



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013

Buku I
Ringkasan Eksekutif
(Buku ke-1 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
KATA PENGANTAR	v
Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester II Tahun 2013	1
Bab 1 Pelaksanaan Pemeriksaan BPK	3
Bab 2 Hasil Pemeriksaan yang Signifikan	5
Bab 3 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013	29
Bab 4 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	55

DAFTAR TABEL

- 2.1. Tren Kerugian PT MNA sejak Tahun 2009 s.d. September 2013
- 3.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2013
- 3.2. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester II Tahun 2013
- 3.3. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.4. Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Entitas
- 3.5. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan
- 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan
- 3.7. Temuan PDTT Semester II Tahun 2013
- 3.8. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat
- 3.9. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah
- 3.10. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN dan KKKS
- 3.11. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD
- 3.12. Kelompok Temuan PDTT pada BLUD
- 3.13. Kelompok Temuan PDTT pada BLU dan Badan lainnya
- 4.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 4.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester II Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009
- 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013
- 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

1. Data Perkembangan YOR Impor Tahun 2012 s.d. Agustus 2013
2. Perkembangan DT Impor Selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013
3. Jumlah Titik Panas Kawasan Konservasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Tahun 2010 s.d 2012
4. Tren Kerugian PT MNA Sejak Tahun 2009 s.d. September 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2013 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS II Tahun 2013 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 662 objek pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan sebanyak 117 objek pemeriksaan, pemeriksaan kinerja sebanyak 158 objek pemeriksaan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) sebanyak 387 objek pemeriksaan. Pada Semester II Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan PDTT sesuai dengan kebijakan pemeriksaan BPK 2012-2015. Kebijakan pemeriksaan tersebut disusun dengan memperhatikan program/kegiatan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Bidang-bidang yang menjadi prioritas pemeriksaan antara lain bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta pengelolaan BUMN dan BUMD. Adapun untuk pemeriksaan atas Laporan keuangan (LK), pemeriksaan atas 117 LK tersebut sebagian besar adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2012 yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada Semester I Tahun 2013.

Secara umum, berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja dan PDTT, BPK memandang bahwa pemerintah pusat/daerah perlu lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan negara/daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah intensifikasi penerimaan negara dari sektor migas melalui peningkatan pengawasan pelaksanaan kontrak-kontrak migas, meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas *cost recovery*, kecermatan menghitung potensi pajak dan memungut pajak daerah, serta optimalisasi penerimaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Disisi pengeluaran, pemerintah pusat/daerah harus mengelola setiap program/kegiatan secara efisien dan efektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menekan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan negara/daerah. Dengan demikian, setiap rupiah penerimaan negara/daerah dapat dibelanjakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, penyediaan fasilitas publik, dan pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IHPS II Tahun 2013 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika buku IHPS adalah sebagai berikut: Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDDT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2013 secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat atau *compact disc (CD)* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini.

Jakarta, 28 Maret 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok Pemeriksaan BPK selama Semester II Tahun 2013

- **Pemeriksaan untuk Mendorong Peningkatan Kinerja dan Kepatuhan**

Pada Semester II Tahun 2013, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 662 objek pemeriksaan dengan prioritas pada pemeriksaan kinerja dan PDTT. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 117 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 158 objek pemeriksaan kinerja, dan 387 objek PDTT.

- **Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Migas**

BPK dalam Semester II Tahun 2013 telah memeriksa *cost recovery* pada delapan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK telah mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas senilai USD81,614.96 ribu ekuivalen Rp994,80 miliar yang berasal dari koreksi *cost recovery* dan koreksi kewajiban perpajakan KKKS.

- **Penyelamatan Uang/Aset.**

Dalam Semester II Tahun 2013 BPK telah mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus senilai Rp13,96 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.452 kasus senilai Rp9,24 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Selama proses pemeriksaan, BPK telah menyelamatkan uang/aset negara yang berasal dari penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp173,55 miliar yang berasal dari tindak lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan.

- **Pemantauan Kerugian Negara.**

Selama periode Tahun 2003 s.d. 2013, BPK telah memantau penyelesaian kerugian negara/daerah atas 24.474 kasus senilai Rp3,12 triliun, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 15.538 kasus senilai Rp603,50 miliar.

- **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.**

Selama periode Tahun 2009 s.d. 2013, BPK telah menyampaikan sebanyak 212.750 rekomendasi senilai Rp81,49 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53,77% atau 114.397 rekomendasi senilai Rp28,07 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, dan di antaranya sebanyak 16.170 rekomendasi senilai Rp3,91 triliun ditindaklanjuti pada periode Semester II Tahun 2013.

Tindak lanjut berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah dan secara kumulatif dari Tahun 2009 s.d. 2013 adalah senilai Rp16,56 triliun yang di antaranya senilai Rp1,39 triliun ditindaklanjuti selama Semester II Tahun 2013.

- **Penegakan Hukum.**

Selama periode Tahun 2003 s.d. 2013, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 432 temuan senilai Rp42,71 triliun, di antaranya sebanyak 48 temuan senilai Rp4,50 triliun disampaikan pada Tahun 2013. Dari 432 temuan tersebut, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 319 temuan atau 73,84% dan di antaranya sebanyak 102 temuan telah diputus pengadilan.

BAB 1

Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

BPK menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19. IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS II Tahun 2013 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 662 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Selain ikhtisar LHP, IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparatus penegak hukum).

Pada Semester II Tahun 2013, BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan kinerja dilakukan terhadap 158 objek pemeriksaan dan PDTT terhadap 387 objek pemeriksaan. Prioritas pemeriksaan BPK disusun sesuai dengan kebijakan pemeriksaan BPK 2012-2015 yang telah diformulasikan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Hasil pemeriksaan signifikan (pemeriksaan kinerja dan PDTT) adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang.
2. Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok.
3. Pengelolaan Audit dan Reviu LK oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
4. Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai serta Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
5. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional
6. Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame (PHRR).
7. Tata Kelola dan Pelayanan BUMD.
8. Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi.
9. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli.
10. Pengelolaan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA).

BPK juga melakukan pemeriksaan atas 117 laporan keuangan yang terdiri atas 108 LKPD dan 9 LK badan lainnya yang belum diperiksa dan/atau belum dilaporkan pada Semester I Tahun 2013. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 7 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 52 LKPD, opini Tidak Wajar (TW) atas 2 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 47 LKPD. Adapun terhadap Laporan Keuangan Badan Lainnya, BPK memberikan opini WTP untuk LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012, opini WDP untuk LK PDAM Kota Padang Tahun 2012, opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012, LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012, dan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010.

Upaya BPK untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga dilakukan antara lain melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian kerugian negara. BPK melaporkan hasil pemantauan TLRHP setelah melakukan penelaahan atas dokumentasi tindak lanjut dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang semakin efektif akan meminimalisasi terjadinya temuan berulang serta meningkatkan kualitas laporan keuangan, kinerja, dan kepatuhan entitas. Adapun pemantauan penyelesaian kerugian negara yang efektif, selain akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara juga akan semakin meningkatkan transparansi dari pengelolaan keuangan negara yaitu semakin tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara. Seluruh hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara tersebut selanjutnya disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui IHPS.

BAB 2

Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan PDDT pada Semester II Tahun 2013. Pemeriksaan tersebut bertujuan antara lain untuk menguji efektivitas program/kegiatan, pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sejumlah permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut signifikan antara lain karena temuan pemeriksaan terjadi di banyak entitas dan hasil pemeriksaan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan signifikan tersebut antara lain sebagai berikut.

Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang

Kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang kurang efektif dalam menjamin pengawasan lalu lintas impor barang

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang yang Dilaksanakan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pelayanan

Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Timur I, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda, Kanwil DJBC Sumatera Utara, KPPBC Belawan, Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT, dan KPPBC Ngurah Rai di Jakarta, Surabaya, Belawan, dan Denpasar TA 2012 sampai dengan Semester I TA 2013. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang kurang efektif dalam menjamin pengawasan lalu lintas impor barang. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut sebagai berikut.

1. Prosedur dan kebijakan kegiatan intelijen, penindakan dan penanganan perkara atas impor barang belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut antara lain terkait ketentuan jangka waktu penyelesaian hasil penindakan dan penanganan barang tanpa pemilik (*lost and found*) yang dikelola oleh maskapai penerbangan belum tersedia, peraturan dan kebijakan mengenai penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan tidak selaras antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, peraturan dan kebijakan belum dijabarkan secara lengkap ke dalam standar operasi dan prosedur (SOP) dan belum dapat diimplementasikan secara optimal, serta mekanisme kegiatan evaluasi atas prosedur dan kebijakan belum memadai.
2. Ketersediaan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) belum sepenuhnya memadai, hasil analisis beban kerja juga belum memperhitungkan seluruh uraian jabatan sehingga tidak menggambarkan kebutuhan pegawai

yang ideal untuk melaksanakan kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC.

3. Ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai.
4. Sistem informasi yang dirancang belum sepenuhnya terintegrasi antarunit terkait dan belum sepenuhnya mendukung kegiatan intelijen, penindakan dan penanganan perkara atas impor barang.
5. Pelaksanaan kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang belum terkoordinasi dan belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku, serta mekanisme pemutakhiran profil importir pada Direktorat P2, pelaporan dan evaluasi hasil kegiatan belum memadai.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dhi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar mengupayakan aturan terkait kewajiban maskapai penerbangan untuk melaporkan status barang *lost and found*, menyelaraskan ketentuan dengan peraturan di atasnya, menjabarkan aturan ke dalam SOP, dan membina jajarannya terkait evaluasi atas prosedur dan kebijakan, menyempurnakan aturan mutasi, memenuhi kekurangan SDM, memenuhi dan memelihara sarana dan prasarana, menyempurnakan desain sistem informasi, dan memerintahkan pejabat terkait untuk meningkatkan koordinasi internal dan pengawasan dalam pemutakhiran database profil importir, pelaksanaan tupoksi, pelaporan dan evaluasi.

Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok

Kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok tidak efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok, yang meliputi kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh otoritas pelabuhan (OP), kegiatan penjaluran kepabeahan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeahan oleh Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai Tanjung Priok, kegiatan kekarantina yang dilaksanakan oleh Balai Karantina, pemberian izin dan rekomendasi terkait larangan pembatasan (Iartas) impor yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L) tidak efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang, sebagaimana terlihat dari data berikut.

1. Persentase jumlah kapal yang waktu tunggu kapalnya (*waiting time/WT*) melebihi standar selama satu jam (terlambat) meningkat dari Tahun 2012 sebesar 18,22% menjadi 22,08% pada Tahun 2013 (s.d Agustus).
2. Rata-rata rasio perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penimbunan dengan ruang penimbunan yang tersedia atau *Yard Occupancy Ratio* (YOR) Impor Pelabuhan Tanjung Priok tidak memenuhi standar yang ditetapkan maksimal sebesar 65% yaitu Tahun 2012 mencapai sebesar 76,77% dan Tahun 2013 (s.d.

Agustus) mencapai sebesar 89,17%. YOR mengalami tren peningkatan, dan terendah pada bulan Agustus 2012 sebesar 61,86% dan tertinggi pada bulan Juli 2013 sebesar 98,55%, sebagaimana disajikan dalam Grafik 1.

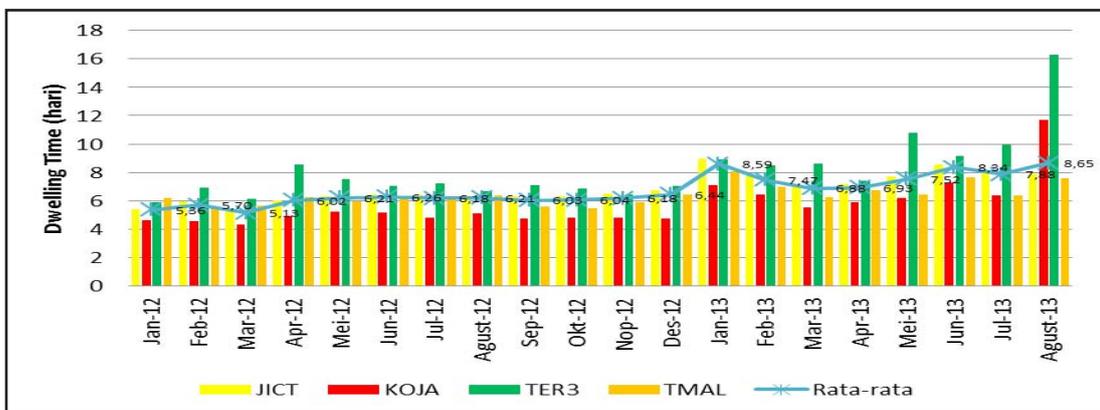
Grafik 1. Data Perkembangan YOR Impor Tahun 2012 s.d. Agustus 2013



Sumber : Diolah dari data PT Pelindo II (Persero)

3. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh peti kemas mulai dari kegiatan bongkar muat sampai keluar dari *gate* terminal/tempat penimbunan sementara (TPS) (*dwelling time/DT*) impor Tahun 2013 (s.d. Agustus) mencapai 7,73 hari atau lebih tinggi 1,75 hari dibandingkan rata-rata Tahun 2012 yaitu 5,98 hari. Semakin tingginya DT pada saat YOR melebihi standar menunjukkan adanya risiko kongesti (kemacetan) di Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan DT Impor selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013 disajikan dalam Grafik 2.

Grafik 2. Perkembangan DT Impor Selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013



Sumber: Diolah dari data PT JICT, TPK KOJA, Terminal 3, PT MAL dan database PIB DJBC

Ketidakefektifan kegiatan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang terutama disebabkan oleh permasalahan-permasalahan pada empat tahap pelayanan pelabuhan meliputi WT, *pre customs clearance*, *customs clearance*, dan *post custom clearance*. Permasalahan pada tahap WT adalah kegiatan jasa layanan kapal belum menjamin pencapaian WT sesuai dengan standar. Permasalahan jasa layanan kapal meliputi sistem operasi pelabuhan

belum sepenuhnya memberikan pengendalian atas pelayanan pandu dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, serta ketersediaan alat pada Pelabuhan Tanjung Priok guna memenuhi kebutuhan jasa kepelabuhanan belum memadai.

Permasalahan pada tahap *pre customs clearance* adalah proses perizinan dan/atau rekomendasi impor barang pada K/L terkait belum mendukung kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga rata-rata waktu *pre customs clearance* Tahun 2012 s.d. Agustus 2013 mencapai 41,48% dari total DT, berdampak terhadap tingginya DT.

Permasalahan pada tahap *customs clearance* adalah ketidakjelasan dan ketidaktegasan pengaturan pemutakhiran profil importir/komoditi dan waktu pemutakhirannya serta kelemahan manajemen risiko dan sistem informasi penjaluran dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang pada pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Permasalahan pemutakhiran profil importir untuk penjaluran tersebut di atas merupakan kelemahan pengendalian signifikan yang dapat menimbulkan risiko penyimpangan pada tahap pengawasan dan pelayanan kepabeanan antara lain penyalahgunaan wewenang pada tahap penetapan jalur, *analyzing point*, pemeriksaan barang dan dokumen serta pengeluaran barang. Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan adanya barang masuk wilayah Indonesia tanpa pengawasan dan nilai bea masuk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kondisi tersebut berdampak terhadap tingginya persentase jalur merah.

Permasalahan pada tahap *post custom clearance* adalah proses penanganan pengeluaran barang belum mendukung kelancaran arus barang sehingga rata-rata waktu *post customs clearance* periode Januari 2012 s.d. Agustus 2013 yang mencapai 35,73% dari rata-rata DT, berdampak terhadap tingginya DT.

Permasalahan yang mempengaruhi seluruh tahapan proses bisnis pelayanan pelabuhan tanjung priok meliputi 1) pengaturan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan kewenangan OP belum didukung dengan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan perusahaan secara terpadu dan terkoordinasi, dan peraturan pemberian konsesi; 2) Protokol Manajemen Krisis untuk menjamin kelancaran arus barang yang terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ada; 3) TPS belum mempunyai Standar Operasi dan Prosedur Pindah Lokasi Penumpukan yang selaras dengan ketentuan kepabeanan dan proses belum didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi; 4) ketersediaan infrastruktur dan parkir belum memadai yang penanganannya perlu dikoordinasikan antar instansi terkait dan pola pergerakan truk belum ditata secara baik sehingga terjadi kepadatan lalu lintas dan terganggunya kelancaran arus barang; 5) sistem informasi pelabuhan yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam mendukung kelancaran arus kapal dan barang.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengkoordinasikan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala BPOM agar meningkatkan efektivitas fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok,

menerapkan sistem *online* pemberian ijin dan rekomendasi yang terintegrasi serta evaluasi dan penyempurnaan ketentuan lartas impor barang, mengkoordinasikan pengaturan penanganan pengeluaran barang, mengkoordinasikan ketersediaan infrastruktur dalam kerangka sistem logistik nasional; dan mengkoordinasikan kebijakan integrasi sistem informasi kepelabuhanan dan sistem informasi perdagangan.

Pengelolaan Audit dan Reviu LK oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Tata kelola sistem pengawasan belum mendukung pengelolaan audit dan reviu LK oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)

Tata kelola sistem pengawasan yang meliputi standar, kode etik dan juklak/juknis merupakan prasyarat dasar berfungsinya lembaga APIP. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tata kelola yang ada belum mendukung pengelolaan audit dan

reviu LK oleh APIP. Pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan.

Kelemahan dalam tata kelola APIP meliputi kelemahan dalam independensi, pedoman operasi, kode etik dan SDM. Independensi APIP dapat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi pemerintahan. Untuk membantu terciptanya independensi secara organisasi, APIP seharusnya bertanggungjawab kepada pejabat tertinggi dalam lembaga/entitasnya tanpa ada tekanan atau pengaruh politik apapun. Struktur APIP dalam organisasi entitas masih beragam, yaitu kedudukan APIP ada yang merupakan unit eselon I, II dan III. Selain itu, struktur APIP dalam organisasi entitas belum dilengkapi uraian tugas dan fungsi APIP. Pada APIP di pemerintah daerah, kedudukan jabatan fungsional auditor (JF-A) dan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah (JF-P2UD) tidak didukung uraian jabatan yang jelas. Selain itu, pedoman operasional dalam bentuk juklak dan juknis sebagai penjabaran dari standar audit atau pedoman pengawasan juga belum dikembangkan APIP secara optimal untuk mendukung pelaksanaan audit di lapangan. Dalam pelaksanaan kode etik, sebagian besar APIP belum mengimplementasikan kode etik di lingkungan kerjanya. Pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia APIP juga belum memadai baik jumlah maupun kompetensi. Jumlah JFA yang ada kurang dari kebutuhannya.

Kegiatan utama pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP adalah audit dan reviu LK. Perencanaan audit dan reviu LK belum memperhatikan pertimbangan risiko dalam pemilihan objek pengawasan dan tidak mempertimbangkan pemeriksaan terdahulu termasuk tindak lanjut rekomendasi. Selain itu, perolehan dan pemilihan bukti audit dan reviu LK berupa dokumentasi bukti audit tidak lengkap atau tidak ada. Lebih lanjut, laporan hasil audit (LHA) dan laporan hasil reviu (LHR) LK disusun tidak lengkap dan sistematis.

Oleh karena itu, untuk mendorong efektivitas pengelolaan audit dan reviu LK oleh APIP, BPK merekomendasikan kepada

- Pemerintah agar meninjau ulang pengaturan sistem pengawasan intern pemerintah dengan memastikan kedudukan dan peranan tiap-tiap APIP di instansi pusat dan daerah;
- Menteri PAN-RB sebagai pembuat kebijakan agar menyusun kerangka standar dan pedoman pengawasan intern pemerintah dengan memperhatikan kerangka standar pemeriksaan keuangan negara dan profesi pemeriksaan serta praktik terbaik.
- BPKP sebagai Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Kemendagri sebagai pembina Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (JF-P2UPD) menyusun pedoman dan rencana pengembangan profesi yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan.
- APIP agar
 - o mengembangkan hubungan kerja yang konstruktif dan efektif dengan pihak internal maupun eksternal untuk mendorong percepatan hasil pengawasan APIP dan tindak lanjut rekomendasi BPK guna peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
 - o meningkatkan upaya penguatan perangkat lunak audit dan reviu LK sesuai dengan jenis, sifat, dan bentuk audit dan reviu LK untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta tindak lanjutnya.

Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai serta Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Upaya pemerintah belum optimal dalam mengendalikan pencemaran daerah aliran sungai serta mencegah kebakaran hutan dan lahan

Pemerintah masih belum optimal melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terkait upaya pengendalian pencemaran daerah aliran sungai serta pencegahan kebakaran hutan

dan lahan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran sungai antara lain melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar, melakukan pengendalian pencemaran air melalui instrumen perizinan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), dan membangun pengelolaan air limbah domestik seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan MCK. Adapun upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan antara lain melalui kegiatan penurunan titik panas (*hotspot*).

Pencemaran Daerah Aliran Sungai

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai (DAS) Brantas menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Brantas belum efektif walaupun target penurunan beban pencemaran di DAS Brantas sebesar 15% telah tercapai. Masih

terdapat beberapa kelemahan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya air pada DAS Brantas oleh pemerintah pusat/daerah antara lain sebagai berikut.

- a. Daya tampung beban pencemar belum ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- b. Upaya pengendalian pencemaran limbah cair industri dan usaha/kegiatan melalui instrumen pengawas di Segmen Hulu, Tengah, dan Hilir belum memadai. Permasalahan tersebut di antaranya terdapat industri & usaha/kegiatan yang membuang limbah cair ke DAS Brantas melebihi baku mutu.
- c. Program percontohan sanitasi dari pemerintah pusat tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjadikan pembangunan fasilitas sanitasi untuk air limbah domestik sebagai program prioritas.

Hal tersebut terjadi antara lain karena koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota lemah. Selain itu, melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai dengan wewenang dalam upaya pengelolaan sumber daya air juga belum memadai.

Kelemahan tersebut mengakibatkan antara lain penentuan mutu air sasaran belum berdasarkan daya tampung beban pencemar DAS Brantas, tingginya pelanggaran oleh pelaku usaha, dan penurunan kualitas air di Sungai Brantas. Lebih lanjut penurunan kualitas air tersebut dapat meningkatkan biaya pemanfaatan air permukaan bagi kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di DAS Brantas.

Terhadap temuan pemeriksaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk lebih memperhatikan amanat PP No. 82 Tahun 2001 Pasal 20 untuk segera menetapkan daya tampung beban pencemar di DAS Brantas, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menegakkan hukum. Selain itu, Menteri Lingkungan Hidup agar menyusun program terpadu pengendalian limbah domestik di DAS Brantas bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut, BPK juga telah merekomendasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk membuat program terpadu dalam melaksanakan proyek sanitasi DAS Brantas di antaranya dengan mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum memiliki strategi sanitasi perkotaan (SSK) untuk segera menyusun SSK, sehingga program sanitasi dilakukan dengan pendekatan yang lebih berskala besar dan komprehensif. Untuk bantuan pendanaan perlu dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong adanya keseriusan pemerintah daerah untuk mewujudkan sanitasi kota yang layak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

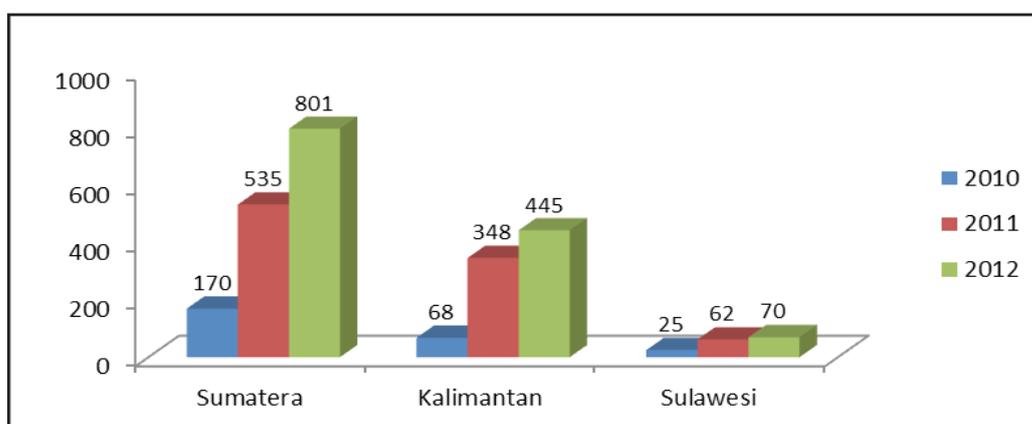
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Hasil pemeriksaan kinerja atas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 di Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan pada empat pemerintah kabupaten/kota menunjukkan bahwa kegiatan belum efektif, dan 1 pemerintah kabupaten tidak efektif. Pemerintah daerah belum efektif menurunkan titik panas karena masih menghadapi kelemahan terkait aspek perencanaan dan kelembagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pemerintah daerah masih kurang melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan secara dini.

Kelemahan aspek perencanaan antara lain pemerintah daerah belum memiliki data dan informasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang memadai. Data cuaca sebagai input peringatan dini (*early warning system*) belum dimanfaatkan secara memadai. Kelemahan kelembagaan antara lain belum adanya peraturan bupati tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Adapun kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan antara lain karena kurang optimalnya pemerintah daerah melakukan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2010 s.d. Semester I 2013 di Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya peningkatan jumlah titik panas di kawasan konservasi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi Tahun 2010 s.d 2012 yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Hal tersebut sebagaimana disajikan dalam Grafik 3 berikut.

Grafik 3. Jumlah Titik Panas Kawasan Konservasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Tahun 2010 s.d 2012



Upaya penurunan titik panas belum efektif antara lain karena Kementerian Kehutanan kurang cermat dalam mengaitkan indikator penurunan jumlah titik panas di luar kawasan konservasi dan kurang optimal dalam menurunkan jumlah titik panas.

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran hutan dan lahan, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala SKPD terkait untuk melakukan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pencegahan kebakaran hutan secara memadai, memberikan pelatihan kepada staf agar memiliki keahlian dalam mengakses dan mengolah data serta menganalisis dan mengintegrasikan data. Selain itu, BPK telah merekomendasikan kepada bupati antara lain agar membuat/menetapkan peraturan

tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan juklak/juknis pelaksanaannya, serta merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara memadai

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penurunan titik panas, BPK pada pemeriksaan atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2010 s.d. Semester I 2013 telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar mengkaji ulang terhadap indikator titik panas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta penguatan kelembagaan Manggala Agni dengan tugas pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan, serta penyelamatan (*rescue*) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana.

Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional

Penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional belum sepenuhnya efektif

Infrastruktur jalan dan jembatan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, antara lain untuk mendukung distribusi barang dan jasa serta sarana transportasi masyarakat. RPJMN 2010-2014 menetapkan bidang infrastruktur

sebagai salah satu prioritas pembangunan. BPK telah melakukan pemeriksaan atas infrastruktur jalan dan jembatan nasional pada Semester II Tahun 2013. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan BPK terhadap infrastruktur jalan dan jembatan nasional yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain adalah pelaksanaan kontrak berbasis kinerja (*performance based contract/PBC*) senilai Rp106,96 miliar pada Paket Pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Provinsi Jawa Barat. Kontrak tersebut mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya adalah penerapan PBC belum berdasarkan kebijakan tertulis. Kontrak PBC merupakan kontrak lumpsum tetapi mengandung klausul tentang amandemen kontrak yang tidak diperbolehkan diatur dalam kontrak lumpsum. Selain itu, kontraktor (KSO) tidak mampu melaksanakan PBC yang ditunjukkan antara lain terdapat perubahan desain yang signifikan, kualitas pekerjaan tidak baik, dan pekerjaan rekonstruksi. Akibatnya, pengeluaran keuangan negara senilai Rp106,96 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas jalan tersebut di masa mendatang.

Hal tersebut disebabkan antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga dalam melaksanakan kontrak berbasis kinerja tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta belum menetapkan prosedur/standar untuk menguji desain atau mengatur masa pertanggungjawaban dan konsekuensi penyedia jasa terhadap hasil pekerjaannya secara jelas.

Selain itu, pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada Ruas Jalan Nasional Jalur Pantai Utara (Pantura) di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur kurang terkoordinasi dan tidak efektif. Hal tersebut

antara lain mengakibatkan kerusakan jalan sehingga umur layanan lebih pendek dari seharusnya. Penyebabnya antara lain Dirjen Bina Marga kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengendalikan terganggunya fungsi jalan akibat muatan berlebih.

Di samping hal di atas, penyelenggaraan jalan strategis nasional rencana (JSNR) belum didukung dengan pedoman baku, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum ada ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan JSNR dan pencatatan aset hasil penanganan JSNR yang bersumber dari APBN belum didukung dengan kebijakan akuntansi.

Akibatnya antara lain, penanganan JSNR berpotensi terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berpotensi tidak tepat sasaran karena tidak adanya data yang memadai atas kondisi jalan di ruas JSNR. Selain itu, pencatatan aset tetap atas jalan yang dicatat oleh satker-satker Ditjen Bina Marga tidak sesuai kondisi sebenarnya. Hal tersebut terjadi karena Keputusan Menteri PU terkait dengan JSNR belum merinci mengenai batasan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jalan yang termasuk di dalam JSNR. Selain itu, Menteri PU belum menetapkan prosedur/standar dan kriteria terkait penanganan JSNR yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PU agar

- meninjau ulang kebijakan PBC yang belum mempunyai dasar hukum dan belum diatur dalam peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk selanjutnya tidak merencanakan dan melaksanakan kembali kontrak semacam itu sampai diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang melandasi pelaksanaannya;
- melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan memprakarsai optimalisasi forum lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan pimpinan kementerian/instansi-instansi terkait untuk bersepakat dan berkomitmen dalam pengelolaan jalan dan jembatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengenakan sanksi secara tegas terhadap setiap pelanggaran; dan
- memerintahkan Dirjen Bina Marga untuk menetapkan pedoman/prosedur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pertanggungjawaban, dan pencatatan atas penanganan JSNR secara komprehensif.

Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame (PHRR)

Pada Semester II Tahun 2013 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan PHRR pada 47 pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) melalui sistem *self assesment* meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), penerimaan pajak, pemeriksaan pajak, serta penetapan dan penagihan pajak. Sementara, pengelolaan Pajak Reklame (PR) melalui sistem *official assesment* meliputi serangkaian kegiatan dimulai dari pendaftaran objek PR, penetapan pajak, penerimaan pajak, penertiban reklame tidak berizin, dan penagihan pajak. Seluruh kegiatan pengelolaan pajak tersebut dilakukan dalam suatu kerangka tata kelola dan kelembagaan, terdiri dari peraturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, yang pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi secara periodik dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PHRR menunjukkan bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PHRR. Upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi/kabupaten/kota antara lain menetapkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah sebagai payung hukum dalam pengelolaan PHRR dan meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan PHRR.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan PHRR belum dilaksanakan dengan baik. Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PHRR, diantaranya sebagai berikut.

1. Aspek Kelembagaan, Tata Laksana, dan Sumber Daya

Kelemahan pada aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya antara lain sebagai berikut.

- Pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung oleh perangkat aturan dan pedoman yang andal dan lengkap, antara lain berupa petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta standar operasional prosedur (SOP) tentang pengelolaan PHRR.

Hal ini mengakibatkan pengelolaan PHRR belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena kepala satker pengelola pajak belum merancang juklak, juknis, dan SOP tentang pengelolaan PHRR secara andal dan lengkap.

- Pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup. Jumlah pegawai dinilai ideal jika sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja. Hasil analisis beban kerja yang dilakukan oleh pemda menunjukkan bahwa terdapat kekurangan jumlah SDM pengelola pajak. Sedangkan dalam hal kompetensi SDM pengelola PHRR, seluruh pemda yang diperiksa mengungkapkan bahwa kompetensi SDM belum memadai. Pengelola PHRR dirasakan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang karakteristik pajak yang menjadi bidang tugasnya. Selain itu, pemda juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai keahlian dalam hal perpajakan secara memadai, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi pemahaman bidang perpajakan.

Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan PHRR termasuk penyelesaian masalah hukum terkait perpajakan tidak dapat segera dilakukan penyidikan.

Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun analisis beban kerja dengan baik, belum melaksanakan kegiatan program diklat pegawai secara berkala, belum melaksanakan kebijakan pola rotasi dan mutasi pegawai dengan pola yang baku, serta belum melaksanakan pemenuhan kebutuhan PPNS.

- Sistem informasi pengelolaan pajak daerah, khususnya PHRR belum sepenuhnya memadai, yaitu terdapat pemda yang belum memiliki sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan PHRR.

Hal ini mengakibatkan sistem informasi pengelolaan pajak daerah belum dapat menghasilkan seluruh informasi yang diperlukan dalam pengelolaan PHRR. Penyebabnya karena sistem informasi pengelolaan PHRR tersebut belum terintegrasi dengan sistem perizinan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah lainnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar meningkatkan aspek kelembagaan, tata laksana dan sumber daya antara lain dengan

- merancang juklak, juknis, dan SOP tentang pengelolaan PHRR secara jelas dan lengkap;
- menyusun analisis beban kerja disesuaikan dengan kebutuhan, meningkatkan kegiatan program diklat pegawai secara berkala dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, menerapkan kebijakan rotasi dan mutasi pegawai sesuai dengan pola yang baku secara berkala, serta memenuhi kebutuhan PPNS guna memperlancar penyidikan perpajakan; dan
- memperbaiki sistem informasi pajak daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya yang terkait dan dapat menunjang pengelolaan PHRR.

2. Aspek Perhitungan Potensi dan Rencana Optimalisasi Penerimaan Pajak

Kelemahan aspek perhitungan potensi pajak dan optimalisasi penerimaan antara lain perhitungan potensi PHRR yang belum menggunakan metodologi dan data yang andal serta optimalisasi penerimaan PHRR belum dilakukan.

- Perhitungan potensi PHRR belum sepenuhnya didukung database yang lengkap dan mutakhir, serta belum menggunakan metodologi dan data yang andal. Pada umumnya, pemda menghitung target penerimaan PHRR dengan pendekatan *incremental*, yaitu dengan menambahkan persentase kenaikan yang diharapkan terhadap target atau realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Penetapan target penerimaan PHRR tersebut tidak didasarkan pada potensi pajak yang riil. Dengan demikian, penetapan target PHRR dengan pendekatan tersebut tidak sistematis dan tidak akuntabel. Hal ini mengakibatkan target penerimaan PHRR tidak menggambarkan potensi penerimaan PHRR yang sebenarnya. Penyebabnya karena Kepala Satker

Pengelola Pajak belum mendokumentasikan data perhitungan potensi PHRR yang lengkap dan mutakhir, serta belum merancang metode perhitungan target penerimaan PHRR yang sistematis dan akuntabel.

- Optimalisasi penerimaan PHRR belum dilakukan. Permasalahan tersebut di antaranya kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi pajak belum disusun, kegiatan sosialisasi peraturan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan, serta koordinasi antarinstansi pengelola PHRR dengan instansi pengelola perizinan dan instansi terkait lainnya dalam rangka pendataan WP belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PHRR belum optimal dan belum efektif. Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PHRR secara efektif dan menyeluruh.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota antara lain agar mendokumentasikan data potensi PHRR yang lengkap dan memutakhirkan database WP sebagai dasar perhitungan potensi PHRR. Selain itu, menyusun kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PHRR secara efektif dan menyeluruh, serta melaksanakan sosialisasi peraturan pajak dan koordinasi dengan instansi terkait secara optimal.

3. Aspek Kegiatan Pemungutan PHRR

Kegiatan pemungutan PHRR belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, di antaranya sebagai berikut.

- Kegiatan Pemungutan PHR

Kelemahan pada aspek pemungutan PHR, terutama proses pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang tidak mudah dan sederhana, serta penerimaan PHR belum seluruhnya dicatat secara lengkap dan benar. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan atas PHR belum dilakukan secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi WP hotel dan restoran tidak menyampaikan data/dokumen perpajakan secara lengkap dan benar, serta pembayaran PHR di bawah potensi sewajarnya. Selain itu, pemda secara umum tidak mengenakan tindakan/sanksi atas permasalahan tersebut.

Hal ini mengakibatkan pelayanan kepada WP belum optimal, kekurangan penetapan PHR, dan hilangnya potensi kekurangan penerimaan PHR.

Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun SOP terkait pembayaran dan pelaporan, serta penerimaan dan pencatatan penerimaan PHR, belum merancang mekanisme verifikasi kesesuaian SPTPD dengan dokumen pendukungnya, belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan PHR, belum menganggarkan kegiatan pemeriksaan PHR, termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan SDM untuk pemeriksaan PHR.

- Kegiatan Pemungutan Pajak Reklame (PR)

Kelemahan utama pada aspek pemungutan PR adalah proses perizinan sampai dengan terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) reklame yang memerlukan waktu yang lama, karena dalam prosesnya memerlukan keterlibatan instansi lain. Kegiatan penetapan PR juga belum memadai, karena masih terdapat ketidakakuratan dalam proses penetapan nilai PR. Dalam proses penertiban reklame, terdapat penyelenggaraan reklame/alat peraga yang tidak berizin, telah habis masa izinnya, atau penempatannya menyalahi ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan PR yang tidak dapat segera diterima oleh daerah, menurunnya kepatuhan WP untuk membongkar reklame yang tidak memiliki izin, dan habis masa berlakunya izin.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Kepala Satker Pengelola Pajak untuk penyeteroran PR, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penertiban reklame, serta Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) untuk perizinan reklame dalam kegiatan penertiban reklame, kegiatan survei lapangan dalam rangka penertiban reklame tidak berizin belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan PR, khususnya terkait penetapan dan penagihan PR.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada gubernur/bupati/walikota untuk memerintahkan kepala satker pengelola pajak agar

- menyusun SOP terkait pembayaran dan pelaporan, serta penerimaan dan pencatatan penerimaan PHRR, merancang mekanisme verifikasi kesesuaian SPTPD dengan dokumen pendukungnya, serta merancang mekanisme perizinan PR yang lebih sederhana;
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan PHRR;
- meningkatkan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan penertiban reklame, serta meningkatkan kegiatan survei lapangan dalam rangka penertiban reklame tidak berizin; dan
- melaksanakan pemeriksaan PHR atas WP hotel dan restoran yang terindikasi tidak membayar dan melaporkan PHR yang seharusnya.

4. Aspek Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PHRR

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan PHRR belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Permasalahan tersebut, antara lain pengukuran kinerja masih terbatas pada pencapaian realisasi penerimaan pajak dan penyerapan anggaran, belum mencakup seluruh tugas dan fungsi tiap-tiap unit kerja, kegiatan monev belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi, pelaporan hasil monev belum dibuat dan belum ditindaklanjuti, serta inspektorat belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin. Hal tersebut mengakibatkan indentifikasi permasalahan dan tindakan perbaikan tidak dapat

dilaksanakan sehingga dapat mengganggu pencapaian target penerimaan PHRR. Hal tersebut terjadi karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum melaksanakan monev sesuai tupoksinya, belum membangun perancangan dan penerapan sistem monev yang komprehensif, serta belum membuat dan menindaklanjuti hasil monev.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, di antaranya untuk memerintahkan Kepala Satker Pengelola antara lain agar membangun dan menerapkan sistem monev yang komprehensif, membuat dan menindaklanjuti pelaksanaan monev sehingga hasilnya dapat digunakan untuk langkah-langkah perbaikan atas pengelolaan PHRR.

Tata Kelola dan Pelayanan BUMD

Pada Semester II Tahun 2013 BPK telah melakukan PDDT atas 92 BUMD yang meliputi 28 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 17 Bank Pembangunan Daerah/ Bank Perkreditan Rakyat (BPD/BPR), 10 PD Pasar, 9 BUMD Pertambangan, dan 28 BUMD Aneka Usaha Lainnya. Hasil pemeriksaan BUMD tersebut menunjukkan bahwa tata kelola BUMD belum memadai sehingga BUMD belum dapat melayani dan memenuhi tanggung jawab kepada publik secara optimal serta melakukan efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan. Hal tersebut terjadi antara lain karena pengendalian intern yang kurang efektif dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam operasional BUMD. Selain itu, tata kelola BUMD juga belum memperhatikan efisiensi biaya dan optimalisasi pendapatan serta tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tata kelola dan pelayanan per jenis BUMD antara lain sebagai berikut.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

- Cakupan pelayanan 16 PDAM dan PT Air Manado belum mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) (68,87%) yaitu berkisar antara 8,21% s.d. 67,85% sehingga sebanyak 4.904.063 jiwa penduduk di 17 kabupaten/kota belum memperoleh layanan air bersih dari PDAM. Selain itu kualitas air produksi pada 22 PDAM belum memenuhi standar kesehatan, yang terbukti dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel air mengandung bakteri *coliform* dan *colitinja* sehingga tujuan pendirian PDAM sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan dan mengusahakan penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan belum tercapai. Hal tersebut disebabkan antara lain Direksi PDAM kurang optimal dalam mencari sumber air baru, belum mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan jaringan pipa baru serta kurang optimal dalam melakukan langkah-langkah meningkatkan kualitas air PDAM.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PDAM antara lain agar mengalokasikan dana untuk membangun jaringan pipa baru serta berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air sesuai standar kesehatan.

- Rata-rata tingkat kehilangan air Tahun 2011-2013 pada 22 PDAM dan PT Air Manado melebihi batas toleransi berkisar antara 21,09% s.d. 72,27% sehingga perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan. Selain itu, pengelolaan tagihan penjualan air belum optimal yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan operasional PDAM dan pelayanan pelanggan menjadi terganggu. Hal tersebut antara lain disebabkan Direksi PDAM belum mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab utama tingkat kehilangan air, belum melakukan langkah-langkah dalam menurunkan tingkat kehilangan air, serta pelaksana kegiatan tidak melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggan yang menunggak walaupun airnya mengalir.
- Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PDAM antara lain agar mengidentifikasi penyebab kehilangan air, melakukan langkah optimal untuk mengatasi kehilangan air, serta memerintahkan pelaksana kegiatan untuk melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak, mengambil langkah-langkah penyelesaian piutang, dan melakukan usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian sanksi pemutusan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- Sepuluh BPR milik pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK), antara lain dalam rencana kerja tahunan porsi kredit produktif kepada UMK lebih kecil dari kredit konsumtif, dan realisasi kredit produktif kepada UMK tidak mencapai target. Hal tersebut antara lain disebabkan direksi dalam mengambil kebijakan dan mengelola BPR kurang memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BPR untuk mendorong usaha mikro dan kecil, penyaluran kredit masih fokus pada sektor konsumtif, dan pemerintah daerah selaku pemilik modal belum melaksanakan pembinaan yang dapat mendorong perekonomian UMK.
- Proses hapus buku atas kredit macet tidak sesuai prosedur. BPR tidak dapat melakukan upaya penyelamatan/penyelesaian kredit antara lain dengan pencairan dan/atau pengambilalihan jaminan yang dilakukan sebelum hapus buku karena kredit tersebut berindikasi fiktif (kecurangan), sehingga BPR berisiko menanggung kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan. Hal tersebut antara lain disebabkan penyaluran kredit tidak berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi antara lain agar dalam mengambil kebijakan dan mengelola BPR memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BPR dengan lebih memprioritaskan alokasi kredit kepada UMK, serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya. Selain itu, Direksi dan dewan pengawas BPR mengkaji kembali dan memastikan optimalisasi penyelamatan kredit sebelum mengusulkan penghapusbukuan dengan menyusun rencana aksi.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar

- Pengelolaan pasar tradisional oleh PD Pasar belum didukung regulasi pemerintah daerah yang selaras dengan regulasi pemerintah pusat. Hal tersebut disebabkan antara lain pemerintah daerah belum melakukan penyesuaian dan/atau penyusunan peraturan pengelolaan pasar berdasarkan peraturan pengelolaan pasar yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi antara lain agar memberikan usulan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan/atau penyusunan peraturan pengelolaan pasar berdasarkan peraturan pengelolaan pasar yang berlaku.

BUMD Pertambangan

- Kegiatan pertambangan di kawasan hutan oleh BUMD Pertambangan belum dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) serta kewajiban reklamasi dan pasca tambang belum dikelola dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan antara lain terdapat kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa dilengkapi IPPKH, terdapat BUMD yang belum sepenuhnya menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang, belum memberikan jaminan reklamasi dan/atau pasca tambang sesuai dengan ketentuan, serta terdapat BUMD yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban reklamasi pada bekas areal tambang. Hal tersebut disebabkan antara lain Direksi BUMD lalai meminta jaminan reklamasi berdasarkan rencana reklamasi, belum optimal dalam mengurus perizinan pinjam pakai kawasan hutan dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi antara lain agar melengkapi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan rencana reklamasi dan pasca tambang, mengidentifikasi nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah ditempatkan untuk masing-masing IUP, serta menghitung dan menutup kekurangan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut berdasarkan rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disahkan instansi terkait.

Selain itu, Direksi berkoordinasi dengan instansi terkait untuk secara bertahap melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang atas lahan bekas tambang yang tidak lagi memproduksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta agar menyelesaikan status perizinan atas wilayah IUP yang berada di kawasan hutan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BUMD Aneka Usaha Lainnya

- Terdapat pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada BUMD Aneka Usaha Lainnya. Kasus-kasus tersebut antara lain pembayaran upah tidak tetap direksi pada anak perusahaan BUMD yang seharusnya tidak diberikan karena perusahaan mengalami kerugian dan dana pembentukan laba ditahan dibelanjakan tidak sesuai tujuan pembentukan. Hal tersebut disebabkan antara lain direksi belum memperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar tunjangan direksi serta dewan komisaris/badan pengawas belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal atas kebijakan yang dikeluarkan

direksi.

BPK telah merekomendasikan kepada direksi agar lebih memperhatikan peraturan dalam mengelola BUMD dan dewan komisaris/badan pengawas lebih ketat melakukan pengawasan dan pengendalian atas kebijakan direksi.

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) Minyak dan Gas Bumi

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas tidak mematuhi ketentuan *cost recovery* dan perpajakan mengakibatkan penerimaan negara berkurang USD81,614.96 ribu ekuivalen Rp994.804,75 juta

Hasil pemeriksaan terhadap delapan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan *cost recovery* dan perpajakan. Hal tersebut telah mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari sektor migas senilai USD81,614.96 ribu ekuivalen

Rp994.804,75 juta yang terdiri atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan *cost recovery* USD68,556.62 ribu dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan USD13,058.34 ribu. Selain ketidakpatuhan kontraktor, kasus pembebanan *cost recovery* dan kekurangan penerimaan negara dari perpajakan sektor migas tidak lepas dari belum optimalnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan *cost recovery* dan perpajakan.

Ketidakpatuhan delapan KKKS terhadap ketentuan *cost recovery* yaitu dengan membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam *cost recovery*. Pembebanan biaya-biaya tersebut akan mengurangi nilai bagi hasil produksi minyak dan/atau gas bumi. Pengurangan nilai bagi hasil tersebut berdampak pada pengurangan penerimaan negara.

Biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam *cost recovery* antara lain biaya penetapan harga kontrak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*owner estimate* (OE), pekerjaan melebihi persetujuan *authorization for expenditure* (AFE) diatas 10%, dan pembebanan biaya *letter of credit* kedalam *cost of sales*. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa biaya yang memiliki nilai pembebanan cukup besar dalam perhitungan *cost recovery* adalah penetapan harga kontrak *Jack Up Drilling Rig* melebihi HPS/OE senilai USD20,595.27 ribu, pembebanan biaya *Letter of Credit* senilai USD7,033.72 ribu ke dalam *cost of sales* Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan, dan realisasi pembayaran bonus/insentif kepada pekerja senilai USD3,083.37 ribu tidak sesuai ketentuan.

Adapun ketidakpatuhan kontraktor yang terkait dengan perpajakan antara lain adalah pemerintah belum memperoleh bagian/kehilangan pendapatan dari bagi hasil pengelolaan kegiatan usaha migas minimal senilai USD11,896.93 ribu atas kewajiban pembayaran Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Bunga Dividen dan Royalti (PBDR) bagian kontraktor Tahun 2011 dan 2012 masing-masing senilai USD4,943.09

ribu dan USD6,953.84 ribu. Selain itu, adanya denda keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai yang belum disetor oleh kontraktor ke kas negara senilai USD279.89 ribu dan pembayaran pajak penghasilan pemegang *participating interest* (PI) tidak sesuai tarif *production sharing contract* (PSC) senilai USD881.52 ribu.

Atas seluruh temuan ketidakpatuhan perhitungan *cost recovery* tersebut, BPK telah membantu menyelamatkan penerimaan negara dari sektor migas dengan mengoreksi perhitungan pembebanan *cost recovery*. Adapun terkait perhitungan perpajakan, BPK telah merekomendasikan kepada entitas terkait agar memberitahukan kepada KPP Migas supaya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk penyetoran denda keterlambatan pajak, membayar selisih perhitungan pajak penghasilan ke kas negara, merekomendasikan Pemerintah dhi. SKK MIGAS agar melakukan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap pemegang PI yang menggunakan *tax treaty*, membayar kewajiban PPs dan PBDR.

Pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli

Peraturan Menteri BUMN tidak konsisten sehingga perencanaan dan pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli senilai Rp828,97 miliar tidak optimal

Dana Program Bina Lingkungan (BL) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (PKBL) bersumber

dari penyisihan laba BUMN setelah pajak maksimal sebesar 2%. Sebesar 70% dari jumlah dana Program BL disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina yang penggunaannya ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN yang bersangkutan dan sebesar 30% diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli yang pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri BUMN.

Saldo dana BL Peduli per 31 Desember 2012 senilai Rp828,97 miliar dengan rincian kegiatan Beasiswa Pendidikan dan Pelatihan, Peduli Bencana Wasior, Penghijauan Daerah Aliran Sungai Tahun 2010 dan 2011, Penghijauan Wilayah NTT, Peduli masyarakat korban bencana alam, Pemberdayaan Masyarakat Tangse – Pidie, Sail Morotai, BL BUMN Peduli 8 sektor, Peduli Tsunami di Mentawai, Ketahanan Pangan (Cetak sawah), Rusunawa dan Pengadaan Daging Sapi.

Program BL BUMN Peduli dihapus dengan adanya peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. Namun demikian, saldo dana BL BUMN Peduli senilai Rp828,97 miliar sebagian besar dananya tetap digunakan/dilanjutkan kegiatannya di tahun 2013 tanpa dasar aturan yang jelas.

Untuk mengakomodasi kegiatan yang belum diselesaikan, Menteri BUMN menetapkan PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 sebagai payung kegiatan tahun 2012 yang belum selesai dapat dilaksanakan s.d Juni 2013. Selanjutnya karena beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan Juni 2013, maka Menteri BUMN menetapkan PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang memberlakukan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan BL BUMN Peduli sampai dengan Desember 2013.

Sehubungan masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan sampai bulan Desember 2013, maka pada tanggal 10 September 2013 Menteri BUMN membuat perubahan keempat PER-08/MBU/2013 dengan ketentuan kegiatan tahun buku 2012 dapat dilaksanakan sepanjang anggaran yang sudah direncanakan masih tersedia.

Beberapa permasalahan pada Program BL BUMN Peduli antara lain: pada program kegiatan Cetak Sawah senilai Rp380,73 miliar BUMN pelaksana tidak membuat alokasi waktu khusus yang dipergunakan untuk kegiatan persiapan yang meliputi perizinan dan sosialisasi untuk perolehan lahan secara efektif, tidak memiliki informasi potensi lahan yang akan dibangun secara akurat dan pembuatan perjanjian kerja sama konsultasi perencanaan dilakukan bersamaan dengan kontrak konstruksi. Pada pembangunan Rumah susun senilai Rp151,00 miliar tidak terdapat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pada perjanjian kerjasama konstruksi antara PT Utama Karya dengan Perum Perumnas dan belum terdapat kejelasan metode/mekanisme perputaran uang hasil perolehan penjualan rumah susun.

Atas peraturan yang tidak konsisten dan pelaksanaan kegiatan BL BUMN peduli yang tidak direncanakan secara memadai, BPK merekomendasikan Menteri BUMN dalam membuat peraturan, terutama yang berdampak pada penggunaan kekayaan negara/perusahaan dibuat dengan tujuan yang benar, segera mengevaluasi kembali penempatan tim perumus hukum, membuat laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana BL BUMN Peduli untuk kegiatan cetak sawah serta hasil/manfaat yang dihasilkannya, melakukan evaluasi dan memantau pelaksanaan pembangunan rumah susun sederhana sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Pengelolaan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA)

Perencanaan (*business plan*) yang kurang memadai dan armada pesawat yang tidak andal mengakibatkan pengelolaan PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) tidak efektif dan efisien

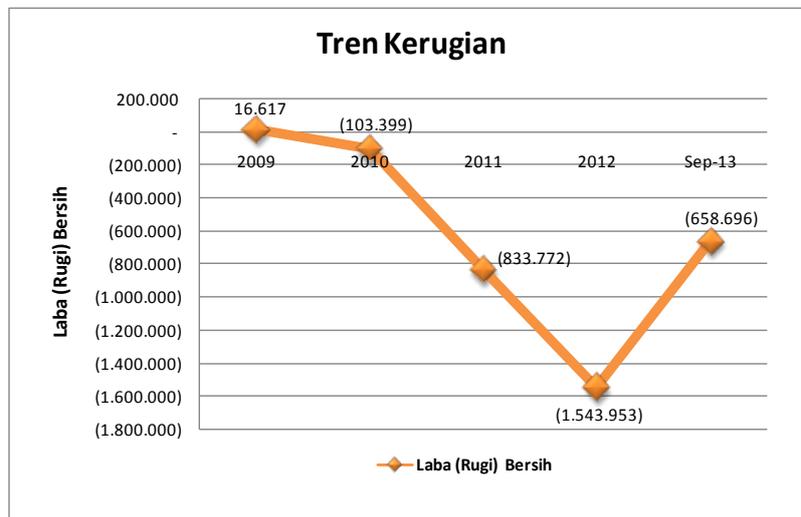
PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) didirikan pada tanggal 6 September 1975 dengan tujuan menjadi jembatan udara nasional di seluruh Indonesia, yang menghubungkan daerah terpencil, kota besar, hingga kawasan regional, dengan memberikan

pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Data historis menunjukkan pertumbuhan jumlah penumpang domestik sebesar 10% sejak Tahun 2004. Jumlah penumpang penerbangan Indonesia diperkirakan sebanyak 62 juta orang pada Tahun 2012 dan mencapai 86 juta orang pada Tahun 2013 serta diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, PT MNA tidak dapat memanfaatkan pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, sebaliknya PT MNA mengalami penurunan kapasitas dan kinerjanya sehingga mengharuskan PT MNA mengurangi kegiatan operasionalnya secara terus menerus. Sejak Tahun 2009 sampai dengan 30 September 2013, jumlah pendapatan usaha yang diperoleh PT MNA lebih kecil dari biaya usaha sehingga perusahaan mengalami kerugian, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Tren Kerugian PT MNA sejak Tahun 2009 s.d. September 2013

(dalam juta rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	September 2013
Pendapatan Usaha	1.852.451	1.783.639	1.612.029	1.752.044	1.325.117
Beban Usaha	1.859.072	1.809.872	2.099.306	2.378.515	1.633.614
Laba (Rugi) Usaha	(6.621)	(26.233)	(487.276)	(626.471)	(308.495)
Laba (Rugi) Diluar Usaha	14.906	(98.538)	(330.228)	(904.407)	(350.200)
Laba (Rugi) Sblm Pajak	8.285	(124.771)	(817.504)	(1.530.878)	(658.696)
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(586)	21.372	(16.268)	(13.075)	-
Laba (Rugi) Pos Luar Biasa	8.918	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	16.617	(103.399)	(833.772)	(1.543.953)	(658.696)

Grafik 4. Tren Kerugian PT MNA Sejak Tahun 2009 s.d. September 2013

Kerugian terus menerus tersebut mengakibatkan penumpukan hutang PT MNA kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai Rp7,29 triliun per 31 Oktober 2013.

Kondisi tersebut terjadi karena PT MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat siap beroperasi (*online*) dan kebutuhan suku cadang dan mesin (*engine*) serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak andal. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan PT MNA tidak efektif dan efisien antara lain terdapat pengeluaran biaya atas penundaan dan pembatalan penerbangan senilai Rp22,84 miliar, masih terdapat sisa dana penerbangan perintis senilai Rp8,64 miliar yang tidak terealisasi, dan terjadi kerugian dari penerbangan Kerja Sama Operasional (KSO) senilai Rp31,24 miliar, serta ketidakefisienan pembayaran asuransi senilai USD3.56 juta.

Pengeluaran biaya penundaan dan pembatalan senilai Rp22,84 miliar merupakan biaya *irregularities* atau biaya yang harus dibayarkan sebagai hak penumpang untuk pembayaran tiket pengganti, makanan, hotel, dan transportasi. Sampai dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2013, PT MNA mengalami kejadian *irregularities delay* (kejadian penundaan) sebanyak 6.893 kejadian dan *irregularities cancel* (kejadian pembatalan) sebanyak 572 kejadian. Adapun selama Tahun 2012, jumlah *irregularities delay* sebanyak 4.096 kejadian dan *irregularities cancel* sebanyak 1.017 kejadian.

Kelemahan pengelolaan penerbangan perintis terjadi pada kontrak penerbangan perintis Tahun 2012. PT MNA masih menyisakan utang penerbangan perintis sebanyak 660 penerbangan sehingga terdapat sisa dana perintis senilai Rp8,64 miliar yang tidak diterima oleh PT MNA. Selain itu, pengelolaan KSO dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke kurang memadai, pengoperasian pesawat PK-MBP, PK MDF, dan PK MDK minimal selama Tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 mengalami kerugian senilai Rp31,24 miliar.

Pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakefisienan PT MNA dalam membayar premi asuransi pesawat kurang lebih senilai USD3.56 juta. PT MNA telah membayar asuransi pesawat dengan perlindungan pesawat yang diterbangkan (*full flight risk/FFR*) tetapi kondisi pesawat tidak terbang (*ground risk only/GRO*). Hal tersebut telah mengakibatkan inefisiensi atas pembayaran premi asuransi pesawat GRO dengan premi FFR kurang lebih senilai USD2.29 juta. Selain itu, terdapat biaya asuransi yang membebani perusahaan senilai USD1.27 juta karena pada periode asuransi Tahun 2011-2012 dan 2012-2013, PT MNA membayar biaya asuransi untuk pesawat yang tidak terbang (*aircraft on ground/AOG*).

Selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa faktor gangguan teknik pesawat merupakan penyebab utama pembatalan penerbangan. *Data on Time Performance (OTP)* sesuai Laporan Kinerja Operasional yang dikeluarkan Divisi *Operation Support and Cost (OS)* selama Tahun 2011, 2012, dan Semester I 2013 menunjukkan bahwa faktor teknis merupakan penyebab terjadinya pembatalan penerbangan pada pesawat jet maupun pesawat baling-baling MA 60. Gangguan teknis terjadi antara lain karena proses pemeliharaan pesawat yang tidak optimal, usia pesawat jet yang rata-rata di atas 20 tahun. Selain pada pesawat lama, gangguan teknis yang sering terjadi pada pesawat MA 60 yang berusia relatif muda (3-6 tahun) juga berkontribusi terhadap kerugian operasional PT MNA.

Untuk pengadaan pesawat MA 60 tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan pada Tahun 2012 dan telah dilaporkan dalam pemeriksaan sebelumnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain sebagai berikut.

Perencanaan Proyek MA60 masuk dalam *Blue Book* dan *Green Book* yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007 dengan nama proyek *Procurement of Aircraft for National Air Bridge* senilai USD232.00 juta tanpa didukung dokumen persyaratan dan penilaian yang memadai antara lain tanpa disertai kerangka acuan kerja dan studi kelayakan proyek yang memuat manfaat langsung maupun tidak langsung yang diidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif.

Pengadaan pesawat MA 60 juga tidak direncanakan dalam *business plan* dan RKAP PT MNA dan kontrak pembelian ditandatangani sebelum mendapat persetujuan RUPS yang mengakibatkan kontrak pembelian patut diduga tidak sah dan terjadi penundaan pengoperasian enam pesawat MA 60 sehingga PT MNA menanggung beban bunga senilai Rp11,34 miliar. Selain itu, kontrak pembelian mengandung kelemahan dan renegotiasi kontrak dilakukan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan PT MNA tidak memiliki jaminan ketepatan waktu penerimaan *full flight simulator*, *additional product support* dan *training* senilai Rp22,05 juta dan hasil renegotiasi tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penerimaan sebagian *product support* sebelum kontrak berlaku efektif mengakibatkan PT MNA pada posisi tawar yang tidak memadai dalam upaya pembatalan atau renegotiasi kontrak pembelian serta pengenaan *commitment fee* atas sisa plafon pinjaman mengakibatkan Pemerintah membayar *commitment fee* senilai Rp243,33 juta dan masih berpotensi dibebani *commitment fee* senilai Rp5,00 miliar.

Seluruh temuan di atas mengindikasikan terjadinya kerugian yang tidak diantisipasi sejak awal akibat dari *business plan* yang tidak memadai, manajemen operasional yang buruk serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT MNA agar

- membuat *business plan* yang realistis dan pelaksanaan yang optimal untuk peningkatan kualitas armada pesawat meliputi efisiensi biaya dan kemampuan bersaing;
- mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan atas armada pesawat terutama yang sering bermasalah untuk menghindari beban biaya secara terus-menerus;
- menyusun perencanaan strategis untuk pengelolaan penerbangan perintis dan KSO dengan pemerintah daerah yang saling menguntungkan; dan
- mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran premi asuransi.

Mengingat fungsi PT MNA sebagai jembatan udara yang strategis, pemerintah agar mengupayakan solusi penyelamatan secara komprehensif melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) untuk pertimbangan *going concern* perusahaan.

BAB 3

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013

BPK telah memeriksa 662 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 3.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 117 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 158 objek pemeriksaan kinerja, dan 387 objek PDTT.

Tabel 3.1. Objek Pemeriksaan BPK pada Semester II Tahun 2013

Entitas Yang Diperiksa	Jenis Pemeriksaan			Jumlah
	Keuangan	Kinerja	PDTT	
Pemerintah Pusat	3	31	47	81
Pemerintah Daerah	108	122	200	430
- Provinsi	7	15	27	49
- Kabupaten/Kota	101	107	173	381
BUMN	4	4	29	37
KKKS	-	-	8	8
BUMD	2	1	92	95
BLU/BLUD	-	-	10	10
Badan Lainnya	-	-	1	1
Jumlah	117	158	387	662

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "kasus". Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

IHPS II Tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp13,96 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.452 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp9,24 triliun. Rincian temuan berdampak finansial meliputi kerugian sebanyak 1.840 kasus senilai Rp1.775,96 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau indikasi kerugian negara/daerah pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 808 kasus senilai Rp590,82 miliar), potensi

kerugian sebanyak 586 kasus senilai Rp4.829,44 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.026 kasus senilai Rp2.635,76 miliar. Rekomendasi BPK terhadap kasus-kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah.

Adapun sebanyak 3.505 kasus merupakan kelemahan SPI, sebanyak 1.782 kasus kelemahan administrasi, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 2.257 kasus senilai Rp4.720,99 miliar. Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif dan/atau tindakan korektif lainnya.

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp173,55 miliar dengan rincian temuan kerugian senilai Rp80,75 miliar, potensi kerugian senilai Rp72,58 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp20,22 miliar.

Hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2013 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 108 Pemerintah Daerah meliputi 7 LK Pemerintah Provinsi, 88 LK Pemerintah Kabupaten, dan 13 LK Pemerintah Kota. Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas 9 Laporan Keuangan Badan Lainnya terdiri dari Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (LK BP Batam) Tahun 2012, Laporan Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LK BP MIGAS) Tahun 2011 dan Tahun 2012, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (LK PDAM) Kota Padang Tahun 2012, dan LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012 serta Laporan Keuangan Perum Produksi Film Negara (LK Perum PFN) Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010.

Cakupan pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 dan 9 Laporan Keuangan Badan Lainnya meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan laba rugi atau laporan surplus defisit, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Cakupan pemeriksaan neraca, meliputi aset senilai Rp316,90 triliun, kewajiban senilai Rp10,16 triliun, dan ekuitas senilai Rp306,80 triliun. Sementara untuk cakupan pemeriksaan LRA/laporan laba rugi, meliputi pendapatan senilai Rp126,38 triliun, belanja senilai Rp119,18 triliun, pembiayaan neto senilai Rp20,16 triliun, dan laba senilai Rp0,44 triliun.

Opini

Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD. Adapun terhadap Laporan Keuangan Badan Lainnya, BPK memberikan opini WTP untuk LK BP Migas Tahun 2011 dan Tahun 2012, opini WDP untuk LK PDAM Kota Padang Tahun 2012,

opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012, LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012, dan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010. Rincian opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2012 pada Semester II Tahun 2013

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPD	7	6%	52	48%	2	2%	47	44%	108
LK Badan Lainnya	2	22%	1	11%	0	0%	6	67%	9
Total	9	8%	53	45%	2	2%	53	45%	117

Adapun permasalahan-permasalahan atas LKPD Tahun 2012 yang tidak memperoleh opini WTP antara lain adalah adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, pelaksanaan belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Dengan demikian, secara umum sejak Tahun 2008 hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP. Kondisi tersebut menggambarkan perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Adapun rincian opini Tahun 2008 s.d. 2012 untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	252	23	105	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	267	6	89	398	21	63	2	7	93
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	253	6	66	397	31	55	0	7	93
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	33%	59%	0%	8%	100%

Hasil Pemeriksaan atas LK

Selain opini, dalam pemeriksaan atas LK, BPK juga mengungkap temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan LK selama Semester II Tahun 2013 mengungkapkan temuan SPI sebanyak 1.448 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 2.165 kasus senilai Rp3.740.991,02 juta. Temuan pemeriksaan atas LK dengan rincian per entitas disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Entitas

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	SPI		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pusat	48	25	1.719.361,02
II	Daerah	1.367	2.114	2.017.963,68
1	Provinsi	116	206	1.027.247,62
2	Kabupaten	1.107	1.694	928.250,74
3	Kota	144	214	62.465,32
III	BUMN	7	5	-
IV	BUMD	26	21	3.666,32
	Jumlah	1.448	2.165	3.740.991,02

Berikut ini adalah rincian hasil pemeriksaan atas LK selama Semester II Tahun 2013 serta kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, dan BUMN sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Pemeriksaan LK instansi Pemerintah Pusat pada Semester II Tahun 2013 dilakukan atas LK BP Migas Tahun 2011 dan 2012 dan LK BP Batam Tahun 2012. Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi antara lain penyajian aset tetap dan persediaan tidak akurat atau belum dilakukan dan aset tetap tidak dapat ditelusuri serta kesalahan penganggaran belanja barang pada beberapa unit pelayanan teknis (UPT). Adapun kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain kasus potensi kerugian senilai Rp1.697.115,43 juta, di antaranya piutang negara dari pokok utang PT TPPI berpotensi tidak tertagih.

2. Pemerintah Daerah

Pada Pemerintah Daerah, kelemahan SPI yang sering terjadi adalah sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu sebanyak 568 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Pada Pemerintah Daerah, kasus kerugian daerah dan kelemahan administrasi yang terjadi antara lain

- kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.
- Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

3. BUMN

Kasus kelemahan SPI yang terjadi pada Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010 diantaranya Perum PFN menanggung denda keterlambatan atas hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dikenakan sanksi administrasi/denda.

4. BUMD

Kasus kelemahan SPI yang terjadi diantaranya pencatatan aset tetap tidak/belum dilakukan atau tidak akurat. Selain itu, terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah. Kasus tersebut diantaranya belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari kasus kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3.274.023,68 juta, selama proses pemeriksaan laporan keuangan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp101.000,87 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp27.840,84 juta, potensi kerugian senilai Rp67.078,06 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp6.081,97 juta.

Pemeriksaan Kinerja

Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 158 objek pemeriksaan, terdiri atas 31 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat, 15 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 107 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 4 objek pemeriksaan badan usaha milik negara (BUMN), dan 1 objek pemeriksaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Hasil pemeriksaan tersebut dikelompokkan dalam sembilan tema sebagai berikut Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; Kesehatan; Pendidikan; Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Infrastruktur; Lingkungan Hidup dan Bencana; Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok; Pelayanan Publik; dan Kinerja Bidang Lainnya.

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja dalam Semester II Tahun 2013 pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2013 ditemukan 11 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp49.402,46 juta, 23 kasus ketidakefisienan senilai Rp959.667,05 juta, dan 1.622 kasus ketidakefektifan senilai Rp2.059.028,47 juta sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	31	1	315,53	5	-	311	1.635.187,90	317	1.635.503,43
2	Provinsi	15	1	2.080,60	3	-	166	53.726,31	170	55.806,91
3	Kabupaten/ Kota	107	6	919,38	-	-	1.061	14.168,27	1.067	15.087,65
4	BUMN	4	3	46.086,95	15	959.667,05	51	355.945,99	69	1.361.699,99
5	BUMD	1	-	-	-	-	33	-	33	-
	Jumlah	158	11	49.402,46	23	959.667,05	1.622	2.059.028,47	1.656	3.068.097,98

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester II Tahun 2013, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan (LK) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 menyimpulkan bahwa pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal, serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan. Pengelolaan kelembagaan APIP yang meliputi

standar, kode etik, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) belum mendukung berfungsinya APIP secara efektif. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya dua peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 dan PP No. 60 Tahun 2008. Kedua peraturan tersebut mengatur sistem pengawasan intern pemerintah, dan oleh karenanya perlu menjadi suatu pertimbangan untuk mendorong efektivitas kelembagaan APIP.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun Anggaran (TA) 2011 s.d. Semester I TA 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan *pre market* dan *post market* yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya terdapat antrian yang panjang dalam memasukkan berkas praregistrasi dan registrasi ke BPOM, serta terdapat waktu diam atau *idle time* berkas registrasi yang masuk ke evaluator dengan rentang waktu antara 1 s.d. 198 hari. Akibatnya, proses penyelesaian registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar oleh industri farmasi membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan fungsi pengawasan obat dan makanan belum optimal sehingga produk obat dan makanan yang beredar kurang mendapatkan pengawasan yang memadai dan berpotensi tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki izin edar di Indonesia.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional Tahun 2012 dan 2013 menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di sepuluh provinsi belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada Paket Pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Provinsi Jawa Barat mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. Kelemahan tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan negara senilai Rp106,96 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya serta berpotensi menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas jalan tersebut di masa mendatang. Selain itu, pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada Ruas Jalan Nasional Jalur Pantura di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kurang terkoordinasi dan tidak efektif sehingga mengakibatkan kerusakan jalan.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas menunjukkan pengelolaan DAS Brantas belum efektif walaupun target penurunan beban pencemaran di DAS Brantas sebesar 15% telah tercapai. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup belum menetapkan daya tampung beban pencemar DAS Brantas sehingga pengendalian pencemaran di DAS Brantas tidak menjamin terjaganya kualitas air. Upaya pengendalian pencemaran limbah cair industri dan usaha/kegiatan melalui instrumen pengawas di Segmen Hulu, Tengah, dan Hilir belum memadai, antara lain terdapat industri dan usaha/kegiatan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri,

Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung yang membuang limbah cair ke DAS Brantas melebihi baku mutu. Selain itu, program percontohan sanitasi dari Pemerintah Pusat tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjadikan pembangunan fasilitas sanitasi untuk air limbah domestik sebagai program prioritas.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim TA 2010 s.d. Semester I TA 2013 menyimpulkan bahwa meskipun Kementerian Kehutanan telah melaporkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada *National Summit 2012* dari bidang kehutanan dan telah mencapai 72,8% dari target penurunan emisi GRK dengan metode analisis penutupan lahan, tetapi kegiatan-kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di Kementerian Kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim masih belum efektif dalam upaya menurunkan emisi GRK. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya upaya penurunan titik panas pada Kementerian Kehutanan untuk Pulau Sumatera Tahun 2012 serta Pulau Sulawesi Tahun 2011 dan 2012 belum mencapai target yang ditetapkan. Hanya pada Pulau Kalimantan penurunan titik panas mencapai target. Namun demikian, jumlah titik panas pada kawasan konservasi di ketiga pulau tersebut mempunyai kecenderungan meningkat dari Tahun 2010 s.d. 2012. Selain itu, belum akuratnya sumber data titik panas dan pencapaian kinerja penurunan titik panas sulit terukur. Hal ini mengakibatkan meningkatnya potensi kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi serta potensi tidak tercapainya target indikasi penurunan emisi CO₂e pada Tahun 2014.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Pemulihan Pascabencana TA 2009, 2010, dan 2011 menyimpulkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi/kabupaten/kota, serta instansi terkait telah berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan *Global Champion for Disaster Risk Reduction* dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang diterima langsung oleh Presiden RI. BNPB juga telah menyusun kebijakan dan pedoman sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan penerapan kebijakan dan lemahnya koordinasi antarunit atau instansi membuat banyak kegiatan pascabencana yang tidak tepat sasaran dan belum dapat memberikan manfaat bagi korban bencana dan masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas pengelolaan kegiatan pemulihan pascabencana belum tercapai secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya proses relokasi warga korban bencana di wilayah terdampak dan rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman belum terealisasi seluruhnya sehingga masih banyak warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok untuk Menjamin Kelancaran Jasa Pelayanan Kapal

dan Barang Tahun 2012 dan Tahun 2013 (s.d. Agustus) menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok, yang meliputi kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan, kegiatan penjaluran kepabeanan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, kegiatan kekarantina yang dilaksanakan oleh Balai Karantina, pemberian izin dan rekomendasi terkait larangan pembatasan impor yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga, tidak efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya permasalahan yang berpengaruh pada seluruh tahapan proses bisnis yaitu antara lain pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok belum didukung dengan peraturan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan perusahaan secara terpadu dan terkoordinasi, serta peraturan terkait pemberian konsesi. Selain itu, sistem informasi pelabuhan belum sepenuhnya terintegrasi dan mendukung kelancaran arus kapal dan barang.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 menunjukkan bahwa kegiatan tersebut kurang efektif dalam menjamin pengawasan lalu lintas impor barang. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya prosedur dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya memadai antara lain ketentuan yang mengatur kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang terkait jangka waktu penyelesaian hasil penindakan dan penanganan barang tanpa pemilik (*lost and found*) yang dikelola oleh maskapai penerbangan belum tersedia.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Gula Nasional Tahun 2010 s.d. 2013 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun 2010 s.d. September 2013, masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, ketidaktertiban, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target dan ketidakpatuhan penggunaan anggaran. Selain itu, BPK menyimpulkan bahwa Program Swasembada Gula Nasional 2010-2014 untuk memenuhi kebutuhan gula Tahun 2014 sebanyak 5,7 juta ton dengan sasaran pertumbuhan produksi gula sebesar 12,55 % per tahun tidak tercapai.

2. Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan TA 2012-2013 pada 19 entitas pada umumnya kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pemerintah daerah belum dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga target standar minimum kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tercapai dan layanan mutu pendidikan menjadi tidak optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan

belum menunjang kegiatan belajar mengajar karena belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tapi tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, tujuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak tercapai.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame (PHRR) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada 47 entitas menunjukkan bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PHRR. Selain capaian tersebut, hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa pengelolaan PHRR belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung oleh perangkat aturan dan pedoman yang andal dan lengkap berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur tentang pengelolaan PHRR, serta belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, perhitungan potensi PHRR belum sepenuhnya didukung database yang lengkap dan mutakhir, dalam aspek pemungutan PHRR kegiatan proses pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah belum sepenuhnya mudah dan sederhana, serta proses perizinan sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk pajak reklame masih memerlukan waktu yang cukup lama.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum efektif, kecuali di Kabupaten Seruyan, kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya data dan informasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki, data cuaca sebagai input sistem peringatan dini (*Early Warning System*) belum dimanfaatkan secara memadai, dan data titik panas belum tersedia, serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dilakukan. Selain itu, kegiatan penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dianggarkan dan masih terdapat kecamatan di daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang belum mendapatkan penyuluhan/sosialisasi.

3. BUMN

- PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) didirikan pada tanggal 6 September 1975 dengan tujuan menjadi jembatan udara nasional di seluruh Indonesia, yang menghubungkan daerah terpencil, kota besar, hingga kawasan regional, dengan memberikan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Data historis menunjukkan pertumbuhan jumlah penumpang domestik sebesar 10% sejak Tahun 2004. Jumlah penumpang penerbangan Indonesia diperkirakan sebanyak 62 juta orang pada Tahun 2012 dan mencapai 86 juta orang pada Tahun 2013 serta diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Namun demikian PT

MNA tidak dapat memanfaatkan pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, sebaliknya PT MNA mengalami penurunan kapasitas dan kinerjanya sehingga mengharuskan PT MNA mengurangi kegiatan operasionalnya secara terus menerus. Sejak Tahun 2009 sampai dengan 30 September 2013, jumlah pendapatan usaha yang diperoleh PT MNA lebih kecil dari biaya usaha sehingga perusahaan mengalami kerugian.

- Kerugian terus menerus tersebut mengakibatkan penumpukan hutang PT MNA kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai Rp7,29 triliun per 31 Oktober 2013.
- Kondisi tersebut terjadi karena PT MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat siap beroperasi (*online*) dan kebutuhan suku cadang dan mesin (*engine*) serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak handal. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan PT MNA tidak efektif dan efisien antara lain terdapat pengeluaran biaya atas penundaan dan pembatalan penerbangan senilai Rp22,84 miliar, masih terdapat sisa dana penerbangan perintis senilai Rp8,64 miliar yang tidak terealisasi dan terjadi kerugian dari penerbangan KSO senilai Rp31,24 miliar, serta ketidakefisienan pembayaran asuransi senilai USD3.56 juta.

Selain itu, hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 509 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta 94 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp176.431,39 juta. Rincian ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu 28 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp6.200,92 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 5 kasus senilai Rp489,31 juta), 7 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp39.109,70 juta, 44 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp131.120,77 juta, dan 15 kasus kelemahan administrasi. Jumlah kasus tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan (Objek)	Jml Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan								
			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pusat	31	13	4.407,71	4	776,16	10	86.518,47	3	30	91.702,34
2	Provinsi	15	-	-	-	-	1	20.536,42	3	4	20.536,42
3	Kabupaten/ Kota	107	15	1.793,21	1	876,30	32	24.025,88	9	57	26.695,39
4	BUMN	4	-	-	2	37.457,24	1	40,00	-	3	37.497,24
5	BUMD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	158	28	6.200,92	7	39.109,70	44	131.120,77	15	94	176.431,39

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp4.146,53 juta dengan rincian temuan kerugian negara/daerah senilai Rp1.611,30 juta, temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp57,21 juta, dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp2.478,02 juta.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 387 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 47 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 173 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 29 objek pemeriksaan BUMN, 8 objek pemeriksaan KKKS Minyak dan Gas Bumi, 92 objek pemeriksaan BUMD, 2 objek pemeriksaan Badan Layanan Usaha (BLU), 8 objek pemeriksaan BLU Daerah (BLUD) dan 1 objek pemeriksaan badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 387 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,67 triliun atau sekitar 76% dari realisasi anggaran senilai Rp480,77 triliun.

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT dikelompokkan dalam delapan tema sebagai berikut: pengelolaan pendapatan; pelaksanaan belanja; pengelolaan aset tetap; penyediaan jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan *mobile* PLIK; pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi; operasional BUMN; operasional BUMD dan RSUD; dan PDTT lainnya.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Temuan PDTT Semester II Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	1.548	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
2	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	1.068	1.117.316,27
3	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	447	2.322.877,97
4	Kekurangan Penerimaan	663	2.350.524,92
Sub Total 1		2.178	5.790.719,16
5	Kelemahan Administrasi	916	-
6	Ketidakhematan	156	196.265,83
7	Ketidakefisienan	11	157.279,78
8	Ketidakefektifan	315	832.379,41
Sub Total 2		1.398	1.185.925,02
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		3.576	6.976.644,18

Berdasarkan Tabel 3.7, hasil PDTT Semester II Tahun 2013 mengungkapkan adanya 1.548 kasus kelemahan SPI dan 3.576 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp6.976.644,18 juta. Dari total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 2.178 kasus senilai Rp5.790.719,16 juta merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian sebanyak 1.068 kasus senilai Rp1.117.316,27 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian sebanyak 438 kasus senilai Rp279.347,15 juta), potensi kerugian sebanyak 447 kasus senilai Rp2.322.877,97 juta, dan kekurangan penerimaan sebanyak 663 kasus senilai Rp2.350.524,92 juta.

Adapun rincian temuan PDTT selama Semester II Tahun 2013 berupa temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan serta kasus-kasus yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan KKKS, BUMD, BLUD, serta BLU dan badan lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 47 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 151 kasus kelemahan SPI dan 396 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1.281.926,54 juta. Dari total temuan PDTT pemerintah pusat tersebut, sebanyak 228 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp939.796,70 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	151	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	147	62.661,96
2	Potensi Kerugian Negara	30	173.478,21
3	Kekurangan Penerimaan	51	703.656,53
Sub Total I		228	939.796,70
4	Kelemahan Administrasi	117	-
5	Ketidakhematan	18	29.153,29
6	Ketidakefektifan	33	312.976,55
Sub Total II		168	342.129,84
Total		396	1.281.926,54

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 44 kasus senilai Rp15.363,18 juta, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 31 kasus senilai Rp10.077,75 juta, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 16 kasus senilai Rp16.378,63 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan serta konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 24 kasus senilai Rp55.519,45 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pengawas, kontraktor pelaksana dan panitia pengadaan tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain memberikan sanksi kepada pejabat dan panitia pengadaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 26 kasus senilai Rp664.001,87 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 23 kasus senilai Rp38.762,43 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor lalai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu sesuai dengan kontrak dan pejabat pembuat surat perintah membayar (SPM) tidak cermat dalam memperhitungkan PPh final atas jasa konstruksi dan jasa konsultan. Selain itu terjadi karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 66 kasus kelemahan SPI dan 309 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp254.569,08 juta. Dari total temuan PDTT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 193 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp182.525,03 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 173 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota menemukan 394 kasus kelemahan SPI dan 1.809 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp522.169,47 juta. Dari total temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 1.265 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp428.092,42 juta. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	66	-	394	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	101	36.584,38	675	193.133,86
2	Potensi Kerugian Daerah	21	21.488,89	301	172.813,13
3	Kekurangan Penerimaan	71	124.451,76	289	62.145,43
Sub Total I		193	182.525,03	1.265	428.092,42
4	Kelemahan Administrasi	66	-	378	-
5	Ketidakhematan	18	14.502,58	53	24.862,35
6	Ketidakefektifan	32	57.541,47	113	69.214,70
Sub Total II		116	72.044,05	544	94.077,05
Total		309	254.569,08	1.809	522.169,47

Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 271 kasus senilai Rp96.947,31 juta, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 127 kasus senilai Rp40.591,80 juta, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 72 kasus senilai Rp13.508,00 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan aset tetap, serta PDTT lainnya, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, kontraktor pengawas kurang cermat melakukan pekerjaan, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 273 kasus senilai Rp112.441,08 juta dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 15 kasus senilai Rp22.469,51 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, dan pengelolaan aset tetap, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai

kontrak yang telah disepakati, para pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku, memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 236 kasus senilai Rp30.436,12 juta, dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 107 kasus senilai Rp149.815,24 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan pendapatan, serta pengelolaan aset, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana dan rekanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

3. BUMN dan KKKS

Hasil PDTT pada 29 objek pemeriksaan BUMN menemukan 263 kasus kelemahan SPI dan 265 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2.395.149,00 juta. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak 125 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.950.042,31 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 8 objek pemeriksaan KKKS menemukan 13 kasus kelemahan SPI dan 79 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp994.804,75 juta. Dari total temuan PDTT KKKS tersebut, sebanyak 68 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp994.804,75 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN dan KKKS disajikan dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN dan KKKS

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMN		KKKS	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	263	-	13	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Perusahaan	34	277.993,23	-	-
2	Potensi Kerugian Perusahaan	33	1.599.908,83	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	58	72.140,25	68	994.804,75
Sub Total I		125	1.950.042,31	68	994.804,75
4	Kelemahan Administrasi	67	-	10	-
5	Ketidakhematan	29	92.913,85	-	-
6	Ketidakefisienan	8	156.789,60	-	-
7	Ketidakefektifan	36	195.403,24	1	-
Sub Total II		140	445.106,69	11	-
Total		265	2.395.149,00	79	994.804,75

Hasil PDTT BUMN dan KKKS menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian perusahaan berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 11 kasus senilai Rp46.091,19 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 8 kasus senilai Rp982,56 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian perusahaan berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 20 kasus senilai Rp1.592.939,07 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana kurang mempunyai itikad baik untuk secara berkala memprioritaskan pembayaran angsuran pinjaman RDI sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan, tidak intensif dalam melakukan penagihan piutang serta pengawasan dan pengendalian penanggung jawab belum optimal.

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi untuk memprioritaskan melakukan pembayaran angsuran pinjaman RDI secara berkala sesuai kemampuan keuangan perusahaan, lebih intensif melakukan penagihan piutang serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 65 kasus senilai Rp835.636,64 juta, dan penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 39 kasus senilai Rp216.307,53 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan operasional BUMN, antara lain disebabkan kurang optimalnya pengendalian intern SKK MIGAS terhadap KKKS dalam membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam *cost recovery*.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada SKK MIGAS dan KKKS antara lain agar melakukan koreksi *cost recovery*, menunda pembebanan selisih kontrak *rig* dibandingkan *owner estimate* (OE) dan mengeluarkan dari biaya operasi sampai dengan hasil evaluasi SKK MIGAS diperoleh, memerintahkan KKKS membayar selisih perhitungan pajak penghasilan dan kewajiban Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Bunga Dividen dan Royalti (PBDR) ke kas negara, serta Pemerintah dhi. SKK MIGAS agar melakukan amandemen *production sharing contract* (PSC) dan/ atau amandemen *tax treaty*. Selain itu menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan.

4. BUMD

Hasil PDDT pada 92 objek pemeriksaan BUMD menemukan 572 kasus kelemahan SPI dan 590 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp512.579,44 juta. Dari total temuan PDDT BUMD tersebut, sebanyak 212 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp281.529,39 juta. Rincian temuan PDDT pada BUMD disajikan dalam Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11. Kelompok Temuan PDDT pada BUMD

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	572	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	76	114.884,15
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	55	85.759,88
3	Kekurangan Penerimaan	81	80.885,36
Sub Total I		212	281.529,39
4	Kelemahan Administrasi	247	-
5	Ketidakhematan	35	34.808,18
6	Ketidakefisienan	3	490,18
7	Ketidakefektifan	93	195.751,69
Sub Total II		378	231.050,05
Total		590	512.579,44

Hasil PDDT BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 34 kasus senilai Rp11.414,99 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi kurang cermat dalam menyusun kebijakan dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar lebih cermat dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/perusahaan

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 35 kasus senilai Rp60.784,17 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggan yang menunggak serta dewan pengawas tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan kepada direksi atas kebijakan dan pelaksanaan penyaluran kredit berlandaskan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan. Selain itu pejabat pelaksana kurang cermat dalam melakukan penatausahaan piutang dan kurang optimal melakukan penagihan angsuran piutang.

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar memerintahkan pejabat pelaksana untuk melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan melakukan usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian sanksi pemutusan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan. Selain itu dewan pengawas menginventarisir dan memastikan bahwa seluruh kebijakan kredit yang telah ditetapkan direksi tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan serta lebih optimal melaksanakan upaya penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan sesuai ketentuan.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 73 kasus senilai Rp74.289,90 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

5. BLUD

Hasil PDDT pada 8 objek pemeriksaan RSUD yang sudah ditetapkan sebagai BLUD menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp12.463,65 juta. Dari total temuan PDDT di lingkungan BLUD tersebut, sebanyak 48 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp10.946,31 juta. Rincian temuan PDDT pada BLUD disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12. Kelompok Temuan PDDT pada BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BLUD	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	65	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	23	3.141,72
2	Potensi Kerugian Daerah	4	5.069,93
3	Kekurangan Penerimaan	21	2.734,66
Sub Total I		48	10.946,31
4	Kelemahan Administrasi	22	-
5	Ketidakhematan	3	25,58
6	Ketidakefektifan	5	1.491,76
Sub Total II		30	1.517,34
Total		78	12.463,65

Hasil PDDT BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 9 kasus senilai Rp1.726,82 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta pimpinan RSUD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor ke kas daerah.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 2 kasus senilai Rp4.267,92 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pasien, lalai tidak melakukan penagihan piutang, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan RSUD.

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana/pejabat yang bertanggung jawab yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pasien, melakukan upaya penagihan piutang, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 15 kasus senilai Rp2.322,56

juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pimpinan RSUD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta pelaksana kegiatan tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, menagih kekurangan penerimaan serta menyetorkan ke kas daerah dan menyetorkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

6. BLU dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BLU, yaitu BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, menemukan 16 kasus kelemahan SPI dan 50 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1.002.982,25 juta. Dari total temuan PDTT BLU tersebut, sebanyak 39 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.002.982,25 juta.

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya, yaitu Bank Indonesia, menemukan 8 kasus kelemahan SPI. Rincian temuan PDTT pada BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13. Kelompok Temuan PDTT pada BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	16	-	8	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Negara	12	428.916,97	-	-
2	Potensi Kerugian Negara	3	264.359,10	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	24	309.706,18	-	-
Sub Total I		39	1.002.982,25		
4	Kelemahan Administrasi	9	-	-	-
5	Ketidakefektifan	2	-	-	-
Sub Total II		11	-	-	-
Total		50	1.002.982,25	-	-

Hasil PDDT BLU dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara sebanyak 8 kasus senilai Rp57.022,57 juta, dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai Rp2.042,70 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi tidak cermat dan lalai dalam menyusun perjanjian kerja sama, tidak mengajukan addendum perjanjian atas kelebihan penggunaan tanah, serta pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian yang lemah.

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar memberikan sanksi kepada direksi BLU yang tidak cermat dan lalai dalam menyusun perjanjian kerja sama dan tidak melakukan addendum perjanjian. Selain itu agar direksi menarik kelebihan pembayaran dan/atau melakukan upaya hukum atas kasus kerugian negara tersebut

- Temuan potensi kerugian negara berupa lain-lain potensi kerugian sebanyak 3 kasus senilai Rp264.359,10 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam menentukan nilai limit lelang dan tidak cermat dalam menyusun perjanjian kerja sama sehingga harga jual tanah dinilai di bawah nilai jual objek pajak (NJOP).

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar direksi BLU memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana/pejabat yang bertanggung jawab yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas, dan mengamandemen perjanjian kerjasama dengan mengakomodasi hak entitas dalam alokasi pembagian hasil kerjasama, serta melakukan upaya hukum atas permasalahan tersebut.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 24 kasus senilai Rp309.706,18 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi lalai dalam menentukan tarif sewa dalam perjanjian dan membiarkan penempatan lahan tanpa perikatan yang sah, serta belum optimal dalam mengelola pemanfaatan aset.

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar memerintahkan direksi BLU untuk melakukan penagihan kepada mitra kerja sama atas kompensasi selisih harga nilai pengganti tanah, alokasi bagi hasil, dan kewajiban mitra kerja sama sesuai perjanjian dan/atau melakukan upaya hukum atas permasalahan tersebut.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5.790.719,16 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp68.411,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp51.303,80 juta, potensi kerugian senilai Rp5.447,47 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp11.660,48 juta.

BAB 4

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 BPK secara keseluruhan telah memberikan 212.750 rekomendasi senilai Rp81,49 triliun kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2009 s.d. 2013 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	25.658	44.073.624,72	15.545	11.163.946,37	5.696	21.603.786,63	4.335	11.103.570,19	82	202.321,53	7.939.376,78
Pemerintah Daerah	180.473	18.202.481,80	95.820	4.907.787,58	48.230	8.416.536,53	36.313	4.845.283,43	110	32.874,26	4.338.164,43
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	6.024	14.646.614,04	2.755	10.072.817,20	1.236	1.808.650,04	1.963	2.756.306,60	70	8.840,20	4.285.417,49
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita	595	4.570.655,24	277	1.933.794,52	94	774.148,08	224	1.862.712,64	-	-	1.634,73
TOTAL	212.750	81.493.375,80	114.397	28.078.345,67	55.256	32.603.121,28	42.835	20.567.872,86	262	244.035,99	16.564.593,43
Persentase Tindak Lanjut Berdasarkan Jumlah Rekomendasi	100%		53,77%		25,97%		20,14%		0,12%		

Berdasarkan Tabel 4.1. dapat dijelaskan bahwa data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 114.397 senilai Rp28,07 triliun atau 53,77%, sedangkan sebanyak 55.256 rekomendasi senilai Rp32,60 triliun atau 25,97% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 42.835 rekomendasi senilai Rp20,56 triliun atau 20,14% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 262 rekomendasi senilai Rp244,03 miliar atau 0,12% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 114.397 rekomendasi senilai Rp28,07 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/penyerahan aset ke negara secara kumulatif sejak tahun 2009 s.d. Tahun 2013 senilai Rp16,56 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebesar 53,77%, menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Adapun selama Semester II Tahun 2013, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2013 sebanyak 16.170 rekomendasi senilai Rp3,91 triliun. Selama Semester II Tahun 2013, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2013 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp1,39 triliun. Perkembangan data pemantauan TLRHP selama Semester II Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester II Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester II Tahun 2013	212.750	81.493.375,80	114.397	28.078.345,67	55.256	32.603.121,28	42.835	20.567.872,86	262	244.035,99	16.564.593,43
Semester I Tahun 2013	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02
Perkembangan	19.150	8.214.347,26	16.170	3.916.179,66	5.921	3.344.045,95	(2.995)	888.835,90	54	65.285,75	1.393.447,41

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2013 memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Tahun 2013 untuk status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan" dan "dalam proses penetapan".

Cakupan entitas yang dipantau adalah sebesar 28,22% atau sebanyak 688 entitas dari total entitas yang seharusnya dipantau sebanyak 2.438 entitas, yang terdiri dari 91 entitas pemerintah pusat, 527 entitas pemerintah daerah, 11 entitas BUMN dan 59 entitas BUMD.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian negara/daerah dalam kurun waktu periode Tahun 2003 s.d. 2013 sebanyak 24.474 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp3.122,05 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 15.538 kasus senilai Rp603,50 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. 2013 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara/Daerah
Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	2.720	600,34	529	80,11	654	19,56	6	0,38	2.281	500,29
	USD	-	243.29	-	3.58	-	-	-	-	-	239.71
TGR NON BENDAHARA	IDR	18.209	1.049,71	5.225	187,06	6.919	138,79	80	1,28	13.202	722,58
	USD	-	4.411.80	-	14.39	-	1.33	-	-	-	4.396.08
	GBP	-	199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15
	AUD	-	2.355.24	-	-	-	-	-	-	-	2.355.24
	CAD	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60
	JPY	-	755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27
	EUR	-	32,592.55	-	-	-	-	-	-	-	32,592.55
	NLG	-	509.42	-	-	-	-	-	-	-	509.42
	FFR	-	2,215.39	-	-	-	-	-	-	-	2,215.39
	DEM	-	510.23	-	-	-	-	-	-	-	510.23
MYR	-	58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53	
PIHAK KETIGA	IDR	3.468	679,75	538	92,33	1.506	70,70	3	3,01	2.777	513,71
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	77	55,29	43	3,70	24	0,39	11	5,97	59	45,23
TOTAL	IDR	24.474	2.385,09	6.335	363,20	9.103	229,44	100	10,64	18.319	1.781,81
	USD	-	4.655.09	-	17.97	-	1.33	-	-	-	4.635.79
	GBP	-	199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15
	AUD	-	2.355.24	-	-	-	-	-	-	-	2.355.24
	CAD	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60
	JPY	-	755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27
	EUR	-	32,592.55	-	-	-	-	-	-	-	32,592.55
	NLG	-	509.42	-	-	-	-	-	-	-	509.42
	FFR	-	2,215.39	-	-	-	-	-	-	-	2,215.39
	DEM	-	510.23	-	-	-	-	-	-	-	510.23
MYR	-	58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53	
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	-	736,96	-	0,21	-	0,01	-	-	-	736,74
TOTAL KERUGIAN	IDR	24.474	3.122,05	6.335	363,41	9.103	229,45	100	10,64	18.319	2.518,55

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Data kerugian negara/daerah pada Tahun 2013 menunjukkan bahwa kerugian negara/daerah yang tercatat pada Tahun 2013 adalah sebanyak 840 kasus senilai Rp20,25 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 310 kasus senilai Rp3,63 miliar dengan rincian angsuran sebanyak 169 kasus senilai Rp1,42 miliar dan pelunasan sebanyak 141 kasus senilai Rp2,21 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada Tahun 2013 sebanyak 750 kasus senilai Rp16,62 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah pada Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Data Kerugian Negara/Daerah Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	153	3,76	38	0,46	3	0,10	-	-	150	3,20
TGR NON BENDAHARA	IDR	514	11,05	93	0,49	110	1,63	-	-	430	8,93
PIHAK KETIGA	IDR	173	5,44	38	0,47	28	0,48	-	-	170	4,49
PENGELOLA KEUANGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	840	20,25	169	1,42	141	2,21	-	-	750	16,62

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

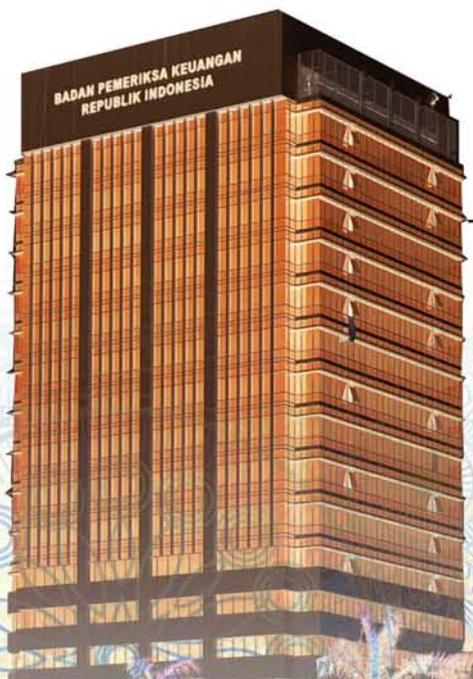
- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Pemantauan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Instansi yang Berwenang (Aparat Penegak Hukum)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak akhir Tahun 2003 s.d. 2013 sebanyak 432 temuan senilai Rp42.714,60 miliar, diantaranya sebanyak 48 temuan senilai Rp4.506,82 miliar disampaikan pada Tahun 2013. Dari 432 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 61 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 201 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 170 temuan. Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 319 temuan atau 73,84% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 45 temuan, penyelidikan sebanyak 93 temuan, penyidikan sebanyak 38 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 26 temuan, telah memperoleh putusan pengadilan sebanyak 102 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 15 temuan. Adapun sebanyak 113 temuan atau 26,16% belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut terhadap LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada Instansi yang berwenang pada Semester II Tahun 2013 adalah sebanyak 9 surat yang memuat 6 temuan senilai Rp47,67 miliar.

Jakarta, 28 Maret 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013

**Buku II
Pemeriksaan Laporan Keuangan**
(Buku ke-2 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan	1
BAB 2 Resume Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2013	7
BAB 3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	15
BAB 4 Laporan Keuangan Badan Lainnya	29

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

- 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Semester II Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan SPI
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4. Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Entitas
- 3.1. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
- 3.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
- 4.1. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya

DAFTAR GRAFIK

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012
- 3.2. Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2013
2. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2013
3. Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2008 s.d. 2012
4. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
5. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
6. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester II Tahun 2013
8. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester II Tahun 2013
9. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester II Tahun 2013
10. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Keuangan

Pengertian Pemeriksaan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya.

Tujuan Pemeriksaan Keuangan

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria pemberian opini adalah (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga bagian yaitu laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat sejumlah temuan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan kelemahan SPI dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan,

kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) SPKN Nomor 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, paragraf 13 tentang Jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, sebagai berikut.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas, sedangkan tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat/opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, obyektif, dan dengan integritas tinggi.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI meliputi lima unsur pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI yang didesain untuk dapat mengenali apakah

SPI telah memadai dan mampu mendeteksi adanya kelemahan. Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan berupa laporan kepatuhan, mengungkapkan ketidakpatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa resiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
- Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun

operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

- Ketidakhematan/pemborosan mengungkapkan adanya penggunaan input dengan harga atau kualitas/kuantitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- Ketidakefisienan berorientasi pada proses, yaitu rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
- Ketidakefektifan berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), yaitu temuan yang mengungkapkan kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

Selain itu, BPK juga melakukan penilaian terhadap kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku sebagai dasar pemberian opini atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Demikian juga halnya dengan gubernur/bupati/walikota, menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat/daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 56 undang-undang tersebut menyatakan bahwa gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, pada Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 108 LKPD Tahun 2012 tingkat provinsi/kabupaten/kota. Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2012, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Tahun 2011 dan Tahun 2012, Perusahaan Umum Poduksi Film Negara (Perum PFN) Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010, serta Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Tahun 2012 dan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Keuangan Semester II Tahun 2013

Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2012 atas 108 LKPD. Selain itu BPK juga melakukan pemeriksaan atas 9 Laporan Keuangan Badan Lainnya terdiri dari Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (LK BP Batam) Tahun 2012, Laporan Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LK BP MIGAS) Tahun 2011 dan Tahun 2012, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (LK PDAM) Kota Padang Tahun 2012, dan LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012 serta Laporan Keuangan Perum Produksi Film Negara (LK Perum PFN) Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010.

Pemeriksaan atas 108 LKPD meliputi 7 LK Pemerintah Provinsi, 88 LK Pemerintah Kabupaten, dan 13 LK Pemerintah Kota.

Cakupan pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 dan 9 Laporan Keuangan Badan Lainnya meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan laba rugi atau laporan surplus defisit, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Cakupan pemeriksaan neraca, meliputi aset senilai Rp316,90 triliun, kewajiban senilai Rp10,16 triliun, dan ekuitas senilai Rp306,80 triliun. Sementara untuk cakupan pemeriksaan LRA/laporan laba rugi, meliputi pendapatan senilai Rp126,38 triliun, belanja senilai Rp119,18 triliun, pembiayaan neto senilai Rp20,16 triliun, dan laba senilai Rp0,44 triliun.

Opini

Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD.

Adapun terhadap Laporan Keuangan Badan Lainnya, BPK memberikan opini WTP untuk LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012, opini WDP untuk LK PDAM Kota Padang Tahun 2012, opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012, LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012, dan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010. Rincian opini pemeriksaan keuangan pada Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Semester II Tahun 2013

Jenis LK	Opini								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
LKPD	7	6%	52	48%	2	2%	47	44%	108
LK Badan Lainnya	2	22%	1	11%	0	0%	6	67%	9
Total	9	8%	53	45%	2	2%	53	45%	117

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester II Tahun 2013 menunjukkan adanya 1.448 kasus kelemahan SPI. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan SPI

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	601
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	582
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	265
	Jumlah	1.448

Kelemahan SPI yang sering ditemukan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan antara lain pencatatan tidak/belum dilakukan atau belum akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan. Kelemahan lain yang sering ditemukan adalah kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai.

Daftar kelompok dan jenis temuan-kelemahan SPI hasil pemeriksaan laporan keuangan Semester II Tahun 2013 disajikan pada Lampiran 1.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester II Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 2.165 kasus senilai Rp3.740.991,02 juta. Jumlah dan nilai masing-masing kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(nilai dalam juta rupiah)

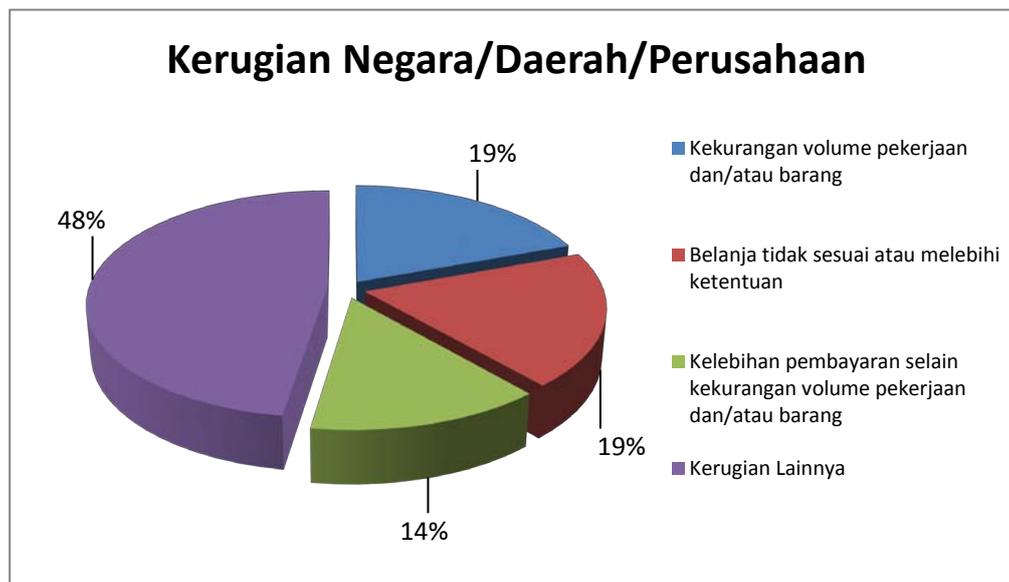
No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	744	652.448,93
2	Potensi Kerugian Negara /Daerah/Perusahaan	132	2.467.458,86
3	Kekurangan Penerimaan	319	154.115,89
Sub Total 1		1.195	3.274.023,68
4	Kelemahan Administrasi	851	-
5	Ketidakhematan	47	25.609,14
6	Ketidakefektifan	72	441.358,20
Sub Total 2		970	466.967,34
Jumlah		2.165	3.740.991,02

Daftar kelompok dan jenis temuan-ke ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hasil pemeriksaan laporan keuangan Semester II Tahun 2013 disajikan pada Lampiran 2.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 744 kasus kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp652.448,93 juta. Dari jumlah tersebut di antaranya sebanyak 365 kasus senilai Rp310.992,92 juta (47,66%) merupakan indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan. Persentase kasus yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Daftar kelompok temuan kerugian negara/daerah/perusahaan di atas disajikan pada Lampiran 2. Kasus-kasus kerugian yang terjadi, yaitu:

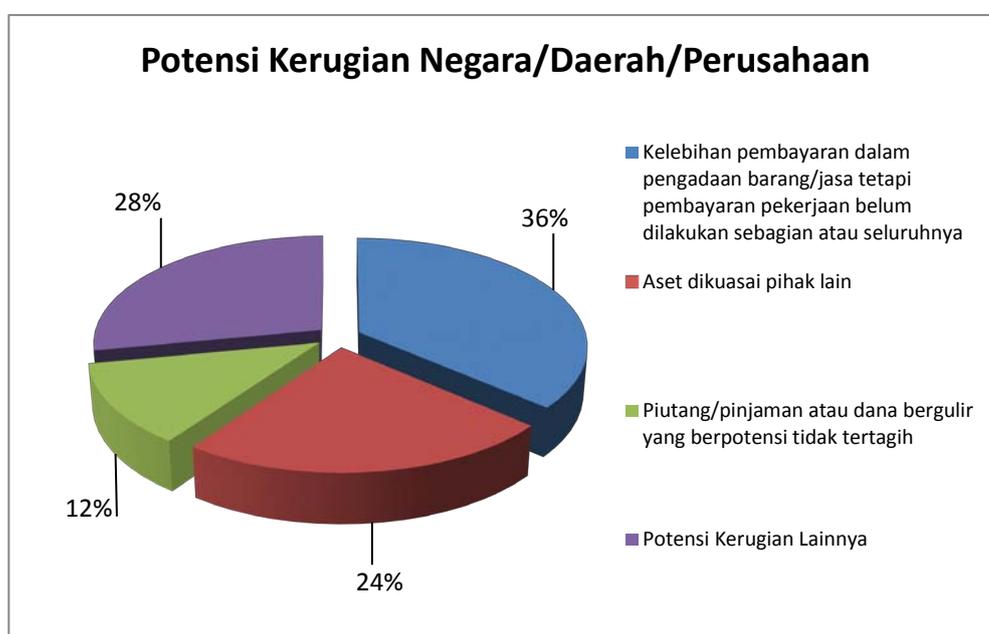
- **Kasus kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 144 kasus (19%) senilai Rp100.786,88 juta yang terjadi di 76 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti pembangunan gedung, peningkatan jalan, dan pemeliharaan/perbaikan jalan;
- **Kasus belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 143 (19%) senilai Rp86.037,53 juta yang terjadi di 70 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja barang/jasa dan belanja pegawai, seperti pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan jalan, dan kelebihan pembayaran gaji, lembur, dan pembayaran tunjangan untuk anggota dewan;
- **Kasus kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 103 kasus (14%) senilai Rp42.652,59 juta yang terjadi di 59 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal dan belanja barang/jasa, seperti pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan

- **Kerugian lainnya** sebanyak 354 kasus (48%) senilai Rp422.971,93 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja barang/jasa di antaranya kasus biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan dan kasus belanja perjalanan dinas fiktif. Kasus kerugian lainnya juga terjadi pada belanja modal dan belanja bantuan seperti pemahalan harga (*mark up*) dan pengadaan fiktif.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 132 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp2.467.458,86 juta dengan persentase kasus yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Daftar kelompok temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan di atas disajikan pada Lampiran 2. Kasus-kasus potensi kerugian yang terjadi, yaitu:

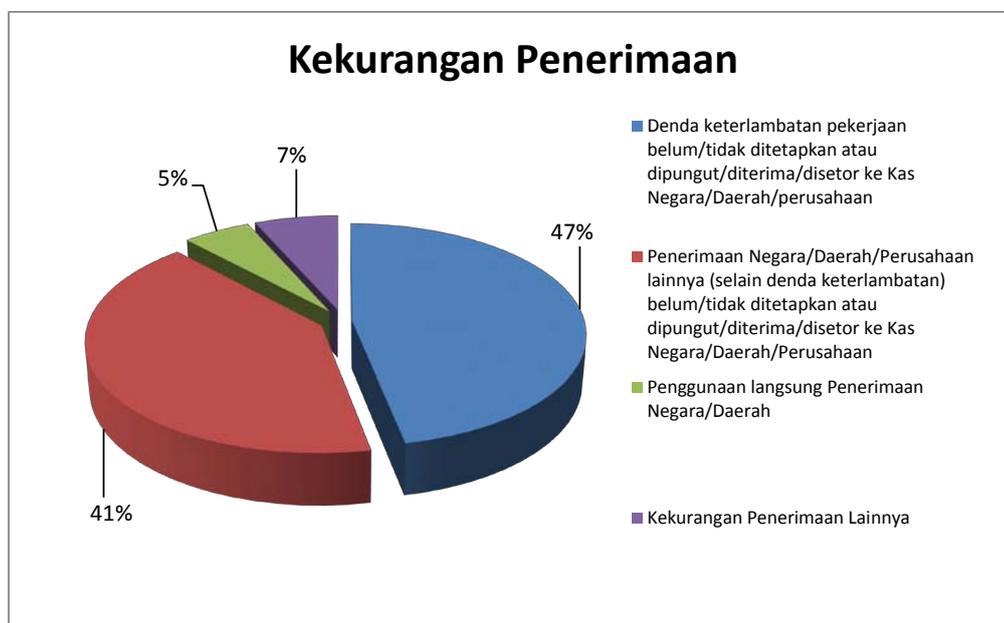
- **Kasus kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 48 kasus (36%) senilai Rp78.643,12 juta yang terjadi di 33 entitas. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal terutama pembangunan gedung yang sudah selesai dikerjakan tetapi pembayaran belum lunas (kurang dari 95%);
- **Kasus aset berupa tanah, kendaraan, dan aset lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 31 kasus (24%) senilai Rp568.714,93 juta yang terjadi di 30 entitas;
- **Kasus piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 16 kasus (12%) senilai Rp1.716.679,49 juta yang terjadi di 14 entitas; dan

- **Kasus potensi kerugian lainnya** sebanyak 37 kasus (28%) senilai Rp103.421,32 juta, di antaranya kasus aset tetap berupa mesin atau peralatan tidak diketahui keberadaannya dan kasus rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan. Kasus lainnya yang sering ditemukan adalah pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang, pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan, dan pembelian aset yang berstatus sengketa.

Kekurangan Penerimaan

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 319 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp154.115,89 juta. Persentase kasus yang terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan di atas disajikan pada Lampiran 2. Kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu:

- **Kasus denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan** sebanyak 149 kasus (47%) senilai Rp53.865,07 juta yang terjadi di 85 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pelaksanaan pekerjaan terlambat dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan;
- **Kasus penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan** sebanyak 132 kasus (41%) senilai Rp69.715,11 juta yang terjadi di 73 entitas. Kasus yang terjadi antara lain pencairan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang wanprestasi, penerimaan retribusi daerah, dan pajak belum disetor ke kas negara;

- **Kasus penggunaan langsung penerimaan negara/daerah** sebanyak 17 kasus (5%) senilai Rp11.996,25 juta yang terjadi di 15 entitas. Kasus yang terjadi adalah penggunaan langsung atas pendapatan retribusi dan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda); dan
- **Kasus kekurangan penerimaan lainnya** sebanyak 21 kasus (7%) senilai Rp18.539,46 juta, di antaranya kasus pengenaan tarif pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih rendah dari ketentuan, kasus penerimaan negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak, dan dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah.

Pengembalian ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan

Dari kasus kerugian dan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.195 kasus senilai Rp3.274.023,68 juta, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp101.000,87 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp27.840,84 juta, potensi kerugian senilai Rp67.078,06 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp6.081,97 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Hasil pemeriksaan laporan keuangan selama Semester II Tahun 2013 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa temuan SPI sebanyak 1.448 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 2.165 kasus senilai Rp3.740.991,02 juta, dengan perincian per entitas pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Entitas

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	SPI	Ketidakpatuhan	
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Pusat	48	25	1.719.361,02
II	Daerah	1.367	2.114	2.017.963,68
1	Provinsi	116	206	1.027.247,62
2	Kabupaten	1.107	1.694	928.250,74
3	Kota	144	214	62.465,32
III	BUMN	7	5	-
IV	BUMD	26	21	3.666,32
	Jumlah	1.448	2.165	3.740.991,02

Gambaran opini dan kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

BPK memberikan opini WTP untuk LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012 dan opini TMP untuk LK BP Batam Tahun 2012.

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi antara lain kasus pencatatan tidak/belum dilakukan atau belum akurat di antaranya penyajian aset tetap dan aset tetap tidak dapat ditelusuri, tidak diselenggarakannya pencatatan atas persediaan, dan kesalahan penganggaran belanja barang pada beberapa unit pelayanan teknis (UPT). Selain itu kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak melakukan pemutakhiran data informasi dan pencatatan pada buku kas dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain kasus potensi kerugian senilai Rp1.697.115,43 juta, di antaranya piutang negara dari pokok utang PT *Trans-Pasific Petrochemical Indotama* (PT TPPI) berpotensi tidak tertagih.

2. Pemerintah Daerah

Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD.

Pada pemerintah daerah, kelemahan SPI yang banyak terjadi adalah kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yaitu sebanyak 568 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan. Kelemahan SPI lainnya yang terjadi adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, dan entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.

Pada pemerintah daerah, kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sering mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi yang terjadi antara lain

- Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 739 kasus senilai Rp652.096,90 juta.
- Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Opini atas LK Perum PFN selama 4 tahun berturut-turut yaitu Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010 adalah TMP. Opini TMP diberikan karena adanya ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya Perum PFN menanggung denda keterlambatan atas hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dikenakan sanksi administrasi/denda di Tahun 2007. Hal tersebut terjadi juga pada LK Perum PFN Tahun 2008, Tahun 2009, dan Tahun 2010.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut oleh Perum PFN dari Duta Visual Nusantara (TV 7) Tahun 2009 senilai Rp46,05 juta belum disetor ke kas negara setelah masa pajak, sehingga berpotensi terkena sanksi denda administrasi atas keterlambatan penyetoran PPN yang sudah dipungut.

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BPK memberikan opini WDP pada LK PDAM Kota Padang Tahun 2012 dan opini TMP pada LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012.

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp285,75 juta di antaranya belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi, dan kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

BAB 3

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

- 3.1 Pada Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa 108 LKPD Tahun 2012, jumlah pemerintah daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 adalah 529 yaitu pemerintah provinsi 34, pemerintah kabupaten 402, dan pemerintah kota 93, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2012 hanya sebanyak 524 pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota.
- 3.2 Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPD berdasarkan pada; (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas atau kehandalan SPI.
- 3.3 Cakupan pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 meliputi neraca dan laporan realisasi anggaran (LRA). Cakupan pemeriksaan neraca 108 LKPD meliputi aset senilai Rp293,99 triliun, kewajiban senilai Rp2,71 triliun, dan ekuitas senilai Rp291,34 triliun. Sedangkan cakupan pemeriksaan atas LRA 108 LKPD meliputi pendapatan senilai Rp122,67 triliun, belanja senilai Rp115,91 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp20,16 triliun.

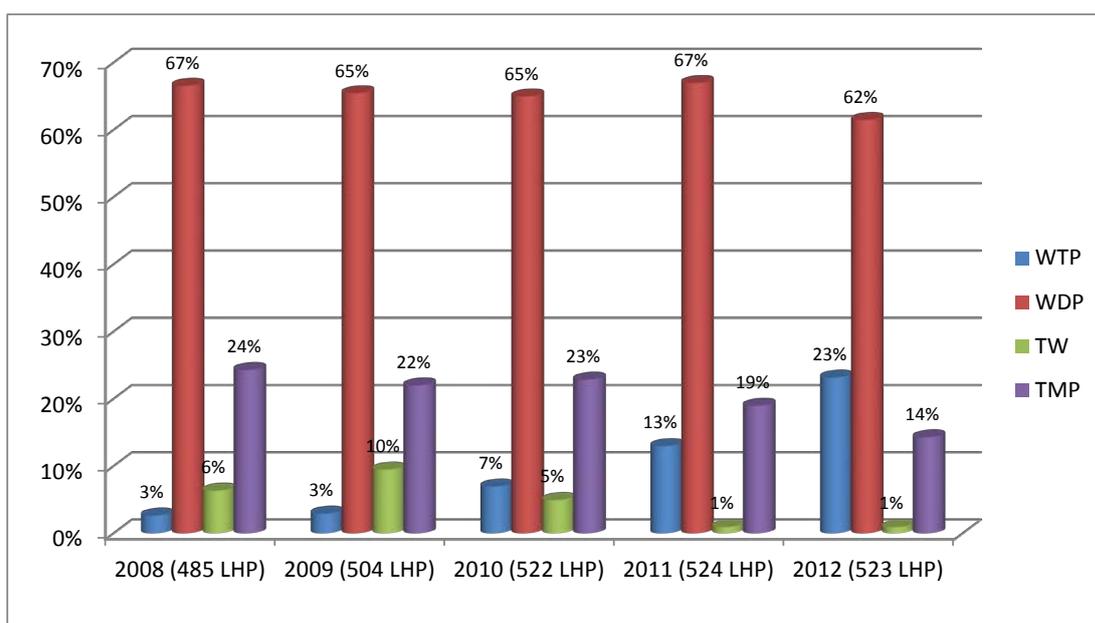
Hasil Pemeriksaan

- 3.4 Hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD disajikan dalam 3 bagian yaitu opini, SPI, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini

- 3.5 Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cermin bagi kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan. Adanya kenaikan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP secara umum menggambarkan **adanya perbaikan** yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- 3.6 Terhadap 108 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 7 LKPD, opini WDP atas 52 LKPD, opini TW atas 2 LKPD, dan opini TMP atas 47 LKPD.
- 3.7 Perkembangan Opini LKPD dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008 s.d. Tahun 2012



3.8 Rincian opini untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Opini LKPD Tahun 2008 s.d. 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Pemerintahan	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	Tahun	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP	Jml	WTP	WDP	TW	TMP
2008	0	24	1	8	33	6	235	26	96	363	7	64	4	14	89
	0%	73%	3%	24%	100%	2%	65%	7%	26%	100%	8%	72%	4%	16%	100%
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	252	23	105	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	267	6	89	398	21	63	2	7	93
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	253	6	66	397	31	55	0	7	93
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	33%	59%	0%	8%	100%
2012 (sem I 2013)	16	9	0	1	26	67	212	4	26	309	30	46	0	4	80
	61%	35%	0%	4%	100%	22%	69%	1%	8%	100%	38%	57%	0%	5%	100%
2012 (sem II 2013)	1	2	0	4	7	5	41	2	40	88	1	9	0	3	13
	14%	29%	0%	57%	100%	7%	46%	2%	45%	100%	8%	69%	0%	23%	100%

3.9 Atas 108 LKPD Tahun 2012, sebanyak satu LKPD mengalami peningkatan opini dari TMP menjadi WTP dan dua LKPD dari WDP menjadi WTP. Kenaikan opini tersebut disebabkan entitas telah melaksanakan perbaikan kelemahan dalam LKPD tahun sebelumnya di antaranya telah melakukan hal-hal berikut, yaitu: (1) penyusunan bukti pertanggungjawaban untuk belanja barang dan jasa; (2) penyesuaian realisasi belanja subsidi sesuai dengan substansi kegiatan; (3) penyusunan bukti realisasi belanja modal; (4) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak dan piutang retribusi; (5) penatausahaan dan pelaporan persediaan; (6) inventarisasi aset tetap dan aset lain-lain berupa ternak gaduh; (7) penyusunan dan pemutakhiran data pegawai.

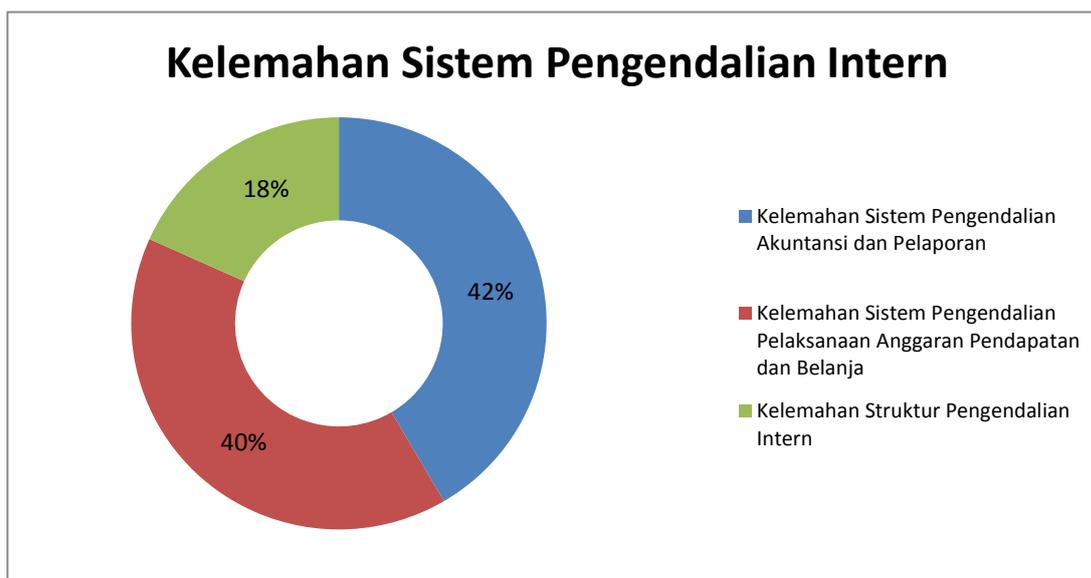
- 3.10 Sebanyak 14 LKPD mengalami peningkatan opini dari TW atau TMP menjadi WDP. Kenaikan opini disebabkan entitas tersebut telah melaksanakan perbaikan kelemahan LKPD tahun sebelumnya di antaranya telah melakukan hal-hal berikut, yaitu: (1) penelusuran dan penjelasan sebagian selisih kas dan SiLPA tahun sebelumnya dan sisanya telah ditindaklanjuti dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); (2) penyajian piutang retribusi sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti yang kompeten; (3) inventarisasi secara memadai terhadap persediaan di akhir tahun; (4) penilaian atas investasi permanen menggunakan metode ekuitas; (5) penerbitan SKTJM kepada Bendahara Pengeluaran yang belum menyetorkan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD); (6) koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam pengelolaan aset tetap.
- 3.11 Sebanyak satu LKPD mengalami penurunan opini dari WDP menjadi TMP dan sebanyak satu LKPD mengalami perubahan opini dari TMP menjadi TW. Penurunan dan perubahan opini tersebut di antaranya disebabkan penyajian Belanja Modal tidak sesuai dengan keterjadian dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta entitas belum melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap Aset Tetap. Selain itu penyajian nilai Persediaan, Piutang Lainnya, Aset Lainnya, dan Kewajiban tidak dapat diyakini kewajarannya.
- 3.12 Atas 52 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya Aset Tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, penatausahaan Kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, Penyertaan Modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo Dana Bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal tidak sesuai dengan ketentuan.
- 3.13 Atas dua LKPD yang memperoleh opini TW, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan akun Aset Tetap, Kas, Belanja Modal, dan SiLPA yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan.
- 3.14 Atas 47 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun Aset Tetap, Kas, Piutang, Persediaan, Investasi Permanen dan non Permanen, Aset Lainnya, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
- 3.15 Dilihat dari tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada Semester II Tahun 2013 terdiri atas 7 LK Pemerintah Provinsi, 88 LK Pemerintah Kabupaten, dan 13 LK Pemerintah Kota.

- 3.16 Di tingkat provinsi terdapat empat LKPD yang memperoleh opini TMP. Di tingkat kabupaten jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP hampir sama yaitu 41 LKPD dan 40 LKPD. Sedangkan di tingkat pemerintah kota, opini yang diperoleh LKPD paling dominan adalah WDP yaitu 9 dari 13 LKPD yang diperiksa.
- 3.17 Rincian opini untuk tiap-tiap entitas disajikan pada Lampiran 3.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 3.18 Hasil pemeriksaan atas 108 LKPD Tahun 2012 menunjukkan terdapat 1.367 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebanyak 568 kasus, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 549 kasus, dan kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 250 kasus. Persentase kelemahan SPI yang terjadi pada LKPD disajikan dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2. Persentase Kelemahan SPI pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012



- 3.19 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat** sebanyak 271 kasus, seperti pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai, realisasi belanja tidak dapat diyakini kewajarannya, penatausahaan kas di bendahara pengeluaran tidak tertib, saldo Investasi non Permanen dalam bentuk dana bergulir belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Kewajiban tidak disajikan dalam neraca per 31 Desember 2012, dan penyajian SiLPA TA 2012 belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 96 entitas.
 - **Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan** sebanyak 220 kasus, seperti Persediaan belum dilakukan *stock opname* pada akhir tahun,

penyajian saldo penyertaan modal belum berdasarkan laporan keuangan *audited*, dan laporan keuangan Tahun 2012 mempertanggungjawabkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Kasus tersebut terjadi di 91 entitas.

- **Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai** sebanyak 66 kasus, seperti sistem pengendalian intern atas persediaan belum memadai, yaitu belum dilakukan cek fisik akhir tahun dan masih terdapat persediaan yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan dan aset tetap yang belum diinventarisasi dan dinilai kembali. Kasus tersebut terjadi di 41 entitas.
- **Perencanaan kegiatan tidak memadai** sebanyak 210 kasus, seperti penganggaran dan realisasi pembayaran Utang Tahun Anggaran 2011 dilakukan melalui Belanja Modal Tahun Anggaran 2012, realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk Belanja tunjangan kepala dan aparat desa, bantuan stimulan kepada pemuda desa dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK); pengeluaran Pembiayaan salah dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah salah dianggarkan pada Belanja Modal; Belanja Barang dan Jasa, Bantuan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Hibah belum disajikan dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, belanja bantuan sosial tidak didukung dengan proposal, dan kontrak belanja modal atas 11 paket pekerjaan tanpa didukung ketersediaan anggaran dan realisasi pembayaran mendahului anggaran. Kasus tersebut terjadi di 98 entitas.
- **Entitas tidak memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur** sebanyak 136 kasus, seperti belum ada SOP dalam pengelolaan dan penatausahaan persediaan sehingga persediaan belum dilaporkan secara lengkap. Belum ada SOP atau peraturan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, tatacara pertanggungjawaban hibah, pengelolaan belanja bantuan sosial, pengelolaan dan penatausahaan pajak dan retribusi daerah, dan pengendalian dan manajemen kas. Kasus tersebut terjadi di 67 entitas.
- **Kelemahan SPI lainnya** sebanyak 464 kasus, di antaranya seperti pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, dan satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

Penyebab

- 3.20 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

- 3.21 Selain itu, kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dan belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP sebelumnya.

Rekomendasi

- 3.22 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
- 3.23 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan yang formal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP sebelumnya.
- 3.24 Daftar kelompok dan jenis temuan berdasarkan pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 4 dan daftar kelompok temuan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 3.25 Hasil pemeriksaan keuangan Semester II Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 2.114 kasus senilai Rp2.017.963,68 juta, yang disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>			
1	Kerugian Daerah	739	652.096,90
2	Potensi Kerugian Daerah	130	768.666,58
3	Kekurangan Penerimaan	308	133.531,48
4	Kelemahan Administrasi	820	-
5	Ketidakhormatan	46	24.071,07
6	Ketidakefektifan	71	439.597,65
Jumlah		2.114	2.017.963,68

- 3.26 Hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat pemerintah provinsi (7 provinsi), pemerintah kabupaten (88 kabupaten), dan pemerintah kota (13 kota) disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2012 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
<i>Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:</i>									
1	Kerugian Daerah	72	111.109,41	598	518.329,75	69	22.657,74	739	652.096,90
2	Potensi Kerugian Daerah	14	607.663,04	98	142.967,39	18	18.036,15	130	768.666,58
3	Kekurangan Penerimaan	31	30.211,07	248	96.675,96	29	6.644,45	308	133.531,48
4	Kelemahan Administrasi	73	-	661	-	86	-	820	-
5	Ketidakhematan	7	4.175,90	35	15.563,76	4	4.331,41	46	24.071,07
6	Ketidakefektifan	9	274.088,20	54	154.713,88	8	10.795,57	71	439.597,65
Jumlah		206	1.027.247,62	1.694	928.250,74	214	62.465,32	2.114	2.017.963,68

Kerugian Daerah (739 kasus senilai Rp652.096,90 juta)

- 3.27 Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan adanya kerugian daerah sebanyak 739 kasus senilai Rp652.096,90 juta yang terjadi di 107 entitas, dan di antaranya berupa indikasi kerugian daerah sebanyak 363 (49,12%) kasus senilai Rp310.779,65 juta.
- 3.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 143 kasus senilai Rp100.764,25 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja modal, seperti volume pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jalan dilaksanakan tidak sesuai kontrak, pembayaran pekerjaan pembangunan gedung/peningkatan jalan melebihi seharusnya, dan kekurangan volume pada beberapa paket pekerjaan. Kasus tersebut terjadi di 75 entitas, di antaranya Kabupaten Nduga senilai Rp26,14 miliar, Kabupaten Paser senilai Rp7,90 miliar, Provinsi Maluku Utara pada proyek pembangunan rumah sakit umum senilai Rp3,97 miliar dan proyek peningkatan jalan senilai Rp3,81 miliar, dan Kabupaten Mamberamo Tengah senilai Rp2,34 miliar;
- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan** sebanyak 141 kasus senilai Rp85.878,28 juta. Kasus tersebut terjadi di 68 entitas, di antaranya pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2011 dan 2012 senilai Rp2,51 miliar tidak sesuai ketentuan terjadi di Kabupaten Deli Serdang, kelebihan pembayaran pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun senilai Rp3,23 miliar di Kabupaten Kutai Kartanegara, realisasi belanja pada sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan senilai Rp12,12 miliar di Kabupaten Tolikara, dan pembayaran

tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp4,58 miliar tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Sorong.

- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang** sebanyak 103 kasus senilai Rp42.652,59 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa, seperti pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Kasus tersebut terjadi di 59 entitas, di antaranya di Kabupaten Mamberamo Tengah senilai Rp5,89 miliar, Provinsi Papua pada proyek pembangunan jembatan dan jalan senilai Rp4,37 miliar, Kabupaten Minahasa Utara senilai Rp2,83 miliar, dan Kabupaten Deli Serdang senilai Rp2,50 miliar.
- **Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan** sebanyak 67 kasus senilai Rp30.493,66 juta, seperti bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak valid dan melebihi nilai pertanggungjawaban yang sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 56 entitas, di antaranya di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp4,50 miliar, Provinsi Maluku senilai Rp3,51 miliar, dan Kabupaten Biak Numfor senilai Rp1,39 miliar.
- **Belanja perjalanan dinas fiktif** sebanyak 51 kasus senilai Rp44.351,93 juta, seperti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan, tiket pesawat yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban tidak terdaftar pada maskapai penerbangan yang bersangkutan, dan perjalanan dinas berindikasi tidak dilaksanakan. Kasus tersebut terjadi di 45 entitas, di antaranya di Provinsi Papua Barat senilai Rp11,41 miliar, Kabupaten Kutai Timur senilai Rp4,35 miliar, Kabupaten Deli Serdang senilai Rp4,18 miliar, dan Kabupaten Nias Selatan senilai Rp3,28 miliar.
- **Kerugian lainnya** sebanyak 234 kasus senilai Rp347.956,19 juta, di antaranya pemahalan harga (*mark up*), dan pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan, seperti penetapan harga satuan dalam kontrak lebih tinggi dibandingkan dengan standar harga satuan di Kabupaten Seram Bagian Timur senilai Rp6,60 miliar dan Provinsi Papua senilai Rp3,03 miliar serta pembayaran honor tidak sesuai ketentuan di Kabupaten Lanny Jaya senilai Rp6,75 miliar dan Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp4,32 miliar.

3.29 Dari kasus-kasus kerugian daerah senilai Rp652.096,90 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp27.834,71 juta, yang berasal dari pemerintah provinsi senilai Rp14.465,16 juta, kabupaten senilai Rp11.066,16 juta, dan kota senilai Rp2.303,39 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp9.622,95 juta, Provinsi Maluku senilai Rp4.166,81 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp2.062,11 juta.

Penyebab

- 3.30 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.31 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar menetapkan peraturan tentang perjalanan dinas, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.
- 3.32 Daftar kelompok dan jenis temuan kerugian daerah disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kerugian daerah menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Potensi Kerugian Daerah (130 kasus senilai Rp768.666,58 juta)

- 3.33 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012 pada 108 pemerintah daerah, menemukan potensi kerugian daerah sebanyak 130 kasus senilai Rp768.666,58 juta.
- 3.34 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya** sebanyak 48 kasus senilai Rp78.643,12 juta, seperti pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan swakelola tidak sesuai dengan ketentuan, dan uang muka pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan belum dapat ditarik kembali. Kasus tersebut terjadi di 33 entitas, di antaranya di Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp24,91 miliar, Kabupaten Paser senilai Rp13,00 miliar, dan Kabupaten Nduga senilai Rp7,70 miliar;
 - **Aset berupa tanah, kendaraan dan aset lainnya dikuasai pihak lain** sebanyak 30 kasus senilai Rp567.038,08 juta. Kasus tersebut terjadi di 29 entitas, di antaranya di Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp402,12 miliar, Provinsi Maluku senilai Rp83,12 miliar, dan Kabupaten Nduga senilai Rp39,81 miliar;

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih** sebanyak 15 kasus senilai Rp19.564,06 juta. Kasus tersebut terjadi di 13 entitas, di antaranya di Kabupaten Malinau senilai Rp3,59 miliar, Kabupaten Halmahera Barat senilai Rp3,28 miliar, dan Kabupaten Aceh Timur senilai Rp2,02 miliar;
- **Aset berupa mesin, peralatan dan aset lainnya tidak diketahui keberadaannya** sebanyak 10 kasus senilai Rp29.369,87 juta. Kasus tersebut terjadi di 10 entitas, di antaranya Kabupaten Wondama senilai Rp17,75 miliar, Kota Ambon senilai Rp6,27 miliar, dan Kabupaten Kutai Barat Rp1,29 miliar;
- **Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan** sebanyak 5 kasus senilai Rp1.331,72 juta. Kasus tersebut terjadi di 5 entitas, di antaranya di Kabupaten Maybrat senilai Rp642,38 juta, Kabupaten Sumba Timur senilai Rp532,78 juta; dan Kabupaten Nias Barat senilai Rp72,22 juta; dan
- **Potensi kerugian daerah lainnya** sebanyak 22 kasus senilai Rp72.719,73 juta. Kasus tersebut terjadi di 20 entitas, di antaranya realisasi keuangan belanja barang atas pekerjaan pembangunan jalan belum sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan pada saat pembayaran senilai Rp52,08 miliar di Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berpotensi menanggung kerugian senilai Rp4,20 miliar atas penyertaan modal pada PT Gemilang Citra Mandiri yang tidak beroperasi lagi sejak Tahun 2006.

3.35 Dari kasus-kasus potensi kerugian daerah senilai Rp768.666,58 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas daerah atau penyerahan aset senilai Rp67.078,06 juta, yang berasal dari pemerintah provinsi senilai Rp66.501,18 juta, kabupaten senilai Rp501,28 juta, dan kota senilai Rp75,60 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp66.501,18 juta, Kabupaten Waropen senilai Rp396,27 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp85,73 juta.

Penyebab

3.36 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.37 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 3.38 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab agar meningkatkan upaya penyelesaian sengketa, memverifikasi tunggakan yang tidak dapat diyakini dan mengintensifkan penagihan, serta mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah untuk mencegah terjadinya kerugian daerah.
- 3.39 Daftar kelompok dan jenis temuan potensi kerugian disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan potensi kerugian menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kekurangan Penerimaan (308 kasus senilai Rp133.531,48 juta)

- 3.40 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012 pada 108 pemerintah daerah, menemukan kekurangan penerimaan sebanyak 308 kasus senilai Rp133.531,48 juta.
- 3.41 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah** sebanyak 147 kasus senilai Rp43.836,88 juta, yang terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemborongan pekerjaan yang mengalami keterlambatan. Kasus tersebut terjadi di 83 entitas, di antaranya di Provinsi Papua Barat senilai Rp3,46 miliar, Kabupaten Manggarai Timur senilai Rp1,66 miliar, dan Kabupaten Mamberamo Tengah senilai Rp1,43 miliar;
 - **Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah** sebanyak 124 kasus senilai Rp64.025,71 juta, seperti kurang bayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), penerimaan retribusi, pajak mineral bukan logam dan batuan belum dipungut dan kurang ditetapkan, dan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas pemutusan kontrak belum dicairkan. Kasus tersebut terjadi di 69 entitas, di antaranya di Kabupaten Kutai Timur senilai Rp10,23 miliar, Kabupaten Aceh Timur senilai Rp4,60 miliar, dan Kabupaten Deli Serdang senilai Rp3,74 miliar;

- **Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah** sebanyak 17 kasus senilai Rp11.996,25 juta. Kasus tersebut terjadi di 15 entitas, di antaranya di Kabupaten Kutai Timur senilai Rp7,16 miliar, Kabupaten Paser senilai Rp1,20 miliar, dan Kabupaten Konawe Utara senilai Rp957,84 juta;
- **Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan** sebanyak 9 kasus senilai Rp6.217,22 juta. Kasus tersebut terjadi di 7 entitas, di antaranya di Kabupaten Konawe Utara senilai Rp2,82 miliar, Kabupaten Paser senilai Rp690,47 juta, Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp622,50 juta, dan Kota Banjarbaru senilai Rp601,55 juta;
- **Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak** sebanyak 7 kasus senilai Rp6.752,15 juta, seperti sisa dana percepatan pembangunan dan infrastruktur daerah (DPPID) belum dikembalikan ke kas negara. Kasus tersebut terjadi di 7 entitas, di antaranya di Kabupaten Landak senilai Rp2,12 miliar, Kabupaten Aceh Timur senilai Rp1,52 miliar, dan Provinsi NTT senilai Rp1,08 miliar; dan
- **Kekurangan penerimaan lainnya** sebanyak 4 kasus senilai Rp703,27 juta terjadi di 4 entitas, di antaranya di Kabupaten Minahasa Selatan, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah senilai Rp292,41 juta.

3.42 Dari kasus-kasus kekurangan penerimaan senilai Rp133.531,48 juta tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset senilai Rp6.081,97 juta, yaitu dari pemerintah provinsi senilai Rp3.739,53 juta, kabupaten senilai Rp1.955,32 juta, dan kota senilai Rp387,12 juta. Entitas yang telah melakukan penyetoran uang/penyerahan aset tersebut di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp3.739,53 juta, Kabupaten Kutai Timur senilai Rp363,48 juta, dan Kota Tarakan senilai Rp247,83 juta.

Penyebab

3.43 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendataan, penetapan, pemungutan, pelaporan dan penerimaan pajak dan retribusi sesuai ketentuan, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

3.44 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan.

- 3.45 Daftar kelompok dan jenis temuan kekurangan penerimaan disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan kekurangan penerimaan menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Kelemahan Administrasi (820 kasus)

- 3.46 Hasil pemeriksaan atas LKPD pada 108 pemerintah daerah, menemukan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan administrasi sebanyak 820 kasus.

- 3.47 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) selain perjalanan dinas** sebanyak 331 kasus, seperti pertanggungjawaban belanja tidak tertib, laporan pertanggungjawaban bantuan hibah belum diserahkan, sisa dana Jamkesmas/Jampersal dan program jaminan kesehatan masyarakat umum (PJKMU) belum dipertanggungjawabkan dan realisasi dana tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kasus tersebut terjadi di 102 entitas.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah** sebanyak 109 kasus, seperti pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap tidak tertib. Kasus tersebut terjadi di 81 entitas.
- **Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah** sebanyak 66 kasus, seperti aset berupa tanah belum bersertifikat dan kendaraan bermotor belum memiliki bukti kepemilikan. Kasus tersebut terjadi di 60 entitas.

Penyebab

- 3.48 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang milik daerah, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak

cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- 3.50 Daftar kelompok dan jenis temuan administrasi disajikan dalam Lampiran 5 dan daftar kelompok temuan administrasi menurut entitas disajikan dalam Lampiran 6.

Ketidakhematan dan Ketidakefektifan

- 3.51 Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012, BPK juga menemukan adanya ketidakhematan sebanyak 46 kasus senilai Rp24.071,07 juta yang terjadi di 26 pemerintah daerah dan ketidakefektifan sebanyak 71 kasus senilai Rp439.597,65 juta yang terjadi di 46 pemerintah daerah.

BAB 4

Laporan Keuangan Badan Lainnya

- 4.1 Pada Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 9 Laporan Keuangan Badan Lainnya, yang meliputi Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (LK BP Batam) Tahun 2012, Laporan Keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LK BP MIGAS) Tahun 2011 dan Tahun 2012, Laporan Keuangan Perum Produksi Film Negara (LK Perum PFN) Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010. Selain itu BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (LK PDAM) Kota Padang Tahun 2012 dan LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012.
- 4.2 Pemeriksaan keuangan atas Badan Lainnya bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.
- 4.3 Cakupan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Lainnya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta laporan arus kas. Rincian cakupan pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya tersebut terdiri dari aset senilai Rp22,91 triliun, kewajiban senilai Rp7,45 triliun, ekuitas senilai Rp15,46 triliun, pendapatan senilai Rp3,71 triliun, biaya senilai Rp3,27 triliun dan laba senilai Rp0,44 miliar.

Hasil pemeriksaan

- 4.4 Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Badan Lainnya mengungkapkan sebanyak 132 kasus senilai Rp1.723.027,34 juta yang merupakan temuan SPI sebanyak 81 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 51 kasus senilai Rp1.723.027.34 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kelompok Temuan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Tema	Tahun /Tahun Buku	SPI		
		Kasus	Kasus	Nilai
BP Batam	2012	21	9	4.068,44
BP MIGAS	2011	14	8	6,13
	2012	13	8	1.715.286,45
Perum PFN	2007	3	1	-
	2008	2	1	-
	2009	1	1	-
	2010	1	2	-
PDAM Kota Padang	2012	16	12	3.541,93
PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang	2012	10	9	124,39
Jumlah		81	51	1.723.027,34

LK BP Batam Tahun 2012

Opini

- 4.5 Laporan hasil pemeriksaan atas LK BP Batam Tahun 2012, BPK memberikan opini TMP karena laporan keuangan menyajikan saldo Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) yang tidak sama dengan saldo akhir, saldo Piutang dari kegiatan operasional BLU dan Piutang jangka panjang lainnya tidak seluruhnya didukung dengan data piutang, saldo Persediaan obat dan peralatan kesehatan tidak didukung dengan hasil inventarisasi fisik dan saldo aset tetap tidak didukung dengan rincian aset, sehingga laporan keuangan BP Batam tidak dapat diyakini kewajarannya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 4.6 Hasil pemeriksaan SPI atas LK BP Batam Tahun 2012 menunjukkan terdapat 21 kasus kelemahan SPI, meliputi 9 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 4 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 7.
- 4.7 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya penyajian aset tetap pada neraca berpotensi salah saji dan tidak dapat ditelusuri, tidak diselenggarakan pencatatan atas Persediaan, kesalahan penganggaran belanja barang pada beberapa Unit Pelayanan Teknis (UPT) BP Batam, pendapatan dari penjualan sisa dan bahan pembangunan Dermaga Pelabuhan Batu Ampar belum terealisasi, pengalokasian lahan tidak sesuai ketentuan jangka waktu maksimal yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan permohonan alokasi lahan.

- 4.8 Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum melakukan rekonsiliasi secara optimal, belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4.9 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepala entitas yang diperiksa antara lain agar memerintahkan Direktur Pengelolaan Lahan untuk menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 4.10 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 9 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4.068,44 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp60,15 juta. Rincian kelompok temuan dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.
- 4.11 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya pembayaran jasa manajemen bagi Pelaksana Harian Direktur Rumah Sakit tidak sesuai ketentuan selama Tahun 2012 senilai Rp60,15 juta, aset kendaraan dan rumah dikuasai pihak lain senilai Rp1,67 miliar, keterlambatan pembayaran *invoice* dan penyampaian laporan pendapatan bulanan oleh pihak penyewa senilai Rp2,33 miliar dan uang panjar/uang muka yang digunakan untuk operasional Rumah Sakit Badan Pengusaha (RSBP) belum dipertanggungjawabkan dan dokumen kepemilikan aset kendaraan bermotor tidak ditemukan.
- 4.12 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku, dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.
- 4.13 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku.

LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012

Opini

- 4.14 BPK telah melakukan pemeriksaan atas LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan memberikan opini WTP atas kedua laporan keuangan tersebut.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 4.15 Hasil pemeriksaan SPI atas LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012 menunjukkan terdapat 27 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 12 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 3 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 7.
- 4.16 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya Kantor Perwakilan BP MIGAS tidak melakukan pemutakhiran data dan informasi atas pelaksanaan kegiatannya, sehingga pencatatan dan pelaporan tidak berdasarkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (SI AK), pencatatan selisih kurs Tahun 2011 tidak sesuai dengan surat keputusan Kepala BP MIGAS, realisasi pembayaran perjalanan dinas yang melebihi anggaran yang disetujui oleh Kemenkeu dan pencatatan pada buku kas tidak mencantumkan nomor register sebagaimana yang tercantum dalam dokumen bukti pengeluaran kas.
- 4.17 Kasus-kasus kelemahan SPI terjadi karena pejabat yang berwenang belum melakukan rekonsiliasi secara optimal terkait pencatatan, belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4.18 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BP MIGAS antara lain agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 4.19 Hasil pemeriksaan LK BP MIGAS Tahun 2011 dan Tahun 2012 mengungkapkan 16 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1.715.292,58 juta. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.
- 4.20 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya terdapat selisih lebih pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2011 senilai Rp6,13 juta, terdapat piutang negara dari pokok utang PT TPPI yang berpotensi tidak tertagih senilai USD139.233,36 ribu atau Rp1.697.115,43 juta, pelaksanaan proses pengadaan tidak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dan Berita Acara penyelesaian pekerjaan untuk renovasi *Fit Out* atas ruangan kantor yang disewa BP Migas tidak dibuat sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan.
- 4.21 Dari kasus kerugian negara atas LK BP MIGAS senilai Rp6,13 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp6,13 juta pada tanggal 25 April 2013.

- 4.22 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terjadi karena Pejabat yang bertanggung jawab dan Panitia Penerima Barang dalam melakukan tugasnya tidak memahami ketentuan yang berlaku serta lemahnya dalam pengawasan dan pengendalian.
- 4.23 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BP MIGAS antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan.

Perum Produksi Film Negara (Perum PFN) Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010

Opini

- 4.24 BPK telah melakukan pemeriksaan atas 4 LK Perum PFN yang meliputi Laporan Keuangan Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 dan memberikan opini TMP atas keempat laporan keuangan tersebut karena adanya kesangsian besar mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

- 4.25 Hasil pemeriksaan SPI atas LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 menunjukkan terdapat 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 7.
- 4.26 Kasus-kasus kelemahan SPI di antaranya dana pinjaman dengan penerimaan piutang dagang sebagian besar telah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pada LK Perum PFN Tahun 2007. Kelemahan SPI lainnya adalah Perum PFN menanggung denda keterlambatan atas hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dikenakan sanksi administrasi/denda Tahun 2007. Hal tersebut juga terjadi pada LK Perum PFN Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010.
- 4.27 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena Manajemen Perum PFN tidak memiliki rencana dan pengendalian yang jelas atas pemanfaatan dana pinjaman dan belum mematuhi ketentuan perpajakan.
- 4.28 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Perum PFN agar mempertanggungjawabkan penggunaan dana pinjaman kepada Menteri BUMN dan mengupayakan pembayaran kewajiban pajak dengan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 4.29 Hasil pemeriksaan LK Perum PFN Tahun 2007, Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 mengungkapkan 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.
- 4.30 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya PPN yang sudah dipungut oleh Perum PFN dari Duta Visual Nusantara (TV 7) Tahun 2009 senilai Rp46,05 juta belum disetor ke kas negara setelah masa pajak, sehingga berpotensi terkena sanksi denda administrasi atas keterlambatan penyetoran PPN yang sudah dipungut. Kasus tersebut terjadi pada LK Perum PFN Tahun 2009 dan Perum PFN tidak memungut PPN dan Pajak Penghasilan (PPH) dari beberapa pihak kedua sehingga beban pajak menjadi kewajiban Perum PFN, yang terjadi pada LK Perum PFN Tahun 2007 dan Tahun 2008.
- 4.31 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan pengendalian, serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 4.32 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Perum PFN agar melakukan pengawasan dan pengendalian secara memadai, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

LK PDAM Kota Padang Tahun 2012 dan PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012

Opini

- 4.33 Hasil Pemeriksaan atas 2 LK PDAM Tahun 2012, BPK memberikan opini WDP atas LK PDAM Kota Padang, dan opini TMP atas LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

Opini WDP diberikan atas LK PDAM Kota Padang antara lain karena saldo persediaan tidak didukung dengan dokumen dan catatan, perbedaan pencatatan nilai dan luas tanah antara rincian aset tanah dan laporan keuangan, saldo pembayaran di muka belum diakui dan dianggarkan. Sedangkan opini TMP diberikan atas LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang antara lain karena Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perubahan Tahun 2011 yang belum disahkan, aset tetap tidak dapat teridentifikasi, beban untuk dana *stakeholder* yang tidak dilengkapi dengan bukti yang memadai, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum dan tidak diikat dengan perjanjian.

- 4.34 Hasil pemeriksaan SPI atas LK PDAM Kota Padang dan LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menunjukkan terdapat 26 kasus kelemahan SPI, meliputi 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 6 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja dan 8 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 7.
- 4.35 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya penyajian nilai aset tetap Instalasi Transmisi dan Distribusi, Aset Instalasi Pompa, dan Aset Tetap dalam penyelesaian pada Neraca per 31 Desember 2012 tidak dapat diyakini kewajarannya pada LK PDAM Kota Padang, pelaksanaan kerjasama PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang dengan BRI mengenai penerimaan pembayaran tagihan rekening air dari pelanggan secara *online* tidak disertai dengan kegiatan rekonsiliasi, dan terdapat beberapa realisasi Uang Muka Kerja (UMK) atas kegiatan yang berhubungan dengan bisnis utama PDAM dan kegiatan penunjang yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam standar operasional dan prosedur pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.
- 4.36 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum melakukan rekonsiliasi secara optimal terkait pencatatan, belum menyusun kebijakan internal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4.37 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur PDAM agar menyusun kebijakan internal atas suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian, dan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan satuan kerja terkait secara periodik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- 4.38 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 21 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada LK PDAM Kota Padang dan LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang senilai Rp3.666,32 juta di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp153,12 juta. Rincian kelompok dan jenis temuan dapat dilihat dalam Lampiran 8 dan 9.
- 4.39 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya terdapat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume tiga pekerjaan pemasangan pipa pada PDAM Kota Padang senilai Rp22,63 juta, realisasi biaya Dewan Pengawas Tahun 2012 tidak sesuai ketentuan yang digunakan antara lain untuk gaji Dewan Pengawas, biaya makan dan minum, biaya perjalanan dinas, honor sekretariat, THR, dan tunjangan cuti gaji ke-13 di PDAM Kota Padang senilai Rp153,12 juta, kekurangan pembayaran pajak penghasilan Badan berdasarkan perhitungan laba fiskal pada PDAM Kota Padang senilai Rp2,91 miliar dan saldo UMK di bagian personalia dan administrasi belum semua dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2012 pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang.

- 4.40 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena PPK dan panitia pengadaan tidak memahami ketentuan yang berlaku, dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta lemahnya dalam pengawasan dan pengendalian.
- 4.41 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian perusahaan daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

B

- BLU : Badan Layanan Umum
BP Batam : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BP MIGAS : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Bultek : Buletin Teknis

C

- CaLK : Catatan atas Laporan Keuangan

D

- DOB : Daerah Otonomi Baru
DPPID : Dana Percepatan Pembangunan dan Infrastruktur Daerah
DPPKAD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

J

- Jamkesda : Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas : Jaminan Kesehatan Masyarakat

L

- LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
LK : Laporan Keuangan
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LRA : Laporan Realisasi Anggaran

P

- PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
Perum PFN : Perusahaan Umum Produksi Film Negara
PKJMU : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP : Peraturan Pemerintah

PPh	: Pajak Penghasilan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
R	
RKAP	: Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RSBP	: Rumah Sakit Badan Pengusaha
S	
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SIAK	: Sistem Informasi Akuntansi Keuangan
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	: Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPAP	: Standar Profesional Akuntan Publik
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
T	
THR	: Tunjangan Hari Raya
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
TW	: Tidak Wajar
TPPI	: <i>Trans Pacific Petrochemical Indotama</i>
U	
UMK	: Uang Muka Kerja
UPT	: Unit Pelayanan Teknis
UYHD	: Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
W	
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2013

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	LKPD	LK Badan Lainnya
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>				
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	601	568	33
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	291	271	20
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	229	220	9
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	4	4	-
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	70	66	4
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	7	7	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	582	549	33
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	215	210	5
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan	45	44	1
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	167	157	10
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/D	27	27	-
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	72	65	7
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	56	46	10
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	265	250	15
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	146	136	10
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	95	90	5
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	22	22	-
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	2	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		1.448	1.367	81

Halaman 1 - Lampiran 2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKPD		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan:							
I	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	744	652.448,93	739	652.096,90	5	352,03
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	51	44.351,93	51	44.351,93	-	-
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	38	15.441,59	38	15.441,59	-	-
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	5	3.597,02	5	3.597,02	-	-
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	144	100.786,88	143	100.764,25	1	22,63
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	103	42.652,59	103	42.652,59	-	-
6	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	43	49.386,19	43	49.386,19	-	-
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	31	5.862,32	30	5.752,32	1	110,00
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	67	30.493,66	67	30.493,66	-	-
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	28	23.851,35	27	23.791,20	1	60,15
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	12	11.517,33	12	11.517,33	-	-
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	143	86.037,53	141	85.878,28	2	159,25
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah/perusahaan	1	12.998,98	1	12.998,98	-	-
13	Lain-lain	78	225.471,56	78	225.471,56	-	-
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	132	770.343,43	130	768.666,58	2	1.676,85
			USD 139,233.36		-		USD 139,233.36
	Jumlah Rupiah Total		2.467.458,86		768.666,58		1.698.792,28
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	48	78.643,12	48	78.643,12	-	-
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	5	1.331,72	5	1.331,72	-	-
3	Aset dikuasai pihak lain	31	568.714,93	30	567.038,08	1	1.676,85
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	2.503,52	1	2.503,52	-	-
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	10	29.369,87	10	29.369,87	-	-
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	4	6.567,05	4	6.567,05	-	-
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah/perusahaan	1	1.647,12	1	1.647,12	-	-
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	16	19.564,06	15	19.564,06	1	-
			USD 139,233.36				USD 139,233.36
	Jumlah Rupiah		1.716.679,49				1.697.115,43
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	284,46	1	284,46	-	-
10	Lain-lain	15	61.717,58	15	61.717,58	-	-
III	Kekurangan Penerimaan	319	138.162,93	308	132.450,92	11	5.712,01
			USD 1,308.80		USD 88.65		USD 1,220.15
	Jumlah Rupiah Total		154.115,89		133.531,48		20.584,41
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	149	43.859,49	147	43.836,88	2	22,61
			USD 820.87				USD 820.87
	Jumlah Rupiah		53.865,07		43.836,88		10.028,19
2	Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan	132	69.715,11	124	64.025,71	8	5.689,40

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKPD		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah	17	11.996,25	17	11.996,25	-	-
4	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	1	292,41	1	292,41	-	-
5	Penerimaan Negara/daerah diterima/digunakan oleh instansi yang tidak berhak	7	6.752,15	7	6.752,15	-	-
6	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	9	5.136,66	9	5.136,66	-	-
			USD 88.65		USD 88.65		
	Jumlah Rupiah		6.217,22		6.217,22		
7	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	1	-	-	-	1	-
			USD 399.28				USD 399.28
	Jumlah Rupiah		4.866,82				4.866,82
8	Lain-lain	3	410,86	3	410,86	-	-
IV	Kelemahan Administrasi	851	-	820	-	31	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	37		37		-	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	336		331		5	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	11		11		-	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/daerah/perusahaan)	44		40		4	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	3		2		1	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		1		-	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	116		109		7	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	69		59		10	
9	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-		1	
10	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	47		47		-	
11	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	28		28		-	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	43		43		-	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	19		19		-	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	68		66		2	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	13		13		-	
16	Lain-lain	15		14		1	
V	Ketidakhematan	47	25.609,14	46	24.071,07	1	1.538,07
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	2	393,09	2	393,09	-	-
2	Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga	45	25.216,05	44	23.677,98	1	1.538,07
VI	Ketidakefektifan	72	441.358,20	71	439.597,65	1	1.760,55
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	50	383.604,40	49	381.843,85	1	1.760,55
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3	3.438,89	3	3.438,89	-	-
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	11	53.169,03	11	53.169,03	-	-

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus	Nilai	LKPD		LK Badan Lainnya	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	-	1	-	-	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	146,28	4	146,28	-	-
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	999,60	1	999,60	-	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2	-	2	-	-	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		2.165	2.027.922,63	2.114	2.016.883,12	51	11.039,51
			USD 140,542.16		USD 88.65		USD 140,453.51
Jumlah Rupiah Total			3.740.991,02		2.017.963,68		1.723.027,34
Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		121	27.840,84	120	27.834,71	1	6,13
Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		7	67.078,06	7	67.078,06	-	-
Kekurangan Penerimaan		45	6.081,97	45	6.081,97	-	-
Total Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		173	101.000,87	172	100.994,74	1	6,13

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

**Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2008 s.d. 2012**

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
1	Prov. Aceh											
	LKPD		24		24		24		24		24	
1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP								
3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP								
4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	5	Kab. Aceh Jaya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP								
9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP-DPP
10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP								
11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP								
14	14	Kab. Bireuen	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP								
16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP-DPP
17	17	Kab. Pidie	1	WDP								
18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP*
20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP-DPP
21	21	Kota Langsa	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
2	Prov. Sumatera Utara											
	LKPD		27		29		34		34		34	
1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP								
2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	28	Kab. Dairi	1	WDP								
5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW*
6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP
7	31	Kab. Karo	1	WDP								
8	32	Kab. Labuhanbatu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	34	Kab. Labuhanbatu Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
13	37	Kab. Nias	1	TMP								
14	38	Kab. Nias Barat					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
16	40	Kab. Nias Utara					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
17	41	Kab. Padang Lawas			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
18	42	Kab. Padang Lawas Utara			1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP								
20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP								
22	46	Kab. Simalungun	1	WDP								
23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	50	Kab. Toba Samosir	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
28	52	Kota Gunung Sitoli					1	WDP	1	WDP	1	WDP*
29	53	Kota Medan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP
30	54	Kota Padangsidempuan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
31	55	Kota Pematangsiantar	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WDP
33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP*
34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
3 Prov. Sumatera Barat												
LKPD			20		20		20		20		20	
1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	66	Kab. Pasaman Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
17	75	Kota Pariaman	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
4 Prov. Riau												
LKPD			12		12		13		13		13	
1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP-DPP
2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP*
5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	84	Kab. Kepulauan Meranti					1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP*
7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP
12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	91	Kota Pekanbaru	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5 Prov. Jambi												
LKPD			11		12		12		12		12	
1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	95	Kab. Kerinci	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	103	Kota Sungai Penuh			1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
6 Prov. Sumatera Selatan												
LKPD			16		16		16		16		16	
1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	105	Kab. Banyuasin	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	111	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	112	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
10	113	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
13	116	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	117	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	118	Kota Palembang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
16	119	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7 Prov. Bengkulu												
LKPD			10		11		11		11		11	
1	120	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	121	Kab. Bengkulu Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	122	Kab. Bengkulu Tengah			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
4	123	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	124	Kab. Kaur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
6	125	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
7	126	Kab. Lebong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
8	127	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	128	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	129	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
11	130	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
8 Prov. Lampung												
LKPD			11		12		15		15		15	
1	131	Prov. Lampung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
2	132	Kab. Lampung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WTP
3	133	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WDP
4	134	Kab. Lampung Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	135	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
6	136	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW
7	137	Kab. Mesuji					1	WDP	1	TMP	1	WDP
8	138	Kab. Pesawaran			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
9	139	Kab. Pesisir Barat										***
10	140	Kab. Pringsewu					1	TMP	1	WDP	1	TMP
11	141	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	142	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	143	Kab. Tulang Bawang Barat					1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	144	Kab. Way Kanan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
15	145	Kota Bandar Lampung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WTP
16	146	Kota Metro	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung											
	LKPD		8		8		8		8		8	
1	147	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	148	Kab. Bangka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP
3	149	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	150	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	151	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP
6	152	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	153	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	154	Kota Pangkalpinang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau											
	LKPD		7		8		8		8		8	
1	155	Prov. Kepulauan Riau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	156	Kab. Bintan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
3	157	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	158	Kab. Kepulauan Anambas			1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	159	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	160	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
7	161	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
8	162	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	Prov. DKI Jakarta											
	LKPD		1		1		1		1		1	
1	163	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP
12	Prov. Jawa Barat											
	LKPD		27		27		27		27		27	
1	164	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
2	165	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	166	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	167	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	168	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	169	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	170	Kab. Cianjur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	171	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	172	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	173	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	174	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	175	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	176	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	177	Kab. Pangandaran										***
15	178	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	179	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
17	180	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
18	181	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	182	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	183	Kota Bandung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	184	Kota Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
22	185	Kota Bekasi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	186	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	187	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	188	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	189	Kota Depok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
27	190	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	191	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13 Prov. Jawa Tengah												
LKPD			36		36		36		36		36	
1	192	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
2	193	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	194	Kab. Banyumas	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
4	195	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	196	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	197	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
7	198	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	199	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	200	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
10	201	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	202	Kab. Jepara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
12	203	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	204	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
14	205	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	206	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	207	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
17	208	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	209	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	210	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	211	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	212	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	213	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	214	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	215	Kab. Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
25	216	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	217	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	218	Kab. Tegal	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	219	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
29	220	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	221	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	222	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	223	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	224	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	225	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
35	226	Kota Surakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
36	227	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
14 Prov. D.I. Yogyakarta												
LKPD			6		6		6		6		6	
1	228	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP	1	WTP
2	229	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
3	230	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	231	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	232	Kab. Sleman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP
6	233	Kota Yogyakarta	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP
15	Prov. Jawa Timur											
	LKPD		39		39		39		39		39	
1	234	Prov. Jawa Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WTP
2	235	Kab. Bangkalan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
3	236	Kab. Banyuwangi	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	237	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	238	Kab. Bojonegoro	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	239	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
7	240	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	241	Kab. Jember	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
9	242	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	243	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	244	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	245	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	246	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	247	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
15	248	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
16	249	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
17	250	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	251	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	252	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WDP
20	253	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WDP
21	254	Kab. Pasuruan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	255	Kab. Ponorogo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
23	256	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
24	257	Kab. Sampang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
25	258	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
26	259	Kab. Situbondo	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
27	260	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
28	261	Kab. Trenggalek	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29	262	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WDP
30	263	Kab. Tulungagung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WTP
31	264	Kota Batu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
32	265	Kota Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WTP
33	266	Kota Kediri	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
34	267	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
35	268	Kota Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
36	269	Kota Mojokerto	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP	1	WTP
37	270	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
38	271	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
39	272	Kota Surabaya	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
16	Prov. Banten											
	LKPD		8		9		9		9		9	
1	273	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	274	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	275	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	276	Kab. Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
5	277	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
6	278	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
7	279	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	280	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	281	Kota Tangerang Selatan			1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP-DPP
17	Prov. Bali											
	LKPD		10		10		10		10		10	
1	282	Prov. Bali	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	283	Kab. Badung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
3	284	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	285	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	286	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	287	Kab. Jembrana	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	288	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	289	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	290	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
10	291	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat											
	LKPD		10		11		11		11		11	
1	292	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP	1	WTP
2	293	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
3	294	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
4	295	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	296	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
6	297	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	298	Kab. Lombok Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	299	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
9	300	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	301	Kota Bima	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	302	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur											
	LKPD		20		21		22		22		22	
1	303	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
2	304	Kab. Alor	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
3	305	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	306	Kab. Ende	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
5	307	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	308	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
7	309	Kab. Lembata	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
8	310	Kab. Manggarai	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
9	311	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
10	312	Kab. Manggarai Timur			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
11	313	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
12	314	Kab. Ngada	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	315	Kab. Rote Ndao	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
14	316	Kab. Sabu Raijua					1	WDP	1	WDP	1	WDP*
15	317	Kab. Sikka	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
16	318	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
17	319	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	320	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
19	321	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
20	322	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
21	323	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
22	324	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat											
	LKPD		14		15		15		15		15	
1	325	Prov. Kalimantan Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
2	326	Kab. Bengkayang	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	327	Kab. Kapuas Hulu	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	328	Kab. Kayong Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
5	329	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	330	Kab. Kubu Raya			1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
7	331	Kab. Landak	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
8	332	Kab. Melawi	1	TMP	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP*
9	333	Kab. Pontianak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	334	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	335	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	336	Kab. Sekadau	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP*
13	337	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
14	338	Kota Pontianak	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP
15	339	Kota Singkawang	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
21	Prov. Kalimantan Tengah											
	LKPD		15		15		15		15		15	
1	340	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
2	341	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP	1	WDP*
3	342	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
4	343	Kab. Barito Utara	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP
5	344	Kab. Gunung Mas	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP*
6	345	Kab. Kapuas	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	346	Kab. Katingan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
8	347	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
9	348	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	TMP
10	349	Kab. Lamandau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	350	Kab. Murung Raya	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
12	351	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TW	1	TW	1	TMP
13	352	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
14	353	Kab. Sukamara	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP*
15	354	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP
22	Prov. Kalimantan Selatan											
	LKPD		14		14		14		14		14	
1	355	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	356	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	357	Kab. Banjar	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
4	358	Kab. Barito Kuala	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	359	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	360	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	361	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	362	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
9	363	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP*
10	364	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	365	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	366	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	367	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
14	368	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
23	Prov. Kalimantan Timur											
	LKPD		12		12		12		12		12	
1	369	Prov. Kalimantan Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP*
2	370	Kab. Berau	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
3	371	Kab. Bulungan	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP*
4	372	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP*
5	373	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WTP-DPP*
6	374	Kab. Kutai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP*
7	375	Kab. Paser	1	TW	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP*
8	376	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP*
9	377	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
10	378	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
11	379	Kota Samarinda	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
12	380	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP*
24	Prov. Kalimantan Utara											
	LKPD		2		3		3		3		3	
1	381	Prov. Kalimantan Utara										***
2	382	Kab. Malinau	1	TW	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP*
3	383	Kab. Nunukan	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP*
4	384	Kab. Tana Tidung			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
25	Prov. Sulawesi Utara											
	LKPD		14		16		16		16		16	
1	385	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP-DPP
2	386	Kab. Bolaang Mongondow	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
3	387	Kab. Bolaang Mongondow Selatan			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
4	388	Kab. Bolaang Mongondow Timur			1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP*
6	390	Kab. Kepulauan Sangihe	1	WDP	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP
7	391	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
8	392	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TW
9	393	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
10	394	Kab. Minahasa Selatan	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
11	395	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
12	396	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
13	397	Kota Bitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP-DPP
14	398	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP*
15	399	Kota Manado	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
16	400	Kota Tomohon	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
26	Prov. Sulawesi Tengah											
	LKPD		11		12		12		12		12	
1	401	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
2	402	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
3	403	Kab. Banggai Kepulauan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
4	404	Kab. Buol	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
5	405	Kab. Donggala	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP
6	406	Kab. Morowali	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
7	407	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	408	Kab. Poso	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
9	409	Kab. Sigi			1	TMP	1	WDP	1	WTP-DPP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
10	410	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	411	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	412	Kota Palu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
27 Prov. Sulawesi Selatan												
LKPD			24		25		25		25		25	
1	413	Prov. Sulawesi Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	414	Kab. Bantaeng	1	WDP								
3	415	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	416	Kab. Bone	1	WDP								
5	417	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
6	418	Kab. Enrekang	1	WDP								
7	419	Kab. Gowa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
8	420	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
9	421	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
10	422	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
11	423	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP-DPP
12	424	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
13	425	Kab. Maros	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
14	426	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
15	427	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
16	428	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP								
17	429	Kab. Sinjai	1	WDP								
18	430	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
19	431	Kab. Takalar	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
20	432	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
21	433	Kab. Toraja Utara			1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
22	434	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
23	435	Kota Makassar	1	WDP								
24	436	Kota Palopo	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
25	437	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
28 Prov. Sulawesi Tenggara												
LKPD			13		13		13		13		13	
1	438	Prov. Sulawesi Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
2	439	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
3	440	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
4	441	Kab. Buton Utara	1	TMP								
5	442	Kab. Kolaka	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	443	Kab. Kolaka Utara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
7	444	Kab. Konawe	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	445	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
9	446	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
10	447	Kab. Muna	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
11	448	Kab. Wakatobi	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	449	Kota Baubau	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
13	450	Kota Kendari	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
29 Prov. Gorontalo												
LKPD			7		7		7		7		7	
1	451	Prov. Gorontalo	1	WDP								
2	452	Kab. Boalemo	1	WDP								
3	453	Kab. Bone Bolango	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	454	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
5	455	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP								
6	456	Kab. Pohuwato	1	WDP								
7	457	Kota Gorontalo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
30	Prov. Sulawesi Barat											
	LKPD		6		6		6		6		6	
1	458	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP								
2	459	Kab. Majene	1	WDP								
3	460	Kab. Mamasa	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
4	461	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP-DPP
5	462	Kab. Mamuju Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
6	463	Kab. Polewali Mandar	1	WDP								
31	Prov. Maluku											
	LKPD		9		12		12		12		11	
1	464	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
2	465	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
3	466	Kab. Buru Selatan			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
4	467	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP		**
5	468	Kab. Maluku Barat Daya			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
6	469	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
7	470	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
8	471	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP								
9	472	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
10	473	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
11	474	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
12	475	Kota Tual			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
32	Prov. Maluku Utara											
	LKPD		9		9		10		10		10	
1	476	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
2	477	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
3	478	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP
4	479	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
5	480	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
6	481	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP
7	482	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
8	483	Kab. Pulau Morotai					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
9	484	Kota Ternate	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
10	485	Kota Tidore Kepulauan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
33	Prov. Papua											
	LKPD		22		23		28		30		30	
1	486	Prov. Papua	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
2	487	Kab. Asmat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
3	488	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
4	489	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
5	490	Kab. Deiyai							1	TMP	1	TMP*
6	491	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
7	492	Kab. Intan Jaya							1	TMP	1	TMP*
8	493	Kab. Jayapura	1	WDP								
9	494	Kab. Jayawijaya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	495	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
11	496	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah		Opini Tahun 2008		Opini Tahun 2009		Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012	
12	497	Kab. Lanny Jaya					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
13	498	Kab. Mamberamo Raya			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
14	499	Kab. Mamberamo Tengah					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
15	500	Kab. Mappi	1	TMP								
16	501	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
17	502	Kab. Mimika	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
18	503	Kab. Nabire	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TW*
19	504	Kab. Nduga					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
20	505	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
21	506	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP
22	507	Kab. Puncak					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
23	508	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
24	509	Kab. Sarmi	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
25	510	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
26	511	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
27	512	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
28	513	Kab. Yahukimo	1	TMP								
29	514	Kab. Yalimo					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
30	515	Kota Jayapura	1	WDP								
34 Prov. Papua Barat												
LKPD			10		10		12		12		12	
1	516	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
2	517	Kab. Fakfak	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
3	518	Kab. Kaimana	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP*
4	519	Kab. Manokwari	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
5	520	Kab. Manokwari Selatan										***
6	521	Kab. Maybrat					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
7	522	Kab. Pegunungan Arfak										***
8	523	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
9	524	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
10	525	Kab. Sorong Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
11	526	Kab. Tambrau					1	TMP	1	TMP	1	TMP*
12	527	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
13	528	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
14	529	Kota Sorong	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP*
Jumlah			485		504		522		524		523	

Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)
WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*unqualified opinion with modified wording*)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)
TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer opinion*)
* : Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013
** : Dalam proses penyusunan laporan
*** : Daerah pemekaran baru

Lampiran 4

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Kasus			
		Provinsi	Kabupaten	Kota	Total
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	48	455	65	568
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	23	212	36	271
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	17	182	21	220
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	4	-	4
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	8	50	8	66
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	-	7	-	7
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	50	446	53	549
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	15	173	22	210
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	7	31	6	44
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	6	137	14	157
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	5	18	4	27
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	10	51	4	65
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	36	3	46
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	18	206	26	250
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	9	113	14	136
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	74	9	90
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	17	3	22
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	2	-	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		116	1.107	144	1.367

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan									
I	Kerugian Daerah	72	111.109,41	598	518.329,75	69	22.657,74	739	652.096,90
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	6	13.914,81	36	28.717,92	9	1.719,20	51	44.351,93
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	3	1.158,09	33	14.115,66	2	167,84	38	15.441,59
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	-	-	4	3.423,85	1	173,17	5	3.597,02
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	14	13.314,06	118	85.303,44	11	2.146,75	143	100.764,25
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	11	8.701,10	85	33.699,60	7	251,89	103	42.652,59
6	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	4	9.518,13	36	39.562,86	3	305,20	43	49.386,19
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	335,30	26	4.062,57	3	1.354,45	30	5.752,32
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	9	9.215,82	50	19.116,55	8	2.161,29	67	30.493,66
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	4	8.869,00	22	13.919,62	1	1.002,58	27	23.791,20
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	1.773,24	9	3.980,01	2	5.764,08	12	11.517,33
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	12	18.827,13	114	60.850,15	15	6.201,00	141	85.878,28
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1	12.998,98	-	-	-	-	1	12.998,98
13	Lain-lain	6	12.483,75	65	211.577,52	7	1.410,29	78	225.471,56
II	Potensi Kerugian Daerah	14	607.663,04	98	142.967,39	18	18.036,15	130	768.666,58
1	Kelebihan Pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	5	43.330,33	38	34.956,75	5	356,04	48	78.643,12
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	-	-	4	1.288,41	1	43,31	5	1.331,72
3	Aset dikuasai pihak lain	5	508.356,11	21	57.818,77	4	863,20	30	567.038,08
4	Pembelian aset yang berstatus sengketa	-	-	1	2.503,52	-	-	1	2.503,52
5	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	575,00	7	21.798,55	2	6.996,32	10	29.369,87
6	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	3	685,22	1	5.881,83	4	6.567,05
7	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	-	-	1	1.647,12	-	-	1	1.647,12
8	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2	3.312,21	12	14.746,73	1	1.505,12	15	19.564,06
9	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	-	-	1	284,46	1	284,46
10	Lain-lain	1	52.089,39	11	7.522,32	3	2.105,87	15	61.717,58
III	Kekurangan Penerimaan	31	30.211,07	248	95.595,40	29	6.644,45	308	132.450,92
					USD 88,65				USD 88,65
	Jumlah Rupiah Total	-	30.211,07	-	96.675,96	-	6.644,45	-	133.531,48
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	12	15.529,08	120	27.094,32	15	1.213,48	147	43.836,88
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	16	12.433,18	99	47.089,90	9	4.502,63	124	64.025,71
3	Penggunaan langsung Penerimaan Daerah	1	544,84	15	11.433,05	1	18,36	17	11.996,25
4	Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas Daerah	-	-	1	292,41	-	-	1	292,41
5	Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	1	1.081,47	6	5.670,68	-	-	7	6.752,15
6	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	622,50	4	3.604,18	4	909,98	9	5.136,66
		-	-	-	USD 88,65	-	-	-	USD 88,65
	Jumlah Rupiah		622,50		4.684,74		909,98		6.217,22

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan						Total	
		Provinsi		Kabupaten		Kota		Jumlah Kasus	Nilai
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai		
7	Lain-lain	-	-	3	410,86	-	-	3	410,86
IV	Kelemahan Administrasi	73		661		86		820	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	5		26		6		37	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	28		267		36		331	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		10		-		11	
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	5		30		5		40	
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-		2		-		2	
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	-		1		-		1	
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah	13		86		10		109	
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5		48		6		59	
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5		33		9		47	
10	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		25		2		28	
11	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	2		40		1		43	
12	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		17		1		19	
13	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	5		53		8		66	
14	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	2		10		1		13	
15	Lain-lain	-		13		1		14	
V	Ketidakhematan	7	4.175,90	35	15.563,76	4	4.331,41	46	24.071,07
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	393,09	1	-	-	-	2	393,09
2	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	6	3.782,81	34	15.563,76	4	4.331,41	44	23.677,98
									-
VI	Ketidakefektifan	9	274.088,20	54	154.713,88	8	10.795,57	71	439.597,65
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	9	274.088,20	35	97.966,20	5	9.789,45	49	381.843,85
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	2.529,77	1	909,12	3	3.438,89
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	9	53.072,03	2	97,00	11	53.169,03
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	-	-	1	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	4	146,28	-	-	4	146,28
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	1	999,60	-	-	1	999,60
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	2	-	-	-	2	-
	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	206	1.027.247,62	1.694	927.170,18	214	62.465,32	2.114	2.016.883,12
					USD 88.65				USD 88.65
	Jumlah Rupiah Total		1.027.247,62		928.250,74		62.465,32		2.017.963,68

Keterangan:

1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

2. Dari kasus kerugian negara/daerah/perusahaan tersebut terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 363 kasus senilai Rp310.779,65 juta

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kedapatannya terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Keuangan Daerah				Potensi Kerugian Daerah				Kekurangan Penerimaan			
		Total Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Jumlah Kasus	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kekurangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan									
						Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai				
1	Prov. Aceh	3	37	5	50	6	14	93	45.507,52	37	18.583,19	6	15.052,96	12	11.871,37	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	Prov. Aceh	31	12	16	3	24	26.413,02	9	9.494,78	3	11.313,35	4	5.604,89	8	5.604,89	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Kab. Aceh Selatan	19	6	8	5	8	216,68	3	215,60	-	-	1	1,08	4	1,08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Kab. Aceh Singkil	11	6	4	1	6	760,21	4	760,21	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Kab. Aceh Timur	15	5	9	1	16	9.975,21	4	1.765,34	1	2.028,70	3	6.181,17	8	6.181,17	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	Kab. Bireun	14	5	8	1	16	6.999,05	6	5.283,01	2	1.710,91	1	5,13	7	5,13	7	-	-	-	3	43,62	-	-	-	-				
6	Kab. Simeulue	11	3	5	3	23	1.143,35	11	1.064,25	-	-	3	79,10	9	79,10	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Prov. Sumatera Utara	69	39	25	5	156	69.088,16	63	56.332,58	10	2.449,81	26	8.512,21	51	1	363,47	5	1.430,09	14	1.062,13	14	1.062,13	-	4	58,23				
1	Kab. Deli Serdang	6	4	2	-	13	17.051,39	9	13.294,81	-	-	2	3.756,58	2	-	-	-	-	-	1	83,07	-	-	-	-				
2	Kab. Nias Barat	8	4	3	1	21	2.090,43	7	1.478,56	2	275,03	3	276,84	8	-	-	1	60,00	-	-	-	-	-	-	-				
3	Kab. Nias Selatan	6	1	4	1	14	29.908,46	9	28.783,04	-	-	1	45,71	3	-	-	1	1.079,71	2	74,08	-	-	-	-	-				
4	Kab. Nias Utara	8	6	2	-	12	1.122,00	6	957,72	-	-	2	164,28	4	-	-	-	-	2	16,42	-	-	-	1	25,11				
5	Kab. Padang Lawas Utara	5	3	1	1	11	895,01	5	750,02	-	-	2	144,99	4	-	-	-	-	2	56,54	-	-	-	1	14,11				
6	Kab. Samosir	5	3	2	2	19	4.728,99	2	568,83	4	1.911,20	7	2.248,96	6	-	-	-	-	1	76,34	-	-	-	1	0,65				
7	Kota Padang Sidimpuan	10	5	4	4	20	2.804,67	5	1.314,38	1	85,28	3	1.194,16	10	-	-	1	210,85	2	74,60	-	-	-	-	-				
8	Kota Padang Sidimpuan	10	5	4	4	12	626,83	2	201,69	1	43,31	1	18,36	6	1	363,47	1	-	1	26,95	-	-	-	1	18,36				
9	Kota Tanjung Balai	11	8	3	-	34	9.860,38	18	8.983,53	2	134,99	5	662,33	8	-	-	1	79,53	3	654,13	-	-	-	-	-				
3	Prov. Sumatera Barat	15	6	8	1	11	11.255,33	2	172,15	1	485,92	2	140,77	5	-	-	1	10.456,49	-	-	-	-	-	-	-				
1	Kab. Solok Selatan	15	6	8	1	11	11.255,33	2	172,15	1	485,92	2	140,77	5	-	-	1	10.456,49	-	-	-	-	-	-	-				
4	Prov. Riau	59	18	25	16	97	40.564,94	32	8.576,00	5	4.466,02	11	4.415,86	35	7	4.186,33	7	18.920,73	5	70,21	-	-	-	2	205,90				
1	Kab. Indragiri Hilir	17	3	8	6	17	6.110,65	3	702,53	1	4.200,00	4	480,92	8	-	-	1	727,20	2	5,71	-	-	-	2	205,90				
2	Kab. Indragiri Hulu	17	7	8	2	30	12.223,26	11	5.220,73	1	239,76	4	2.535,92	9	2	334,85	3	3.892,00	3	64,50	-	-	-	-	-				
3	Kab. Kepulauan Meranti	8	3	4	1	19	2.410,47	7	1.445,68	1	7,05	2	504,22	7	2	453,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	Kab. Rokan Hilir	17	5	5	7	31	19.820,56	11	1.207,06	2	19,21	1	894,80	11	3	3.397,96	3	14.301,53	-	-	-	-	-	-	-				

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai perubahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan															
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Ketidakefektifan			Kelemahan Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan					
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
5	Prov. Nusa Tenggara Barat	10	3	5	2	21	985,16	9	774,34	2	121,92	1	88,90	9	-	-	-	-	-	2	40,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	21	Kab. Dompu	3	5	2	21	985,16	9	774,34	2	121,92	1	88,90	9	-	-	-	-	-	2	40,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	Prov. Nusa Tenggara Timur	179	73	59	47	188	30.719,31	40	10.820,05	14	8.439,79	38	10.035,17	80	8	1.161,19	8	265,11	11	1.302,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,86		
1	22	Prov. Nusa Tenggara Timur	25	10	7	8	29	10.662,17	5	3.089,94	3	3.312,21	5	4.078,49	14	2	181,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	23	Kab. Alor	4	7	4	17	1.357,31	7	862,94	1	8,48	3	485,89	5	-	-	-	-	-	3	251,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	24	Kab. Kupang	5	6	-	4	1.171,57	3	1.010,26	-	-	2	161,31	3	-	-	-	-	-	1	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	25	Kab. Lembata	6	-	-	4	1.039,18	1	14,15	1	570,51	1	454,52	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	26	Kab. Manggarai	3	3	3	4	15	2.625,36	4	2.396,67	-	4	228,69	7	-	-	-	-	-	2	35,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	27	Kab. Manggarai Barat	8	4	4	5	16	2.893,00	1	1.007,37	2	1.240,52	5	287,61	5	2	337,50	1	20,00	1	392,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,60	
7	28	Kab. Manggarai Timur	8	4	2	12	2.637,97	3	846,30	-	-	2	1.679,44	6	-	-	-	-	-	1	112,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,91	
8	29	Kab. Sabu Raijua	7	3	1	10	2.147,00	2	67,16	1	686,50	2	1.276,42	4	-	-	-	-	-	1	116,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	30	Kab. Sikka	6	3	3	-	20	1.085,95	7	598,06	2	3	285,50	6	1	188,43	1	13,96	1	46,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	31	Kab. Sumba Timur	5	5	3	15	2.320,78	1	102,95	3	1.934,07	3	70,03	5	2	213,73	1	-	1	71,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	32	Kab. Timor Tengah Utara	7	7	7	19	1.523,93	3	448,62	1	687,50	3	147,81	10	1	240,00	1	-	1	289,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	33	Kab. Timor Tengah Selatan	4	10	4	13	1.255,09	3	375,63	-	-	5	879,46	4	-	-	-	-	-	1	201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Prov. Kalimantan Barat	33	12	15	6	34	5.618,36	8	932,78	3	1.832,00	5	2.819,53	17	-	-	-	-	-	4	209,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	34	Kab. Kayong Utara	2	1	1	5	191,64	1	25,42	-	-	1	166,22	3	-	-	-	-	-	1	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	35	Kab. Landak	3	4	-	8	3.244,09	1	27,60	1	1.053,70	1	2.128,74	4	-	-	-	-	-	1	34,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	36	Kab. Melawi	2	6	2	11	1.300,55	3	557,21	1	345,00	2	398,34	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	37	Kab. Sekadau	1	1	1	6	882,08	3	322,55	1	433,30	1	126,23	1	-	-	-	-	-	3	206,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	38	Kota Singkawang	4	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Prov. Kalimantan Tengah	43	15	21	7	53	8.868,83	14	2.660,18	5	3.999,68	3	655,82	28	1	317,15	2	1.236,00	6	493,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	39	Kab. Barito Selatan	5	5	1	15	1.205,97	3	233,00	-	-	3	655,82	8	1	317,15	-	-	-	1	29,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	40	Kab. Gunung Mas	1	5	2	14	4.474,18	2	28,41	3	3.209,77	-	-	7	-	-	-	-	-	1	28,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Kendapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah dibundaklanjuti dalam proses pemeriksaan																				
		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total			Kelemahan Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Kelemahan Administrasi			Ketidakefektifan			Kelemahan Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan								
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																
3	41	12	6	4	2	12	2.657,06	5	2.315,57	1	341,49	-	6	-	-	-	-	-	3	415,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	42	12	3	7	2	12	531,62	4	83,20	1	448,42	-	7	-	-	-	-	-	1	19,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Prov. Kalimantan Selatan	25	7	16	2	46	19.125,46	19	3.650,11	1	4.771,91	9	8.636,37	15	-	-	-	-	2	2.067,07	6	166,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	43	17	4	12	1	27	16.390,61	11	2.125,50	1	4.771,91	5	7.523,13	9	-	-	-	-	1	1.970,07	2	18,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	44	8	3	4	1	19	2.734,85	8	1.524,61	-	-	4	1.113,24	6	-	-	-	-	1	97,00	4	147,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Prov. Kalimantan Timur	171	66	81	24	228	624.590,96	69	52.466,27	20	528.588,12	54	39.886,72	83	2	3.649,85	-	-	-	26	15.822,97	5	66.662,51	21	4.898,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	45	17	6	9	2	31	516.780,19	10	10.592,95	5	497.466,49	8	8.720,75	8	-	-	-	-	8	9.622,95	3	66.501,18	5	3.739,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	46	11	6	4	1	15	2.391,30	3	140,83	1	1.612,34	5	638,13	6	-	-	-	-	1	16,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	47	10	5	5	-	16	2.169,39	3	652,38	-	-	5	1.517,01	8	-	-	-	-	1	8,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	48	8	5	3	-	13	3.412,33	6	2.091,68	1	1.299,15	1	21,50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	49	26	6	9	11	18	12.173,86	6	8.810,29	2	814,58	4	2.548,99	6	-	-	-	-	4	2.062,11	1	85,73	2	177,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	50	8	4	4	-	16	27.326,11	6	6.984,85	1	2.503,52	5	17.837,74	4	-	-	-	-	2	1.538,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	51	10	3	6	1	13	5.703,36	3	897,25	1	3.594,78	1	1.211,33	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	52	12	5	5	2	26	1.553,61	9	987,05	2	107,66	6	458,90	9	-	-	-	-	2	38,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	53	10	4	6	-	20	27.615,55	5	9.142,35	3	15.033,67	6	3.439,53	5	1	-	-	-	1	593,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	54	10	3	7	-	11	2.284,57	4	1.234,94	-	-	1	1.049,63	6	-	-	-	-	1	687,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	55	10	4	4	2	11	9.597,29	3	8.401,12	-	-	3	1.196,17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	56	13	7	5	1	12	6.138,12	4	1.626,78	1	198,50	3	662,99	3	1	3.649,85	-	-	3	939,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	57	9	4	2	3	11	818,13	4	577,48	-	-	3	240,65	4	-	-	-	-	2	269,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	58	8	2	6	-	6	6.163,77	2	281,94	2	5.881,83	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	59	9	2	6	1	9	463,38	1	44,38	1	75,60	3	343,40	4	-	-	-	-	1	44,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Prov. Sulawesi Utara	60	22	20	18	140	28.383,47	60	18.821,82	4	3.057,69	17	1.935,26	50	6	3.611,36	3	957,34	13	475,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	60	15	5	6	4	37	3.728,34	20	2.057,30	1	691,34	7	979,70	9	-	-	-	-	3	54,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	61	18	9	5	4	34	9.567,44	13	6.511,37	1	983,00	6	815,86	11	2	1.208,99	1	48,22	4	295,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	62	18	6	6	6	39	10.705,16	18	8.316,02	-	-	1	8,36	16	3	2.380,78	1	-	2	24,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	63	9	2	3	4	30	4.382,53	9	1.937,13	2	1.383,35	3	131,34	14	1	21,59	1	909,12	4	100,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern												Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan																		Nilai perubahan aset atau penyerotan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern			Total			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Kelemahan Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan					
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
		4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25														
12 Prov. Sulawesi Tenggara		13	7	5	1	23	11.581,46	7	6.092,55	-	6	4.488,91	9	-	-	1	1.000,00	2	141,46	-	-	-	-	-	-												
1 Kab. Konawe Utara		13	7	5	1	23	11.581,46	7	6.092,55	-	6	4.488,91	9	-	-	1	1.000,00	2	141,46	-	-	-	-	-	-												
13 Prov. Maluku		137	67	49	21	295	188.055,14	123	71.203,77	17	100.425,27	30	5.980,38	113	2	2.041,00	10	8.404,72	4	4.166,81	-	-	-	-	-												
1	Prov. Maluku	8	6	2	-	26	105.259,58	12	20.715,72	1	83.124,28	2	700,23	9	-	-	2	719,35	4	4.166,81	-	-	-	-	-												
2	Kab. Buru	18	8	7	3	18	4.473,67	7	3.256,04	-	5	1.069,78	5	-	-	1	147,85	-	-	-	-	-	-	-	-												
3	Kab. Buru Selatan	32	11	16	5	98	15.361,29	52	13.267,06	4	121,74	8	1.972,49	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Kab. Maluku Barat Daya	14	10	3	1	22	7.618,16	8	6.927,92	-	1	55,24	12	-	-	1	635,00	-	-	-	-	-	-	-	-												
5	Kab. Maluku Tengah	14	5	6	3	19	7.720,26	6	710,71	1	4.103,59	2	327,99	7	2	2.041,00	1	536,97	-	-	-	-	-	-	-												
6	Kab. Seram Bagian Barat	15	9	4	2	38	11.427,39	17	10.246,79	2	269,20	5	816,40	13	-	-	1	95,00	-	-	-	-	-	-	-												
7	Kab. Seram Bagian Timur	14	7	4	3	42	19.322,62	13	15.641,87	3	2.661,52	6	1.019,23	18	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-												
8	Kota Ambon	22	11	7	4	32	16.872,17	8	437,66	6	10.144,94	1	19,02	15	-	-	2	6.270,55	-	-	-	-	-	-	-												
14 Prov. Maluku Utara		94	49	31	14	138	65.706,74	48	40.090,09	8	4.073,07	20	8.736,67	52	7	1.514,88	3	11.292,03	8	1.302,39	-	-	-	-	-												
1	Prov. Maluku Utara	20	11	9	-	37	25.001,91	13	12.937,17	-	7	6.319,62	16	-	-	-	1	5.745,12	3	675,40	-	-	-	-	-												
2	Kab. Halmahera Barat	16	8	6	2	21	16.732,69	6	13.076,66	2	3.397,66	1	258,37	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
3	Kab. Halmahera Timur	15	7	4	4	28	11.658,40	9	8.938,48	3	398,20	5	1.249,17	6	5	1.072,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Kab. Kepulauan Sula	11	7	3	1	16	3.828,94	3	668,27	1	208,89	3	633,39	8	-	-	1	2.318,39	-	-	-	-	-	-	-												
5	Kab. Morotai	23	11	7	5	24	4.357,91	14	3.962,45	1	8,15	3	241,48	5	1	145,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
6	Kota Ternate	9	5	2	2	12	4.126,89	3	507,06	1	60,17	1	34,64	5	1	296,50	1	3.228,52	-	-	-	-	-	-	-												
15 Prov. Papua		268	110	104	54	419	793.426,40	145	321.474,28	19	70.129,80	43	11.789,55	174	10	6.496,75	28	383.536,02	5	309,80	1	396,27	2	201,20	-												
1	Prov. Papua	11	2	5	4	42	325.685,65	16	40.840,28	1	12.419,55	3	1.200,81	12	4	3.601,28	6	267.623,73	-	-	-	-	-	-	-												
2	Kab. Biak Numfor	15	5	6	4	28	17.224,61	6	3.366,59	1	644,25	2	390,28	13	1	480,47	5	12.343,02	-	-	-	-	-	-	-												
3	Kab. Boven Digoel	13	8	3	2	15	17.057,64	6	15.824,94	2	1.116,43	2	116,27	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
4	Kab. Deiyai	7	2	3	2	13	4.028,35	3	2.597,02	-	-	3	1.431,33	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

Halaman 5 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Emittas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan						
		Total Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jumlah Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern Jumlah Kasus	Kelemahan Administrasi Jumlah Kasus	Total		Kelemahan Administrasi		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Daerah		Kekurangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan				
						Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Kab. Dogiyai	15	8	4	3	16	30.871,12	3	2.371,71	-	-	1	43,66	10	-	-	2	28.455,75	1	4,73	-	-	-	-
6	Kab. Intan Jaya	5	3	1	1	16	33.846,96	7	18.349,21	-	-	2	72,58	6	-	-	1	15.425,17	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Keerom	10	4	4	2	24	10.420,71	10	4.016,03	-	-	1	148,05	8	2	763,01	3	5.493,62	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Lanny Jaya	25	10	7	8	22	17.304,68	6	14.508,35	-	-	2	1.281,23	11	-	-	3	1.515,10	-	-	-	-	-	-
9	Kab. Mamberamo Raya	12	6	4	2	18	7.881,79	6	7.854,79	-	-	1	27,00	11	-	-	-	-	1	59,64	-	-	-	-
10	Kab. Mamberamo Tengah	20	6	8	6	16	18.241,59	6	13.625,87	2	3.140,72	3	1.475,00	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Merauke	13	8	5	-	15	8.795,42	3	1.175,23	-	-	1	63,56	10	-	-	1	7.556,63	-	-	-	-	-	-
12	Kab. Nabire	9	2	6	1	17	31.664,99	6	18.787,05	2	311,48	1	50,56	6	-	-	2	12.515,90	-	-	-	-	-	-
13	Kab. Nduga	18	6	10	2	33	117.178,55	17	42.664,73	5	47.727,38	1	614,34	8	-	-	2	26.172,10	-	-	-	-	-	-
14	Kab. Paniai	13	4	9	-	18	78.573,01	4	76.333,41	1	61,96	2	177,64	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Puncak	20	4	8	8	14	4.319,94	2	114,59	2	4.019,63	2	185,72	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kab. Sarmi	17	11	3	3	34	32.176,19	9	29.127,32	1	132,74	4	447,54	16	2	1.318,59	2	1.150,00	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Supiori	12	5	4	3	22	7.553,42	10	4.988,49	-	-	5	2.564,93	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kab. Tolikera	14	6	7	1	21	15.851,50	9	14.926,43	-	-	4	925,07	8	-	-	-	-	1	156,23	-	-	-	-
19	Kab. Yalimo	6	2	3	1	15	2.241,26	7	1.434,90	1	159,39	1	313,57	5	1	333,40	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kab. Waropen	13	8	4	1	20	12.509,02	9	6.567,34	1	396,27	2	260,41	7	-	-	1	5.285,00	1	6,50	1	396,27	2	201,20

Halaman 6 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan																		
		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern		Total		Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Kelemahan Administrasi			Ketidakefektifan			Kerugian Daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan									
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai							
1	16	Prov. Papua Barat	90	37	35	18	172	73.405,88	63	39.446,74	15	20.772,62	31	12.457,43	61	2	729,09	-	11	2.227,53	-	22	21	20	21	18	19	19	20	21	22	23	24	25	98,47			
1	99	Prov. Papua Barat	4	1	2	1	17	17.445,10	7	13.438,57	1	27,16	2	3.586,28	6	1	393,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	100	Kab. Fakfak	11	6	3	2	23	5.724,54	9	2.478,23	2	398,80	6	2.847,51	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	101	Kab. Kaimana	11	2	7	2	10	1.402,44	5	996,72	1	2,28	3	403,14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	102	Kab. Manokwari	15	8	5	2	17	2.750,07	6	2.284,95	1	24,65	3	104,47	6	1	336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	103	Kab. Maybrat	11	6	3	2	21	7.815,41	6	5.293,19	4	1.392,58	4	1.129,64	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	104	Kab. Sorong	2	1	1	1	12	2.311,96	6	2.311,96	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	105	Kab. Tambora	8	2	3	3	15	359,23	3	97,62	-	-	3	261,61	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	106	Kab. Teluk Bintuni	2	-	1	1	21	5.015,96	8	3.708,77	1	502,93	5	804,26	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	107	Kab. Teluk Wondama	10	4	6	-	23	23.107,87	8	3.615,63	4	18.396,04	3	1.096,20	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	108	Kota Sorong	16	7	4	5	13	7.473,60	5	5.221,10	1	28,18	2	2.224,32	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	1.367	568	549	250	2.114	2.016.883,12	739	652.096,90	130	768.666,58	308	132.450,92	820	46	24.071,07	71	439.597,65	120	27.834,71	7	67.078,06	45	6.081,97	7	67.078,06	45	6.081,97	7	67.078,06	45	6.081,97	7	67.078,06	45	6.081,97	
		Jumlah Rupiah						2.017.963,68		652.096,90		768.666,58		133.531,48			24.071,07		439.597,65		27.834,71		67.078,06		6.081,97		67.078,06		67.078,06		67.078,06		67.078,06		67.078,06		6.081,97	
		Jumlah Provinsi	116	48	50	18	206	1.027.247,62	72	111.109,41	14	607.663,04	31	30.211,07	73	7	4.175,90	9	274.088,20	15	14.465,16	3	66.501,18	5	3.739,53	3	66.501,18	5	3.739,53	3	66.501,18	5	3.739,53	3	66.501,18	5	3.739,53	
		Jumlah Kabupaten	1.107	455	446	206	1.694	927.170,18	598	518.329,75	98	142.967,39	248	95.595,40	661	35	15.563,76	54	154.713,88	83	11.066,16	3	501,28	33	1.955,32	3	501,28	33	1.955,32	3	501,28	33	1.955,32	3	501,28	33	1.955,32	
		Jumlah Kabupaten Rupiah						USD 88.65		-		-		USD 88.65			15.563,76		154.713,88		11.066,16		501,28		1.955,32		501,28		501,28		501,28		501,28		1.955,32			
		Jumlah Kota	144	65	53	26	214	62.465,32	69	22.657,74	18	18.036,15	29	6.644,45	86	4	4.331,41	8	10.795,57	22	2.303,39	1	75,60	7	387,12	1	75,60	7	75,60	7	75,60	7	75,60	7	75,60	7	387,12	

Keterangan:
 1. Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013
 2. Dari kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 363 kasus senilai Rp310.779,65 juta

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester II Tahun 2013

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Total	BP Batam	BP Migas	Perum PFN	PDAM
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>						
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	33	9	12	-	12
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	20	7	7	-	6
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	9	-	4	-	5
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	4	2	1	-	1
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	33	8	12	7	6
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	2	1	-	2
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	1	-	-	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10	2	5	3	-
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	7	3	3	-	1
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	10	-	3	4	3
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	15	4	3	-	8
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	10	2	2	-	6
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	2	1	-	2
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		81	21	27	7	26

Halaman 1 - Lampiran 8

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester II Tahun 2013**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Total		BP Batam		BP Migas		Perum PFN		PDAM	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan</i>											
I	Kerugian Negara/Perusahaan	5	352,03	1	60,15	1	6,13	-	-	3	285,75
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1	22,63	-	-	-	-	-	-	1	22,63
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	110,00	-	-	-	-	-	-	1	110,00
3	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	60,15	1	60,15	-	-	-	-	-	-
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	159,25	-	-	1	6,13	-	-	1	153,12
II	Potensi Kerugian Negara/Perusahaan	2	1.676,85	1	1.676,85	1	-	-	-	-	-
			USD 139,233.36		-		USD 139,233.36				-
	Total Nilai Rupiah		1.698.792,28		1.676,85		1.697.115,43				-
1	Aset dikuasai pihak lain	1	1.676,85	1	1.676,85	-	-	-	-	-	-
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Total Nilai Rupiah		USD 139,233.36				USD 139,233.36				
			1.697.115,43				1.697.115,43				
III	Kekurangan Penerimaan	11	5.712,01	2	2.331,44	3	-	-	-	6	3.380,57
			USD 1,220.15		-		USD 1,220.15				-
	Total Nilai Rupiah		20.584,41		2.331,44		14.872,40				3.380,57

Halaman 2 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Total		BP Batam		BP Migas		Perum PFN		PDAM	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Perusahaan	2	22,61	-	-	1	-	-	-	1	22,61
			USD 820,87				USD 820,87				
	Total Nilai Rupiah		10.028,19				10.005,58				
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Perusahaan	8	5.689,40	2	2.331,44	1	-	-	-	5	3.357,96
3	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
			USD 399,28				USD 399,28				
	Total Nilai Rupiah		4.866,82				4.866,82				
IV	Kelemahan Administrasi	31	-	5	-	9	-	5	-	12	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5		1		1		-		3	
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	4		-		2		1		1	
3	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1		1		-		-		-	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per- UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	7		2		3		-		2	

Halaman 3 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Total		BP Batam		BP Migas		Perum PFN		PDAM	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	10		-		3		4		3	
6	Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan	1		-		-		-		1	
7	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2		1		-		-		1	
8	Lain-lain	1		-		-		-		1	
V	Ketidakhematan	1	1.538,07	-		1	1.538,07	-		-	
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	1	1.538,07	-		1	1.538,07	-		-	
VI	Ketidakefektifan	1	1.760,55	-		1	1.760,55	-		-	
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	1.760,55	-		1	1.760,55	-		-	
Total Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		51	11.039,51	9	4.068,44	16	3.304,75	5	-	21	3.666,32
Jumlah Total Rupiah		51	1.723.027,34	9	4.068,44	16	USD 140,453.51	5	-	21	3.666,32

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 9

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Semester II Tahun 2013**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyerahan ke Nas Negara/Daerah atas Temuan yang Telah Dibindaklanjuti dalam Proses Pemeriksaan		
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Total	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan			
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	BP Batam Tahun 2012	21	9	8	4	9	4.068,44	1	60,15	1	1.676,85	2	2.331,44	5	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	21	9	8	4	9	4.068,44	1	60,15	1	1.676,85	2	2.331,44	5	-	-	-	-	-	-
2	BP Migas Tahun 2012	13	4	7	2	8	3.298,62	-	-	1	USD 139.233,36	2	USD 1.220,15	3	1.538,07	1	1.760,55	-	-	-
	Sub Total	13	4	7	2	8	3.298,62	-	-	1	USD 139.233,36	2	USD 1.220,15	3	1.538,07	1	1.760,55	-	-	-
3	BP Migas Tahun 2011	14	8	5	1	8	6,13	1	6,13	-	1.697.115,43	1	14.872,40	6	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	27	12	12	3	16	3.304,75	1	6,13	1	USD 139.233,36	3	USD 1.220,15	9	1.538,07	1	1.760,55	1	1.760,55	6,13
Jumlah Rupiah Total																				
4	Perum Produksi Film Negara Tahun 2010	1	-	1	-	2	1.715.292,58	-	6,13	-	1.697.115,43	-	14.872,40	2	-	-	-	-	-	-
5	Perum Produksi Film Negara Tahun 2009	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	Perum Produksi Film Negara Tahun 2008	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	Perum Produksi Film Negara Tahun 2007	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	7	-	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
8	PDAM Kota Padang Tahun 2012	16	8	5	3	12	3.541,93	2	175,75	-	-	5	3.366,18	5	-	-	-	-	-	-
9	PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012	10	4	1	5	9	124,39	1	110,00	-	-	1	14,39	7	-	-	-	-	-	-
	Sub Total	26	12	6	8	21	3.666,32	3	285,75	-	-	6	3.380,57	12	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	81	33	33	15	51	11.039,51	5	352,03	2	1.676,85	11	5.712,01	31	1.538,07	1	1.760,55	1	1.760,55	6,13
	Jumlah Total Rupiah	81	33	33	15	51	1.723.027,34	5	352,03	2	1.698.792,28	11	20.584,41	31	1.538,07	1	1.760,55	1	1.760,55	6,13

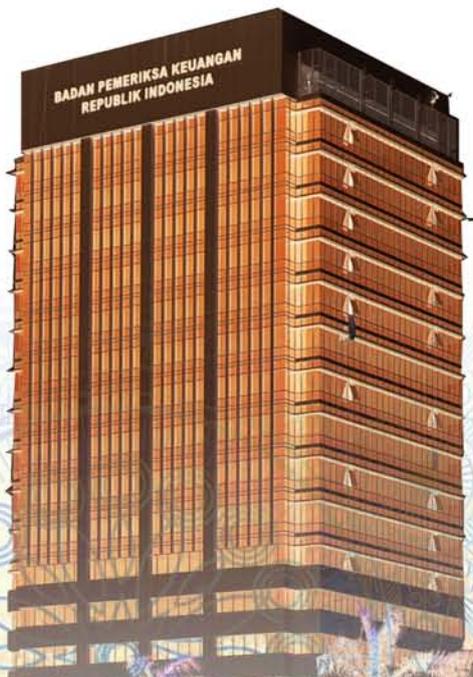
Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2013

No	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KEUANGAN				
I	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
1	1	Provinsi Aceh	1	LKPD Provinsi Aceh Tahun 2012
	2		1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012
	3		1	LKPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012
	4		1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012
	5		1	LKPD Kabupaten Bireun Tahun 2012
	6		1	LKPD Kabupaten Simeuleu Tahun 2012
2	7	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012
	8		1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2012
	9		1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012
	10		1	LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2012
	11		1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2012
	12		1	LKPD Kabupaten Samosir Tahun 2012
	13		1	LKPD Kota Gunung Sitoli Tahun 2012
	14		1	LKPD Kota Padangsidempuan Tahun 2012
	15		1	LKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2012
3	16	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012
4	17	Provinsi Riau	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012
	18		1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012
	19		1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012
	20		1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012
5	21	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2012
6	22	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012
	23		1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2012
	24		1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2012
	25		1	LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2012
	26		1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2012
	27		1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012
	28		1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012
	29		1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012
	30		1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2012
	31		1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012
	32		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012
	33		1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2012
7	34	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2012
	35		1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2012
	36		1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012
	37		1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2012
	38		1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2012
8	39	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012
	40		1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012
	41		1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2012
	42		1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
9	Provinsi Kalimantan Selatan	43	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2012
		44	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2012
10	Provinsi Kalimantan Timur	45	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012
		46	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2012
		47	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2012
		48	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012
		49	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012
		50	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012
		51	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2012
		52	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2012
		53	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2012
		54	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012
		55	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012
11	Provinsi Sulawesi Utara	56	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2012
		57	LKPD Kota Bontang Tahun 2012
		58	LKPD Kota Samarinda Tahun 2012
		59	LKPD Kota Tarakan Tahun 2012
		60	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012
		61	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012
		62	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012
		63	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2012
		64	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012
		65	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2012
12	Provinsi Sulawesi Tenggara	66	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2012
		67	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012
		68	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012
		69	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012
		70	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2012
		71	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012
		72	LKPD Kota Ambon Tahun 2012
		73	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2012
13	Provinsi Maluku Utara	74	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012
		75	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2012
		76	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2012
		77	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012
		78	LKPD Kota Ternate Tahun 2012
		79	LKPD Provinsi Papua Tahun 2012
14	Provinsi Papua	80	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2012
		81	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2012
		82	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2012
		83	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2012
		84	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2012
		85	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2012
		86	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2012
		86	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2012

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	87		1 LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012
	88		1 LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2012
	89		1 LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2012
	90		1 LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2012
	91		1 LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2012
	92		1 LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2012
	93		1 LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2012
	94		1 LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2012
	95		1 LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2012
	96		1 LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2012
	97		1 LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2012
	98		1 LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2012
16	99 Provinsi Papua Barat		1 LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012
	100		1 LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2012
	101		1 LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2012
	102		1 LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2012
	103		1 LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2012
	104		1 LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2012
	105		1 LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2012
	106		1 LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012
	107		1 LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2012
	108		1 LKPD Kota Sorong Tahun 2012
	Jumlah	108	
II Laporan Keuangan Badan Lainnya			
1	109 Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS)		1 LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
	110		1 LK Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) untuk periode yang berakhir pada 13 November 2012
2	111 Perum Produksi Film Negara (Perum PFN)		1 LK Perum PFN Tahun 2007
	112		1 LK Perum PFN Tahun 2008
	113		1 LK Perum PFN Tahun 2009
	114		1 LK Perum PFN Tahun 2010
3	115 Provinsi Sumatera Barat		1 LK PDAM Kota Padang Tahun 2012
4	116 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam		1 LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2012
5	117 Provinsi Banten		1 LK PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang Tahun 2012
	Jumlah	9	
	Jumlah Pemeriksaan Keuangan	117	



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013

Buku III
Pemeriksaan Kinerja
(Buku ke-3 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR TABEL	ii	
DAFTAR GAMBAR	iii	
DAFTAR GRAFIK	iv	
DAFTAR LAMPIRAN	v	
BAB 1	Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja	1
BAB 2	Resume Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013	5
BAB 3	Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	13
BAB 4	Kesehatan	21
BAB 5	Pendidikan	33
BAB 6	Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	41
BAB 7	Infrastruktur	53
BAB 8	Lingkungan Hidup dan Bencana	61
BAB 9	Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok	75
BAB 10	Pelayanan Publik	83
BAB 11	Kinerja Bidang Lainnya	95
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM		117
DAFTAR ISTILAH		125
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

- 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan
- 2.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan
- 11.1. Tren Kerugian PT MNA sejak Tahun 2009 s.d. September 2013

DAFTAR GAMBAR

- 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome
- 4.1. Kasur Pasien Rusak
- 5.1. Proses Belajar Mengajar Pendidikan Dasar
- 5.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Belum Dimanfaatkan
- 6.1. Rumah Kos Tidak Ada dalam Database
- 6.2. Kegiatan Penertiban Reklame
- 6.3. Ruang Tunggu Pelayanan Samsat
- 8.1. Lokasi Pemantauan Kualitas Air Sungai Brantas (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas)
- 8.2. Peta Indeks Rawan Bencana di Indonesia
- 8.3. Kerusakan Akibat Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat, Erupsi Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 9.1. Proses Bisnis Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok
- 10.1. Hasil Tes Narkoba Urine Petugas Pemasarakatan (Kiri) serta Uang dan Paket Ganja di dalam Tas WBP (Kanan)
- 11.1. Kondisi RTSM di Berbagai Wilayah

DAFTAR GRAFIK

- 7.1. Penyebaran Jalan Nasional (km)
- 8.1. Jumlah Titik Panas Kawasan Konservasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Tahun 2010 s.d. 2012
- 9.1. Data Perkembangan YOR Impor Tahun 2012 s.d. Agustus 2013
- 9.2. Perkembangan DT Impor selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013
- 11.1. Tren Kerugian PT MNA sejak Tahun 2009 s.d. September 2013

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Kinerja
2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Kinerja

Pengertian Pemeriksaan Kinerja

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada pengelolaan kegiatan entitas yang diperiksa, sehingga BPK dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja entitas.

Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, selain menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) pemeriksa juga menguji sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pemeriksaan Kinerja

Tujuan pemeriksaan kinerja adalah menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu program/kegiatan adalah untuk mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai tujuannya. Adapun tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan efisiensi yaitu berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan sumber dayanya dengan cara yang paling produktif dan hemat dalam mencapai tujuan program/kegiatan. Kedua tujuan pemeriksaan ini dapat berhubungan satu sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu pemeriksaan kinerja.

Konsep Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E)

Aspek 3E dalam pemeriksaan kinerja adalah sebagai berikut.

- **Ekonomi** berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses.
- **Efisiensi** merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan

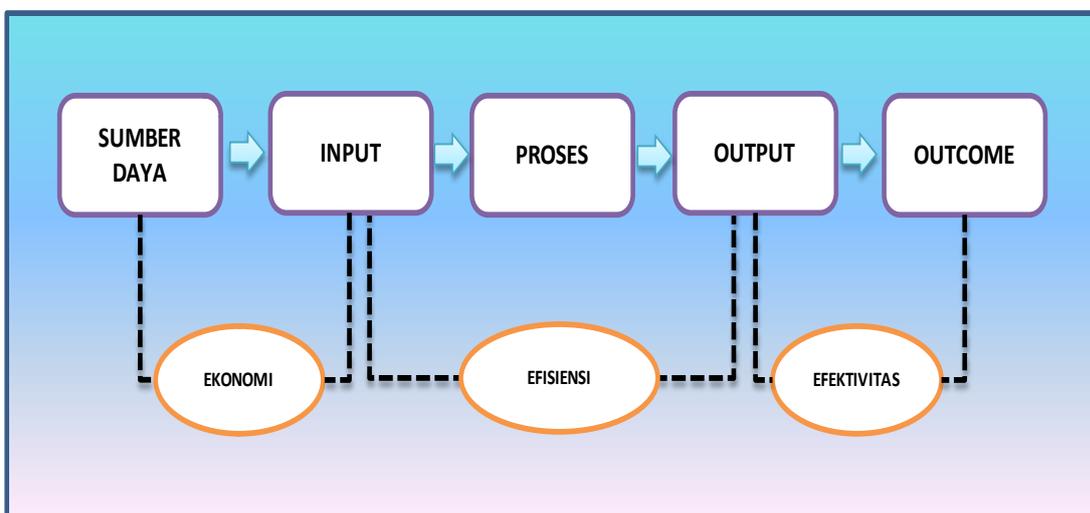
jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

- **Efektivitas** pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (outcome). Efektif berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, konsep 3E yang menjadi dasar pemeriksaan kinerja berkaitan erat dengan konsep input, output, proses, dan outcome. Keempat konsep tersebut didefinisikan sebagai berikut.

- **Input** merupakan sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output.
- **Proses** adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
- **Output** adalah barang-barang yang diproduksi, jasa yang diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas input.
- **Outcome** adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui output.

Gambar 1.1. Hubungan Input, Proses, Output, dan Outcome



Manfaat Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi. Pemeriksaan kinerja juga bermanfaat untuk meningkatkan pertanggungjawaban publik.

Pemeriksaan kinerja dapat menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian atau evaluasi, dan pada akhirnya akan menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

Untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan banyak pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja pemerintah terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat.

Hasil pemeriksaan kinerja dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, simpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan dan dibedakan dalam tiga kategori, yaitu 1) ketidakhematan/ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI); dan 3) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, dan kelemahan administrasi. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) ini disebut dengan istilah "**kasus**". Namun, istilah kasus di sini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

BAB 2

Resume Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013

Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 158 objek pemeriksaan, terdiri atas 31 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat, 15 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 107 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 4 objek pemeriksaan badan usaha milik negara (BUMN), dan 1 objek pemeriksaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam sembilan tema sebagai berikut:

- Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Kesehatan;
- Pendidikan;
- Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Infrastruktur;
- Lingkungan Hidup dan Bencana;
- Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok;
- Pelayanan Publik; dan
- Kinerja Bidang Lainnya, yang terdiri atas 11 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat, 5 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 4 objek pemeriksaan BUMN, dan 1 objek pemeriksaan BUMD.

Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program/kegiatan. Pemeriksaan kinerja dalam Semester II Tahun 2013 pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan entitas.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan kinerja pada umumnya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2013 ditemukan 11 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp49.402,46 juta, 23 kasus ketidakefisienan senilai Rp959.667,05 juta, dan 1.622 kasus ketidakefektifan senilai Rp2.059.028,47 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus dan nilai rupiah tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan							
			Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pusat	31	1	315,53	5	-	311	1.635.187,90	317	1.635.503,43
2	Provinsi	15	1	2.080,60	3	-	166	53.726,31	170	55.806,91
3	Kabupaten/ Kota	107	6	919,38	-	-	1.061	14.168,27	1.067	15.087,65
4	BUMN	4	3	46.086,95	15	959.667,05	51	355.945,99	69	1.361.699,99
5	BUMD	1	-	-	-	-	33	-	33	-
	Jumlah	158	11	49.402,46	23	959.667,05	1.622	2.059.028,47	1.656	3.068.097,98

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester II Tahun 2013, di antaranya sebagai berikut.

Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan atas Efektivitas Fungsi Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan (LK) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 menyimpulkan bahwa pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal, serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan. Tata kelola sistem pengawasan sebagai prasyarat dasar berfungsinya pengelolaan kelembagaan APIP yang meliputi standar, kode etik, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) belum mendukung pengelolaan itu. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya dua peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 dan PP No. 60 Tahun 2008. Kedua peraturan tersebut mengatur sistem pengawasan intern pemerintah, dan oleh karenanya perlu menjadi suatu pertimbangan untuk mendorong efektivitas kelembagaan APIP.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun Anggaran (TA) 2011 s.d. Semester I TA 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan *pre market* dan *post market* yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya terdapat antrian yang panjang dalam memasukkan berkas praregistrasi dan registrasi ke BPOM, serta terdapat waktu diam atau *idle time* berkas registrasi yang masuk

- ke evaluator dengan rentang waktu antara 1 s.d. 198 hari. Akibatnya, proses penyelesaian registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar oleh industri farmasi membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan fungsi pengawasan obat dan makanan belum optimal sehingga produk obat dan makanan yang beredar kurang mendapatkan pengawasan yang memadai dan berpotensi tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki izin edar di Indonesia.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional Tahun 2012 dan 2013 menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di sepuluh provinsi belum sepenuhnya dikelola secara efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada Paket Pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Provinsi Jawa Barat mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. Kelemahan tersebut mengakibatkan pengeluaran keuangan negara senilai Rp106,96 miliar tidak dapat dinilai dan diyakini kewajarannya serta berpotensi menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas jalan tersebut di masa mendatang. Selain itu, pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada Ruas Jalan Nasional Jalur Pantai Utara (Pantura) di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kurang terkoordinasi dan tidak efektif sehingga mengakibatkan kerusakan jalan.
 - Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas menunjukkan pengelolaan DAS Brantas belum efektif walaupun target penurunan beban pencemaran di DAS Brantas sebesar 15% telah tercapai. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya Kementerian Lingkungan Hidup belum menetapkan daya tampung beban pencemar DAS Brantas sehingga pengendalian pencemaran di DAS Brantas tidak menjamin terjaganya kualitas air. Upaya pengendalian pencemaran limbah cair industri dan usaha/kegiatan melalui instrumen pengawas di Segmen Hulu, Tengah, dan Hilir belum memadai, antara lain terdapat industri dan usaha/kegiatan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung yang membuang limbah cair ke DAS Brantas melebihi baku mutu. Selain itu, program percontohan sanitasi dari Pemerintah Pusat tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjadikan pembangunan fasilitas sanitasi untuk air limbah domestik sebagai program prioritas.
 - Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim TA 2010 s.d. Semester I TA 2013 menyimpulkan bahwa meskipun Kementerian Kehutanan telah melaporkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada *National Summit 2012* dari bidang kehutanan dan telah mencapai 72,8% dari target penurunan emisi GRK dengan metode analisis penutupan lahan, tetapi kegiatan-kegiatan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) di Kementerian Kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim masih belum efektif dalam upaya menurunkan emisi GRK. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya upaya penurunan titik panas pada Kementerian

Kehutanan untuk Pulau Sumatera Tahun 2012 serta Pulau Sulawesi Tahun 2011 dan 2012 belum mencapai target yang ditetapkan. Hanya pada Pulau Kalimantan penurunan titik panas mencapai target. Namun demikian, jumlah titik panas pada kawasan konservasi di ketiga pulau tersebut mempunyai kecenderungan meningkat dari Tahun 2010 s.d. 2012. Selain itu, belum akuratnya sumber data titik panas dan pencapaian kinerja penurunan titik panas sulit terukur. Hal ini mengakibatkan meningkatnya potensi kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi serta potensi tidak tercapainya target indikasi penurunan emisi CO₂e pada Tahun 2014.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Pemulihan Pascabencana TA 2009, 2010, dan 2011 menyimpulkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi/kabupaten/kota, serta instansi terkait telah berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan ***Global Champion for Disaster Risk Reduction*** dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang diterima langsung oleh Presiden RI. BNPB juga telah menyusun kebijakan dan pedoman sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan penerapan kebijakan dan lemahnya koordinasi antarunit atau instansi membuat banyak kegiatan pascabencana yang tidak tepat sasaran dan belum dapat memberikan manfaat bagi korban bencana dan masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas pengelolaan kegiatan pemulihan pascabencana belum tercapai secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya proses relokasi warga korban bencana di wilayah terdampak dan rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman belum terealisasi seluruhnya sehingga masih banyak warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok untuk Menjamin Kelancaran Jasa Pelayanan Kapal dan Barang Tahun 2012 dan Tahun 2013 (s.d. Agustus) menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok, yang meliputi kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Otoritas Pelabuhan, kegiatan penjaluran kepabeanan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, kegiatan kekarantina yang dilaksanakan oleh Balai Karantina, pemberian izin dan rekomendasi terkait larangan pembatasan impor yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian/ lembaga, tidak efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya permasalahan yang berpengaruh pada seluruh tahapan proses bisnis yaitu antara lain pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung

- Priok belum didukung dengan peraturan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pengusaha secara terpadu dan terkoordinasi, serta peraturan terkait pemberian konsesi. Selain itu, sistem informasi pelabuhan belum sepenuhnya terintegrasi dan mendukung kelancaran arus kapal dan barang.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 menunjukkan bahwa kegiatan tersebut kurang efektif dalam menjamin pengawasan lalu lintas impor barang. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya prosedur dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya memadai antara lain ketentuan yang mengatur kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang terkait jangka waktu penyelesaian hasil penindakan dan penanganan barang tanpa pemilik (*lost and found*) yang dikelola oleh maskapai penerbangan belum tersedia.
 - Hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Gula Nasional Tahun 2010 s.d. 2013 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun 2010 s.d. September 2013, masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, ketidaktertiban, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target dan ketidakpatuhan penggunaan anggaran. Selain itu, BPK menyimpulkan bahwa Program Swasembada Gula Nasional 2010-2014 untuk memenuhi kebutuhan gula Tahun 2014 sebanyak 5,7 juta ton dengan sasaran pertumbuhan produksi gula sebesar 12,55 % per tahun tidak tercapai.

Pemerintah Daerah

- Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan TA 2012-2013 pada 19 entitas pada umumnya kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pemerintah daerah belum dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga target standar minimum kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tercapai dan layanan mutu pendidikan menjadi tidak optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan belum menunjang kegiatan belajar mengajar karena belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tapi tidak sesuai peruntukannya. Akibatnya, tujuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak tercapai.
- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame (PHRR) Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada 47 entitas menunjukkan bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PHRR. Selain capaian tersebut, hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa pengelolaan PHRR belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung oleh perangkat aturan dan pedoman yang andal dan lengkap berupa petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur tentang

pengelolaan PHRR, serta belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup. Selain itu, perhitungan potensi PHRR belum sepenuhnya didukung database yang lengkap dan mutakhir, dalam aspek pemungutan pajak hotel dan restoran kegiatan proses pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah belum sepenuhnya mudah dan sederhana, serta proses perizinan sampai dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk pajak reklame masih memerlukan waktu yang cukup lama.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 di Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum efektif, kecuali di Kabupaten Seruyan, kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan di antaranya data dan informasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki, data cuaca sebagai input sistem peringatan dini (*Early Warning System*) belum dimanfaatkan secara memadai, dan data titik panas belum tersedia, serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dilakukan. Selain itu, kegiatan penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dianggarkan dan masih terdapat kecamatan di daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang belum mendapatkan penyuluhan/sosialisasi.

BUMN

- PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) didirikan pada tanggal 6 September 1975 dengan tujuan menjadi jembatan udara nasional di seluruh Indonesia, yang menghubungkan daerah terpencil, kota besar, hingga kawasan regional, dengan memberikan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Data historis menunjukkan pertumbuhan jumlah penumpang domestik sebesar 10% sejak Tahun 2004. Jumlah penumpang penerbangan Indonesia diperkirakan sebanyak 62 juta orang pada Tahun 2012 dan mencapai 86 juta orang pada Tahun 2013 serta diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, PT MNA tidak dapat memanfaatkan pertumbuhan tersebut untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, sebaliknya PT MNA mengalami penurunan kapasitas dan kinerjanya sehingga mengharuskan PT MNA mengurangi kegiatannya secara terus menerus. Sejak Tahun 2007 sampai dengan 30 September 2013, jumlah pendapatan usaha yang diperoleh PT MNA lebih kecil dari biaya usaha sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kerugian terus menerus tersebut mengakibatkan penumpukan hutang PT MNA kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai Rp7,29 triliun per 31 Oktober 2013.

Kondisi tersebut terjadi karena PT MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat siap beroperasi (*online*) dan kebutuhan suku cadang dan mesin (*engine*) serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak andal. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan PT MNA tidak efektif dan efisien antara lain terdapat pengeluaran biaya atas penundaan dan pembatalan penerbangan

senilai Rp22,84 miliar, masih terdapat sisa dana penerbangan perintis senilai Rp8,64 miliar yang tidak terealisasi dan terjadi kerugian dari penerbangan Kerja Sama Operasional (KSO) senilai Rp31,24 miliar, serta ketidakefisienan pembayaran asuransi senilai USD3.56 juta.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 509 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang mempengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 94 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp176.431,39 juta yaitu 28 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp6.200,92 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah sebanyak 5 kasus senilai Rp489,31 juta), 7 kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp39.109,70 juta, 44 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp131.120,77 juta, dan 15 kasus kelemahan administrasi sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1. Jumlah kasus tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester II Tahun 2013 per Objek Pemeriksaan

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan (Obrik)	Jml Obrik	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan								
			Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi	Total Ketidakpatuhan	
			Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pusat	31	13	4.407,71	4	776,16	10	86.518,47	3	30	91.702,34
2	Provinsi	15	-	-	-	-	1	20.536,42	3	4	20.536,42
3	Kabupaten/ Kota	107	15	1.793,21	1	876,30	32	24.025,88	9	57	26.695,39
4	BUMN	4	-	-	2	37.457,24	1	40,00	-	3	37.497,24
5	BUMD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	158	28	6.200,92	7	39.109,70	44	131.120,77	15	94	176.431,39

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp4.146,53 juta dengan rincian temuan kerugian negara/daerah senilai Rp1.611,30 juta, temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan senilai Rp57,21 juta, dan temuan kekurangan penerimaan senilai Rp2.478,02 juta.

Penyerahan aset atau penyetoran atas temuan kerugian negara/daerah oleh Pemerintah Pusat senilai Rp1.424,71 juta dan pemerintah kabupaten/kota senilai Rp186,59 juta. Selain itu, penyerahan aset atau penyetoran atas temuan potensi kerugian negara/daerah/perusahaan oleh Pemerintah Pusat senilai Rp55,96 juta dan pemerintah kabupaten/kota senilai Rp1,25 juta. Adapun penyerahan aset atau penyetoran atas temuan kekurangan penerimaan oleh Pemerintah Pusat senilai Rp1.172,87 juta dan pemerintah kabupaten/kota senilai Rp1.305,15 juta.

BAB 3

Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

- 3.1 Sistem pengawasan intern pemerintah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dipertegas dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengenai pengaturan dan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sejalan otonomi daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pemerintah meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 3.2 Untuk mengimplementasikan mandat pengawasan tersebut, pemerintah telah menerbitkan berbagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan sistem pengawasan intern pemerintah. Kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun mengarah kepada efektivitas pengawasan aparatur negara dan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kebijakan pengawasan itu menjadi salah satu dasar pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) di setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Selain itu, pemerintah secara aktif menyelenggarakan koordinasi dengan semua APIP pusat dan daerah dalam merencanakan pengawasan intern pemerintah, serta mendorong terbentuknya Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- 3.3 Pelaksanaan tugas pengawasan dijalankan oleh APIP. Di Pemerintah Pusat, APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian atau unit pengawasan lembaga. Sementara itu, di pemerintah daerah APIP adalah Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atau unit pengawasan yang melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan. Untuk menjalankan fungsi pengawasan intern pemerintah, sampai dengan saat ini terdapat 600 APIP yang terdiri atas 76 APIP kementerian/lembaga, 33 APIP provinsi, dan 491 APIP kabupaten/kota.
- 3.4 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Fungsi Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan (LK) oleh APIP Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APIP pada 16 Inspektorat Kementerian/Lembaga, 32 Inspektorat Provinsi, 25 Inspektorat Kabupaten, dan 13 Inspektorat Kota.

- 3.5 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas fungsi pengelolaan audit dan reviu LK oleh APIP yang didukung oleh regulasi dan tata kelola yang memadai untuk Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013.
- 3.6 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan audit dan reviu LK belum mencerminkan perencanaan audit yang cermat, pelaksanaan audit dan reviu yang tepat, dan pelaporan yang andal, serta perbaikan kualitas audit dan reviu LK yang berkelanjutan. Tata kelola sistem pengawasan sebagai prasyarat dasar berfungsinya pengelolaan kelembagaan APIP yang meliputi standar, kode etik, dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (juklak/juknis) belum mendukung pengelolaan itu. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya dua peraturan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 dan PP No. 60 Tahun 2008. Kedua peraturan tersebut mengatur sistem pengawasan intern pemerintah, dan oleh karenanya perlu menjadi suatu pertimbangan untuk mendorong efektivitas kelembagaan APIP.
- 3.7 Sasaran pemeriksaan kinerja ini diarahkan pada regulasi pengawasan intern; tata kelola APIP; audit dan reviu LK; serta monitoring dan evaluasi.

Regulasi APIP

- 3.8 APIP menurut PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut.
- PP No. 79 Tahun 2005 menyatakan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. APIP adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
 - PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa APIP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang bertugas melakukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- 3.9 Hasil pemeriksaan mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengelolaan audit dan reviu LK oleh APIP, yang terdiri atas 7 kasus ketidakefektifan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut.

Tata Kelola APIP

- 3.10 Struktur organisasi APIP yang memadai diperlukan dalam mendukung fungsi pengawasan. Struktur organisasi seharusnya mendukung dan mencerminkan lingkup tugas, fungsi, dan peran inspektorat. Pedoman kerja yang lengkap, memadai, dan implementatif tersedia untuk mendukung kegiatan audit dan reviu LK. Sumber daya pengawasan diharapkan cukup tersedia dan berkualitas. Selain itu, hubungan kerja pengawasan internal dan eksternal yang baik akan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan.
- 3.11 Kelemahan-kelemahan dalam tata kelola APIP antara lain sebagai berikut.
- Independensi APIP dapat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi pemerintahan. Untuk membantu terciptanya independensi secara organisasi, APIP seharusnya bertanggung jawab kepada pejabat tertinggi dalam lembaga/entitasnya tanpa ada tekanan atau pengaruh politik apapun. Struktur APIP dalam organisasi entitas masih beragam, yaitu kedudukan APIP ada yang merupakan unit eselon I, II, dan III. Selain itu, struktur APIP dalam organisasi entitas belum dilengkapi uraian tugas dan fungsi APIP. Pada APIP pemerintah daerah, kedudukan jabatan fungsional auditor (JF-A) dan jabatan fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah (JF-P2UPD) tidak didukung pembagian jabatan yang jelas.
 - Untuk menjamin pelaksanaan audit APIP yang lebih berkualitas diperlukan pedoman operasional kerja yang memadai dalam bentuk juklak dan juknis sebagai penjabaran dari standar audit atau pedoman pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan agar pelaksanaan audit terarah, serasi, dan seragam sehingga berjalan lebih efisien, efektif, dan berkualitas. Dengan demikian, siapapun yang melaksanakannya dapat menghasilkan hasil audit dengan kualitas yang terstandar. Dari 86 APIP, hanya 7 APIP yang telah menyusun pedoman/juklak/juknis audit dan reviu LK, 53 APIP tidak memiliki pedoman/juklak/juknis audit dan reviu LK, serta 26 APIP tidak diperoleh informasi.
 - Kode etik merupakan pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP. Dari 86 APIP, hanya sebanyak 16 APIP yang telah mengimplementasikan kode etik di lingkungan kerjanya, 63 APIP belum mengimplementasikan kode etik, dan 7 APIP tidak diperoleh informasi.
 - Pemenuhan dan pengembangan sumber daya manusia APIP masih belum memadai dalam hal jumlah maupun kompetensi. Jumlah jabatan fungsional auditor yang ada tidak seimbang dengan kebutuhannya dan sebagian besar auditor belum memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhannya. Dari 86 APIP kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah menunjukkan bahwa pengawas di 11 APIP telah memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan, pengawas di 71 APIP belum memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan, dan sisanya di 4 APIP tidak diperoleh informasinya.

Hal tersebut mengakibatkan independensi, khususnya *independency in appearance*, dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi terganggu, tidak ada konsistensi dalam pemahaman dan penerapan kode etik. Selain itu, proses dan hasil audit APIP belum bisa memenuhi standar profesionalisme. Penyebabnya antara lain adanya ketidakjelasan kebijakan pengawasan dan proses bisnis fungsi pengawasan pada tiap-tiap APIP.

Audit dan Reviu LK

3.12 Kegiatan utama pengawasan intern yang dilakukan oleh unsur APIP adalah audit dan reviu LK, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pelaksanaan tindak lanjut.

3.13 Kelemahan-kelemahan dalam audit dan reviu LK antara lain sebagai berikut.

- Perencanaan audit dan reviu LK belum memperhatikan pertimbangan risiko dalam pemilihan objek pengawasan terjadi di 76 APIP. Adapun penyusunan rencana audit dan reviu LK yang tidak mempertimbangkan pemeriksaan terdahulu termasuk tindak lanjut rekomendasi terjadi di 72 APIP, serta perencanaan yang belum sesuai dengan standar audit dan reviu LK terjadi di 76 APIP.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain sasaran dan dampak audit tidak terukur dengan baik.

Penyebabnya antara lain belum ada pemahaman yang seragam mengenai pentingnya pertimbangan risiko dan hasil pemeriksaan terdahulu, serta belum tersedianya pedoman mengenai penyusunan rencana pengawasan.

- Pelaksanaan audit dan reviu LK belum memadai terutama mengenai perolehan dan pemilihan bukti audit dan reviu LK berupa dokumentasi bukti audit yang tidak lengkap atau tidak ada, sehingga penilaian kualitas bukti audit tidak dapat dilakukan, kondisi ini terjadi di 14 APIP. Adapun pendokumentasian bukti audit dan reviu LK dalam kertas kerja audit (KKA)/kertas kerja reviu (KKR) tidak memenuhi kualitas bukti yang cukup terjadi di 72 APIP, tidak memenuhi kualitas bukti yang relevan terjadi di 68 APIP, dan tidak memenuhi kualitas bukti yang kompeten terjadi di 66 APIP. Selain itu, APIP tidak mendokumentasikan atau tidak lengkap mendokumentasikan metodologi perolehan dan pemilihan bukti audit dan reviu LK dalam KKA/KKR terjadi di 64 APIP.

Akibatnya, temuan audit (laporan hasil audit/LHA) dan catatan hasil reviu (CHR/laporan hasil reviu/LHR) tidak valid dan tidak terjamin mutunya, serta identifikasi masalah dan dasar rekomendasi sesuai permasalahan tidak tepat.

Hal tersebut terjadi karena APIP belum memiliki pedoman/juklak/juknis yang mengatur secara teknis perolehan dan pemilihan bukti audit, serta kurangnya kompetensi auditor mengenai teknik perolehan dan pemilihan bukti audit.

- Pelaporan audit dan reviu LK belum dilaksanakan secara memadai, antara lain LHA dan LHR tidak disusun dengan lengkap dan sistematis, yaitu sebagai berikut.
 - LHA dan LHR tidak memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, jangka waktu, dan identifikasi kelemahan SPI terjadi di 68 APIP.
 - Tindak lanjut yang dilaksanakan *auditee* sebelum laporan terbit tidak dilaporkan dalam LHA dan LHR terjadi di 45 APIP.
 - LHA tidak memuat temuan, simpulan, rekomendasi, dan tanggapan pimpinan entitas, serta kontra tanggapan (jika tanggapan bertentangan). Selain itu, LHR tidak memuat koreksi kesalahan penyajian LK dan catatan lainnya, serta simpulan reviu terjadi di 47 APIP.
 - LHA dan LHR tidak disusun sesuai dengan juklak dan juknis pelaporan, terjadi di 68 APIP.

Akibatnya informasi yang tersaji tidak lengkap, akurat, objektif, dan meyakinkan, serta tidak memberikan dampak bagi perbaikan objek yang diaudit dan direviu.

Hal tersebut terjadi karena tidak ada standar/pedoman/juklak/juknis di tiap-tiap APIP sebagai acuan dalam menyusun LHA dan LHR LK.

- Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan reviu LK belum memadai, antara lain sebagai berikut.
 - Tidak ada dokumentasi mengenai laporan audit dan reviu LK, bukti tindak lanjut, dan pemutakhiran data *auditee*, terjadi di 32 APIP.
 - APIP belum melaporkan status tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit kepada pimpinan entitas yang memuat jumlah temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut, terjadi di 37 APIP.
 - APIP belum memantau tindak lanjut CHR LK entitas mengenai identifikasi kelemahan SPI, terjadi di 53 APIP.

- APIP belum melakukan pembahasan tindak lanjut hasil audit dan revidi LK secara periodik, terjadi di 34 APIP.

Akibatnya tindakan nyata atas rekomendasi hasil audit dan revidi LK tidak segera dapat dilihat. Selain itu, manfaat rekomendasi rendah.

Hal tersebut terjadi karena mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil audit dan revidi LK belum memadai.

Monitoring dan Evaluasi

- 3.14 Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang penting untuk menjamin mutu pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Monitoring merupakan proses penilaian kemajuan kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber daya, serta untuk mengupayakan agar tujuan dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Adapun evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi kegiatan pengawasan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, dan dampak apa yang terjadi setelah kegiatan dilaksanakan.
- 3.15 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 86 APIP yang diuji petik, 67 APIP telah melakukan monitoring dan evaluasi walaupun belum memadai baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan/atau tindak lanjut. Adapun 19 APIP sama sekali belum melakukan monitoring dan evaluasi.

Akibatnya, tidak tersedianya dasar untuk memperbaiki kinerja dan perencanaan pengawasan APIP. Hal tersebut disebabkan APIP belum memiliki pedoman monitoring dan evaluasi terkait pengawasan dan mekanisme tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan.

Rekomendasi

- 3.16 Terhadap kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengelolaan audit dan revidi LK oleh APIP tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada
- Pemerintah agar meninjau ulang pengaturan sistem pengawasan intern pemerintah dengan memastikan kedudukan dan peranan tiap-tiap APIP di instansi pusat dan daerah;
 - Menteri PAN-RB sebagai pembuat kebijakan agar menyusun kerangka standar dan pedoman pengawasan intern pemerintah dengan memperhatikan kerangka standar pemeriksaan keuangan negara dan profesi pemeriksaan serta praktik terbaik;

- BPKP sebagai Pembina JF-A dan Kemendagri sebagai Pembina JF-P2UPD untuk menyusun pedoman dan rencana pengembangan profesi yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan; dan
 - APIP agar
 - mengembangkan hubungan kerja yang konstruktif dan efektif dengan pihak internal maupun eksternal untuk mendorong percepatan hasil pengawasan APIP, termasuk tindak lanjut rekomendasi BPK guna percepatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
 - meningkatkan upaya penguatan perangkat lunak audit dan reviu LK sesuai dengan jenis, sifat, dan bentuk audit dan reviu LK untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta tindak lanjutnya.
- 3.17 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 3 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.
- 3.18 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Kesehatan

- 4.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Hal tersebut selaras dengan prioritas kesehatan yang menitikberatkan pada pembangunan bidang kesehatan yang bukan hanya melalui pendekatan preventif tetapi juga melalui pendekatan kuratif. Penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan.
- 4.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan 23 pemeriksaan kinerja bidang kesehatan pada 1 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 5 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 17 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota. Selain berdasar tingkat pemerintahan, 23 objek pemeriksaan tersebut terbagi atas 16 objek pelayanan kesehatan rumah sakit, 6 objek pengelolaan program kesehatan, dan 1 objek Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 4.3 Hasil pemeriksaan atas kinerja bidang kesehatan menunjukkan permasalahan ketidakhematan/ketidakekonomisan sebanyak 1 kasus, ketidakefisienan sebanyak 4 kasus, dan ketidakefektifan sebanyak 278 kasus senilai Rp1.407,14 juta.
- 4.4 Perincian hasil pemeriksaan kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

- 4.5 Dalam rangka pelayanan rumah sakit, pemerintah pada Tahun 2013 memiliki 838 unit rumah sakit atau 37,61% dari total unit rumah sakit di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat 211 unit atau 33,65% jika dibandingkan dengan jumlah unit Tahun 2012.
- 4.6 Kegiatan pelayanan kesehatan rumah sakit meliputi pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan. Selain itu, pelayanan kesehatan rumah sakit juga meliputi pelayanan gawat darurat dan pelayanan penunjang medis.
- 4.7 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit untuk Tahun Anggaran (TA) 2012 dan Semester I TA 2013 pada 16 rumah sakit di 12 provinsi, terdiri atas pemeriksaan pelayanan farmasi

pada 2 rumah sakit; pelayanan farmasi dan rawat inap pada 2 rumah sakit; pelayanan farmasi, rawat inap, dan rawat jalan pada 1 rumah sakit; pelayanan rawat inap pada 9 rumah sakit; dan pelayanan rawat inap dan rawat jalan pada 2 rumah sakit.

- 4.8 Pemeriksaan kinerja di atas pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi, rawat inap, dan rawat jalan pada rumah sakit. Selain itu, pemeriksaan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Tegal Kota Tegal, juga untuk menilai aspek keekonomisan pada pelayanan kesehatan rumah sakit. Pada Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Lingga dan RSUD Kabupaten Natuna, selain menilai efektivitas pengelolaan rawat inap juga untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan kesehatan rumah sakit.
- 4.9 Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan rumah sakit menunjukkan bahwa pada umumnya kurang efektif dalam pengelolaan pelayanan farmasi, rawat inap, dan rawat jalan. Hal tersebut dapat terlihat dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit, yang terdiri atas 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan dan 200 kasus ketidakefektifan senilai Rp1.407,14 juta.
- 4.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi, pelayanan rawat inap, dan pelayanan rawat jalan diuraikan sebagai berikut.

Pelayanan Farmasi

- 4.11 Pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 4.12 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit antara lain sebagai berikut.

- Pelayanan farmasi belum memadai, terjadi di tiga rumah sakit yaitu RSUD Kardinah Tegal Kota Tegal, RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dan RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya. Tidak memadainya pelayanan farmasi tersebut di antaranya belum ada ruangan khusus *dispensing* sediaan farmasi khusus dan *dispensing* sediaan farmasi berbahaya. Para petugas *dispensing* juga belum menggunakan peralatan pengaman seperti masker dan sarung tangan. *Dispensing* merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap validasi, interpretasi, menyiapkan/

Entitas yang Diperiksa:

1. RSUD Kabupaten Siak
2. RSUD Kardinah Tegal, Kota Tegal
3. RSUD Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan
4. RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
5. RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya

meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi yang memadai disertai sistem dokumentasi.

Akibatnya, terdapat risiko bercampurnya kandungan obat yang tidak seharusnya, dan higienitas obat dalam proses *dispensing* tidak terjamin.

Hal ini terjadi karena belum tersedianya ruang dan peralatan yang memadai untuk kegiatan *dispensing*.

- Pelayanan farmasi belum sepenuhnya mencapai standar pelayanan minimal (SPM), terjadi di tiga rumah sakit yaitu RSUD Kardinah Tegal Kota Tegal, RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dan RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya. Belum tercapainya SPM tersebut di antaranya peresepan obat belum seluruhnya sesuai dengan formularium, implementasi waktu tunggu pelayanan farmasi belum sepenuhnya sesuai SPM, dan tingkat kepuasan pelanggan belum memenuhi standar.

Hal tersebut mengakibatkan pasien pengguna pelayanan farmasi belum mendapatkan pelayanan maksimal sesuai SPM.

Penyebabnya antara lain karena tata kelola farmasi belum sesuai dengan standar, Kepala Instalasi Farmasi lemah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, serta penulisan resep belum sepenuhnya mematuhi formularium yang ditetapkan.

4.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit antara lain agar

- menyediakan ruang *dispensing* yang lebih memadai dan memerintahkan petugas *dispensing* untuk menggunakan peralatan sesuai standar;
- meningkatkan pelayanan dalam rangka mengurangi risiko kesalahan pemberian dan peresepan obat sesuai dengan formularium; dan
- menginstruksikan Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi sesuai standar.

Pelayanan Rawat Inap

4.14 Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan pasien untuk observasi diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau upaya pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit. Pelayanan rawat inap diberikan kepada pasien agar mendapatkan kesembuhan dengan memberikan asuhan keperawatan yang optimal.

4.15 Secara umum hasil pemeriksaan pelayanan rawat inap pada 14 rumah sakit menunjukkan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat inap dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi di antaranya sebagai berikut.

- Pelaksanaan pelayanan rawat inap belum memadai terjadi di delapan rumah sakit yaitu RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya, RSUD Kota Padang Panjang, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, RSUD Kabupaten Natuna, RSUD Taman Husada Kota Bontang, RSUD Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong, dan RSU Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak memadainya pelayanan rawat inap tersebut di antaranya penyediaan data rekam medis belum memenuhi prosedur pelayanan rekam medis, *visite* apoteker/asisten apoteker bersama dokter dan *visite* mandiri apoteker belum merata di seluruh ruang rawat inap, serta sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS) belum dijalankan oleh manajemen rumah sakit.

Akibatnya, tujuan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien tidak tercapai.

Hal tersebut antara lain terjadi karena Direktur Rumah Sakit belum menerapkan sistem *reward and punishment* bagi petugas medis dalam pelaksanaan pelayanan penanganan medis dan pelayanan rekam medis belum dilakukan secara tertib. Direktur Rumah Sakit kurang melakukan pengawasan yang memadai atas pelaksanaan *visite* dan komite medis belum optimal dalam memantau pelaksanaan pelayanan medis. Selain itu, Direktur Rumah Sakit belum menjalankan SIM-RS di instalasi rawat inap sesuai dengan ketentuan.

- Sarana dan prasarana pelayanan pada instalasi rawat inap belum memadai, terjadi di 11 rumah sakit yaitu RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya, RSUD Kota Padang Panjang, RSUD Kabupaten Siak, RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan, RS Lapangan Kabupaten Lingga, RSUD Taman Husada Kota Bontang, RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong, RSU Provinsi Sulawesi Tenggara, RSUD Abepura Provinsi Papua, RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor, dan RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya. Tidak memadainya sarana dan prasarana tersebut di antaranya masih terdapat sarana dan prasarana dalam keadaan

Entitas yang Diperiksa:

1. RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya
2. RSUD Kota Padang Panjang
3. RSUD Kabupaten Siak
4. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
5. RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan
6. RS Lapangan Kabupaten Lingga
7. RSUD Kabupaten Natuna
8. RSUD Taman Husada Kota Bontang
9. RSUD Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan
10. RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong
11. RSU Provinsi Sulawesi Tenggara
12. RSUD Abepura Provinsi Papua
13. RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor
14. RSUD Wamena Kabupaten Jayawijaya

rusak, belum dimanfaatkan, dan tidak memenuhi standar seperti belum mempunyai jalur evakuasi dan tidak ada sistem pemadam kebakaran. Selain itu, masih terdapat beberapa ruangan yang tidak dilengkapi papan informasi nama-nama pasien dan tidak terdapat papan informasi pada tempat tidur pasien.

Hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan tidak optimal yang akan mempengaruhi pelayanan yang diterima oleh pasien dan keluarga pasien.

Penyebabnya antara lain terjadi karena Direktur Rumah Sakit belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas pemeliharaan maupun inventarisasi sarana dan prasarana di instalasi rawat inap.

Gambar 4.1. Kasur Pasien Rusak



4.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk memerintahkan Direktur Rumah Sakit antara lain agar

- menerapkan sistem *reward and punishment* bagi petugas medis dalam pelaksanaan pelayanan penanganan medis;
- menginstruksikan apoteker melakukan *visite*/kunjungan apoteker ke seluruh ruang rawat inap;
- meningkatkan pengawasan yang memadai atas pelaksanaan prosedur kegiatan *visite* dan menginstruksikan komite medis untuk menyusun jadwal pelaksanaan *visite* sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- segera menerapkan SIM-RS dengan mencatat dan melaporkan seluruh aktivitas rumah sakit dalam satu sistem informasi yang terintegrasi; dan
- mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana dengan mengusulkan belanja pemenuhan kebutuhan, melakukan pengawasan atas pengadaan, dan memelihara yang telah ada.

Pelayanan Rawat Jalan

- 4.17 Rawat jalan merupakan pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut menginap.
- 4.18 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan rawat jalan di antaranya pengelolaan pelayanan kesehatan instalasi rawat jalan belum sesuai SPM, terjadi pada dua rumah sakit yaitu RSUD Taman Husada Kota Bontang dan RSUD Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong. Ketidaksesuaian pelayanan kesehatan instalasi rawat jalan tersebut di antaranya pelayanan pada poliklinik spesialis belum sepenuhnya ditangani dokter spesialis dan waktu pelayanan kesehatan belum tertib dan belum sesuai dengan SPM.

Entitas yang Diperiksa:

1. RSUD Taman Husada, Kota Bontang
2. RSUD Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan
3. RSUD Anuntaloko, Kabupaten Parigi Moutong

Akibatnya, kualitas pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan belum sepenuhnya sesuai standar. Hal tersebut antara lain disebabkan ketersediaan dokter spesialis belum memenuhi standar dan Direktur RSUD belum optimal dalam mengelola pelayanan penunjang dalam hal waktu kerja pegawai dan waktu pelayanan kesehatan.

- 4.19 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Direktur RSUD antara lain agar menggunakan SPM yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku sebagai acuan dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan; dan
 - Bupati agar memerintahkan Direktur RSUD antara lain untuk mengelola pelayanan penunjang kesehatan secara optimal yaitu menertibkan waktu kerja pegawai dan waktu pelayanan kesehatan.
- 4.20 Hasil pemeriksaan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit juga mengungkapkan adanya 1 kasus ketidakefisienan, 58 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 1 kasus indikasi kerugian negara senilai Rp159,81 juta, dan 1 kasus kelemahan administrasi. Dari kasus indikasi kerugian negara senilai Rp159,81 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp88,10 juta.

Pengelolaan Program Kesehatan

- 4.21 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas enam objek pengelolaan program kesehatan TA 2012 dan Semester I TA 2013, yaitu 1 objek Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman; 3 objek Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi

Rawas, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya; serta 2 objek Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

- 4.22 Program KIA merupakan program pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal (pelayanan kesehatan kepada ibu hamil selama masa kehamilan) yang ada, dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif.
- 4.23 Program Perbaikan Gizi Masyarakat merupakan program yang mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan *Millenium Development Goals* yang merupakan komitmen bangsa-bangsa di dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan pada Tahun 2015.
- 4.24 Program Jamkesda merupakan program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
- 4.25 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan program kesehatan, yaitu Program KIA, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dan Program Jamkesda.
- 4.26 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program kesehatan pada 4 dinas kesehatan dan 2 pemerintah daerah pada umumnya belum efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan program kesehatan yang terdiri atas 67 kasus ketidakefektifan.
- 4.27 Hasil pemeriksaan Program KIA pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman menunjukkan bahwa realisasi anggaran untuk program KIA telah sesuai dengan prioritas yang telah didesain dan tepat guna.
- 4.28 Hasil pemeriksaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang telah disediakan untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan kesehatan.

Entitas yang Diperiksa:

- Program KIA
 1. Dinas Kesehatan Kota Pariaman
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
- Program Jamkesda
 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
 2. Pemerintah Kabupaten Cianjur

4.29 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan program kesehatan, diuraikan sebagai berikut.

- Kinerja Bidang Kesehatan Keluarga (Kesga) dalam Program KIA pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman belum sepenuhnya memenuhi SPM. Indikator SPM yang belum sesuai standar yang ditetapkan yaitu kunjungan lengkap ibu hamil, pelayanan ibu nifas, dan peserta keluarga berencana aktif, sehingga mengakibatkan belum terjaminnya mutu pelayanan kesehatan Program KIA.

Hal tersebut antara lain terjadi karena Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang Kesga belum optimal dalam mengendalikan mutu pelayanan dasar kesehatan.

- Sumber daya manusia (SDM) Dinas Kesehatan belum memadai dalam mendukung efektivitas program perbaikan gizi masyarakat yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya. Tidak memadainya SDM tersebut antara lain dalam permasalahan jumlah pegawai dan kompetensi tenaga gizi yang tersedia. Selain itu, penyebaran tenaga dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya belum merata dan belum terdapat analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawai.

Hal tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program perbaikan gizi masyarakat belum optimal.

Hal tersebut terjadi karena penerimaan dan distribusi tenaga kesehatan dan nonkesehatan tidak berdasarkan kebutuhan, belum semua tenaga gizi mempunyai latar belakang pendidikan tenaga gizi, serta Kepala Dinas Kesehatan belum menyusun analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.

- Proses administrasi, verifikasi, dan penetapan jumlah klaim pasien tidak mampu Program Jamkesda belum didukung dengan SIM-RS, sistem pengendalian intern (SPI), dan SDM yang memadai. Hal tersebut terjadi di RSUD Al Ihsan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelayanan kepada pasien pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) belum didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi dan andal karena masih terjadi kesalahan input jenis/klasifikasi pasien. Pasien SKTM diklasifikasikan dan diinput sebagai pasien umum dan sebaliknya. Selain itu, SIM-RS pada setiap unit yang memberikan pelayanan terhadap pasien SKTM belum terintegrasi.

Proses administrasi, verifikasi, dan penetapan jumlah klaim pasien SKTM belum didukung dengan SPI yang optimal antara lain pada instalasi rawat jalan, berkas pasien yang akan melanjutkan pemeriksaan ke dokter spesialis dibawa sendiri oleh pasien ke ruang dokter spesialis. Kondisi ini memungkinkan berkas tercecer, sedangkan berkas yang tidak

lengkap tidak dapat diverifikasi untuk ditagihkan klaimnya. Selain itu permasalahan lain adalah kurangnya SDM dalam proses administrasi, verifikasi, dan penetapan jumlah klaim pasien SKTM.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan pencatatan dan pelaporan jumlah klaim biaya pelayanan kesehatan pasien SKTM tidak akurat, informasi mengenai jumlah klaim yang melebihi *plafond* pembiayaan, dan jumlah piutang pasien tidak dapat diketahui setiap waktu.

Hal tersebut terjadi antara lain karena Direktur RSUD Al Ihsan kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap efektivitas penggunaan SIM-RS, proses administrasi, verifikasi, dan penetapan jumlah klaim pasien SKTM.

- Penetapan kuota peserta Program Jamkesda tidak didukung database yang akurat, yaitu terdapat indikasi duplikasi kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Selain itu, terdapat nama kepala keluarga pada database kepesertaan Jamkesda yang tidak tercatat pada data penduduk miskin kelurahan dan rincian peserta Program Jamkesda tidak sesuai dengan alokasi kuota masyarakat miskin.

Hal ini mengakibatkan jumlah masyarakat miskin yang berhak mendapatkan pelayanan Program Jamkesda di Kabupaten Cianjur belum diketahui dengan pasti dan pemberian pelayanan Program Jamkesda berpotensi tidak tepat sasaran.

Hal ini terjadi antara lain karena Pemerintah Kabupaten Cianjur belum melakukan pemutakhiran database peserta Jamkesmas dan Jamkesda dengan mengacu pada database penduduk miskin di wilayah Kabupaten Cianjur.

4.30 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain telah merekomendasikan kepada

- Walikota Pariaman agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk memerintahkan Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang Kesga untuk lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian mutu terhadap pelayanan dasar kesehatan;
- Bupati Musi Rawas, Bupati Ketapang, dan Bupati Kubu Raya agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat dan menetapkan rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan nonkesehatan secara bertahap, mendistribusikan berdasarkan kebutuhan, menyusun analisis beban kerja, dan kebutuhan pegawai;
- Gubernur Jawa Barat agar memerintahkan Direktur RSUD Al Ihsan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap efektivitas

penggunaan SIM-RS, proses administrasi, verifikasi, dan penetapan jumlah klaim pasien SKTM; dan

- Bupati Cianjur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan instansi dan SKPD terkait supaya melakukan verifikasi dan pemutakhiran database penduduk miskin Kabupaten Cianjur. Database tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar penetapan Kebijakan Bupati mengenai kuota peserta Jamkesda.

4.31 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan program kesehatan juga mengungkap adanya 21 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Badan Pengawas Obat dan Makanan

4.32 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas BPOM TA 2011 s.d. Semester I TA 2013.

4.33 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah peranan dan fungsi BPOM sudah efisien dan efektif dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sebelum obat beredar (*pre market*) dan saat obat beredar (*post market*) dari Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2013.

4.34 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan *pre market* dan *post market* yang merupakan tugas pokok dan fungsi BPOM belum dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kinerja BPOM yang terdiri atas 3 kasus ketidakefisienan dan 11 kasus ketidakefektifan.

4.35 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kinerja BPOM di antaranya sebagai berikut.

Pre Market

- Terdapat antrian yang panjang dalam memasukkan berkas praregistrasi dan registrasi ke BPOM, serta terdapat waktu diam atau *idle time* berkas registrasi yang masuk ke evaluator dengan rentang waktu antara 1 sampai dengan 198 hari.

Hal tersebut mengakibatkan proses penyelesaian registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar oleh industri farmasi membutuhkan waktu yang lama. Penyebabnya karena tidak tersedia jumlah evaluator yang memadai untuk melayani permohonan registrasi.

Post Market

- Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) dalam melakukan fungsi pengawasan obat dan makanan belum optimal. Ketidakefektifan fungsi pengawasan yaitu struktur Balai Besar/Balai POM di daerah belum mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam tugas pengawasan obat dan makanan secara efektif.

Selain itu, jumlah SDM di Balai Besar/Balai POM belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam tugas pengawasan obat dan makanan secara efektif. Dari data Laporan Tahunan 2012 yang diuji petik pada 15 Balai Besar/Balai POM, terdapat jumlah sarana produksi dan distribusi yang ada sebanyak 148.119 sarana, sedangkan pemeriksaan yang dapat direalisasikan oleh Balai Besar/Balai POM sebanyak 23.184 sarana atau sebesar 15,65% dari jumlah sarana yang ada.

Hal ini mengakibatkan produk obat dan makanan yang beredar kurang mendapatkan pengawasan yang memadai dan berpotensi terdapat produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak memiliki izin edar di Indonesia.

Hal ini terjadi karena Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan belum melaksanakan evaluasi dan kajian atas struktur organisasi yang efektif di Balai Besar/Balai POM di daerah. Selain itu, Kepala Biro Umum belum melaksanakan analisis kebutuhan dan pemerataan SDM yang memadai dalam pengawasan obat dan makanan.

- 4.36 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar
- berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi keterbatasan jumlah evaluator BPOM pada proses evaluasi registrasi obat;
 - memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melaksanakan evaluasi dan kajian atas struktur organisasi yang efektif di Balai Besar/Balai POM di daerah; dan
 - memerintahkan Kepala Biro Umum untuk melaksanakan analisis kebutuhan SDM yang memadai dalam pengawasan obat dan makanan serta pemerataan SDM dari Balai Besar/Balai POM yang mengalami kelebihan pegawai dengan Balai Besar/Balai POM yang mengalami kekurangan pegawai sehingga tercukupinya kebutuhan di bidang SDM yang ada di Balai Besar/Balai POM.
- 4.37 Hasil pemeriksaan kinerja atas BPOM juga mengungkapkan 1 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.
- 4.38 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Pendidikan

- 5.1 Kesadaran bangsa Indonesia atas ketertinggalannya terhadap bangsa-bangsa lain sebagai akibat dari kurang optimalnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan semakin tinggi. Sejak era reformasi pada Tahun 1999, tekad pemerintah untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan semakin kuat, antara lain dengan diamanatkannya alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN untuk bidang pendidikan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 5.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan 23 pemeriksaan kinerja atas bidang pendidikan, terdiri atas 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi dan 22 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota. Satu objek pemeriksaan pemerintah provinsi merupakan pemeriksaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 22 objek merupakan pemeriksaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan; pemeriksaan program bantuan operasional sekolah (BOS); dan pemeriksaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- 5.3 Selain berdasar tingkat pemerintahan, 23 objek pemeriksaan tersebut terbagi atas 19 objek pemeriksaan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan; 3 objek pemeriksaan PPDB; dan 1 objek pemeriksaan program BOS.
- 5.4 Hasil pemeriksaan atas kinerja pendidikan menunjukkan permasalahan-permasalahan ketidakefektifan sebanyak 264 kasus senilai Rp656,76 juta.
- 5.5 Perincian hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sarana dan Prasarana Pendidikan

- 5.6 Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, dapat berupa pendidik, kepala satuan pendidikan, penilik, pengawas satuan pendidikan, laboran, pustakawan, tata usaha, tukang kebun, dan penjaga keamanan sekolah. Pengelolaan pendidik merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis tenaga pendidik. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, dalam jumlah yang mencukupi, dan distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.
- 5.7 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan TA 2012-2013

pada 19 Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga provinsi/kabupaten/kota di 11 provinsi. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan kinerja atas

- pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan baik pendidikan dasar dan/atau menengah pada 5 Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar pada 10 Dinas Pendidikan; dan
- pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan/atau menengah pada 4 Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

5.8 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Hasil pemeriksaan pada umumnya kurang efektif dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan, yang terdiri atas 221 kasus ketidakefektifan senilai Rp656,76 juta.

5.9 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan di antaranya sebagai berikut.

- Pemenuhan dan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, terjadi di tujuh entitas yaitu terjadi pada Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman; Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Mamasa. Permasalahan belum sesuai kebutuhan guru, ditunjukkan dengan masih kurangnya jumlah guru baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA/SMK. Kekurangan

Entitas yang Diperiksa:

1. Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Barat
2. Kabupaten Pasaman
3. Kabupaten Sijunjung
- Provinsi Jambi
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Provinsi Kepulauan Riau
5. Kabupaten Karimun
6. Kabupaten Kep. Anambas
- Provinsi Jawa Tengah
7. Kabupaten Kebumen
8. Kabupaten Purbalingga
- Provinsi Sulawesi Barat
9. Kabupaten Mamasa

guru tersebut oleh sekolah diisi dengan mengangkat guru honor yang dibiayai dari dana APBD maupun yang diangkat oleh pemerintah. Selain itu, penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan tingkat pendidikan menengah tidak merata, serta pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan belum dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hal tersebut mengakibatkan proses belajar kurang maksimal, dan menghambat pengembangan serta peningkatan mutu pendidikan. Penyebabnya antara lain karena Kepala Dinas kurang optimal dalam mengendalikan dan mengawasi perencanaan, pelaksanaan, dan penataan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

- Permasalahan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan selain dari segi jumlah, juga terjadi dari segi pemenuhan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini terjadi di sembilan entitas yang diperiksa. Pemerintah daerah belum dapat memenuhi standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru harus memenuhi beberapa kualifikasi yang telah diatur peraturan perundang-undangan, antara lain pendidikan minimal S1/D-IV dengan jurusan sesuai mata pelajaran yang diampu dan memiliki sertifikat pendidik.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan target standar minimum kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan tidak tercapai dan layanan mutu pendidikan menjadi tidak optimal. Penyebabnya antara lain karena Kepala Dinas belum optimal dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sesuai ketentuan kualifikasi.

Gambar 5.1. Proses Belajar Mengajar Pendidikan Dasar



5.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada Gubernur/Bupati untuk menginstruksikan Kepala Dinas agar

- meningkatkan pengendalian dan pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, penataan, serta pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan; dan

- meningkatkan usaha pemenuhan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan kualifikasinya.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

5.12 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di antaranya sebagai berikut.

- Pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia belum menunjang kegiatan belajar mengajar. Permasalahan ini terjadi pada delapan entitas yaitu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Bombana. Sarana dan prasarana pendidikan belum menunjang kegiatan belajar mengajar karena belum dimanfaatkan atau dimanfaatkan tapi tidak sesuai peruntukannya. Sarana dan prasarana tersebut antara lain berupa peralatan laboratorium, alat peraga, dan buku-buku pelajaran.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain tujuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak tercapai.

Penyebabnya antara lain karena Kepala Dinas Pendidikan kurang optimal dalam melakukan perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.

- Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar. Hal ini terjadi di 13 entitas yaitu pada Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bombana, dan Kota Ternate. Permasalahan tersebut meliputi antara lain, ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah,

Entitas yang Diperiksa:

- Provinsi Sumatera Utara
 1. Kabupaten Dairi
 2. Kabupaten Karo
 3. Kabupaten Tapanuli Utara
- Provinsi Sumatera Barat
 4. Kabupaten Pasaman
 5. Kabupaten Sijunjung
- Provinsi Sumatera Selatan
 6. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Provinsi Jawa Tengah
 7. Kabupaten Kebumen
 8. Kabupaten Purbalingga
- Provinsi Jawa Timur
 9. Kabupaten Banyuwangi
 10. Kabupaten Madiun
 11. Kabupaten Probolinggo
 12. Kabupaten Tuban
- Provinsi Sulawesi Tenggara
 13. Kabupaten Bombana
- Provinsi Maluku Utara
 14. Kota Ternate

usaha kesehatan sekolah, ruang konseling, gudang, dan buku-buku pelajaran di sekolah belum sesuai dengan SPM.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan pelayanan pendidikan masih di bawah SPM dan berpotensi mempengaruhi mutu pendidikan. Penyebabnya antara lain karena Kepala Dinas Pendidikan tidak memiliki database yang memadai sebagai pedoman perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, belum optimal memperhatikan pemenuhan SPM dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, serta kurang optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Gambar 5.2. Sarana dan Prasarana Pendidikan yang Belum Dimanfaatkan



5.13 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk menginstruksikan Kepala Dinas, antara lain agar

- melakukan pengendalian dalam proses perencanaan serta memerintahkan pejabat terkait lebih optimal dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan; dan
- melakukan pemetaan dan pendataan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, segera memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai SPM, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas unit kerjanya.

5.14 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana pendidikan tersebut juga mengungkap adanya 50 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 6 kasus kerugian daerah senilai Rp1.095,85 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp151,49 juta), 2 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp285,79 juta, dan 4 kasus kelemahan administrasi.

Penerimaan Peserta Didik Baru

5.15 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas PPDB Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tahun

Pelajaran 2013/2014 yang dilaksanakan pada tiga Dinas Pendidikan kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, dan Kota Makassar.

- 5.16 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pencapaian kinerja kegiatan, mengidentifikasi kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja di bawah target atau standar PPDB, dan memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen dalam rangka perbaikan serta peningkatan kinerja untuk tahun pelajaran berikutnya.
- 5.17 Hasil pemeriksaan kinerja atas PPDB SMAN/SMKN tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPDB kurang efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan PPDB yang terdiri atas 33 kasus ketidakefektifan.
- 5.18 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan PPDB di antaranya pengumuman kegiatan PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014 pada tiga entitas tersebut belum terjadwal, belum diatur dengan prosedur operasional standar (POS), belum memanfaatkan media informasi yang memiliki akses yang luas, dan belum menyajikan informasi yang lengkap. Pengumuman PPDB kurang informatif dan transparan di antaranya karena banyak sekolah yang belum mengumumkan secara lengkap dan jelas tentang PPDB yang melalui jalur bebas tes, proses seleksi, dan hasil seleksi PPDB.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan asas transparansi PPDB tidak terjamin pelaksanaannya secara optimal dan efektivitas kegiatan PPDB dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon peserta didik tidak tercapai.

Penyebabnya karena kepala sekolah belum menetapkan POS PPDB, pengumuman PPDB belum dapat diakses dengan mudah, dan belum berisi informasi yang lengkap.

- 5.19 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya menginstruksikan kepala sekolah agar menyusun POS PPDB dan secara berjenjang kepada kepala sekolah bersama dengan panitia PPDB memanfaatkan media informasi yang memiliki akses yang luas dalam rangka pengumuman PPDB, serta mengumumkan kegiatan/hasil PPDB secara terjadwal dan lengkap.
- 5.20 Hasil pemeriksaan kinerja ini juga mengungkapkan adanya 14 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 1 kasus kelemahan administrasi.

Program Bantuan Operasional Sekolah

- 5.21 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pertanggungjawaban dan kegiatan monitoring evaluasi program BOS (BOS

Pusat, BOS Provinsi, dan BOS Kabupaten) pada Pemerintah Kabupaten Bandung TA 2012 dan Semester I Tahun 2013.

- 5.22 BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Berdasarkan sumber pendanaannya, penerimaan dana BOS di Kabupaten Bandung dibagi atas 3 jenis, yaitu BOS Pusat (pendanaan dari APBN), BOS Provinsi (pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat), dan BOS Kabupaten (pendanaan dari APBD Kabupaten Bandung).
- 5.23 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan BOS. Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pertanggungjawaban dan kegiatan monitoring evaluasi program BOS menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dan kegiatan monitoring evaluasi belum memadai untuk mencapai efektivitas pengelolaan BOS di tingkat Kabupaten Bandung. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BOS yang terdiri atas 10 kasus ketidakefektifan.
- 5.24 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BOS di antaranya sebagai berikut.

- Pencatatan penggunaan dana BOS oleh sekolah penerima BOS belum memadai, ditunjukkan dengan uji petik terhadap 32 sekolah penerima BOS. Hasil uji petik menunjukkan bahwa 21 sekolah tidak lengkap mencatat penggunaan dana BOS Pusat, 29 sekolah tidak lengkap mencatat penggunaan dana BOS Provinsi, dan 5 sekolah sama sekali tidak mencatat penggunaan dana BOS Kabupaten.

Akibatnya antara lain Tim Manajemen BOS Kabupaten tidak dapat mengevaluasi lebih lanjut penggunaan dana BOS oleh sekolah dan membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah.

Hal tersebut terjadi antara lain karena Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung belum melaksanakan sosialisasi terkait pencatatan atas penggunaan dana BOS kepada seluruh sekolah dan Tim Manajemen BOS Kabupaten belum sepenuhnya melaksanakan monitoring evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan BOS.

- Tim Manajemen BOS Sekolah dan Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung belum melaporkan penggunaan dana BOS secara memadai. Tim Manajemen BOS Sekolah dan Kabupaten Bandung tidak menyusun dan melaporkan penggunaan dana seperti yang disyaratkan dalam pedoman dan petunjuk teknis yang ada. Selain itu, Tim Manajemen BOS Sekolah Negeri belum seluruhnya melaporkan aset yang berasal dari realisasi penggunaan dana BOS dan aset tersebut belum tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan realisasi penggunaan dana BOS tidak dapat diketahui secara tepat penggunaannya dan Tim Manajemen BOS tidak dapat mengevaluasi lebih lanjut penggunaan dana BOS oleh sekolah. Selain itu, permasalahan tersebut mengakibatkan aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung belum mencakup aset di sekolah yang diperoleh dari dana BOS.

Penyebabnya antara lain karena sosialisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS serta sosialisasi pengelolaan aset masih kurang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten. Selain itu, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan dan pelaporan aset dari pelaksana BOS di tingkat sekolah negeri dan tingkat Kabupaten Bandung.

- 5.25 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada
- Bupati Bandung agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh sekolah penerima BOS terkait pencatatan atas penggunaan dana BOS dan meningkatkan pelaksanaan monitoring evaluasi atas penggunaan dana BOS oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten; dan
 - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung untuk menganggarkan dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS, serta menganggarkan dan melaksanakan bimbingan teknis terkait pengelolaan aset yang diperoleh dari dana BOS kepada seluruh sekolah negeri penerima BOS.
- 5.26 Hasil pemeriksaan ini juga mengungkap adanya 3 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.
- 5.27 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 6

Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 6.1 Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai pemerintah. Langkah-langkah kebijakan pemerintah untuk mencapai kemajuan ekonomi dituangkan dalam lima agenda pembangunan, di antaranya adalah stabilitas ekonomi yang kokoh. Di sisi pengelolaan keuangan negara, ketahanan fiskal yang membaik harus terus dipertahankan guna mendukung pencapaian stabilitas ekonomi yang kokoh. Di sisi penerimaan negara, berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan penerimaan pajak yang diharapkan meningkat setiap tahunnya selama periode Tahun 2010-2014.
- 6.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan 51 pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame (PHRR); pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB); pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan pengelolaan Pajak Restoran, Kerja Sama Operasi (KSO), dan Retribusi Izin Gangguan. Pemeriksaan pengelolaan pajak tersebut dilakukan di 3 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 48 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 6.3 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PHRR dilakukan pada 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi dan 46 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota. Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB dilakukan pada 2 objek pemeriksaan pemerintah provinsi. Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB dilakukan pada 1 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten. Adapun pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Pajak Restoran, KSO, dan Retribusi Izin Gangguan dilakukan pada 1 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten.
- 6.4 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah ini menunjukkan permasalahan ketidakefektifan sebanyak 422 kasus.
- 6.5 Perincian hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut.

Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame

- 6.6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

- 6.7 Sumber pembiayaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang mempunyai arti penting karena dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah (pemda) yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu yang memberi kontribusi pada PAD adalah pajak daerah, di antaranya yang berasal dari PHRR.
- 6.8 Penerimaan dari pajak daerah terutama yang berasal dari PHRR sangat terbatas. Dari 47 pemda yang diperiksa, terdapat 32 pemda yang mempunyai kontribusi PHRR terhadap PAD di bawah 20%, sedangkan 13 pemda mempunyai kontribusi PHRR terhadap PAD antara 20% s.d. 40%, dan hanya 2 pemda yang mempunyai kontribusi PHRR terhadap PAD di atas 40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemda, terkait penerimaan pajak dari PHRR belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Selain itu, hasil pemeriksaan PAD pada tahun sebelumnya mengidentifikasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemda masih di bawah potensi riilnya. Menjawab hal tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PHRR untuk mengetahui penyebab atas kondisi tersebut dan memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan PHRR.
- 6.9 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan PHRR Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada 47 pemda. Pemeriksaan dilakukan pada Satker Pengelola Pajak (yaitu: 1 Dinas Pelayanan Pajak (DPP) provinsi, 46 Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA), dan Dinas lain yang mempunyai fungsi pengelolaan pajak pada pemerintah kabupaten/kota), serta instansi terkait lainnya.
- 6.10 Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PHRR bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan PHRR yang secara spesifik diarahkan untuk menilai kecukupan empat aspek utama yang berperan penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan PHRR. Keempat aspek utama tersebut yaitu 1) aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya; 2) aspek perhitungan potensi pajak dan rencana optimalisasi penerimaan pajak; 3) aspek kegiatan pemungutan pajak; dan 4) aspek monitoring dan evaluasi pengelolaan PHRR.
- 6.11 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PHRR menunjukkan bahwa pemerintah provinsi/kabupaten/kota telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan PHRR, di antaranya sebagai berikut.
- Penetapan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah sebagai payung hukum dalam pengelolaan PHRR.
 - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan PHRR.

- 6.12 Selain capaian tersebut di atas, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan PHRR belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan signifikan dalam empat aspek kinerja utama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan PHRR.
- 6.13 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas atas pengelolaan PHRR, di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

Aspek Kelembagaan, Tata Laksana, dan Sumber Daya

- 6.14 Aspek kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya belum sepenuhnya mendukung terlaksananya pengelolaan PHRR, di antaranya sebagai berikut.
- Pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung oleh perangkat aturan dan pedoman yang andal dan lengkap, antara lain berupa petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta standar operasional prosedur (SOP) tentang pengelolaan PHRR.

Hal ini mengakibatkan pengelolaan PHRR belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum merancang juklak, juknis, dan SOP tentang pengelolaan PHRR secara andal dan lengkap.

- Pengelolaan PHRR belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup. Jumlah pegawai dinilai ideal jika sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja. Hasil analisis beban kerja yang dilakukan oleh pemda menunjukkan bahwa terdapat kekurangan jumlah SDM pengelola pajak. Sedangkan dalam hal kompetensi SDM pengelola PHRR, seluruh pemda yang diperiksa mengungkapkan bahwa kompetensi SDM belum memadai. Pengelola PHRR dirasakan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang karakteristik pajak yang menjadi bidang tugasnya. Selain itu, pemda juga belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai keahlian dalam hal perpajakan secara memadai, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi pemahaman bidang perpajakan.

Hal ini mengakibatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan PHRR belum sesuai kebutuhan, penempatan pegawai masih belum merata, serta penyelesaian masalah hukum terkait perpajakan tidak dapat segera dilakukan penyidikan.

Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun analisis beban kerja dengan baik, belum melaksanakan kegiatan program diklat pegawai secara berkala, belum melaksanakan kebijakan pola rotasi dan mutasi pegawai dengan pola yang baku, serta belum melaksanakan pemenuhan kebutuhan PPNS.

- Sistem informasi pengelolaan pajak daerah, khususnya PHRR belum sepenuhnya memadai, yaitu terdapat pemda yang belum memiliki sistem informasi yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan PHRR.

Hal ini mengakibatkan sistem informasi pengelolaan pajak daerah belum dapat menghasilkan seluruh informasi yang diperlukan dalam pengelolaan PHRR. Penyebabnya karena sistem informasi pengelolaan PHRR tersebut belum terintegrasi dengan sistem perizinan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah lainnya.

6.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, di antaranya untuk menginstruksikan Kepala Satker Pengelola Pajak agar

- merancang juklak, juknis, dan SOP tentang pengelolaan PHRR secara andal dan lengkap;
- menyusun analisis beban kerja disesuaikan dengan kebutuhan, meningkatkan kegiatan program diklat pegawai secara berkala dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, menerapkan kebijakan rotasi dan mutasi pegawai sesuai dengan pola yang baku secara berkala, serta memenuhi kebutuhan PPNS guna memperlancar penyidikan perpajakan; dan
- memperbaiki sistem informasi pajak daerah agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lain yang terkait dan dapat menunjang pengelolaan PHRR.

Aspek Perhitungan Potensi Pajak dan Rencana Optimalisasi Penerimaan Pajak

6.16 Kegiatan perhitungan potensi PHRR belum sepenuhnya didukung database yang memadai dan optimalisasi penerimaan PHRR belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, di antaranya sebagai berikut.

- Perhitungan potensi PHRR belum sepenuhnya didukung database yang lengkap dan mutakhir. Perhitungan potensi PHRR merupakan langkah awal dalam menetapkan target penerimaan pajak. Dengan dukungan database yang lengkap dan mutakhir akan diperoleh penerimaan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Gambar 6.1. Rumah Kos Tidak Ada Dalam Database

Perhitungan potensi PHRR belum menggunakan metodologi dan data yang andal. Pada umumnya, pemda menghitung target penerimaan pajak dengan pendekatan *incremental*, yaitu dengan menambahkan persentase kenaikan yang diharapkan terhadap target atau realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Penetapan target penerimaan PHRR tersebut tidak didasarkan pada potensi pajak yang riil. Sehingga penetapan target pajak dengan pendekatan tersebut tidak sistematis dan tidak akuntabel.

Hal ini mengakibatkan target penerimaan PHRR tidak menggambarkan potensi penerimaan PHRR yang sebenarnya. Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum mendokumentasikan data perhitungan potensi PHRR yang lengkap dan mutakhir, serta belum merancang metode perhitungan target penerimaan PHRR yang sistematis dan akuntabel.

- Optimalisasi penerimaan PHRR belum dilakukan sepenuhnya secara memadai untuk mendukung penerimaan PHRR. Permasalahan tersebut di antaranya kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi pajak belum disusun, kegiatan sosialisasi peraturan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan, serta koordinasi antara instansi pengelola PHRR dengan instansi pengelola perizinan dan instansi terkait lainnya dalam rangka pendataan wajib pajak (WP) belum dilaksanakan secara optimal.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pengelolaan PHRR belum optimal dan belum efektif. Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi atas pengelolaan PHRR secara efektif dan menyeluruh.

- 6.17 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, di antaranya untuk menginstruksikan Kepala Satker Pengelola Pajak agar
- merancang metode perhitungan target penerimaan PHRR yang lebih sistematis dan akuntabel;
 - mendokumentasikan data perhitungan potensi pajak yang lengkap dan pemutakhiran database WP sebagai dasar perhitungan potensi PHRR; dan
 - menyusun kebijakan dan rencana kerja intensifikasi dan ekstensifikasi atas pengelolaan PHRR yang efektif dan menyeluruh, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan pajak dan koordinasi dengan instansi terkait secara optimal.

Aspek Kegiatan Pemungutan Pajak

- 6.18 Kegiatan pemungutan PHRR belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, di antaranya sebagai berikut.

- Kegiatan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

Kelemahan pada aspek pemungutan PHR, terutama kegiatan proses pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang belum sepenuhnya mudah dan sederhana, serta penerimaan pajak belum seluruhnya dicatat secara lengkap dan benar. Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan atas PHR belum dilakukan secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya indikasi WP hotel dan restoran tidak menyampaikan data/dokumen perpajakan secara lengkap dan benar, serta pembayaran pajak di bawah potensi sewajarnya. Selain itu, pemda secara umum tidak mengenakan tindakan/sanksi atas permasalahan tersebut.

Hal ini mengakibatkan pelayanan kepada WP belum optimal, kekurangan penetapan PHR, dan hilangnya potensi kekurangan penerimaan PHR.

Penyebabnya karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum menyusun SOP terkait pembayaran dan pelaporan, serta penerimaan dan pencatatan penerimaan pajak, belum merancang mekanisme verifikasi kesesuaian SPTPD dengan dokumen pendukungnya, belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan PHR, belum menganggarkan kegiatan pemeriksaan pajak, termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan SDM untuk pemeriksaan pajak.

- Kegiatan Pemungutan Pajak Reklame (PR)

Kelemahan utama pada aspek pemungutan PR adalah proses perizinan sampai dengan terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) reklame yang memerlukan waktu yang lama, karena dalam prosesnya memerlukan keterlibatan instansi lain. Kegiatan penetapan PR juga belum memadai, karena masih terdapat ketidakakuratan dalam proses penetapan nilai pajak. Dalam proses penertiban reklame, terdapat penyelenggaraan reklame/alat peraga yang tidak berizin, telah habis masa izinnya, atau penempatannya menyalahi ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut mengakibatkan potensi penerimaan PR yang tidak dapat segera diterima oleh daerah, menurunnya kepatuhan WP untuk membongkar reklame yang tidak memiliki izin, dan habis masa berlakunya izin.

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Kepala Satker Pengelola Pajak untuk penyetoran pajak, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penertiban reklame, serta Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) untuk perizinan reklame dalam kegiatan penertiban reklame, kegiatan survei lapangan dalam rangka penertiban reklame tidak berizin belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan PR, khususnya terkait penetapan dan penagihan PR.

Gambar 6.2. Kegiatan Penertiban Reklame



6.19 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memerintahkan Kepala Satker Pengelola Pajak agar

- menyusun SOP terkait pembayaran dan pelaporan, serta penerimaan dan pencatatan penerimaan pajak, merancang mekanisme verifikasi kesesuaian SPTPD dengan dokumen pendukungnya, serta merancang mekanisme perizinan PR yang lebih sederhana;

- meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemungutan PHRR;
- meningkatkan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan penertiban reklame, serta meningkatkan kegiatan survei lapangan dalam rangka penertiban reklame tidak berizin; dan
- melaksanakan pemeriksaan pajak atas WP hotel dan restoran yang terindikasi tidak membayar dan melaporkan pajak yang seharusnya.

Aspek Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan PHRR

6.20 Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pengelolaan PHRR belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, di antaranya pengukuran kinerja masih terbatas pada pencapaian realisasi penerimaan pajak dan penyerapan anggaran, belum mencakup seluruh tugas dan fungsi masing-masing unit kerja, kegiatan monev belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi, pelaporan hasil monev belum dibuat dan belum ditindaklanjuti, serta Inspektorat belum melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin.

Hal ini mengakibatkan indentifikasi permasalahan dan tindakan perbaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga dapat mengganggu pencapaian target penerimaan atas pengelolaan PHRR.

Hal ini terjadi karena Kepala Satker Pengelola Pajak belum melaksanakan monev sesuai tupoksinya, belum membangun perancangan dan penerapan sistem monev yang komprehensif, serta belum membuat dan menindaklanjuti hasil monev.

6.21 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, di antaranya untuk memerintahkan Kepala Satker Pengelola Pajak agar

- merancang dan menerapkan sistem monev yang komprehensif; dan
- membuat dan menindaklanjuti pelaksanaan monev, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk langkah-langkah perbaikan atas pengelolaan PHRR.

6.22 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PHRR selain mengungkap adanya 371 kasus ketidakefektifan, juga mengungkap adanya 152 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, dan 32 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42.758,94 juta yang di antaranya adalah 26 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp42.543,20 juta.

6.23 Dari kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di atas yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas daerah senilai Rp1.334,58 juta.

Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 6.24 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB pada dua provinsi yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013.
- 6.25 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 6.26 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB menunjukkan bahwa Dispenda Provinsi Lampung selaku Dinas Pengelola PKB dan BBNKB telah melakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu sebagai berikut.
- Melakukan analisis dan evaluasi pengelolaan aplikasi sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) yang akan digunakan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan pengendalian penerimaan PKB dan BBNKB.
 - Melakukan perubahan struktur organisasi Dispenda untuk menunjang upaya perbaikan pengelolaan pajak daerah.
- 6.27 Selain capaian tersebut di atas, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PKB dan BBNKB pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa pengelolaan PKB dan BBNKB belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, yang terdiri atas 18 kasus ketidakefektifan.
- 6.28 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas atas pengelolaan PKB dan BBNKB, di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.
- Pengelolaan SDM dalam pelayanan PKB dan BBNKB belum efektif, yaitu analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilaksanakan.
- Hal ini mengakibatkan kualitas pelayanan PKB dan BBNKB belum optimal. Penyebabnya karena Dispenda belum menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- Database dalam sistem aplikasi Samsat belum lengkap dan akurat, yaitu perpindahan data ke sistem *online* belum terintegrasi dalam satu jaringan, pusat data yang dikelola tidak dijamin validitasnya, dan terdapat perbedaan jumlah data kendaraan antara Dispenda, PT Jasa Raharja (Persero), dan Kepolisian Daerah (Polda).
- Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari PKB dan BBNKB. Penyebabnya karena sistem aplikasi Samsat belum terintegrasi dalam satu sistem *online* untuk menghasilkan database yang valid, serta belum adanya koordinasi antarinstansi dalam pelayanan PKB dan BBNKB terkait jumlah data kendaraan.

Gambar 6.3. Ruang Tunggu Pelayanan Samsat

- 6.29 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur di antaranya untuk memerintahkan Kepala Dispenda agar
- menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
 - mengintegrasikan data ke sistem *online* sehingga pusat data yang dikelola terjamin validitasnya, serta melakukan koordinasi antara Dispenda, PT Jasa Raharja (Persero), dan Polda terkait jumlah data kendaraan dalam pelayanan PKB dan BBNKB.
- 6.30 Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan PKB dan BBNKB juga mengungkap adanya 23 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 2 kasus kelemahan administrasi.

Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan

- 6.31 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB pada Pemerintah Kabupaten Mimika di Timika, Provinsi Papua untuk Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013.
- 6.32 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB dalam rangka rencana optimalisasi penerimaan pajak.
- 6.33 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika telah berupaya secara optimal melaksanakan kegiatan pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai kelemahan-kelemahan yang menyebabkan pengelolaan pajak tersebut belum efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, yang terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan.

6.34 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas atas pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB, di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

- Peraturan bupati (perbup) mengenai pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB belum ditetapkan, Dispenda belum memiliki SOP/juklak/juknis mengenai pengelolaan pajak daerah, serta struktur organisasi belum sepenuhnya merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah belum optimal, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai dalam pengelolaan pajak belum jelas. Penyebabnya karena belum adanya perda dan SOP/juklak/juknis tentang pengelolaan pajak daerah, serta struktur organisasi belum dilakukan pemisahan tupoksi secara jelas.

- Database WP belum disajikan secara lengkap dan mutakhir. Salah satu kesulitan dalam penetapan pajak adalah tidak adanya data dan informasi yang lengkap dan terpercaya yang ditimbulkan adanya kecenderungan WP dengan sengaja menyembunyikan informasi yang dimilikinya.

Hal ini mengakibatkan perhitungan potensi penerimaan pajak tidak dapat diketahui secara pasti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penyebabnya karena belum tersedianya dasar perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang jelas dan database belum lengkap dan mutakhir.

6.35 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Mimika agar

- menetapkan perbup dan SOP/juklak/juknis mengenai pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB, serta memerintahkan Kepala Dispenda untuk berkoordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk melakukan reviu atas Struktur Organisasi Dispenda; dan
- memerintahkan Kepala Dispenda untuk melakukan pemutakhiran database WP dan menyusun kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan hasil studi kelayakan dan kajian yang memadai.

6.36 Hasil pemeriksaan kinerja ini juga mengungkap adanya 1 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Pengelolaan Pajak Restoran, Kerja Sama Operasi, dan Retribusi Izin Gangguan

6.37 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Pajak Restoran, KSO, dan Retribusi Izin Gangguan pada Pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke, Provinsi Papua untuk Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013.

- 6.38 Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, KSO, dan Retribusi Izin Gangguan dalam rangka rencana optimalisasi penerimaan pajak.
- 6.39 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke telah berupaya secara optimal melaksanakan kegiatan pengelolaan Pajak Restoran, KSO, dan Retribusi Izin Gangguan, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai kelemahan-kelemahan yang menyebabkan pengelolaan pajak tersebut belum efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, yang terdiri atas 22 kasus ketidakefektifan.
- 6.40 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas atas pengelolaan Pajak Restoran, KSO, dan Retribusi Izin Gangguan, di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut. Peraturan bupati sebagai aturan pelaksana perda belum seluruhnya disusun dan juklak/juknis/SOP tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi izin gangguan belum dibuat.
- Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi izin gangguan tidak maksimal. Penyebabnya karena Dispenda belum sepenuhnya memperhatikan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan belum membuat usulan juklak/juknis/SOP tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi izin gangguan.
- 6.41 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Merauke agar menyusun perbup yang secara rinci memuat juklak/juknis/SOP tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi izin gangguan.
- 6.42 Hasil pemeriksaan kinerja ini juga mengungkap adanya 3 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.
- 6.43 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Infrastruktur

- 7.1 Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Pembangunan Infrastruktur tersebut diupayakan yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan terkait bidang infrastruktur yaitu meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur. Pencapaian sasaran ini ditunjukkan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi, serta pos dan telekomunikasi.
- 7.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan sepuluh pemeriksaan kinerja atas bidang infrastruktur, terdiri atas 8 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten.
- 7.3 Delapan objek pemeriksaan Pemerintah Pusat yaitu 7 objek pemeriksaan jalan dan jembatan nasional; dan 1 objek pemeriksaan percepatan pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa. Dua objek pemeriksaan pemerintah kabupaten adalah pemeriksaan jalan dan jembatan kabupaten.
- 7.4 Hasil pemeriksaan atas kinerja infrastruktur menunjukkan permasalahan-permasalahan ketidakefektifan sebanyak 73 kasus senilai Rp81.065,04 juta.
- 7.5 Perincian hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut.

Jalan dan Jembatan

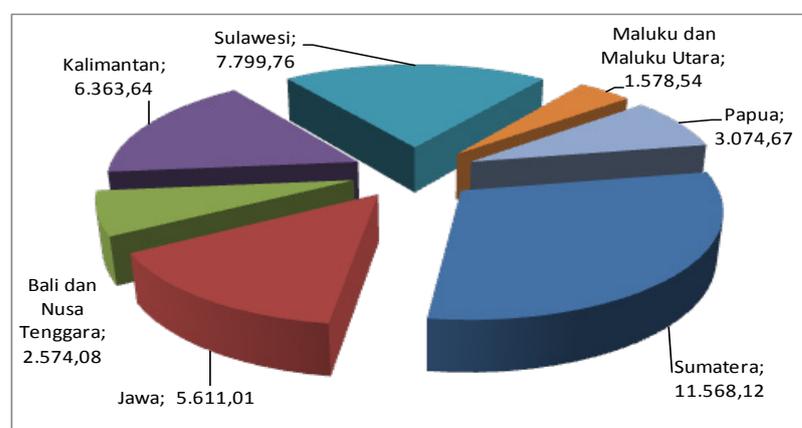
- 7.6 Jalan merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pengembangan jalan dilakukan melalui pendekatan pengembangan wilayah untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional, memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
- 7.7 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

- 7.8 Jalan, berdasarkan peruntukannya, terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum menurut statusnya dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Sementara itu, jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- 7.9 Pemeriksaan atas kinerja jalan dan jembatan terdiri atas kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional serta infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten.

Jalan dan Jembatan Nasional

- 7.10 Jalan nasional yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU) ditetapkan oleh Keputusan Menteri PU, terakhir dengan Keputusan Menteri PU Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional. Panjang jalan nasional di seluruh provinsi di Indonesia adalah 38.569,82 km dengan penyebaran seperti pada Grafik 7.1 berikut.

Grafik 7.1. Penyebaran Jalan Nasional (km)



- 7.11 Selama kurun waktu 2010 s.d. 2012, terdapat penambahan pembangunan jalan baru sepanjang 2.034,20 km dan pembangunan jembatan baru sepanjang 26,00 km. Selain itu juga telah dibangun jalan bebas hambatan baru sepanjang 25,05 km. Total anggaran jalan nasional TA 2012 senilai Rp40,33 triliun dan telah direalisasikan senilai Rp36,61 triliun.
- 7.12 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013.

7.13 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PU di sepuluh provinsi belum sepenuhnya dikelola secara efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional, yang terdiri atas 38 kasus ketidakefektifan senilai Rp74.842,23 juta.

Entitas yang Diperiksa:

- Provinsi DI Aceh
- Provinsi Jambi
- Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara

7.14 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Pelaksanaan kontrak berbasis kinerja (*performance based contract/PBC*) senilai Rp106,96 miliar pada Paket Pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Provinsi Jawa Barat mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif. Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya adalah penerapan PBC belum berdasarkan kebijakan tertulis. Kontrak PBC merupakan kontrak lumpsum tetapi mengandung klausul tentang amandemen kontrak yang tidak diperbolehkan diatur dalam kontrak lumpsum. Selain itu, kontraktor tidak mampu melaksanakan PBC yang ditunjukkan antara lain terdapat perubahan desain yang signifikan, kualitas pekerjaan tidak baik, dan pekerjaan rekonstruksi.

Akibatnya, pengeluaran keuangan negara senilai Rp106,96 miliar tidak dapat dinilai dan diyakini kewajarannya serta berpotensi menambah beban dan biaya untuk perbaikan ruas jalan tersebut di masa mendatang.

Hal ini disebabkan antara lain karena Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga dalam melaksanakan kontrak berbasis kinerja tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Dirjen Bina Marga belum menetapkan prosedur/standar untuk menguji desain atau mengatur masa pertanggungjawaban dan konsekuensi penyedia jasa terhadap hasil pekerjaannya secara jelas.

- Pengawasan atas pelanggaran batas muatan kendaraan yang melintas pada Ruas Jalan Nasional Jalur Pantai Utara (Pantura) di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur kurang terkoordinasi dan tidak efektif. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan jalan di jalur Pantura Jawa melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) belum terkoordinasi dengan baik dan penerapan sanksi atas pelanggaran tidak efektif. Ketidakefektifan penerapan sanksi tersebut diidentifikasi oleh dua

kondisi yaitu laju pelanggaran batas muatan yang tidak menurun tetapi cenderung meningkat dan penegakan sanksi tilang tidak dilaksanakan dengan tegas.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain kerusakan jalan sehingga umur layanan terhadap penyelenggaraan jalan lebih cepat atau lebih pendek dari seharusnya.

Penyebabnya antara lain Dirjen Bina Marga kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengendalikan terganggunya fungsi jalan akibat muatan berlebih.

- Penyelenggaraan Jalan Strategis Nasional Rencana (JSNR) belum dikelola secara efektif. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan JSNR yang belum didukung dengan pedoman baku, baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum ada ketentuan yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan JSNR dan pencatatan aset hasil penanganan JSNR yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum didukung dengan kebijakan akuntansi. Hal ini terjadi di empat entitas, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Akibatnya, penanganan JSNR berpotensi terjadi tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berpotensi tidak tepat sasaran karena tidak adanya data yang memadai atas kondisi jalan di ruas JSNR, dan pencatatan aset tetap atas jalan yang dicatat oleh satker-satker Ditjen Bina Marga tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Hal tersebut terjadi karena Keputusan Menteri PU terkait dengan JSNR belum merinci mengenai batasan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap jalan yang termasuk di dalam JSNR. Selain itu, Menteri PU belum menetapkan prosedur/standar dan kriteria terkait penanganan JSNR yang mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

7.15 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri PU agar

- meninjau ulang kebijakan PBC yang belum mempunyai dasar hukum dan belum diatur dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, untuk selanjutnya tidak merencanakan dan melaksanakan kembali kontrak semacam itu sampai diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang melandasi pelaksanaannya;
- melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan memprakarsai optimalisasi Forum LLAJ dengan pimpinan kementerian/instansi-instansi terkait untuk bersepakat dan berkomitmen dalam melakukan pengelolaan atas pemanfaatan/penggunaan penyelenggaraan jalan

dan jembatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan terkait yang diberlakukan serta mengenakan sanksi sepadan secara tegas terhadap siapapun pelanggarnya; dan

- memerintahkan Dirjen Bina Marga untuk menetapkan pedoman/prosedur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pertanggungjawaban, dan pencatatan atas penanganan JSNR secara komprehensif.

- 7.16 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 4 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 11 kasus kerugian negara senilai Rp3.834,78 juta, 4 kasus potensi kerugian negara senilai Rp776,16 juta, dan 6 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp6.711,45 juta.
- 7.17 Dari kasus kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan senilai Rp3.834,78 juta, Rp776,16 juta, dan Rp6.711,45 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara masing-masing senilai Rp1.116,39 juta, Rp55,96 juta, dan Rp1.169,53 juta.

Jalan dan Jembatan Kabupaten

- 7.18 Selain pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten, yaitu pemeriksaan atas
- Kinerja Infrastruktur Kabupaten Aceh Utara TA 2012 dan TA 2013 (s.d. 31 Oktober) di Lhoksukon, Provinsi Aceh; dan
 - Kinerja Infrastruktur TA 2011, 2012, dan 2013 (Semester I) pada Kabupaten Bintan di Bintan Buyu, Provinsi Kepulauan Riau.
- 7.19 Pemeriksaan kinerja tersebut pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten kurang efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten, yang terdiri atas 31 kasus ketidakefektifan senilai Rp6.222,81 juta.
- 7.20 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Di Kabupaten Aceh Utara, pengelolaan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten belum didukung dengan rencana induk (*master plan*). Perencanaan dalam *draft* rencana tata ruang wilayah (RTRW) hanya mengungkapkan sistem perencanaan secara umum dan belum mencakup seluruh sistem jaringan jalan yang telah dan akan dibangun sehingga dibutuhkan rencana induk pembangunan jalan dan jembatan kabupaten.

Akibatnya, perencanaan sistem jaringan jalan dan jembatan kabupaten belum dapat terpadu secara keseluruhan yang menghubungkan seluruh simpul distribusi untuk mencapai pembangunan jalan dan jembatan kabupaten yang berdaya guna dan berhasil guna. Hal tersebut disebabkan Bupati Aceh Utara belum menetapkan *master plan* atas penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten. Selain itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Bina Marga sebagai dinas terkait belum melakukan penyusunan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten secara memadai.

- Di Kabupaten Bintang, jumlah, jenis, dan lokasi kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum mengakomodasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Kegiatan infrastruktur TA 2011 dan 2012 pada Dinas PU telah dilaksanakan, tetapi tidak seluruhnya berdasarkan rencana kerja SKPD. Adapun pada TA 2013 terjadi hal yang sama yaitu pada Dinas PU dan Dinas Perhubungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan yang dianggarkan pada APBD namun belum melalui mekanisme pembahasan APBD yaitu Musrenbang.

Akibatnya, tidak seluruh perencanaan pembangunan infrastruktur dalam DPA sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penentuan prioritas kegiatan infrastruktur.

7.21 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Bupati Aceh Utara untuk menetapkan *master plan* atas penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten serta memerintahkan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Bina Marga agar segera menyempurnakan perencanaan sistem jaringan jalan dan jembatan kabupaten dalam *draft* RTRW Kabupaten Aceh Utara; dan
- Bupati Bintang agar dalam penyusunan APBD, Tim Anggaran Eksekutif tetap berpedoman pada kegiatan hasil Musrenbang.

7.22 Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkap adanya 5 kasus ketidakhematan senilai Rp919,38 juta, 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 3 kasus kerugian daerah senilai Rp321,81 juta (di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp157,42 juta), 1 kasus potensi kerugian daerah senilai Rp876,30 juta, dan 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp48,02 juta.

7.23 Dari kasus kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan senilai Rp321,81 juta, Rp876,30 juta, dan Rp48,02 juta, telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyeteroran ke kas daerah masing-masing senilai Rp21,04 juta, Rp1,25 juta, dan Rp48,02 juta.

Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa

- 7.24 Pembangunan jalur ganda lintas utara merupakan salah satu pekerjaan investasi infrastruktur di koridor Jawa dalam *Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011. Anggaran yang dibutuhkan dalam dua tahun anggaran (2012-2013) senilai Rp9,83 triliun, terdiri atas anggaran pekerjaan tahun jamak atau *multiyears* senilai Rp9,15 triliun dan anggaran pekerjaan tahun tunggal senilai Rp682,13 miliar. Pekerjaan pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa berupa pembangunan jalan kereta api antara Cirebon s.d. Surabaya Pasarturi sepanjang \pm 436 km. Pekerjaan tersebut berpotensi rawan permasalahan mengingat pekerjaan dilaksanakan hanya dalam jangka waktu dua tahun, sehingga pengoperasionalan jalur ganda kereta api berisiko tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
- 7.25 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Manajemen dalam Mengelola Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa pada Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan.
- 7.26 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan percepatan pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa masih belum efektif untuk mendukung penyelesaian dan pemanfaatan hasil pekerjaan secara menyeluruh sesuai dengan rencana. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas manajemen dalam mengelola percepatan pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa, yang terdiri atas 4 kasus ketidakefektifan.
- 7.27 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut.
- Lahan untuk pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa belum seluruhnya dibebaskan. Permasalahan tersebut antara lain belum adanya kesepakatan besaran ganti kerugian antara warga dengan satker dan aturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang baru terbit di bulan Agustus 2012. Akibatnya, pengoperasian jalur ganda lintas utara Jawa sepanjang \pm 363,5 km¹ secara keseluruhan tidak tercapai. Hal ini terjadi antara lain karena penetapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalur ganda antara lain meliputi konstruksi jalan kereta api dan jembatan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembebasan lahan.
 - Distribusi rel dan wesel jalur ganda lintas utara Jawa tidak tepat waktu. Permasalahan tersebut di antaranya distribusi rel wesel kepada tiap-tiap satker belum sepenuhnya sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, distribusi dari gudang penyimpanan ke titik lokasi pekerjaan belum selesai sehingga berpengaruh kepada pelaksanaan pengoperasionalan atau

switch over jalan kereta api. Permasalahan tersebut mengakibatkan target percepatan pembangunan jalur ganda lintas utara jawa tidak tercapai. Penyebabnya, Manajemen Direktorat Prasarana Perkeretaapian tidak memperhitungkan waktu pengadaan material dan lama pendistribusian sampai dengan ke lokasi tiap-tiap paket pekerjaan di tiap satker.

- 7.28 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada Menteri Perhubungan selaku penanggung jawab program percepatan pembangunan jalur ganda lintas utara jawa agar segera menginstruksikan Dirjen Perkeretaapian untuk mengajukan perpanjangan izin *multiyears* kepada Menteri Keuangan. Selain itu, juga mengambil langkah-langkah penyelesaian pembebasan lahan guna lancarnya penyelesaian pekerjaan serta memperbaiki manajemen distribusi material rel dan wesel.
- 7.29 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Lingkungan Hidup dan Bencana

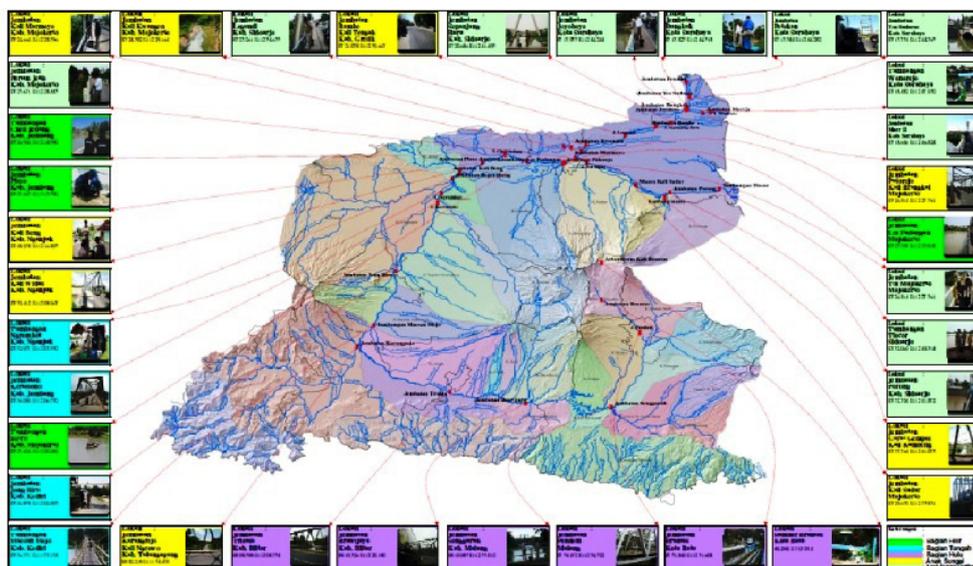
- 8.1 Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 8.2 Pemerintah telah menempatkan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana sebagai salah satu dari 11 prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.
- 8.3 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan 8 pemeriksaan kinerja atas bidang lingkungan hidup dan bencana, terdiri atas 3 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat dan 5 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 8.4 Tiga objek pemeriksaan Pemerintah Pusat yaitu pemeriksaan daerah aliran sungai (DAS), mitigasi perubahan iklim, dan pascabencana. Lima objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota adalah pemeriksaan pencegahan kebakaran hutan.
- 8.5 Hasil pemeriksaan atas kinerja lingkungan hidup dan bencana menunjukkan permasalahan-permasalahan ketidakefektifan sebanyak 91 kasus senilai Rp389.266,63 juta.
- 8.6 Perincian hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut.

Daerah Aliran Sungai

- 8.7 Wilayah Sungai (WS) Brantas merupakan wilayah sungai strategis nasional dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A Tahun 2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. DAS Brantas merupakan salah satu DAS utama di Jawa Timur dengan aliran Sungai Brantas yang menyumbang 73,1% bahan baku produksi air minum di Provinsi Jawa Timur. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sungai Brantas merupakan satu dari 13 sungai strategis nasional yang ditetapkan sebagai sungai prioritas. Sungai Brantas memiliki panjang 320 km

dengan luas wilayah sungai 14.103 km² mencakup 25% dari wilayah Jawa Timur. Selain itu, DAS Brantas merupakan stok pangan nasional dan menjadi sumber air di 17 kabupaten/kota.

**Gambar 8.1. Lokasi Pemantauan Kualitas Air Sungai Brantas
(Balai Besar Wilayah Sungai Brantas)**



- 8.8 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan DAS Brantas pada KLH, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Perum Jasa Tirta I, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, PDAM Kota Surabaya, Pemerintah Kota Gresik, Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur.
- 8.9 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengelolaan sumber daya air pada DAS Brantas. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan DAS Brantas belum efektif walaupun target penurunan beban pencemaran di DAS Brantas sebesar 15% telah tercapai. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pengelolaan sumber daya air pada DAS Brantas, yang terdiri atas 4 kasus ketidakefektifan.
- 8.10 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.
- KLH belum menetapkan daya tampung beban pencemar DAS Brantas. Akibatnya, penentuan mutu air sasaran di Provinsi Jawa Timur belum berdasarkan daya tampung beban pencemar DAS Brantas sehingga

pengendalian pencemaran di DAS Brantas tidak menjamin terjaganya kualitas air DAS Brantas.

Hal tersebut terjadi karena KLH dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional dengan menetapkan daya dukung dan daya tampung beban pencemar di DAS Brantas.

- Upaya pengendalian pencemaran limbah cair industri dan usaha/kegiatan melalui instrumen pengawas di Segmen Hulu, Tengah, dan Hilir belum memadai. Permasalahan tersebut di antaranya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup tidak tersedia dan terdapat industri dan usaha/kegiatan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Tulungagung yang membuang limbah cair ke DAS Brantas melebihi baku mutu.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain tingginya pelanggaran oleh pelaku usaha yang pada akhirnya akan berdampak pada masuknya beban pencemar ke badan air secara berlebihan.

Penyebabnya antara lain karena tidak adanya perhatian dari pemerintah atas permasalahan yang ada. Selain itu, hal tersebut terjadi karena BLH/ KLH kabupaten/kota belum menerapkan sanksi yang tegas atas kewajiban ketaatan terhadap baku mutu air limbah.

- Program percontohan sanitasi dari Pemerintah Pusat tidak efektif karena tidak adanya kesadaran dari pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjadikan pembangunan fasilitas sanitasi untuk air limbah domestik sebagai program prioritas.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain penurunan kualitas air di Sungai Brantas yang dapat meningkatkan biaya pemanfaatan air permukaan bagi kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di DAS Brantas. Sesuai dengan model, biaya sosial yang menjadi beban masyarakat di DAS Brantas bila terjadi penurunan kelas air diproyeksikan senilai Rp26,44 miliar.

Penyebabnya karena KLH belum memiliki program pengendalian limbah domestik di DAS Brantas dan Kementerian PU tidak secara berkelanjutan melaksanakan proyek sanitasi di DAS Brantas. Selain itu, hal tersebut disebabkan lemahnya perhatian pemerintah daerah untuk memprioritaskan program pengendalian air limbah domestik dengan menyediakan anggaran yang memadai dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercantum pada strategi sanitasi perkotaan (SSK) yang telah disusun.

- 8.11 Terhadap kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada
- KLH agar lebih memperhatikan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 Pasal 20 untuk segera menetapkan daya tampung beban pencemar di DAS Brantas;
 - KLH agar berkoordinasi dengan BLH/KLH kabupaten/kota untuk lebih meningkatkan kepedulian perlunya PPLHD dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menegakkan hukum;
 - Menteri Lingkungan Hidup untuk menyusun program terpadu pengendalian limbah domestik di DAS Brantas bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - Menteri Pekerjaan Umum untuk membuat program terpadu dalam melaksanakan proyek sanitasi DAS Brantas di antaranya dengan mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum memiliki SSK untuk segera menyusun SSK, sehingga program sanitasi dilakukan dengan pendekatan yang lebih berskala besar dan komprehensif. Untuk bantuan pendanaan perlu dilakukan dengan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong adanya keseriusan pemerintah daerah untuk mewujudkan sanitasi kota yang layak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.

Mitigasi Perubahan Iklim

- 8.12 Pada pertemuan G-20 Tahun 2009 di Pittsburg Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya bahwa akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada Tahun 2020. Tindak lanjut dari komitmen tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK).
- 8.13 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim TA 2010 s.d. Semester I TA 2013 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Papua.
- 8.14 Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan mitigasi perubahan iklim pada Kementerian Kehutanan untuk menurunkan emisi GRK. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa meskipun Kementerian Kehutanan telah melaporkan penurunan emisi GRK pada *National Summit 2012* dari bidang kehutanan dan telah mencapai 72,8% dari target penurunan emisi GRK dengan metode analisis penutupan lahan, tetapi kegiatan-kegiatan RAN-GRK di Kementerian Kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim masih belum efektif dalam upaya menurunkan emisi GRK. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-

kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan mitigasi perubahan iklim, yang terdiri atas 8 kasus ketidakefektifan.

8.15 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Metodologi perhitungan perkiraan penurunan emisi GRK bidang kehutanan dan lahan gambut belum memadai. Penetapan target penurunan emisi GRK yang tercantum dalam Lampiran Perpres No. 61 Tahun 2011, dihitung berdasarkan proporsi besaran anggaran per jenis kegiatan, yang disusun berdasarkan prioritas indikator kinerja utama (IKU) dalam renstra, belum berdasarkan metodologi yang memadai/terukur.

Akibatnya, efektivitas tiap-tiap kegiatan RAN-GRK dalam menurunkan emisi GRK tidak dapat terukur secara transparan, akurat, dapat dibandingkan metodologinya, konsisten, dan lengkap sehingga kegiatan RAN-GRK berpotensi tidak dapat diakui secara internasional.

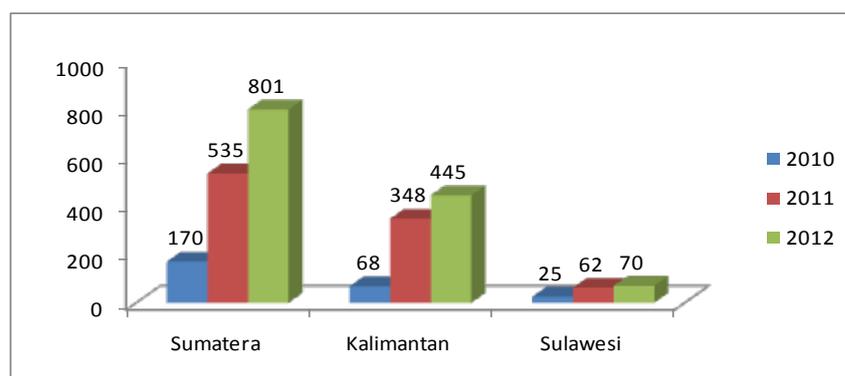
Hal ini disebabkan karena Kementerian Kehutanan belum mempunyai perhitungan penurunan emisi GRK untuk tiap-tiap kegiatan inti RAN-GRK yang memadai.

- Upaya penurunan titik panas pada Kementerian Kehutanan untuk Pulau Sumatera Tahun 2012 serta Pulau Sulawesi Tahun 2011 dan 2012 belum mencapai target yang ditetapkan. Hanya pada Pulau Kalimantan penurunan titik panas mencapai target. Namun demikian, jumlah titik panas pada kawasan konservasi di ketiga pulau tersebut mempunyai kecenderungan meningkat dari Tahun 2010 s.d. 2012. Upaya penurunan titik panas yang telah dilakukan selama ini antara lain membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) Manggala Agni dengan tugas pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran hutan, serta penyelamatan (*rescue*) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana. Permasalahan lain terkait upaya penurunan titik panas baik skala nasional maupun provinsi yaitu belum akuratnya sumber data titik panas dan pencapaian kinerja penurunan titik panas sulit terukur.

Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya potensi kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi serta potensi tidak tercapainya target indikasi penurunan emisi CO₂e pada Tahun 2014.

Penyebabnya Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA) kurang cermat dalam mengaitkan indikator penurunan jumlah titik panas di luar kawasan konservasi dan kurang optimal dalam menurunkan jumlah titik panas.

Grafik 8.1. Jumlah Titik Panas Kawasan Konservasi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Tahun 2010 s.d. 2012



8.16 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar

- menyusun perhitungan penurunan emisi GRK untuk tiap-tiap kegiatan dan bersama-sama dengan KLH dan Bappenas mengkaji ulang penetapan angka target penurunan emisi dalam Lampiran Perpres No. 61 Tahun 2011; dan
- mengkaji ulang terhadap indikator titik panas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan kelembagaan Manggala Agni di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi.

Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

8.17 Kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, dan Kota Palangka Raya. Hal ini mengakibatkan kerugian baik secara ekonomi maupun ekologi dan berpotensi menjadi bencana asap apabila tidak terkendali. Kepedulian pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sehingga risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dan bencana asap dapat dikurangi.

8.18 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 yang dilakukan pada lima pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Entitas yang Diperiksa:

- Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
- Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
- Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
- Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
- Kota Palangka Raya di Palangka Raya

- 8.19 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan perencanaan, kelembagaan, dan penyuluhan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- 8.20 Lima pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah mengambil beberapa kebijakan dan upaya untuk memperbaiki kualitas dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, antara lain sebagai berikut.
- Di Kabupaten Kapuas, proses perencanaan dan mekanisme perencanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan telah mengikuti prosedur yang berlaku.
 - Di Kabupaten Kotawaringin Timur, pemerintah kabupaten telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) dan mekanisme koordinasi terkait pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta terdapat perangkat organisasi yang memiliki tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
 - Di Kabupaten Pulang Pisau, pemerintah kabupaten telah mempunyai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran, yang melaksanakan pengecekan kebenaran titik panas, dan yang melakukan penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan serta yang mengawasi aktivitas masyarakat dan pelaku usaha terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
 - Di Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan telah melaksanakan pemantauan titik panas melalui situs Kementerian Kehutanan, melaksanakan *groundcheck* dan inventarisasi daerah rawan kebakaran, serta mendokumentasikannya dalam laporan.
 - Di Kota Palangka Raya, pemerintah kota telah memiliki struktur organisasi dan personil untuk melaksanakan perencanaan dan penyuluhan, serta telah memanfaatkan jenis dan media penyuluhan secara optimal.
- 8.21 Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum efektif, kecuali di Kabupaten Seruyan, kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pencegahan kebakaran hutan, yang terdiri atas 56 kasus ketidakefektifan.
- 8.22 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.
- Data dan informasi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum memadai. Permasalahan ini terjadi di empat entitas, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan

Kota Palangka Raya. Belum memadainya data dan informasi tersebut antara lain, data dan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan belum dimiliki, data cuaca sebagai input sistem peringatan dini (*Early Warning System*) belum dimanfaatkan secara memadai, dan data titik panas belum tersedia, serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dilakukan.

Hal ini mengakibatkan antara lain perencanaan program/kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat waktu.

Penyebabnya, Kepala SKPD terkait kurang memahami pentingnya data, informasi, dan evaluasi sebagai dasar perencanaan program/kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, hal tersebut terjadi karena terbatasnya sumber daya manusia dalam mengakses sumber data, menganalisis, dan mengintegrasikan data.

- Terdapat permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu
 - Di Kabupaten Kotawaringin Timur, belum terdapat SKPD yang melaksanakan evaluasi lokasi rawan kebakaran dan SKPD yang melaksanakan pengecekan kebenaran titik panas di lapangan.
 - Di Kabupaten Pulang Pisau, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi beberapa SKPD terkait upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu evaluasi lokasi rawan kebakaran setiap tiga bulan sekali belum dilaksanakan dan pelaksanaan pengecekan titik api di lapangan kurang efektif di mana pengecekan titik api yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) tidak berdasarkan data titik api terkini dari BLH. Selain itu, lembaga yang memiliki tugas khusus untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yaitu Brigdalkarhut belum terbentuk.

Akibatnya, pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum optimal dalam mengurangi risiko/potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Hal tersebut terjadi karena Bupati Kotawaringin Timur belum membagi tupoksi pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara jelas. Kepala Disbunhut Kabupaten Pulang Pisau belum merencanakan kegiatan evaluasi lokasi rawan kebakaran setiap tiga bulan sekali dan tidak memiliki sarana pendukung untuk mengakses informasi langsung dari sumber kompeten, serta belum melakukan kerja sama dengan BLH untuk mengetahui keberadaan titik api. Selain itu, Bupati Pulang Pisau belum membentuk Brigdalkarhut.

- Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan belum ada. Permasalahan ini terjadi di satu entitas yaitu Kabupaten Kapuas.

Akibatnya, Kepala SKPD terkait tidak mempunyai pedoman langkah dan koordinasi yang jelas dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kurang maksimal.

Hal tersebut terjadi karena Bupati belum menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2011 yaitu menyusun peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Karhutla dan belum menetapkan juklak dan juknis pelaksanaan pengendalian karhutla tingkat kabupaten.

- Kegiatan penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan belum dilaksanakan secara memadai. Permasalahan ini terjadi di empat entitas, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. Di antaranya kegiatan penyuluhan/sosialisasi tidak dianggarkan dan masih terdapat kecamatan di daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang belum mendapatkan penyuluhan/sosialisasi.

Hal ini mengakibatkan tujuan penyuluhan/sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak tercapai secara optimal dan masih tingginya jumlah titik panas. Penyebabnya, Kepala SKPD terkait belum merencanakan kegiatan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara memadai.

8.23 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada

- Kepala SKPD terkait untuk melakukan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pencegahan kebakaran hutan secara memadai serta memberikan pelatihan kepada staf agar memiliki keahlian dalam mengakses dan mengolah data serta menganalisis dan mengintegrasikan data;
- Bupati Kotawaringin Timur agar menetapkan tupoksi terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara jelas, sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bupati Pulang Pisau agar memerintahkan Kepala Disbunhut untuk membuat perencanaan kegiatan evaluasi lokasi rawan kebakaran setiap tiga bulan sekali serta melakukan analisis kebutuhan berupa sarana pendukung untuk mengakses informasi langsung dari sumber kompeten dan melakukan koordinasi dengan Kepala BLH untuk mengetahui keberadaan titik api. Selain itu, Bupati Pulang Pisau agar membentuk Brigadkarhut Kabupaten Pulang Pisau;

- Bupati Kapuas agar membuat/menetapkan peraturan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta menetapkan juklak dan juknis pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten; dan
- Kepala SKPD terkait untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara memadai.

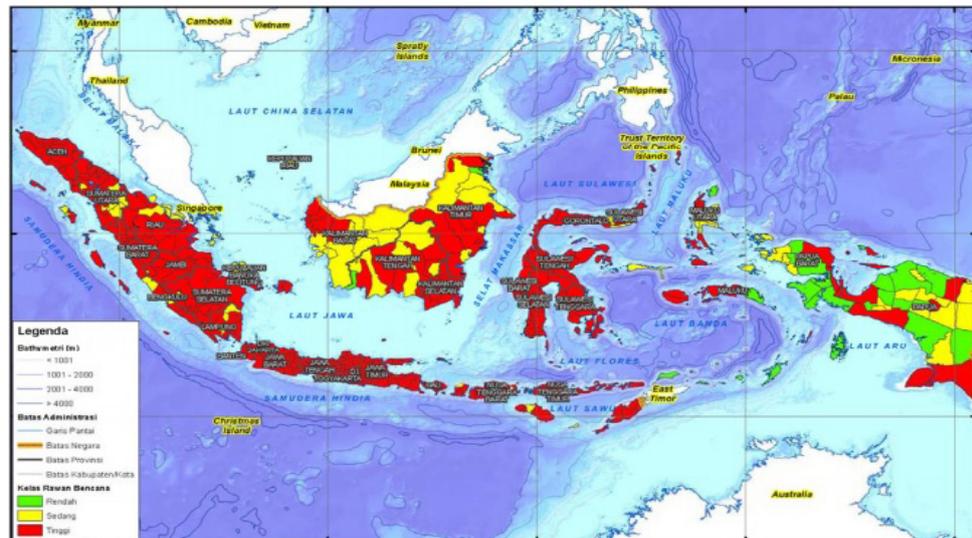
8.24 Hasil pemeriksaan kinerja pencegahan kebakaran hutan juga mengungkapkan adanya 7 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Pascabencana

8.25 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di antara dua benua dan dua lautan. Indonesia juga berada pada pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi apabila lempengan-lempengan tersebut bertumbukan. Selain itu, Indonesia mempunyai 129 gunung api aktif, 76 di antaranya berbahaya. Letak geografis yang demikian membuat Indonesia sangat rentan akan ancaman gempa bumi dan erupsi gunung api. Bencana alam lainnya yang sering melanda Indonesia adalah tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Hampir seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah rawan bencana.

8.26 Dampak utama bencana berupa korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan nonmateri maupun psikologis. Penanganan bencana tidak bisa lagi hanya menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi perlu menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana, yang meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan semakin baik, karena Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Gambar 8.2. Peta Indeks Rawan Bencana di Indonesia



- 8.27 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Pemulihan Pascabencana TA 2009, 2010, dan 2011 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan pemulihan pascabencana telah efektif dalam aspek perencanaan, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan, dan pengendalian.
- 8.28 Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi/kabupaten/kota, serta instansi terkait telah berupaya maksimal dalam penanganan pascabencana. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mendapatkan **Global Champion for Disaster Risk Reduction** dari Persatuan Bangsa-Bangsa yang diterima langsung oleh Presiden RI. BNPB juga telah menyusun kebijakan dan pedoman sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 24 Tahun 2007.
- 8.29 Namun, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan penerapan kebijakan dan lemahnya koordinasi antarunit atau instansi membuat banyak kegiatan pascabencana yang tidak tepat sasaran dan belum dapat memberikan manfaat bagi korban bencana dan masyarakat. Permasalahan tersebut mengakibatkan efektivitas pengelolaan kegiatan pemulihan pascabencana belum tercapai secara optimal. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pascabencana, yang terdiri atas 23 kasus ketidakefektifan senilai Rp389.266,63 juta.
- 8.30 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.
- Proses penyajian data kerusakan dan kerugian dalam rencana aksi dan pendokumentasian data kerusakan akibat bencana belum memadai. Tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu PB) belum konsisten

menerapkan metode pengumpulan data sesuai pedoman. BNPB dan BPBD juga belum mendokumentasikan data kerusakan secara detil yang menjadi dasar perhitungan nilai kerusakan dan kerugian.

Akibatnya, informasi yang disajikan dalam rencana aksi, khususnya mengenai kebutuhan pemulihan pascabencana baik dana maupun rincian kegiatan, menjadi tidak andal. Rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemulihan pascabencana, sehingga rencana aksi yang tidak andal berpotensi *misleading* dalam pelaksanaannya dan tujuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) tidak tercapai.

Hal tersebut terjadi antara lain karena proses pengumpulan data kerusakan dalam kegiatan Jitu PB belum sepenuhnya mengacu pada metodologi *Economic Commission for Latin America and the Caribbean* (ECLAC) serta BNPB dan BPBD provinsi/kabupaten/kota serta instansi terkait yang terlibat dalam proses pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi belum konsisten dalam mengadministrasikan data kebencanaan secara memadai.

- Proses relokasi warga korban bencana di wilayah terdampak dan rawan bencana di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman belum terealisasi seluruhnya sehingga masih banyak warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

Hal tersebut terjadi karena Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki prioritas yang jelas dan konsisten untuk relokasi. Pembangunan hunian tetap di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk merelokasi korban bencana hingga saat ini belum terlaksana karena terkendala proses perizinan pengalihfungsian hutan dari Kementerian Kehutanan yang memakan waktu lama. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sleman belum berhasil merelokasi warga seluruhnya yang tinggal di kawasan rawan bencana karena mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

Gambar 8.3. Kerusakan Akibat Gempa Bumi di Provinsi Sumatera Barat, Erupsi Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai



8.31 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada BNPB dan BPBD antara lain agar

- melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana, terutama dalam pengumpulan data kerusakan dengan metode inventarisasi. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan informasi kebencanaan yang akurat. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada BNPB dan BPBD agar mendokumentasikan data kerusakan bencana secara detil dan akurat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dan mengolahnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, teliti, dan objektif agar menghasilkan informasi yang tepat, ringkas dan akurat sesuai Peraturan Kepala BNPB Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan; dan
- segera merealisasikan program relokasi untuk korban bencana gempa bumi Sumatera Barat Tahun 2009 dan melaksanakan pembangunan hunian tetap untuk korban bencana tsunami di Mentawai melalui perencanaan dan pengelolaan yang memadai, transparan, dan akuntabel serta tetap memberikan sosialisasi secara intensif dan kekeluargaan kepada warga yang belum bersedia direlokasi akan bahaya yang mengancam.

- 8.32 Hasil pemeriksaan kinerja kegiatan pascabencana juga mengungkapkan adanya 1 kasus ketidakhematan senilai Rp315,53 juta, 2 kasus ketidakefisienan, 5 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, dan 1 kasus kerugian negara senilai Rp264,61 juta.
- 8.33 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 9

Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok

- 9.1 Sejak awal Tahun 2013 s.d. Juli 2013, *Yard Occupancy Ratio* (YOR) pada tempat penimbunan sementara (TPS) Terminal di Pelabuhan Tanjung Priok cenderung mencapai 100% dan pada bulan Juni dan Juli 2013 terjadi puncak stagnasi kepadatan peti kemas yang menjadi perhatian nasional karena lambannya pengeluaran barang impor dari terminal. YOR merupakan rasio perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penimbunan dengan ruang penimbunan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan arus barang impor menjadi tidak lancar dan meningkatnya *dwelling time* (DT) dari rata-rata Tahun 2012 selama enam hari menjadi delapan hari pada Tahun 2013. Salah satu indikator dalam mengukur kelancaran arus impor barang pada suatu pelabuhan adalah dengan menilai impor DT pelabuhan. Impor DT adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (*container*) dibongkar dan diangkat (*unloading*) dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan TPS melalui pintu utama (*World Bank, 2011*). Waktu tunggu bongkar muat di suatu pelabuhan menjadi patokan sistem logistik suatu negara.
- 9.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok untuk Menjamin Kelancaran Jasa Pelayanan Kapal dan Barang pada Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero), Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II, dan Instansi Terkait di Jakarta Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Agustus). Instansi terkait dimaksud adalah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian terkait pemberian izin larangan pembatasan (*lartas*) dan rekomendasi (*Other Government Agency/ OGA*) yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- 9.3 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok apakah telah efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang peti kemas impor.
- 9.4 Proses bisnis pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok meliputi jasa pelayanan kapal (tahap *waiting time*/WT) dan jasa pelayanan barang (tahap *pre customs clearance, customs clearance, dan post customs clearance*).

Gambar 9.1. Proses Bisnis Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok

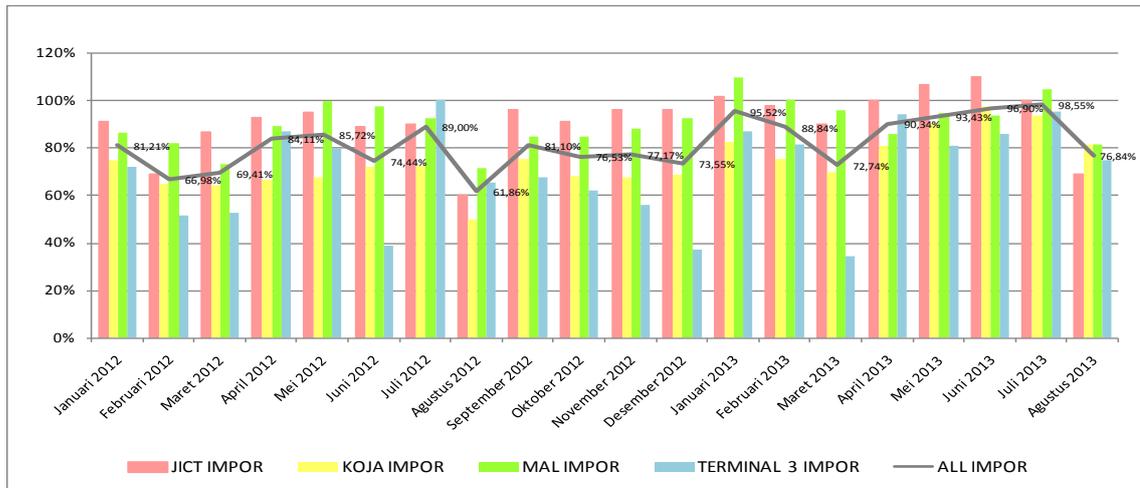


9.5 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok, yang meliputi kegiatan pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh OP, kegiatan penjaluran kepabeanan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan oleh KPU BC Tanjung Priok, kegiatan kekarantinaan yang dilaksanakan oleh Balai Karantina, pemberian izin dan rekomendasi terkait lartas impor yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L), tidak efektif menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok yang terdiri atas 19 kasus ketidakefektifan.

9.6 Ketidakefektifan kegiatan pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok membawa dampak ketidaklancaran jasa pelayanan kapal dan arus barang, sebagaimana terlihat dari data berikut.

- Persentase jumlah kapal yang waktu tunggu kapalnya (WT) melebihi standar satu jam (terlambat) meningkat dari Tahun 2012 sebesar 18,22% menjadi 22,08% pada Tahun 2013 (s.d. Agustus).
- Rata-rata YOR impor Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2012 mencapai sebesar 76,77% dan Tahun 2013 (s.d. Agustus) mencapai sebesar 89,17%. Angka-angka YOR tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan maksimal sebesar 65%. YOR mengalami tren peningkatan, terendah pada bulan Agustus 2012 sebesar 61,86% dan tertinggi pada bulan Juli 2013 sebesar 98,55%. Bahkan pada bulan Juni 2013, PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT), yang merupakan terminal impor terbesar di Pelabuhan Tanjung Priok, YOR-nya mencapai 110% sebagaimana digambarkan pada Grafik 9.1.

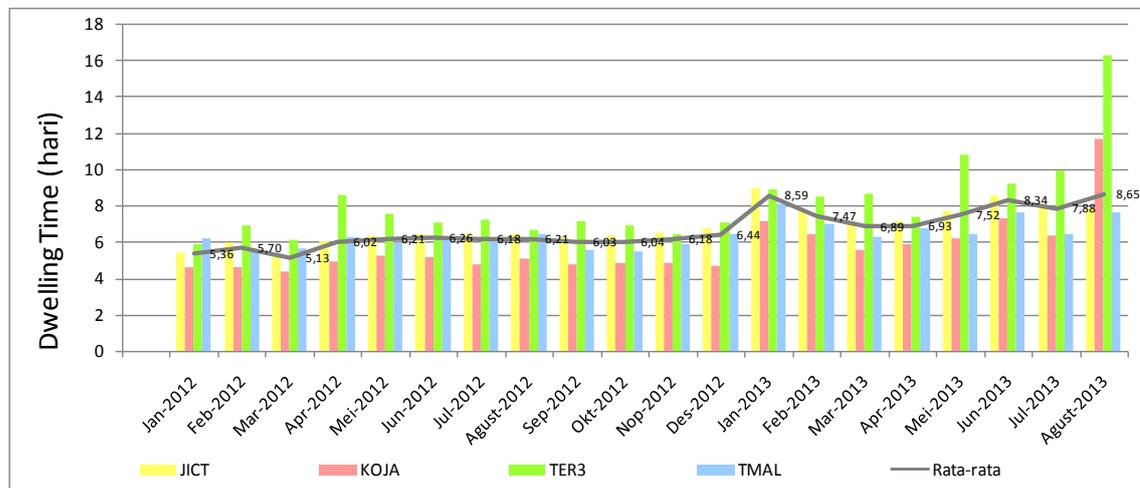
Grafik 9.1. Data Perkembangan YOR Impor Tahun 2012 s.d. Agustus 2013



Sumber: Diolah dari data PT Pelindo II (Persero)

- DT impor Tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan rata-rata Tahun 2012. DT impor Tahun 2012 mencapai 5,98 hari sedangkan pada Tahun 2013 (s.d. Agustus) meningkat menjadi 7,73 hari. DT impor tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2013 yang mencapai 16,29 hari. Semakin tinggi DT pada saat YOR melebihi standar menunjukkan adanya risiko kongesti (kemacetan) di Pelabuhan Tanjung Priok. Perkembangan DT impor selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013 disajikan pada Grafik 9.2.

Grafik 9.2. Perkembangan DT Impor selama Tahun 2012 s.d. Agustus 2013



Sumber: Diolah dari data PT JICT, TPK KOJA, Terminal 3, PT MAL dan database PIB DJBC

- 9.7 Ketidakefektifan kegiatan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok untuk menjamin kelancaran layanan kapal dan arus barang terutama disebabkan oleh permasalahan-permasalahan pada tahap WT, *pre customs clearance*, *customs clearance*, dan *post customs clearance*.

Permasalahan pada Tahap *Waiting Time*

- 9.8 Kegiatan jasa layanan kapal belum menjamin pencapaian WT sesuai dengan standar. Permasalahan jasa layanan kapal meliputi sistem operasi pelabuhan belum sepenuhnya dapat mengendalikan pelayanan pandu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sistem operasi pelabuhan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten, dan ketersediaan alat pada Pelabuhan Tanjung Priok guna memenuhi kebutuhan jasa kepelabuhanan belum sepenuhnya memadai.

Permasalahan pada Tahap *Pre Customs Clearance*

- 9.9 Proses perizinan dan/atau rekomendasi impor barang pada K/L terkait belum mendukung kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok sehingga rata-rata waktu *pre customs clearance* Tahun 2012 s.d. Agustus 2013 mencapai 41,48% dari total DT, berdampak terhadap tingginya DT. Lamanya proses *pre customs clearance* tersebut disebabkan adanya pengajuan perizinan/rekomendasi belum seluruhnya dilaksanakan melalui proses perizinan yang didukung dengan sistem *online* dan *Service Level Agreement (SLA)*, sistem informasi yang belum terintegrasi dalam *Indonesia National Single Window (INSW)*, dan sosialisasi mekanisme perizinan terhadap importir/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) belum efektif.

Permasalahan pada Tahap *Customs Clearance*

- 9.10 Ketidakjelasan dan ketidaktegasan pengaturan pemutakhiran profil importir/komoditi dan waktu pemutakhirannya serta kelemahan manajemen risiko dan sistem informasi penjaluran dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang pada pengawasan dan pelayanan kepabeanan. Permasalahan utama terkait pemutakhiran profil importir/komoditi adalah Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Nomor INS-06/BC/2010 yang belum mengatur secara jelas importir yang mendapat prioritas untuk dimutakhirkan. Dalam Instruksi Dirjen BC tersebut juga belum mengatur secara jelas terkait waktu dan koordinasi serta peran antarunit kerja di DJBC dalam pemutakhiran profil importir. Selain itu, jumlah SDM yang ditugasi memutakhirkan profil importir dan komoditi yang disediakan tidak memadai.
- 9.11 Kondisi tersebut berdampak terhadap adanya keterlambatan input data profil importir dan komoditi, dan adanya penetapan jalur yang tidak sesuai dengan kriteria. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan permasalahan yaitu Direktur P2 salah dalam menetapkan kategori importir, adanya PPJK yang tidak memiliki profil risiko, dan adanya pembentukan Tim Evaluasi Penjaluran dan Pengelolaan Pemutakhiran Importir yang tidak mendukung proses kelancaran arus barang.
- 9.12 Permasalahan-permasalahan pemutakhiran profil importir untuk penjaluran tersebut di atas merupakan kelemahan pengendalian signifikan yang dapat menimbulkan risiko penyimpangan pada tahap pengawasan dan pelayanan kepabeanan antara lain penyalahgunaan wewenang pada tahap penetapan

jalur, *analyzing point*, pemeriksaan barang dan dokumen, serta pengeluaran barang. Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan adanya barang masuk wilayah Indonesia tanpa pengawasan dan nilai bea masuk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kondisi tersebut berdampak terhadap tingginya persentase jalur merah. Jalur merah merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Permasalahan pada Tahap *Post Custom Clearance*

9.13 Proses penanganan pengeluaran barang belum mendukung kelancaran arus barang sehingga rata-rata waktu *post customs clearance* periode Januari 2012 s.d. Agustus 2013 yang mencapai 35,73% dari rata-rata DT, berdampak terhadap tingginya DT. Permasalahan pengeluaran barang tersebut meliputi

- belum ada pengaturan waktu timbun maksimal atas barang yang sudah diurus dengan pemberitahuan pabean atau pemenuhan kewajiban pabeannya;
- terdapat keterlambatan penetapan sebagai barang tidak dikuasai (BTD) atas barang yang belum diurus oleh pemiliknya sebanyak 11.677 peti kemas;
- BTD sebanyak 1.220 peti kemas masih tersimpan di TPS yang seharusnya ditimbun di tempat penimbunan pabean (TPP);
- penimbunan barang hasil penindakan (BHP) sebanyak 1.294 peti kemas belum diatur secara tegas dan masih disimpan di TPS;
- beberapa importir diindikasikan menjadikan TPS sebagai gudang;
- terdapat 28 TPS yang belum menerapkan *gate online*; dan
- belum ada pengaturan terkait pihak yang berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang atas barang-barang *longstay*, baik yang sudah terbit pemberitahuan impor barang maupun sudah dikeluarkan SPPB-nya.

Permasalahan yang Berpengaruh pada Seluruh Tahapan Proses Bisnis

9.14 Pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok belum didukung dengan peraturan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan perusahaan secara terpadu dan terkoordinasi, serta peraturan terkait pemberian konsesi. Hal tersebut berdampak terhadap ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin kelancaran arus barang. Permasalahan ketidakefektifan OP meliputi koordinasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perusahaan pelabuhan masih

lemah; penataan dan pembangunan lahan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tidak terarah dan tidak terjadwal dengan lebih spesifik; serta pengawasan kinerja layanan jasa kepelabuhanan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut mengakibatkan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur tidak memadai, serta rendahnya kinerja kegiatan pelayanan baik pemerintahan dan pengusaha pelabuhan.

- 9.15 Protokol manajemen krisis kelancaran arus barang yang terpadu di Pelabuhan Tanjung Priok tidak ada. Dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang, sejak Tahun 2002 pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Keppres No. 22 Tahun 2007. Pada Tahun 2013, Kepala OP juga telah membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi DT. Akan tetapi, penanganan krisis kelancaran arus barang Pelabuhan Tanjung Priok belum ditetapkan dalam peraturan atau standar operasi dan prosedur (SOP) sehingga tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait menjadi tidak jelas.
- 9.16 TPS belum mempunyai SOP Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) yang selaras dengan ketentuan kepabeanan dan proses PLP belum didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi dan peraturan tentang kewenangan pengalihan TPS dan pihak yang bertanggung jawab atas risiko pelaksanaan PLP.
- 9.17 Ketersediaan infrastruktur dan parkir perlu dikoordinasikan antarinstansi terkait dan pola pergerakan truk perlu ditata kembali untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memperlancar arus barang. Permasalahan ketersediaan infrastruktur meliputi infrastruktur jalan umum, jalan tol, dan rel kereta api yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan wilayah industri timur (Purwakarta, Cibitung, Bekasi, dan Karawang) dan industri barat (Provinsi Banten). Adapun permasalahan sarana prasarana meliputi ketersediaan lahan parkir atau area tunggu bagi truk pengangkut untuk mendapat giliran muat atau bongkar maupun menunggu penyelesaian dokumen. Selain itu, pola pergerakan truk antara pabrik, gudang, garasi, depo *container*, dan pelabuhan belum efisien misalnya integrasi pengelolaan truk untuk mengirim barang ekspor sekaligus untuk mengambil barang impor.
- 9.18 Sistem informasi pelabuhan belum sepenuhnya terintegrasi dan mendukung kelancaran arus kapal dan barang. Permasalahan-permasalahan integrasi sistem informasi meliputi
- beberapa peraturan pendukung penggunaan teknologi informasi belum lengkap, beberapa belum disusun, dan belum dilaksanakan secara memadai serta terdapat ketidaksinkronan antarperaturan;
 - OP belum menyediakan dan mengelola sistem informasi angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan secara memadai; dan

- instansi-instansi pemerintah dan perusahaan pelabuhan belum secara memadai menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus barang, di antaranya sistem informasi perdagangan terkait perizinan (*inatrade*), sistem informasi kepelabuhanan (*inaport*), sistem informasi kepabeanan, dan INSW belum terintegrasi.

9.19 Terhadap permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi antara lain kepada

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengkoordinasikan 1) efektivitas fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi untuk menjamin kelancaran arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok; 2) penerapan sistem *online* yang terintegrasi pemberian izin dan rekomendasi serta evaluasi dan penyempurnaan ketentuan lartas impor barang; 3) pengaturan penanganan pengeluaran barang; 4) ketersediaan infrastruktur dalam kerangka sistem logistik nasional; dan 5) kebijakan integrasi sistem informasi kepelabuhanan dan sistem informasi perdagangan;
- Menteri Perhubungan agar menyusun 1) peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 79, supaya kegiatan pemerintahan dan perusahaan diselenggarakan secara terpadu dan terkoordinasi; dan 2) peraturan tentang protokol manajemen krisis yang meliputi pengertian krisis serta tata cara pengidentifikasian, perencanaan penanggulangan, dan tanggung jawab tiap-tiap pihak dalam menyelesaikan krisis untuk kelancaran pelayanan arus kapal dan barang;
- Menteri Keuangan antara lain agar melakukan 1) mitigasi risiko-risiko penyimpangan yang dapat terjadi dengan adanya kelemahan dalam pemutakhiran profil importir/komoditi dan penjaluran dengan meminta pertanggungjawaban pejabat terkait atas kesalahan dan ketidaktertiban dalam penetapan jalur dan pemutakhiran profil importir/komoditi; 2) memperbaiki peraturan terkait penjaluran berdasarkan manajemen risiko; dan 3) memerintahkan kepada Dirjen BC untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan profil risiko dan penetapan penjalurannya; dan
- Menteri Perdagangan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Kepala BPOM agar 1) menerapkan perizinan secara *online*; 2) mengintegrasikan sistem informasi perizinan melalui INSW dan menyusun SLA-nya; 3) melaksanakan program peningkatan kapasitas dan kompetensi kepada importir dan/atau PPJK terkait perizinan; serta 4) melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan ketentuan lartas agar mendukung kelancaran arus barang.

9.20 Hasil pemeriksaan atas pelayanan operasional Pelabuhan Tanjung Priok juga mengungkap adanya 13 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

- 9.21 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 10

Pelayanan Publik

- 10.1 Pelayanan Publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud adalah pelayanan perizinan, pelayanan peradilan, layanan pemasyarakatan, pelayanan lelang, pelayanan pertanahan, dan pelayanan jasa informasi meteorologi.
- 10.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan 16 pemeriksaan kinerja atas bidang pelayanan publik, yang terdiri atas 6 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 9 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 10.3 Enam objek pemeriksaan Pemerintah Pusat yaitu 2 objek pelayanan peradilan, layanan pemasyarakatan, pelayanan lelang, pelayanan pertanahan, dan pelayanan jasa informasi meteorologi. Sepuluh objek pemeriksaan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) merupakan pemeriksaan pelayanan perizinan.
- 10.4 Hasil pemeriksaan atas kinerja pelayanan publik menunjukkan permasalahan-permasalahan ketidakefektifan sebanyak 195 kasus senilai Rp13,22 juta.
- 10.5 Perincian hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut.

Pelayanan Perizinan

- 10.6 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas pelayanan perizinan Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Semester I Tahun 2013/Triwulan III Tahun 2013) pada sembilan entitas. Selain itu, BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas upaya pengendalian korupsi dalam pelayanan perizinan TA 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada satu entitas.
- 10.7 Pemeriksaan kinerja ini pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat/publik.
- 10.8 Hasil pemeriksaan atas pelayanan perizinan antara lain menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang telah berupaya dalam memberikan pelayanan yang memadai, yaitu memberikan bimbingan teknis kepada pemohon yang melakukan permohonan izin mendirikan bangunan dan membuat loket pelayanan yang memadai dalam hal jumlah, tempat, dan fasilitas. Dalam pemrosesan dan penerbitan izin pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan SIUP Kecil, dapat dilaksanakan lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan.

10.9 Selain upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang di atas, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pelayanan perizinan pada umumnya belum efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan perizinan, yang terdiri atas 118 kasus ketidakefektifan.

10.10 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Sumber daya manusia (SDM) belum memadai dalam mendukung pelayanan perizinan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi pada enam entitas di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe, Kota Palembang, Kota Kediri, dan Kota Kotamobagu. Belum memadainya SDM ini terlihat dari belum seimbang jumlah pegawai dibanding beban kerja pada bidang pelayanan perizinan. Selain itu, tidak terdapat data analisis kebutuhan personel baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Permasalahan lain yaitu SDM yang ada berlatar belakang pendidikan di bawah standar yang ditetapkan dalam standar operasional dan prosedur (SOP) dan tidak didukung kompetensi, keahlian, serta keterampilan yang sesuai.

Hal ini mengakibatkan pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat belum optimal yang terjadi karena belum adanya analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja dan tidak ada kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan keterampilan kompetensi pegawai pelaksana pelayanan perizinan.

Entitas yang diperiksa:

Pelayanan Perizinan

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara; Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) dan Unit PTSP pada tiap-tiap kota administrasi
2. BPMP Kabupaten Gresik dan entitas terkait lainnya
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kediri dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan dinas teknis terkait Kabupaten Banggai
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah (BPMPD) dan SKPD penerbit izin lainnya pada Kabupaten Konawe
6. KPPT dan SKPD terkait di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tata Kota di Palembang
7. Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kota Kediri dan SKPD terkait
8. BPPT dan Penanaman Modal Daerah (PMD) Kota Bitung
9. PTSP Kota Kotamobagu

Upaya Pengendalian Korupsi dalam Pelayanan Perizinan

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok dan instansi terkait lainnya

- Pelayanan perizinan pada tujuh entitas di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banggai, Kota Palembang, Kota Kediri, dan Kota Kotamobagu melebihi waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan maupun SOP, yang mengakibatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan yang cepat belum terpenuhi.

Hal ini terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam mengawasi kinerja petugas pelaksana pelayanan.

10.11 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada kepala entitas yang diperiksa antara lain agar

- menyusun analisis kebutuhan pegawai dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai dan membuat kebijakan pengembangan keterampilan; dan
- memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara memadai dalam pemberian pelayanan perizinan sesuai jangka waktu yang diatur standar pelayanan maupun SOP.

10.12 Selain pemeriksaan kinerja atas pelayanan perizinan tersebut, pemeriksaan juga dilakukan atas Upaya Pengendalian Korupsi dalam Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Instansi Terkait pada Pemerintah Kota Depok TA 2012 dan Semester I Tahun 2013. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya efektif dalam melakukan upaya pengendalian korupsi. Hal tersebut antara lain terjadi karena Pemerintah Kota Depok belum memiliki kebijakan makro yang terintegrasi dalam upaya pengendalian korupsi dan belum menyusun profil risiko korupsi di setiap tahapan proses bisnis.

10.13 Hasil pemeriksaan pelayanan perizinan juga mengungkap adanya 28 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 4 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp1.685,29 juta.

Pelayanan Peradilan

10.14 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan peradilan, yaitu

- Pelayanan Peradilan Perkara Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011 s.d. Tahun 2013 (Semester I) pada Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan di Jakarta; dan
- Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011 s.d. Tahun 2013 (Semester I) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat di Jakarta.

10.15 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas atas pelayanan peradilan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan peradilan perkara gugatan dan upaya hukum di PA Jakarta Selatan telah cukup efektif dan kinerja pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan upaya hukum di PN Jakarta Barat belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan peradilan pada PN Jakarta Barat dan PA Jakarta Selatan yang terdiri atas 41 kasus ketidakefektifan senilai Rp13,22 juta.

10.16 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Kelemahan pada dukungan SDM antara lain yaitu belum adanya analisis beban kerja dan analisis kompetensi pegawai, penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi, dan kekurangan jumlah pegawai. Hal tersebut mengakibatkan antara lain peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. Terjadi antara lain karena Ketua PN dan Ketua PA tidak melakukan analisis beban kerja dan belum menyusun pedoman pembagian beban kerja. Lebih lanjut, Ketua PN dan Ketua PA juga kurang proaktif mengajukan pemenuhan kebutuhan pegawai.

- Terdapat kelemahan dalam waktu pelaksanaan pelayanan peradilan, yaitu

- di PA Jakarta Selatan, pelaksanaan penyampaian salinan putusan ke Kantor Urusan Agama (KUA) tidak sesuai pedoman yang berlaku. Salinan putusan belum pernah dikirimkan kepada KUA baik KUA tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berdomisili serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Hal tersebut mengakibatkan KUA tempat penggugat dan tergugat berdomisili dan mencatatkan perkawinannya tidak mengetahui dengan segera informasi mengenai putusan perceraian dan tidak dapat mendaftarkan/mencatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan. Selain itu, para pihak terkait tidak mendapatkan pelayanan prima dalam pemerolehan salinan putusan.

Hal tersebut terjadi karena penyusunan pedoman tidak memperhatikan peraturan di atasnya dan Panitera PA Jakarta Selatan lalai dalam melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam amar putusan dan pedoman lainnya.

- Di PN Jakarta Barat, terkait putusan perkara saat pembacaan putusan, beberapa Hakim belum selesai membuat konsep putusan pada saat putusan dibacakan, sehingga mengakibatkan antara lain potensi ketidaksesuaian putusan yang dibacakan dengan salinan putusan yang telah diketik. Hal tersebut terjadi antara lain karena Majelis Hakim lambat dalam menyusun konsep putusan.

- 10.17 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Ketua PN Jakarta Barat dan/atau Ketua PA Jakarta Selatan agar
- melakukan analisis beban kerja secara menyeluruh, menyusun pedoman pembagian beban kerja bagi Hakim dan pelaksana pelayanan peradilan dalam bentuk petunjuk pelaksana, serta lebih proaktif dalam mengajukan pemenuhan kebutuhan pegawai kepada pejabat yang berwenang;
 - memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada KUA sesuai dengan pedoman yang berlaku dan membuat monitoring penyampaian; dan
 - memantau pelaksanaan tugas Majelis Hakim.
- 10.18 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 7 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp15,39 juta, dan 2 kasus kelemahan administrasi.
- 10.19 Dari kasus kekurangan penerimaan senilai Rp15,39 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp3,34 juta.

Layanan Pemasarakatan

- 10.20 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) sebagai instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia juga memberikan pelayanan publik, salah satunya adalah layanan pemsarakatan yang menjadi perhatian masyarakat luas. Layanan pemsarakatan tersebut diberikan kepada warga binaan pemsarakatan (WBP)/tahanan, keluarga WBP/tahanan, dan masyarakat.
- 10.21 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Layanan Pemsarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Periode waktu yang diperiksa adalah Tahun 2011 s.d. 2013 (Semester I).
- 10.22 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas layanan pemsarakatan pada umumnya, serta pengelolaan layanan pembebasan bersyarat (PB) dan kegiatan keamanan dan ketertiban (kamtib) pada khususnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kemenkum dan HAM telah melakukan upaya pembenahan kebijakan atas layanan pemsarakatan. Namun demikian, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa layanan pemsarakatan pada umumnya, serta pengelolaan layanan PB dan kegiatan kamtib pada khususnya belum dapat dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas layanan pemsarakatan yang terdiri atas 9 kasus ketidakefektifan.

- 10.23 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut di antaranya pengelolaan kegiatan kamtib lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) belum optimal mendukung layanan pemasyarakatan. Berdasarkan uji petik masih ditemukan 1) *overstay* tahanan di lapas/rutan; 2) kode etik petugas pemasyarakatan belum disosialisasikan ke seluruh kanwil dan satker pemasyarakatan; 3) prosedur pengeledahan belum dilaksanakan petugas pemasyarakatan sesuai prosedur tetap; 4) barang-barang terlarang ditemukan di dalam kawasan steril lapas/rutan; 5) petugas pemasyarakatan belum bebas dari penyalahgunaan narkoba; 6) lapas/rutan belum bebas dari pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan; 7) pemberian izin keluar lapas bagi WBP/tahanan berisiko penyimpangan; dan 8) hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kamtib oleh Ditjen Pemasyarakatan tidak wajib ditindaklanjuti satker dan kanwil.

Gambar 10.1. Hasil Tes Narkoba Urine Petugas Pemasyarakatan (Kiri) serta Uang dan Paket Ganja di dalam Tas WBP (Kanan)



Hal ini mengakibatkan perlakuan diskriminatif pemberian fasilitas yang tidak sesuai ketentuan di blok hunian dan layanan pemasyarakatan dari oknum petugas pemasyarakatan kepada WBP/tahanan mulai dari tahap penerimaan hingga bebas murni; pungutan liar untuk pemberian fasilitas yang tidak sesuai ketentuan di blok hunian dan layanan pemasyarakatan dari oknum petugas pemasyarakatan dan tahanan pendamping (*tamping*) kepada WBP/tahanan dan keluarga WBP/tahanan; dan tingginya tingkat keberadaan dan peredaran barang-barang terlarang di dalam lapas/rutan.

Hal ini disebabkan adanya itikad tidak baik oknum petugas pemasyarakatan dan *tamping* untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok; petugas pemasyarakatan lalai karena tidak melaksanakan prosedur kamtib pada lapas/rutan sesuai Peraturan Menkum dan HAM dan prosedur tetap; kurangnya kuantitas petugas pengamanan dan sarana prasarana pendukung kegiatan kamtib lapas/rutan; dan lemahnya pengendalian dari Kepala Lapas/ Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Pengamanan Rutan atas pelaksanaan prosedur kamtib.

- 10.24 Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menkum dan HAM agar
- mengusulkan penambahan pegawai yang bertugas melakukan pengamanan lapas/rutan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB); dan
 - menginstruksikan Dirjen Pemasarakatan untuk 1) melakukan pembenahan kebijakan dan implementasi sistem pemasarakatan untuk mengurangi interaksi yang tinggi antara WBP/tahanan dengan petugas pemasarakatan; dan 2) mengembangkan sistem kamtib dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan mengoptimalkan fungsi/peran petugas pengamanan di lapas/rutan.

Pelayanan Lelang

- 10.25 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pelayanan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pelayanan lelang.
- 10.26 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan lelang pada DJKN cukup efektif. Secara umum, pelayanan lelang telah didukung dengan perencanaan dan sumber daya yang memadai, serta penetapan target kinerja lelang telah diimplementasikan. Kegiatan pralelang telah diatur dan dilaksanakan dengan cukup baik antara lain dalam hal penetapan jadwal lelang, verifikasi formalitas subjek dan objek lelang, pengumuman lelang dan penguasaan fisik atas objek lelang barang bergerak, serta administrasi uang jaminan penawaran. Adapun pada tahap pelaksanaan lelang telah didukung dengan peraturan dan diterapkan dengan cukup baik antara lain, peraturan terkait pihak-pihak yang berhak melakukan penawaran dalam penawaran lisan dan tertulis baik dengan kehadiran maupun tanpa kehadiran, dan penyusunan risalah lelang. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah dilaksanakan melalui pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung serta terdapat penilaian kinerja pejabat lelang oleh Kantor Wilayah DJKN dan Direktorat Lelang DJKN.
- 10.27 Namun demikian, hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang terdiri atas 12 kasus ketidakefektifan yang perlu mendapat perbaikan guna meningkatkan kinerja kegiatan pelayanan lelang.
- 10.28 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan pelayanan pelelangan, yaitu 1) peraturan terkait lelang belum mengatur secara rinci mengenai ketentuan nilai limit lelang, pembatalan lelang khususnya untuk lelang tanpa kehadiran, pelaksanaan *aanwijzing*, tata tertib lelang, dan lelang melalui internet; 2) penetapan nilai limit belum seluruhnya didukung

dengan dokumen hasil penilaian/penaksiran dan diverifikasi oleh KPKNL; 3) daftar peserta lelang yang dikenakan sanksi belum dimuat dalam *website* yang dapat diakses oleh seluruh KPKNL; dan 4) penilaian Pejabat Lelang Kelas I oleh Kanwil DJKN belum diikuti dengan pengenaan sanksi dan pemberian penghargaan.

- 10.29 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar
- melakukan harmonisasi dan menyempurnakan peraturan lelang sehingga lebih jelas dan lengkap;
 - segera menyusun dan menetapkan aturan yang mengatur kewajiban bagi penjual untuk melampirkan dokumen hasil penilaian/penaksiran dalam kelengkapan permohonan lelang; kewajiban KPKNL untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan masa berlaku dokumen hasil penilaian/penaksiran; dan kewajiban KPKNL untuk melakukan penilaian atas nilai limit lelang barang milik negara yang diajukan oleh pemohon/penjual;
 - menyusun ketentuan yang mewajibkan tiap-tiap KPKNL untuk mengunggah daftar peserta lelang yang terkena sanksi dalam *website* resmi DJKN sehingga mudah diakses oleh Pejabat Lelang; dan
 - menyusun indikator/kriteria kinerja Pejabat Lelang dan ketentuan pemberian penghargaan kepada Pejabat Lelang Kelas I; dan memutuskan usulan pengenaan sanksi kepada Pejabat Lelang Kelas I oleh Kanwil DJKN sesuai peraturan yang berlaku.
- 10.30 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 3 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Pelayanan Pertanahan

- 10.31 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja Pengelolaan Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta dan Cibinong.
- 10.32 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
- 10.33 Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pengelolaan pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor masih belum efektif karena masih ada beberapa masalah yang menghambat tercapainya efektivitas pengelolaan layanan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pertanahan yang terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan.

10.34 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor belum mengelola SDM sesuai analisis beban kerja dan kamus jabatan, pembagian kerja petugas ukur tidak merata, dan sistem rotasi petugas ukur belum tersedia.

Hal ini mengakibatkan pengelolaan SDM yang tersedia belum optimal, pelayanan pertanahan dikerjakan oleh pegawai yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi atau memiliki kompetensi di bawah standar. Selain itu ketimpangan beban kerja petugas ukur mengakibatkan tingginya risiko terjadinya ketidaktepatan/kesalahan dalam pengukuran/pemetaan yang berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan dan/atau gugatan hukum terhadap Kantor Pertanahan.

Hal ini disebabkan BPN belum memberi perhatian khusus terhadap tata kelola dan kompetensi pegawai. Selain itu, BPN belum menyusun standar baku sistem rotasi petugas ukur dan mekanisme penentuan dan penugasan juru ukur.

- Penerapan mekanisme pelayanan *front office* belum mampu meminimalkan pertemuan pengguna layanan dengan petugas *back office*. Pertemuan personal yang intensif dan hubungan dekat antara pemohon dengan petugas/pejabat *back office* berpotensi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang pegawai/pejabat dan menimbulkan persepsi masyarakat mengenai sulitnya mengurus pelayanan pertanahan.

Hal ini terjadi karena loket dan media informasi belum berfungsi secara optimal. Sedangkan monitoring/pengawasan atas pelaksanaan mekanisme *front office* lemah.

10.35 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPN agar

- memerintahkan seluruh satker untuk mengelola pegawai sesuai kamus jabatan dan analisis beban kerja, serta menyusun dan menetapkan standar baku sistem rotasi dan mekanisme penugasan petugas ukur; dan
- menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme pertemuan antara pemohon dengan petugas *back office*.

10.36 Selain itu, BPK juga telah merekomendasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor agar

- mengelola pegawai sesuai kamus jabatan dan analisis beban kerja, serta menyusun pembagian tugas juru ukur yang adil dan tidak diskriminatif; dan

- meminimalkan intensitas pertemuan antara pemohon dengan petugas *back office* dengan memfungsikan loket sebagai tempat pengambilan seluruh produk layanan.

Pelayanan Jasa Informasi Meteorologi

- 10.37 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Manajemen dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Informasi Meteorologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Jakarta Tahun 2012 dan 2013, dengan uji petik pada Kantor Pusat, 17 stasiun meteorologi, dan 1 stasiun klimatologi yang merupakan koordinator tingkat provinsi yang juga menyelenggarakan pelayanan jasa informasi meteorologi.
- 10.38 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen dalam pelaksanaan pelayanan jasa informasi meteorologi pada BMKG. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa informasi meteorologi pada BMKG sudah cukup efektif. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan masih ditemukan kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan jasa informasi meteorologi, yang terdiri atas 4 kasus ketidakefektifan.
- 10.39 Kelemahan yang mempengaruhi efektivitas manajemen dalam pelaksanaan pelayanan jasa informasi meteorologi, di antaranya adalah penyediaan dan diseminasi informasi prediksi dan peringatan dini cuaca ekstrim belum memadai, yaitu 1) petugas pengelolaan data peringatan dini tidak memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan; dan 2) belum ada ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban BMKG dan instansi penerima informasi prediksi cuaca ekstrim. Selain itu, pengamatan meteorologi peringatan dini cuaca ekstrim belum dilakukan selama 24 jam dalam satu hari, tidak ada standardisasi batas waktu penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrim, dan tidak ada standardisasi media diseminasi dan penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrim melalui *Short Message Service* (sms).

Hal ini mengakibatkan 1) sebagian stasiun meteorologi pada wilayah tertentu tidak dapat memantau cuaca ekstrim secara terus menerus dan tidak dapat membuat informasi peringatan dini cuaca ekstrim yang berkualitas kepada masyarakat; dan 2) asas kesamaan hak dan perlakuan dalam pelayanan publik terkait diseminasi informasi peringatan dini cuaca ekstrim belum tercapai.

Hal tersebut terjadi karena 1) BMKG belum menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sumber Daya Manusia; 2) prosedur operasional standar (POS) tentang penyelenggaraan diseminasi informasi prediksi dan peringatan dini cuaca ekstrim, belum mengatur tentang standardisasi waktu penyampaian informasi, media diseminasi dan penyampaian informasi, serta hak dan kewajiban dari pihak BMKG dan instansi penerima informasi; dan 3) keterbatasan jumlah petugas prakirawan pada stasiun yang menyelenggarakan peringatan dini cuaca ekstrim.

- 10.40 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar
- menyelesaikan RPP tentang SDM yang antara lain mengatur sertifikasi keahlian untuk menjamin kompetensi prakirawan;
 - menetapkan POS tentang penyelenggaraan diseminasi informasi prediksi peringatan dini cuaca ekstrim yang mengatur secara jelas perihal 1) hak dan kewajiban BMKG dan instansi penerima informasi; 2) standarisasi batas waktu penyampaian informasi dan media diseminasi serta penyampaian informasi peringatan dini cuaca ekstrim; dan
 - menginstruksikan Sekretaris Utama BMKG untuk melakukan pengaturan ulang penempatan petugas prakirawan dengan mempertimbangkan kontinuitas jam operasional stasiun.
- 10.41 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 11

Kinerja Bidang Lainnya

- 11.1 Selain tema pemeriksaan kinerja seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2013 BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada 25 objek pemeriksaan kinerja bidang lainnya. Objek pemeriksaan tersebut terdiri atas 11 objek pemeriksaan Pemerintah Pusat, 5 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 4 objek pemeriksaan badan usaha milik negara (BUMN), dan 1 objek pemeriksaan badan usaha milik daerah (BUMD).
- 11.2 Sebelas objek pemeriksaan Pemerintah Pusat terdiri atas 2 objek pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, serta 9 objek pemeriksaan kinerja lain-lain. Sembilan objek pemeriksaan kinerja lain-lain yaitu kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara impor barang; pembinaan keuangan badan layanan umum; swasembada gula nasional; Program Keluarga Harapan; Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan; pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan; pengelolaan kredit ekspor; pengelolaan aset rumah susun sederhana sewa, prasarana, sarana, dan utilitas dan rumah kawasan khusus; dan pengelolaan fungsi penindakan tindak pidana korupsi.
- 11.3 Sembilan objek pemeriksaan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota, terdiri atas 1 objek pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, 3 objek pemeriksaan manajemen aset, 2 objek pemeriksaan pengelolaan keuangan, dan 3 objek pemeriksaan kinerja lain-lain. Tiga objek pemeriksaan kinerja lain-lain tersebut terdiri atas pengelolaan pertamanan dan pemakaman; pengelolaan sarana dan prasarana Transjakarta *Busway*; serta pelaksanaan fungsi unit pelaksana teknis (UPT).
- 11.4 Empat objek pemeriksaan BUMN yaitu kinerja pada PT Merpati Nusantara Airlines; pengelolaan kegiatan produksi dan investasi pada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia; pengelolaan *pospay*, *weselpos*, surat, dan paket pada PT Pos Indonesia (Persero); dan pengelolaan proyek pada PT Waskita Karya (Persero),Tbk. Satu objek pemeriksaan BUMD yaitu pengelolaan produksi dan distribusi air minum, dan pengelolaan pelayanan pelanggan dan penagihan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 11.5 Selain berdasar tingkat pemerintahan, 25 objek pemeriksaan tersebut terbagi atas 3 objek pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, 3 objek pemeriksaan manajemen aset, 2 objek pemeriksaan pengelolaan keuangan, dan 17 objek pemeriksaan kinerja lain-lain, dengan uraian sebagai berikut.
- 11.6 Hasil pemeriksaan atas kinerja bidang lainnya menunjukkan permasalahan-permasalahan ketidakefisienan sebanyak 17 kasus senilai Rp959.667,05 juta dan ketidakefektifan sebanyak 273 kasus senilai Rp1.580.738,12 juta.

11.7 Perincian hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut.

Pengadaan Barang dan Jasa

11.8 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengadaan barang dan jasa pada tiga entitas pemeriksaan, yaitu Pengelolaan Pengadaan Alat Komunikasi pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) (penilaian atas efektivitas hasil pengadaan TA 2008 s.d. 2012 dan penilaian proses pengadaan TA 2010 s.d. 2012); Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Bersumber Pinjaman Luar Negeri (PLN) pada Kementerian Pertahanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan Tahun 2006 s.d. 2011; dan Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2011 s.d. 2013 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

11.9 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk

- menilai apakah pengelolaan kegiatan pengadaan alat komunikasi telah efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer secara optimal memenuhi tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara;
- menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang bersumber dari pinjaman luar negeri dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembiayaan telah efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara; dan
- menilai efektivitas kegiatan pengadaan alat kesehatan yang dilaksanakan oleh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

11.10 Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan

- pengelolaan pengadaan alat komunikasi yang dilakukan dalam periode Tahun 2008 s.d. 2012 belum mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer secara efisien dan efektif;
- pelaksanaan kegiatan pengadaan alutsista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan negara; dan
- Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya telah berupaya maksimal meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dengan terus memperbanyak jumlah puskesmas kecamatan dengan

fasilitas rawat inap. Selain itu, Dinas Kesehatan juga sedang berupaya untuk meningkatkan status beberapa puskesmas kecamatan menjadi rumah sakit tipe D. Rumah sakit tipe D merupakan rumah sakit yang menjadi rujukan puskesmas. Namun demikian, tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pengadaan alat kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kurang efektif dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan alat kesehatan TA 2011 s.d. 2013.

Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kinerja pengadaan barang dan jasa, yang terdiri atas 14 kasus ketidakefektifan senilai Rp898.313,00 juta.

11.11 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kinerja kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Proses pengadaan alat komunikasi perbatasan terkendala karena perencanaan yang belum memadai yaitu tidak adanya *grand design* yang komprehensif atas alat komunikasi perbatasan sehingga terdapat beberapa sistem komunikasi berbeda yang tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya peran pihak Staf Komunikasi dan Elektronika TNI dalam menyusun kebijakan dan perencanaan strategis pengadaan alat komunikasi secara jelas dan komprehensif.

- Penetapan Rencana Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) serta Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri-Jangka Menengah (DRPHLN-JM) dilakukan pada saat tahun berjalan dari periode lima tahunan. Pengaturan kerangka waktu penyusunan RPJM dan Renstra yang menyesuaikan jadwal pelantikan Presiden terpilih mengakibatkan pelaksanaan RPJM dan Renstra Kemhan pada satu periode tertentu tidak berdasarkan waktu mulainya periode perencanaan jangka menengah yang dimaksud. Proses penyusunan dan penetapan DRPHLN-JM yang menyesuaikan proses penyusunan RPJM dan Renstra berakibat output perencanaan pengadaan alutsista untuk periode disusun tidak dapat dilaksanakan pada periode tersebut.

Hal tersebut terjadi karena mekanisme perencanaan pembangunan nasional belum sepenuhnya memadai dalam menciptakan perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, tanggap terhadap perubahan, dan berkelanjutan. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan mundurnya pelaksanaan pengadaan alutsista pada periode pertama dari satu periode RPJM dan Renstra sehingga pencapaian terciptanya rencana pembangunan nasional yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan belum optimal.

- Perencanaan pengadaan alat kesehatan pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi belum memadai sehingga anggaran pada TA 2011 s.d. 2013 senilai Rp43,26 miliar tidak dapat direalisasikan. Tidak terealisasinya anggaran tersebut disebabkan berbagai kendala, antara lain belum adanya database alat kesehatan yang valid dan terintegrasi di jajaran Dinas Kesehatan yang dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah/ rumah sakit khusus daerah.

Hal tersebut mengakibatkan tidak efektifnya penyediaan anggaran/ dana pengadaan alat kesehatan senilai Rp43,26 miliar untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan di puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal tersebut terjadi karena belum adanya mekanisme pengkajian anggaran sebelum disetujui untuk mensinkronkan revisi anggaran dengan kebutuhan riil alat kesehatan. Selain itu, hasil identifikasi yang dituangkan di dalam rencana kerja anggaran (RKA) awal maupun revisi RKA sampai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disetujui belum didukung dengan kertas kerja yang memadai.

11.12 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada

- Panglima TNI agar memerintahkan Asisten Komunikasi dan Elektronika Panglima TNI berkoordinasi dengan dinas pembina teknis/materiil alat komunikasi di angkatan untuk menyusun kebijakan standarisasi hierarkis alat pengelolaan komunikasi TNI secara jelas dan komprehensif;
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan untuk mempertimbangkan penggunaan mekanisme perencanaan, pembiayaan, dan pengadaan alutsista sesuai saran BPK; dan
- Gubernur DKI Jakarta agar menyusun kebijakan yang mengatur secara lebih jelas tentang mekanisme pengkajian anggaran sebelum persetujuan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) termasuk pendokumentasian hasil kajian dan kertas kerja identifikasi kebutuhan riil untuk RKA awal maupun revisi RKA.

11.13 Hasil pemeriksaan tersebut juga mengungkap adanya 9 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Manajemen Aset

11.14 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas manajemen aset pada tiga kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pringsewu untuk Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013.

11.15 Pemeriksaan ini pada umumnya bertujuan untuk menilai apakah proses penatausahaan aset tetap pemerintah kabupaten telah dilakukan secara efektif. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap belum efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas manajemen aset yang terdiri atas 3 kasus ketidakefektifan.

11.16 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Kegiatan penatausahaan aset tetap belum didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai, terjadi pada tiga entitas yang diperiksa. Kondisi tersebut di antaranya analisis kebutuhan jumlah pegawai penatausahaan aset tetap belum berdasarkan beban kerja, penatausahaan aset tetap belum didukung dengan pengelola yang kompeten, dan pengurus/penyimpan barang belum memperoleh pendidikan dan pelatihan (diklat) secara memadai.

Hal tersebut mengakibatkan antara lain pelaksanaan penatausahaan aset tetap terhambat dan proses inventarisasi, pencatatan, pelaporan terkait pengelolaan aset tidak mutakhir.

Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum mengajukan rancangan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan standar kompetensi bagi pelaksana penatausahaan aset tetap. Selain itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) belum menyelenggarakan diklat penatausahaan aset tetap secara rutin dan berkelanjutan.

- Kegiatan inventarisasi aset tetap belum memadai, terjadi pada tiga entitas yang diperiksa. Belum memadainya kegiatan inventarisasi aset tetap di antaranya yaitu pengguna/kuasa pengguna dan pengelola barang milik daerah (BMD) belum tertib, teratur, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi. Selain itu, kegiatan inventarisasi belum didasarkan pada data yang benar, lengkap, dan akurat.

Hal tersebut antara lain mengakibatkan data hasil inventarisasi aset tetap belum andal sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

Penyebabnya antara lain karena Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pengelola BMD kurang melakukan pengawasan atas kegiatan pendataan aset tetap. Selain itu, pengguna/kuasa pengguna barang dan pengurus/penyimpan barang kurang berkomitmen melaksanakan tugas pendataan aset tetap.

- 11.17 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Bupati antara lain agar memerintahkan
- Sekda untuk menginstruksikan Kabag Organisasi supaya mengajukan rancangan analisis kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan standar kompetensi bagi pelaksana penatausahaan aset tetap;
 - Kepala DPPKAD menyelenggarakan diklat/bimtek tentang pengelolaan aset tetap secara rutin dan berkelanjutan;
 - Sekda meningkatkan pengawasan atas kegiatan pendataan aset tetap; dan
 - Kepala SKPD beserta pengurus/penyimpan barang lebih berkomitmen melaksanakan tugas pendataan aset tetap.
- 11.18 Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkap adanya 35 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan 3 kasus kelemahan administrasi.

Pengelolaan Keuangan

- 11.19 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan keuangan pada dua provinsi, yaitu
- pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Keuangan TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung; dan
 - pemeriksaan kinerja atas Penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), DPRD, dan Instansi Terkait Lainnya.
- 11.20 Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai
- efektivitas proses perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, serta menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - efektivitas kegiatan penganggaran untuk program *dedicated* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 11.21 Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
- perencanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Lampung belum efektif dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Lampung belum efisien dan efektif; dan
 - penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Bappeda, BPKD, DPRD, dan instansi terkait lainnya belum efektif.

Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan yang terdiri atas 2 kasus ketidakefisienan dan 24 kasus ketidakefektifan.

11.22 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kinerja kegiatan tersebut sebagai berikut.

- Di Provinsi Lampung, penyusunan anggaran kas dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak memadai. Pada TA 2012, terdapat anggaran pendapatan yang tidak dapat direalisasikan. Anggaran kas sebagai dasar penerbitan SPD seharusnya disesuaikan dengan kondisi riil. Namun, anggaran kas tidak dilakukan penyesuaian, sehingga SPD tetap diterbitkan berdasarkan anggaran kas tanpa didukung ketersediaan dana di kas daerah. Sehingga, pada akhir tahun terdapat belanja yang tidak dapat dibayarkan karena tidak tersedia dana di kas daerah. Atas belanja yang tidak dapat dibayarkan tersebut, Gubernur Lampung mengeluarkan surat pengakuan utang.

Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadinya defisit anggaran pemerintah daerah, karena Kepala Biro Keuangan Setda selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak menjalankan strategi manajemen kas dengan baik dan belum melakukan konsolidasi dalam penyusunan anggaran kas. Selain itu kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun anggaran kas tidak berdasarkan analisis kebutuhan riil.

- Di Provinsi DKI Jakarta, tahapan penyusunan APBD TA 2013 tidak sesuai jadwal, yaitu terdapat keterlambatan dalam proses penyusunan RAPBD 2013 dibandingkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan sebelum Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat menilai kinerjanya dalam hal sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu, dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tidak dapat direalisasikan secara maksimal.

Hal tersebut terjadi karena Gubernur belum menetapkan Peraturan Gubernur tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), kurangnya koordinasi Eksekutif dengan Legislatif dalam pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan terjadinya pergantian Gubernur Provinsi DKI Jakarta hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012.

- 11.23 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada
- Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Biro Keuangan Setda Selaku PPKD dan BUD menjalankan strategi manajemen kas dengan baik dan melakukan konsolidasi dalam penyusunan anggaran kas. Selain itu, Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala SKPD menyusun anggaran kas berdasarkan analisis kebutuhan riil; dan
 - Gubernur DKI Jakarta untuk segera menyusun rancangan peraturan Gubernur tentang tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD/UKPD, serta meningkatkan koordinasi dengan DPRD terkait waktu pelaksanaan pembahasan penyusunan APBD.
- 11.24 Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya 1 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp2.080,60 juta dan 2 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Kinerja Lain-lain

- 11.25 Selain pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, dan pengelolaan keuangan, BPK telah melaksanakan 17 objek pemeriksaan kinerja lain-lain, terdiri atas Pemerintah Pusat sebanyak 9 objek pemeriksaan, pemerintah daerah sebanyak 3 objek pemeriksaan, BUMN sebanyak 4 objek pemeriksaan, dan BUMD sebanyak 1 objek pemeriksaan.

Pemerintah Pusat

- 11.26 Sembilan objek pemeriksaan Pemerintah Pusat yaitu kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara impor barang; pembinaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); swasembada gula nasional; Program Keluarga Harapan; Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP); pengelolaan sumber daya ikan (SDI) berkelanjutan; pengelolaan kredit ekspor (KE); pengelolaan aset rumah susun sederhana sewa, prasarana, sarana, dan utilitas dan rumah kawasan khusus (rusunawa, PSU, dan rusus); dan pengelolaan fungsi penindakan tindak pidana korupsi (TPK).
- 11.27 Pemeriksaan kinerja atas sembilan objek pemeriksaan kinerja di Pemerintah Pusat pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan. Hasil pemeriksaan kinerja atas pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan, yang terdiri atas 112 ketidakefektifan senilai Rp326.479,13 juta.
- 11.28 Hasil pemeriksaan kinerja atas objek pemeriksaan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut.

Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang

- 11.29 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang yang Dilaksanakan pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Timur I, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda, Kanwil DJBC Sumatera Utara, KPPBC Belawan, Kanwil DJBC Bali, NTB, NTT, dan KPPBC Ngurah Rai di Jakarta, Surabaya, Belawan, dan Denpasar TA 2012 sampai dengan Semester I TA 2013.
- 11.30 Pemeriksaan kinerja di atas bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang.
- 11.31 Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang menunjukkan bahwa kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang kurang efektif dalam menjamin pengawasan lalu lintas impor barang.
- 11.32 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut.
- Prosedur dan kebijakan yang ada belum sepenuhnya memadai antara lain ketentuan yang mengatur kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang terkait jangka waktu penyelesaian hasil penindakan dan penanganan barang tanpa pemilik (*lost and found*) yang dikelola oleh maskapai penerbangan belum tersedia; peraturan dan kebijakan mengenai penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan tidak selaras antara satu peraturan dengan peraturan lainnya; peraturan dan kebijakan belum dijabarkan secara lengkap ke dalam standar operasi dan prosedur (SOP); peraturan dan kebijakan belum dapat diimplementasikan secara optimal; dan mekanisme kegiatan evaluasi atas prosedur dan kebijakan belum memadai.
 - Ketersediaan dan pemberdayaan SDM belum sepenuhnya memadai, hasil analisis beban kerja juga belum memperhitungkan seluruh uraian jabatan sehingga tidak menggambarkan kebutuhan pegawai yang ideal untuk melaksanakan kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2).
 - Ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai.
 - Sistem informasi yang tersedia belum sepenuhnya memadai antara lain sistem informasi yang dirancang belum sepenuhnya mendukung kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang, serta belum terintegrasi antarunit terkait.

- Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif antara lain pelaksanaan kegiatan intelijen, penindakan, dan penanganan perkara atas impor barang belum terkoordinasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku, mekanisme pemutakhiran profil importir pada Direktorat P2 belum memadai, pelaporan hasil kegiatan belum seluruhnya disusun, dan evaluasi hasil kegiatan belum memadai.

11.33 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dhi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai antara lain agar

- mengupayakan aturan terkait kewajiban pihak maskapai penerbangan untuk melaporkan status barang *lost and found*, menjabarkan aturan ke dalam SOP dan melakukan upaya penyesuaian Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.05/1997 dengan peraturan di atasnya, menyempurnakan aturan terkait jangka waktu penyelesaian perkara dan pedoman administrasi pelaporan kegiatan P2, dan melakukan pembinaan kepada jajarannya terkait evaluasi atas prosedur dan kebijakan;
- membuat aturan mutasi yang jelas, memenuhi kekurangan SDM, dan menginstruksikan pejabat terkait untuk melakukan pembinaan kepada para bawahannya dalam menyusun dan mengevaluasi analisis beban kerja;
- memenuhi dan memelihara sarana dan prasarana yang jelas;
- menyempurnakan desain sistem informasi terkait otomasi proses administrasi dan dokumentasi, rekonsiliasi dan aksesibilitas data, kelengkapan fitur aplikasi dan integrasi sistem; dan
- memerintahkan pejabat terkait untuk meningkatkan koordinasi internal dan pengawasan dalam pemutakhiran database profil importir, pelaksanaan tupoksi, pelaporan, dan evaluasi.

Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum

11.34 Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pembinaan Keuangan BLU pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar Tahun 2010 s.d. 2013 (Semester I), BPK menyimpulkan bahwa kegiatan penetapan, pembinaan, dan pencabutan status BLU tidak efektif untuk menjamin pengelolaan keuangan BLU dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya permasalahan signifikan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan BLU (penetapan, pembinaan, dan pencabutan) tidak efektif.

11.35 Permasalahan signifikan tersebut di antaranya

- pedoman pembinaan pengelolaan keuangan BLU belum mengatur tata cara pengkajian aspek teknis dan aspek substantif dalam proses penetapan maupun pencabutan status BLU dan belum ada penjabaran petunjuk operasional pembinaan sesuai kebutuhan di tingkat kanwil;
- perencanaan pembinaan belum didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, belum ada pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta belum tersedianya pusat data pembinaan;
- pengorganisasian kegiatan pembinaan belum mencakup prosedur pembekalan tim pembina dan koordinasi antara Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU dan Kanwil DJPB dengan kementerian/ lembaga selaku pembina teknis BLU belum terjalin dengan baik;
- mekanisme reviu dan supervisi kegiatan pembinaan belum dibakukan; dan
- laporan hasil pembinaan belum sesuai format yang ditentukan dalam pedoman/peraturan, tidak disajikan secara informatif, tidak dilaporkan dan dievaluasi secara berjenjang, tidak didistribusikan tepat waktu, belum dihimpun dalam suatu pusat data, dan belum memperoleh umpan balik dari para pemangku kepentingan perihal manfaat laporan hasil pembinaan terhadap peningkatan layanan.

11.36 Terhadap permasalahan signifikan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

- Menteri Keuangan agar
 - merevisi/menyempurnakan pengaturan mengenai tata cara penetapan dan pencabutan BLU dengan memperjelas standar/ indikator penilaian aspek teknis, aspek substantif, dan pemenuhan indikator ketidaklayakan status BLU; dan
 - menyusun dan menetapkan ketentuan mengenai pengaturan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis terkait, Kanwil DJPB, satker BLU, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan agar
 - mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan yang akan dilaksanakan per jenis pembinaan dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pembina di Kanwil DJPB;
 - membentuk pusat data informasi pembinaan satker BLU yang terintegrasi sebagai dukungan dalam perencanaan kegiatan pembinaan;

- membuat mekanisme *transfer knowledge* dalam rangka pembekalan bagi tenaga pembina di Kanwil DJPB;
- menyusun modul revidu dan supervisi dalam rangka *quality assurance* atas pelaksanaan pembinaan; dan
- merumuskan laporan hasil pembinaan yang perlu disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan mekanisme pemerolehan umpan balik atas manfaat laporan hasil pembinaan dari para pemangku kepentingan.

Swasembada Gula Nasional

- 11.37 Hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Gula Nasional Tahun 2010 s.d. 2013 pada Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, DJBC Kementerian Keuangan, dan Instansi Terkait Lainnya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tahun 2010 s.d. September 2013, masih terdapat beberapa kelemahan berupa kelalaian, ketidaktertiban, kurangnya pembinaan, dan lemahnya pengawasan yang menimbulkan ketidakefektifan pencapaian target dan ketidakpatuhan penggunaan anggaran. Selain itu, BPK menyimpulkan bahwa Program Swasembada Gula Nasional 2010-2014 untuk memenuhi kebutuhan gula Tahun 2014 sebanyak 5,7 juta ton dengan sasaran pertumbuhan produksi gula sebesar 12,55 % per tahun tidak tercapai.

Program Keluarga Harapan

- 11.38 Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Keluarga Harapan Tahun 2010, 2011, dan 2012 pada Kementerian Sosial menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan pada Kementerian Sosial di 10 Provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Gorontalo, Lampung, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu masih cukup efektif. BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu mengenai kegiatan validasi dan pemutakhiran data, pembayaran, verifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dapat terlihat dari data calon peserta yang akan divalidasi tidak *up to date*, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)/Keluarga Sangat Miskin tidak terdata sebagai calon peserta Program Keluarga Harapan oleh Badan Pusat Statistik/Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan. Selain itu, proses pembayaran bantuan belum sepenuhnya sesuai ketentuan terkait kebijakan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat, pelaksanaan prosedur pembayaran dan sisa dana bantuan Program Keluarga Harapan di rekening RTSM, proses verifikasi terhadap komitmen kesehatan dan pendidikan Program Keluarga Harapan belum dilaksanakan secara optimal, dan UPPKH Pusat belum menerbitkan SOP Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Daerah, sehingga pelaksanaannya tidak seragam dan optimal.

Gambar 11.1. Kondisi RTSM di Berbagai Wilayah

Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan

- 11.39 Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan Tahun 2011 s.d. 2013 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa pelaksanaan PUMP pada tiga eselon I melalui pemberian bantuan langsung masyarakat (BLM) dapat disimpulkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan belum dapat menjamin tercapainya efektivitas usaha perikanan sehingga dana PUMP yang dikelola berpotensi menjadi salah sasaran. Indikator ketidaktercapaian efektivitas pemberian BLM adalah sebagai berikut, penetapan calon penerima dan calon lokasi belum memadai, penyaluran BLM tidak tepat sasaran dan tepat waktu, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUMP tidak optimal.

Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan

- 11.40 Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan (*Sustainable Fisheries Management*) Tahun 2011 s.d. Semester I Tahun 2013 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan manajerial yang mengakibatkan belum efektifnya upaya-upaya KKP dalam mewujudkan pengelolaan SDI yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat terlihat dari estimasi potensi SDI yang ditetapkan pada Tahun 2011 belum dimutakhirkan, pengendalian terhadap pemanfaatan SDI belum optimal, dan upaya pelestarian SDI belum sepenuhnya mendukung terwujudnya pengelolaan SDI yang berkelanjutan.

Pengelolaan Kredit Ekspor

- 11.41 Hasil pemeriksaan atas Kinerja Pengelolaan Kredit Ekspor TA 2006 s.d. 2010 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) pengelolaan KE untuk pemenuhan peralatan

utama dan peralatan khusus belum efektif dalam mendorong pencapaian Renja dan Renstra Polri. Hal tersebut antara lain terlihat dari uraian berikut.

- SPI pengelolaan KE memiliki kelemahan antara lain ketiadaan *grand design* pengadaan barang yang terintegrasi, ketiadaan SOP tertulis dan baku mengenai pelaksanaan *pre audit*, belum dilakukannya pengidentifikasian risiko-risiko manajemen yang mempengaruhi pengelolaan KE, penggunaan dana untuk pembiayaan KE belum bersifat spesifik (antara lain pembiayaan KE digunakan untuk pengadaan barang yang dapat dibiayai dari APBN), informasi antarpihak pengelola KE belum dijadikan umpan balik dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan KE, dan pengawasan pengelolaan KE baru dilaksanakan untuk tahap perencanaan melalui *pre audit* yang belum dilaksanakan untuk seluruh pengadaan barang dan jasa KE.
- Pengelolaan KE belum memadai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Pengelolaan Aset Rumah Susun Sederhana Sewa, Prasarana, Sarana dan Utilitas, dan Rumah Kawasan Khusus

- 11.42 Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Aset Rumah Susun Sederhana Sewa, Prasarana, Sarana dan Utilitas, dan Rumah Kawasan Khusus TA 2010 s.d. Semester I Tahun 2013 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat menyimpulkan bahwa masih terdapat masalah-masalah yang menghambat tercapainya efektivitas pengelolaan aset. Masalah tersebut terkait perencanaan kebutuhan dan anggaran, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan dan penatausahaan, serta pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi yang kurang optimal. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu rusunawa, PSU, dan rusus pada Kemenpera masih belum efektif.

Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi

- 11.43 Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 s.d. 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta menyimpulkan bahwa perencanaan strategi KPK telah komprehensif dan terukur serta pelaksanaan fungsi penindakan telah sesuai dengan SOP. Namun demikian, penanganan sumber daya dan proses evaluasi dan monitoring masih perlu ditingkatkan, terutama terkait eksaminasi penanganan TPK dan audit atas kegiatan *lawful interception* serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang.
- 11.44 Hasil pemeriksaan kinerja lain-lain Pemerintah Pusat juga mengungkapkan adanya 24 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp308,32 juta, 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp79.791,63 juta, dan 1 kasus kelemahan administrasi. Dari kasus kerugian

negara senilai Rp308,32 juta seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara senilai Rp308,32 juta.

Pemerintah Daerah

- 11.45 Tiga objek pemeriksaan pemerintah daerah yaitu pemeriksaan pengelolaan pertamanan dan pemakaman, pengelolaan sarana dan prasarana Transjakarta *Busway*, serta pelaksanaan fungsi unit pelaksana teknis (UPT).
- 11.46 Pemeriksaan kinerja atas tiga objek pemeriksaan pemerintah daerah pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan. Hasil pemeriksaan kinerja atas tiga objek pemeriksaan kinerja pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas, yang terdiri atas 36 kasus ketidakefektifan.
- 11.47 Hasil pemeriksaan kinerja atas objek pemeriksaan kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman

- 11.48 Hasil pemeriksaan atas Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman TA 2010 s.d. 2012 pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan telah cukup efektif karena telah dilaksanakan sesuai dengan target namun outcome kegiatan masih belum memadai. Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut antara lain didukung dengan adanya kondisi-kondisi berupa realisasi fisik pengadaan lahan peruntukan hijau rendah, realisasi penghijauan tepian sungai rendah, pengamanan tanah hasil pengadaan belum optimal, pemanfaatan lahan taman kota secara ilegal, area resapan air hujan dalam taman kota belum dibangun, dan peraturan terkait penebangan pohon pelindung belum memadai.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transjakarta *Busway*

- 11.49 Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transjakarta *Busway* TA 2013 pada Unit Pengelola (UP) Transjakarta *Busway* Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana Transjakarta *Busway* belum efektif. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan UP Transjakarta *Busway* belum optimal mengawasi kegiatan pemeliharaan armada bus Transjakarta *Busway* yang menjadi kewajiban operator bus sesuai kontrak/surat perjanjian dan kondisi armada bus Transjakarta *Busway* belum sepenuhnya memenuhi standar bus yang telah disepakati dalam kontrak/perjanjian.

Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis

- 11.50 Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Terminal Penumpang Yogyakarta dan Instansi Terkait di Yogyakarta TA 2012 dan 2013 (s.d. Juni) menunjukkan bahwa UPT Pengelolaan Kawasan Terminal Penumpang Yogyakarta belum cukup berhasil dalam merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pemantauan serta evaluasi atas hasil pengelolaan kawasan Terminal Penumpang Yogyakarta. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pelaksanaan beberapa jalan/akses masuk ke terminal tidak dijaga dengan optimal dan tidak ditutup, ketertiban pengguna jasa terminal tidak optimal, dan beberapa fasilitas penunjang pada terminal penumpang Yogyakarta belum disediakan maupun difungsikan secara optimal, data riil jadwal waktu kedatangan dan keberangkatan bus tidak tersedia, serta koordinasi penindakan terhadap armada bus yang tidak tertib belum optimal dilaksanakan.
- 11.51 Hasil pemeriksaan kinerja lain-lain pemerintah daerah juga mengungkapkan adanya 9 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.

Badan Usaha Milik Negara

- 11.52 Pemeriksaan kinerja di empat objek pemeriksaan BUMN yaitu kinerja pada PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA); pengelolaan kegiatan produksi dan investasi pada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri); pengelolaan *pospay*, *wesepos*, surat, dan paket pada PT Pos Indonesia (Persero); dan pengelolaan proyek pada PT Waskita Karya (Persero), Tbk.
- 11.53 Pemeriksaan kinerja atas empat objek pemeriksaan BUMN tersebut pada umumnya bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kegiatan, yang terdiri atas 15 kasus ketidakefisienan senilai Rp959.667,05 juta dan 51 kasus yang mempengaruhi efektivitas senilai Rp355.945,99 juta.
- 11.54 Hasil pemeriksaan kinerja atas objek pemeriksaan tersebut di atas diuraikan sebagai berikut.

PT Merpati Nusantara Airlines

- 11.55 PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) didirikan pada tanggal 6 September 1975 dengan tujuan menjadi jembatan udara nasional di seluruh Indonesia, yang menghubungkan daerah terpencil, kota besar, hingga kawasan regional, dengan memberikan pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat. Data historis menunjukkan pertumbuhan jumlah penumpang domestik sebesar 10% sejak Tahun 2004. Jumlah penumpang penerbangan Indonesia diperkirakan sebanyak 62 juta orang pada Tahun 2012 dan mencapai 86 juta orang pada Tahun 2013 serta diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, PT MNA tidak dapat memanfaatkan pertumbuhan

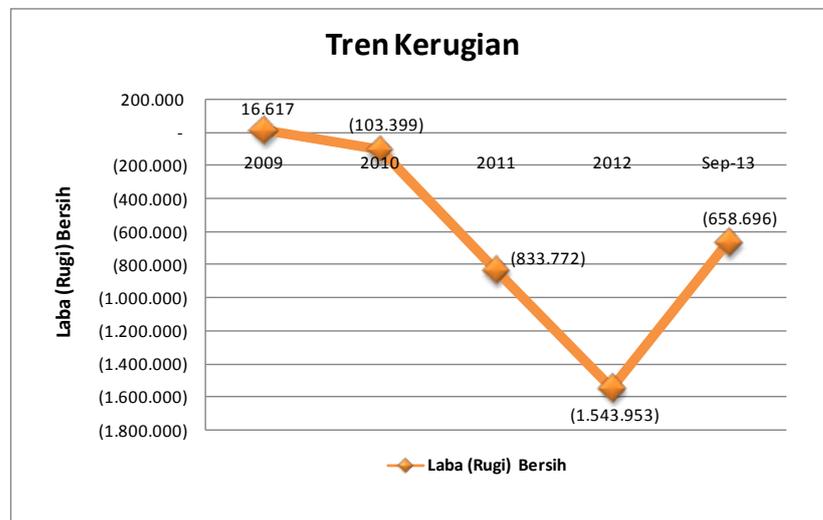
tersebut untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, sebaliknya PT MNA mengalami penurunan kapasitas dan kinerjanya sehingga mengharuskan PT MNA mengurangi kegiatan operasionalnya secara terus menerus. Sejak Tahun 2009 sampai dengan 30 September 2013, jumlah pendapatan usaha yang diperoleh PT MNA lebih kecil dari biaya usaha sehingga perusahaan mengalami kerugian, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 11.1. Tren Kerugian PT MNA sejak Tahun 2009 s.d. September 2013

(dalam juta rupiah)

Uraian	2009	2010	2011	2012	September 2013
Pendapatan Usaha	1.852.451	1.783.639	1.612.029	1.752.044	1.325.117
Beban Usaha	1.859.072	1.809.872	2.099.306	2.378.515	1.633.614
Laba (Rugi) Usaha	(6.621)	(26.233)	(487.276)	(626.471)	(308.495)
Laba (Rugi) Diluar Usaha	14.906	(98.538)	(330.228)	(904.407)	(350.200)
Laba (Rugi) Sblm Pajak	8.285	(124.771)	(817.504)	(1.530.878)	(658.696)
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(586)	21.372	(16.268)	(13.075)	-
Laba (Rugi) Pos Luar Biasa	8.918	-	-	-	-
Laba (Rugi) Bersih	16.617	(103.399)	(833.772)	(1.543.953)	(658.696)

Grafik 11.1. Tren Kerugian PT MNA sejak Tahun 2009 s.d. September 2013



- 11.56 Kerugian terus menerus tersebut mengakibatkan penumpukan hutang PT MNA kepada berbagai kreditur dan entitas pendukung operasional penerbangan senilai Rp7,29 triliun per 31 Oktober 2013.
- 11.57 Kondisi tersebut terjadi karena PT MNA kurang cermat dalam merencanakan jumlah pesawat siap beroperasi (*online*) dan kebutuhan suku cadang dan mesin (*engine*) serta sebagian besar armada yang dioperasikan tidak andal.

Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan PT MNA tidak efektif dan efisien antara lain terdapat pengeluaran biaya atas penundaan dan pembatalan penerbangan senilai Rp22,84 miliar, masih terdapat sisa dana penerbangan perintis senilai Rp8,64 miliar yang tidak terealisasi, dan terjadi kerugian dari penerbangan Kerja Sama Operasional (KSO) senilai Rp31,24 miliar, serta ketidakefisienan pembayaran asuransi senilai USD3.56 juta.

- 11.58 Pengeluaran biaya penundaan dan pembatalan senilai Rp22,84 miliar merupakan biaya *irregularities* atau biaya yang harus dibayarkan sebagai hak penumpang untuk pembayaran tiket pengganti, makanan, hotel, dan transportasi. Sampai dengan pemeriksaan Semester I Tahun 2013, PT MNA mengalami kejadian *irregularities delay* (kejadian penundaan) sebanyak 6.893 kejadian dan *irregularities cancel* (kejadian pembatalan) sebanyak 572 kejadian. Adapun selama Tahun 2012, jumlah *irregularities delay* sebanyak 4.096 kejadian dan *irregularities cancel* sebanyak 1.017 kejadian.
- 11.59 Kelemahan pengelolaan penerbangan perintis terjadi pada kontrak penerbangan perintis Tahun 2012. PT MNA masih menyisakan utang penerbangan perintis sebanyak 660 penerbangan sehingga terdapat sisa dana perintis senilai Rp8,64 miliar yang tidak diterima oleh PT MNA. Selain itu, pengelolaan KSO dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke kurang memadai, pengoperasian pesawat PK-MBP, PK MDF, dan PK MDK minimal selama Tahun 2012 sampai dengan Juni 2013 mengalami kerugian senilai Rp31,24 miliar.
- 11.60 Pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakefisienan PT MNA dalam membayar premi asuransi pesawat kurang lebih senilai USD3.56 juta. PT MNA telah membayar asuransi pesawat dengan perlindungan pesawat yang diterbangkan (*full flight risk/FFR*) tetapi kondisi pesawat tidak terbang (*ground risk only/GRO*). Hal tersebut telah mengakibatkan inefisiensi atas pembayaran premi asuransi pesawat GRO dengan premi FFR kurang lebih senilai USD2.29 juta. Selain itu, terdapat biaya asuransi yang membebani perusahaan senilai USD1.27 juta karena pada periode asuransi Tahun 2011-2012 dan 2012-2013, PT MNA membayar biaya asuransi untuk pesawat yang tidak terbang (*aircraft on ground/AOG*).
- 11.61 Selain itu hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa faktor gangguan teknik pesawat merupakan penyebab utama pembatalan penerbangan. Data *On Time Performance* (OTP) sesuai Laporan Kinerja Operasional yang dikeluarkan Divisi *Operation Support and Cost* (OS) selama Tahun 2011, 2012, dan Semester I 2013 menunjukkan bahwa faktor teknis merupakan penyebab terjadinya pembatalan penerbangan pada pesawat jet maupun pesawat baling-baling MA 60. Gangguan teknis terjadi antara lain karena proses pemeliharaan pesawat yang tidak optimal, usia pesawat jet yang rata-rata di atas 20 tahun. Selain pada pesawat lama, gangguan teknis yang sering terjadi pada pesawat MA 60 yang berusia relatif muda (3-6 tahun) juga berkontribusi terhadap kerugian operasional PT MNA.

- 11.62 Untuk pengadaan pesawat MA 60 tersebut, BPK telah melakukan pemeriksaan pada Tahun 2012 dan telah dilaporkan dalam pemeriksaan sebelumnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain sebagai berikut.
- Perencanaan Proyek MA 60 masuk dalam *Blue Book* dan *Green Book* yang diterbitkan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2007 dengan nama proyek *Procurement of Aircraft for National AirBridge* senilai USD232.00 juta tanpa didukung dokumen persyaratan dan penilaian yang memadai antara lain tanpa disertai kerangka acuan kerja dan studi kelayakan proyek yang memuat manfaat langsung maupun tidak langsung yang diidentifikasi secara kualitatif dan kuantitatif.
 - Pengadaan pesawat MA 60 juga tidak direncanakan dalam *business plan* dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT MNA dan kontrak pembelian ditandatangani sebelum mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mengakibatkan kontrak pembelian patut diduga tidak sah dan terjadi penundaan pengoperasian enam pesawat MA 60 sehingga PT MNA menanggung beban bunga senilai Rp11,34 miliar. Selain itu kontrak pembelian mengandung kelemahan dan renegotiasi kontrak dilakukan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan PT MNA tidak memiliki jaminan ketepatan waktu penerimaan *full flight simulator, additional product support dan training* senilai Rp22,05 juta dan hasil renegotiasi tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Penerimaan sebagian *product support* sebelum kontrak berlaku efektif mengakibatkan PT MNA pada posisi tawar yang tidak memadai dalam upaya pembatalan atau renegotiasi kontrak pembelian serta pengenaan *commitment fee* atas sisa plafon pinjaman mengakibatkan pemerintah membayar *commitment fee* senilai Rp243,33 juta dan masih berpotensi dibebani *commitment fee* senilai Rp5,00 miliar.
- 11.63 Seluruh temuan di atas mengindikasikan terjadinya kerugian yang tidak diantisipasi sejak awal akibat dari *business plan* yang tidak memadai, manajemen operasional yang buruk, serta pemeliharaan dan pengadaan armada yang tidak tepat guna.
- 11.64 Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PT MNA agar
- membuat *business plan* yang realistis dan pelaksanaan yang optimal untuk peningkatan kualitas armada pesawat meliputi efisiensi biaya dan kemampuan bersaing;
 - mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan atas armada pesawat terutama yang sering bermasalah untuk menghindari beban biaya secara terus-menerus;

- menyusun perencanaan strategis untuk pengelolaan penerbangan perintis dan KSO dengan pemerintah daerah yang saling menguntungkan; dan
 - mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran premi asuransi.
- 11.65 Mengingat fungsi PT MNA sebagai jembatan udara yang strategis, pemerintah agar mengupayakan solusi penyelamatan secara komprehensif melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) untuk pertimbangan *going concern* perusahaan.

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

- 11.66 Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Investasi Tahun 2012 dan 2013 (Semester I) pada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan produksi belum sepenuhnya efisien dan efektif serta pengelolaan kegiatan investasi belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan perjanjian pelaksanaan pekerjaan pencetakan uang rupiah dan perjanjian uji mutu dengan Bank Indonesia belum mencerminkan kesetaraan hak dan kewajiban serta pengadaan *camera Inspection for Intaglio* dan *Numbering Control* kurang efektif sehingga tujuan pengurangan biaya produksi (*cost reduction*) per tahun senilai Rp10,18 miliar tidak tercapai.

PT Pos Indonesia (Persero)

- 11.67 Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan *Pospay*, Efektivitas Pengelolaan *Weselpos*, dan Efisiensi Pengelolaan Surat dan Paket Tahun 2012 dan 2013 pada PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung, Jakarta, Banjarbaru, Medan, dan Denpasar menyimpulkan bahwa pengelolaan *pospay* dan *weselpos* cukup efektif, sedangkan pengelolaan surat dan paket kurang efisien. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan PT Pos Indonesia belum optimal dalam merencanakan SDM, PT Pos Indonesia belum memiliki metode perhitungan harga pokok produksi surat dan paket untuk menetapkan tarif, dan aplikasi sistem *online payment point* pelayanan PLN membebani keuangan perusahaan minimal senilai Rp594,36 juta.

PT Waskita Karya (Persero), Tbk

- 11.68 Hasil pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Proyek pada PT Waskita Karya (Persero), Tbk Tahun Buku 2011 dan 2012 serta instansi terkait lainnya di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pekanbaru menyimpulkan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring atas pengelolaan proyek dan piutang PT Waskita Karya (Persero), Tbk belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan
- tata kelola piutang pada PT Waskita Karya (Persero), Tbk belum dilakukan secara efektif;

- ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran pelaksanaan proyek menyebabkan penambahan beban kontrak minimal senilai Rp53,72 miliar; dan
 - penyelesaian pekerjaan tanpa ada dasar kontrak pada Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sriwijaya mengakibatkan PT Waskita Karya (Persero), Tbk menanggung beban kontrak tambahan senilai Rp1,21 miliar di atas beban kontrak rencana.
- 11.69 Hasil pemeriksaan kinerja lain-lain BUMN juga mengungkapkan adanya 3 kasus ketidakhematan senilai Rp46.086,95 juta, 24 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 2 kasus potensi kerugian senilai Rp37.457,24 juta, dan 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp40,00 juta.

Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Daerah Air Minum

- 11.70 Hasil pemeriksaan atas Efektivitas Pengelolaan Produksi dan Distribusi Air Minum, dan Pengelolaan Pelayanan Pelanggan dan Penagihan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. November) menunjukkan bahwa pengelolaan produksi dan distribusi air minum dan pengelolaan pelayanan pelanggan dan penagihan oleh PDAM Kabupaten HSU belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut tercermin dari masih ditemukannya kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan produksi dan distribusi air minum, dan pengelolaan pelayanan pelanggan dan penagihan, yang terdiri atas 33 kasus ketidakefektifan.
- 11.71 Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi efektivitas kegiatan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kegiatan pengembangan jaringan perpipaan belum memadai, kualitas air minum yang dihasilkan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kualitas dan belum seluruhnya diuji kualitasnya secara rutin dan berkala, pelayanan pemasangan sambungan rumah baru tidak memadai, dan pelayanan pengaduan pelanggan PDAM Kabupaten HSU belum memadai.
- 11.72 Hasil pemeriksaan kinerja tersebut juga mengungkap adanya 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern.
- 11.73 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

0-9

3E : Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

A

AAIPI : Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia

Alutsista : Alat Utama Sistem Persenjataan

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

B

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BDU : Belum Daftar Ulang

BHP : Barang Hasil Penindakan

BLH : Badan Lingkungan Hidup

BLM : Bantuan Langsung Masyarakat

BLU : Badan Layanan Umum

BMD : Barang Milik Daerah

BMKG : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BOS : Bantuan Operasional Sekolah

BP3M : Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BPKD : Badan Pengelola Keuangan Daerah

BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPMP : Badan Penanaman Modal dan Perizinan

BPMP2T : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

BPN : Badan Pertanahan Nasional

BPOM : Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPPT : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

BPS : Badan Pusat Statistik

Brigadkarhut : Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan

BUD : Bendahara Umum Daerah

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN : Badan Usaha Milik Negara

C

- CHR : Catatan Hasil Reviu
CO2e : *Carbon dioxide equivalent*

D

- DAS : Daerah Aliran Sungai
Diklat : Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen : Direktur Jenderal
Dirjen BC : Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Dirjen PHKA : Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Disbunhut : Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Dispenda : Dinas Pendapatan Daerah
Ditjen : Direktorat Jenderal
DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP : Direktorat Jenderal Pajak
DJPB : Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKI : Daerah Khusus Ibukota
DPA : Daftar Pelaksanaan Anggaran
DPKA : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
DPP : Dinas Pelayanan Pajak
DPPKAD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRPHLN-JM : Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri - Jangka Menengah
DRPPHLN : Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
DT : *Dwelling Time*

E

- ECLAC : *Economic Commission for Latin America and the Carribean*

F

- FFR : *Full Flight Risk*

G

- GRK : Gas Rumah Kaca
GRO : *Ground Risk Only*

H

- HSU : Hulu Sungai Utara

I

- IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKU : Indikator Kinerja Utama
IMB : Izin Mendirikan Bangunan

Inpres	: Instruksi Presiden
INSW	: <i>Indonesia National Single Window</i>
J	
Jamkesda	: Jaminan Kesehatan Daerah
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
JF-A	: Jabatan Fungsional Auditor
JF-P2UPD	: Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Jitu PB	: Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
JSNR	: Jalan Strategis Nasional Rencana
Juklak	: Petunjuk Pelaksanaan
Juknis	: Petunjuk teknis
K	
K/L	: Kementerian dan Lembaga
Kabag	: Kepala Bagian
Kamtib	: Keamanan dan ketertiban
Kanwil	: Kantor Wilayah
Karhutla	: Kebakaran hutan dan lahan
KE	: Kredit Ekspor
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkum dan HAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kemenpera	: Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian PAN-RB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN/ Bappenas	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Keppres	: Keputusan Presiden
Kesga	: Kesehatan Keluarga
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KKA	: Kertas Kerja Audit
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKR	: Kertas Kerja Reviu
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
km	: kilometer
km ¹ sp	: kilometer sepur
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	: Kantor Pelayanan Perizinan
KPPBC	: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KPPT	: Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
KPU BC	: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai

KSO	: Kerjasama Operasi
KUA	: Kantor Urusan Agama
L	
Lapas	: Layanan Pemasarakatan
Lartas	: Larangan Pembatasan
LHA	: Laporan Hasil Audit
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	: Laporan Hasil Reviu
LK	: Laporan Keuangan
LLAJ	: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
M	
Monev	: monitoring dan evaluasi
MR	: <i>maintenance reserve</i>
Musrenbang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
O	
Obrik	: Objek pemeriksaan
OP	: Otoritas Pelabuhan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P	
P2	: Penindakan dan Penyidikan
PA	: Pengadilan Agama
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pantura	: Pantai Utara
PB	: Pembebasan Bersyarat
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBC	: <i>Performance Based Contract</i>
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
Pelindo	: Pelabuhan Indonesia
Pemda	Pemerintah Daerah
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
Perum	: Perusahaan Umum
Peruri	: Percetakan Uang Republik Indonesia
PHR	: Pajak Hotel dan Reklame
PHRR	: Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame
PKB dan BBNKB	: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PLN	: Pinjaman Luar Negeri
PLP	: Pindah Lokasi Penimbunan

PMD	:	Penanaman Modal Daerah
PN	:	Pengadilan Negeri
Polda	:	Kepolisian Daerah
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
POM	:	Pengawas Obat dan Makanan
POS	:	Prosedur Operasional Standar
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPDB	:	Penerimaan Peserta Didik Baru
PPJK	:	Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPLHD	:	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
PPNS	:	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PR	:	Pajak Relame
PSU	:	prasarana, sarana, dan utilitas
PT MNA	:	PT Merpati Nusantara Airlines
PT JITC	:	<i>PT Jakarta International Container Terminal</i>
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PU	:	Pekerjaan Umum
PUMP	:	Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan
R		
RAN-GRK	:	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Renstra	:	Rencana Strategis
RI	:	Republik Indonesia
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Rp	:	Rupiah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah
RPP	:	Rancangan Peraturan Pemerintah
RR	:	Rehabilitasi dan Rekontruksi
RS	:	Rumah Sakit
RSU	:	Rumah Sakit Umum
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTSM	:	Rumah Tangga Sangat Miskin
Rusunawa	:	Rumah susun sederhana sewa
Rusus	:	Rumah kawasan khusus
Rutan	:	Rumah Tahanan
S		
s.d.	:	sampai dengan
Samsat	:	Sistem administrasi manunggal satu atap

satker	: Satuan kerja
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDI	: Sumber Daya Ikan
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekda	: Sekretaris Daerah
Setda	: Sekretariat Daerah
SIM-RS	: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
SLA	: <i>Service Operating Agreement</i>
SMAN	: Sekolah Menengah Atas Negeri
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPD	: Surat Penyediaan Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPB	: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SPTPD	: Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSK	: Strategi Sanitasi Perkotaan

T

TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
TPP	: Tempat Penimbunan Pabean
TPS	: Tempat Penimbunan Sementara
Tupoksi	: Tugas, pokok, dan fungsi

U

UKPD	: Unit Kerja Perangkat Daerah
UP	: Unit Pengelola
UPPKH	: Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
USD	: <i>United State Dollar</i>
UU	: Undang-Undang

W

WBP	: Warga Binaan Pemasyarakatan
WP	: Wajib Pajak

WS : Wilayah Sungai

WT : *Waiting Time*

Y

YOR : *Yard Occupancy Ratio*

DAFTAR ISTILAH

Antenatal	:	Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan, dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal yang ada, dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif
Biaya <i>irregularities</i>	:	Biaya yang harus dibayarkan sebagai hak penumpang untuk pembayaran tiket pengganti, makanan, hotel, dan transportasi
<i>Camera Inspection For Intaglio</i>	:	Alat kontrol yang berfungsi untuk mendeteksi secara langsung (<i>online</i>) terhadap kualitas hasil mesin cetak dalam (<i>intaglio</i>) yang dapat dilihat atau tidak dapat dilihat secara kasat mata pada uang kertas
<i>Costums Clearance</i>	:	Proses administrasi pengiriman dan atau pengeluaran barang ke/dari pelabuhan muat/bongkar yang berhubungan dengan Kepabeanaan dan administrasi pemerintah
Desentralisasi fiskal	:	Sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah
Diseminasi	:	Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut
Disinsentif	:	Bersifat tidak merangsang; tidak memberi insentif
<i>Dispensing</i>	:	Kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap validasi, interpretasi, menyiapkan/meracik obat, memberikan label/etiket, penyerahan obat dengan pemberian informasi obat yang memadai disertai sistem dokumentasi
<i>Dwelling Time</i>	:	Waktu yang dibutuhkan oleh peti kemas mulai dari kegiatan bongkar muat sampai keluar dari <i>Gate</i> terminal/Tempat Penimbunan Sementara
Eksaminasi	:	Menguji dalam arti yang luas Putusan PN diuji dengan putusan banding Pengadilan Tinggi. Putusan PT diuji dengan Kasasi MA, Putusan MA diuji dengan PK (Peninjauan Kembali). Terkait KPK, KPK melakukan pengujian atasan putusan hakim pada persidangan tingkat pertama
Ekstensifikasi pajak	:	Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan jalan mengembangkan dan menambah cakupan (jumlah) wajib pajak
<i>Indonesia National Single Window (INSW)</i>	:	Sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (<i>single submission of data and information</i>), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (<i>single and synchronous processing of data and information</i>), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanaan dan pengeluaran barang (<i>single decision-making for custom release and clearance of cargoes</i>)
Insentif	:	Tambahan penghasilan (uang, barang, dsb) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja, uang perangsang
Integrasi	:	Pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat

Intensifikasi pajak	:	Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan jalan membina dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang sudah ada
Interoperabilitas	:	Kemampuan dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, pada saat ini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi
Jalan Arteri	:	Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
Jalan Khusus	:	Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri
Jalan Kolektor	:	Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi
Jalan Strategis Nasional Rencana	:	Jalan yang berstatus jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota yang mendukung berfungsinya sistem jaringan jalan nasional
Kepelabuhanan	:	Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah
Klimatologi	:	Gejala alam yang berkaitan dengan iklim dan kualitas udara
Konsesi	:	Pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu
Larangan dan Pembatasan (Lartas)	:	Perizinan yang berkaitan dengan aturan pembatasan/tata niaga atau larangan
<i>Lawful interception</i>	:	Penyadapan secara sah menurut hukum
Meteorologi	:	Gejala alam yang berkaitan dengan cuaca
<i>Non cash transaction</i>	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi nontunai 2. Seluruh transaksi dalam rangkaian pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan transaksi nontunai melalui mekanisme perbankan
<i>Numbering Control</i>	:	Alat kontrol yang berfungsi untuk mendeteksi secara langsung (<i>online</i>) terhadap akurasi, urutan, dan kualitas hasil mesin cetak nomor yang dapat dilihat atau tidak dapat dilihat secara kasat mata
<i>Other Government Agencies</i>	:	Balai Karantina, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain
Otoritas Pelabuhan (<i>Port Authority</i>)	:	Lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial
Pelabuhan	:	Tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi

Pemberitahuan Impor Barang	: Pemberitahuan atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap Pabean sesuai prinsip <i>self assessment</i>
Pindah Lokasi Penimbunan (PLP)	: Pemindahan lokasi penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya dari suatu gudang atau lapangan penumpukan TPS tertentu ke suatu gudang atau lapangan penumpukan tertentu atau TPS lainnya yang berada dalam satu wilayah pengawasan Kantor Pabean
<i>Post Clearance</i>	: Peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan
<i>Pre Clearance</i>	: Proses barang masuk ke Pelabuhan sebelum diperiksa oleh aparat bea dan cukai pelabuhan. Proses tersebut antara lain pemenuhan izin instansi, proses pembayaran (perbankan), administrasi pelabuhan dan infrastruktur, dan karantina
<i>Program Dedicated</i>	: Program prioritas yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar, dan memiliki urgensi yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)	: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang, merupakan pemberitahuan yang diterbitkan oleh Kantor Bea dan Cukai tentang persetujuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean
<i>Sustainable Fisheries Management</i>	: Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Berkelanjutan
Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	: Bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya
<i>System Online Payment Point</i>	: Sistem yang digunakan untuk operasional layanan <i>pospay</i> secara <i>online</i> yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia yang terhubung ke mitra. Bisnis proses layanan <i>pospay</i> dilakukan dengan cara mengintegrasikan sistem dan database mitra dengan sistem dan database PT Pos Indonesia yang berada di loket
<i>visite</i>	: Kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap bersama tim dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
<i>Waiting Time/ Waktu Tunggu Kapal</i>	: Jumlah waktu sejak pengajuan permohonan tambat setelah kapal tiba di lokasi labuh sampai kapal digerakkan menuju tambatan
Wesel	: Jalan rel kereta api yang bercabang (bersimpangan) sebagai tempat memindahkan jurusan jalan kereta api dengan arah ke kanan ataupun ke kiri dari <i>track</i>

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Kinerja

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyetonan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah dibindak lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Kerugian Negara/Daerah		Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	APIP	-	-	-	-	7	8	9	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat	-	-	-	-	7	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kesehatan	1	-	4	-	278	1.407,14	283	1.407,14	80	1	159,81	-	-	-	-	-	1	2	159,81	88,10	-
	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	1	-	1	-	200	1.407,14	202	1.407,14	58	1	159,81	-	-	-	-	-	1	2	159,81	88,10	-
	Provinsi	-	-	1	-	52	-	53	-	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Kabupaten/Kota	1	-	-	-	148	1.407,14	149	1.407,14	33	1	159,81	-	-	-	-	-	-	1	159,81	88,10	-
	Penyelenggaraan Program Kesehatan	-	-	-	-	67	-	67	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Program KIA	-	-	-	-	4	-	4	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	4	-	4	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	-	-	-	-	45	-	45	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	45	-	45	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Program Jamkesda	-	-	-	-	18	-	18	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	7	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Badan POM	-	-	3	-	11	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pusat	-	-	3	-	11	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pendidikan	-	-	-	-	264	656,76	264	656,76	67	6	1.095,85	-	-	2	285,79	5	13	1.381,64	-	-	-
	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sarana dan Prasarana Pendidikan	-	-	-	-	221	656,76	221	656,76	50	6	1.095,85	-	-	2	285,79	4	12	1.381,64	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	10	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	211	656,76	211	656,76	47	6	1.095,85	-	-	2	285,79	4	12	1.381,64	-	-	-
	Penerimaan Peserta Didik Baru	-	-	-	-	33	-	33	-	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	33	-	33	-	14	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Ketdakekonomisan, Ketdakefisienan, dan Ketdakefektifan						Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan						Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas tunjangan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan								
		Ketdakehematan/pemborosan/ketidakekonomisan		Ketdakefisienan		Ketdakefektifan		Total Ketdakekonomisan, Ketdakefisienan, dan Ketdakefektifan		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Kelemahan Administrasi		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Program Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	422	5.881,56	422	5.881,56	179	5	215,74	-	-	-	26	42.543,20	3	34	42.758,94	77,45	-
	Pengelolaan PHRR	-	-	-	-	371	5.881,56	371	5.881,56	152	5	215,74	-	-	26	42.543,20	1	32	42.758,94	77,45	-	1.257,13
	Provinsi	-	-	-	-	8	-	8	-	3	-	-	-	-	1	20.536,42	-	1	20.536,42	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	363	5.881,56	363	5.881,56	149	5	215,74	-	-	25	22.006,78	1	31	22.222,52	77,45	-	1.257,13
	Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB)	-	-	-	-	18	-	18	-	23	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	18	-	18	-	23	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-	-	-	11	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	11	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Pajak Restoran, Kerja Sama Operasi (KSO) dan Retribusi Izin Gangguan	-	-	-	-	22	-	22	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	22	-	22	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Infrastruktur	5	919,38	-	-	73	81.065,04	78	81.984,42	6	14	4.156,59	5	1.652,46	7	6.759,47	-	26	12.568,52	1.137,43	57,21	1.217,55
	Jalan dan Lembangan Nasional	-	-	-	-	38	74.842,23	38	74.842,23	4	11	3.834,78	4	776,16	6	6.711,45	-	21	11.322,39	1.116,39	55,96	1.169,53
	Pusat	-	-	-	-	38	74.842,23	38	74.842,23	4	11	3.834,78	4	776,16	6	6.711,45	-	21	11.322,39	1.116,39	55,96	1.169,53
	Jalan dan Lembangan Kabupaten	5	919,38	-	-	31	6.222,81	36	7.142,19	2	3	321,81	1	876,30	1	48,02	-	5	1.246,13	21,04	1,25	48,02
	Kabupaten/Kota	5	919,38	-	-	31	6.222,81	36	7.142,19	2	3	321,81	1	876,30	1	48,02	-	5	1.246,13	21,04	1,25	48,02

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan										Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah diindikasikan lanjut dalam proses pemeriksaan				
		Ketidakekonomisan/ pemborosan/ ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Total Ketidapatuhan		Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa Pusat	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Lingkungan Hidup dan Bencana Daerah Aliran Sungai Pusat	1	315,53	2	-	91	389.266,63	94	389.582,16	12	264,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	264,61	-	-
	Mitigasi Perubahan Iklim Pusat	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	56	-	56	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pascabencana Pusat	1	315,53	2	-	23	389.266,63	26	389.582,16	5	264,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	264,61	-	-	-
7	Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok Pusat	-	-	-	-	19	-	19	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelayanan Publik Pelayanan Perizinan Provinsi Kabupaten/Kota Pelayanan Peradilan Pusat Layanan Pemasyarakatan Pusat Pelayanan Lelang Pusat	-	-	-	-	195	13,22	195	13,22	38	-	-	-	-	7	1.700,68	2	1.700,68	-	-	-	9	1.700,68	-	-	3,34
		-	-	-	-	118	-	118	-	28	-	-	-	4	1.685,29	-	4	1.685,29	-	-	-	4	1.685,29	-	-	-
		-	-	-	-	15	-	15	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	103	-	103	-	25	-	-	-	4	1.685,29	-	4	1.685,29	-	-	-	4	1.685,29	-	-	-
		-	-	-	-	41	13,22	41	13,22	7	-	-	-	3	15,39	2	5	15,39	-	-	-	5	15,39	-	-	3,34
		-	-	-	-	41	13,22	41	13,22	7	-	-	-	3	15,39	2	5	15,39	-	-	-	5	15,39	-	-	3,34
		-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	12	-	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	12	-	12	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Kelelahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/ Daerah												Nilai penyerahan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan					
		Ketidakekonomisan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan			Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan		Kerugian Negara/ Daerah		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan									
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	Pelayanan Pertahanan Pusat	-	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Jasa Informasi Meteorologi Pusat	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9	4	40.366,59	17	916.204,25	273	482.100,16	294	1.438.671,00	111	1	308,32	2	22.726,35	2	79.831,63	4	9	102.866,30	308,32	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah Kinerja Bidang Lainnya		USD 640,00		USD 3.565,74		USD 90.133,56		USD 94.339,30										USD 1.208,54							
	Pengadaan Barang dan Jasa	-	48.167,55	-	959.667,05	-	1.580.738,12	-	2.588.572,72	-	-	308,32	-	37.457,24	-	79.831,63	-	-	117.597,19	308,32	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa					14	125.733,59	14	125.733,59	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Pusat						USD 63.383,33		USD 63.383,33																	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi					8	72.007,28	8	72.007,28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota					6	53.726,31	6	53.726,31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi					3	3	3	3	35	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota					3	3	3	3	35	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi	1	2.080,60	2	2.080,60	24	-	27	2.080,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota	1	2.080,60	2	2.080,60	24	-	27	2.080,60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi	3	38.285,99	15	916.204,25	232	356.366,57	250	1.310.856,81	65	1	308,32	2	22.726,35	2	79.831,63	1	6	102.866,30	308,32	-	-	-	-	-	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota		USD 640,00		USD 3.565,74		USD 26.750,23		USD 30.955,97										USD 1.208,54							
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi		46.086,95		959.667,05		682.425,12		1.688.179,13		308,32			37.457,24		79.831,63			117.597,19	308,32						
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota					112	420,58	112	420,58	24	1	308,32	1	-	1	79.791,63	1	3	80.099,95	308,32						
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi						USD 26.750,23		326.479,13																	
	Jumlah Rupiah Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota						326.479,13		326.479,13		308,32					79.791,63			80.099,95	308,32						

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Ketikadekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Kelemban Sistem Pengendalian Intern	Ketikadpatahan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Ketidakpatahan												Nilai penyerahan aset atau penyeteran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	b. Daerah	-	-	-	-	36	-	36	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	26	-	26	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	10	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. BUMN	3	38.285,99	15	916.204,25	51	355.945,99	69	1.310.436,23	24	-	2	22.726,35	1	40,00	-	-	3	22.766,35	-	-	-	-	-
			USD 640,00		USD 3,565,74				USD 4,205,74					USD 1,208,54					USD 1,208,54					
	Jumlah Rupiah BUMN		46.086,95		959.667,05		355.945,99		1.361.699,99					37.457,24		40,00			37.497,24					
	d. BUMD	-	-	-	-	33	-	33	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah																							
	Pusat	1	315,53	5	-	311	536.549,94	317	536.865,47	68	13	4.407,71	4	776,16	10	86.518,47	3	30	91.702,34	1.424,71	55,96	1.172,87		
							USD 90,133,56		USD 90,133,56															
	Jumlah Rupiah Pusat		315,53		-		1.635.187,90		1.635.503,43			4.407,71		776,16		86.518,47			91.702,34	1.424,71	55,96	1.172,87		
	Provinsi	1	2.080,60	3	-	166	53.726,31	170	55.806,91	67	-	-	-	-	1	20.536,42	3	4	20.536,42	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	6	919,38	-	-	1.061	14.168,27	1.067	15.087,65	342	15	1.793,21	1	876,30	32	24.025,88	9	57	26.695,39	186,59	1,25	1.305,15		
	BUMN	3	38.285,99	15	916.204,25	51	355.945,99	69	1.310.436,23	24	-	-	2	22.726,35	1	40,00	-	3	22.766,35	-	-	-	-	-
			USD 640,00		USD 3,565,74				USD 4,205,74					USD 1,208,54					USD 1,208,54					
	Jumlah Rupiah BUMN		46.086,95		959.667,05		355.945,99		1.361.699,99					37.457,24		40,00			37.497,24					
	BUMD	-	-	-	-	33	-	33	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	11	41.601,50	23	916.204,25	1.622	960.390,51	1.656	1.918.196,26	509	28	6.200,92	7	24.378,81	44	131.120,77	15	94	161.700,50	1.611,30	57,21	2.478,02		
			USD 640,00		USD 3,565,74		USD 90,133,56		USD 90,133,56					USD 1,208,54					USD 1,208,54					
	Jumlah Total Rupiah	11	49.402,46	23	959.667,05	1.622	2.059.028,47	1.656	3.068.097,98	509	28	6.200,92	7	39.109,70	44	131.120,77	15	94	176.431,39	1.611,30	57,21	2.478,02		

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2013

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KINERJA				
I APIP				
1	1	Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 16 Inspektorat Kementerian/Lembaga, 32 Inspektorat Provinsi, 25 Inspektorat Kabupaten, dan 13 Inspektorat Kota	1	Efektivitas Fungsi Pengelolaan Audit dan Reviu Laporan Keuangan Oleh APIP Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 16 Inspektorat Kementerian/Lembaga, 32 Inspektorat Provinsi, 25 Inspektorat Kabupaten, dan 13 Inspektorat Kota
	Jumlah		1	
II Kesehatan				
a Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit				
1	2	Provinsi Aceh	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Rawat Inap TA 2012 dan 2013 (s.d. Semester I) pada RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya di Calang
2	3	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan Rawat Inap TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada RSUD Kota Padang Panjang di Padang Panjang
3	4	Provinsi Riau	1	Efektifitas Pengelolaan Rawat Inap dan Perbekalan Farmasi TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada RSUD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
4	5	Provinsi Jambi	1	Efektivitas Manajemen RSUD Raden Mattaher dalam Mengelola Pelayanan Rawat Inap pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi di Jambi
5	6	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RS Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6	7	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Lapangan Kabupaten Lingga TA 2012 dan 2013 (Semester I) di Daik
	8		1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Kabupaten Natuna TA 2012 dan 2013 (Semester I) di Ranai
7	9	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja Pelayanan Instalasi Farmasi pada RSUD Kardinah Tegal Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Tegal
8	10	Provinsi Jawa Timur	1	Efektivitas Pelayanan Farmasi pada RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto TA 2012 dan 2013 (Semester I) di Mojokerto
9	11	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rawat Inap RSUD Taman Husada TA 2012 dan 2013 di Kota Bontang
10	12	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2012 dan 2013 pada RSUD Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan
	13		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan TA 2012 dan 2013 pada RSUD Anuntaloko di Kabupaten Parigi Moutong
11	14	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja RSU Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
12	15	Provinsi Papua	1	Efektivitas Pelayanan Kesehatan Instalasi Rawat Inap pada RSUD Abepura Provinsi Papua TA 2012 dan 2013
	16		1	Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap dan Penunjang Medis RSUD Biak Kabupaten Biak Numfor TA 2012 dan 2013 di Biak
	17		1	Efektivitas Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap dan Farmasi pada RSUD Wamena Tahun 2012 dan 2013 Semester I di Wamena
b	Pengelolaan Program Kesehatan			
	Program Kesehatan Ibu dan Anak			
1	18	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja Pengelolaan Program Kesehatan Ibu dan Anak TA 2012 dan Semester I TA 2013 Pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman di Pariaman
	Program Perbaikan Gizi masyarakat			
1	19	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kinerja Pengelolaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
2	20	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Ketapang
	21		1	Efektivitas Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Sungai Raya
	Program Jamkesda			
1	22	Provinsi Jawa Barat	1	Program Jaminan Kesehatan Daerah (Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin) pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2012 dan Semester I TA 2013
	23		1	Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemerintah Kabupaten Cianjur TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Cianjur
c	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
1	24	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) TA 2011 s.d. Semester I TA 2013
	Jumlah		23	
III	Pendidikan			
a	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Sarana dan Prasarana			
1	25	Provinsi Aceh	1	Kinerja Pelayanan Pendidikan Provinsi Aceh TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh
2	26	Provinsi Sumatera Utara	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Dairi di Sidikalang
	27		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar TA 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Karo di Kabanjahe

No.	Entitas	Daftar LHP			
		Jml	Objek Pemeriksaan		
		28		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung
3	Provinsi Sumatera Barat	29		1	Kinerja Pengelolaan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana TA 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
		30		1	Kinerja Pengelolaan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
4	Provinsi Jambi	31		1	Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Tenaga Kependidikan TA 2012 dan Semester I 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5	Provinsi Sumatera Selatan	32		1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2012 dan Instansi Terkait Lainnya di Kayuagung
6	Provinsi Kepulauan Riau	33		1	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Menengah TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun
		34		1	Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa
7	Provinsi Jawa Tengah	35		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Tenaga Pendidik dalam Menunjang Mutu Pendidikan Dasar Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen di Kebumen
		36		1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Tenaga Pendidik dalam Menunjang Mutu Pendidikan Dasar Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
8	Provinsi Jawa Timur	37		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Banyuwangi TA 2012 dan 2013 (Semester I) di Banyuwangi
		38		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Madiun TA 2012 dan 2013 (Semester I)
		39		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Probolinggo TA 2012 dan 2013 (Semester I) di Probolinggo

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
	40		1 Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar pada Kabupaten Tuban Tahun 2012 - 2013 (Semester I)
9	41 Provinsi Sulawesi Tenggara		1 Kinerja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bombana TA 2012 s.d. Semester I 2013 di Rumbia
10	42 Provinsi Sulawesi Barat		1 Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pemerintah Kabupaten Mamasa
11	43 Provinsi Maluku Utara		1 Efektivitas Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Pemerintah Kota Ternate di Ternate
b Penerimaan Peserta Didik Baru			
1	44 Provinsi Sulawesi Selatan		1 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2013/2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
	45		1 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2013/2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo
	46		1 Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN/SMKN Tahun Pelajaran 2013/2014 pada Dinas Pendidikan Kota Makassar
c Program Bantuan Operasional Sekolah			
1	47 Provinsi Jawa Barat		1 Efektivitas Pertanggungjawaban dan Kegiatan Monitoring Evaluasi Program BOS (BOS Pusat, BOS Provinsi, dan BOS Kabupaten) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Soreang
	Jumlah		23
IV Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			
a Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame			
1	48 Provinsi Aceh		1 Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2012 dan Semester I 2013 di Banda Aceh
2	49 Provinsi Sumatera Utara		1 Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Medan TA 2012 dan Semester I 2013 di Medan
3	50 Provinsi Sumatera Barat		1 Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Bukittinggi
	51		1 Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Padang TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Padang
4	52 Provinsi Riau		1 Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Dumai TA 2012 dan Semester I 2013 di Dumai

No.	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
	53		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru
5	54	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
	55		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
6	56	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin TA 2012 dan Semester I 2013 di Sekayu
	57		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Palembang TA 2012 dan Semester I 2013 di Palembang
7	58	Provinsi Bengkulu	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Bengkulu TA 2012 dan Semester I 2013
8	59	Provinsi Lampung	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Bandar Lampung
9	60	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2012 dan Semester I 2013 di Tanjungpandan
10	61	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Batam TA 2012 dan Semester I 2013 di Batam
11	62	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan Entitas Terkait Lainnya
12	63	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame Pemerintah Kota Bandung TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Bandung
	64		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Bogor TA 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Bogor
13	65	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Purwokerto
	66		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kota Semarang di Semarang
	67		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Surakarta TA 2012 dan Semester I 2013 di Surakarta
14	68	Provinsi D I Yogyakarta	1	Pengelolaan Pajak, Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Yogyakarta

No.			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
15	69	Provinsi Jawa Timur	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan TA 2012 dan Semester I 2013 di Pasuruan	
	70		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Malang TA 2012 dan Semester I 2013 di Malang	
	71		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Surabaya TA 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Surabaya	
16	72	Provinsi Banten	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Serang TA 2012 dan Semester I 2013 di Serang	
17	73	Provinsi Bali	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Badung TA 2012 dan 2013 (Semester I) di Mangupura	
	74		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Denpasar TA 2012 dan Semester I 2013 di Denpasar	
18	75	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Entitas Terkait Lainnya Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Gerung	
19	76	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat TA 2012 s.d. Semester I 2013 di Labuan Bajo	
	77		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Kupang TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 di Kupang	
20	78	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kota Pontianak di Pontianak	
21	79	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun	
	80		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kota Palangka Raya di Palangka Raya	
22	81	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame pada Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2012 dan Semester I 2013 di Banjarmasin	
23	82	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (Semester I) di Balikpapan	
24	83	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran dan Reklame pada Pemerintah Kota Manado TA 2012 dan Semester I 2013 di Manado	
25	84	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Efektivitas Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame Tahun 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kota Palu di Palu	

No.		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
26	85	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara TA 2012 dan Semester I 2013 di Rantepao
	86		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Makassar TA 2012 dan Semester I 2013 di Makassar
	87		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Parepare TA 2012 dan Semester I 2013 di Parepare
27	88	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Baubau TA 2012 dan Semester I 2013 di Baubau
28	89	Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2012 dan Semester I 2013 di Limboto
	90		1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Gorontalo TA 2012 dan Semester I 2013 di Gorontalo
29	91	Provinsi Maluku	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Ambon TA 2012 dan Semester I 2013 di Ambon
30	92	Provinsi Maluku Utara	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Ternate TA 2012 dan Semester I 2013 di Ternate
31	93	Provinsi Papua	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame pada Pemerintah Kota Jayapura TA 2012 dan Semester I 2013 di Jayapura
32	94	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kota Sorong di Sorong
b Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB)				
1	95	Provinsi Lampung	1	Kinerja Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2	96	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pengelolaan PKB dan BBNKB pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
c Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)				
	97	Provinsi Papua	1	Pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, dan PBB pada Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2012 dan 2013 (Semester I) di Timika
d Pengelolaan Pajak Restoran, Kerja Sama Operasi (KSO), dan Retribusi Izin Gangguan				
1	98	Provinsi Papua	1	Kinerja Pengelolaan Pajak Restoran, Kerja Sama Operasi (KSO), dan Retribusi Izin Gangguan pada Kabupaten Merauke TA 2012 dan Semester I 2013 di Merauke
Jumlah			51	

No.	Entitas	Daftar LHP			
		Jml	Objek Pemeriksaan		
V	Infrastruktur				
	a	Jalan dan Jembatan Nasional			
	1	99	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013 di Provinsi Aceh
		100		1	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013 di Provinsi Jambi
		101		1	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013 di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat
		102		1	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013 di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur
		103		1	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013 di Provinsi Kalimantan Timur
		104		1	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013 di Provinsi Sulawesi Utara
		105		1	Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nasional pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Instansi Terkait Lainnya Tahun 2012 dan 2013 di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
	b	Jalan dan Jembatan Kabupaten			
	1	106	Provinsi Aceh	1	Kinerja Infrastruktur Kabupaten Aceh Utara TA 2012 dan 2013 (s.d. 31 Oktober) di Lhoksukon
	2	107	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja Infrastruktur TA 2011, 2012, dan 2013 (Semester I) pada Kabupaten Bintan di Bintan Kayu
	c	Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa			
	1	108	Kementerian Perhubungan	1	Efektivitas Manajemen dalam Mengelola Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa pada Kementerian Perhubungan
		Jumlah		10	

No.	Entitas	Daftar LHP		
		Jml	Objek Pemeriksaan	
VI	Lingkungan Hidup dan Bencana			
	a	Daerah Aliran Sungai		
1	109	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas pada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PPN/Bappenas, Perum Jasa Tirta I, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, PDAM Kota Surabaya, Pemerintah Kota Gresik, Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Jawa Timur
	b	Mitigasi Perubahan Iklim		
1	110	Kementerian Kehutanan	1	Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim TA 2010 s.d. Semester I 2013 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua
	c	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan		
1	111	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
		112	1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
		113	1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
		114	1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 pada Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang
		115	1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan TA 2012 pada Pemerintah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
	d	Pascabencana		
1	116	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan Kegiatan Pemulihan Pasca Bencana TA 2009, 2010 dan 2011 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat
		Jumlah	8	

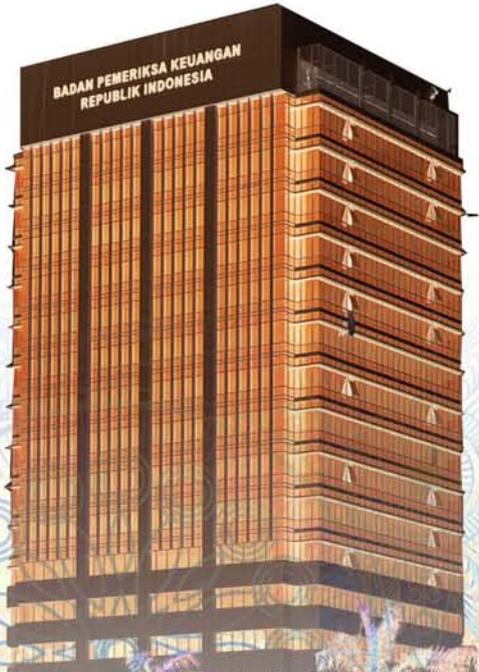
No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
VII	Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok			
1	117	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Kegiatan Pelayanan Operasional Pelabuhan Tanjung Priok untuk Menjamin Kelancaran Jasa Pelayanan Kapal dan Barang pada Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok, Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II, dan instansi terkait di Jakarta.
	Jumlah		1	
VIII	Pelayanan Publik			
	a	Pelayanan Perizinan		
1	118	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kinerja Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan SKPD Terkait di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tata Kota di Palembang
2	119	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Tanda Daftar Pertunjukkan Temporer (TDPT) TA 2012 dan Semester I 2013 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Unit Pelayanan Terpadu (PTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3	120	Provinsi Jawa Barat	1	Upaya Pengendalian Korupsi dalam Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dan Instansi Terkait pada Pemerintah Kota Depok TA 2012 dan Semester I Tahun 2013 di Depok
4	121	Provinsi Jawa Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan IMB, Izin HO, dan Izin Reklame TA 2012 dan TW III 2013 pada BPMP dan Instansi Terkait Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik
	122		1	Kinerja Pelayanan Perizinan TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kediri
	123		1	Kinerja Pelayanan Perizinan TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Kota Kediri
5	124	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Bitung
	125		1	Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu TA 2012 dan Semester I 2013 di Kotamobagu
6	126	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pelayanan Perizinan IMB, SITU/HO, dan SIU pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan dinas teknis terkait Kabupaten Banggai TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 Juni 2013) di Luwuk
7	127	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pelayanan Perizinan Kabupaten Konawe di Unaaha TA 2012 dan 2013

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
b Pelayanan Peradilan			
1	128 Mahkamah Agung	1	Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011 s.d. 2013 (Semester I) pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta
2	129 Kementerian Agama	1	Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Upaya Hukum Tahun 2011 s.d. 2013 (Semester I) pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di Jakarta
c Layanan Pemasarakatan			
1	130 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Layanan Pemasarakatan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
d Pelayanan Lelang			
1	131 Kementerian Keuangan	1	Pelayanan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar.
e Pelayanan Pertanahan			
1	132 Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Tahun 2012 dan Semester I 2013 pada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dan Cibinong.
f Pelayanan Jasa Informasi Meteorologi			
1	133 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	Efektivitas Manajemen dalam Pelaksanaan Pelayanan Jasa Informasi Meteorologi pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jakarta
Jumlah		16	
VIII Kinerja Bidang Lainnya			
a Pengadaan Barang dan Jasa			
1	134 Kementerian Pertahanan	1	Kinerja Pengelolaan Pengadaan Alat Komunikasi pada Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
	135	1	Kinerja Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan Bersumber Pinjaman Luar Negeri pada Kementerian Pertahanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan
2	136 Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Pengadaan Alat Kesehatan Tahun 2011 s.d. Tahun 2013 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
b Manajemen Aset			
1	137 Provinsi Lampung	1	Kinerja Manajemen Aset Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
	138	1	Kinerja Manajemen Aset Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
	139	1	Kinerja Manajemen Aset Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
c	Pengelolaan Keuangan		
1	140 Provinsi Lampung	1	Kinerja Pengelolaan Keuangan TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2	141 Provinsi DKI Jakarta	1	Penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi Terkait Lainnya Provinsi DKI Jakarta
d	Kinerja Lain-Lain		
-	Pemerintah Pusat		
	Kegiatan Intelijen, Penindakan, dan Penanganan Perkara atas Impor Barang		
1	142 Kementerian Keuangan	1	Kinerja Kegiatan Intelijen, Penindakan dan Penanganan Perkara atas Impor Barang pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Wilayah (Kanwil) DJBC Jawa Timur I dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda, Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT dan KPPBC Ngurah Rai, Kanwil DJBC Sumatera Utara dan KPPBC Belawan di Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Belawan.
	Pembinaan Keuangan Badan Layanan Umum		
1	143 Kementerian Keuangan	1	Penetapan, Pembinaan dan Pencabutan Satuan Kerja Keuangan Badan Layanan Umum pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar
	Swasembada Gula Nasional		
1	144 Kementerian Pertanian	1	Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Swasembada Gula Nasional pada Tahun 2010 s.d. 2013
	Program Keluarga Harapan		
1	145 Kementerian Sosial	1	Kinerja Program Keluarga Harapan TA 2010, 2011, dan 2012 pada Kementerian Sosial di Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat
2	146 Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Tahun 2011 s.d. 2013 (Semester I) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan		
1	147 Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan (<i>Sustainable Fisheries Management</i>) Tahun 2012 sampai dengan Semester I Tahun 2013 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Maluku

No.	Entitas		Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	Pengelolaan Kredit Ekspor			
1	148	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kinerja Pengelolaan Kredit Ekspor TA 2006 – 2010 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Pengelolaan Aset Rumah Susun Sederhana Sewa, Prasarana, Sarana dan Utilitas, dan Rumah Kawasan Khusus			
1	149	Kementerian Perumahan Rakyat	1	Kinerja Pengelolaan Aset Rumah Susun Sederhana Sewa, Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Rumah Kawasan Khusus sampai dengan Semester I 2013 pada Kementerian Perumahan Rakyat di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
	Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi			
1	150	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	Pengelolaan Fungsi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2009 s.d. 2011 pada Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
-	Pemerintah Daerah			
	Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman			
1	151	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman TA 2010-2012 pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transjakarta <i>Busway</i>			
1	152	Provinsi DKI Jakarta	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transjakarta <i>Busway</i> TA 2013 pada Unit Pengelola Transjakarta <i>Busway</i> Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	Pengelolaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis			
1	153	Provinsi D I Yogyakarta	1	Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Terminal Penumpang Yogyakarta dan Instansi Terkait di Yogyakarta
-	BUMN			
1	154	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	1	Kinerja pada PT Merpati Nusantara Airlines di Jakarta, Surabaya, Makasar, dan Merauke
2	155	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	1	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Produksi serta Efektivitas Pengelolaan Kegiatan Investasi Tahun 2012 dan 2013 (Semester I) pada Perum Percetakan Uang Republik Indonesia di Karawang
3	156	PT Pos Indonesia (Persero)	1	Efektivitas Pengelolaan <i>Pospay</i> , Efektivitas Pengelolaan Weselpos dan Efisiensi Pengelolaan Surat dan Paket Tahun 2012 dan 2013 pada PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung, Jakarta, Banjarbaru, Medan, dan Denpasar
4	157	PT Waskita Karya (Persero)	1	Pengelolaan Proyek pada PT Waskita Karya (Persero), Tbk Tahun Buku 2011 dan 2012 serta Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Pekanbaru

No.	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
-	BUMD		
1	158 Provinsi Kalimantan Selatan	1	Efektivitas Pengelolaan Produksi dan Distribusi Air Minum dan Pengelolaan Pelayanan Pelanggan dan Penagihan pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. November)
	Jumlah	25	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja	158	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013

Buku IV
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

(Buku ke-4 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2014

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB 1 Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	1
BAB 2 Resume PDTT Semester II Tahun 2013	5
BAB 3 Pengelolaan Pendapatan	23
BAB 4 Pelaksanaan Belanja	41
BAB 5 Pengelolaan Aset Tetap	63
BAB 6 Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan <i>Mobile</i> Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)	75
BAB 7 Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi	83
BAB 8 Operasional BUMN	89
BAB 9 Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	113
BAB 10 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya	145
Daftar Singkatan dan Akronim	155
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

- 2.1. Cakupan PDTT Semester II Tahun 2013
- 2.2. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDTT Semester II Tahun 2013
- 2.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas PDTT Semester II Tahun 2013
- 2.4. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat
- 2.5. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah
- 2.6. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN dan KKKS
- 2.7. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD
- 2.8. Kelompok Temuan PDTT pada BLUD
- 2.9. Kelompok Temuan PDTT pada BLU dan Badan Lainnya
- 3.1. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan
- 3.2. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
- 3.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
- 3.4. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah
- 3.5. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah
- 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah
- 4.1. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Belanja
- 4.2. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 4.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 4.4. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 4.5. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 4.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 5.1. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap
- 5.2. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap pada BLU
- 5.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap pada BLU
- 5.4. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah
- 5.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah
- 6.1. Cakupan Pemeriksaan Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK
- 6.2. Kelompok Temuan atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK
- 6.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK
- 7.1. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi
- 7.2. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi
- 7.3. Koreksi *Cost Recovery* Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
- 8.1. Kelompok Temuan atas Operasional BUMN
- 8.2. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN
- 8.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
- 8.4. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Kawasan Industri
- 8.5. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Kawasan Industri
- 8.6. Kelompok Temuan atas Kegiatan Pemupukan
- 8.7. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Kegiatan Pemupukan
- 8.8. Kelompok Temuan atas Program BL BUMN Peduli

- 8.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Program BL BUMN Peduli
- 8.10. Kelompok Temuan atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 8.11. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 9.1. Kelompok Temuan atas Operasional BUMD dan RSUD
- 9.2. Hasil Evaluasi Kinerja 328 PDAM Tahun 2012
- 9.3. Daftar Rincian PDAM yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013
- 9.4. Kelompok Temuan atas Operasional PDAM
- 9.5. Daftar Rincian BPD/BPR yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013
- 9.6. Kelompok Temuan atas Operasional BPD/BPR
- 9.7. Profil Pasar di Indonesia
- 9.8. Daftar Rincian PD Pasar yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013
- 9.9. Kelompok Temuan atas Operasional PD Pasar
- 9.10. Daftar Rincian BUMD Pertambangan yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013
- 9.11. Kelompok Temuan atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan
- 9.12. Daftar Rincian BUMD Aneka Usaha Lainnya yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013
- 9.13. Kelompok Temuan atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya
- 9.14. Daftar Rincian RSUD yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013
- 9.15. Kelompok Temuan atas Operasional RSUD
- 9.16. Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Operasional RSUD
- 10.1. Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya
- 10.2. Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 10.3. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 10.4. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

- 10.5. Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah
- 10.6. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah
- 10.7. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah

Daftar Grafik

- 2.1. Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan
- 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan
- 3.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
- 3.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah
- 4.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
- 4.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
- 5.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap pada BLU
- 5.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah
- 7.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi
- 8.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
- 8.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Kawasan Industri
- 8.3. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Kegiatan Pemupukan
- 8.4. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Program BL BUMN Peduli
- 8.5. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan BUMN Lainnya
- 10.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat
- 10.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah

Daftar Lampiran

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2013
2. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester II Tahun 2013
3. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester II Tahun 2013
4. Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDTT Semester II Tahun 2013
5. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
6. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
7. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
8. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
9. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
10. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
11. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
12. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
13. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
14. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

15. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
16. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah
17. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
18. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
19. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap
20. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK
21. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK
22. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK
23. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
24. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
25. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
26. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas pada PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
27. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
28. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN
29. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan Kawasan Industri

30. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan Kawasan Industri
31. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengelolaan Kawasan Industri
32. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Kegiatan Pemupukan
33. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Kegiatan Pemupukan
34. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan pada PDTT atas Kegiatan Pemupukan
35. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas pada PDTT atas Program Bina Lingkungan BUMN Peduli
36. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Program Bina Lingkungan BUMN Peduli
37. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan pada PDTT atas Program Bina Lingkungan BUMN Peduli
38. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
39. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
40. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya
41. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Operasional PDAM
42. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional PDAM
43. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan pada PDTT atas Operasional PDAM
44. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Operasional BPD/BPR
45. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional BPD/BPR

46. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Operasional BPD/BPR
47. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Operasional PD Pasar
48. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional PD Pasar
49. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Operasional PD Pasar
50. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas pada PDTT atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan
51. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan
52. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan
53. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas pada PDTT atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya
54. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya
55. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya
56. Daftar Kelompok Temuan menurut Entitas pada PDTT atas Operasional RSUD
57. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI pada PDTT atas Operasional RSUD
58. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan pada PDTT atas Operasional RSUD
59. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat
60. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat
61. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat

62. Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah
63. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah
64. Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah
65. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDDT Semester II Tahun 2013

BAB 1

Gambaran Umum Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pengertian PDTT

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 1 dinyatakan pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan pengertian PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Tujuan dan Sifat PDTT

Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), PDTT bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

- Eksaminasi ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan positif bahwa suatu pokok masalah telah sesuai atau telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kriteria.
- Reviu ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan dengan tingkat keyakinan negatif bahwa tidak ada informasi yang diperoleh pemeriksa dari pekerjaan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa pokok masalah tidak sesuai dengan kriteria dalam semua hal yang material.
- Prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*) ialah pengujian yang memadai untuk menyatakan simpulan atas hasil pelaksanaan prosedur tertentu yang disepakati dengan pemberi tugas terhadap pokok masalah.

Cara Penentuan Sifat PDTT

Penentuan sifat PDTT yang akan dilakukan pemeriksa harus mempertimbangkan prosedur yang akan dijalankan dan tingkat keyakinan yang diinginkan pengguna. Jika prosedur yang akan dilakukan disepakati dengan pemakai tertentu, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat *agreed upon procedures*. Jika tidak, pemeriksa dapat melakukan reviu atau eksaminasi.

Penentuan pemilihan PDTT reviu atau eksaminasi ditentukan oleh tingkat keyakinan yang diinginkan pemakai tertentu. Jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan yang tinggi, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat eksaminasi. Sebaliknya, jika pengguna menginginkan tingkat keyakinan menengah, pemeriksa harus melakukan PDTT yang bersifat reviu.

Sebagian besar pemeriksaan yang dilaksanakan BPK bersifat eksaminasi.

Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah “kasus”. Namun istilah kasus disini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil PDTT disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Kelemahan atas SPI dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

- Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.
- Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PDTT juga melakukan penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, dengan pengertian sebagai berikut.

- Kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara/daerah/perusahaan sesuai pengertian dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, “Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Kerugian dimaksud harus ditindaklanjuti dengan pengenaan/pembebanan kerugian kepada penanggung jawab kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Potensi kerugian negara/daerah/perusahaan adalah kerugian nyata berupa berkurangnya kekayaan negara sesuai pengertian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 butir 22, tetapi masih berupa risiko, terjadi kerugian apabila suatu kondisi yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi di kemudian hari.
- Kekurangan penerimaan adalah penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah, tetapi belum/tidak masuk ke kas negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan.
- Kelemahan administrasi adalah penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran/pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah atau kekurangan penerimaan, dan uang yang belum/tidak dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
- Ketidakhematan/pemborosan adalah penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu dan kondisi yang sama.
- Ketidakefisienan adalah rasio antara input dan output yang lebih tinggi dibandingkan standar atau rata-rata rasio untuk kegiatan serupa.
- Ketidakefektifan adalah kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi entitas yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.

BAB 2

Resume PDTT Semester II Tahun 2013

Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan PDTT atas 387 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 47 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 173 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, 29 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 8 objek pemeriksaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi, 92 objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 2 objek pemeriksaan Badan Layanan Usaha (BLU), 8 objek pemeriksaan BLU Daerah (BLUD) dan 1 objek pemeriksaan badan lainnya. Cakupan pemeriksaan atas 387 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp365,67 triliun atau sekitar 76% dari realisasi anggaran senilai Rp480,77 triliun. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN dan KKKS, BUMD, BLU dan BLUD, serta badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Cakupan PDTT Semester II Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Jumlah Obrik	Anggaran	Realisasi	Cakupan Pemeriksaan	%
Pusat	47	63.296.195,43	51.764.073,58	48.715.150,86	94%
Provinsi	27	40.266.307,03	26.689.739,53	11.674.290,23	44%
Kabupaten/Kota	173	91.502.073,98	66.068.985,43	31.001.800,33	47%
BUMN	29	82.416.303,63	80.922.322,34	68.137.753,39	84%
KKKS	8	168.236.610,22	160.358.451,09	157.309.528,37	98%
BUMD	92	23.572.374,45	43.364.268,71	24.492.105,06	56%
BLU dan BLUD	10	2.637.430,55	1.928.216,87	1.276.457,63	66%
Badan Lainnya	1	1.360.000,00	49.675.010,15	23.067.419,53	46%
Total	387	473.287.295,29	480.771.067,70	365.674.505,40	76%

Hasil pemeriksaan tersebut dapat dikelompokkan dalam delapan tema sebagai berikut

- pengelolaan pendapatan;
- pelaksanaan belanja;
- pengelolaan aset tetap;
- penyediaan jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan *mobile* PLIK;
- pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi;
- operasional BUMN;

- operasional BUMD dan RSUD; dan
- pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) lainnya.

Rekapitulasi hasil PDTT disajikan dalam Lampiran 1.

Sesuai dengan tujuan pemeriksaannya, hasil pemeriksaan disajikan dalam dua kategori yaitu SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil PDTT Semester II Tahun 2013 menunjukkan adanya 1.548 kasus kelemahan SPI. Jumlah kasus tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDTT Semester II Tahun 2013

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	266
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	756
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	526
	Jumlah	1.548

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil PDTT Semester II Tahun 2013 mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 3.576 kasus senilai Rp6.976.644,18 juta. Jumlah dan nilai tiap-tiap kelompok temuan disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas PDTT Semester II Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	1.068	1.117.316,27
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan	447	2.322.877,97
3	Kekurangan Penerimaan	663	2.350.524,92
	Sub Total I	2.178	5.790.719,16
4	Kelemahan Administrasi	916	-
5	Ketidakhematan	156	196.265,83
6	Ketidakefisienan	11	157.279,78
7	Ketidakefektifan	315	832.379,41
	Sub Total II	1.398	1.185.925,02
	Total	3.576	6.976.644,18

Berdasarkan Tabel 2.3, hasil PDDT Semester II Tahun 2013 menemukan.

- Kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi kerugian negara/daerah/perusahaan, dan kekurangan penerimaan sebanyak 2.178 kasus senilai Rp5.790.719,16 juta.

Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut antara lain adalah penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

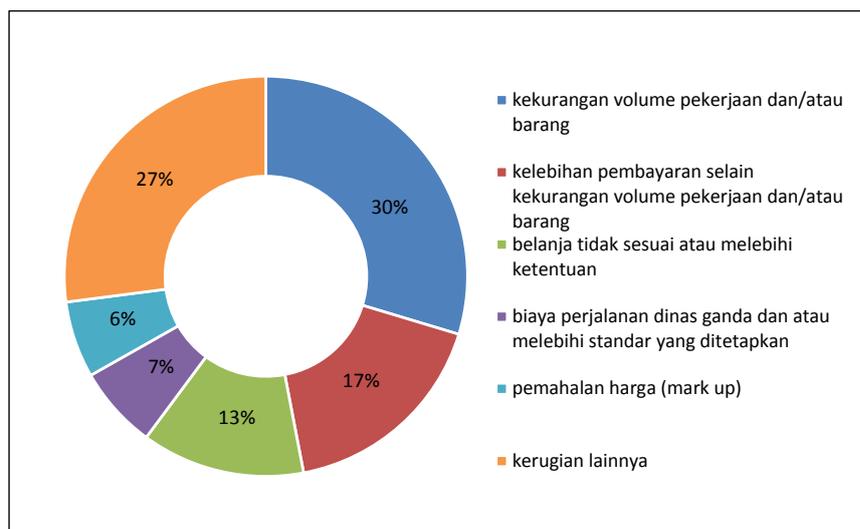
- Kasus kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebanyak 1.398 kasus senilai Rp1.185.925,02 juta.

Rekomendasi BPK atas kasus tersebut adalah tindakan administratif dan/atau perbaikan SPI.

Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 1.068 kasus senilai Rp1.117.316,27 juta sebagaimana disajikan dalam Lampiran 2, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 438 kasus senilai Rp279.347,15 juta. Persentase kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.1.

Grafik 2.1. Persentase Kasus Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Grafik 2.1 menyajikan kasus-kasus kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi, yaitu

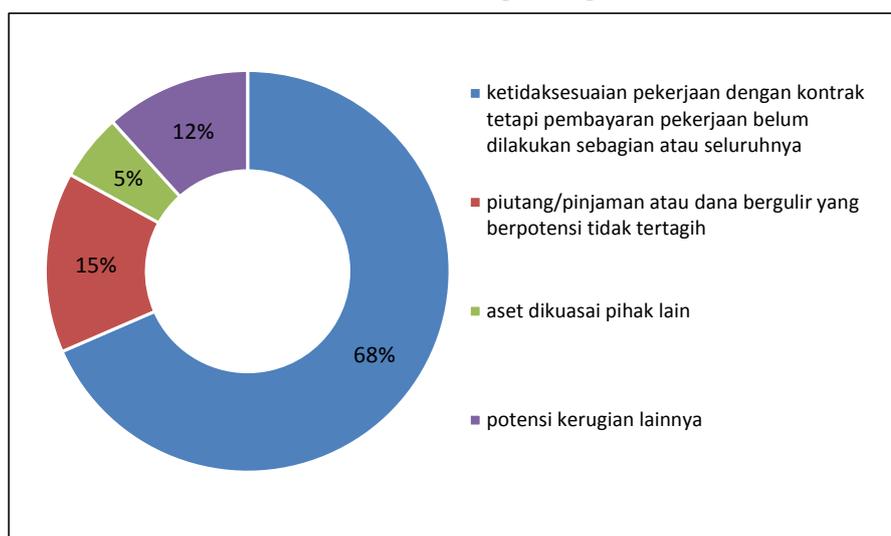
- kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 317 kasus (30%) senilai Rp109.557,92 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, operasional BUMD dan RSUD, serta operasional BUMN;
- kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 185 kasus (17%) senilai Rp152.409,82 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, operasional BUMN, serta operasional BUMD dan RSUD;

- belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 140 kasus (13%) senilai Rp88.354,05 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, operasional BUMD dan RSUD, serta operasional BUMN;
- biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 71 kasus (7%) senilai Rp16.296,29 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, serta operasional BUMD dan RSUD;
- pemahalan harga (*mark up*) sebanyak 66 kasus (6%) senilai Rp22.384,92 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, serta operasional BUMD dan RSUD; dan
- kerugian lainnya sebanyak 289 kasus (27%) senilai Rp728.313,27 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan aset tetap, serta operasional BUMD dan RSUD.

Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

Kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan sebanyak 447 kasus senilai Rp2.322.877,97 juta disajikan dalam Lampiran 3. Persentase kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.2.

Grafik 2.2. Persentase Kasus Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan



Grafik 2.2 menyajikan kasus-kasus potensi kerugian negara/daerah/perusahaan yang terjadi, yaitu

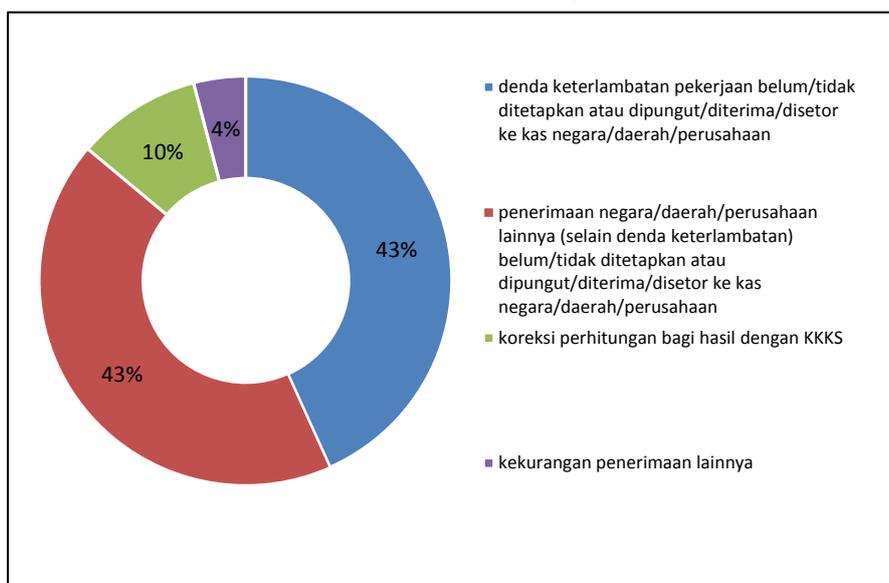
- ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 306 kasus (68%) senilai Rp172.481,92 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, penyediaan jasa pusat layanan internet kecamatan (PLIK) dan *mobile* PLIK, serta operasional BUMN;

- piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 65 kasus (15%) senilai Rp1.768.267,60 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada operasional BUMD dan RSUD, operasional BUMN, serta pengelolaan pendapatan.
- aset dikuasai pihak lain sebanyak 24 kasus (5%) senilai Rp23.976,89 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan aset tetap, operasional BUMD dan RSUD, serta pelaksanaan belanja; dan
- potensi kerugian lainnya sebanyak 52 kasus (12%) senilai Rp358.151,56 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, operasional BUMN, serta pengelolaan aset tetap.

Kekurangan Penerimaan

Kasus kekurangan penerimaan sebanyak 663 kasus senilai Rp2.350.524,92 juta disajikan dalam Lampiran 4. Persentase kasus kekurangan penerimaan yang banyak terjadi disajikan dalam Grafik 2.3.

Grafik 2.3. Persentase Kasus Kekurangan Penerimaan



Grafik 2.3 menyajikan kasus-kasus kekurangan penerimaan yang terjadi, yaitu

- denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 287 kasus (43%) senilai Rp86.362,01 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, operasional BUMN, serta operasional BUMD dan RSUD;
- penerimaan negara/daerah/perusahaan (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 284 kasus (43%) senilai Rp1.416.443,28 juta. Kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan, operasional BUMD dan RSUD, serta operasional BUMN;

- koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 65 kasus (10%) senilai Rp835.636,64 juta. Kasus tersebut terjadi pada KKKS; dan
- kekurangan penerimaan lainnya sebanyak 27 kasus (4%) senilai Rp12.082,99 juta. Kasus tersebut terjadi pada pelaksanaan belanja dan pengelolaan pendapatan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5.790.719,16 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan/BLU senilai Rp68.411,75 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp51.303,80 juta, potensi kerugian senilai Rp5.447,47 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp11.660,48 juta.

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Entitas

Rincian temuan PDDT selama Semester II Tahun 2013 berupa temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BLUD, BLU, dan badan lainnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

Hasil PDDT pada 47 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 151 kasus kelemahan SPI dan 396 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1.281.926,54 juta. Dari total temuan PDDT pemerintah pusat tersebut, sebanyak 228 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp939.796,70 juta. Rincian temuan PDDT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kelompok Temuan PDDT pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Pemerintah Pusat	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	151	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	147	62.661,96
2	Potensi Kerugian Negara	30	173.478,21
3	Kekurangan Penerimaan	51	703.656,53
Sub Total I		228	939.796,70
4	Kelemahan Administrasi	117	-
5	Ketidakhormatan	18	29.153,29
6	Ketidakefektifan	33	312.976,55
Sub Total II		168	342.129,84
Total		396	1.281.926,54

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 44 kasus senilai Rp15.363,18 juta, kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 31 kasus senilai Rp10.077,75 juta, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 16 kasus senilai Rp16.378,63 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan serta konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Temuan potensi kerugian negara berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 24 kasus senilai Rp55.519,45 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan pengawas, kontraktor pelaksana dan panitia pengadaan tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain memberikan sanksi kepada pejabat dan panitia pengadaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ memperhitungkan dalam termin pembayaran.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 26 kasus senilai Rp664.001,87 juta dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 23 kasus senilai Rp38.762,43 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, yang pada umumnya disebabkan kontraktor lalai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu sesuai dengan kontrak dan pejabat pembuat surat perintah membayar (SPM) tidak cermat dalam memperhitungkan PPh final atas jasa konstruksi dan jasa konsultan. Selain itu terjadi karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan

dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp939.796,70 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp22.255,18 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp21.302,56 juta, potensi kerugian senilai Rp26,02 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp926,60 juta.

2. Pemerintah Daerah

Hasil PDDT pada 27 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 66 kasus kelemahan SPI dan 309 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp254.569,08 juta. Dari total temuan PDDT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 193 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp182.525,03 juta.

Sementara itu, hasil PDDT atas 173 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota menemukan 394 kasus kelemahan SPI dan 1.809 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp522.169,47 juta. Dari total temuan PDDT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 1.265 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp428.092,42 juta. Rincian temuan PDDT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	66	-	394	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Daerah	101	36.584,38	675	193.133,86
2	Potensi Kerugian Daerah	21	21.488,89	301	172.813,13
3	Kekurangan Penerimaan	71	124.451,76	289	62.145,43
Sub Total I		193	182.525,03	1.265	428.092,42
4	Kelemahan Administrasi	66	-	378	-
5	Ketidakhematan	18	14.502,58	53	24.862,35
6	Ketidakefektifan	32	57.541,47	113	69.214,70
Sub Total II		116	72.044,05	544	94.077,05
Total		309	254.569,08	1.809	522.169,47

Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 271 kasus senilai Rp96.947,31 juta, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 127 kasus senilai Rp40.591,80 juta, dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 72 kasus senilai Rp13.508,00 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan aset tetap, serta PDTT lainnya, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, kontraktor pengawas kurang cermat melakukan pekerjaan, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 273 kasus senilai Rp112.441,08 juta dan aset dikuasai pihak lain sebanyak 15 kasus senilai Rp22.469,51 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, dan pengelolaan aset tetap, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku, memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 236 kasus senilai Rp30.436,12 juta, dan penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak/ ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 107 kasus senilai Rp149.815,24 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pelaksanaan belanja, pengelolaan pendapatan, serta pengelolaan aset, yang pada umumnya disebabkan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana dan rekanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp610.617,45 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp40.800,60 juta dengan rincian temuan kerugian senilai Rp28.201,22 juta, potensi kerugian senilai Rp3.594,49 juta, dan kekurangan penerimaan senilai Rp9.004,89 juta.

3. BUMN dan KKKS

Hasil PDTT pada 29 objek pemeriksaan BUMN menemukan 263 kasus kelemahan SPI dan 265 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2.395.149,00 juta. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak 125 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.950.042,31 juta.

Sementara itu, hasil PDTT atas 8 objek pemeriksaan KKKS menemukan 13 kasus kelemahan SPI dan 79 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp994.804,75 juta. Dari total temuan PDTT KKKS tersebut, sebanyak 68 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp994.804,75 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMN dan KKKS disajikan dalam Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Kelompok Temuan PDTT pada BUMN dan KKKS

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMN		KKKS	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	263	-	13	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Perusahaan	34	277.993,23	-	-
2	Potensi Kerugian Perusahaan	33	1.599.908,83	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	58	72.140,25	68	994.804,75
Sub Total I		125	1.950.042,31	68	994.804,75
4	Kelemahan Administrasi	67	-	10	-
5	Ketidakhematan	29	92.913,85	-	-
6	Ketidakefisienan	8	156.789,60	-	-
7	Ketidakefektifan	36	195.403,24	1	-
Sub Total II		140	445.106,69	11	-
Total		265	2.395.149,00	79	994.804,75

Hasil PDTT BUMN dan KKKS menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian perusahaan berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 11 kasus senilai Rp46.091,19 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 8 kasus senilai Rp982,56 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan rekanan tidak melaksanakan

ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, para pelaksana lalai dalam menjalankan tugasnya serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian perusahaan berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 20 kasus senilai Rp1.592.939,07 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada operasional BUMN, yang pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana kurang mempunyai itikad baik untuk secara berkala memprioritaskan pembayaran angsuran pinjaman RDI sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan, tidak intensif dalam melakukan penagihan piutang serta pengawasan dan pengendalian penanggung jawab belum optimal.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi untuk memprioritaskan melakukan pembayaran angsuran pinjaman RDI secara berkala sesuai kemampuan keuangan perusahaan, lebih intensif melakukan penagihan piutang serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS sebanyak 65 kasus senilai Rp835.636,64 juta, dan penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 39 kasus senilai Rp216.307,53 juta. Kasus-kasus tersebut terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerjasama minyak dan gas bumi dan operasional BUMN, antara lain disebabkan kurang optimalnya pengendalian intern SKK MIGAS terhadap KKKS dalam membebankan biaya-biaya yang semestinya tidak dibebankan dalam *cost recovery*.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada SKK MIGAS dan KKKS antara lain agar melakukan koreksi *cost recovery*, menunda pembebanan selisih kontrak *rig* dibandingkan *owner estimate* (OE) dan mengeluarkan dari biaya operasi sampai dengan hasil evaluasi SKK MIGAS diperoleh, memerintahkan KKKS membayar selisih perhitungan pajak penghasilan dan kewajiban Pajak Perseroan (PPs) dan Pajak Bunga Dividen dan Royalti (PBDR) ke kas negara, serta Pemerintah dhi. SKK MIGAS agar melakukan amandemen *production sharing contract* (PSC) dan/atau amandemen *tax treaty*. Selain itu menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp2.944.847,06 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp2.351,84 juta dengan rincian temuan kerugian negara/perusahaan senilai Rp367,68 juta, potensi kerugian senilai Rp1.826,96 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp157,20 juta.

4. BUMD

Hasil PDTT pada 92 objek pemeriksaan BUMD menemukan 572 kasus kelemahan SPI dan 590 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp512.579,44 juta. Dari total temuan PDTT BUMD tersebut, sebanyak 212 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp281.529,39 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMD disajikan dalam Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Kelompok Temuan PDTT pada BUMD

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BUMD	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	572	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah/Perusahaan	76	114.884,15
2	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	55	85.759,88
3	Kekurangan Penerimaan	81	80.885,36
Sub Total I		212	281.529,39
4	Kelemahan Administrasi	247	-
5	Ketidakhematan	35	34.808,18
6	Ketidakefisienan	3	490,18
7	Ketidakefektifan	93	195.751,69
Sub Total II		378	231.050,05
Total		590	512.579,44

Hasil PDTT BUMD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan berupa belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 34 kasus senilai Rp11.414,99 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi kurang cermat dalam menyusun kebijakan dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar lebih cermat dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah/perusahaan yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah/perusahaan.

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 35 kasus senilai Rp60.784,17 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggan yang menunggak serta dewan pengawas tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan kepada direksi atas kebijakan dan pelaksanaan penyaluran kredit berlandaskan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan. Selain itu pejabat pelaksana kurang cermat dalam melakukan penatausahaan piutang dan kurang optimal melakukan penagihan angsuran piutang.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar memerintahkan pejabat pelaksana untuk melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan melakukan usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian sanksi pemutusan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan. Selain itu dewan pengawas menginventarisir dan memastikan bahwa seluruh kebijakan kredit yang telah ditetapkan direksi tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan serta lebih optimal melaksanakan upaya penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan sesuai ketentuan.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 73 kasus senilai Rp74.289,90 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian .

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah/perusahaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi BUMD yang bersangkutan agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta menagih kekurangan penerimaan dan segera menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp281.529,39 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp1.917,86 juta dengan rincian temuan kerugian daerah/perusahaan senilai Rp379,07 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.538,79 juta.

5. BLUD

Hasil PDTT pada 8 objek pemeriksaan RSUD yang sudah ditetapkan sebagai BLUD menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 78 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp12.463,65 juta. Dari total temuan PDTT di lingkungan BLUD tersebut, sebanyak 48 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp10.946,31 juta. Rincian temuan PDTT pada BLUD disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8. Kelompok Temuan PDTT pada BLUD

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BLUD	
		Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
1	SPI	65	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Daerah	23	3.141,72
2	Potensi Kerugian Daerah	4	5.069,93
3	Kekurangan Penerimaan	21	2.734,66
Sub Total I		48	10.946,31
4	Kelemahan Administrasi	22	-
5	Ketidakhematan	3	25,58
6	Ketidakefektifan	5	1.491,76
Sub Total II		30	1.517,34
Total		78	12.463,65

Hasil PDTT BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 9 kasus senilai Rp1.726,82 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta pimpinan RSUD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor ke kas daerah.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 2 kasus senilai Rp4.267,92 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pelaksana kegiatan tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pasien, lalai tidak melakukan penagihan piutang, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan RSUD.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana/pejabat yang bertanggung jawab yang tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pasien, melakukan upaya penagihan piutang, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebanyak 15 kasus senilai Rp2.322,56 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pimpinan RSUD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta pelaksana kegiatan tidak memedomani ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara/daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, menagih kekurangan penerimaan serta menyetorkan ke kas daerah dan menyetorkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp10.946,31 juta, selama proses pemeriksaan berlangsung entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp1.086,27 juta dengan rincian temuan kerugian daerah senilai Rp1.053,27 juta dan kekurangan penerimaan senilai Rp33,00 juta.

6. BLU dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BLU, yaitu BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, menemukan 16 kasus kelemahan SPI dan 50 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1.002.982,25 juta. Dari total temuan PDTT BLU tersebut, sebanyak 39 kasus merupakan temuan yang

berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1.002.982,25 juta.

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan badan lainnya, yaitu Bank Indonesia, menemukan 8 kasus kelemahan SPI. Rincian temuan PDTT pada BLU dan badan lainnya disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9. Kelompok Temuan PDTT pada BLU dan Badan Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Sub Kelompok Temuan	BLU		Badan Lainnya	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	SPI	16	-	8	-
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan					
1	Kerugian Negara	12	428.916,97	-	-
2	Potensi Kerugian Negara	3	264.359,10	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	24	309.706,18	-	-
Sub Total I		39	1.002.982,25		
4	Kelemahan Administrasi	9	-	-	-
5	Ketidakefektifan	2	-	-	-
Sub Total II		11	-	-	-
Total		50	1.002.982,25	-	-

Hasil PDTT BLU dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara sebanyak 8 kasus senilai Rp57.022,57 juta, dan pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 2 kasus senilai Rp2.042,70 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi tidak cermat dan lalai dalam menyusun perjanjian kerja sama, tidak mengajukan addendum perjanjian atas kelebihan penggunaan tanah, serta pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian yang lemah.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar memberikan sanksi kepada direksi BLU yang tidak cermat dan lalai dalam menyusun perjanjian kerja sama dan tidak melakukan addendum perjanjian. Selain itu agar direksi BLU menarik kelebihan pembayaran dan/atau melakukan upaya hukum atas kasus kerugian negara tersebut.

- Temuan potensi kerugian negara berupa lain-lain potensi kerugian sebanyak 3 kasus senilai Rp264.359,10 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat yang berwenang tidak cermat dalam menentukan nilai limit lelang dan tidak cermat dalam menyusun perjanjian kerja sama sehingga harga jual tanah dinilai di bawah nilai jual objek pajak (NJOP).

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar direksi BLU memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana/pejabat yang bertanggung jawab yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas, dan mengamandemen perjanjian kerjasama dengan mengakomodasi hak entitas dalam alokasi pembagian hasil kerjasama, serta melakukan upaya hukum atas permasalahan tersebut.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 24 kasus senilai Rp309.706,18 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan direksi lalai dalam menentukan tarif sewa dalam perjanjian dan membiarkan penempatan lahan tanpa perikatan yang sah, serta belum optimal dalam mengelola pemanfaatan aset.

Rekomendasi. Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar memerintahkan direksi BLU untuk melakukan penagihan kepada mitra kerja sama atas kompensasi selisih harga nilai pengganti tanah, alokasi bagi hasil, dan kewajiban mitra kerja sama sesuai perjanjian dan/atau melakukan upaya hukum atas permasalahan tersebut.

BAB 3

Pengelolaan Pendapatan

- 3.1 Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan meliputi pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD).
- 3.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan Tahun Anggaran 2009 s.d. 2013 atas 37 objek pemeriksaan, terdiri atas 22 objek pemeriksaan kementerian/ lembaga/badan, 5 objek pemeriksaan pemerintah provinsi dan 10 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 3.3 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan telah mengungkap sebanyak 160 kasus kelemahan SPI dan 159 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp866.482,02 juta. Dari jumlah kasus diatas telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp2.544,80 juta selama proses pemeriksaan. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan

(nilai dalam juta rupiah)

Subtema	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan		Nilai Penyetoran
	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	
Pengelolaan pendapatan pemerintah pusat	74	63	706.085,73	1.130,45
Pengelolaan pendapatan pemerintah daerah.	86	96	160.396,29	1.414,35
Total	160	159	866.482,02	2.544,80

- 3.4 Pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan terdiri atas 2 subtema, yaitu sebagai berikut.
- Pengelolaan pendapatan pemerintah pusat; dan
 - Pengelolaan pendapatan pemerintah daerah.
- 3.5 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan pengelolaan pendapatan disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

- 3.6 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan pendapatan pemerintah pusat TA 2009 s.d. 2013. Pemeriksaan dilakukan pada sepuluh entitas pemerintah pusat yang meliputi 22 objek pemeriksaan.
- 3.7 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan pada sepuluh entitas pemerintah pusat adalah senilai Rp33.386.902,71 juta dari realisasi anggaran senilai Rp35.867.629,88 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.8 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) dalam pengelolaan pendapatan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban serta pengendalian dan pengawasan; dan
 - informasi keuangan mengenai pendapatan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Hasil Pemeriksaan

- 3.9 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat telah mengungkap sebanyak 137 kasus senilai Rp706.085,73 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 74 kasus yang terjadi di sepuluh entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 63 kasus senilai Rp706.085,73 juta yang terjadi di tujuh entitas. Dari jumlah kasus di atas terdapat tiga entitas telah menyerahkan aset/ menyetorkan ke kas negara senilai Rp1.130,45 juta selama proses pemeriksaan. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan/penyetoran pada proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	74	9	2	25	24	3	63
Nilai Kasus	-	4.279,33	5.808,41	695.522,58	-	475,41	706.085,73
Jumlah Entitas	10	2	1	7	6	1	7*
Penyetoran selama proses pemeriksaan	-	443,00	-	687,45	-	-	1.130,45

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern

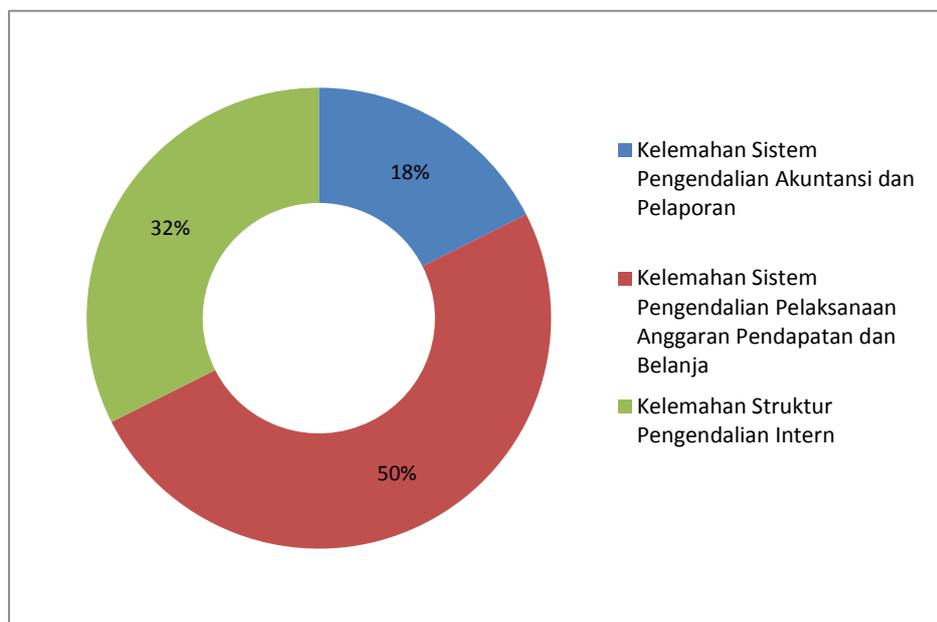
3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 3.10 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat disajikan pada Lampiran 5.

Sistem Pengendalian Intern

- 3.11 Hasil pemeriksaan SPI menunjukkan terdapat 74 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 13 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 37 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 24 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 3.1.

Grafik 3.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

- 3.12 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di enam entitas. Kasus-kasus tersebut seperti barang rampasan dari putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya sehingga berisiko menjadi rusak dan turun nilai ekonomisnya, pengelolaan dan pengembalian kerugian negara dari tagihan uang pengganti belum optimal, potensi PNBP dari jasa tambat, labuh, dan kebersihan kolam yang belum diterima negara, serta pembebasan denda keterlambatan pembayaran tidak sesuai ketentuan.
 - **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di tujuh entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang belum sesuai dengan pedoman dan tata cara yang berlaku, penerapan wajib pengurusan surat perjanjian antara BP Batam dengan pemegang alokasi lahan tidak sesuai dengan SOP, serta pelaksanaan pengawasan dan monitoring evaluasi atas kuota dan volume impor produk perikanan belum dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.
 - **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di lima entitas. Kasus-kasus tersebut seperti kesalahan pembebanan mata anggaran belanja barang pemeliharaan Tahun 2012 dan 2013 (semester I) yang digunakan untuk pembelian barang (aset tetap) belum dikapitalisasi, dan PNBP yang belum disetor pada akhir Tahun 2012 tidak disajikan di laporan keuangan Tahun 2012.

Penyebab

- 3.13 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan belum melaksanakan ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 3.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta monitoring evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3.15 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 6.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 3.16 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 63 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 12 objek pemeriksaan pada tujuh entitas senilai Rp706.085,73 juta yang disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	9	4.279,33
2	Potensi Kerugian Negara	2	5.808,41
3	Kekurangan Penerimaan	25	695.522,58
4	Kelemahan Administrasi	24	-
5	Ketidakefektifan	3	475,41
	Jumlah	63	706.085,73

- 3.17 Rincian jenis temuan pada tiap-tiap kelompok disajikan dalam Lampiran 7.

Kerugian Negara (9 kasus senilai Rp4.279,33 juta)

- 3.18 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak sembilan kasus kerugian negara senilai Rp4.279,33 juta yang terjadi di dua entitas, di antaranya sebagai berikut.

- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp3.625,37 juta** yang terjadi di Kepolisian RI, yaitu penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan atas pengamanan obyek vital (pamobvit) digunakan untuk pemeliharaan kendaraan operasional yang sudah dibiayai dari APBN dan kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan (pembelian hadiah seragam olahraga), serta penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah untuk pengamanan pilkada Gubernur Papua Barat Tahun 2011 tidak disertai bukti pendukung pertanggungjawaban keuangan.
- **Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya senilai Rp183,03 juta** yang terjadi di Kepolisian RI, yaitu terdapat pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah dari pemerintah daerah untuk pengamanan pilkada tetapi kegiatan tidak dilaksanakan (fiktif).

- 3.19 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian negara atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat senilai Rp4.279,33 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp443,00 juta.

Penyebab

- 3.20 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi

- 3.21 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Negara (2 kasus senilai Rp5.808,41 juta)

- 3.22 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat mengungkap sebanyak dua kasus potensi kerugian negara senilai Rp5.808,41 juta di dua objek pemeriksaan pada satu entitas.
- 3.23 Kasus-kasus tersebut adalah **piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp5.808,41 juta**, yang terjadi di Kejaksaan RI, yaitu belum dilaksanakan pembayaran atas piutang uang pengganti dan denda dari perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan upaya penagihan atas piutang tersebut belum optimal.

Penyebab

- 3.24 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena sosialisasi pedoman penyelesaian uang pengganti tindak pidana korupsi kurang optimal, pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam mengeksekusi uang pengganti, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan atasan langsung masih lemah.

Rekomendasi

- 3.25 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar lebih optimal dalam melakukan sosialisasi SOP, petugas dan pejabat yang bertanggung jawab lebih mengintensifkan penagihan uang pengganti, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atasan langsung.

Kekurangan Penerimaan (25 kasus senilai Rp695.522,58 juta)

- 3.26 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 25 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp695.522,58 juta di 12 objek pemeriksaan pada tujuh entitas.
- 3.27 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp660.876,82 juta**, yang terjadi di tujuh entitas, antara lain di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kejaksaan RI. Kasus-kasus tersebut seperti Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTA) belum dipungut, terdapat tunggakan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) pada Ditjen Perikanan Tangkap yang belum diterima, PNPB biaya perkara tilang belum disetor ke kas negara, serta terdapat perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang kurang membayar royalti, Dana Hasil Penjualan Batubara, iuran tetap beserta dendanya.
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp34.644,36 juta**, yang terjadi di Kementerian KP dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu denda atas tunggakan PHP Tahun 2010 dan 2011 belum dikenakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, serta denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

3.28 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah pusat senilai Rp695.522,58 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp687,45 juta, yaitu Kepolisian RI senilai Rp456,44 juta, Kejaksaan RI senilai Rp217,81 juta, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp13,20 juta.

Penyebab

3.29 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pejabat yang berwenang kurang cermat dalam menyusun kebijakan, pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, kurangnya koordinasi antar instansi, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta belum optimal dalam melakukan monitoring dan penagihan.

Rekomendasi

3.30 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, meningkatkan koordinasi antar satker atau instansi terkait, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kelemahan Administrasi (24 kasus)

- 3.31 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 24 kasus kelemahan administrasi di sebelas objek pemeriksaan pada enam entitas.
- 3.32 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan**, yang terjadi di delapan objek pemeriksaan pada tiga entitas. Kasus-kasus tersebut seperti uang rampasan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya, dan PNPB dari penjualan hasil perikanan dan jasa pelabuhan/laboratorium/asrama terlambat disetor ke kas negara.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll**, yang terjadi di empat objek pemeriksaan pada tiga entitas. Kasus-kasus tersebut seperti barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan harus dikembalikan kepada pemilik yang sah belum dikembalikan kepada yang berhak, BP Batam telah memungut uang muka atas pencadangan lahan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan terdapat potensi legitimasi/pengesahan penyalahgunaan tata ruang wilayah Kota Batam atas alokasi hutan lindung.
 - **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)**, yang terjadi di dua entitas. Kasus-kasus tersebut antara lain pertanggungjawaban penggunaan hibah dana pengamanan pilkada belum valid dan sah.

Penyebab

- 3.33 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, kurangnya koordinasi antara satker atau instansi terkait, serta pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 3.34 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan perundang-undangan serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (3 kasus senilai Rp475,41 juta)

- 3.35 Hasil pemeriksaan mengungkap tiga kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp475,41 juta di Kejaksaan RI pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

- 3.36 Kasus tersebut yaitu **fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai senilai Rp475,41 juta**, Kasus tersebut adalah terdapat barang bukti yang belum jelas statusnya dan belum dieksekusi, barang rampasan yang belum dilelang, serta penyelesaian barang bukti uang hasil pelelangan perkara berlarut-larut.

Penyebab

- 3.37 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dan belum mematuhi peraturan yang berlaku, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.

Rekomendasi

- 3.38 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 3.39 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 7.

Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah

- 3.40 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah TA 2010 s.d. 2012 atas 15 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri 5 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi, dan 10 objek pemeriksaan pemerintahan kabupaten/kota.
- 3.41 Cakupan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah pada 15 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp12.416.716,27 juta dari realisasi anggaran senilai Rp14.954.755,44 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 3.42 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pelaksanaan pengelolaan pendapatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Hasil Pemeriksaan

- 3.43 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah telah mengungkap sebanyak 182 kasus senilai Rp160.396,29 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 86 kasus di 14 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 96 kasus senilai Rp160.396,29 juta dan terjadi di 14 entitas. Dari nilai temuan di atas terdapat empat entitas telah menyerahkan asset/menyetorkan ke kas daerah senilai Rp1.414,35 juta selama proses pemeriksaan. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan/penyetoran selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					3E	Total
		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi			
Jumlah kasus	86	1	4	49	37	5	96	
Nilai temuan	-	80,00	29.612,03	129.095,90	-	1.608,36	160.396,29	
Jumlah Entitas	14	1	2	14	8	1	14*	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	-	-	1.414,35	-	-	1.414,35	

Keterangan:

SPI : sistem pengendalian intern

3E : ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah bukan merupakan hasil penjumlahan

- 3.44 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 8.

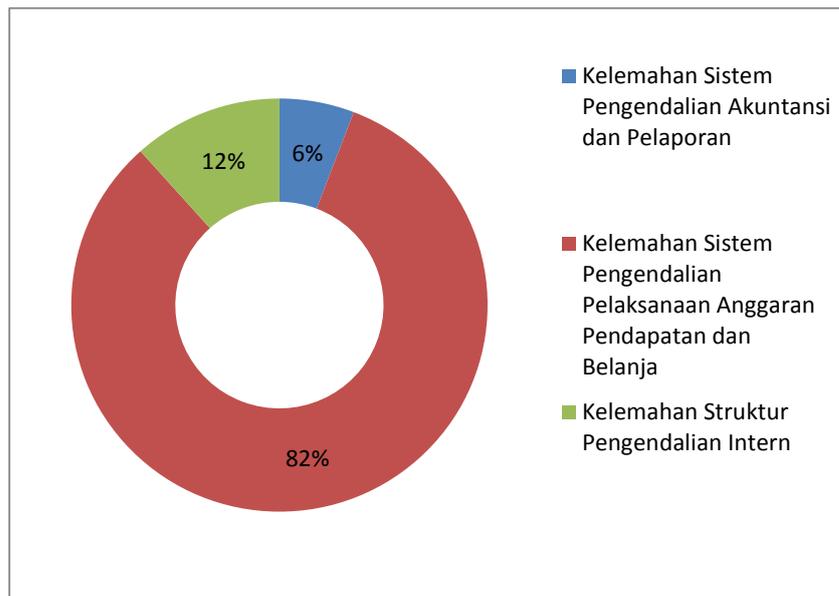
Sistem Pengendalian Intern

- 3.45 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 86 kasus kelemahan SPI, yaitu 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 71 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	5	-	5
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	13	58	71
3	Struktur Pengendalian Intern	3	7	10
Jumlah		21	65	86

3.46 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 3.2.

Grafik 3.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah

3.47 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di 12 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti Dinas Pendapatan belum pernah melakukan pendataan ulang terkait dengan status wajib pajak yang belum melakukan pendaftaran ulang pajak kendaraan bermotor, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan belum disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku, dan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor roda empat belum diterapkan secara optimal.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di empat entitas. Kasus-kasus tersebut seperti entitas belum menetapkan peraturan tentang sistem dan prosedur pengelolaan pajak, entitas belum menetapkan peraturan tentang perencanaan dan pelaksanaan reklamasi untuk kegiatan pertambangan, serta entitas belum memiliki peraturan tentang tata cara permohonan izin penyelenggaraan reklame dan hasil perhitungan nilai sewa reklame.
- **Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai**, yang terjadi di tiga entitas. Kasus-kasus tersebut seperti sistem aplikasi Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) belum menjamin ketepatan perhitungan dan kelengkapan informasi pajak kendaraan bermotor, database sistem aplikasi samsat pada beberapa Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) tidak terintegrasi dalam jaringan, dan pengamanan ruang server tidak memadai.

Penyebab

- 3.48 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya disebabkan petugas pelaksana belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan, belum intensif dalam melakukan pendataan ulang kendaraan bermotor, lalai dalam menyesuaikan tarif pajak sesuai perda yang berlaku, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 3.49 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pelaksana yang belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan, mengintensifkan pendataan ulang, menyesuaikan tarif pajak sesuai perda yang berlaku, serta pimpinan entitas meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 3.50 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 9.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 3.51 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah mengungkap sebanyak 96 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 15 objek pemeriksaan pada 14 entitas senilai Rp160.396,29 juta yang disajikan dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	-	-	1	80,00	1	80,00
2	Potensi Kerugian Daerah	-	-	4	29.612,03	4	29.612,03
3	Kekurangan Penerimaan	17	102.006,86	32	27.089,04	49	129.095,90
4	Kelemahan Administrasi	5	-	32	-	37	-
5	Ketidakefektifan	-	-	5	1.608,36	5	1.608,36
	Jumlah	22	102.006,86	74	58.389,43	96	160.396,29

Kerugian Daerah (1 kasus senilai Rp80,00 juta)

- 3.52 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak satu kasus indikasi kerugian daerah senilai Rp80,00 juta pada satu entitas.
- 3.53 Kasus tersebut adalah **penggunaan uang untuk kepentingan pribadi**, yaitu penerimaan hasil tagihan jasa bongkar muat dari perusahaan tambang sebesar Rp80,00 juta yang digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara penerimaan yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara.

Penyebab

- 3.54 Kasus kerugian daerah tersebut terjadi karena kepala dinas kurang optimal dalam pengawasan dan pengendalian, serta bendahara penerimaan lalai dalam menyetorkan dan melaporkan seluruh pendapatan daerah.

Rekomendasi

- 3.55 Terhadap kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugas, memberikan sanksi kepada Kepala Dinas atas kelemahan pengawasan dan pengendalian, serta memerintahkan Majelis TPTGR untuk memproses dan menetapkan indikasi kerugian daerah dan menyetorkan ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah (4 kasus senilai Rp29.612,03 juta)

- 3.56 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak empat kasus potensi kerugian daerah senilai Rp29.612,03 juta di dua entitas pada dua objek pemeriksaan.
- 3.57 Kasus-kasus tersebut adalah **piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp29.612,03 juta**, yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro, kasus-kasus tersebut seperti piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang berumur s.d. lima tahun belum tertagih. Selain itu terdapat piutang retribusi pasar grosir dan pertokoan yang berumur kurang dari tiga tahun serta tagihan air untuk pelanggan aktif pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum (UPT PAM) yang belum tertagih.

Penyebab

- 3.58 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kepala dinas terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan pengelolaan PBB P2 serta pejabat pelaksana kurang intensif dalam melakukan penagihan atas piutang PBB P2, retribusi pasar grosir dan pertokoan, serta tagihan air.

Rekomendasi

- 3.59 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan PBB P2, dan menginstruksikan pejabat pelaksana untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan atas piutang PBB P2, retribusi pasar grosir dan pertokoan, serta tagihan air.

Kekurangan Penerimaan (49 kasus senilai Rp129.095,90 juta)

- 3.60 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 49 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp129.095,90 juta di 15 objek pemeriksaan pada 14 entitas.
- 3.61 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp123.935,23 juta**, yang terjadi di 13 entitas antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Maluku, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, dan Provinsi DKI Jakarta. Kasus-kasus tersebut seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang telah jatuh tempo belum diterima, kekurangan pembayaran royalti dan denda izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi, pajak air permukaan belum ditetapkan dan ditagih.
 - **Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp4.983,17 juta**, yang terjadi di 5 entitas, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Wakatobi dan

Kota Singkawang. Kasus-kasus tersebut seperti penetapan PKB dan BBNKB berikut dendanya belum berdasarkan Permendagri No.29 Tahun 2012, pajak hiburan dibayar dengan tarif yang lebih kecil dari tarif yang ditetapkan Perda, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kurang ditetapkan.

- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp177,50 juta**, yaitu denda keterlambatan penyampaian laporan bulanan akta pejabat pembuat akta tanah. Kasus tersebut terjadi di Kabupaten Buleleng.

3.62 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan pemerintah daerah senilai Rp129.095,90 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp1.414,35 juta, yaitu Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp1.366,22 juta, Kabupaten Lampung Timur senilai Rp27,21 juta, Kabupaten Buleleng senilai Rp15,00 juta dan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp5,92 juta.

Penyebab

3.63 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena dinas terkait kurang memperhatikan pemutakhiran peraturan, pejabat terkait belum menetapkan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Rekomendasi

3.64 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, dan mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab. Selain itu merekomendasikan agar pimpinan entitas selalu memperhatikan pemutakhiran peraturan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kelemahan Administrasi (37 kasus)

3.65 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 37 kasus kelemahan administrasi di sembilan objek pemeriksaan pada delapan entitas.

3.66 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.**, yang terjadi di tujuh entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan dikenakan pada bangunan pemerintah, perhitungan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan

pajak reklame belum mengacu pada peraturan daerah, dan pemegang IUP mengoperasikan pelabuhan khusus tanpa izin dari Kementerian Perhubungan.

- **Penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan**, yang terjadi di tiga entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pendapatan pajak penerangan jalan (PPJ) terlambat disetor oleh PT PLN (Persero), penerimaan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah terlambat disetor ke kas daerah.

Penyebab

- 3.67 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana tidak berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pimpinan entitas kurang berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk melakukan penyetoran PPJ tepat waktu, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 3.68 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar pimpinan entitas memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai, meningkatkan koordinasi dengan PT PLN untuk melakukan penyetoran tepat waktu, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Ketidakefektifan (5 kasus senilai Rp1.608,36 juta)

- 3.69 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak lima kasus ketidakefektifan senilai Rp1.608,36 juta pada satu entitas.
- 3.70 Kasus-kasus tersebut adalah **fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai**, yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) belum menyusun target pendapatan pajak daerah (restoran, hotel, reklame, dan hiburan) berdasarkan data perhitungan potensi pajak yang ada, dan pendataan dan penetapan sebagai wajib pajak belum optimal dilakukan. Selain itu DPPKA tidak memberikan peringatan dan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban. Kasus tersebut terjadi di Kota Singkawang.

Penyebab

- 3.71 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena pejabat terkait belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola pajak daerah, belum optimalnya pemungutan pajak daerah, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian atasan.

Rekomendasi

- 3.72 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana dan pejabat terkait yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian atasan.
- 3.73 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pengelolaan pendapatan pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 10.
- 3.74 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 4

Pelaksanaan Belanja

- 4.1 Pemeriksaan atas pelaksanaan belanja meliputi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah pusat/daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat/daerah dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut jenisnya, belanja pemerintah pusat/daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
- 4.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan belanja TA 2010 s.d. 2013 atas 197 objek pemeriksaan, terdiri atas 37 objek pemeriksaan kementerian/lembaga (KL), 20 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 140 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 4.3 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja telah mengungkap sebanyak 2.329 kasus senilai Rp915.471,75 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 270 kasus di 86 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 2.059 kasus senilai Rp915.471,75 juta dan terjadi di 170 entitas. Dari jumlah kasus di atas telah ditindaklanjuti pemerintah pusat/daerah dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp60.330,30 juta selama proses pemeriksaan. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Belanja

(nilai dalam juta rupiah)

Subtema	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan		Nilai Penyetoran
	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	
Pelaksanaan belanja pemerintah pusat	69	271	351.138,01	21.124,73
Pelaksanaan belanja pemerintah daerah	201	1.788	564.333,74	39.205,57
Total	270	2.059	915.471,75	60.330,30

- 4.4 Pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja terdiri atas dua subtema, yaitu sebagai berikut.
- Pelaksanaan belanja pemerintah pusat; dan
 - Pelaksanaan belanja pemerintah daerah.
- 4.5 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan pelaksanaan belanja disajikan pada uraian berikut.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 4.6 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pelaksanaan belanja pemerintah pusat TA 2012 s.d. 2013. Pemeriksaan dilakukan pada 18 kementerian/lembaga (KL) yang meliputi 37 objek pemeriksaan.
- 4.7 Cakupan pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah pusat pada 18 KL adalah senilai Rp13.138.593,82 juta dari realisasi anggaran belanja senilai Rp19.702.443,37 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.8 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian;
 - pelaksanaan anggaran dan kegiatan belanja, pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
 - hasil pengadaan telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya serta telah memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 4.9 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat telah mengungkap sebanyak 340 kasus senilai Rp351.138,01 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 69 kasus di 10 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 271 kasus senilai Rp351.138,01 juta dan terjadi di 17 entitas. Dari jumlah kasus di atas terdapat 11 entitas telah menyerahkan aset/menyetorkan ke kas negara senilai Rp21.124,73 juta selama proses pemeriksaan. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan/penyetoran selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	69	134	20	24	64	29	271
Nilai kasus	-	52.545,17	47.263,27	7.326,35	-	244.003,22	351.138,01
Jumlah Entitas	10	16	11	8	15	13	17*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	20.859,56	26,02	239,15	-	-	21.124,73

Keterangan:

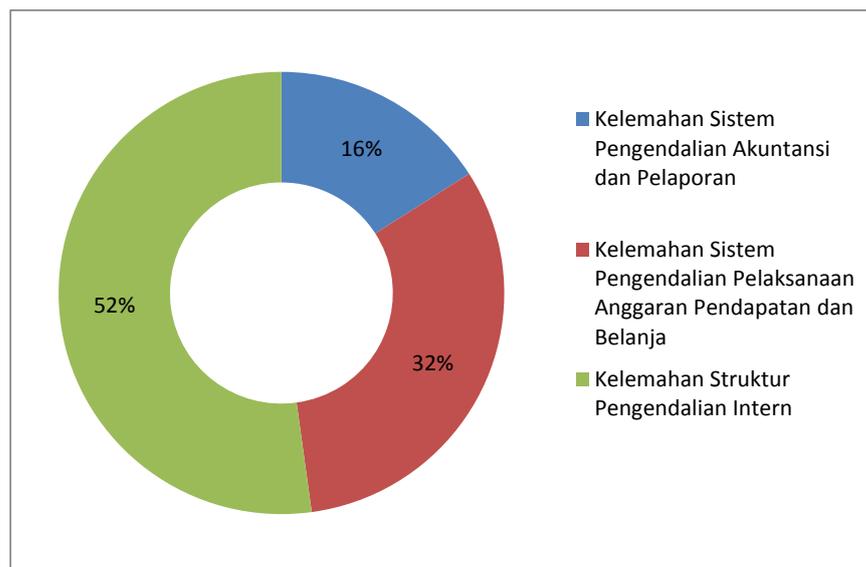
SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 4.10 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan pada Lampiran 11.

Sistem Pengendalian Intern

- 4.11 Hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat mengungkap sebanyak 69 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 11 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 22 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 36 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pelaksanaan belanja pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 4.1.

Grafik 4.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

- 4.12 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di empat entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pembebanan anggaran belanja pusat perjalanan dinas (BPJ) dan beban persekot resmi (BPPR) belum terselesaikan/mendapat penggantian, pembayaran lembur yang dilakukan sekaligus untuk beberapa bulan, dan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan pelaporan kinerja instansi pemerintahan belum memedomani peraturan.
 - **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di empat entitas. Kasus-kasus tersebut seperti penggunaan anggaran latihan dan pendidikan tidak sesuai alokasi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran belum memperhatikan ketentuan, dan pengelolaan belanja sosial bantuan program perluasan kesempatan kerja belum sesuai ketentuan.
 - **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di tiga entitas. Kasus-kasus tersebut seperti penambahan aset bangunan belum tercatat sebagai aset tetap dalam neraca, barang yang telah rusak berat masih tercatat sebagai Aset Tetap, dan pendapatan pengurusan visa dan konsuler yang telah diterima belum tercatat pada Kas di Bendaharawan Penerima.

Penyebab

- 4.13 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan dan pejabat yang bertanggung jawab tidak memedomani peraturan yang berlaku, perencanaan tidak memadai, Biro Keuangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak segera menindaklanjuti permohonan penggantian BPJ dan BPPR yang telah diajukan, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 4.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memedomani peraturan yang berlaku, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola barang dan keuangan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggungjawab meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4.15 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 12.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 4.16 Hasil pemeriksaan mengungkap sebanyak 271 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 35 objek pemeriksaan pada 17 entitas senilai Rp351.138,01 juta yang disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	134	52.545,17
2	Potensi Kerugian Negara	20	47.263,27
3	Kekurangan Penerimaan	24	7.326,35
4	Kelemahan Administrasi	64	-
5	Ketidakhematan	18	29.153,29
6	Ketidakefektifan	11	214.849,93
	Jumlah	271	351.138,01

Kerugian Negara (134 kasus senilai Rp52.545,17 juta)

- 4.17 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat mengungkap sebanyak 134 kasus kerugian negara senilai Rp52.545,17 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak delapan kasus senilai Rp8.613,05 juta. Kasus tersebut terjadi di 29 objek pemeriksaan pada 16 entitas.
- 4.18 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp12.753,26 juta**, yang terjadi di lima entitas, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Kepolisian Negara RI (Polri), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan Kemlu. Kasus-kasus tersebut seperti pengeluaran untuk pegawai tetap *project management unit* tidak dapat dibebankan pada kontrak penerapan KTP elektronik, terdapat realisasi belanja barang yang tidak sesuai ketentuan, serta terdapat pengeluaran biaya untuk tempat penampungan anak (*shelter*) tidak berdasarkan jumlah *shelter* yang digunakan.
- **Pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp10.665,21 juta**, yang terjadi di enam entitas, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), Polri, Kemnakertrans, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kemenkumham. Kasus-kasus tersebut seperti pemahalan harga dalam pengadaan tanah, pekerjaan infrastruktur dan instalasi teknologi informasi, dan dalam pekerjaan pengadaan perangkat konferensi video serta peralatan sistem monitoring, perintah dan pengendalian.

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp10.024,75 juta**, yang terjadi di 12 entitas, antara lain Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kemnakertrans, Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kasus-kasus tersebut seperti realisasi fisik tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran telah dilakukan seluruhnya sehingga terdapat kerugian dari selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan dan atau barang yang diterima.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp9.429,12 juta**, yang terjadi di 13 entitas, antara lain Kementerian KP, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian PU, Polri dan Kemendag. Kasus-kasus tersebut seperti adanya biaya-biaya pekerjaan yang seharusnya tidak dibebankan/diperlukan dalam kontrak, kesalahan perhitungan dalam RAB kontrak, terdapat dua pekerjaan pengawasan yang dilakukan pada saat bersamaan, dan terdapat harga satuan kontrak jasa konsultasi melebihi tarif yang ditentukan.

4.19 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-kasus kerugian negara atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp52.545,17 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp20.859,56 juta, di antaranya adalah Kemendagri senilai Rp11.800,83 juta, Kemenhub senilai Rp4.112,39 juta, Polri senilai Rp1.949,08 juta, dan Kemenhut senilai Rp1.745,43 juta.

Penyebab

4.20 Kasus-kasus kerugian negara pada umumnya terjadi karena Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugasnya, panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak cermat dalam menguji kesesuaian tagihan dengan pengeluaran riil kegiatan. Selain itu, kasus tersebut juga terjadi karena konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

Rekomendasi

4.21 Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Potensi Kerugian Negara (20 kasus senilai Rp47.263,27 juta)

- 4.22 Hasil pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan adanya potensi kerugian negara sebanyak 20 kasus potensi kerugian negara senilai Rp47.263,27 juta di 12 objek pemeriksaan pada sebelas entitas.
- 4.23 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Potensi kerugian negara lain-lain senilai Rp36.585,10 juta**, yang terjadi di Kemenag. Kasus tersebut yaitu prosedur dan pengambilan data pembanding untuk pembelian tanah pada IAIN Sunan Ampel yang dilakukan oleh konsultan jasa penilai menyalahi Standar Penilaian Indonesia.
 - **Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp9.953,47 juta**, yang terjadi di sembilan entitas, antara lain Kementerian PU, Kemenhub, Kementerian KP, Kemendag, dan TNI AD. Kasus-kasus tersebut seperti kesalahan perhitungan penyesuaian harga kontrak *multiyears*, kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan. Terhadap kasus-kasus tersebut, pembayaran belum dilakukan seluruhnya.
- 4.24 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus potensi kerugian negara atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp47.263,27 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara senilai Rp26,02 juta, yaitu oleh Kemnakertrans senilai Rp13,48 juta, Kemenkumham senilai Rp11,41 juta dan Kejaksaan RI senilai Rp1,13 juta.

Penyebab

- 4.25 Kasus potensi kerugian negara tersebut terjadi karena pengawas, kontraktor pelaksana dan panitia pengadaan tidak cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas, penetapan harga tanah tidak memperhatikan harga pasar yang wajar serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.26 Terhadap kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain memberikan sanksi kepada pejabat dan panitia pengadaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan agar mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/memperhitungkan dalam termin pembayaran. Selain itu BPK juga telah merekomendasikan agar Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag menelusuri lebih lanjut potensi kerugian negara.

Kekurangan Penerimaan (24 kasus senilai Rp7.326,35 juta)

- 4.27 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat mengungkap sebanyak 24 kasus kekurangan penerimaan negara senilai Rp7.326,35 juta di sebelas objek pemeriksaan pada delapan entitas.
- 4.28 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp3.310,47 juta**, yang terjadi di tujuh entitas, antara lain Kementerian KP, Kemenhut, Kemnakertrans, Kemendag, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg). Kasus-kasus tersebut yaitu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang terlambat diselesaikan oleh rekanan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak tetapi belum dikenakan denda keterlambatan.
 - **Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp3.125,05 juta**, yang terjadi di tiga entitas yaitu Kementan, Kementerian KP, dan Kemnakertrans. Kasus-kasus tersebut seperti jaminan penawaran yang belum dicairkan atas rekanan yang menolak saat ditetapkan sebagai pemenang lelang, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan yang belum dipungut/dikenakan pada penyedia barang/jasa, dan pengembalian kelebihan penggunaan dana belum disetorkan ke kas negara.
 - **Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan senilai Rp890,83 juta**, yang terjadi di satu entitas, yaitu Kementerian KP. Kasus tersebut yaitu tarif PPh jasa konstruksi dan konsultan yang dikenakan kepada rekanan lebih rendah dari yang ditetapkan dalam UU dan peraturan pemerintah.
- 4.29 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat senilai Rp7.326,35 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara senilai Rp239,15 juta, yaitu Kemenhut senilai Rp163,68 juta, Kemsetneg senilai Rp44,79 juta, Kejaksaan RI senilai Rp21,79 juta dan Kemenkumham senilai Rp8,89 juta.

Penyebab

- 4.30 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor lalai tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu sesuai dengan kontrak dan pejabat pembuat SPM tidak cermat dalam memperhitungkan PPh final atas jasa konstruksi dan jasa konsultan. Selain itu, terjadi karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.31 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kelemahan Administrasi (64 kasus)

- 4.32 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat mengungkap sebanyak 64 kasus kelemahan administrasi di 27 objek pemeriksaan pada 15 entitas.
- 4.33 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)**, yang terjadi di sebelas entitas. Kasus-kasus tersebut seperti laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pekerjaan yang dilakukan secara swakelola dibuat secara formalitas agar pembayaran dapat segera dicairkan, pembayaran atas pekerjaan tidak diverifikasi dan dilengkapi dengan data pendukung sesuai ketentuan, serta pembayaran restitusi pengobatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap.
 - **Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)**, yang terjadi di delapan entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pengadaan barang dan jasa tidak diikat dengan surat perintah kerja (SPK) atau surat perjanjian (kontrak), pemilihan penyedia dalam pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan, serta klarifikasi dan negosiasi biaya langsung personil kegiatan survei belum sesuai dengan ketentuan.

Penyebab

- 4.34 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas, kurang cermat dan tidak mematuhi ketentuan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran/kegiatan, belum ada pedoman mengenai pelaksanaan swakelola, serta pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 4.35 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan teguran dan atau sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakhematan (18 kasus senilai Rp29.153,29 juta)

- 4.36 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan bahwa terdapat 18 kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakhematan senilai Rp29.153,29 juta di sebelas objek pemeriksaan pada sembilan entitas.
- 4.37 Kasus-kasus tersebut adalah **pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp29.153,29 juta**, yang terjadi di 9 entitas, antara lain Kementerian PU, Kemnakertrans, Kemendagri, Kemenhut, dan Kemenag. Kasus-kasus tersebut seperti harga total penawaran pada kontrak melebihi HPS tetapi tidak dilakukan negosiasi harga, bantuan pemberdayaan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) diberikan kepada dinas-dinas yang tidak memerlukan bantuan sehingga tidak memberikan manfaat, dan barang/jasa hasil pengadaan tidak dapat digunakan dan tidak memberikan output.

Penyebab

- 4.38 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana kegiatan dalam menyusun HPS dan melaksanakan kegiatan lalai dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, perencanaan kegiatan tidak memadai, pejabat yang bertanggung jawab lemah dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta belum ada pedoman/SOP.

Rekomendasi

- 4.39 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan memberikan pembinaan kepada pelaksana kegiatan, menyusun pedoman/SOP serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Ketidakefektifan (11 kasus senilai Rp214.849,93 juta)

- 4.40 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah pusat menunjukkan sebelas kasus ketidakpatuhan yang mengakibatkan ketidakefektifan senilai Rp214.849,93 juta di tujuh objek pemeriksaan pada tujuh entitas.
- 4.41 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp204.433,72 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu Kemendagri dan Kemendag. Kasus-kasus tersebut seperti pengadaan lisensi *software*/sistem yang sampai dengan kontrak berakhir tidak langsung dimanfaatkan secara keseluruhan, dan pasar yang telah selesai dibangun namun belum dimanfaatkan.

- **Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp8.071,89 juta**, yang terjadi di Kemendag. Kasus tersebut adalah biaya pekerjaan pembangunan pasar seharusnya tidak dibebankan pada dana tugas pembantuan di Kemendag namun dibebankan pada APBD.
- **Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp2.344,32 juta**, yang terjadi di tiga entitas, yaitu Kemendag, TNI AL dan Kementerian KP. Kasus-kasus tersebut seperti pembangunan pasar yang tidak dapat diselesaikan karena terkendala kondisi lahan, proses penetapan Korps Marinir sebagai Komando Utama Operasional berlarut-larut, serta kegiatan pengadaan barang dan jasa berpotensi terlambat sehingga hasil pekerjaan tidak dapat segera dimanfaatkan.

Penyebab

- 4.42 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas dalam membuat perencanaan belum disusun berdasarkan pertimbangan yang memadai dan memperhatikan rencana strategis lima tahunan, kurang berkoordinasi dengan satker/pihak terkait, pejabat pelaksana lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta pengawasan dan pengendalian yang dilakukan belum optimal.

Rekomendasi

- 4.43 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, menyusun rencana strategis yang lebih realistis sesuai ketentuan dan kebutuhan yang senyatanya, serta meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 4.44 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 13.

Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

- 4.45 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja atau pengadaan barang/jasa pemerintah daerah TA 2011 s.d. 2013, atas 160 objek pemeriksaan pemerintahan provinsi/kabupaten/kota, yang terdiri atas 20 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, dan 140 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota.
- 4.46 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah di 160 objek pemeriksaan pada 153 entitas tersebut adalah senilai Rp22.106.375,71 juta dari realisasi anggaran belanja senilai Rp73.712.916,00 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 4.47 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern yang terkait dengan program/kegiatan yang diperiksa telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai; dan
 - pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk penerapan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Pemeriksaan

- 4.48 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah telah mengungkap sebanyak 1.989 kasus senilai Rp564.333,74 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 201 kasus di 76 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 1.788 kasus senilai Rp564.333,74 juta dan terjadi di 153 entitas. Dari jumlah kasus di atas terdapat 91 entitas telah menyerahkan aset/menyetorkan ke kas daerah senilai Rp39.205,57 juta selama proses pemeriksaan. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan/penyetoran selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	201	760	291	306	250	181	1.788
Nilai kasus	-	226.728,42	117.821,43	56.717,82	-	163.066,07	564.333,74
Jumlah entitas	76	147	106	131	97	84	153*
Penyetoran selama proses pemeriksaan	-	28.047,75	3.594,49	7.563,33	-	-	39.205,57

Keterangan:

SPI : sistem pengendalian intern

3E : ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah bukan merupakan hasil penjumlahan

- 4.49 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 14.

Sistem Pengendalian Intern

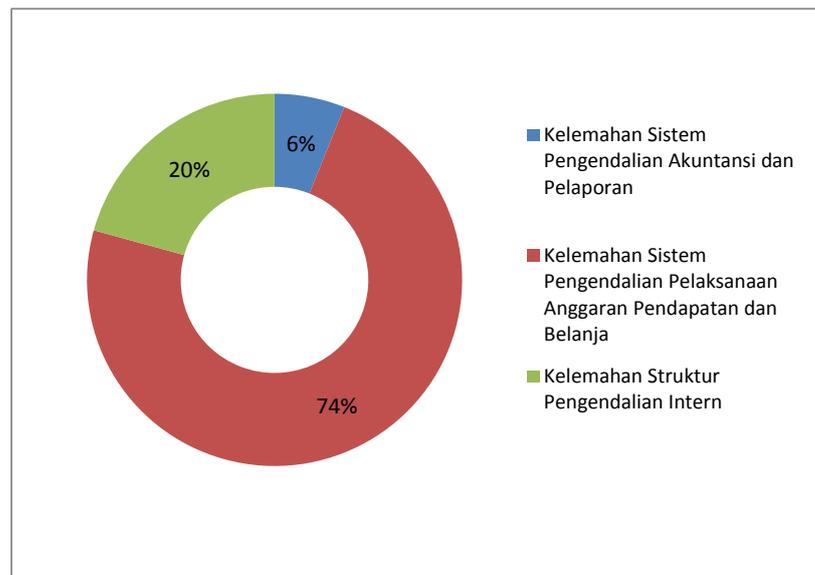
- 4.50 Hasil pemeriksaan SPI atas pelaksanaan belanja daerah menunjukkan terdapat 201 kasus kelemahan SPI, yaitu 12 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 148 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 41 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	6	6	12
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	19	129	148
3	Struktur Pengendalian Intern	8	33	41
	Jumlah	33	168	201

4.51 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 4.2.

Grafik 4.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah



4.52 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja**, yang terjadi di 38 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti belanja hibah dan bansos yang belum didukung proposal permohonan, belum diverifikasi secara memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah pemilukada belum disampaikan ke gubernur dan DPRD. Selain itu, terdapat pencairan dana jamkesmas dan program satu miliar satu kecamatan (samisake) dilakukan sebelum diverifikasi oleh verifikator independen.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 19 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti peraturan kepala daerah terkait tatacara pengelolaan pemberian hibah dan bansos belum mengatur kriteria penerima bantuan antara lain selektif, harus menyampaikan pakta integritas dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban. Kemudian terdapat tim pengelola hibah dan bansos tidak pernah melakukan analisa proposal, menilai kelayakan penerima bantuan sehingga beberapa penerima hibah dan bansos yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah dan bansos antara lain tidak memiliki identitas yang jelas dan tidak berdomisili di wilayah tersebut tetapi menerima bantuan, serta belum ada peraturan terkait pengelolaan situs *web* di lingkungan pemerintah daerah.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di empat entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pencatatan buku kas umum (BKU) tidak tertib seperti pengeluaran dicatat ganda dan realisasi pengeluaran tidak dicatat di BKU, serta belanja barang modal belum dicatat dalam aset pemerintah daerah.

Penyebab

- 4.53 Kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja pemerintah daerah pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku, belum adanya SOP, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas. Selain itu terdapat peraturan kepala daerah sebagai dasar hukum pengelolaan hibah belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Rekomendasi

- 4.54 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI pada pelaksanaan belanja pemerintah daerah, BPK telah merekomendasikan agar kepala daerah memberikan sanksi kepada pelaksana yang belum memperhatikan ketentuan, menyusun dan menetapkan SOP, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan agar kepala daerah merevisi peraturan daerah terkait pengelolaan hibah dengan menyesuaikan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.
- 4.55 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 15.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 4.56 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah mengungkap sebanyak 1.788 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 160 objek pemeriksaan pada 153 entitas senilai Rp564.333,74 juta sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	101	36.584,38	659	190.144,04	760	226.728,42
2	Potensi Kerugian Daerah	16	7.253,97	275	110.567,46	291	117.821,43
3	Kekurangan Penerimaan	54	22.444,90	252	34.272,92	306	56.717,82
4	Kelemahan Administrasi	52	-	198	-	250	-
5	Ketidakhematan	18	14.502,58	51	24.718,98	69	39.221,56
6	Ketidakefektifan	26	57.541,47	86	66.303,04	112	123.844,51
	Jumlah	267	138.327,30	1.521	426.006,44	1.788	564.333,74

Kerugian Daerah (760 kasus senilai Rp226.728,42 juta)

4.57 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah mengungkap sebanyak 760 kasus kerugian daerah senilai Rp226.728,42 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 367 kasus senilai Rp123.397,57 juta. Kasus tersebut terjadi di 154 objek pemeriksaan pada 148 entitas.

4.58 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp94.721,40 juta**, yang terjadi di 114 entitas, antara lain Kabupaten Sarmi, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kasus-kasus tersebut seperti realisasi fisik tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran telah dilakukan seluruhnya sehingga terdapat kerugian dari selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan dan atau barang yang diterima.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp40.591,80 juta**, yang terjadi di 75 entitas, antara lain Kota Medan, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tolikara. Kasus-kasus tersebut seperti kelebihan pembayaran pengadaan bahan bakar minyak dan asuransi kendaraan, kelebihan pembayaran karena perbedaan koefisien analisa harga satuan antara dokumen penawaran dengan kontrak, dan terdapat pembayaran uang muka pekerjaan melebihi prestasi fisik yang telah dikerjakan.

- **Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp15.102,28 juta**, yang terjadi di 47 entitas antara lain Kabupaten Asahan, Kabupaten Badung, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Gorontalo. Kasus-kasus tersebut seperti pekerjaan lapisan hotmix, lapisan aspal, dan lapis pondasi agregat pada pekerjaan jalan tidak sesuai spesifikasi kontrak, serta spesifikasi komputer untuk laboratorium bahasa tidak sesuai kontrak.

- 4.59 Penyerahan aset atau penyeteroran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kerugian daerah atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp226.728,42 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah senilai Rp28.047,75 juta, antara lain Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp5.232,44 juta, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta senilai Rp3.804,65 juta, Kabupaten Badung senilai Rp2.424,40 juta, Kabupaten Bantul senilai Rp1.943,48 juta, dan Kabupaten Labuhanbatu senilai Rp1.459,21 juta.

Penyebab

- 4.60 Kasus-kasus kerugian daerah pada umumnya terjadi karena rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, kontraktor pengawas kurang cermat melakukan pekerjaan, para pelaksana lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 4.61 Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyeteror uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah (291 kasus senilai Rp117.821,43 juta)

- 4.62 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah mengungkap sebanyak 291 kasus yang berpotensi merugikan daerah senilai Rp117.821,43 juta di 106 objek pemeriksaan pada 106 entitas.
- 4.63 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp112.441,08 juta**, yang terjadi di 101 entitas, antara lain Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Barito Kuala,

Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Maluku Utara. Kasus-kasus tersebut seperti pemahalan harga kontrak, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi barang/pekerjaan yang diterima tidak sesuai kontrak. Terhadap kasus-kasus tersebut pembayaran belum dilakukan seluruhnya.

- **Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah senilai Rp617,82 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang dan Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus tersebut yaitu terdapat hasil pekerjaan/pengadaan barang yang belum diserahkan ke pemerintah daerah.
- **Lain-lain potensi kerugian daerah senilai Rp4.303,73 juta**, yang terjadi di lima entitas yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Lombok Timur. Kasus-kasus tersebut seperti penyaluran sembako belum dilaksanakan karena hambatan transportasi, serta pekerjaan pemeliharaan rutin yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

4.64 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-kasus potensi kerugian daerah atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp117.821,43 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp3.594,49 juta, antara lain Kabupaten Badung senilai Rp1.312,04 juta, Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai Rp646,32 juta, Kab. Hulu Sungai Tengah senilai Rp277,05 juta.

Penyebab

4.65 Kasus-kasus potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian penanggung jawab proyek.

Rekomendasi

4.66 Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhitungkan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kekurangan Penerimaan (306 kasus senilai Rp56.717,82 juta)

4.67 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja pemerintah daerah mengungkap sebanyak 306 kasus kekurangan penerimaan daerah senilai Rp56.717,82 juta di 134 objek pemeriksaan pada 131 entitas.

- 4.68 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp30.258,62 juta**, yang terjadi di 118 entitas, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Tolikara. Kasus-kasus tersebut yaitu denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada rekanan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak.
 - **Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp25.276,37 juta**, yang terjadi di 41 entitas, antara lain Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lebong, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kasus-kasus tersebut seperti pajak yang belum dipungut/dikenakan pada penyedia barang, dan jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum dicairkan atas kontrak yang telah diputus.
- 4.69 **Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan**, dari kasus-kasus kekurangan penerimaan atas pelaksanaan belanja daerah senilai Rp56.717,82 juta telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp7.563,33 juta, antara lain Kabupaten Lamandau senilai Rp1.856,40 juta, Kabupaten Lebong senilai Rp3.008,59 juta, Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta senilai Rp441,97 juta dan Kabupaten Buol senilai Rp344,74 juta.

Penyebab

- 4.70 Kasus-kasus kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, pelaksana kegiatan dan bendaharawan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rekomendasi

- 4.71 Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana dan rekanan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Kelemahan Administrasi (250 kasus)

- 4.72 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah mengungkap sebanyak 250 kasus kelemahan administrasi di 101 objek pemeriksaan pada 97 entitas.

4.73 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)**, yang terjadi di 61 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat realisasi belanja yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban, pembayaran jasa konsultasi tidak dilengkapi bukti pengeluaran yang sah dan bukti kehadiran konsultan, serta terdapat belanja bansos yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran.
- **Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)**, yang terjadi di 44 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti harga perkiraan sendiri (HPS) belum disusun secara cermat dan tidak didukung dengan dokumen yang memadai, perpanjangan waktu kontrak pekerjaan konstruksi tidak disertai dengan perpanjangan waktu berlakunya jaminan pelaksanaan, serta terdapat penyelesaian pekerjaan yang tidak didukung dengan berita acara penyerahan pekerjaan.

Penyebab

4.74 Kasus-kasus kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian dari pimpinan entitas.

Rekomendasi

4.75 Terhadap kasus-kasus kelemahan administrasi tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberi teguran/sanksi kepada pelaksana yang lalai dalam melaksanakan pekerjaan, serta pimpinan entitas untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

Ketidakhematan (69 kasus senilai Rp39.221,56 juta)

4.76 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah mengungkap sebanyak 69 kasus ketidakhematan senilai Rp39.221,56 juta di 49 objek pemeriksaan pada 46 entitas.

4.77 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp37.234,12 juta**, yang terjadi di 46 entitas, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Lampung, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Majene. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat selisih harga antara harga pemenang lelang dengan peserta lelang yang digugurkan karena bukan kesalahan substansial, perhitungan HPS tidak mempertimbangkan harga material setempat dan jarak angkut,

pemberian tunjangan perumahan tidak sesuai ketentuan, harga satuan kontrak melebihi standar harga satuan daerah, serta belanja hibah disalurkan kepada penerima yang sama secara terus menerus.

- **Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar senilai Rp1.987,44 juta**, yang terjadi di Kabupaten Kuningan, yaitu penyusunan RAB yang tidak sesuai atau tidak berpedoman pada standar (SNI) yang berlaku.

Penyebab

- 4.78 Kasus-kasus ketidakhematan pada umumnya terjadi karena para pelaksana lalai dalam melaksanakan tugas dan tidak memperhatikan ketentuan, panitia pengadaan kurang cermat dalam menyusun HPS, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Rekomendasi

- 4.79 Terhadap kasus-kasus ketidakhematan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan.

Ketidakefektifan (112 kasus senilai Rp123.844,51 juta)

- 4.80 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan belanja daerah mengungkap sebanyak 112 kasus ketidakefektifan senilai Rp123.844,51 juta di 65 objek pemeriksaan pada 61 entitas.

- 4.81 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi senilai Rp52.758,19 juta**, yang terjadi di 17 entitas, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Landak, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Merauke dan Kota Bogor. Kasus-kasus tersebut seperti pengadaan dan pemasangan suku cadang kelengkapan pompa dan pintu air terlambat diselesaikan, dana alokasi khusus bidang pendidikan terlambat disalurkan sehingga mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan, keterlambatan penyampaian dana belanja bantuan keuangan kepada ketua RT dan RW, serta terdapat pekerjaan yang prestasi fisiknya masih jauh dari target yang direncanakan.
- **Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp41.360,04 juta**, yang terjadi di 22 entitas, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. Kasus-kasus tersebut seperti kios penjualan bunga dan sarana prasarana belum dimanfaatkan karena belum ada jalan, hasil pengadaan alat kesehatan belum dimanfaatkan, pembangunan sarana dan prasarana stadion belum dimanfaatkan, serta terdapat pembangunan pasar yang belum dimanfaatkan.

Penyebab

- 4.82 Kasus-kasus ketidakefektifan pada umumnya terjadi karena entitas yang diperiksa kurang cermat dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, kurangnya koordinasi antar instansi, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian pejabat yang bertanggung jawab.

Rekomendasi

- 4.83 Terhadap kasus-kasus ketidakefektifan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar merencanakan kegiatan secara cermat, memberikan sanksi kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, segera memanfaatkan barang hasil pengadaan dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian.
- 4.84 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 16.
- 4.85 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 5

Pengelolaan Aset Tetap

- 5.1 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 7).
- 5.2 Aset tetap negara/daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen/pengelolaan aset tetap negara/daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah.
- 5.3 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap pada 23 entitas pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 2 Badan Layanan Umum (BLU), 1 pemerintah provinsi, dan 20 pemerintah kabupaten/kota.
- 5.4 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap adalah untuk menilai
- Efektivitas sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai
 - Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset tetap daerah yang meliputi perencanaan, pencatatan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan.
- 5.5 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap telah mengungkap sebanyak 418 kasus senilai Rp1.054.698,35 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 164 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 254 kasus senilai Rp1.054.698,35 juta. Dari jumlah kasus di atas telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp180,68 juta selama proses pemeriksaan. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah)

Subtema	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan		Nilai Penyetoran
	Kasus	Kasus	Nilai	
Pengelolaan aset badan layanan umum	16	50	1.002.982,25	-
Pengelolaan aset pemerintah daerah	148	204	51.716,10	180,68
Total	164	254	1.054.698,35	180,68

- 5.6 Pemeriksaan terhadap pengelolaan aset tetap terdiri dari 2 subtema, yaitu sebagai berikut.
- Pengelolaan aset tetap pada BLU; dan
 - Pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah.
- 5.7 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan terhadap pengelolaan aset tetap disajikan pada uraian berikut.

Badan Layanan Umum

- 5.8 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan aset tetap BLU pada 2 entitas yaitu BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK).
- 5.9 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap pada BLU telah mengungkap sebanyak 66 kasus senilai Rp1.002.982,25 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 16 kasus dan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 50 kasus senilai Rp1.002.982,25 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap pada BLU

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					Total
		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	
Jumlah Kasus	16	12	3	24	9	2	50
Nilai Kasus	-	428.916,97	264.359,10	309.706,18	-	-	1.002.982,25
Jumlah Entitas	2	2	1	2	2	2	2*

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern

3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

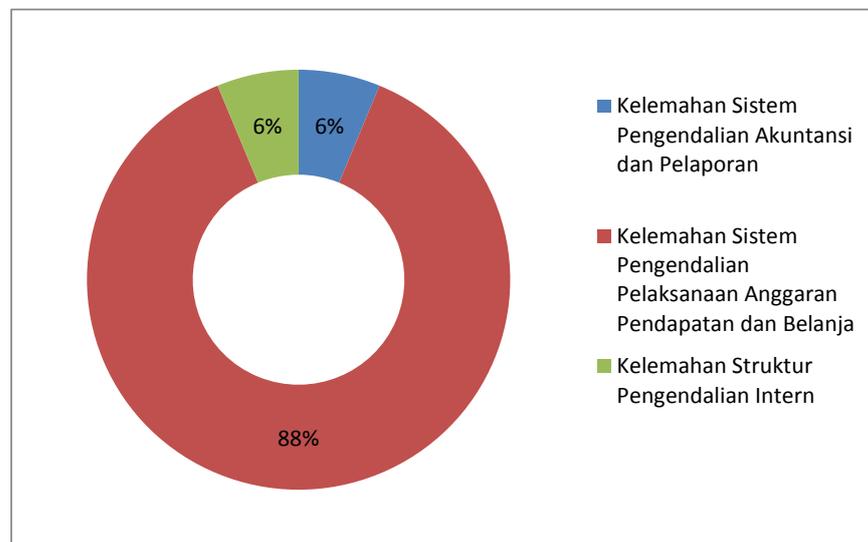
* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 5.10 Daftar kelompok temuan menurut entitas atas pengelolaan aset tetap pada BLU disajikan pada Lampiran 17.

Sistem Pengendalian Intern

- 5.11 Hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan aset tetap BLU menunjukkan terdapat 16 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 1 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 14 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 1 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan aset tetap pada BLU disajikan dalam Grafik 5.1.

Grafik 5.1 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap pada BLU



- 5.12 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut adalah sebagai berikut.

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di satu entitas. Kasus tersebut yaitu aset tetap yang diperoleh dari hasil pengelolaan padang golf dan *driving range* tidak tercatat sebagai aset PPKK.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di dua entitas. Kasus-kasus tersebut antara lain pemanfaatan aset tetap oleh mitra kerja sama tidak dibuat dalam perikatan hukum, sehingga entitas tidak memperoleh pendapatan atas pemanfaatan aset tersebut, terdapat potensi pendapatan yang hilang karena pemanfaatan aset tidak dikerjasamakan secara langsung dengan pihak ketiga, tetapi melalui koperasi karyawan, dan tertundanya perjanjian kompensasi peniadaan media promosi luar ruang mengakibatkan entitas kehilangan peluang untuk memperoleh pendapatan.

- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di satu entitas. Kasus tersebut yaitu entitas tidak memiliki standar terkait besaran kontribusi dan batas waktu perjanjian kerjasama dalam bentuk Bangun Guna Serah (*Built Operating Transfer*) dan kerjasama pemanfaatan/KSO.

Penyebab

- 5.13 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut pada umumnya terjadi karena pihak pengelola tidak cermat dalam mencatat aset tetap, memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan atas kerja sama BOT dan pengendalian pemanfaatan aset, belum ada standarisasi atau aturan yang baku dan jelas dalam membuat surat perjanjian kerja sama, serta standarisasi untuk mengakomodir perjanjian yang tidak sesuai dengan aturan dengan mengamandemen perjanjian kerja sama. Selain itu, direksi kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta berlarut-larutnya kesepakatan atas dasar penentuan formulasi perhitungan kompensasi.

Rekomendasi

- 5.14 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan Menteri Sekretaris Negara antara lain untuk memberikan sanksi kepada pihak pengelola yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas, memerintahkan direksi untuk mencatat aset tetap dan memperhitungkan kembali pendapatan kontribusi. Selain itu, BPK juga merekomendasikan direksi agar membuat standarisasi atau aturan yang baku dalam membuat surat perjanjian guna mengakomodir atau mengamandemen perjanjian yang tidak sesuai aturan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan upaya negosiasi untuk merealisasikan potensi pendapatan.
- 5.15 Rincian per kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI disajikan dalam Lampiran 18.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 5.16 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 50 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di dua objek pemeriksaan senilai Rp1.002.982,25 juta yang disajikan dalam Tabel 5.3.

Tabel 5.3. Kelompok Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap pada BLU

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	12	428.916,97
2	Potensi Kerugian Negara	3	264.359,10
3	Kekurangan Penerimaan	24	309.706,18
4	Kelemahan Administrasi	9	-
5	Ketidakefektifan	2	-
	Jumlah	50	1.002.982,25

- 5.17 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap pada BLU mengungkap sebanyak 12 kasus kerugian negara senilai Rp428.916,97 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 11 kasus senilai Rp59.590,27 juta.
- 5.18 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap pada BLU menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara senilai Rp57.022,57 juta**, yang terjadi di satu entitas yaitu PPKK. Kasus tersebut antara lain penjualan lahan oleh mitra kerja sama kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengelola PPKK dan PPKK tidak menerima tambahan uang pengganti sebagai kompensasi penjualan lahan, alokasi bagi hasil pengelola PPKK dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga terlalu rendah karena harga tanah di bawah nilai jual objek pajak (NJOP) belum memperhitungkan kelebihan penggunaan tanah oleh mitra kerja sama, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan pihak ketiga diperhitungkan sebagai bagian dari hasil kerja sama dengan mitra kerja sama.
 - **Lain-lain kerugian negara senilai Rp369.326,70 juta**, yang terjadi di satu entitas yaitu PPKGBK. Kasus tersebut adalah penggantian perusahaan areal tanah oleh mitra kerja sama tidak diterima dalam bentuk hibah berupa aset bangunan dan kas, namun diperhitungkan dalam kepemilikan saham pihak ketiga. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui pihak ketiga tersebut tidak dapat memberikan dividen sebelum hutang pihak ketiga kepada mitra kerja sama lunas, sehingga PPKGBK tidak dapat menikmati keuntungan dari dividen saham.
 - **Lain-lain potensi kerugian negara senilai Rp264.359,10 juta**, yang terjadi di satu entitas yaitu PPKK. Kasus-kasus tersebut adalah nilai penjualan tanah dan bangunan aset lebih rendah dari NJOP, serta nilai penyertaan modal berupa tanah diakui lebih rendah dari NJOP.

- **Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp309.706,18 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PPKK dan PPKGBK. Kasus-kasus tersebut antara lain kompensasi nilai pengganti tanah atas pengaturan kembali nilai tanah belum diterima, tarif sewa tanah yang ditetapkan lebih kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, biaya sewa penggunaan lahan oleh pihak ketiga belum diterima, pembayaran atas selisih harga tanah dari mitra kerja sama belum diterima, dan pihak ketiga belum melakukan kewajiban pembayaran berupa kompensasi, kontribusi tetap dan kontribusi variabel.
- **Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara**, yang terjadi di dua entitas. Kasus-kasus tersebut antara lain entitas belum melakukan evaluasi atas pengadaan dan/atau pembangunan yang dilakukan oleh mitra kerja (BOT) sehingga jumlah aset atas investasi yang dikelola mitra tidak dapat dimonitor, pembangunan apartemen golf yang dilaksanakan pihak ketiga tanpa ada perikatan yang sah, dan objek kerja sama pengelolaan aset entitas dengan pihak ketiga tidak dirinci secara jelas dalam perjanjian mengakibatkan aset berpotensi hilang.

Penyebab

- 5.19 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut pada umumnya terjadi karena
- Direksi tidak cermat dan lalai dalam menyusun perjanjian kerja sama, tidak mengajukan addendum perjanjian atas kelebihan penggunaan tanah, serta pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian yang lemah;
 - Pencantuman klausul perjanjian mengenai kontribusi/pembayaran awal area kompensasi dimasukkan sebagai biaya *pre-operational* atas penyerahan areal tanah dan dikapitalisasi sebagai modal saham;
 - Pejabat yang berwenang tidak cermat dalam menentukan nilai limit lelang dan tidak cermat dalam menyusun perjanjian kerja sama sehingga harga jual tanah di bawah nilai jual objek pajak (NJOP);
 - Direksi tidak tegas menerapkan perjanjian yang telah disepakati, lalai dalam menentukan tarif sewa dalam perjanjian dan membiarkan penempatan lahan tanpa perikatan yang sah, serta belum optimal dalam mengelola pemanfaatan aset; dan
 - Mitra kerja sama wanprestasi terhadap klausul perjanjian dan memiliki itikad tidak baik dengan melakukan pembangunan tanpa didasari perikatan/kontrak.

Rekomendasi

- 5.20 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Sekretaris Negara agar antara lain
- Memberikan sanksi kepada direksi yang tidak cermat dan lalai dalam menyusun perjanjian kerja sama dan tidak melakukan addendum perjanjian;
 - Memerintahkan direksi untuk melakukan penagihan kepada mitra kerja sama atas kompensasi selisih harga nilai pengganti tanah, alokasi bagi hasil, dan kewajiban mitra kerja sama sesuai perjanjian dan/atau melakukan upaya hukum atas permasalahan tersebut;
 - Memerintahkan direksi memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana/pejabat yang bertanggung jawab yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas, dan mengamandemen perjanjian kerjasama dengan mengakomodasi hak PPKK dalam alokasi pembagian hasil kerjasama, serta melakukan upaya hukum atas permasalahan tersebut;
 - Memerintahkan direksi melakukan renegotiasi atas pencantuman klausul perjanjian terkait kontribusi/pembayaran kompensasi awal diperhitungkan sebagai modal saham dengan menagihkan kontribusi/pembayaran kompensasi awal yang belum diterima dalam bentuk hibah; dan
 - Memerintahkan direksi untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- 5.21 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset tetap pada BLU per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 19.

Pemerintah Daerah

- 5.22 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan aset tetap pada 21 entitas pemerintah daerah yang terdiri atas satu pemerintah provinsi dan 20 pemerintah kabupaten/kota.
- 5.23 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah telah mengungkap sebanyak 352 kasus senilai Rp51.716,10 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 148 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 204 kasus senilai Rp51.716,10 juta. Dari jumlah kasus diatas terdapat penyerahan aset/penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan senilai Rp180,68 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus serta penyerahan/penyetoran selama proses pemeriksaan per kelompok temuan disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					3E	Total
		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi			
Jumlah Kasus	148	10	27	5	151	11	204	
Nilai Kasus	-	2.854,89	46.868,56	783,47	-	1.209,18	51.716,10	
Jumlah Entitas	21	9	13	5	21	8	21*	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	153,47	-	27,21	-	-	180,68	

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern

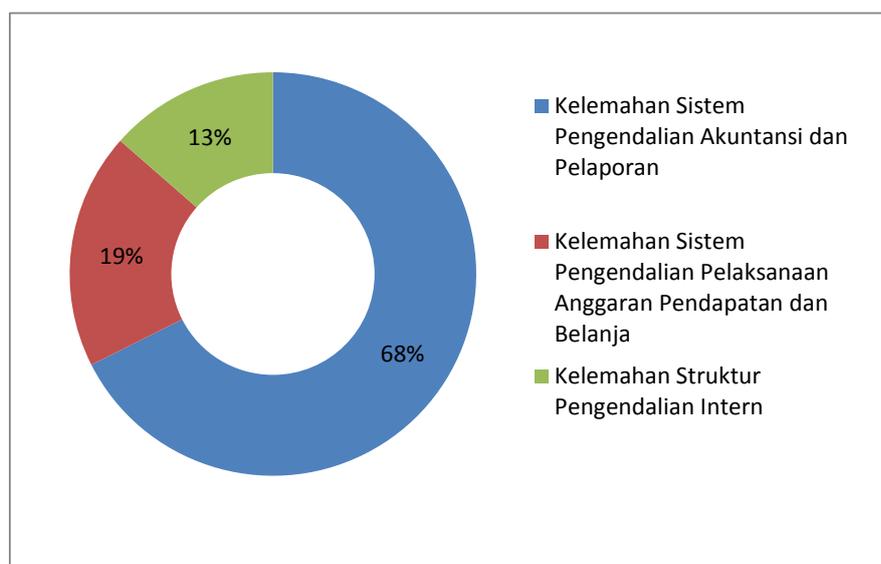
3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 5.24 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah disajikan pada Lampiran 17.

Sistem Pengendalian Intern

- 5.25 Hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat 148 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 100 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 28 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 20 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 5.2.

Grafik 5.2 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah

- 5.26 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di 21 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti barang milik daerah (BMD) yang rusak berat, hilang/tidak diketahui keberadaannya namun masih tercatat dalam kartu inventaris barang (KIB), pengklasifikasian hasil pengadaan belanja modal sebagai aset tetap tidak sesuai peraturan bupati, dan bangunan lama yang telah dimusnahkan masih tercatat dalam KIB dan tidak dilakukan proses penghapusan.
 - **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di sebelas entitas. Kasus-kasus tersebut seperti penetapan tarif sewa aset pemerintah daerah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, dan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga tidak didukung perjanjian pinjam pakai dan sewa.
 - **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di sebelas entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pengelolaan BMD antara lain status penggunaan BMD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum didukung dengan keputusan kepala daerah, pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara dan persyaratan penyerahan prasarana dan sarana dan utilitas dari pengembang perumahan dan pemukiman, dan pengelolaan bukti kepemilikan tidak dilaksanakan dengan tertib antara lain BPKB kendaraan tidak ada dan bukti sertifikat yang disimpan hanya berupa fotocopy.

Penyebab

- 5.27 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pengelola keuangan dan barang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, belum ada kebijakan dan prosedur yang jelas tentang pengelolaan BMD, dan pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 5.28 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, membuat perjanjian sewa yang mengatur hak dan kewajiban penggunaan aset oleh pihak lain, serta menyusun peraturan terkait pengelolaan BMD.
- 5.29 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 18.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 5.30 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 204 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di 21 entitas senilai Rp51.716,10 juta yang disajikan dalam Tabel 5.5.

Tabel 5.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	-	-	10	2.854,89	10	2.854,89
2	Potensi Kerugian Daerah	5	14.234,92	22	32.633,64	27	46.868,56
3	Kekurangan Penerimaan	-	-	5	783,47	5	783,47
4	Kelemahan Administrasi	9	-	142	-	151	-
5	Ketidakefektifan	-	-	11	1.209,18	11	1.209,18
	Jumlah	14	14.234,92	190	37.481,18	204	51.716,10

- 5.31 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah mengungkap sebanyak 10 kasus kerugian daerah senilai Rp2.854,89 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 7 kasus senilai Rp607,79 juta.
- 5.32 Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp2.219,74 juta**, yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dan Kota Tidore Kepulauan, yaitu realisasi fisik tidak sesuai kontrak tetapi pembayaran telah dilakukan seluruhnya, sehingga terdapat kerugian dari selisih antara uang yang telah dibayarkan dengan nilai prestasi pekerjaan dan atau barang yang diterima, antara lain untuk pengadaan meubelair dan pemeliharaan mesin genset.
 - **Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp24.425,55 juta**, yang terjadi di delapan entitas antara lain Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Yahukimo dan Kota Tidore Kepulauan. Kasus-kasus tersebut antara lain seperti kendaraan dinas, peralatan dan mesin yang tercatat pada KIB namun fisiknya tidak diketahui pemakai/penanggungjawab kendaraan dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
 - **Aset dikuasai pihak lain senilai Rp22.376,51 juta**, yang terjadi di sepuluh entitas antara lain Kabupaten Yahukimo, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Polewali Mandar. Kasus-kasus tersebut seperti aset yang dikuasai

dan dimanfaatkan pihak ketiga namun belum memiliki dasar pinjam pakai, terdapat aset berupa gedung dan bangunan serta kendaraan yang dikuasai oleh masyarakat umum yang tidak berhak dan terdapat bangunan rumah dinas yang masih ditempati pegawai pensiunan.

- **Penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan pekerjaan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah senilai Rp603,64 juta** yang terjadi di tiga entitas yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tulungagung dan Kota Gorontalo. Kasus-kasus tersebut seperti pendapatan dari sewa kios dan hasil lelang kendaraan yang belum diterima dan tidak ada perjanjian yang dapat dijadikan dasar untuk menagih, serta partisipasi pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga belum dibayarkan sesuai perjanjian.
- **Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah** yang terjadi di 21 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pengelolaan aset tanah oleh pihak ketiga tidak didukung perjanjian yang memadai (hanya berupa surat pernyataan), penyimpanan bukti kepemilikan aset belum memadai dan KIB belum disusun secara rinci dan lengkap.
- **Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah** yang terjadi di 17 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti aset kendaraan dan alat berat yang digunakan oleh SKPD yang diperoleh dari dana selain APBD namun belum didukung dengan berita acara penyerahan/berita acara hibah, serta terdapat kendaraan dan tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan.
- **Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp1.209,18 juta**, yang terjadi di delapan entitas antara lain Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Magetan dan Kota Gorontalo. Kasus-kasus tersebut seperti alat kesehatan pada beberapa puskesmas dan pembangunan kios pasar belum/tidak dimanfaatkan karena belum ada kesepakatan pengelolaan atas kios

5.33 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-kasus atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp180,68 juta, yaitu oleh Kota Tidore Kepulauan senilai Rp152,07 juta, Kabupaten Tulungagung senilai Rp27,21 juta, dan Kota Gorontalo senilai Rp1,40 juta.

Penyebab

5.34 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam pemanfaatan BMD.

- Panitia penjualan/penghapusan tidak segera menindaklanjuti pemenang lelang dengan membuat perjanjian jual beli, dan pengelola BMD lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan sewa kios dan ruko.
- Pengelola BMD dan para kepala SKPD selaku pengguna barang belum melakukan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMD.
- Kepala SKPD mengeluarkan kebijakan penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan fungsi kendaraan, serta kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan BMD.

Rekomendasi

- 5.35 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah/indikasi kerugian daerah dengan menyetorkan uang ke kas daerah.
 - Melakukan koordinasi dengan pihak SKPD terkait untuk menelusuri keberadaan fisik aset yang tidak diketahui keberadaannya, menertibkan BMD yang masih dipinjam pakai oleh pihak ketiga dan menelusuri bukti kepemilikannya.
 - Mengoptimalkan penagihan pendapatan sewa dan menyetorkan ke kas daerah, membuat perjanjian jual beli serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan BMD.
 - Menegur pengelola barang yang tidak tertib melakukan pengelolaan BMD, segera melakukan pengurusan bukti kepemilikan aset sesuai dengan ketentuan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian, serta segera mengoptimalkan pemanfaatan barang.
- 5.36 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 19.
- 5.37 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat atau *compact disc* (CD) terlampir.

BAB 6

Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)

- 6.1 Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya saing internasional, serta untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, infrastruktur mempunyai peran penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kurangnya kualitas pelayanan dan tertundanya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dapat menghambat laju pembangunan nasional.
- 6.2 Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Program percepatan pembangunan infrastruktur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 difokuskan antara lain pada bidang telekomunikasi.
- 6.3 Usaha pemerintah di bidang telekomunikasi sampai dengan Tahun 2008 menghasilkan tingkat penetrasi layanan telekomunikasi sambungan bergerak sebesar 61,72%, sambungan tetap 11,49% dan pengguna internet 11,30%. Penyediaan ketiga layanan tersebut juga masih terpusat di daerah perkotaan dan wilayah barat Indonesia.
- 6.4 Permasalahan utama dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan dan kualitas infrastruktur informasi yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi. Kondisi itu menyebabkan makin lebarnya kesenjangan digital (*digital divide*) antar daerah di Indonesia ataupun antara Indonesia dan negara lain.
- 6.5 Oleh karena itu, pemerintah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berupaya untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur, dengan salah satu fokusnya adalah di bidang infrastruktur telekomunikasi. Dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika sesuai dengan RPJM, Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemkominfo) mengimplemetasikan kegiatan antara lain berupa.

- **Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)**

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan pembangunan sarana umum untuk melakukan akses internet di ibukota kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah *universal service obligation* (USO). Pembangunan internet kecamatan tidak hanya untuk melakukan pembangunan ruang akses internet bersama akan tetapi juga akan

dilakukan *push konten* yang produktif dan juga portal konten-konten yang bermanfaat. Pembangunan tersebut mulai dilaksanakan pada Tahun 2010 dengan target jumlah titik layanan adalah lebih dari 5.748 titik.

- **Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan yang Bersifat Bergerak (MPLIK)**

Penyediaan *mobile* layanan internet kecamatan (MPLIK) merupakan Penyediaan Jasa PLIK yang bersifat bergerak. Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi, antara lain infrastruktur, sarana dan perangkat pendukung, pengoperasian dan pemeliharaan, kemampuan sistem, serta prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan.

- **Penyediaan Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan (SIMMLIK)**

SIMMLIK merupakan gerbang layanan internet kecamatan (*Gateway LIK*) di Jakarta yang memungkinkan layanan PLIK dapat diselenggarakan secara terpusat dan terjamin keberlangsungan layanannya. SIMMLIK memiliki fungsi manajemen jaringan dan *monitoring Service Level Agreement* (SLA) layanan internet kecamatan serta distribusi konten. Setiap PLIK yang berjumlah 5.748 dan MPLIK 1.907 Satuan Sambungan Layanan (SSL) wajib terhubung dengan SIMMLIK untuk mendapatkan layanan internet kecamatan berupa koneksi internet dan konten-konten yang disediakan oleh SIMMLIK.

- **Penyediaan Jasa Akses Internet SIMMLIK (*Upstream*)**

Penyediaan Jasa Akses Internet SIMMLIK merupakan penyediaan atas akses internet yang akan digunakan PLIK melalui SIMMLIK.

6.6 Pentingnya sektor telekomunikasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), membuat BPK pada semester II Tahun 2013 melakukan pemeriksaan terhadap penyediaan jasa PLIK, MPLIK, pekerjaan penyediaan SIMMLIK, dan pekerjaan jasa konsultasi serta sosialisasi yang terkait dengan penyediaan jasa PLIK dan MPLIK yang dilaksanakan mulai dari proses pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan penyediaan jasa periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013. Cakupan pemeriksaan tersebut di sajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Cakupan Pemeriksaan Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK

No.	Daerah	PLIK	MPLIK
1	Prov. Bangka Belitung	74	14
2	Prov. Sulawesi Utara	90	15
3	Prov. Maluku Utara	68	32
4	Sampling dari LKPD dan Pemeriksaan Kinerja	269	32
Total		501	93

Tujuan Pemeriksaan

- 6.7 Pemeriksaan atas penyediaan jasa PLIK dan MPLIK Tahun 2010 s.d. Tahun 2013 bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan atas kegiatan penyediaan jasa PLIK dan MPLIK serta kegiatan pendukungnya meliputi pekerjaan penyediaan SIMMLIK dan pekerjaan jasa konsultasi serta sosialisasi yang terkait dengan penyediaan jasa PLIK dan MPLIK pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemkominfo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan tujuan penyediaan jasa PLIK dan MPLIK.

Lingkup Pemeriksaan

- 6.8 Lingkup unsur yang diperiksa meliputi proses pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan penyediaan jasa PLIK, MPLIK, SIMMLIK, dan pekerjaan pengukuran kinerja kewajiban pelayanan umum (PK KPU)/USO; optimalisasi pemberdayaan dan sosialisasi publikasi KPU/USO yang terkait dengan penyediaan jasa PLIK dan MPLIK.

Hasil Pemeriksaan

- 6.9 Hasil pemeriksaan atas penyediaan jasa PLIK dan MLIK Tahun 2010 s.d. Tahun 2013 mengungkapkan sebanyak 46 kasus senilai Rp149.291,41 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 4 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 42 kasus senilai Rp149.291,41 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Kelompok Temuan atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	4	4	7	2	17	12	42
Nilai Kasus	-	5.837,46	45.565,98	807,60	-	97.080,37	149.291,41

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern

3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

- 6.10 Daftar kelompok temuan menurut entitas atas penyediaan jasa PLIK dan MPLIK disajikan pada Lampiran 20.

Sistem Pengendalian Intern

- 6.11 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 4 kasus kelemahan struktur pengendalian intern yaitu 3 kasus sistem operasional prosedur (SOP) yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, serta 1 kasus entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
- 6.12 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut adalah.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yaitu terdapat pungutan kepada mitra/pengelola PLIK/MPLIK oleh penyedia jasa dan terdapat 7 PLIK terpasang di Provinsi Maluku Utara yang tidak didukung dengan kontrak.
 - **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yaitu setiap perubahan *internet protocol* (IP) *hostname* dan lokasi PLIK pada aplikasi SIMMLIK belum pernah dilakukan *updating* oleh penyedia jasa.

Penyebab

- 6.13 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut terjadi karena Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) selaku PPK tidak melakukan pengendalian secara optimal, serta tidak membuat SOP terkait *updating* data atas jumlah IP PLIK untuk penyedia SIMMLIK. Selain itu, juga disebabkan PPK tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLIK.

Rekomendasi

- 6.14 Terhadap kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika agar memerintahkan Kepala BP3TI selaku PPK untuk membuat SOP terkait *updating* data IP NOC SIMMLIK dan memerintahkan penyedia jasa untuk melakukan tindakan hukum kepada oknum yang mengatasnamakan penyedia jasa yang telah memungut biaya dari mitra/operator. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan sanksi kepada PPK yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLIK.
- 6.15 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap penyediaan jasa PLIK dan MPLIK per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 21.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 6.16 Hasil pemeriksaan atas penyediaan jasa PLIK dan MPLIK mengungkap sebanyak 42 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp149.291,41 juta yang disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kerugian Negara	4	5.837,46
2	Potensi Kerugian Negara	7	45.565,98
3	Kekurangan Penerimaan	2	807,60
4	Kelemahan Administrasi	17	-
5	Ketidakefektifan	12	97.080,37
	Jumlah	42	149.291,41

- 6.17 Hasil pemeriksaan atas penyediaan jasa PLIK dan MPLIK mengungkap sebanyak empat kasus kerugian negara senilai Rp5.837,46 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian kerugian negara sebanyak satu kasus senilai Rp780,60 juta.
- 6.18 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas penyediaan jasa PLIK dan MPLIK disajikan pada Lampiran 20.
- 6.19 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya sebagai berikut.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp5.837,46 juta**, seperti kelebihan pembayaran biaya sewa ruang dan konsumsi pada optimalisasi PLIK, kelebihan pembayaran atas biaya sosialisasi dan publikasi untuk penyediaan moderator, hotel, sewa *sound system* dan lainnya, serta terdapat kelebihan pembayaran survei atas pekerjaan PK USO.
 - **Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya senilai Rp45.565,98 juta**, seperti terdapat selisih pembayaran menurut berita acara rekon dengan data portal MPLIK Lintasarta, terdapat beberapa PLIK dan MPLIK yang tidak beroperasi tetapi tetap dibayar, dan terdapat perbedaan jumlah dan nilai PLIK antara rekap pembayaran dan *log file*, serta terdapat perangkat PLIK yang tidak terpasang tetapi penyedia jasa tetap menagih dan tetap dibayar oleh BP3TI.

- **Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai Rp807,60 juta**, yaitu terdapat pekerjaan penyediaan MPLIK terpasang melewati batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan belum dipungut denda keterlambatan, serta pelaksanaan pekerjaan penyediaan MPLIK yang belum sepenuhnya memperhitungkan dan mengenakan sanksi denda pra operasional kepada penyedia jasa.
- **Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)**, yaitu terdapat proses pelelangan untuk menentukan pelaksana PLIK dan MPLIK tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 di antaranya terdapat kesalahan perhitungan pembobotan dan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didukung dengan data atau informasi yang relevan.
- **Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal senilai Rp89.910,16 juta**, yaitu terdapat subsidi operasional PLIK dan MPLIK yang tidak disampaikan penyedia jasa kepada mitra/pengelola serta terdapat pungutan oleh penyedia jasa kepada mitra/pengelola sehingga tujuan penyediaan internet bersubsidi tidak tercapai.

6.20 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena:

- Kepala BP3TI selaku KPA dan PPK lalai tidak membuat SOP verifikasi dan pembayaran untuk menguji kebenaran dokumen pertanggungjawaban dan tidak optimal dalam melakukan pengendalian kegiatan, serta tidak tegas memberlakukan SIMMLIK untuk menilai uji fungsi dan uji integrasi MPLIK;
- Tim pemeriksa tagihan dan tim pemeriksa barang lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- BP3TI belum menetapkan sanksi denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahap pra operasional;
- Kepala BP3TI selaku PPK lalai menggugurkan peserta lelang dan mengusulkan peserta lain selaku pemenang dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang pada awalnya PPK menyetujui dan menetapkan usulan urutan calon pemenang PLIK dan MPLIK, serta panitia pelelangan tidak cermat dalam mengevaluasi proses pelelangan; dan
- Kepala BP3TI selaku PPK tidak melakukan pengendalian secara optimal atas perjanjian antara penyedia jasa dengan mitra/pengelola, dan Inspektorat Jenderal selaku pengawas intern pemerintah belum melakukan pengawasan pada tiap tahap pelaksanaan pekerjaan.

6.21 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika antara lain agar

- memberikan sanksi kepada PPK yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PLIK dan MPLIK, serta memerintahkan kepada penyedia jasa untuk melakukan tindakan hukum kepada oknum yang mengatasnamakan penyedia jasa yang telah memungut biaya dari mitra/operator;
 - memproses TGR, menarik, dan menyetorkan kelebihan bayar, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala BP3TI, tim pemeriksa tagihan dan tim penerima barang karena lalai menjalankan tugas dan fungsinya;
 - memperhitungkan kembali kelebihan pembayaran PLIK dan MPLIK dengan pembayaran termin berikutnya, menghentikan sementara pembayaran PLIK dan MPLIK sampai diuji oleh inspektorat, dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala BP3TI dan Kasie Operasional Monitoring yang tidak cermat menetapkan SOP rekonsiliasi dan pembayaran pekerjaan;
 - menarik dan menyetorkan denda keterlambatan dan denda pra operasional ke kas negara, serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala BP3TI dan Kasie Operasional Monitoring yang tidak cermat menghitung denda keterlambatan pra operasional;
 - memberikan sanksi kepada Kepala BP3TI selaku PPK karena tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan lelang, dan Panitia Pelelangan yang tidak cermat dalam mengevaluasi proses pelelangan; dan
 - memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala BP3TI selaku PPK yang tidak optimal melakukan pengendalian perjanjian penyedia jasa dengan mitra/pengelola, dan memerintahkan Inspektur Jenderal memeriksa perjanjian penyedia jasa dengan mitra/operator untuk memastikan apakah semua informasi tentang hak dan kewajiban penyedia jasa sudah dilaksanakan oleh penyedia jasa serta dipahami dan diketahui oleh mitra/operator secara jelas.
- 6.22 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap penyediaan jasa PLIK dan MPLIK per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 22.
- 6.23 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 7

Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

- 7.1 Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7.2 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi pada 8 entitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk 8 wilayah kerja (WK).
- 7.3 Entitas KKKS pada tiap-tiap WK tersebut meliputi KKKS BP Indonesia Ltd WK Berau, Muturi, dan Wiriangar (Tanggung Joint Venture), KKKS China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES Ltd WK South East Sumatera, KKKS Citic Seram Energy Limited (CSEL) WK Seram Non Bula, KKKS Petrochina International Jabung Ltd (PCJL) WK Jabung, KKKS Hess Indonesia Pangkah Ltd WK Pangkah, KKKS Vico Indonesia WK Sanga-sanga, KKKS Energi Mega Persada Malacca Strait S.A (EMP MSSA) WK Malacca Strait, dan KKKS Star Energy (Kakap) Ltd (SEKL) WK Kakap.
- 7.4 Cakupan pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi pada delapan KKKS adalah senilai USD8,909.21 juta ekuivalen Rp108.594,36 miliar dari realisasi *gross revenue* senilai USD8,909.21 juta ekuivalen Rp108.594,36 miliar.

Tujuan Pemeriksaan

- 7.5 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi adalah untuk menilai kewajaran perhitungan volume dan nilai *lifting* minyak mentah dan gas, *cost recovery* (biaya yang dimintakan penggantian), termasuk pembebanan biaya dari *home office* yang dilakukan oleh KKKS, serta perhitungan *equity to be split* (bagi hasil) bagian pemerintah dan bagian kontraktor.

Hasil Pemeriksaan

- 7.6 Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi telah mengungkap sebanyak 92 kasus senilai USD81,614.96 ribu ekuivalen Rp994.804,75 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 13 kasus di 6 KKKS dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 79 kasus senilai USD81,614.96 ribu ekuivalen Rp994.804,75 juta yang terjadi di 8 KKKS. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Kelompok Temuan atas Pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi

(nilai dalam ribu USD dan juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Negara	Potensi Kerugian negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	13	-	-	68	10	1	79
Nilai Kasus	-	-	-	USD81,614.96	-	-	USD81,614.96
Ekuivalen Rp	-	-	-	994.804,75	-	-	994.804,75
Jumlah Entitas	6	-	-	8	6	1	8*

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern

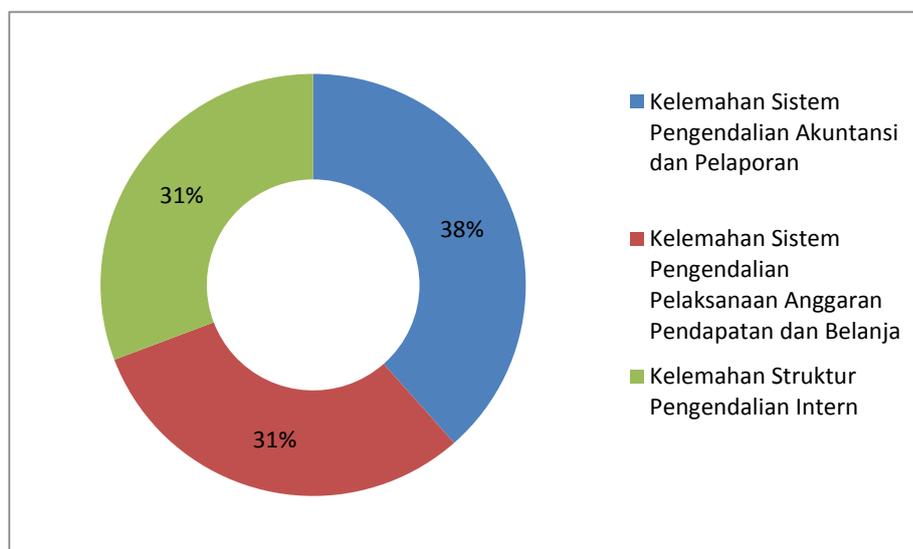
3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 7.7 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi disajikan pada Lampiran 23.

Sistem Pengendalian Intern

- 7.8 Hasil pemeriksaan SPI atas pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi menunjukkan terdapat 13 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 5 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 4 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi disajikan dalam Grafik 7.1.

Grafik 7.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi

7.9 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di 3 KKKS. Kasus tersebut seperti Aset *Liquefied Natural Gas (LNG) Plant* Tangguh belum dicatat sebagai barang milik negara dalam daftar aset KKKS yang dikelola SKK MIGAS, dan terdapat kesalahan pengelompokan/klasifikasi jenis sset antara daftar aset harta benda modal dengan daftar aset harta benda inventaris. Selain itu terdapat pengeluaran biaya terkait produksi gas yang seharusnya dibebankan pada pendapatan gas, namun dibebankan pada pendapatan minyak seperti pengeluaran biaya untuk jasa penasehat komersial gas, kegiatan *radiography* untuk *gas sales*, dan biaya terkait jual beli gas.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di dua KKKS. Kasus tersebut seperti perubahan *Floating Storage Offloading (FSO) Area North Business Unit* dengan menggunakan *temporary storage tanker* mengakibatkan peningkatan biaya, dan realisasi pekerjaan sewa alat berat tidak sesuai spesifikasi kontrak dan belum dilakukan penyesuaian tarif atas perubahan spesifikasi tersebut yang mengakibatkan biaya sewa alat berat berpotensi dibayarkan lebih tinggi.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di satu entitas. Kasus tersebut seperti KKKS dalam melakukan pengalihan pekerjaan *Flowline Installation* kepada rekanan pengganti kurang memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Kerja (PTK), dan kontrak yang digunakan sebagai dasar pengalihan tidak dilakukan amandemen atau perubahan lingkup kerja. Selain itu terdapat pengelolaan aset KKKS belum sepenuhnya berpedoman pada PTK seperti belum dilakukan identifikasi terkait pemakaian bersama aset KKKS.

Penyebab

7.10 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena SKK MIGAS belum merancang satu sistem pelaporan yang memadai untuk mencatat aset-aset yang berasal dari Tangguh *Joint Venture Agreement*, manajemen KKKS mengambil tindakan yang tidak tepat untuk operasional FSO, serta KKKS dalam melaksanakan kegiatan belum mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam PTK seperti dalam pengadaan barang, pengelolaan aset, dan verifikasi biaya.

Rekomendasi

7.11 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada KKKS antara lain agar SKK MIGAS melakukan penyesuaian terhadap Sistem Informasi Aset sehingga aset LNG Tangguh dapat dicatat sebagai BMN, melakukan kajian mendalam model operasional yang efisien untuk Terminal Widuri dengan memperhitungkan aspek keuangan dan aspek

keamanan, dan menyesuaikan tarif sewa alat berat. Selain itu BPK juga merekomendasikan agar KKKS memedomani PTK sesuai ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang, pengelolaan aset dan verifikasi biaya, serta melakukan koreksi pembebanan biaya (*reclass*) dari pendapatan minyak ke pendapatan gas.

- 7.12 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 24.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 7.13 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 79 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 8 KKKS senilai USD81,614.96 ribu ekuivalen Rp994.804,75 juta yang disajikan dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan KKS Minyak dan Gas Bumi

(nilai dalam ribu USD dan juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah KKKS	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
1	Kekurangan Penerimaan	8	68	USD 81,614.96
2	Administrasi	6	10	
3	Ketidakefektifan	1	1	
	Total	8*	79	USD 81,614,96
	Ekuivalen (Rupiah)			994.804,75

*Total untuk jumlah KKKS bukan merupakan penjumlahan

- 7.14 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Koreksi perhitungan *cost recovery* senilai USD68,556.62 ribu ekuivalen Rp835.636,64 juta.** Koreksi tersebut berasal dari koreksi *cost recovery* yang terjadi di 8 KKKS yang diperiksa sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.3.

Tabel 7.3. Koreksi Cost Recovery Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

(nilai dalam ribu USD dan juta rupiah)

No	KKKS	Koreksi Cost Recovery
1	BP Indonesia Ltd WK Berau, Muturi, dan Wiriangar (Tanggung Joint Venture)	USD 23,019.52
2	CNOOC SES Ltd WK South East Sumatera	USD 9,392.54
3	Citic Seram Energy Ltd WK Seram Non Bula	USD 363.95
4	Petrochina International Jabung Ltd WK Jabung	USD 744.02
5	Hess Indonesia Pangkah Ltd WK Pangkah	USD 24,915.90
6	Vico Indonesia WK Sanga-Sanga	USD 5,553.66
7	Energi Mega Persada Malacca Strait S.A WK Malacca Strait	USD 2,321.69
8	Star Energy (Kakap) Ltd WK Kakap	USD 2,245.34
	Jumlah	USD 68,556.62
	Ekuivalen (Rupiah)	835.636,64

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Koreksi tersebut terjadi antara lain karena penetapan harga kontrak *Jack Up Drilling Rig* melebihi harga perkiraan sendiri (HPS)/owner estimate (OE), pembebanan biaya depresiasi atas proyek pengembangan dan pembebanan biaya depresiasi aset *waste water treatment* yang belum memperoleh persetujuan *placed into service* (PIS), serta pembebanan biaya *letter of credit* ke dalam *cost of sales* Tahun 2012.

- **Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara senilai USD13,058.34 ribu ekuivalen Rp159.168,11 juta**, yang terjadi di 3 KKKS yaitu KKKS CNOOC SES Ltd WK *South East Sumatera*, KKKS Citic Seram Energy Limited WK Seram Non Bula dan KKKS Energi Mega Persada Malacca Strait S.A WK Malacca Strait. Kasus tersebut seperti pembayaran pajak penghasilan pemegang *participating interest* WK *South East Sumatera* tidak sesuai tarif *production sharing contract* (PSC), KKKS belum memenuhi kewajiban perpajakan Tahun 2012 (Pajak Perseroan dan Pajak Bunga Dividen dan Royalti (PPs/PBDR)), dan denda keterlambatan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai belum disetor ke kas negara dan berpotensi disalahgunakan.

Penyebab

- 7.15 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi karena pengendalian intern SKK MIGAS atas analisa kewajaran harga kontrak *rig* dan penunjukan pemenang pengadaan *rig* kurang optimal, KKKS tidak cermat dalam melakukan pembebanan biaya proyek, dan KKKS belum memenuhi persyaratan dalam persetujuan *authorization for expenditure* (AFE) dan ketentuan terkait *placed into service*.

- 7.16 Selain itu kasus tersebut juga disebabkan KKKS tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh SKK MIGAS dan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan pemerintah dhi. SKK MIGAS belum melaksanakan rekomendasi BPK untuk melakukan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap pemegang *participating interest* (PI) yang menggunakan *tax treaty*.

Rekomendasi

- 7.17 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK merekomendasikan kepada SKK MIGAS dan KKKS antara lain agar melakukan koreksi *cost recovery*, menunda pembebanan selisih kontrak *rig* dibandingkan OE dan mengeluarkan dari biaya operasi sampai dengan hasil evaluasi SKK MIGAS diperoleh, memerintahkan KKKS membayar selisih perhitungan pajak penghasilan dan kewajiban PPs dan PBDR ke kas negara, serta Pemerintah dhi. SKK MIGAS agar melakukan amandemen PSC dan/atau amandemen *tax treaty* terhadap pemegang PI yang menggunakan *tax treaty*, dan memberitahukan kepada KPP Migas untuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) agar dapat menyetorkan denda keterlambatan ke kas negara.
- 7.18 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan KKS minyak dan gas bumi per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 25.
- 7.19 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 8

Operasional BUMN

- 8.1 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional BUMN pada 29 objek pemeriksaan.
- 8.2 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMN telah mengungkap sebanyak 528 kasus senilai Rp2.395.149,00 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 263 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 265 kasus senilai Rp2.395.149,00 juta. Dari jumlah kasus di atas telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan senilai Rp2.351,84 juta pada proses pemeriksaan. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Kelompok Temuan atas Operasional BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

Subtema	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan		Nilai Penyetoran
	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	
Pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN	160	170	1.701.102,81	2.351,84
Pengelolaan kawasan industri	46	36	20.754,43	-
Kegiatan pemupukan	19	31	102.914,96	-
Bina Lingkungan BUMN Peduli	8	5	163.949,53	-
BUMN lainnya	30	23	406.427,27	-
Total	263	265	2.395.149,00	2.351,84

- 8.3 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional BUMN terdiri dari 5 subtema, yaitu:
- Pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN;
 - Pengelolaan Kawasan Industri;
 - Kegiatan Pemupukan;
 - Program Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli; dan
 - BUMN lainnya.
- 8.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema operasional BUMN disajikan pada uraian berikut.

Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

- 8.5 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi atas 14 objek pemeriksaan di BUMN yaitu PT Jasa Raharja (Persero) (PT JR), PT Angkasa Pura I (Persero) (PT AP I) dan PT Angkasa Pura II (Persero) (PT AP II), PT Pertamina (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Dahana (Persero), PT Pindad (Persero), PT Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia (PPI), PT Inhutani I (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (PT RNI) dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (PT BKI).
- 8.6 Cakupan pemeriksaan pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN adalah senilai Rp60.510.123,89 juta dari realisasi senilai Rp71.974.494,67 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 8.7 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi adalah untuk menilai apakah
- pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi/ belanja modal telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pelaksanaan/pengelolaan realisasi pendapatan, biaya dan investasi/ belanja modal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 8.8 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN telah mengungkap sebanyak 330 kasus senilai Rp1.701.102,81 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 160 kasus di 14 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 170 kasus senilai Rp1.701.102,81 juta di 14 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	160	20	23	43	41	43	170
Nilai temuan	-	117.040,81	1.344.642,50	56.021,01	-	183.398,49	1.701.102,81
Jumlah Entitas	14	8	13	12	11	14	14*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan		367,68	1.826,96	157,20	-	-	2.351,84

Keterangan:

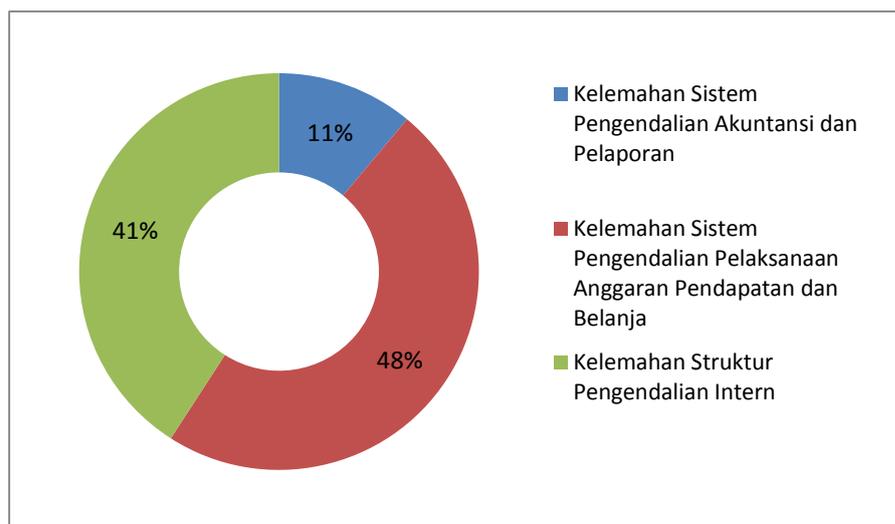
SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.9 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN disajikan pada Lampiran 26.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.10 Hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN mengungkap sebanyak 160 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 18 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 77 kasus sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 65 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN disajikan dalam Grafik 8.1.

Grafik 8.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

8.11 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di sembilan entitas, antara lain PT RNI, PT AP II dan PT Semen Baturaja. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat pengelolaan hasil produksi tetes kurang profesional antara lain tidak menjaga suhu dan sirkulasi tetes yang menimbulkan pengurangan (tetes yang rusak) sehingga perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan, perusahaan belum membuat perikatan atas penyelenggaraan pelayanan pengisian bahan bakar pesawat udara di bandara, dan proses tender peralatan utama pembangunan *cement mill* dan *packer* terlambat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan perusahaan.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 13 entitas, antara lain PT Pindad, PT Garam dan PT AP II. Kasus-kasus tersebut seperti belum ada prosedur mengenai penyusunan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa, serta prosedur mekanisme pendapatan pelayanan jasa penerbangan (PJP) dan pelayanan jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara (PJP4U) tidak memadai.
- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di delapan entitas, antara lain PT Semen Baturaja, Perum Perikanan Indonesia, dan PT Inhutani I. Kasus-kasus tersebut seperti adanya selisih saldo kas dan setara kas yang tidak dapat dijelaskan, pengakuan dan pencatatan aktiva tetap berupa tanah dan bangunan dalam laporan keuangan kurang lengkap dan tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. Selain itu, terdapat kelebihan pengakuan pendapatan karena tidak mencatat volume penjualan berdasarkan berita acara serah terima.

Penyebab

8.12 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat terkait belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, belum adanya peraturan/SOP terkait prosedur tertentu, perjanjian kerja sama belum dibuat, koordinasi yang lemah, serta pejabat yang bertanggung jawab belum melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian secara optimal.

Rekomendasi

8.13 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menyusun dan menetapkan SOP, dan membuat perjanjian kerja sama. BPK juga merekomendasikan agar entitas meningkatkan koordinasi serta lebih mengoptimalkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

8.14 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 27.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.15 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 170 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 14 BUMN senilai Rp1.701.102,81 juta yang disajikan dalam Tabel 8.3.

Tabel 8.3. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Perusahaan	20	117.040,81
2	Potensi Kerugian Perusahaan	23	1.344.642,50
3	Kekurangan Penerimaan	43	56.021,01
4	Kelemahan Administrasi	41	-
5	Ketidakhematan	18	36.865,05
6	Ketidakefisienan	5	128.083,46
7	Ketidakefektifan	20	18.449,98
	Jumlah	170	1.701.102,81

- 8.16 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp45.488,34 juta**, yang terjadi di lima entitas, yaitu PT JR, PT BKI, PT Dahana, PT Inhutani I dan PT RNI. Kasus-kasus tersebut seperti pemberian potongan iuran wajib pesawat udara (IWPU) kepada operator penerbangan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964, terdapat kelebihan pembayaran tenaga kerja berupa pesangon yang dibayar tiap bulan yang tidak diatur dalam surat perjanjian, dan pemberian biaya representasi melebihi ketentuan direksi.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp1.338.451,76 juta**, yang terjadi di delapan entitas, antara lain PT RNI, PT Inhutani I, dan PT Pindad. Kasus-kasus tersebut seperti penyelesaian pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) tidak jelas dan pasti, pemungutan hasil hutan yang dikerjasamakan dengan beberapa mitra usaha tidak sesuai kontrak sehingga masih ada saldo hutang tertunggak, serta piutang penjualan *air brake system* yang telah berusia lebih dari satu tahun berpotensi tidak tertagih.
- **Penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp41.468,72 juta**, yang terjadi di sebelas entitas, antara lain PT AP I, PT AP II dan PT Semen Baturaja. Kasus-kasus tersebut di antaranya seperti penagihan *fuel throughput charge* Bandara

Internasional Juanda Surabaya masa November 2012 s.d. Juni 2013 belum diterima, belum menerima pendapatan sewa hangar dan apron yang masih dipergunakan oleh perusahaan penerbangan yang telah dinyatakan pailit, serta terdapat kekurangan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- **Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp30.895,22 juta**, yang terjadi di tujuh entitas antara lain PT Semen Baturaja, PT Garuda, dan PT JM. Kasus-kasus tersebut di antaranya terdapat selisih antara harga pokok klinker impor dan harga pokok klinker produksi sendiri yang seharusnya dapat diminimalisir, premi asuransi penerbangan yang tidak ekonomis antara lain mencakup *aircraft third party liability* yang seharusnya menjadi tanggung jawab *lessor* dan perhitungan asuransi yang tidak cermat, serta kemahalan harga atas pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan umum LED tenaga surya.
- **Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp128.083,46 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PT RNI dan PT Garam. Kasus-kasus tersebut seperti jam berhenti giling pada pabrik gula masih tinggi dan melebihi standar sehingga menimbulkan inefisiensi, investasi *boiler maxitherm* belum memberikan nilai tambah berupa efisiensi energi dalam bentuk bahan bakar yang dapat dihemat, serta susut proses garam olahan rekanan yang ditunjuk lebih besar dibandingkan susut proses PT Garam sehingga menimbulkan inefisiensi penggunaan garam bahan baku.

8.17 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan Dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan atas pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi BUMN telah dilakukan penyetoran ke kas perusahaan atau penyerahan aset senilai Rp2.351,84 juta yaitu oleh PT Jasa Marga senilai Rp497,28 juta, PT AP II senilai Rp157,20 juta dan PT Garuda Indonesia senilai Rp1.697,36 juta.

Penyebab

8.18 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan pejabat pelaksana dalam melaksanakan kegiatan belum memperhatikan ketentuan yang berlaku, kurang mempunyai itikad baik untuk secara berkala memprioritaskan pembayaran angsuran pinjaman RDI sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan, perencanaan jangka panjang belum komprehensif, belum melakukan analisa investasi secara mendalam, dan pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal

Rekomendasi

8.19 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada

pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memprioritaskan untuk secara berkala melakukan pembayaran angsuran pinjaman RDI sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan, memberikan sanksi kepada pejabat yang terbukti lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas, membuat dan menetapkan rencana jangka panjang yang komprehensif, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- 8.20 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pendapatan, biaya dan investasi BUMN per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 28.

Pengelolaan Kawasan Industri

- 8.21 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan kawasan industri Tahun Buku 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada 7 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, yaitu PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau (PDIP) Batam (Persero), PT Kawasan Industri Medan (KIM) (Persero), PT Kawasan Industri Makasar (KIMA) (Persero), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) (Persero), PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) (Persero), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) (Persero), dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (Persero).

- 8.22 Cakupan pemeriksaan pengelolaan kawasan industri pada 7 BUMN adalah senilai Rp2.942.450,16 juta dari realisasi anggaran senilai Rp3.766.036,07 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 8.23 Tujuan pemeriksaan atas pengelolaan kawasan industri adalah
- untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menilai resiko dan kecukupan pengendalian untuk mengamankan kekayaan perusahaan serta menilai apakah sistem pengendalian tersebut telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 8.24 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kawasan industri telah mengungkap sebanyak 82 kasus senilai Rp20.754,43 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 46 kasus yang terjadi di 7 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 36 kasus senilai Rp20.754,43 juta yang terjadi di 7 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.4.

Tabel 8.4. Kelompok Temuan atas Pengelolaan Kawasan Industri

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	46	9	4	11	10	2	36
Nilai kasus	-	4.556,40	6.087,78	9.516,49	-	593,76	20.754,43
Jumlah Entitas	7	5	3	6	5	1	7*

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

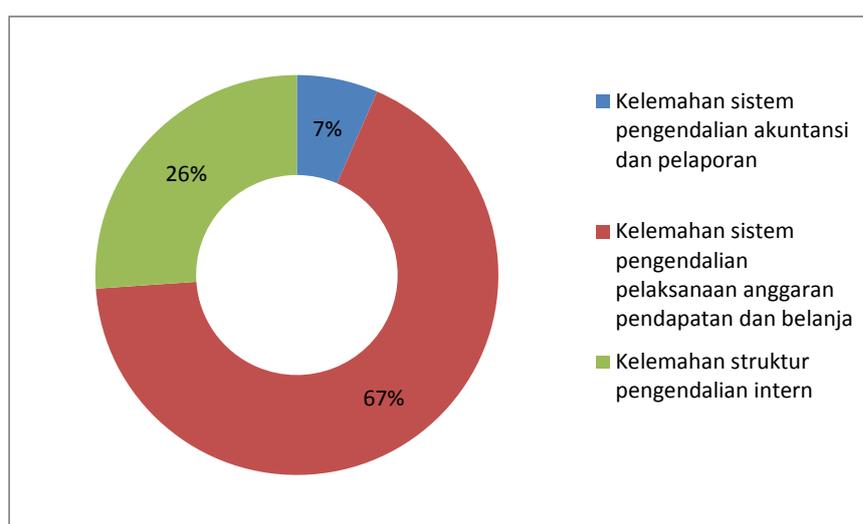
* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.25 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas pengelolaan kawasan industri disajikan pada lampiran 29.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.26 Hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan kawasan industri mengungkap sebanyak 46 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 31 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 12 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan kawasan industri disajikan dalam Grafik 8.2.

Grafik 8.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan Kawasan Industri



- 8.27 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di enam entitas, antara lain PT KBN, PT KIMA, dan PT JIEP. Kasus-

kasus tersebut seperti pengadaan *head truck* tidak sesuai ketentuan dan berlarut-larut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dari pengelolaan *head truck* dan terdapat potensi pendapatan yang hilang akibat tidak dilakukannya penyesuaian harga sewa tanah dan bangunan sebesar 10% setiap 5 tahun sesuai perjanjian sewa dan surat keputusan direksi. Selain itu, terdapat pengelolaan aset yang tidak optimal dimana ada lahan terlantar yang dimanfaatkan pihak lain tanpa izin dan tidak membayar sewa.

- **Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di lima entitas, yaitu PT PDIP Batam, PT KIM, PT KIMA, PT JIEP dan PT KBN. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat lahan perusahaan yang belum dimanfaatkan dan membebani keuangan perusahaan dalam bentuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan pengelolaan rusunawa milik Kementerian Perumahan Rakyat serta pembangunan sarana prasarana dan fasilitas utilitas membebani keuangan perusahaan. Selain itu, terdapat pembayaran biaya jasa konsultan hukum akibat dari permasalahan hukum gugatan kepemilikan tanah dan gugatan investor terkait perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan industri milik entitas.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di empat entitas yaitu PT PDIP Batam, PT KIMA, PT JIEP dan PT KBN. Kasus-kasus tersebut seperti penyewaan ruangan gudang tidak didukung dengan kontrak/perjanjian, pelaksanaan kerjasama pendirian anak perusahaan dalam rangka pengelolaan pelabuhan tidak sesuai dengan perjanjian dan pelaksanaannya terlambat, serta entitas melakukan penjualan tanah yang masih ada perikatan dengan pihak lain.

Penyebab

- 8.28 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena kelalaian pejabat terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan kajian teknis dan bisnis sebelum melakukan investasi, proses pembebasan lahan tanpa didasarkan dokumen dan bukti yang memadai, serta perjanjian pemberian HGB di atas HPL belum mengatur secara jelas hak, kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak. Selain itu, permasalahan juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi dengan pihak lain, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan pejabat yang bertanggung jawab.

Rekomendasi

- 8.29 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku, menyusun kebijakan yang mengatur mekanisme perencanaan dan pelaksanaan investasi/pengadaan barang dan jasa, serta melaksanakan

perjanjian sewa dengan investor secara tegas dan konsisten. BPK juga merekomendasikan agar mengintensifkan koordinasi dengan pihak lain, serta pejabat yang bertanggung jawab meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- 8.30 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan kawasan industri per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 30.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.31 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 36 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada tujuh BUMN senilai Rp20.754,43 juta yang disajikan dalam Tabel 8.5.

Tabel 8.5. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Kawasan Industri

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Perusahaan	9	4.556,40
2	Potensi Kerugian Perusahaan	4	6.087,78
3	Kekurangan Penerimaan	11	9.516,49
4	Kelemahan Administrasi	10	-
5	Ketidakhematan	2	593,76
	Jumlah	36	20.754,43

- 8.32 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penjualan/pertukaran/penghapusan aset perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan perusahaan senilai Rp3.920,94 juta**, yang terjadi di PT JIEP. Kasus tersebut yaitu penjualan tanah kavling dan perumahan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai dengan harga yang lebih rendah dari harga jual yang ditetapkan dan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp6.087,78 juta**, yang terjadi di tiga entitas, yaitu PT KIMA, PT SIER dan PT KBN. Kasus-kasus tersebut seperti piutang penjualan tanah kepada investor macet, piutang sewa lahan yang dilakukan tanpa surat perjanjian berpotensi tidak tertagih, dan piutang sewa gudang dan Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) oleh penyewa yang sudah tidak lagi berada di kawasan industri berpotensi tidak terbayar.
- **Penerimaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp9.301,74 juta**, yang terjadi di lima entitas, yaitu PT KIM, PT KIMA, PT SIER, PT JIEP dan PT KBN. Kasus-kasus tersebut seperti Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dibayar oleh pembeli tanah kavling serta entitas belum mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran piutang penjualan tanah dan biaya sewa pemakaian ruangan (BPR).

- **Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga senilai Rp593,76 juta**, yang terjadi di PT KIW. Kasus-kasus tersebut yaitu terjadi kelebihan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan pemadatan timbunan tanah dan kelebihan perhitungan harga satuan pembesian pekerjaan pembangunan perbaikan dinding gudang.

Penyebab

- 8.33 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan Direksi menetapkan kebijakan penjualan lahan dengan harga di bawah harga yang sebenarnya dan tanpa adanya persetujuan RUPS, pejabat terkait lalai serta tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan, serta ketidaktegasan manajemen entitas dalam membuat dan melaksanakan perjanjian sewa yang telah disepakati.
- 8.34 Selain itu, permasalahan tersebut terjadi karena pejabat terkait tidak intensif dalam menagih piutang/denda/PPN serta pengawasan dan pengendalian penanggung jawab belum optimal.

Rekomendasi

- 8.35 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar mempertanggungjawabkan permasalahan penjualan lahan yang mengakibatkan kerugian perusahaan kepada RUPS dan mengambil kebijakan untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan direksi, memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang lalai dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas, serta memerintahkan manajemen untuk melaksanakan perjanjian sewa secara tegas.
- 8.36 BPK juga merekomendasikan agar pimpinan entitas lebih mengintensifkan penagihan piutang/denda/PPN serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanggung jawab kegiatan.
- 8.37 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan kawasan industri per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 31.

Kegiatan Pemupukan

- 8.38 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa kegiatan pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada 4 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero), PTPN IV (Persero), PTPN V (Persero) dan PTPN VII (Persero).
- 8.39 Cakupan pemeriksaan kegiatan pemupukan pada 4 BUMN adalah senilai Rp2.955.828,90 juta dari realisasi anggaran senilai Rp2.955.828,90 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 8.40 Tujuan pemeriksaan atas kegiatan pemupukan adalah untuk:
- menilai kecukupan dan kepatuhan pengendalian intern dalam perencanaan kebutuhan pupuk, pengadaan pupuk, dan aplikasi/ pelaksanaan pemupukan; dan
 - menemukan adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak material terhadap perencanaan, pengadaan, dan aplikasi pemupukan.

Hasil Pemeriksaan

- 8.41 Hasil Pemeriksaan atas kegiatan pemupukan telah mengungkap sebanyak 50 kasus senilai Rp102.914,96 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 19 kasus yang terjadi di empat entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 31 kasus senilai Rp102.914,96 juta yang terjadi di empat entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.6.

Tabel 8.6 Kelompok Temuan atas Kegiatan Pemupukan

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	19	-	-	3	6	22	31
Nilai kasus	-	-	-	5.750,05	-	97.164,91	102.914,96
Jumlah Entitas	4	-	-	2	4	4	4*

Keterangan:

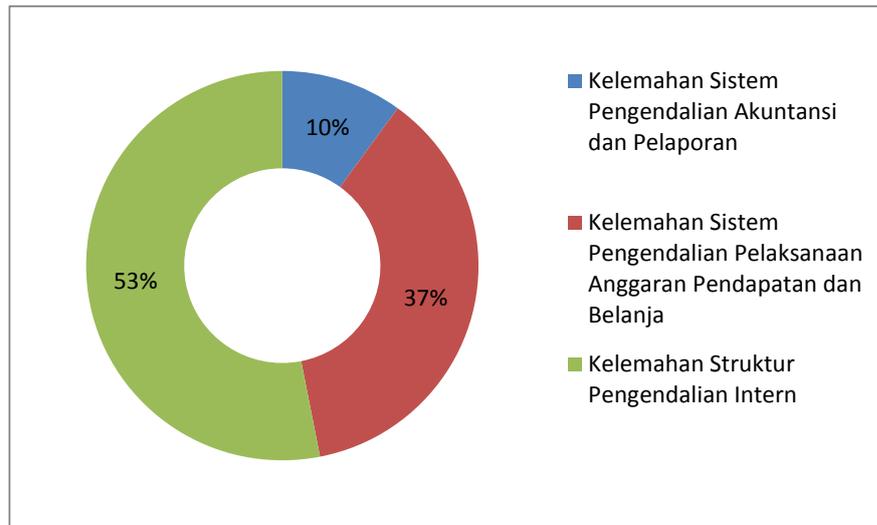
SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas
 * : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.42 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas kegiatan pemupukan disajikan pada Lampiran 32.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.43 Hasil pemeriksaan SPI terhadap kegiatan pemupukan menunjukkan terdapat 19 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 2 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 7 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas kegiatan pemupukan disajikan dalam Grafik 8.3.

Grafik 8.3 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Kegiatan Pemupukan



- 8.44 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di empat entitas. Kasus-kasus tersebut seperti belum adanya kebijakan internal yang mengatur perencanaan kebutuhan pupuk, cara aplikasi pemupukan, evaluasi aplikasi pemupukan, dan konversi dosis pupuk. Selain itu, pedoman pengadaan barang dan jasa belum mengatur tentang batasan jangka waktu dalam setiap tahapan proses pengadaan pupuk, serta pedoman penyusunan harga perkiraan sendiri kurang jelas dan rinci.
 - **Perencanaan kegiatan tidak memadai**, yang terjadi di tiga entitas. Kasus-kasus tersebut seperti perhitungan rencana kebutuhan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan riil di kebun, perencanaan dan pengadaan pupuk ekstra tidak memperhitungkan ketersediaan pupuk di kebun, serta persediaan pupuk yang memiliki formula yang berbeda dengan formula rekomendasi pemupukan telah digunakan tanpa melakukan konversi terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan formula yang direkomendasikan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS).

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yang terjadi di dua entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pencatatan persediaan pupuk tidak dilengkapi dengan informasi formula pupuk, dan terdapat selisih antara jumlah persediaan pupuk menurut pencatatan dalam kartu gudang dengan jumlah persediaan pupuk hasil cek fisik.

Penyebab

- 8.45 Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena entitas tidak melakukan reviu secara berkala terhadap efektivitas penerapan SOP yang telah dibuat dan kurang memiliki *awareness* terhadap kebutuhan SOP untuk beberapa pelaksanaan kegiatan pemupukan, pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam menyusun perencanaan, pengelola barang dan keuangan belum melaksanakan ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan.

Rekomendasi

- 8.46 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada entitas yang diperiksa antara lain agar menyusun SOP atau kebijakan internal yang diperlukan, memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola barang dan keuangan yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 8.47 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas kegiatan pemupukan per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 33.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.48 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 31 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 4 BUMN senilai Rp102.914,96 juta yang disajikan dalam Tabel 8.7.

Tabel 8.7 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Kegiatan Pemupukan

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
1	Kekurangan Penerimaan	3	5.750,05
2	Kelemahan Administrasi	6	-
3	Ketidakhematan	9	55.455,04
4	Ketidakefisienan	3	28.706,14
5	Ketidakefektifan	10	13.003,73
	Jumlah	31	102.914,96

8.49 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penerimaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp5.516,27 juta**, yang terjadi di dua entitas, yaitu PTPN III dan IV. Kasus tersebut adalah denda mutu unsur hara pupuk yang belum dikenakan kepada rekanan yang menyediakan pupuk tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis dalam kontrak.
- **Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan)**, yang terjadi di empat entitas. Kasus-kasus tersebut seperti peserta lelang pengadaan pupuk berada dalam satu kendali pemilik modal dan kepengurusan (perusahaan terafiliasi) sehingga tidak terjadi *fair competition* dalam pelelangan pengadaan pupuk, serta penyusunan HPS pengadaan pupuk belum sepenuhnya berdasarkan basis perhitungan yang jelas dan wajar. Selain itu, terdapat panitia pengadaan belum mengatur persyaratan dukungan ketersediaan pupuk dari produsen dan persyaratan mutu pupuk sesuai SNI dalam dokumen lelang pengadaan pupuk.
- **Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp32.579,91 juta**, yang terjadi di empat entitas, yaitu PTPN III, IV, V dan VII. Kasus-kasus tersebut seperti lembaga yang ditunjuk perusahaan untuk menyusun rekomendasi pemupukan melakukan kerjasama produksi dan pemasaran dengan salah satu produsen pupuk sehingga mempengaruhi independensi dan obyektivitas dalam pemberian rekomendasi, serta terdapat kekurangcermatan dalam penyusunan HPS yaitu membebankan PPN ganda yang berdampak pada ketidakhematan biaya pembelian pupuk. Selain itu terdapat kebun yang telah di-*replanting* (proses penanaman kembali areal yang telah ditanami tanaman usia tua dengan tujuan untuk peremajaan kebun) pada tahun 2012 dan 2013, tetapi dua tahun sebelum *replanting* masih dilakukan pemupukan sehingga biaya pemupukan tersebut merupakan pemborosan karena tidak berdampak terhadap produktivitas tanaman sebelum di-*replanting*.
- **Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya senilai Rp18.183,05 juta**, yang terjadi di PTPN VII. Kasus tersebut yaitu pemilihan jenis pupuk yang diadakan dan digunakan pada beberapa unit usaha/kebun kurang mempertimbangkan efisiensi biaya, seperti pemakaian pupuk tunggal yang lebih mahal dibandingkan dengan pupuk majemuk, dan pemakaian pupuk majemuk granuler yang lebih mahal dibandingkan dengan pupuk majemuk briket.
- **Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi senilai Rp9.516,56 juta**, yang terjadi di PTPN IV. Kasus tersebut adalah kebun-kebun kelapa sawit yang mendapat rekomendasi pemupukan yang dibuat oleh balai penelitian ARABIS lebih rendah produktivitasnya jika dibandingkan dengan produktivitas kebun lain yang mendapat rekomendasi dari balai penelitian PPKS.

Penyebab

- 8.50 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan rekanan tidak mempunyai itikad baik untuk menyediakan dan menyerahkan pupuk sesuai spesifikasi dalam kontrak, pelaksana kegiatan lalai dalam melaksanakan tugas dengan tidak mematuhi ketentuan, serta lembaga pemberi rekomendasi lalai dan kurang memiliki etika dengan melakukan kerja sama produksi dan pemasaran dengan produsen pupuk.
- 8.51 Selain itu permasalahan tersebut terjadi karena direksi tidak merencanakan pelaksanaan *replanting* secara komprehensif, kurang mempertimbangkan efisiensi biaya dalam mengambil kebijakan penentuan jenis pupuk yang digunakan, dan direksi tidak melakukan reviu atau evaluasi secara berkala atas efisiensi dan efektivitas penggunaan dua balai penelitian, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

- 8.52 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan BUMN yang diperiksa antara lain agar segera menagih denda mutu kepada pemasok pupuk dan menyetorkannya ke kas perusahaan, memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak menaati ketentuan serta meninjau ulang kerja sama dengan lembaga pemberi rekomendasi yang memiliki konflik kepentingan dan mempertimbangkan kembali penggunaan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut.
- 8.53 BPK juga merekomendasikan agar pimpinan BUMN mempertanggungjawabkan kepada Kementerian BUMN dan RUPS atas pelaksanaan *replanting* yang tidak didahului dengan perencanaan yang komprehensif, membuat kebijakan pemupukan berdasarkan hasil simulasi perhitungan rencana biaya pemupukan yang paling efisien di antara berbagai jenis pupuk yang direkomendasikan, mempertimbangkan kembali penunjukan balai penelitian yang rekomendasinya kurang efisien dan efektif, serta memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 8.54 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas kegiatan pemupukan per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 34.

Program Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli

- 8.55 Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Peduli (BL BUMN Peduli) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan (PK) Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (BL). Tujuan Program PK dan BL ini adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana untuk kegiatan PKBL tersebut bersumber dari laba setelah pajak masing-masing maksimal sebesar 2% (dua persen).
- 8.56 Dalam menunjang kegiatan PKBL, Kementerian BUMN membentuk Asisten Deputi Pembinaan kemitraan dan Bina Lingkungan yang mempunyai tugas untuk penyiapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pembinaan BUMN di bidang pembinaan program kemitraan dan bina lingkungan.
- 8.57 Program BL terbagi menjadi dua program yaitu program BL BUMN Pembina dan program BL BUMN Peduli. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan, sedangkan program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri d.h.i. Menteri BUMN. Setiap tahun berjalan, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina dan sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli.
- 8.58 Hasil pemeriksaan atas program BL BUMN Peduli pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana Tahun 2012 dan Semester I 2013 menunjukkan bahwa Kementerian BUMN tidak konsisten dalam membuat peraturan program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan, khususnya tentang masa berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang didanai program BL BUMN Peduli. Peraturan tersebut telah mengalami empat kali perubahan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, sehingga BUMN pelaksana program BL BUMN Peduli tidak mendapatkan kepastian atas kelanjutan dalam menyelesaikan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
- 8.59 Selain itu, hasil pemeriksaan atas program BL BUMN Peduli pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana Tahun 2012 dan Semester I 2013 juga telah mengungkap sebanyak 13 kasus senilai Rp163.949,53 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 8 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 5 kasus senilai Rp163.949,53 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.8.

Tabel 8.8 Kelompok Temuan atas Program BL BUMN Peduli

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	8	-	-	-	3	2	5
Nilai kasus	-	-	-	-	-	163.949,53	163.949,53

Keterangan:

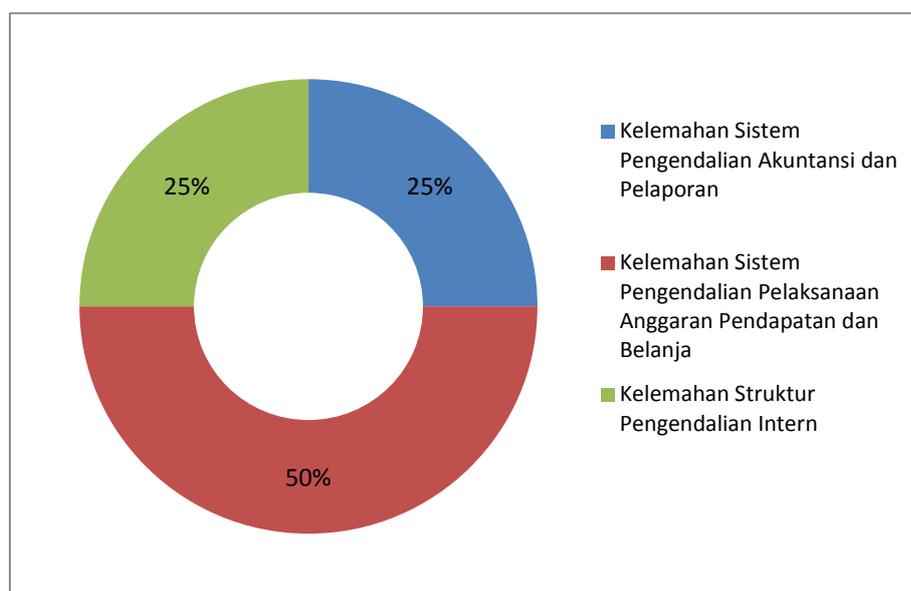
SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

- 8.60 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas Program BL BUMN Peduli disajikan pada Lampiran 35.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.61 Hasil pemeriksaan SPI atas program BL BUMN Peduli pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana mengungkap 8 kasus kelemahan SPI meliputi 2 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 4 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 2 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas program BL BUMN Peduli disajikan dalam Grafik 8.4.

Grafik 8.4 Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Program BL BUMN Peduli



- 8.62 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat**, yaitu terdapat dana BL BUMN Peduli yang belum dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan Kementerian BUMN.

- **Perencanaan kegiatan tidak memadai**, yaitu sebagian dana program BL BUMN Peduli dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, jangka waktu penyelesaian program yang ditetapkan dalam peraturan Menteri BUMN belum memperhatikan kondisi di lapangan, serta tanggal kontrak dan waktu pelaksanaan untuk pekerjaan perencanaan, konstruksi fisik, dan pengawasan pekerjaan cetak sawah senilai Rp380.738,31 juta di Ketapang Kalimantan Barat dilakukan pada saat yang bersamaan. Selain itu, tidak terdapat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dalam perjanjian kerjasama konstruksi antara PT Utama Karya dengan Perum Perumnas pembangunan rumah susun senilai Rp151.000,00 juta serta belum terdapat kejelasan metode/mekanisme perputaran uang hasil perolehan penjualan rumah susun.

Penyebab

- 8.63 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan perubahan peraturan menteri atas pasal terkait program BL BUMN Peduli hanya mempertimbangkan kapan dana tersebut habis digunakan, tidak adanya koordinasi antara Kementerian BUMN dengan pihak BUMN Koordinator serta BUMN pelaksana kegiatan, dan masih lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Kementerian BUMN.

Rekomendasi

- 8.64 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar dalam membuat peraturan, terutama yang berdampak pada penggunaan kekayaan negara/perusahaan dibuat dengan tujuan yang benar, segera melakukan audit atas dana BL BUMN Peduli, melakukan koordinasi efektif antara Kementerian BUMN dengan pihak BUMN Koordinator serta pelaksana kegiatan, dan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang didanai dari BL BUMN Peduli.
- 8.65 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas program BL BUMN Peduli per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 36.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.66 Hasil pemeriksaan atas program BL BUMN Peduli pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana mengungkap 5 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp163.949,53 juta yang disajikan dalam Tabel 8.9.

Tabel 8.9. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Program BL BUMN Peduli

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kelemahan Administrasi	3	-
2	Ketidakefektifan	2	163.949,53
	Jumlah	5	163.949,53

- 8.67 Kasus-kasus tersebut di antaranya **pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp163.949,53 juta**. Kasus yang terjadi adalah lahan hasil cetak sawah yang sudah di *land leveling* belum seluruhnya dilakukan proses penanaman sehingga lokasi kembali ditumbuhi rumput. Kontrak pekerjaan ini senilai Rp380.738,31 juta, namun berdasarkan progress pekerjaan, yang dibayarkan baru sebesar Rp163.949,53 juta.

Penyebab

- 8.68 Kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disebabkan BUMN Pelaksana belum menyampaikan kajian penyediaan lahan dan koordinasi antara Kementerian BUMN dengan BUMN Koordinator dan BUMN pelaksana tidak efektif. Selain itu, BUMN Koordinator dan BUMN Pelaksana Pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan cetak sawah tidak terarah dan tidak memanfaatkan lahan yang telah dicetak secara optimal.

Rekomendasi

- 8.69 Terhadap kasus-kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan Menteri BUMN agar melakukan koordinasi secara efektif antara Kementerian BUMN dengan BUMN Koordinator dan operator pelaksana serta BUMN pelaksana di lapangan, dan memastikan bahwa kegiatan cetak sawah bisa dilakukan secara optimal dengan mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi kendala-kendala di lapangan.
- 8.70 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-perundangan atas program BL BUMN Peduli per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 37.

BUMN Lainnya

- 8.71 Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan BUMN lainnya pada tiga entitas BUMN telah mengungkap sebanyak 53 kasus senilai Rp406.427,27 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 30 kasus di tiga entitas dan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 23 kasus senilai Rp406.427,27 juta di tiga entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 8.10.

Tabel 8.10. Kelompok Temuan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					Total
		Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	
Jumlah kasus	30	5	6	1	7	4	23
Nilai kasus	-	156.396,03	249.178,55	852,69	-	-	406.427,27
Jumlah Entitas	3	2	3	1	2	2	3*

Keterangan:

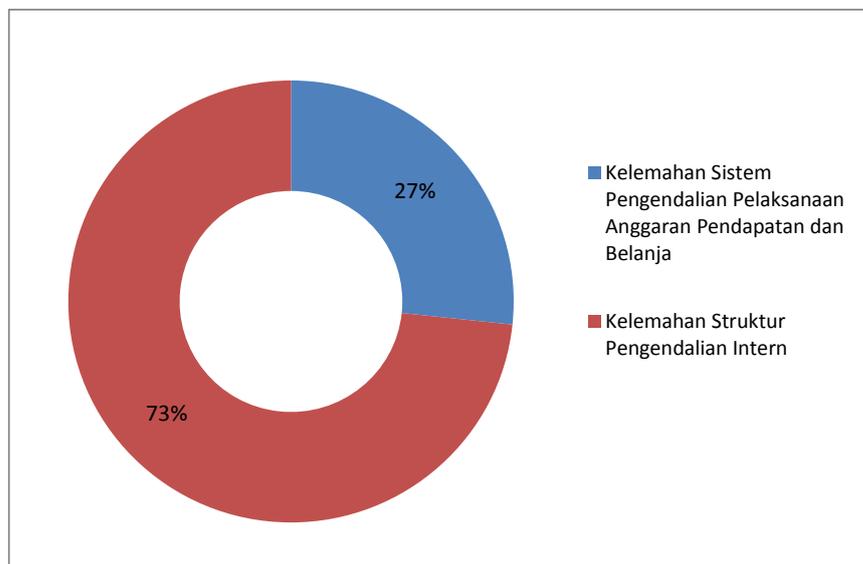
SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 8.72 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas pengelolaan BUMN lainnya disajikan pada Lampiran 38.

Sistem Pengendalian Intern

- 8.73 Hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan BUMN lainnya menunjukkan terdapat 30 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 8 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta 22 kasus kelemahan struktur pengendalian intern. Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas pengelolaan BUMN lainnya disajikan dalam Grafik 8.5.

Grafik 8.5. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas Pengelolaan BUMN Lainnya

- 8.74 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di dua entitas. Kasus-kasus tersebut seperti transaksi pembelian dan penjualan saham *listed* tidak mengacu pada rencana investasi mingguan dan tidak mendapat persetujuan secara tertulis dari komite investasi, serta jaminan pelaksanaan atas sewa kendaraan dinas belum diserahkan. Selain itu terdapat SOP perkreditan dan perjanjian kredit yang belum ditaati di antaranya persyaratan agunan, *financial covenant*, dan *affirmative covenant*.
 - **Perencanaan kegiatan tidak memadai** yang terjadi di tiga entitas. Kasus tersebut seperti arah kebijakan penggabungan dan restrukturisasi PT BP belum jelas dan pasti serta pengurus DP Pertamina belum menyusun rencana kerja jangka panjang.

Penyebab

- 8.75 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan pejabat pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai SOP, pejabat yang bertanggungjawab belum membuat dan menetapkan rencana kerja, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan entitas.

Rekomendasi

- 8.76 Atas kasus-kasus kelemahan SPI tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan BUMN agar memerintahkan pejabat terkait menyusun rencana kerja, memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana dan pejabat yang bertanggung jawab yang belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 8.77 Rincian hasil pemeriksaan SPI terhadap pengelolaan BUMN lainnya per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 39.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- 8.78 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan BUMN lainnya mengungkap 23 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada 3 objek pemeriksaan senilai Rp406.427,27 juta yang disajikan dalam Tabel 8.11.

Tabel 8.11. Kelompok Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan BUMN Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan			
1	Kerugian Perusahaan	5	156.396,03
2	Potensi Kerugian Perusahaan	6	249.178,55
3	Kekurangan Penerimaan	1	852,69
4	Kelemahan Administrasi	7	-
5	Ketidakefektifan	4	-
Jumlah		23	406.427,27

8.79 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Penggunaan uang untuk keperluan pribadi senilai Rp155.621,90 juta**, yang terjadi di PT Bank BNI (Persero) Tbk. Kasus tersebut yaitu penyalahgunaan kredit oleh oknum PT BNI (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Lubuk Linggau.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp248.399,53 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PT Bank BNI (Persero) Tbk dan PT Balai Pustaka (Persero) (PT BP). Kasus-kasus tersebut seperti piutang usaha PT BP sebelum tahun 2012 belum ada realisasi pembayaran (macet), fasilitas kredit terindikasi tidak digunakan sesuai tujuan penggunaan, dan pencairan kredit tidak didasarkan pada prestasi proyek.
- **Penerimaan perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan senilai Rp852,69 juta**, yang terjadi di PT. BP yaitu belum diterimanya bagi hasil atas pekerjaan cetak surat suara pemilihan kepala daerah DKI.

Penyebab

8.80 Kasus-kasus ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan Kementerian BUMN tidak melanjutkan program restrukturisasi yang telah dirancang untuk PT BP, para pelaksana dalam menjalankan tugasnya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh penanggung jawab kegiatan, dan adanya itikad kurang baik dari debitur.

Rekomendasi

- 8.81 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan BUMN yang diperiksa antara lain agar menetapkan dan mengimplementasikan upaya litigasi atas tindakan kecurangan yang dilakukan oknum pegawai, mengupayakan penagihan piutang dan bagi hasil secara intensif, memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak mematuhi ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 8.82 Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan BUMN lainnya per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 40.
- 8.83 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 9

Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

- 9.1 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas operasional 92 BUMD dan 9 RSUD. 92 entitas BUMD terdiri atas 28 entitas perusahaan daerah air minum (PDAM), 17 bank pembangunan daerah/bank perkreditan rakyat (BPD/BPR), 10 PD pasar, 9 BUMD pertambangan, dan 28 BUMD aneka usaha lainnya. Pemeriksaan 9 RSUD terdiri atas 8 RSUD yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan 1 RSUD yang merupakan SKPD. Kegiatan operasional tersebut pada umumnya mencakup pengelolaan pendapatan dan pengendalian biaya/belanja.
- 9.2 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMD dan RSUD telah mengungkap sebanyak 1.320 kasus senilai Rp525.157,59 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 643 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 677 kasus senilai Rp525.157,59 juta. Dari jumlah kasus di atas telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp3.004,13 juta pada proses pemeriksaan. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 9.1.

Tabel 9.1. Kelompok Temuan atas Operasional BUMD dan RSUD

(nilai dalam juta rupiah)

Subtema	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan		Nilai Penyetoran
	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Nilai	
Operasional PDAM	215	130	238.194,95	-
Operasional BPD/BPR	80	133	62.401,11	214,36
Operasional PD Pasar	39	69	6.245,39	148,95
Operasional BUMD Pertambangan	37	65	108.987,88	30,00
Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya	201	193	96.750,11	1.524,55
Operasional RSUD	71	87	12.578,15	1.086,27
Total	643	677	525.157,59	3.004,13

- 9.3 Pemeriksaan terhadap operasional BUMD dan RSUD terdiri atas 6 subtema, yaitu sebagai berikut.

- Operasional PDAM;

- Operasional BPD/BPR;
- Operasional PD Pasar;
- Operasional BUMD Pertambangan;
- Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya; dan
- Operasional RSUD.

9.4 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan operasional BUMD dan RSUD disajikan pada uraian berikut.

Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

9.5 PDAM didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pendirian PDAM. Tujuan pendirian PDAM adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

9.6 Kegiatan usaha PDAM adalah mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat-syarat bagi masyarakat di daerah/wilayah kerja PDAM.

9.7 Untuk menilai kinerja PDAM, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) menetapkan empat indikator pengukuran yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia. Secara nasional, hasil evaluasi BPPSPAM terhadap 328 PDAM menunjukkan bahwa hanya 52% PDAM yang memiliki kategori sehat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9.2. Hasil Evaluasi Kinerja 328 PDAM Tahun 2012

Kategori	Jumlah PDAM	Persentase
Sehat	171	52%
Kurang Sehat	101	31%
Sakit	56	17%
Jumlah	328	100%

9.8 Rata-rata cakupan pelayanan air bersih PDAM per Tahun 2012 masih rendah, yakni sebesar 39,94%. Angka ini masih jauh dibawah target *Millenium Development Goals* (MDGs) Tahun 2015, yaitu cakupan pelayanan 68,87%.

9.9 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan kegiatan operasional PDAM TA 2011 s.d. 2013 terhadap 28 PDAM. Rincian PDAM yang diperiksa tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.3.

Tabel 9.3. Daftar Rincian PDAM yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013

No	PDAM	No	PDAM	No	PDAM
1	PDAM Tirta Naga	11	PDAM Tirta Arut	21	PDAM Kabupaten Gowa
2	PDAM Kota Payakumbuh	12	PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur	22	PDAM Kota Kendari
3	PDAM Lematang Enim	13	PDAM Intan Banjar	23	PDAM Kota Gorontalo
4	PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu	14	PDAM Kabupaten Tapin	24	PDAM Kabupaten Mamuju
5	PDAM Way Irang	15	PDAM Kota Banjarmasin	25	PDAM Kota Ambon
6	PDAM Tirta Bening	16	PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara	26	PDAM Kota Ternate
7	PDAM Kabupaten Karangasem	17	PDAM Kabupaten Paser	27	PDAM Kota Jayapura
8	PDAM Kota Mataram	18	PDAM Kota Balikpapan	28	PDAM Kabupaten Manokwari
9	PDAM Kabupaten Kupang	19	PDAM Kota Samarinda		
10	PDAM Kota Pontianak	20	PT Air Manado		

9.10 Cakupan pemeriksaan pengelolaan kegiatan operasional pada 28 PDAM adalah senilai Rp13.001.875,80 juta dari realisasi anggaran senilai Rp13.160.380,87 juta.

Tujuan Pemeriksaan

9.11 Pemeriksaan atas operasional PDAM bertujuan untuk menilai apakah

- upaya PDAM dalam mendorong terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan, penurunan tingkat kehilangan air dan perbaikan kualitas air;
- tingkat penyelesaian (*settlement*) utang rekening dana investasi (RDI) dan rekening pembangunan daerah (RPD);
- penyertaan pemerintah pusat pada PDAM telah disajikan dan ditetapkan statusnya;
- kerjasama PDAM dengan pihak ketiga telah memperhatikan kepentingan perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- pengelolaan operasional (pendapatan, biaya, aktiva, piutang, dan hutang) PDAM telah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- SPI entitas telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan PDAM.

Hasil Pemeriksaan

- 9.12 Hasil pemeriksaan atas operasional PDAM telah mengungkap sebanyak 345 kasus senilai Rp238.194,95 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 215 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 130 kasus senilai Rp238.194,95 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 9.4.

Tabel 9.4. Kelompok Temuan atas Operasional PDAM

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah/Perusahaan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	215	16	3	8	36	67	130
Nilai kasus	-	1.337,64	7.737,59	9.261,73	-	219.857,99	238.194,95
Jumlah Entitas	28	8	3	7	25	27	28*

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 9.13 Hasil pemeriksaan atas operasional PDAM mengungkap sebanyak 16 kasus kerugian daerah/perusahaan senilai Rp1.337,64 juta, di antaranya terdapat 11 kasus indikasi kerugian daerah/perusahaan senilai Rp807,84 juta.
- 9.14 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas operasional PDAM disajikan pada Lampiran 41.
- 9.15 Hasil pemeriksaan atas 28 PDAM menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp7.737,59 juta**, yang terjadi di tiga entitas, yaitu PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim, PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan PDAM Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat piutang langganan air dan non air yang tidak tertagih dan telah berumur di atas tiga bulan.
 - **Penerimaan daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas daerah/perusahaan senilai Rp9.261,73 juta**, yang terjadi di tujuh entitas di antaranya PDAM Kota Samarinda, PDAM Kota Manado, PDAM Kota Ambon, PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur, dan PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim. Kasus-kasus tersebut seperti pemerintah daerah belum menerima pembagian keuntungan sesuai dengan bagian modal yang diinvestasikan, dana kontribusi perjanjian kerjasama yang belum diterima PDAM, serta hasil penjualan air melalui mobil tangki belum disetor ke kas perusahaan.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, antara lain rata-rata tingkat kehilangan air Tahun 2011-2013 pada 22 PDAM dan PT Air Manado melebihi batas toleransi berkisar antara 21,09% s.d. 72,27%, sehingga menimbulkan potensi kehilangan pendapatan perusahaan. Selain itu, pengelolaan tagihan penjualan air belum optimal yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan operasional PDAM dan pelayanan pelanggan menjadi terganggu.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, antara lain penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah Pusat dalam bentuk Rekening Dana Investasi belum ada kejelasan penyelesaiannya, PDAM tidak membayar biaya administrasi pinjaman tersebut selama masa tenggang sehingga tunggakan biaya administrasi tersebut dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman, keputusan walikota yang menetapkan PDAM sebagai pengelola IPAL tidak sejalan dengan maksud pendirian PDAM sehingga PDAM harus menanggung beban pengelolaan instalasi pengolahan air limbah, serta pembayaran tunjangan kepada dewan pengawas membebani PDAM.
- **Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp26.096,91 juta**, yang terjadi di delapan entitas di antaranya PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara, PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati, PDAM Kota Pontianak, PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim, dan PDAM Kota Samarinda. Kasus-kasus tersebut seperti realisasi biaya untuk penghasilan direktur, jasa badan pengawas, dan penghasilan pegawai melebihi ketentuan Perda. Selain itu terdapat PDAM yang menanggung beban yang bukan biaya operasionalnya untuk membiayai operasional perusahaan pihak ketiga yang bekerjasama dalam pengelolaan PDAM termasuk pembayaran gaji, biaya manajemen, biaya rapat dan perjalanan dinas serta angsuran pinjaman, sehingga memboroskan keuangan perusahaan.
- **Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan senilai Rp193.660,50 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PDAM Kabupaten Kutai Kartanegara dan PDAM Kabupaten Manokwari. Kasus-kasus tersebut seperti pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam kegiatan produksi air bersih. Selain itu, terdapat instalasi pengolahan air (IPA) yang belum dapat dioperasikan karena kapasitas terpasang *intake* lebih besar dari kapasitas IPA tersebut, tidak terdapat jaringan listrik PLN dan sarana genset, sumber air baku dan pipa transmisi *existing* yang kurang mendukung.
- **Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal**, yang terjadi di 23 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti cakupan pelayanan 16 PDAM dan PT Air Manado belum mencapai target MDGs (68,87%) yaitu berkisar antara 8,21% s.d. 67,85% sehingga sebanyak 4.904.063 jiwa penduduk di 17

kabupaten/kota belum memperoleh layanan air bersih dari PDAM. Selain itu kualitas air produksi pada 22 PDAM belum memenuhi standar kesehatan, yang terbukti dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel air mengandung bakteri *coliform* dan *colitinja* sehingga tujuan pendirian PDAM sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan dan mengusahakan penyediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan belum tercapai.

Penyebab

9.16 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- manajemen PDAM kurang optimal dalam mencari sumber air baru, belum mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan jaringan pipa baru dan belum mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah yang menjadi penyebab utama tingkat kehilangan air dan belum melakukan langkah-langkah dalam menurunkan tingkat kehilangan air;
- pejabat pelaksana tidak melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak dan tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap pelanggan yang menunggak walaupun airnya mengalir;
- Direksi PDAM lalai dan tidak tegas dalam melaksanakan klausul perjanjian kerja sama yang telah disepakati, serta kebijakan pemerintah daerah yang memerintahkan PDAM menalangi biaya operasional partner kerja sama dan menyetujui kerja sama tanpa didukung studi kelayakan;
- Direksi PDAM lalai dalam menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga serta pemerintah daerah kurang melakukan pengawasan terhadap PDAM yang melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga;
- Kepala Dinas Cipta Karya kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan kajian pembangunan sarana dan prasarana air bersih, serta kurangnya koordinasi antar PDAM dengan pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan instalasi PDAM; dan
- Direksi PDAM kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan PDAM serta kurang optimal dalam melakukan langkah-langkah meningkatkan kualitas air PDAM.

Rekomendasi

9.17 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Direksi PDAM mengidentifikasi penyebab kehilangan air dan mengalokasikan dana untuk membangun jaringan pipa baru serta melakukan langkah optimal untuk mengatasi kehilangan air;

- Direksi PDAM memerintahkan pejabat pelaksana untuk melakukan inventarisasi terhadap status pelanggan yang menunggak, mengambil langkah-langkah penyelesaian piutang dan bila diperlukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, melakukan usaha yang nyata dalam menerapkan pemberian sanksi pemutusan kepada pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan;
 - Kepala Daerah selaku pemegang saham memberikan sanksi kepada direksi PDAM yang lalai melaksanakan perjanjian kerja sama serta memerintahkan direksi PDAM agar lebih tegas menerapkan klausul perjanjian kerja sama, seperti memerintahkan pembayaran dana kontribusi yang belum diberikan oleh partner kerja sama dan menyetorkan ke kas perusahaan;
 - Kepala Daerah dan Direksi PDAM meninjau ulang perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga agar perjanjian mengatur dengan jelas hak dan kewajiban serta pembagian laba antar kedua belah pihak;
 - Kepala Daerah memberikan sanksi kepada Kepala Dinas Cipta Karya yang kurang cermat dalam melakukan perencanaan, serta memerintahkan PDAM agar meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan instalasi PDAM; dan
 - Direksi PDAM meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air sesuai standar kesehatan.
- 9.18 Rincian hasil pemeriksaan atas operasional PDAM per kelompok dan jenis temuan untuk temuan SPI disajikan dalam Lampiran 42 dan untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Lampiran 43.

Operasional Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- 9.19 BPD/BPR sebagai salah satu jenis bank, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 9.20 BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbedaan antara bank umum dan BPR adalah BPR tidak dapat melaksanakan kliring sistem pembayaran antar bank, dan wilayah kerja BPR paling jauh hanya sampai wilayah satu provinsi atau

tidak bisa membuka cabang di provinsi lain. Tujuan dibentuknya BPR secara umum adalah sebagai lembaga media intermediasi, yang menghubungkan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana, terutama kepada pihak usaha mikro dan kecil di wilayah operasional BPR bersangkutan.

- 9.21 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan operasional BPD/BPR TA 2011 s.d. 2013 pada 17 BPD/BPR. Rincian BPD/BPR yang diperiksa tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.5.

Tabel 9.5. Daftar Rincian BPD/BPR yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013

No	BPD/BPR	No	BPD/BPR
1	PT BPD Jambi	10	BPR Sumbawa
2	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	11	BPR Kota Pontianak
3	PT Bank Lampung	12	BPR Marunting Sejahtera
4	PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul	13	BPR Muara Uya
5	PT BPD Jawa Timur, Tbk.	14	BPR Tapin Selatan
6	BPR Bank Pasar Bangli	15	BPR Kota Samarinda
7	BPR Werdhi Sedana	16	BPR Pesisir Tanadoang
8	BPR Lombok Tengah	17	BPR Bahteramas Kota Kendari
9	BPR Lombok Timur		

- 9.22 Cakupan pemeriksaan pengelolaan operasional pada 17 BPD/BPR adalah senilai Rp6.499.094,03 juta dari realisasi anggaran senilai Rp29.684.788,74 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.23 Tujuan pemeriksaan BUMD bidang BPD/BPR adalah untuk menilai apakah
- tujuan dan kegiatan usaha BPD/BPR untuk memberikan kredit dan mendorong perekonomian usaha mikro dan kecil telah direncanakan dan dicapai secara memadai;
 - pembentukan BPD/BPR dan penyertaan modal pemerintah daerah pada BPR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - pemberian kredit dan penanganan kredit bermasalah BPD/BPR sudah mempertimbangkan prinsip *prudent banking* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - pengelolaan kegiatan operasional BPD/BPR telah mempertimbangkan prinsip efisiensi dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- sistem pengendalian intern (SPI) atas kegiatan operasional sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian.

Hasil Pemeriksaan

- 9.24 Hasil pemeriksaan atas operasional BPD/BPR telah mengungkap sebanyak 213 kasus senilai Rp62.401,11 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 80 kasus terjadi di 16 entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 133 kasus senilai Rp62.401,11 juta dan terjadi di 17 entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 9.6.

Tabel 9.6. Kelompok Temuan atas Operasional BPD/BPR

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah/Perusahaan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	80	23	18	7	53	32	133
Nilai Kasus	-	4.202,00	45.868,09	9.359,33	-	2.971,69	62.401,11
Jumlah Entitas	16	12	11	3	16	14	17*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	200,12	-	14,24	-	-	214,36

Keterangan:

- SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas
 * : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 9.25 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional BPD/BPR mengungkap sebanyak 23 kasus kerugian daerah/perusahaan senilai Rp4.202,00 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian kerugian daerah/perusahaan sebanyak 14 kasus senilai Rp3.851,24 juta.
- 9.26 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas operasional BPD/BPR disajikan pada Lampiran 44.
- 9.27 Hasil pemeriksaan atas 17 BPD/BPR menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp1.929,04 juta**, yang terjadi di sepuluh entitas antara lain BPR Lombok Timur, BPR Kota Samarinda, BPR Muara Uya, BPR Tapin Selatan, dan BPR Sumbawa. Kasus-kasus tersebut seperti pembayaran honor yang melebihi standar honorarium yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati, tunjangan kesra kepada direksi dan pegawai serta tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan insentif pegawai diberikan tidak memiliki dasar hukum.

Selain itu terdapat kelebihan pembayaran jasa pengabdian dewan pengawas, duplikasi pembayaran tunjangan kesehatan TB 2012 dan 2013 Semester I yang dibayarkan dalam bentuk tunjangan kesehatan dan melalui premi asuransi, serta pembayaran premi asuransi tunjangan hari tua dan dana pensiun tanpa melalui surat keputusan.

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp22.270,00 juta**, yang terjadi di tujuh entitas antara lain PT BPD Jawa Timur, Tbk., PT BPD Jambi, PT BPD Bengkulu, BPR Tapin Selatan, dan BPR Sumbawa. Kasus-kasus tersebut seperti pemberian fasilitas kredit modal kerja dan pemberian plafon kredit yang melebihi batas nilai maksimum plafon tidak sesuai dalam pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi sehingga berpotensi tidak terpenuhinya kewajiban debitur atas pokok dan bunga kredit. Selain itu, pemantauan, penyelamatan, dan penyelesaian agunan terhadap kredit macet atau bermasalah belum dilakukan serta adanya potensi gagal klaim asuransi atas debitur yang meninggal dunia namun diasuransikan pada perusahaan asuransi yang telah dicabut ijin usahanya oleh OJK.
- **Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan senilai Rp22.191,16 juta**, yang terjadi di lima entitas yaitu BPR Sumbawa, BPR Lombok Tengah, BPR Kota Samarinda, BPR Lombok Timur, dan BPR Werdhi Sedana. Kasus-kasus tersebut seperti proses hapus buku atas kredit macet tidak sesuai prosedur, BPR tidak melakukan upaya penyelamatan kredit maupun penyelesaian kredit berupa pencairan dan atau pengambilalihan jaminan sebelum dilakukan hapus buku. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan antara lain karena kredit tersebut berindikasi fiktif (kecurangan), sehingga BPR berisiko menanggung kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang telah disalurkan. Kredit fiktif tersebut telah ada yang diproses oleh aparat penegak hukum, namun ada juga yang belum diproses.
- **Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp6.378,72 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PT BPD Jawa Timur, Tbk., dan PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul. Kasus-kasus tersebut adalah Bank Jatim kurang membayar jasa giro kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan belum menerima imbalan jasa pelayanan atas penatausahaan penerimaan negara sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk operasional perusahaan. Selain itu, PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul belum memotong/memungut PPh pasal 21 atas pembayaran jasa produksi.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.**, yang terjadi di 14 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti proses pembentukan BPR dan penyertaan modal pemerintah belum didukung dokumentasi yang lengkap yaitu perda tentang pendirian tidak ada, tidak ada studi kelayakan pembentukan BPR, dan pemerintah daerah

belum memenuhi kewajiban penyertaan modal sesuai jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian penetapan suku bunga deposito melebihi batas yang dijamin oleh LPS dan pemberian suku bunga melebihi suku bunga yang ditetapkan dalam SK direksi. Selain itu, penggunaan dan pencatatan pembagian laba tidak sesuai ketentuan antara lain tidak ada berita acara atau risalah rapat direksi yang membahas tentang rencana pembagian laba, penyetoran ke kas daerah, dan penggunaan laba BPR, serta penggunaan dana kesejahteraan tidak tepat yaitu untuk membayar tunjangan transport dan operasional direktur utama. Terdapat juga risiko atas kredit yang tidak diasuransikan dan belum didukung polis/sertifikat asuransi.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di 14 entitas. Kasus-kasus tersebut seperti kebijakan dan proses persetujuan kredit belum optimal dan berlandaskan prinsip kehati-hatian bank antara lain pemberian kredit tidak melalui analisis yang didukung kertas kerja dan bukti memadai, pemberian kredit tidak didukung dengan penilaian/taksasi dan pengikatan jaminan (agunan) secara memadai, kebijakan pemberian kredit kepada pengurus dan/atau pegawai BPR tidak mewajibkan adanya agunan dan bunga murah serta evaluasi kredit tidak dilakukan dengan prinsip 6C meliputi karakter (*character*), kemampuan membayar (*capacity*), jaminan (*collateral*), permodalan (*capital*), kondisi perekonomian (*condition of economy*), dan *cashflow*.
- **Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp2.881,69 juta**, yang terjadi di delapan entitas antara lain BPR Lombok Tengah, BPR Bahteramas Kota Kendari, BPR Lombok Timur, BPR Muara Uya, dan BPR Sumbawa. Kasus-kasus tersebut seperti perhitungan premi asuransi jaminan hari tua lebih besar dari yang diperkenankan dalam Permendagri, realisasi belanja tenaga kerja melebihi yang dipersyaratkan dalam peraturan Gubernur, pemberian imbalan sebagai penunjang penagihan kredit tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan membebani operasional perusahaan. Selain itu, terdapat pemberian tunjangan dan insentif yang tidak sesuai ketentuan dan membebani perusahaan.
- **Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai**, yang terjadi di 12 BPR. Kasus-kasus tersebut seperti BPR milik pemerintah daerah belum melakukan upaya untuk memenuhi pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil (UMK), yaitu porsi kredit produktif kepada UMK lebih kecil dari kredit konsumtif dalam rencana kerja tahunan (RKT) BPR, realisasi kredit produktif kepada UMK tidak mencapai target, serta BPR dan pihak terkait tidak melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pencapaian RKT BPR untuk memberikan kredit dan mendorong perekonomian usaha kecil.

9.28 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan pada pemeriksaan operasional BPD/BPR senilai Rp59.429,42 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah/perusahaan senilai Rp214,36 juta, di antaranya adalah BPR Kota Pontianak senilai Rp65,00 juta, PT BPD Bengkulu senilai Rp61,22 juta, dan PT BPD Jawa Timur, Tbk senilai Rp37,72 juta.

Penyebab

9.29 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- Direksi kurang cermat dalam menyusun kebijakan dan lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian;
- Tim Khusus penanganan kredit bermasalah lalai tidak melaksanakan penanganan kredit bermasalah melalui restrukturisasi dan pengambilalihan agunan;
- Dewan Pengawas tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan kepada direksi atas kebijakan dan penyaluran kredit berlandaskan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan;
- pelaksana kegiatan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta direksi tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan suku bunga kredit;
- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten lalai mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor di BPR dalam suatu aturan tertulis serta memenuhi setoran modal dasar; dan
- Direksi dalam mengambil kebijakan dan mengelola BPR kurang memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BPR untuk mendorong usaha mikro dan kecil, penyaluran kredit masih fokus pada sektor konsumtif dan pemerintah daerah selaku pemilik modal belum melaksanakan pembinaan yang dapat mendorong perekonomian UMK.

Rekomendasi

9.30 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan agar

- Direksi lebih cermat dalam menyusun kebijakan, menetapkan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku, lebih optimal melaksanakan upaya penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan sesuai ketentuan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;

- Direksi dan dewan pengawas mengkaji kembali dan memastikan optimalisasi penyelamatan kredit sebelum mengusulkan penghapusbukuan dengan menyusun rencana aksi;
 - Dewan Pengawas menginventarisir dan memastikan bahwa seluruh kebijakan kredit yang telah ditetapkan direksi tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan;
 - Kepala Daerah/Direksi memerintahkan kepada pejabat berwenang/majelis TGR untuk mengkoordinasikan dan memproses kerugian sesuai ketentuan dengan cara menetapkan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran atas kerugian tersebut ke kas daerah/perusahaan;
 - Dewan Pengawas menginstruksikan direksi untuk memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana dan melakukan penyetoran pajak ke kas negara serta melakukan penagihan atas kekurangan penerimaan perusahaan;
 - Kepala Daerah selaku pemilik modal berkoordinasi khususnya dalam hal mengatur pengakuan porsi kepemilikan modal terkait pemenuhan modal disetor di BPR dan memenuhi setoran modal dasar; dan
 - Direksi dalam mengambil kebijakan dan mengelola BPR memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BPR dengan lebih memprioritaskan alokasi kredit kepada UMK, serta memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
- 9.31 Rincian hasil pemeriksaan atas operasional BPD/BPR per kelompok dan jenis temuan untuk temuan SPI disajikan dalam Lampiran 45 dan untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Lampiran 46.

Operasional Perusahaan Daerah (PD) Pasar

- 9.32 Perusahaan Daerah (PD) Pasar merupakan salah satu bentuk BUMD yang dibentuk oleh beberapa pemerintah daerah sebagai pengganti dinas atau kantor pengelola pasar. Pembentukan PD Pasar ditujukan agar pengelolaan pasar lebih fleksibel dan mandiri serta ditangani oleh tenaga-tenaga profesional.
- 9.33 Pemerintah telah menyusun regulasi terkait dengan pasar dimulai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan

Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sementara, penataan pasar tradisional di daerah oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

- 9.34 Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan diketahui bahwa profil pasar di Indonesia secara ringkas disajikan pada Tabel 9.7.

Tabel 9.7 Profil Pasar di Indonesia

Tahun	Jumlah Pasar	Kios/Los	PKL	Pedagang
Tahun 2008	7.091	1.268.703	333.533	1.602.236
Tahun 2009	7.879	1.409.671	370.592	1.780.263
Tahun 2010	8.754	1.566.301	411.769	1.978.070
Tahun 2011	9.727	1.740.334	457.521	2.197.855

- 9.35 Dari jumlah pasar yang demikian besar dibanding dengan aspek pengelolaan yang relatif masih kurang baik, diharapkan pemda melakukan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional secara tepat, sehingga dapat menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
- 9.36 Keberadaan PD Pasar diperlukan agar pengelolaan pasar tradisional yang memiliki daya saing dengan pasar modern dapat terwujud. Oleh karena itu, PD Pasar perlu didukung dengan aspek regulasi yang jelas baik di tingkat pemerintah pusat berupa regulasi yang memperjelas dan menguatkan posisi perusahaan daerah maupun oleh pemda melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; kejelasan pembentukan dan kewenangan PD pasar serta kejelasan penyertaan modal oleh pemda; dan aspek pengelolaan PD pasar sendiri telah merujuk pada prinsip-prinsip manajemen yang lebih baik termasuk kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
- 9.37 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan operasional PD Pasar TA 2011 s.d. 2013 pada sepuluh entitas. Rincian PD Pasar yang diperiksa tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.8.

Tabel 9.8. Daftar Rincian PD Pasar yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013

No	PD Pasar	No	PD Pasar
1	PD Pasar Kota Medan	6	PD Pasar Kota Kupang
2	PD Pasar Kabupaten Badung	7	PD Pasar Bauntung Batuah
3	PD Pasar Kabupaten Buleleng	8	PD Pasar Kota Manado
4	PD Pasar Kota Denpasar	9	PD Pasar Makassar Raya
5	PD Pasar Selaparang	10	PD Pasar Kota Kendari

- 9.38 Cakupan pemeriksaan pengelolaan operasional pada sepuluh PD Pasar adalah senilai Rp1.644.738,15 juta dari realisasi anggaran senilai Rp2.712.634,30 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.39 Pemeriksaan atas pengelolaan operasional PD Pasar bertujuan untuk menilai apakah
- regulasi pemerintah telah mendukung penguatan pasar tradisional yang dikelola PD pasar;
 - pembentukan PD pasar dan penyertaan modal pemerintah daerah pada PD pasar telah memadai dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - kerjasama PD pasar dengan pihak ketiga telah memperhatikan kepentingan perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - pengelolaan sumber daya PD pasar telah dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya operasional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan

- 9.40 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional PD Pasar telah mengungkap sebanyak 108 kasus senilai Rp6.245,39 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 39 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 69 kasus senilai Rp6.245,39 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 9.9.

Tabel 9.9. Kelompok Temuan atas Operasional PD Pasar

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah/Perusahaan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	39	5	2	12	40	10	69
Nilai kasus	-	549,61	63,24	4.502,57	-	1.129,97	6.245,39
Jumlah Entitas	10	3	1	7	10	7	10 *
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	148,95	-	-	-	-	148,95

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 9.41 Hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional PD Pasar mengungkap sebanyak 5 kasus kerugian daerah/perusahaan senilai Rp549,61 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 2 kasus senilai Rp148,95 juta.
- 9.42 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas operasional PD Pasar disajikan pada Lampiran 47.
- 9.43 Hasil pemeriksaan atas sepuluh PD Pasar menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Penerimaan daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah/perusahaan senilai Rp4.502,57 juta**, yang terjadi di tujuh entitas, antara lain PD Pasar Kota Manado, PD Pasar Kota Medan, PD Pasar Bauntung Batuah, PD Pasar Kota Kendari, dan PD Pasar Kota Kupang. Kasus-kasus tersebut di antaranya seperti denda keterlambatan perpanjangan SIPTB belum diterima, PD Pasar belum dapat menagih jasa pemakaian kekayaan daerah kepada pedagang, dan penerimaan pendapatan uang perikatan atas iuran kontrak pemakaian tempat usaha yang belum dipungut. Selain itu, terdapat pemotongan PPh 21 atas penghasilan karyawan yang belum disetor ke kas negara serta terdapat gaji direksi dan honorarium Badan Pengawas yang belum dipungut PPh 21.
 - **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di tujuh entitas. Kasus-kasus tersebut seperti pedagang masih diakui sebagai pemegang hak sewa tempat berjualan meskipun Surat Izin Menyewa Tempat Berjualan (SIMTB) yang dimiliki telah kedaluwarsa dan belum diperpanjang, penetapan tarif harian dan kebersihan pasar di bawah tarif perda, hilangnya potensi pendapatan atas bangunan pasar berupa kios, lapak, los dan bangsal yang kondisinya rusak berat, tidak terpakai dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, serta proses penentuan mitra kerja sama pengelolaan parkir dan bongkar muat barang tidak melalui proses yang terukur dan pelaksanaannya tidak menguntungkan perusahaan.
 - **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di lima entitas. Kasus-kasus tersebut seperti belum adanya regulasi pemerintah daerah untuk pasar tradisional yang selaras dengan regulasi pemerintah pusat, PD Pasar belum memiliki SOP tentang pengelolaan aset tetap, dan pengelolaan dana imbalan pasca kerja belum sepenuhnya diatur oleh Direksi.

- **Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp639,79 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PD Pasar Makassar Raya dan PD Pasar Kota Manado. Kasus-kasus tersebut adalah pembayaran gaji pegawai, gaji direksi, honorarium pembina, serta honor dan tunjangan Badan Pengawas yang melebihi ketentuan dalam Perda/Permendagri.
- **Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya senilai Rp490,18 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PD Pasar Kota Kendari dan PD Pasar Kabupaten Buleleng. Kasus tersebut adalah pembayaran biaya listrik lebih besar dari pemungutan pendapatan pelayanan jasa listrik.

9.44 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan pada pemeriksaan operasional PD Pasar senilai Rp5.115,42 juta telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas perusahaan milik daerah senilai Rp148,95 juta.

Penyebab

- 9.45 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat/pelaksana kegiatan terkait belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, direksi belum menetapkan peraturan/SOP terkait prosedur tertentu, pejabat terkait melakukan pembiaran pihak ketiga melakukan pengelolaan parkir dan bongkar muat barang, serta pejabat yang bertanggung jawab belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.
- 9.46 Permasalahan tersebut juga disebabkan karena pemerintah daerah belum melakukan sosialisasi peraturan pengelolaan pasar kepada pengelola pasar serta penyesuaian dan/atau penyusunan peraturan pengelolaan pasar berdasarkan peraturan pengelolaan pasar yang berlaku.
- 9.47 Selain itu, permasalahan tersebut disebabkan oleh direksi dalam mengeluarkan kebijakan tidak berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi, kurang cermat dalam menetapkan formula perhitungan beban alokasi biaya listrik, dan tidak tegas menerapkan sanksi kepada pedagang yang tidak memperpanjang izin pemakaian tempat berjualan yang telah habis masa berlakunya, serta kurang proaktif dalam melakukan penagihan.

Rekomendasi

- 9.48 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada direksi antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan, menyusun dan menetapkan peraturan/SOP, melakukan pendataan dan penertiban atas objek pajak/retribusi, mengambil alih pengelolaan parkir dan bongkar muat barang oleh pihak ketiga yang tidak menguntungkan perusahaan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta memanfaatkan bangunan pasar secara optimal sesuai peruntukannya.
- 9.49 BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah melakukan sosialisasi peraturan pengelolaan pasar serta penyesuaian dan/atau penyusunan peraturan pengelolaan pasar berdasarkan peraturan pengelolaan pasar yang berlaku.
- 9.50 Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar direksi menagih denda keterlambatan/tunggakan penerimaan jasa/pendapatan uang perikatan, menyesuaikan besarnya gaji dengan peraturan yang berlaku, menghentikan pembayaran honor dan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan, menyusun formula perhitungan beban biaya listrik riil dan alokasi jasa pelayanan listrik yang dikenakan pada pedagang.
- 9.51 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas operasional PD Pasar per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 48 dan untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Lampiran 49.

Operasional BUMD Bidang Pertambangan

- 9.52 Pertumbuhan ekonomi nasional di kontribusi oleh sembilan sektor usaha, di antaranya adalah sektor usaha pertambangan. Perekonomian Indonesia pada Tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23% dibanding Tahun 2011 dengan kontribusi sektor pertambangan sebesar 0,11%. Kontribusi tersebut relatif stagnan dengan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia Tahun 2011 sebesar 0,1%, dimana pertumbuhan perekonomian pada Tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dibanding Tahun 2010.
- 9.53 Kontribusi sektor usaha pertambangan Tahun 2011 antara lain berasal dari produksi batubara Tahun 2011 yang mencapai 353,27 juta MT. Jumlah produksi tersebut merupakan produksi batubara dari 55 perusahaan pemegang PKP2B, dimana hanya ada satu PKP2B yang berbentuk perusahaan daerah, yaitu PD Baramarta. Total produksi batubara PD Baramarta pun relatif kecil, yaitu 4,4 juta MT atau hanya 1,25% dari total produksi batubara Tahun 2011.

- 9.54 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa pengelolaan kegiatan operasional BUMD bidang pertambangan TA 2011 s.d. 2013 (Semester I) terhadap 9 BUMD pertambangan. Rincian BUMD pertambangan yang diperiksa tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.10.

Tabel 9.10. Daftar Rincian BUMD Pertambangan yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013

No	BUMD Pertambangan	No	BUMD Pertambangan
1	PD Baramarta Kab. Banjar	6	PD Bara Kaltim Sejahtera Prov. Kalimantan Timur
2	PD Aneka Usaha Kolaka Kab. Kolaka	7	PD Bangun Banua Prov. Kalimantan Selatan
3	Baratala Tuntung Pandang Kab. Tanah Laut	8	PD Banggai Energi Utama Kab. Banggai
4	PD Benuo Taka Kab. Penajam Paser Utara	9	PD Banggai Sakti Kab. Banggai
5	PD Danum Belum Kab. Barito Selatan		

- 9.55 Cakupan pemeriksaan pengelolaan kegiatan operasional atas sembilan BUMD Pertambangan adalah senilai Rp11.596.512,67 juta dari realisasi anggaran senilai Rp12.729.364,32 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.56 Pemeriksaan atas operasional BUMD bidang pertambangan bertujuan untuk menilai apakah
- pengelolaan pertambangan telah dilakukan secara mandiri oleh BUMD;
 - kegiatan penambangan di kawasan hutan telah dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
 - pengelolaan reklamasi dan pasca tambang telah dilakukan dengan baik;
 - kerjasama dengan pihak ketiga telah memberikan kontribusi yang optimal bagi BUMD; dan
 - pengelolaan sumber daya BUMD telah memperhatikan optimalisasi pendapatan dan efisiensi biaya.

Hasil Pemeriksaan

- 9.57 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMD bidang pertambangan telah mengungkap 102 kasus senilai Rp108.987,88 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 37 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 65 kasus senilai Rp108.987,88 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 9.11.

Tabel 9.11. Kelompok Temuan atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah/Perusahaan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	37	13	3	10	34	5	65
Nilai kasus	-	73.712,92	9.885,15	21.853,38	-	3.536,43	108.987,88
Jumlah Entitas	9	5	3	7	9	3	9 *
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	30,00	-	-	-	-	30,00

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern

3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 9.58 Hasil pemeriksaan atas sembilan BUMD bidang pertambangan mengungkap sebanyak 13 kasus kerugian daerah/perusahaan senilai Rp73.712,92 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 7 kasus senilai Rp49.507,26 juta.
- 9.59 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas operasional BUMD bidang pertambangan disajikan pada Lampiran 50.
- 9.60 Hasil pemeriksaan atas sembilan BUMD Bidang Pertambangan menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp65.773,29 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu PD Baramarta dan PD Benuo Taka. Kasus-kasus tersebut seperti kelebihan pembayaran upah manajemen, biaya *crusher*/pemecah, biaya pengangkutan/pengiriman, biaya pelabuhan dan biaya *transshipment*/ pengiriman ke kapal besar pada perjanjian proyek pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam amandemen, serta kelebihan pembayaran kewajiban Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Tahun 2013.
 - **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp9.885,15 juta**, yang terjadi di tiga entitas yaitu PD Baramarta, PD Aneka Usaha Kolaka, dan PD Danum Belum. Kasus-kasus tersebut yaitu pemberian pinjaman kepada pengurus, pegawai dan pihak ketiga untuk dana talangan dan dana operasional pihak ketiga yang berpotensi tidak tertagih. Pinjaman tersebut pada umumnya tidak terkait kegiatan bisnis perusahaan, tanpa ketentuan batas pengembalian, tidak ada jaminan, dan diantaranya tanpa dilengkapi dokumen peminjaman.

- **Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp21.853,38 juta**, yang terjadi di tujuh entitas antara lain PD Aneka Usaha Kolaka, PD Baramarta, PD Bangun Banua, Baratala Tuntung Pandang, dan PD Bara Kaltim Sejahtera. Kasus-kasus tersebut antara lain tunggakan kewajiban sejumlah mitra kerja sehubungan kerjasama penambangan bijih besi berupa dana royalti, jasa kontribusi, biaya administrasi pengajuan SPK, dan jaminan reklamasi yang belum dibayarkan kepada perusahaan daerah, serta sumbangan perusahaan daerah atas produksi batubara yang belum dibayarkan kepada pemerintah daerah.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll**, yang terjadi di delapan entitas. Kasus-kasus tersebut antara lain terdapat kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), terdapat BUMD yang belum sepenuhnya menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang, belum memberikan jaminan reklamasi dan/atau pasca tambang sesuai dengan ketentuan, serta terdapat BUMD yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban reklamasi pada bekas areal tambang.
- **Perencanaan kegiatan tidak memadai**, yang terjadi di enam entitas. Kasus-kasus tersebut antara lain rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan belum disusun secara memadai, rencana bisnis belum disusun untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan pembentukan anak perusahaan belum didukung dengan perencanaan yang memadai.
- **Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga, senilai Rp 3.516,11 juta**, yang terjadi di tiga entitas yaitu PD Baramarta, PD Danum Belum, dan PD Bangun Banua. Kasus-kasus tersebut antara lain pemberian upah produksi kepada masyarakat, sewa kendaraan oleh BUMD tetapi digunakan untuk kegiatan operasional pihak ketiga, pembayaran catering untuk pegawai pihak ketiga, serta terdapat pemberian sumbangan dana pensiun dan tunjangan pengelola keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Selain itu terdapat dana representatif kepada direksi yang bukan untuk kepentingan pengembangan usaha perusahaan dan mengabaikan kondisi perusahaan yang mengakibatkan pemborosan.

Penyebab

9.61 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- Direksi BUMD lalai menyetujui klausul dan perjanjian novasi dengan pihak ketiga, kurang profesional dalam mengelola perusahaan, lalai dalam membuat kebijakan pemberian pinjaman tanpa didukung perjanjian peminjaman, serta kurang memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Direksi BUMD lalai meminta jaminan reklamasi berdasarkan rencana reklamasi, belum optimal dalam mengurus perizinan pinjam pakai kawasan hutan dan kurang optimal dalam melakukan penagihan dan pengawasan, serta lalai dalam menyusun dan menyampaikan rencana kerja perusahaan;
- Manajer keuangan BUMD tidak cermat dalam meminta royalti atas penjualan hasil nikel, tidak cermat dalam melakukan pembayaran atas pengeluaran yang menjadi kewajiban pihak ketiga, dan lalai dalam memverifikasi tagihan upah manajemen;
- Manajer Teknik dan Operasional tidak cermat mengawasi pelaksanaan operasional pertambangan, dan tidak melaporkan kegiatan yang bukan kewajiban BUMD; dan
- kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan dari badan pengawas/komisaris, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya, serta tidak tegas dalam pemberian sanksi.

Rekomendasi

9.62 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain agar

- Bupati memerintahkan Direksi BUMD melakukan evaluasi perjanjian novasi dan renegotiasi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, menarik kelebihan pembayaran dan mengupayakan penagihan piutang, serta melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Direksi BUMD melengkapi seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dengan rencana reklamasi dan pasca tambang, mengidentifikasi nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah ditempatkan untuk masing-masing IUP, serta menghitung dan menutup kekurangan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut berdasarkan rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disahkan instansi terkait;
- Direksi BUMD berkoordinasi dengan instansi terkait untuk secara bertahap melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang atas lahan bekas tambang yang tidak lagi memproduksi sesuai ketentuan yang berlaku, serta agar menyelesaikan status perizinan atas wilayah IUP yang berada di kawasan hutan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

- Direksi BUMD menyusun rencana kerja tahunan dan rencana bisnis perusahaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan dan pengembangan usaha di masa mendatang dan menyusun studi kelayakan dan rencana bisnis anak perusahaan yang dibentuk;
 - Direksi BUMD memerintahkan manajer keuangan menyesuaikan penyajian pencatatan dalam laporan, dan memerintahkan Manajer Teknik dan Operasional untuk melakukan rekonsiliasi dan membuat berita acara hasil produksi dan penjualan pada setiap tempat atau titik persediaan batubara; dan
 - Kepala Daerah melalui SKPD terkait agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan berlaku kepada BUMD yang lalai dalam membuat dan melaksanakan perjanjian, belum menyusun rencana reklamasi dan/atau pasca tambang, tidak/kurang menyediakan jaminan rencana reklamasi dan/atau pasca tambang, dan tidak/belum melaksanakan reklamasi dan/atau pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9.63 Rincian hasil pemeriksaan atas operasional BUMD pertambangan per kelompok dan jenis temuan untuk temuan SPI disajikan dalam Lampiran 51 dan untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Lampiran 52.

Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya

- 9.64 Perusahaan daerah aneka usaha lainnya merupakan kelompok perusahaan daerah dengan kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam empat kelompok sebelumnya (PDAM, BPD/BPR, PD Pasar, BUMD pertambangan). Kegiatan usaha perusahaan daerah kelompok aneka usaha lainnya, antara lain: agribisnis, peternakan, pengelolaan pembangkit listrik, pengolahan dan perdagangan minyak dan gas bumi, perdagangan umum, perdagangan komoditi daerah, ekspor dan impor, asuransi/penjaminan, jasa pengolahan air limbah, jasa konstruksi, jasa terminal, jasa pengangkutan dan pelayaran, dll.
- 9.65 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa kegiatan operasional BUMD aneka usaha lainnya TA 2011 s.d. 2013 atas 28 BUMD. Rincian BUMD aneka usaha lainnya yang diperiksa tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.12.

Tabel 9.12. Daftar Rincian BUMD Aneka Usaha Lainnya yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013

No	BUMD Aneka Usaha	No	BUMD Aneka Usaha
1	PT Pengembangan Investasi Riau Provinsi Riau	15	PD Banama Tingang Makmur Provinsi Kalimantan Tengah
2	PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Kota Palembang	16	PD Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin
3	PD Wahana Raharja Provinsi Lampung	17	PT Indo Pusaka Berau Kabupaten Berau
4	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dan Anak Perusahaan, Provinsi DKI Jakarta	18	PT Bontang Migas dan Energi Kota Bontang
5	PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan, Provinsi DKI Jakarta	19	PD Kota Tarakan
6	PD Aneka Wirausaha Provinsi Jawa Tengah	20	PD Pembangunan Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
7	PT Anindya Mitra Internasional Provinsi DIY	21	PT Citra Nuansa Elok Kota Palu
8	PD Taru Martani Provinsi DIY	22	PD Holding Company Gowa Mandiri Kabupaten Gowa
9	PT Petrogas Jatim Utama, Provinsi Jawa Timur	23	PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar
10	PT Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali	24	PT Gorontalo Fitrah Mandiri Provinsi Gorontalo
11	PD Jembrana Kabupaten Jembrana	25	PD Panca Karya Provinsi Maluku
12	PT Flobamor Provinsi NTT	26	PD Irian Bhakti Provinsi Papua
13	Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	27	PT Rakyat Papua Sejahtera Provinsi Papua
14	PD Katingan Jaya Mandiri di Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah	28	PT Papua Doberai Mandiri Provinsi Papua Barat

9.66 Cakupan pemeriksaan pengelolaan kegiatan operasional pada 28 BUMD aneka usaha lainnya adalah senilai Rp5.625.003,56 juta dari realisasi anggaran senilai Rp7.910.460,79 juta.

Tujuan Pemeriksaan

- 9.67 Tujuan pemeriksaan BUMD aneka usaha lainnya adalah untuk menilai apakah
- pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) aneka usaha lainnya telah melalui studi kelayakan dan didukung dengan sumber daya yang memadai;
 - kerjasama BUMD aneka usaha lainnya dengan pihak ketiga telah memperhatikan kepentingan perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - pengelolaan sumber daya BUMD aneka usaha lainnya telah dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi pendapatan, efisiensi biaya operasional, kewajiban kepada pemerintah, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - struktur perusahaan dan pejabat pengelola BUMD aneka usaha lainnya telah ditetapkan sesuai kebutuhan perusahaan dan sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- sistem pengendalian intern (SPI) atas kegiatan operasional sudah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional perusahaan.

Hasil Pemeriksaan

- 9.68 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMD aneka usaha lainnya telah mengungkap sebanyak 394 kasus senilai Rp96.750,11 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 201 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 193 kasus senilai Rp96.750,11 juta. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 9.13.

Tabel 9.13. Kelompok Temuan atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah/Perusahaan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	201	19	29	44	84	17	193
Nilai kasus	-	35.081,98	22.205,81	35.908,35	-	3.553,97	96.750,11
Jumlah Entitas	28	11	13	20	26	12	27*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	-	-	1.524,55	-	-	1.524,55

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas
 * : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 9.69 Hasil pemeriksaan atas operasional BUMD aneka usaha lainnya mengungkap sebanyak 19 kasus kerugian daerah/perusahaan senilai Rp35.081,98 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah/perusahaan sebanyak 7 kasus senilai Rp31.085,36 juta.
- 9.70 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDTT atas operasional BUMD aneka usaha lainnya disajikan pada Lampiran 53.
- 9.71 Hasil pemeriksaan atas 28 BUMD aneka usaha lainnya menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp29.698,99 juta**, yang terjadi di dua entitas, yaitu PT Petrogas Jatim Utama, dan PD Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin. Kasus-kasus tersebut yaitu investasi pada proyek kerja sama pengadaan batubara tidak dapat dipertanggungjawabkan dan belum dikembalikan mitra kerja sama, serta terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga yang belum melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

- **Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp32.293,50 juta**, yang terjadi di 19 entitas, antara lain PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan, PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dan Anak Perusahaan, PT Gorontalo Fitrah Mandiri, PT Citra Nuansa Elok, dan PD Panca Karya. Kasus-kasus tersebut antara lain BUMD dan mitra kerjasama BUMD belum memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan beserta denda administrasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bunga hutang. Selain itu, terdapat tunggakan angsuran atas penjualan properti termasuk denda keterlambatannya, serta bagi hasil produksi/penjualan kayu bulat yang belum diterima BUMD.
- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp20.828,19 juta**, yang terjadi di 11 entitas, antara lain PD Holding Company Gowa Mandiri, PD Panca Karya, PD Irian Bhakti, Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, dan PD Katingan Jaya Mandiri. Kasus-kasus tersebut antara lain piutang usaha, piutang pemegang saham dan piutang lain-lain yang berpotensi tidak tertagih karena tidak ada pembukuan, berumur lebih dari 1 tahun, dan debitur tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, terdapat biaya jasa pelaksanaan pendistribusian beras PNS yang dikerjakan tanpa didukung kontrak/SPK berpotensi tidak tertagih.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di 18 entitas. Kasus-kasus tersebut antara lain novasi/pengambilalihan hutang atau kredit BUMD lain belum berdasarkan analisis risiko secara profesional yang selanjutnya membebani BUMD untuk membayar hutang dan bunga kredit, biaya penyusutan aset tetap tidak produktif membebani unit usaha BUMD, dan setoran pembagian laba BUMD kepada Pemerintah Daerah (pemda) membebani keuangan BUMD karena belum menghasilkan laba.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di 19 entitas. Kasus-kasus tersebut antara lain BUMD belum menyusun SOP atas kegiatan operasional, pengelolaan hotel, pengelolaan piutang usaha, penjualan kredit, kewajiban karyawan, pengelolaan investasi dan piutang, serta tata kerja staf ahli.
- **Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga senilai Rp1.673,68 juta**, yang terjadi di enam entitas, yaitu PT Rakyat Papua Sejahtera, PD Terminal Makassar Metro, Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, PD Wahana Raharja, PT Bontang Migas dan Energi, dan PT Flobamor. Kasus-kasus tersebut antara lain pembayaran upah tidak tetap direksi pada anak perusahaan BUMD yang seharusnya tidak diberikan karena perusahaan mengalami kerugian,

dana pembentukan laba ditahan dibelanjakan tidak sesuai tujuan pembentukan, dan pembelian bangunan dimana bangunan tersebut harus dibongkar karena akan digunakan untuk perumahan.

Penyebab

9.72 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena

- pejabat pelaksana dan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugasnya, belum memperhatikan ketentuan yang berlaku, kurang cermat dalam melakukan penatausahaan piutang, serta kurang optimal melakukan penagihan angsuran piutang dan kekurangan penerimaan bagi hasil produksi;
- Direksi belum menyusun SOP untuk suatu prosedur, kurang optimal dalam memanfaatkan aset yang dimiliki, belum memperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar tunjangan direksi, belum memperhatikan peraturan dalam mengelola BUMD serta lemahnya pengawasan dan pengendalian direksi;
- Dewan Komisaris/Badan Pengawas belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal atas kebijakan yang dikeluarkan direksi;
- debitur/mitra kerja sama belum melaksanakan kewajiban membayar angsuran/dana investasi sesuai perjanjian; dan
- penyetoran pembagian laba BUMD kepada pemda tidak didasarkan atas hasil usaha BUMD, tetapi hanya berdasarkan APBD pemda.

Rekomendasi

9.73 Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK merekomendasikan agar

- Direksi memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana/pejabat yang bertanggung jawab yang lalai dan belum memperhatikan ketentuan yang berlaku, memerintahkan untuk menagih tunggakan angsuran/piutang/kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas perusahaan, serta menyetorkan pajak ke kas negara/daerah;
- Direksi menyusun dan menetapkan SOP, meningkatkan pemanfaatan aset yang dikelola, lebih memperhatikan peraturan dalam mengelola BUMD, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian;
- Dewan Komisaris/Badan Pengawas memerintahkan direksi untuk meminta pertanggungjawaban mitra kerja dalam bentuk pengembalian dana dan lebih ketat melakukan pengawasan dan pengendalian atas kebijakan direksi; dan
- Badan Pengawas dan direksi berkoordinasi dengan pemda untuk memperhitungkan jumlah setoran yang masuk ke kas daerah.

- 9.74 Rincian hasil pemeriksaan atas operasional BUMD aneka usaha lainnya per kelompok dan jenis temuan untuk temuan SPI disajikan dalam Lampiran 54 dan untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Lampiran 55.

Operasional RSUD

- 9.75 Dalam Semester II Tahun 2013, BPK telah memeriksa operasional RSUD TA 2012 s.d. 2013 pada sembilan RSUD, yang terdiri atas delapan RSUD yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan satu RSUD yang masih merupakan SKPD yaitu RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan. Rincian RSUD yang diperiksa tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.14.

Tabel 9.14. Daftar Rincian RSUD yang Diperiksa pada Semester II Tahun 2013

No	RSUD	No	RSUD
1	RSUD M. Yunus	6	RSUD KRT Setjonegoro
2	RSUD Koja	7	RSUD Wangaya
3	RSUD Gunung Jati	8	RSUD Kota Mataram
4	RSUD R. Syamsudin	9	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
5	RSUD Pandan Arang		

Tujuan Pemeriksaan

- 9.76 Secara umum, tujuan pemeriksaan atas operasional RSUD adalah untuk menilai apakah
- sistem pengendalian intern (SPI) entitas terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaksanaan pendapatan dan belanja operasional RSUD telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian; dan
 - pengelolaan pendapatan dan biaya/belanja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien, dan efektifitas.
- 9.77 Cakupan pemeriksaan operasional atas sembilan RSUD adalah senilai Rp1.290.330,79 juta dari realisasi anggaran senilai Rp1.942.662,12 juta.

Hasil Pemeriksaan

- 9.78 Hasil pemeriksaan atas operasional RSUD telah mengungkap sebanyak 158 kasus senilai Rp12.578,15 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 71 kasus terjadi di delapan entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 87 kasus senilai Rp12.578,15 juta dan terjadi di sembilan entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 9.15.

Tabel 9.15. Kelompok Temuan atas Operasional RSUD

(nilai dalam juta rupiah)

Keterangan	Kelemahan SPI	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
		Kerugian Daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	71	23	4	21	25	14	87
Nilai Kasus	-	3.141,72	5.069,93	2.734,66	-	1.631,84	12.578,15
Jumlah Entitas	9	7	3	8	9	7	9*
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan	-	1.053,27	-	33,00	-	-	1.086,27

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 9.79 Rincian temuan pada tiap-tiap kelompok menurut entitas disajikan pada Tabel 9.16.

Tabel 9.16. Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Operasional RSUD

(nilai dalam juta rupiah)

No	Jenis Temuan	Kabupaten/Kota		BLUD		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
1	SPI	6	-	65	-	71	-
Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	-	-	23	3.141,72	23	3.141,72
2	Potensi Kerugian Daerah	-	-	4	5.069,93	4	5.069,93
3	Kekurangan Penerimaan	-	-	21	2.734,66	21	2.734,66
4	Administrasi	3	-	22	-	25	-
5	Ketidakhematan	1	114,50	3	25,58	4	140,08
6	Ketidakefektifan	5	-	5	1.491,76	10	1.491,76
	Total Ketidapatuhan	9	114,50	78	12.463,65	87	12.578,15

- 9.80 Hasil pemeriksaan atas operasional RSUD mengungkap sebanyak 23 kasus kerugian daerah senilai Rp3.141,72 juta, di antaranya terdapat indikasi kerugian daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp877,22 juta.
- 9.81 Daftar kelompok temuan menurut entitas pada PDDT atas operasional RSUD disajikan pada lampiran 56.
- 9.82 Hasil pemeriksaan atas sembilan RSUD menunjukkan adanya kasus-kasus yang di antaranya sebagai berikut.
- **Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp1.726,82 juta**, yang terjadi di tiga entitas yaitu RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, RSUD Gunung Jati Kota

Cirebon, dan RSUD Wangaya Kota Denpasar. Kasus-kasus tersebut seperti kelebihan pembayaran honorarium dewan pengawas RSUD dan jasa pelayanan Jamkesmas karena dihitung tidak berdasarkan pada nilai pendapatan yang telah diverifikasi oleh verifikator independen. Di samping itu terdapat kelebihan pembayaran jasa pelayanan kepada pejabat struktural eselon IV pada bulan Januari 2012 sampai September 2013 yang seharusnya mengikuti sistem *indexing* namun menggunakan persentase direksi.

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp4.267,92 juta**, yang terjadi di dua entitas yaitu RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dan RSUD Wangaya Kota Denpasar. Kasus-kasus tersebut adalah piutang pasien umum RSUD yang berasal dari pelayanan kesehatan kepada pasien umum yang belum tertagih karena beberapa alamat pasien yang tercatat tidak sesuai dengan alamat sebenarnya dan menggunakan identitas orang lain. Selain itu terdapat piutang pasien Ikatan Kerja Sama (IKS) RSUD tidak dapat ditagih karena dokumen-dokumen terkait pasien atas tagihan IKS tersebut tidak lengkap dan penagihan oleh pihak rumah sakit kepada perusahaan-perusahaan penjamin telah melebihi batas waktu sesuai perjanjian kerjasama.
- **Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah senilai Rp2.322,56 juta**, yang terjadi di tujuh entitas, antara lain RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi, RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu, RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD Kota Mataram dan RSUD Koja. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat penarikan tunai atas dana pada rekening penerimaan RSUD yang kurang disetorkan ke rekening RSUD secara tertib, digunakan langsung, atau tidak dipertanggungjawabkan secara memadai sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan RSUD. Di samping itu terdapat bendahara pengeluaran yang membayar kepada penyedia obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) dengan harga bruto (harga obat + PPN) tanpa melakukan pemungutan atas PPN dan PPh Pasal 22, pajak tersebut dibayarkan oleh penyedia obat dan BMHP namun bendahara tidak memiliki mekanisme kontrol untuk meyakinkan bahwa seluruh kewajiban pajak tersebut telah disetor ke kas negara.
- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)** yang terjadi di tiga entitas, yaitu RSUD R. Syamsudin Kota Sukabumi, RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, dan RSUD Wangaya Kota Denpasar. Kasus-kasus tersebut seperti pembayaran honor pembinaan hanya didukung bukti kuitansi dan tidak dilampiri daftar penerima serta belanja BBM dibayarkan secara tunai kepada pejabat struktural RSUD dan dipertanggungjawabkan hanya dengan bon bensin yang dibuat staf unit pengadaan barang dan jasa. Selain itu terdapat realisasi pembayaran jasa konsultasi tidak dilampiri bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran yang sesungguhnya sehingga penggantian atas biaya langsung non personil belum sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*).

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan**, yang terjadi di empat entitas. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana RSUD untuk penempatan anjungan tunai mandiri (atm) yang belum diikat perjanjian kerjasama yang berakibat RSUD kehilangan potensi pendapatan atas biaya sewa dan menanggung biaya pemeliharaan, termasuk biaya listrik. Selain itu terdapat pendapatan yang tidak tertagih yang timbul dari penolakan klaim Askes Tahun 2012 yang diajukan RSUD yang disebabkan pengajuan tanpa bukti pendukung memadai, biaya yang tidak dijamin program Askes atau tindakan/pemeriksaan yang tidak sesuai diagnosa, dan berkas pengajuan klaim pasien tidak dibubuhi tanda tangan pasien.
- **Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga senilai Rp140,08 juta**, yang terjadi di tiga entitas, yaitu RSUD Zainal Abidin Kabupaten Way Kanan, RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, dan RSUD Kota Mataram. Kasus-kasus tersebut seperti pembayaran jasa administrasi umum kepada tenaga struktural dan kepala ruangan, staf manajemen yang tidak terkait langsung dengan jasa medik atau pelayanan mengakibatkan pemborosan keuangan daerah. Selain itu terdapat pembelian kamera, printer, dan mebel pada Tahun 2012 dan 2013 yang melebihi standar satuan harga (SSH).
- **Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp771,73 juta**, yang terjadi di dua entitas, yaitu RSUD M. Yunus Bengkulu dan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Kasus-kasus tersebut adalah pengeluaran biaya makan pasien digunakan untuk membayar uang makan dokter jaga yang masih terutang di Tahun 2012, untuk *extra fooding* tenaga pelayanan yang bertugas di bagian-bagian yang berisiko tinggi menurut ketetapan direktur, untuk pembayaran uang makan dokter residen dan dokter jaga Tahun 2013, dan untuk pembayaran biaya makan kegiatan penunjang pelayanan. Selain itu, penggunaan dana Jamkesmas tidak tepat sasaran yaitu tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan seperti observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, *visite*, dan/atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksana administrasi pelayanan. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

9.83 Penyerahan aset atau penyetoran selama proses pemeriksaan, dari kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan atas operasional RSUD senilai Rp10.946,31 juta telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah senilai Rp1.086,27 juta, yaitu RSUD Koja Provinsi DKI Jakarta senilai Rp799,15 juta, RSUD Wangaya Kota Denpasar senilai Rp213,13 juta, dan RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu senilai Rp73,99 juta.

Penyebab

- 9.84 Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena pimpinan RSUD kurang cermat dalam menyusun kebijakan, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta kurangnya koordinasi antar instansi.

Rekomendasi

- 9.85 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan RSUD agar lebih cermat dalam menyusun kebijakan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, meningkatkan koordinasi antar instansi, melakukan upaya penagihan piutang yang tertunggak serta mempertanggungjawabkan kerugian daerah dan kekurangan penerimaan yang terjadi dengan cara menyetero uang ke kas negara/daerah.
- 9.86 Rincian hasil pemeriksaan atas operasional RSUD per kelompok dan jenis temuan untuk temuan SPI disajikan dalam Lampiran 57 dan untuk temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan dalam Lampiran 58.
- 9.87 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

BAB 10

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Lainnya

- 10.1 Selain tema-tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dalam Semester II Tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) lainnya pada 6 objek pemeriksaan yaitu 3 objek pemeriksaan pada 3 entitas pemerintah pusat dan 3 objek pemeriksaan pada 3 entitas pemerintah daerah.
- 10.2 Entitas pemeriksaan pemerintah pusat tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Bank Indonesia. Adapun entitas pemeriksaan pemerintah daerah meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Sigi.
- 10.3 Cakupan pemeriksaan atas enam entitas tersebut adalah senilai Rp24.933.986,05 juta, dengan rincian cakupan pemeriksaan entitas pemerintah pusat senilai Rp24.895.764,60 juta dan entitas pemerintah daerah senilai Rp38.221,45 juta.
- 10.4 Hasil pemeriksaan atas PDTT lainnya telah mengungkap sebanyak 72 kasus senilai Rp75.589,31 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 31 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 41 kasus senilai Rp75.589,31 juta. Rincian kelompok temuan disajikan dalam Tabel 10.1.

Tabel 10.1. Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya

(nilai dalam juta rupiah)

Subtema	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan	
	Kasus	Kasus	Nilai
PDTT lainnya pemerintah pusat	12	20	75.411,39
PDTT lainnya pemerintah daerah	19	21	177,92
Total	31	41	75.589,31

- 10.5 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya terdiri atas 2 subtema, yaitu sebagai berikut :
- PDTT lainnya pemerintah pusat; dan
 - PDTT lainnya pemerintah daerah.
- 10.6 Penjelasan lebih lanjut terhadap subtema pemeriksaan PDTT lainnya disajikan pada uraian berikut.

Pemerintah Pusat

- 10.7 Cakupan pemeriksaan atas PDDT lainnya pada tiga objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp24.895.764,60 juta dari realisasi anggaran belanja senilai Rp51.798.207,75 juta.
- 10.8 Hasil pemeriksaan atas tiga entitas pemerintah pusat telah mengungkap sebanyak 32 kasus senilai Rp75.411,39 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 12 kasus di dua entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 20 kasus senilai Rp75.411,39 juta dan terjadi di dua entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 10.2.

Tabel 10.2. Kelompok Temuan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			
		Potensi Kerugian Negara	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah Kasus	12	1	12	7	20
Nilai Kasus	-	74.840,55	-	570,84	75.411,39
Jumlah Entitas	2	1	2	2	2*

Keterangan:

- SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas
 * : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 10.9 Daftar kelompok temuan menurut entitas atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat disajikan pada Lampiran 59.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

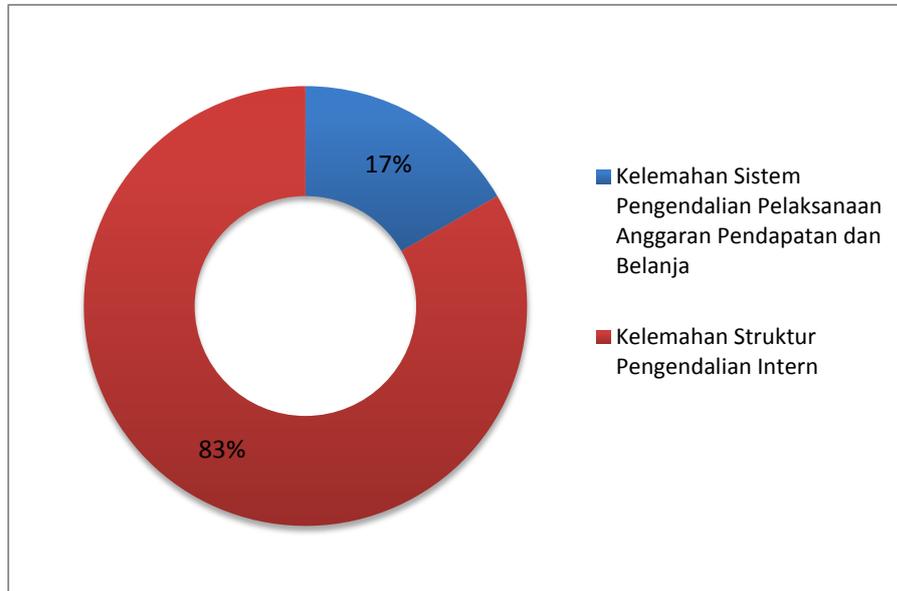
- 10.10 Hasil pemeriksaan SPI mengungkap sebanyak 12 kasus kelemahan SPI, yang meliputi 2 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 10 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.3.

Tabel 10.3. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Kementerian	Badan	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	-	2	2
2	Struktur Pengendalian Intern	4	6	10
	Jumlah	4	8	12

10.11 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas PDTT lainnya pada pemerintah pusat disajikan dalam Grafik 10.1.

Grafik 10.1. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat



10.12 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, yang terjadi di dua entitas. Kasus-kasus tersebut di antaranya terdapat badan/lembaga keswadayaan masyarakat tidak membuat atau tidak melakukan pemutakhiran data warga miskin di wilayahnya, pengolahan uang kertas (UK) dengan mesin sortasi uang kertas (MSUK) dan mesin racik uang kertas (MRUK) belum didokumentasikan dengan tertib, serta pengamanan dan pengawasan proses pengolahan UK dengan MSUK dan MRUK belum sepenuhnya sesuai ketentuan seperti pengeledahan tidak selalu dilakukan, perekaman CCTV tidak menjangkau seluruh area, dan tidak terdapat rekaman CCTV atas kegiatan pengolahan uang.
- **Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur**, yang terjadi di satu entitas. Kasus tersebut seperti penempatan pesanan cetak uang TA 2012 terlambat karena proses negosiasi yang berlarut-larut, pelaksanaan pengelolaan UK dengan MSUK pada 2012 tidak berjalan optimal dan belum seluruhnya sesuai dengan *soil level* (tingkat kelusuhan UK) dan mode mesin yang ditetapkan, uji petik terhadap uang tidak layak edar (UTLE) yang akan dimusnahkan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, serta ketentuan terkait pemusnahan belum dimutakhirkan dan belum secara rinci mengatur pelaksanaan uji petik dan pemeriksaan hasil racik.

- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di satu entitas. Kasus tersebut seperti kontrak pencetakan uang belum mengatur penyelesaian biaya tambahan atas terjadinya bahan uang substandar serta timbulnya biaya tambahan dan waktu yang lebih lama karena adanya perubahan proses penanganan impor bahan uang di pelabuhan.

Penyebab

- 10.13 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain terjadi karena pejabat pelaksana belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman, BI belum menyadari pentingnya pengaturan klausul biaya tambahan atas pencetakan bahan uang yang ditemukan substandar, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.
- 10.14 Selain itu kasus kelemahan SPI juga disebabkan oleh perjanjian mengenai *standard cost* belum mengatur secara jelas cara perhitungan faktor penyesuaian dan masih mengakomodir rentang margin yang terlalu besar, belum efektifnya pemantauan atas kepatuhan Kepala Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) BI atas kebijakan tingkat pemusnahan yang telah ditetapkan Departemen Pengelolaan Uang (DPU) dan memastikan dampaknya terhadap pencapaian target kas minimum, belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci bentuk dokumentasi proses uji petik yang lengkap dan informatif, serta tata cara pengambilan/pemilihan sampel dan BI tidak mencabut atau menyesuaikan aturan tentang pemusnahan UTLE.

Rekomendasi

- 10.15 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada pejabat pelaksana yang belum melaksanakan pedoman yang berlaku, menambahkan klausul kontrak terkait biaya tambahan atas pencetakan bahan uang substandar, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 10.16 BPK juga merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa agar memperjelas penyesuaian atas kapasitas produksi dan mereviu serta memperjelas seluruh faktor penyesuaian lainnya dalam perjanjian *standard cost*, memperbaiki mekanisme pemantauan kepatuhan KPw DN BI atas kebijakan tingkat pemusnahan yang telah ditetapkan DPU dan memastikan dampaknya terhadap batas aman kecukupan kas nasional, mengatur secara rinci bentuk dokumentasi, serta tata cara pengambilan/pemilihan sampel, dan segera menyesuaikan dan menyempurnakan aturan terkait pemusnahan UTLE.
- 10.17 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas PDDT lainnya pada pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 60.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

10.18 Hasil pemeriksaan mengungkapkan 20 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di dua objek pemeriksaan pemerintah pusat senilai Rp75.411,39 juta yang disajikan dalam Tabel 10.4.

Tabel 10.4. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Kementerian		Badan		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Potensi Kerugian Negara	1	74.840,55	-	-	1	74.840,55
2	Kelemahan Administrasi	12	-	-	-	12	-
3	Ketidakefektifan	7	570,84	-	-	7	570,84
	Jumlah	20	75.411,39	-	-	20	75.411,39

10.19 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih senilai Rp74.840,55 juta**, yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum. Kasus tersebut adalah terdapat pinjaman macet yang diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) senilai Rp74.840,55 juta.
- **Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan**, yang terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain seperti pemberian izin pemanfaatan limbah B3 tidak cermat, terdapat perusahaan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tidak mempunyai izin tempat penyimpanan sementara (TPS) dan berpotensi mencemari lingkungan, serta TPS limbah B3 tidak sesuai UU dan PP seperti TPS tidak memiliki atap, berdekatan dengan kali kecil, dan daya tampung TPS kecil.
- **Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp570,84 juta**, yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum. Kasus tersebut di antaranya seperti penyaluran pinjaman bergulir kepada yang tidak berhak, yaitu kepada pengurus badan keswadayaan masyarakat (BKM) dan kegiatan operasional BKM.

Penyebab

- 10.20 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran penerima dana untuk melunasi pinjaman, pejabat pelaksana dan perusahaan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian pejabat yang bertanggung jawab.

Rekomendasi

- 10.21 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar lebih intensif dalam menagih piutang, memberikan sanksi atas kelalaian dan menindaklanjuti kasus pelanggaran yang dilakukan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- 10.22 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas PDTT lainnya pada pemerintah pusat per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 61.

Pemerintah Daerah

- 10.23 Cakupan pemeriksaan atas PDTT lainnya pada tiga objek pemeriksaan pemerintah daerah adalah senilai Rp38.221,45 juta dari realisasi anggaran senilai Rp38.221,45 juta.
- 10.24 Hasil pemeriksaan atas tiga objek pemeriksaan pemerintah daerah telah mengungkap sebanyak 40 kasus senilai Rp177,92 juta yang merupakan temuan kelemahan SPI sebanyak 19 kasus di tiga entitas dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 21 kasus senilai Rp177,92 juta dan terjadi di tiga entitas. Rincian jumlah dan nilai kasus per kelompok temuan disajikan pada Tabel 10.5.

Tabel 10.5. Kelompok Temuan atas PDTT Lainnya pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

Uraian	Kelemahan SPI	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			
		Kerugian Daerah	Kelemahan Administrasi	3E	Total
Jumlah kasus	19	5	3	13	21
Nilai temuan	-	54,93	-	122,99	177,92
Jumlah Entitas	3	1	1	3	3*

Keterangan:

SPI : Sistem Pengendalian Intern 3E : Ekonomis/ketidakhematan, efisiensi, dan efektivitas

* : Total pada jumlah entitas bukan merupakan hasil penjumlahan

- 10.25 Daftar kelompok temuan menurut entitas atas PDDT lainnya pemerintah daerah disajikan pada lampiran 62.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)

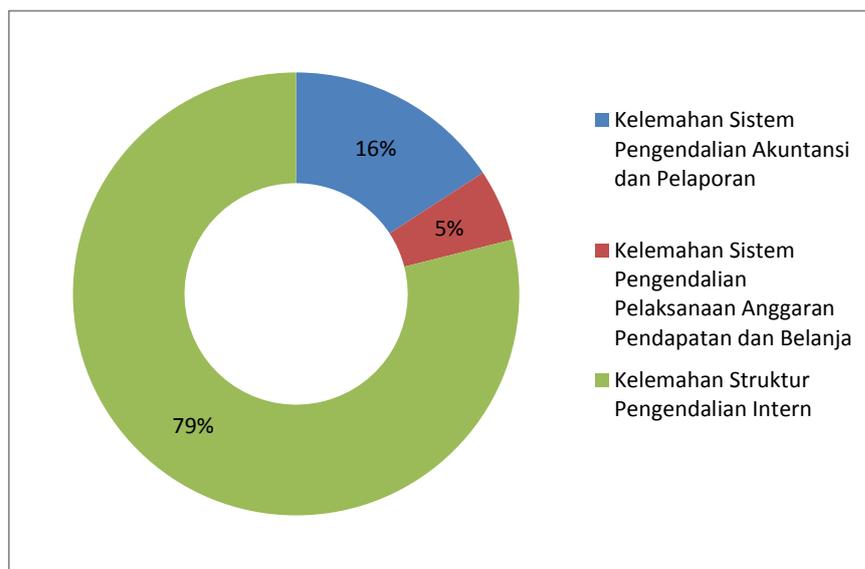
- 10.26 Hasil pemeriksaan SPI atas PDDT lainnya pada pemerintah daerah mengungkapkan adanya 19 kasus kelemahan SPI. Rincian kelemahan SPI tersebut meliputi 3 kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 1 kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 15 kasus kelemahan struktur pengendalian intern sebagaimana disajikan dalam Tabel 10.6.

Tabel 10.6. Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah

No	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus		
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas				
1	Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	3	-	3
2	Sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	-	1	1
3	Struktur Pengendalian Intern	2	13	15
	Jumlah	5	14	19

- 10.27 Persentase kelompok temuan kelemahan SPI atas PDDT lainnya pada pemerintah daerah disajikan dalam Grafik 10.2.

Grafik 10.2. Persentase Kelompok Temuan Kelemahan SPI atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah



10.28 Kasus-kasus kelemahan SPI tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Entitas tidak memiliki SOP formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan**, terjadi di dua entitas. Kasus-kasus tersebut seperti SOP tentang pengelolaan database kepegawaian, SOP tentang pemberian izin belajar PNS, dan SOP tentang mekanisme mutasi internal, serta peraturan tentang rencana pemulihan setelah bencana (*Disaster Recovery Plan*) belum dimiliki oleh entitas.
- **SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati**, terjadi di tiga entitas. Kasus-kasus tersebut seperti terdapat perbedaan jumlah siswa penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) antara data rekapitulasi absen dengan data yang disampaikan ke tim manajemen BOS kabupaten, serta antara lampiran naskah perjanjian hibah BOS dengan jumlah yang diajukan oleh tim manajemen BOS kabupaten. Selain itu terdapat prosedur kapitalisasi dengan menggunakan sistem informasi manajemen daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dilaksanakan tidak sesuai pedoman pengoperasian.
- **Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja**, yang terjadi di satu entitas. Kasus tersebut yaitu pemda melakukan penambahan tenaga kontrak pada tahun 2013 tanpa melakukan kajian/analisa kebutuhan tenaga kontrak sehingga mengakibatkan meningkatnya belanja pegawai atas beban honorarium tenaga kontrak.

Penyebab

10.29 Kasus-kasus kelemahan SPI antara lain disebabkan entitas belum memiliki SOP atau peraturan internal untuk suatu kebijakan, pejabat yang bertanggung jawab belum menjalankan tugas sesuai dengan peraturan internal yang telah ditetapkan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

10.30 Terhadap kasus-kasus kelemahan SPI, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab menyusun dan menetapkan SOP atau peraturan internal, melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan, melakukan evaluasi beban kerja PNS dan hasilnya digunakan dalam perekrutan tenaga kontrak sesuai kebutuhan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

10.31 Rincian hasil pemeriksaan SPI atas PDDT lainnya pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 63.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

10.32 Hasil pemeriksaan mengungkapkan sebanyak 21 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di tiga objek pemeriksaan pada tiga entitas pemerintah daerah senilai Rp177,92 juta yang disajikan dalam Tabel 10.7.

Tabel 10.7. Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No	Sub Kelompok Temuan	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
1	Kerugian Daerah	-	-	5	54,93	5	54,93
2	Kelemahan Administrasi	-	-	3	-	3	-
3	Ketidakhematan	-	-	1	28,87	1	28,87
4	Ketidakefektifan	6	-	6	94,12	12	94,12
	Jumlah	6	-	15	177,92	21	177,92

10.33 Kasus-kasus tersebut di antaranya sebagai berikut.

- **Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp28,41 Juta**, yang terjadi di Kabupaten Sigi. Kasus tersebut yaitu dana BOS TA 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan II) yang dibayarkan untuk honor yang diberikan secara rutin dan atas kegiatan yang tidak seharusnya mendapatkan honor.
- **Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya**, yang terjadi di Kabupaten Sigi. Kasus tersebut yaitu dana BOS Pusat dan BOS Kabupaten Tahun 2012 dan Tahun 2013 (s.d. Triwulan II) belum dipertanggungjawabkan oleh sekolah penerima dana senilai Rp4,25 miliar.
- **Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan senilai Rp94,12 Juta**, yang terjadi di Kabupaten Sigi. Kasus tersebut yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan II) digunakan tidak sesuai peruntukan, seperti untuk pembayaran iklan dan profil sekolah untuk dimuat di surat kabar, pembelian LKS, pembelian *software* pengelolaan BOS beserta pelatihan, pembelian ATK dan baju olahraga untuk siswa, serta untuk pembangunan pagar sekolah dan lapangan bola voli.

Penyebab

- 10.34 Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain disebabkan karena pejabat yang berwenang belum menyusun laporan penggunaan dana BOS, pengelolaan dana BOS tidak mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam penggunaan dana BOS.

Rekomendasi

- 10.35 Terhadap kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memerintahkan menyetorkan kembali ke rekening BOS atas dana yang tidak seharusnya dibayarkan, memedomani juknis BOS terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS, dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana BOS.
- 10.36 Rincian hasil pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas PDDT lainnya pada pemerintah daerah per kelompok dan jenis temuan disajikan dalam Lampiran 64.
- 10.37 Hasil pemeriksaan lengkap dapat dilihat pada *softcopy* LHP dalam cakram padat terlampir.

Daftar Singkatan dan Akronim

A

AFE	: <i>Authorization for Expenditure</i>
Anwusa	: Aneka Wirausaha
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
AU	: Aneka Usaha

B

Bansos	: Bantuan Sosial
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BI	: Bank Indonesia
BIG	: Badan Informasi Geospasial
BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
BKU	: Buku Kas Umum
BL	: Bina Lingkungan
BLU	: Badan Layanan Umum
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BMHP	: Bahan Medis Habis Pakai
BMN	: Barang Milik Negara
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOT	: <i>Built Operating Transfer</i>
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJ	: Belanja Pusat Perjalanan Dinas
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	: Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor
BPP	: Badan Pendukung Pengembangan
BPPR	: Beban Persekot Resmi
BPPSPAM	: Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
BP3TI	: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPSP	: Bangunan Pabrik Siap Pakai
BP Batam	: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CNC	: <i>Clear and Clean</i>
CNOOC	: China National Offshore Oil Company
CSEL	: Citic Seram Energy Limited
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia

D

Ditjen PPI	: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DKPTA	: Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
DP	: Dana Pensiun
DPPKA	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPU	: Departemen Pengelolaan Uang

E

EMP MSSA	: Energi Mega Persada Malacca Strait S.A
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

F

FSO	: <i>Floating Storage Offloading</i>
-----	--------------------------------------

H

HGB	: Hak Guna Bangunan
HPL	: Hak Pengelolaan Lahan
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

I

IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IES	: <i>International Energy Statistic</i>
IKS	: Ikatan Kerja Sama
IIX	: <i>International Internet Exchange</i>
IP	: <i>Internet Protocol</i>
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
ISP	: <i>Internet Service Provider</i>
ITU	: <i>International Telecommunication Union</i>
Itjen	: Inspektorat Jenderal
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IX	: <i>Internet Exchange</i>
IXP	: <i>Internet Exchange Point</i>
IWPU	: Iuran Wajib Pesawat Udara

J

JIEP	: Jakarta Industrial Estate Pulogadung
------	--

K

KBN	: Kawasan Berikat Nusantara
Kejagung	: Kejaksaan Agung
Kemenag	: Kementerian Agama
Kemenakertrans	: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kementerian KP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian PU	: Kementerian Pekerjaan Umum
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan
Kemenhut	: Kementerian Kehutanan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM

Kementan	: Kementerian Pertanian
Kemkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Kemsetneg	: Kementerian Sekretariat Negara
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KIM	: Kawasan Industri Medan
KIMA	: Kawasan Industri Makasar
KIW	: Kawasan Industri Wijayakusuma
KJM	: Katingan Jaya Mandiri
KKS	: Kontrak Kerja Sama
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KL	: Kementerian/Lembaga
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPU	: Kewajiban Pelayanan Universal
KPw DN	: Kepala Perwakilan Dalam Negeri
L	
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKS	: Lembar Kerja Siswa
LNG	: Liquefied Natural Gas
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
M	
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MPLIK	: <i>Mobile</i> Pusat Layanan Internet Kecamatan
Monev	: Monitoring dan evaluasi
MRUK	: Mesin Racik Uang Kertas
MSUK	: Mesin Sortasi Uang Kertas
N	
NAP	: <i>Network Access Point</i>
NIK	: Nusantara <i>Internet Exchange</i>
NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
O	
OE	: <i>Owner Estimate</i>
P	
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAM	: Pengelolaan Air Minum
Pamobvit	: Pengamanan Objek Vital
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PBB P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBDR	: Pajak Bunga Dividen dan Royalti
PCJL	: Petrochina International Jabung Ltd
PD	: Perusahaan Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDIP Batam	: Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam
PD PMR	: PD Pasar Makassar Raya
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri

PHP	: Pungutan Hasil Perikanan
PI	: <i>Participating Interest</i>
PIS	: <i>Placed Into Service</i>
PJA	: Pembangunan Jaya Ancol
PJP	: Pelayanan Jasa Penerbangan
PJP4U	: Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara
PJU	: Petrogas Jatim Utama
PK	: Program Kemitraan
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PK KPU	: Pengukuran Kinerja Kewajiban Pelayanan Umum
PLIK	: Pusat Layanan Internet Kecamatan
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPI	: Perum Perikanan Indonesia
PPJ	: Pajak Penerangan Jalan
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPKK	: Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
PPKS	: Pusat Penelitian Kelapa Sawit
PPKGBK	: Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno
PPs	: Pajak Perseroan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
P2KP	: Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PSC	: <i>Production Sharing Contract</i>
PTPN	: PT Perkebunan Nusantara
PT AP I	: PT Angkasa Pura I (Persero)
PT AP II	: PT Angkasa Pura II (Persero)
PT BKI	: PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI	: PT Bank Nasional Indonesia
PT BP	: PT Balai Pustaka
PT JM	: PT Jasa Marga
PT JR	: PT Jasa Raharja (Persero)
PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara
PT RNI	: PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PTK	: Pedoman Tata Kerja
R	
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RDI	: Rekening Dana Investasi
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
RW	: Rukun Warga
S	
Samisake	: Satu Miliar Satu Kecamatan
SAMSAT	: Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap

SEKL	: Star Energy (Kakap) Ltd
SIER	: Surabaya Industrial Estate Rungkut
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMMLIK	: Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan
SIMTB	: Surat Izin Menyewa Tempat Berjualan
SIPTB	: Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan
SKK Migas Bumi	: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: <i>Service Level Agreement</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPK	: Surat Perintah Kerja
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPJ	: Sarana Pembangunan Palembang Jaya
SSH	: Standar Satuan Harga
SSL	: Satuan Sambungan Layanan
STP	: Surat Tagihan Pajak
T	
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TPS	: Tempat Penyimpanan Sementara
TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
U	
UK	: Uang Kertas
UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UPTB	: Unit Pelaksana Teknis Badan
USO	: <i>Universal Service Obligation</i>
UTLE	: Uang Tidak Layak Edar
UU	: Undang-Undang
W	
WK	: Wilayah Kerja

LAMPIRAN

Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	TOTAL			Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan										
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu																													
1	Pengelolaan Pendapatan	319	549.293,52	160	159	549.293,52	10	4.359,33	6	35.420,44	74	507.429,98	61	8	2.083,77	443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.101,80	2.544,80	
			USD 26.022,52			USD 26.022,52					USD 26.022,52																		
1	Pengelolaan Pendapatan Pusat	137	406.161,00	74	63	406.161,00	9	4.279,33	2	5.808,41	25	395.597,85	24	3	475,41	443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687,45	1.130,45	
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	182	143.132,52	86	96	143.132,52	1	80,00	4	29.612,03	49	111.832,13	37	5	1.608,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.414,35	1.414,35	
			USD 1.416,34			USD 1.416,34					USD 1.416,34																		
	Provinsi	43	102.006,86	21	22	102.006,86	-	-	-	-	17	102.006,86	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372,14	1.372,14	
	Kabupaten/kota	139	41.125,66	65	74	41.125,66	1	80,00	4	29.612,03	32	9.825,27	32	5	1.608,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,21	42,21	
			USD 1.416,34			USD 1.416,34						USD 1.416,34																	
2	Pelaksanaan Belanja	2.329	915.449,13	270	2.059	915.449,13	894	279.266,41	311	165.069,26	330	64.044,17	314	210	407.069,29	48.903,18	3.620,51	7.802,48	60.326,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 0,25			USD 0,25		USD 0,25				USD 0,25																	
			AUD 1,80			AUD 1,80		AUD 0,38		AUD 1,42		AUD 1,42				AUD 0,38													
3	Pelaksanaan Belanja Pusat	340	351.115,39	69	271	351.115,39	134	52.537,99	20	47.247,83	24	7.326,35	64	29	244.003,22	20.855,43	26,02	239,15	21.120,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 0,25			USD 0,25		USD 0,25		USD 0,25		USD 0,25																	
			AUD 1,80			AUD 1,80		AUD 0,38		AUD 1,42		AUD 0,38				AUD 0,38													
4	Pelaksanaan Belanja Daerah	1.989	564.333,74	201	1.788	564.333,74	760	226.728,42	291	117.821,43	306	56.717,82	250	181	163.066,07	28.047,75	3.594,49	7.563,33	39.205,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 0,25			USD 0,25		USD 0,25		USD 0,25		USD 0,25																	
			AUD 1,80			AUD 1,80		AUD 0,38		AUD 1,42		AUD 0,38				AUD 0,38													
	Provinsi	300	138.327,30	33	267	138.327,30	101	36.584,38	16	7.253,97	54	22.444,90	52	44	72.044,05	13.731,67	32,55	853,59	14.617,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/kota	1.689	426.006,44	168	1.521	426.006,44	659	190.144,04	275	110.567,46	252	34.272,92	198	137	91.022,02	14.316,08	3.561,94	6.709,74	24.587,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pengelolaan Aset Tetap	418	685.371,65	164	254	685.371,65	22	62.445,16	30	311.227,66	29	310.489,65	160	13	1.209,18	153,47	-	27,21	180,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 30.300,00			USD 30.300,00		USD 30.300,00				USD 30.300,00																	
			AUD 1,80			AUD 1,80		AUD 0,38		AUD 1,42		AUD 0,38				AUD 0,38													
	Provinsi	21	14.234,92	7	14	14.234,92	-	-	5	14.234,92	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/kota	331	37.481,18	141	190	37.481,18	10	2.854,89	22	783,47	5	783,47	142	11	1.209,18	153,47	-	27,21	180,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BLU	66	633.655,55	16	50	633.655,55	12	59.590,27	3	264.359,10	24	309.706,18	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 30.300,00			USD 30.300,00		USD 30.300,00				USD 30.300,00																	

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
4	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile PLIK	46	149.291,41	4	42	149.291,41	4	5.837,46	7	45.565,98	2	807,60	17	12	97.080,37	-	-	-	-	-	-	-	-
5	KKKS	92	USD 81,614,96	13	79	USD 81,614,96	-	-	-	-	68	USD 81,614,96	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Operasional BUMN	528	2.366.904,08	263	265	2.366.904,08	34	277.798,22	33	1.592.549,73	58	56.394,74	67	73	440.161,39	367,68	129,60	157,20	654,48				
			USD 1,893,27			USD 1,893,27		USD 16,00		USD 298,20		USD 1,291,78			USD 287,29		SAR 522,26		SAR 522,26				
			SAR 966,42			SAR 966,42		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53			-		SAR 444,16		SAR 522,26				
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi	330	1.673.399,93	160	170	1.673.399,93	20	116.845,79	23	1.337.283,40	43	40.601,32	41	43	178.669,42	367,68	129,60	157,20	654,48				
			USD 1,848,80			USD 1,848,80		USD 16,00		USD 298,20		USD 1,265,05			USD 269,55		SAR 444,16		SAR 522,26				
			SAR 966,42			SAR 966,42		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53			-		SAR 444,16		SAR 522,26				
9	Kegiatan Pemupukan	50	102.698,73	19	31	102.698,73	-	-	-	-	3	5.750,05	6	22	96.948,68	-	-	-	-				
			USD 17,74			USD 17,74		4.556,40		6.087,78		9.190,68			USD 17,74		-	-	-				
10	Kawasan Industri	82	20.428,62	46	36	20.428,62	9	4.556,40	4	6.087,78	11	9.190,68	10	2	593,76	-	-	-	-				
			USD 26,73			USD 26,73		4.202,00		4.588,09		USD 26,73			-		-	-	-				
11	BL BUMN Peduli	13	163.949,53	8	5	163.949,53	-	-	-	-	-	-	3	2	163.949,53	-	-	-	-				
12	Operasional BUMN Lainnya	53	406.427,27	30	23	406.427,27	5	156.396,03	6	249.178,55	1	862,69	7	4	-	-	-	-	-				
7	Operasional BUMD dan RSUD	1.320	479.121,20	643	677	479.121,20	99	75.714,93	59	90.068,24	102	81.495,75	272	145	231.902,28	1.432,34	-	1.571,79	3.004,13				
			USD 3,776,88			USD 3,776,88		USD 3,471,24		USD 62,48		USD 179,20			USD 63,96		-	-	-				
13	Operasional PDAM	345	238.194,95	215	130	238.194,95	16	1.337,64	3	7.737,59	8	9.261,73	36	67	219.857,99	-	-	-	-				
14	Operasional Bank/BPR	213	62.401,11	80	133	62.401,11	23	4.202,00	18	45.868,09	7	9.359,33	53	32	2.971,69	200,12	-	14,24	214,36				
15	Operasional PD Pasar	108	6.245,39	39	69	6.245,39	5	549,61	2	63,24	12	4.502,57	40	10	1.129,97	148,95	-	-	148,95				
16	Operasional BUMD Pertambangan	102	63.713,06	37	65	63.713,06	13	31.401,98	3	9.885,15	10	19.669,11	34	5	2.756,82	30,00	-	-	30,00				
			USD 3,714,40			USD 3,714,40		USD 3,471,24		USD 179,20		USD 63,96			USD 63,96		-	-	-				

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Total Ketidaktahuan		Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhormatan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan	Total Penyerahan				
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
17	Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya	394	95.988,54	201	95.988,54	193	95.988,54	19	35.081,98	29	21.444,24	44	35.908,35	84	3.553,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.524,55
			USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		USD 62,48		1.524,55
18	Operasional RSUD Kabupaten	158	12.578,15	71	12.578,15	23	3.141,72	4	5.069,93	21	2.734,66	25	2.734,66	25	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84
		15	114,50	6	114,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	114,50	6	114,50	6	114,50	6	114,50	6	114,50	6	114,50
	BLUD	143	12.463,65	65	12.463,65	23	3.141,72	4	5.069,93	21	2.734,66	25	2.734,66	25	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84	14	1.631,84
8	PDTT Lainnya	72	75.589,31	31	75.589,31	5	54,93	1	74.840,55	1	74.840,55	-	-	15	693,83	20	693,83	20	693,83	20	693,83	20	693,83	20	693,83
19	Pusat	32	75.411,39	12	75.411,39	-	-	1	74.840,55	1	74.840,55	-	-	12	570,84	7	570,84	7	570,84	7	570,84	7	570,84	7	570,84
	Kementerian	24	75.411,39	4	75.411,39	-	-	1	74.840,55	1	74.840,55	-	-	12	570,84	7	570,84	7	570,84	7	570,84	7	570,84	7	570,84
	Badan Lainnya	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Daerah	40	177,92	19	177,92	5	54,93	-	-	-	-	-	-	3	122,99	13	122,99	13	122,99	13	122,99	13	122,99	13	122,99
	Provinsi	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	29	177,92	14	177,92	5	54,93	-	-	-	-	-	-	3	122,99	7	122,99	7	122,99	7	122,99	7	122,99	7	122,99
	Total	5.124	5.221.020,30	1.548	5.221.020,30	1.068	705.476,44	447	2.314.741,86	663	1.020.601,89	916	1.380.200,11	482	1.380.200,11	51.299,67	3.750,11	11.660,48	66.710,26						
			USD 143,607,88		USD 143,607,88		USD 33,787,49		USD 360,68		USD 109,108,46		USD 351,25		USD 351,25		AUD 0,38		AUD 0,38		AUD 0,38		AUD 0,38		AUD 0,38
			AUD 1,80		AUD 1,80		AUD 0,38		AUD 1,42		AUD 1,42		AUD 1,42		AUD 1,42		AUD 0,38		AUD 0,38		AUD 0,38		AUD 0,38		AUD 0,38
			SAR 966,42		SAR 966,42		SAR 966,42		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 522,26
			SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53		SGD 210,53
	Pusat	547	981.979,19	151	981.979,19	147	62.654,78	30	173.462,77	51	403.731,80	117	342.129,84	51	342.129,84	21.298,43	26,02	926,60	22.251,05						
		-	USD 24,606,43	-	USD 24,606,43	-	USD 0,25	-	AUD 1,42	-	USD 24,606,18	-	USD 24,606,18	-	USD 24,606,18	-	AUD 0,38	-	AUD 0,38	-	AUD 0,38	-	AUD 0,38	-	AUD 0,38
	Jumlah Rupiah Pusat	547	1.281.926,54	151	1.281.926,54	147	62.654,78	30	173.462,77	51	403.731,80	117	342.129,84	51	342.129,84	21.298,43	26,02	926,60	22.251,05						
	KKKS	92	994.804,75	13	994.804,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10	926,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah KKKS	92	994.804,75	13	994.804,75	-	-	-	-	-	-	-	-	10	926,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMN	528	2.366.904,08	263	2.366.904,08	34	277.798,22	33	1.592.549,73	58	56.394,74	67	440.161,39	73	440.161,39	367,68	129,60	157,20	654,48						
		-	USD 1,893,27	-	USD 1,893,27	-	USD 16,00	-	USD 298,20	-	USD 1,291,78	-	USD 287,29	-	USD 287,29	-	SAR 522,26	-	SAR 522,26	-	SAR 522,26	-	SAR 522,26	-	SAR 522,26
		-	SAR 966,42	-	SAR 966,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah BUMN	528	2.395.149,00	263	2.395.149,00	34	277.993,23	33	1.599.908,83	58	72.140,25	67	445.106,69	73	445.106,69	367,68	1.826,96	157,20	2.351,84						

Halaman 4 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Total Ketidaktapatan		Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Negara/ Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhormatan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan		Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Potensi Kerugian Negara/ Daerah/ Perusahaan	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan	Total Penyeteroran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Jumlah Rupiah BUMD dan KKKS BLU	620	3.389.953,75	276	344	3.389.953,75	34	277.993,23	33	1.599.908,83	126	1.066.945,00	77	74	445.106,69	367,68	1.826,96	157,20	2.351,84		
	Jumlah Rupiah BLU	66	633.655,55	16	50	633.655,55	12	59.590,27	3	264.359,10	24	309.706,18	9	2	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rupiah BLU	66	1.002.982,25	16	50	1.002.982,25	12	428.916,97	3	264.359,10	24	309.706,18	9	2	-	-	-	-	-		
	Badan Lainnya	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Rupiah BLU dan Badan Lainnya	74	1.002.982,25	24	50	1.002.982,25	12	428.916,97	3	264.359,10	24	309.706,18	9	2	-	-	-	-	-		
	Provinsi	375	254.569,08	66	309	254.569,08	101	36.584,38	21	21.488,89	71	124.451,76	66	50	72.044,05	13.731,67	32,55	2.225,73	15.989,95		
	Kabupaten/Kota	2.203	504.905,70	394	1.809	504.905,70	675	193.133,86	301	172.813,13	289	44.881,66	378	166	94.077,05	14.469,55	3.561,94	6.779,16	24.810,65		
	Jumlah Rupiah Kabupaten/Kota	2.203	522.169,47	394	1.809	522.169,47	675	193.133,86	301	172.813,13	289	62.145,43	378	166	94.077,05	14.469,55	3.561,94	6.779,16	24.810,65		
	Jumlah Rupiah Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.578	776.738,55	460	2.118	776.738,55	776	229.718,24	322	194.302,02	360	186.597,19	444	216	166.121,10	28.201,22	3.594,49	9.004,89	40.800,60		
	BUMD	1.162	466.543,05	572	590	466.543,05	76	72.573,21	55	84.998,31	81	78.701,09	247	131	230.270,44	379,07	-	1.538,79	1.917,86		
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	5.124	6.976.644,18	1.548	3.576	6.976.644,18	1.068	1.117.316,27	447	2.322.877,97	663	2.350.524,92	916	482	1.185.925,02	51.303,80	5.447,47	11.660,48	68.411,75		

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kerugian PDTT Semester II Tahun 2013

Ketidapatannya Terhadap Keenuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tipe Pemeriksaan	Total Temuan Kerugian		Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif		Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Pemahaman harga (Mark up)		penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi		Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan		pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan		spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pengembalian piutang atau dana bergulir macet		Penyalah/ penghapusan aset negara/ daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah		Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan		Lain-lain		Penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (kecuali pojokan dinas)		Penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (kecuali pojokan dinas)			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu																																					
1	Pengelolaan Pendapatan	10	4.359,33	1	34,33	1	183,03	-	-	1	53,00	1	96,60	-	-	1	80,00	1	138,29	-	-	1	148,71	3	3.625,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,00	
1	Pengelolaan Pendapatan Pusat	9	4.279,33	1	34,33	1	183,03	-	-	1	53,00	1	96,60	-	-	1	80,00	1	138,29	-	-	1	148,71	3	3.625,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443,00	
2	Pengelolaan Daerah	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kabupaten/ Kota	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pelaksanaan Belanja	894	279.286,41	29	5.786,72	86	14.517,79	13	11.256,79	298	104.746,15	166	50.020,92	63	22.120,54	8	599,42	67	15.988,66	42	2.796,36	64	16.132,75	83	26.236,78	-	-	-	1	2,40	-	-	24	9.109,13	3.941,89	44.961,29	
	USD 0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	AUD 0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pelaksanaan Belanja Pusat	134	52.537,99	4	805,00	4	1.574,36	-	-	30	10.024,75	39	9.429,12	9	10.665,21	2	126,37	6	2.023,42	10	933,96	6	1.030,47	13	12.749,13	-	-	-	-	-	-	11	3.176,20	152,20	20.703,23	-	-
	USD 0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AUD 0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Daerah	760	226.728,42	25	4.931,72	32	12.943,43	13	11.256,79	268	94.721,40	127	40.591,80	54	11.455,33	6	473,05	61	13.965,24	32	1.862,40	58	15.102,28	70	13.489,65	-	-	-	1	2,40	-	-	13	5.932,93	3.789,69	24.258,06	
	USD 0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AUD 0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Provinsi	101	36.594,38	3	48,00	9	3.152,06	2	5.054,35	34	15.072,17	10	5.988,06	2	881,75	1	30,00	12	1.781,97	7	706,07	7	1.135,68	11	1.315,78	-	-	-	-	-	-	-	3	1.418,49	487,35	13.244,32	
	Kabupaten/ Kota	659	190.144,04	22	4.883,72	23	9.791,37	11	6.202,44	234	79.649,23	117	34.603,74	52	10.573,58	5	443,05	49	12.183,27	25	1.156,33	51	13.966,60	59	12.173,87	-	-	-	1	2,40	-	-	10	4.514,44	3.307,34	11.013,74	
3	Pengelolaan Aset Tetap	22	62.445,16	-	-	-	-	-	-	2	2.219,74	-	-	-	-	1	18,07	-	2.042,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	607,78	-	-	153,47	
	USD 30.300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/ Kota	10	2.854,89	-	-	-	-	-	-	2	2.219,74	-	-	-	1	18,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BLU	12	59.590,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	USD 30.300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu velas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidapiakutan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan															Nilai penyimpangan set atau penyimpangan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah dihindarkan/judul selama proses pemeriksaan																																				
		Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif		Rekaman pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain pekerjaan dan/atau barang		Pemalahan harga (Mark up)		penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi		Baya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan		Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pengembalian piutang atau dana bergulir macet		Penjualan/ pembelian aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah		Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan		Lain-lain		Penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah dihindarkan/judul selama proses pemeriksaan		Penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah dihindarkan/judul selama proses pemeriksaan																							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																		
4	6	4	5.827,46	-	-	-	-	4	5.827,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
5	7	KKNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																
6	Operasional BUIWN	34	277.798,22	-	-	-	-	6	851,69	6	851,69	8	982,56	-	-	2	155.813,22	-	-	2	342,53	-	-	-	11	46.091,19	1	616,28	1	3.920,94	-	-	-	3	69.179,81	-	-	367,68															
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi	20	116.845,79	-	-	-	-	4	757,35	-	-	3	892,64	-	-	-	1	191,32	-	-	1	253,54	-	-	-	8	45.488,34	1	616,28	-	-	-	-	2	68.646,32	-	-	367,68															
9	Kegiatan Pengadaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
10	Kawasan Industri	9	4.556,40	-	-	-	-	2	94,34	-	-	4	88,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	452,85	-	-	1	3.920,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
11	BL BUIWN Peduli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
12	Operasional BUIWN Lainnya	5	156.396,03	-	-	-	-	1	1,65	-	-	1	1,65	-	-	-	1	155.621,90	-	-	1	88,99	-	-	-	1	150,00	-	-	-	-	-	-	1	533,49	-	-	-	-														
7	Operasional BUMD dan RSUD	99	75.714,93	1	29,93	3	138,83	-	-	9	1.486,16	6	53.161,34	3	264,38	6	558,29	3	169,34	20	3.025,86	1	13,50	40	11.851,23	1	1.640,09	1	1.058,53	1	1.592,49	4	724,96	56,05	1.376,29	-	-	-	-														
13	Operasional PDAM	16	1.337,64	-	-	-	-	1	16,20	-	-	-	-	-	-	4	161,17	-	-	4	161,17	-	-	9	1.035,53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27,05	-	-	-	-														
14	Operasional Bank/LPR	23	4.202,00	-	-	-	-	2	104,75	-	-	1	25,94	-	-	2	341,00	1	23,77	2	44,79	-	-	13	1.929,04	-	-	-	-	-	-	1	1.592,49	1	140,22	23,77	176,35	-	-														
15	Operasional PD Pasar	5	549,61	-	-	-	-	1	50,16	-	-	1	50,16	-	-	2	44,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	356,06	-	-	148,95															
16	Operasional BUMD Perambangan	13	31.401,98	-	-	-	-	4	23.462,35	-	-	4	23.462,35	-	-	1	75,00	-	-	3	387,09	-	-	5	7.477,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00													

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valias)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidaksihonestan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan																								Nilai penyerahan aset negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan								
		Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan												Penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan			Penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan																	
		Belanja atau pengadaan barang/jasa riil		Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif		Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain lekuran volume pekerjaan dan/atau barang		Pemabalan harga (Mark up)		penggunaan uang/keuntungan pribadi		pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau standar yang ditetapkan		spesifikasi barang/jasa tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak melebihi ketentuan		Pengembalian piutang atau dana bergulir macet		Penjualan/ penghapusan/ penghapusan daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah		Pengehapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan		Lain-lain		Jml Kasus	Nilai			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai			
1	Operasional BUMD/Anchada Utama Lainnya	19	35.081,98	-	-	-	-	3	520,99	-	1	143,23	2	705,99	-	-	7	972,88	1	1.640,09	1	1.058,53	-	-	1	201,63	-	-	-	-				
2	Operasional RSUD Kabupaten	23	3.141,72	1	29,93	3	138,83	-	-	2	794,06	-	1	2,34	9	1.726,82	1	13,50	6	436,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	BLUD	23	3.141,72	1	29,93	3	138,83	-	-	2	794,06	-	1	2,34	9	1.726,82	1	13,50	6	436,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	PPTD Lainnya	5	54,93	-	-	1	2,00	-	-	1	6,17	-	-	-	1	28,41	-	-	2	18,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	Kementerian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Daerah	5	54,93	-	-	1	2,00	-	-	1	6,17	-	-	-	1	28,41	-	-	2	18,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
9	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10	Kabupaten/ Kota	5	54,93	-	-	1	2,00	-	-	1	6,17	-	-	-	1	28,41	-	-	2	18,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total		1.068	705.476,44	31	5.800,98	41	14.841,65	13	11.256,79	317	109.362,91	185	110.098,88	66	22.384,92	66	16.294,96	140	88.349,92	2	2.256,37	12	62.013,74	1	1.592,49	38	79.621,68	3.997,94	47.001,73	-	-			
			USD 33.767,49								USD 16,00		USD 3.471,24				USD 0,25																	
			AUD 0,38																															
		147	62.654,78	5	839,33	5	1.757,39	-	-	31	10.077,75	44	15.363,18	9	10.665,21	2	1.179,18	16	16.374,50	-	-	-	-	-	-	11	3.176,20	152,20	21.146,23	-	-			
			USD 0,25																															
			AUD 0,38																															
Jumlah Rupiah Pusat		147	62.664,96	5	839,33	5	1.757,39	-	-	31	10.077,75	44	15.363,18	9	10.665,21	2	1.179,18	16	16.378,63	-	-	-	-	-	11	3.176,20	152,20	21.150,36	-	-				
KKKS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BUMN		34	277.796,22	-	-	-	-	-	-	6	851,69	8	982,56	-	-	2	342,53	11	46.091,19	1	616,28	1	3.920,94	-	3	69.179,81	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 16,00																															
			AUD 0,38																															
Jumlah Rupiah BUMN		34	277.993,23	-	-	-	-	-	-	6	1.046,70	8	982,56	-	-	2	342,53	11	46.091,19	1	616,28	1	3.920,94	-	3	69.179,81	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Rupiah BUMN dan KKKS		34	277.993,23	-	-	-	-	-	-	6	1.046,70	8	982,56	-	-	2	342,53	11	46.091,19	1	616,28	1	3.920,94	-	3	69.179,81	-	-	-	-	-	-	-	
BLU		12	59.590,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.042,70	-	-	-	-	-	-	-	1	525,00	-	-	-	-	-	-	-		
			USD 30,300,00																															
Jumlah Rupiah BUJ		12	428.916,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.042,70	-	-	-	-	-	-	-	1	525,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 30,300,00																															
Badan Lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Tema Pemeriksaan	Ketidapkabupaten Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan														Nilai penyelesaian set atau pemotongan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan																							
		Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan														Penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan																							
		Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif		Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan		Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang		Kelebihan pembayaran selain pekerjaan dan/atau barang		Pemalahan harga (Mark up)		penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi		pembayaran honorarium dan atau melebihi standar yang ditetapkan		Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pengembalian pinjaman/ piutang atau dana bergulir macet		Penjualan/ pembelian aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah		Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan		Lain-lain		Penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain perjalanan dinas)											
Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
	Jumlah Rupiah BLU dan lain-lainnya	12	428.916,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.042,70	-	-	-	1	525,00	-	-	8	57.022,57	-	-	1	369.326,70	-	-			
	Provinsi	101	36.584,38	3	48,00	9	3.152,06	2	5.054,35	34	15.072,17	10	5.988,06	2	881,75	1	30,00	12	1.781,97	7	706,07	-	-	-	-	11	1.315,68	-	-	-	-	-	3	1.418,49	-	-			
	Kabupaten/Kota	675	193.133,86	21	4.883,72	24	9.793,37	11	6.202,44	237	81.875,14	117	34.603,74	52	10.573,58	7	541,12	49	12.183,27	26	1.184,74	51	13.965,60	-	-	61	12.192,22	-	-	2	11,70	-	-	16	5.122,22	-	-		
	Jumlah provinsi dan Kabupaten/Kota	776	225.718,24	25	4.931,72	33	12.945,43	13	11.256,79	271	96.947,31	127	40.591,80	54	11.455,33	8	571,12	61	13.965,24	33	1.890,81	58	15.102,28	-	-	72	13.508,00	-	-	2	11,70	-	-	19	6.540,71	-	-		
	BUMD	76	72.573,21	-	-	-	-	-	-	7	692,10	6	53.161,34	3	264,38	6	552,29	2	167,00	11	1.295,04	-	-	-	-	34	11.414,99	1	1.058,53	1	1.592,49	4	724,96	2377	355,30	-	-		
	Jumlah Rupiah BUMD	76	114.884,15	-	-	-	-	-	-	7	692,10	6	95.472,28	3	264,38	6	552,29	2	167,00	11	1.295,04	-	-	-	-	34	11.414,99	1	1.058,53	1	1.592,49	4	724,96	2377	355,30	-	-		
	BLUD	23	3.141,72	1	29,93	3	138,83	-	-	2	794,06	-	-	-	-	-	-	1	2,34	9	1.726,82	1	13,50	6	436,24	-	-	-	-	-	-	-	-	32,28	1.020,99	-	-		
	Jumlah Total Setelah dikomversi ke Rupiah	1.068	1.117.316,27	31	5.800,98	41	14.841,65	13	11.256,79	317	109.557,92	185	152.409,82	66	22.384,92	18	157.069,00	71	16.296,29	67	8.238,91	66	16.294,96	66	88.354,05	140	88.354,05	2	2.256,37	12	62.013,74	1	1.592,49	38	448.948,38	3.997,94	47.305,86	-	-

Keterangan:
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Potensi Kerugian PDTT Semester II Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan																									
		Total Temuan Potensi Kerugian		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu																											
1	Pengelolaan Pendapatan	6	35.420,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	35.420,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pengelolaan Pendapatan Pusat	2	5.808,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.808,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4	29.612,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29.612,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	4	29.612,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	29.612,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Belanja	311	165.069,26	290	122.394,55	6	977,31	1	93,00	1	38,67	2	59,08	2	617,82	1	AUD 1,42	-	-	-	-	-	-	-	8	40.888,83	3.620,51
		-	AUD 1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUD 1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelaksanaan Belanja Pusat	20	47.247,83	17	9.953,47	1	709,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	AUD 1,42	-	-	-	-	-	-	1	36.585,10	26,02
		-	AUD 1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AUD 1,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelaksanaan Belanja Daerah	291	117.821,43	273	112.441,08	5	268,05	1	93,00	1	38,67	2	59,08	2	617,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4.303,73	3.594,49
	Provinsi	16	7.253,97	11	6.995,52	1	136,14	-	-	1	38,67	-	-	-	1	20,08	-	-	-	-	-	-	-	-	2	63,56	32,55
	Kabupaten/Kota	275	110.567,46	262	105.445,56	4	131,91	1	93,00	-	-	2	59,08	1	597,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.240,17	3.561,94
3	Pengelolaan Aset Tetap	30	311.227,66	-	-	-	-	14	22.376,51	11	24.425,55	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	264.425,60	-
	Provinsi	5	14.234,92	-	-	-	-	3	5.220,95	2	9.013,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	22	32.633,64	-	-	-	-	11	17.155,56	9	15.411,58	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	66,50	-
	BLU	3	264.359,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	264.359,10	-
4	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile PLIK	7	45.565,98	7	45.565,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	IKKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Operasional BUMN	33	1.592.549,73	7	1.401,90	1	165,28	1	276,54	-	-	1	335,52	-	-	-	20	1.588.421,15	-	-	-	-	-	3	1.949,34	129,60	
		-	USD 298,20	-	USD 93,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 204,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	SAR 522,26	-	SAR 522,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SAR 522,26
		-	SGD 210,53	-	SGD 210,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SGD 210,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Kedidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan												Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Penghapusan Piutang tidak sesuai ketentuan		Lain-lain		Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		
1	8	23	1.337.283,40	7	1.401,90	1	165,28	9	276,54	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			USD 298,20		USD 93,84							1	335,52			12	1.333.933,84				1	1.170,32	129,60
			SAR 522,26		SAR 522,26												USD 204,36						
			SGD 210,53														SGD 210,53						
9	Pupuk																						
10	kawasan industri	4	6.087,78																				
11	BL BUMIN Peduli																						
12	Operasional BUMN lainnya	6	249.178,55																				
7	Operasional BUMD dan RSUD	59	90.068,24	2	278,32			8	1.230,84			2	101,09			37	64.290,52	6	22.738,31			4	1.429,16
			USD 62,48														USD 62,48						
13	Operasional PDAM	3	7.737,59																				
14	Operasional Bank/BPR	18	45.868,09																				
15	Operasional PD Pasar	2	63,24					1															
16	Operasional BUMD pertambangan	3	9.885,15																				
17	Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya	29	21.444,24	1	23,46			7	1.230,84			2	101,09			18	20.066,62					1	22,23
			USD 62,48														USD 62,48						
18	Operasional RSUD	4	5.069,93	1	254,86											2	4.267,92	1	547,15				
	Kabupaten																						
	BLUD	4	5.069,93	1	254,86											2	4.267,92	1	547,15				
8	PDTT Lainnya	1	74.840,55													1	74.840,55						
19	Pusat	1	74.840,55													1	74.840,55						
	Kementerian	1	74.840,55													1	74.840,55						
	Badan Lainnya																						
20	Daerah																						
	Provinsi																						
	Kabupaten/Kota																						

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan																		Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Total Temuan Potensi Kerugian		Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya		Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan		Aset dikuasai pihak lain		Aset tetap tidak diketahui keberadaannya		Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pekerjaan, pemantauan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan		Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah		Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		Penghapusan Piutang tidak sesuai ketentuan			Lain-lain		
1	2	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	23	
	Total	447	2.314.741,86	306	169.640,75	7	1.142,59	24	23.976,89	12	24.464,22	3	394,60	5	718,91	65	1.762.972,66	6	22.738,31	19	308.692,93	19	3.750,11
			USD 360,68		USD 93,84		-		-		-		-		-		USD 266,84		-		-		-
			AUD 1,42		-		-		-		-		-		-		AUD 1,42		-		-		-
			SAR 522,26		SAR 522,26		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			SGD 210,53		-		-		-		-		-		-		SGD 210,53		-		-		-
	Pusat	30	173.462,77	24	55.519,45	1	709,26	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.648,96	-	-	1	36.585,10	-	26,02
			AUD 1,42		-		-		-		-		-		-		AUD 1,42		-		-		-
	Jumlah Rupiah Pusat	30	173.478,21	24	55.519,45	1	709,26	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.664,40	-	-	1	36.585,10	-	26,02
	KKKS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BUMN	33	1.592.549,73	7	1.401,90	1	165,28	1	276,54	1	335,52	1	335,52	-	-	20	1.588.021,15	-	-	3	1.949,34	-	129,60
			USD 298,20		USD 93,84		-		-		-		-		-		USD 204,36		-		-		-
			SAR 522,26		SAR 522,26		-		-		-		-		-		-		-		-		-
			SGD 210,53		-		-		-		-		-		-		SGD 210,53		-		-		-
	Jumlah Rupiah BUMN	33	1.599.908,83	7	4.243,07	1	165,28	1	276,54	1	335,52	1	335,52	-	-	20	1.592.999,07	-	-	3	1.949,34	-	1.826,96
	Jumlah Rupiah BUMN dan KKKS	33	1.599.908,83	7	4.243,07	1	165,28	1	276,54	1	335,52	1	335,52	-	-	20	1.592.999,07	-	-	3	1.949,34	-	1.826,96
	BLU	3	264.359,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	264.359,10	-	-
	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah BLU dan Badan Lainnya	3	264.359,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	264.359,10	-	-
	Provinsi	21	21.488,89	11	6.995,52	1	136,14	3	5.220,95	3	9.052,64	-	-	1	20,08	-	-	-	-	2	63,56	-	32,55
	Kabupaten/Kota	301	172.813,13	262	105.445,56	4	131,91	12	17.248,56	9	15.411,58	2	59,08	2	597,74	4	29.612,03	-	-	6	4.306,67	-	3.561,94
	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota	322	194.302,02	273	112.441,08	5	268,05	15	22.469,51	12	24.464,22	2	59,08	3	617,82	4	29.612,03	-	-	8	4.370,23	-	3.594,49
	BUMD	55	84.998,31	1	23,46	-	-	8	1.230,84	-	-	-	-	2	101,09	35	60.022,60	5	22.191,16	4	1.429,16	-	-
			USD 62,48		-		-		-		-		-		-		USD 62,48		-		-		-
	Jumlah Rupiah BUMD	55	85.759,88	1	23,46	-	-	8	1.230,84	-	-	-	-	2	101,09	35	60.784,17	5	22.191,16	4	1.429,16	-	-
	BLUD	4	5.069,93	1	254,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.267,92	1	547,15	-	-	-	-
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	447	2.322.877,97	306	172.481,92	7	1.142,59	24	23.976,89	12	24.464,22	3	394,60	5	718,91	65	1.768.267,60	6	22.738,31	19	308.692,93	-	5.447,47

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Daftar Rekapitulasi Kelompok Temuan Kekurangan Penerimaan PDDT Semester II Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																								
		Total Temuan Kekurangan Penerimaan			Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan			Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan			Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke Kas Negara/ Daerah/ Perusahaan			Penaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan			Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS			Lain-lain			Penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan lainnya (selain denda keterlambatan pekerjaan)			
		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu																										
1	Pengelolaan Pendapatan	74	507.429,98	3	34.821,86	65	467.623,55	-	-	-	-	6	4.984,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	2.086,80
			USD 26,022,52		-		USD 26,022,52																			
1	Pengelolaan Pendapatan Pusat	25	395.597,85	2	34.644,36	22	360.952,09	-	-	-	-	1	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687,45
			USD 24,606,18				USD 24,606,18																			
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	49	111.832,13	1	177,50	43	106.671,46	-	-	-	-	5	4.983,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	1.399,35	
			USD 1,416,34				USD 1,416,34																			
	Provinsi	17	102.006,86	-	-	16	97.299,05	-	-	-	-	1	4.707,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.372,14
	Kabupaten/ Kota	32	9.825,27	1	177,50	27	9.372,41	-	-	-	-	4	275,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	27,21	
			USD 1,416,34				USD 1,416,34																			
2	Pelaksanaan Belanja	330	64.044,17	254	33.569,09	65	28.401,42	-	-	2	323,30	3	915,56	-	-	-	6	834,80	2.096,39	-	-	-	-	-	-	5.706,09
3	Pelaksanaan Belanja Pusat	24	7.326,35	19	3.310,47	4	3.125,05	-	-	-	-	1	890,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,68
4	Pelaksanaan Belanja Daerah	306	56.717,82	235	30.258,62	61	25.276,37	-	-	2	323,30	2	24,73	-	-	-	6	834,80	2.020,92	-	-	-	-	-	-	5.542,41
	Provinsi	54	22.444,90	29	12.835,89	18	8.478,32	-	-	2	323,30	1	0,07	-	-	-	4	807,32	645,09	-	-	-	-	-	-	208,50
	Kabupaten/ Kota	252	34.272,92	206	17.422,73	43	16.798,05	-	-	-	-	1	24,66	-	-	-	2	27,48	1.375,83	-	-	-	-	-	-	5.333,91
3	Pengelolaan Aset Tetap	29	310.489,65	-	-	27	310.309,82	2	179,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,21
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/ Kota	5	783,47	-	-	3	603,64	2	179,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,21
	BLU	24	309.706,18	-	-	24	309.706,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet/ Kecamatan (PLIK) dan Mobile PLIK	2	807,60	2	807,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																	
		Total Temuan Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disector ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disector ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak		Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan		Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS		Lain-lain		Penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan <i>denda keterlambatan pekerjaan</i>		Penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjut dalam proses pemeriksaan untuk temuan <i>lainnya (selain denda keterlambatan pekerjaan)</i>	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1		3	USD 81,614,96	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	7	68	USD 81,614,96	-	-	3	USD 13,058,34	-	-	-	-	-	-	65	USD 68,556,62	-	-	-	-
6	Operasional BUMN	58	56.394,74 USD 1,291,78	18	7.903,16 USD 429,35	36	46.627,26 USD 862,43	4	1.864,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
8	Pendapatan, Biaya dan Investasi	43	40.601,32 USD 1,265,05	15	7.454,63 USD 429,35	24	31.282,37 USD 835,70	4	1.864,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,20
9	Kegiatan Pemupukan	3	5.750,05	1	233,78	2	5.516,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	kawasan industri	11	9.190,68 USD 26,73	2	214,75	9	8.975,93 USD 26,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BL BUMN Peduli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Operasional BUMN lainnya	1	852,69	-	-	1	852,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Operasional BUMD dan RSUD	102	81.435,75 USD 179,20	10	4.026,95	88	74.428,19 USD 179,20	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.980,61	-	1.571,79
13	Operasional PDAM	8	9.261,73	-	-	8	9.261,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Operasional Bank/BPR	7	9.359,33	-	-	3	6.378,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Operasional PD Pasar	12	4.502,57	-	-	12	4.502,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,24
16	Operasional BUMD Pertambangan	10	19.669,11 USD 179,20	-	-	10	19.669,11 USD 179,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya	44	35.908,35	4	3.614,85	40	32.293,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.524,55
18	Operasional RSUD Kabupaten	21	2.734,66	6	412,10	15	2.322,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00
	BLUD	21	2.734,66	6	412,10	15	2.322,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00

Halaman 3 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidaksiharian Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjutinya (selain denda keterlambatan)			
		Total Temuan Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disoror ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjutinya (selain denda keterlambatan)	
1	2	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
8	PDTT Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kementerian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	663	1.020.601,89	287	81.128,66	284	927.390,24	6	2.044,15	2	323,30	9	5.900,13	65	3.815,41	10	2.111,39
			USD 109.108,46		USD 429,35		USD 40.122,49		-		-		-		-		-
	Pusat	51	403.731,80	23	38.762,43	26	364.077,14	-	-	-	-	2	892,23	-	-	-	75,47
			USD 24.606,18		-		USD 24.606,18		-		-		-		-		-
	Jumlah Rupiah Pusat	51	703.656,53	23	38.762,43	26	664.001,87	-	-	-	-	2	892,23	-	-	-	75,47
		68	81.614,96	-	-	3	USD 13.058,34	-	-	-	-	-	-	65	USD 68.556,62	-	-
	Jumlah Rupiah KKKs	68	994.804,75	-	-	3	159.168,11	-	-	-	-	-	-	65	835.636,64	-	-
	BUMN	58	56.394,74	18	7.903,16	36	46.627,26	4	1.864,32	-	-	-	-	-	-	-	157,20
			USD 1.291,78		USD 429,35		USD 862,43		-		-		-		-		-
	Jumlah Rupiah BUMN	58	72.140,25	18	13.136,51	36	57.139,42	4	1.864,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah BUMN dan KKKs	126	1.066.945,00	18	13.136,51	39	216.307,53	4	1.864,32	-	-	-	-	65	835.636,64	-	-
	BLU	24	309.706,18	-	-	24	309.706,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Badan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah BLU dan Badan Lainnya	24	309.706,18	-	-	24	309.706,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Tema Pemeriksaan	Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan																	
		Total Temuan Kekurangan Penerimaan		Penerimaan Negara/Daerah/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan		Penerimaan Negara/Daerah/Daerah/Perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ditetapkan atau dipungut/diterima/disor ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan							
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	Provinsi	71	124.451,76	29	12.835,89	34	105.777,37	-	-	2	323,30	2	4.707,88	-	-	4	807,32	645,09	1.580,64
	Kabupaten/Kota	289	44.881,66	207	17.600,23	73	26.774,10	2	179,83	-	-	5	300,02	-	-	2	27,48	1.390,83	5.388,33
		-	USD 1.416,34	-	-	-	USD 1.416,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah Kabupaten/Kota	289	62.145,43	207	17.600,23	73	44.037,87	2	179,83	-	-	5	300,02	-	-	2	27,48	1.390,83	5.388,33
	Jumlah Rupiah Provinsi dan Kabupaten/Kota	360	186.597,19	236	30.436,12	107	149.815,24	2	179,83	2	323,30	7	5.007,90	-	-	6	834,80	2.035,92	6.968,97
	BUMID	81	78.701,09	4	3.614,85	73	72.105,63	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.980,61	-	1.538,79
		-	USD 179,20	-	-	-	USD 179,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Rupiah BUMID	81	80.885,36	4	3.614,85	73	74.289,90	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.980,61	-	1.538,79
	BLUD	21	2.734,66	6	412,10	15	2.322,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total Setelah dikonversi ke Rupiah	663	2.350.524,92	287	86.362,01	284	1.416.443,28	6	2.044,15	2	323,30	9	5.900,13	65	835.636,64	10	3.815,41	2.111,39	9.549,09

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan	
		TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai temuan
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Kejelasan RI	52	7.667,38	22	4	13	5	30	7.667,38	-	-	2	5.808,41	11	1.389,56	14	3	475,41	-	-	217,81	-	
	Pendapatan Kejati Kalimantan Barat	12	145,77	8	1	6	1	4	145,77	-	-	-	-	2	145,77	2	-	-	-	-	37,66	-	
	Pendapatan Kejati Bali	9	87,30	6	-	4	2	3	87,30	-	-	-	-	2	87,30	1	-	-	-	-	87,30	-	
	Pendapatan Kejati NTB	2	13,59	-	-	-	-	2	13,59	-	-	-	-	1	13,59	1	-	-	-	-	10,29	-	
	Pendapatan Kejati Bengkulu	11	5.993,15	3	1	1	1	8	5.993,15	-	-	1	5.808,41	2	184,74	5	-	-	-	-	35,86	-	
	Pendapatan Kejati Sulawesi Utara	11	1.037,88	4	1	2	1	7	1.037,88	-	-	-	-	2	562,47	2	3	475,41	-	-	46,70	-	
	Pendapatan Kejati Gorontalo	7	389,69	1	1	-	-	6	389,69	-	-	1	-	2	389,69	3	-	-	-	-	-	-	
2	Kementerian Luar Negeri	8	-	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KBRI Canada	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KBRI Paris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KIRI Marseille	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KIRI Melbourne	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KIRI Perth	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KIRI Sydney	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KIRI Vancouver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan KIRI Darwin	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kepolisian	12	4.264,84	6	-	4	2	6	4.264,84	4	3.808,40	-	-	1	456,44	1	-	-	443,00	-	456,44	-	
	Pendapatan Polda Papua	12	4.264,84	6	-	4	2	6	4.264,84	4	3.808,40	-	-	1	456,44	1	-	-	443,00	-	456,44	-	
4	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	5.751,90	4	-	4	-	3	5.751,90	-	-	-	-	3	5.751,90	-	-	-	-	-	13,20	-	
	Pendapatan Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementektrans	7	5.751,90	4	-	4	-	3	5.751,90	-	-	-	-	3	5.751,90	-	-	-	-	-	13,20	-	

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan								Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	Ketidakefektifan	Kerugian Negara	Jml Kasus	Nilai Temuan	Nilai temuan	Kerugian Penerimaan	Nilai temuan	Nilai temuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
5	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	10	317.357,51	4	-	1	3	6	317.357,51	-	-	-	-	2	317.357,51	4	-	-	-	-			
			USD 24.606.18						USD 24.606.18						USD 24.606.18								
17	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2011 s.d. 2012 pada Kementerian ESDM, Perusahaan Pertambangan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Palembang, Bangka Belitung,	10	317.357,51	4	-	1	3	6	317.357,51	-	-	-	-	2	317.357,51	4	-	-	-	-			
6	Kementerian Pertanian	-	USD 24.606.18						USD 24.606.18						USD 24.606.18								
	Pelaksanaan Karantina Komoditi Hortikultura Tahun 2010 s.d Semester I Tahun 2013 pada Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur di Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya	3	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
18	Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur di Jakarta, Medan, Makassar, dan Surabaya	3	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9	63.437,30	6	-	3	3	3	63.437,30	-	-	-	-	2	63.437,30	1	-	-	-	-			
19	Pendapatan Kementerian Kelautan dan Perikanan	9	63.437,30	6	-	3	3	3	63.437,30	-	-	-	-	2	63.437,30	1	-	-	-	-			
8	Badan Pertanahan Nasional	21	556,12	10	3	3	4	11	556,12	5	470,93	-	-	3	85,19	3	-	-	-	-			
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNBPDan Penggunaannya Kembali Tahun 2012 dan Semester I 2013 pada BPN Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	21	556,12	10	3	3	4	11	556,12	5	470,93	-	-	3	85,19	3	-	-	-	-			

Halaman 3 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	Ketidakefektifan	Kerugian Negara	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Kerugian Negara	Nilai Temuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
9	Badan Informasi Geospasial	3	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pendapatan Badan Informasi Geospasial	3	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	BP Batam	12	7.125,95	8	1	4	3	4	7.125,95	-	-	-	-	3	7.125,95	1	-	-	-	-
22	Pendapatan BP Batam	12	7.125,95	8	1	4	3	4	7.125,95	-	-	-	-	3	7.125,95	1	-	-	-	-
	Jumlah	137	406.161,00	74	13	37	24	63	406.161,00	9	4.279,33	2	5.808,41	25	395.597,85	24	3	475,41	443,00	687,45
	Jumlah Rupiah	137	706.085,73	74	13	37	24	63	706.085,73	9	4.279,33	2	5.808,41	25	695.522,58	24	3	475,41	443,00	687,45

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 6

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat**

No	Kelompok	Jml Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	13	18
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	9	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	37	50
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	7	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	16	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	24	32
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	17	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		74	100

Lampiran 7

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Total	
		Jml Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara	9	4.279,33
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	34,33
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	1	183,03
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	53,00
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	96,60
5	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	138,29
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1	148,71
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	3	3.625,37
II	Potensi Kerugian Negara	2	5.808,41
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2	5.808,41
III	Kekurangan Penerimaan	25	395.597,85
			USD 24,606.18
	Jumlah Rupiah	25	695.522,58
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	2	34.644,36
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	22	360.952,09
		-	USD 24,606.18
	Jumlah Rupiah	22	660.876,82
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	1,40
IV	Kelemahan Administrasi	24	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	7	-
5	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	12	-
VII	Ketidakefektifan	3	475,41
1	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	3	475,41
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		63	406.161,00
			USD 24,606.18
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah dikonversi ke Rupiah		63	706.085,73

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 1 - Lampiran 8

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Keuangan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Nilai temuan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Nilai temuan	
1	Sumatera Utara	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	-	
1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	10	2.747,97	7	1	4	2	3	2.747,97	-	-	-	3	2.747,97	-	-	-	-	-	
2	Sumatera Selatan	6	74.668,77	5	2	2	1	1	74.668,77	-	-	-	1	74.668,77	-	-	-	-	-	
2	Pendapatan Daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2012 s.d Semester I 2013 Provinsi Sumatera Selatan	6	74.668,77	5	2	2	1	1	74.668,77	-	-	-	1	74.668,77	-	-	-	-	1.366,22	
3	Lampung	41	32.510,35	23	-	23	-	18	32.510,35	-	-	-	4	29.612,03	-	-	-	-	27,21	
3	Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	13	24.535,69	6	-	6	-	7	24.535,69	-	-	-	1	24.313,10	-	-	-	-	-	
4	Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur	11	75,48	7	-	7	-	4	75,48	-	-	-	2	75,48	-	-	-	-	27,21	
5	Pendapatan Daerah Kota Metro	17	7.899,18	10	-	10	-	7	7.899,18	-	-	-	3	5.298,93	-	-	-	-	-	
4	DKI Jakarta	6	5.749,30	2	-	2	-	4	5.749,30	-	-	-	4	5.749,30	-	-	-	-	5,92	
6	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan	6	5.749,30	2	-	2	-	4	5.749,30	-	-	-	4	5.749,30	-	-	-	-	5,92	
5	Bali	21	1.096,74	11	-	11	-	10	1.096,74	-	-	-	8	1.096,74	-	-	-	-	15,00	
7	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng	10	776,90	6	-	6	-	4	776,90	-	-	-	4	776,90	-	-	-	-	15,00	
8	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem	11	319,84	5	-	5	-	6	319,84	-	-	-	4	319,84	-	-	-	-	-	
6	Kalimantan Barat	14	1.627,04	7	-	4	3	7	1.627,04	-	-	-	1	18,68	-	-	-	-	-	
9	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Singkawang	14	1.627,04	7	-	4	3	7	1.627,04	-	-	-	1	18,68	-	-	-	-	-	
7	Sulawesi Tengah	6	6.807,79	3	-	3	-	3	6.807,79	-	-	-	3	6.807,79	-	-	-	-	-	
10	PKB dan BBNKB Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 dan 2013	6	6.807,79	3	-	3	-	3	6.807,79	-	-	-	3	6.807,79	-	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Ketidakefektifan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penytoran ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			Total Ketidakefektifan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Nilai Temuan				
			Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	
1		3	4	5	6	7	8	4	80,00	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Sulawesi Tenggara	63	5.891,53 USD 1.416.34	24	-	20	4	39	5.891,53 USD 1.416.34	10	80,00	-	-	14	5.811,53	24	-	-	-
11	PAD dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	19	1.330,48	7	-	5	2	12	1.330,48	9	-	-	-	5	1.330,48	7	-	-	-
12	PAD Kabupaten Wakatobi TA 2012 dan Semester I 2013	13	438,88	1	-	-	1	12	438,88	9	-	-	-	5	438,88	7	-	-	-
13	Pengelolaan Izin Usaha dan PNBP sektor Perambangan Kabupaten Kolaka Utara	19	3.910,76	15	-	15	-	4	3.910,76	1	80,00	-	-	2	3.830,76	1	-	-	-
14	Pengelolaan Izin Usaha dan PNBP sektor Pertambangan Kabupaten Kolaka	12	211,41	1	-	-	1	11	211,41	-	-	-	-	2	211,41	9	-	-	-
9	Maluku	15	12.033,03 USD 776.04	4	2	2	-	11	12.033,03	-	-	-	-	6	12.033,03	5	-	-	-
15	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Maluku	15	12.033,03	4	2	2	-	11	12.033,03	-	-	-	-	6	12.033,03	5	-	-	-
	Jumlah	182	143.132,52	86	5	71	10	96	143.132,52	1	80,00	4	29.612,03	49	111.832,13	37	5	1.608,36	1.414,35
	Jumlah Total setelah dikonversi ke Rupiah	182	160.396,29	86	5	71	10	96	160.396,29	1	80,00	4	29.612,03	49	129.095,90	37	5	1.608,36	1.414,35
	Jumlah Provinsi	43	102.006,86	21	5	13	3	22	102.006,86	-	-	-	-	17	102.006,86	5	-	-	1.372,14
	Jumlah Kabupaten/Kota	139	41.125,66	65	-	58	7	74	41.125,66	1	80,00	4	29.612,03	32	9.825,27	32	5	1.608,36	42,21
	Jumlah Total Kabupaten/Kota setelah dikonversi ke Rupiah	139	58.389,43	65	-	58	7	74	58.389,43	1	80,00	4	29.612,03	32	27.089,04	32	5	1.608,36	42,21

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 9

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

No	Kelompok	Jumlah Kasus		Total	%
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota		
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	5	-	5	6
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	-	1	-
2	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	4	-	4	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	13	58	71	82
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-	2	2	-
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	3	8	11	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	2	2	-
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	10	44	54	-
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1	-
6	Lain-lain	-	1	1	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	3	7	10	12
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	7	9	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	-	1	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		21	65	86	100

Lampiran 10

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	-	-	1	80,00	1	80,00
1	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi			1	80,00	1	80,00
II	Potensi Kerugian Daerah			4	29.612,03	4	29.612,03
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih			4	29.612,03	4	29.612,03
III	Kekurangan Penerimaan	17	102.006,86	32	9.825,27	49	111.832,13
					USD 1,416.34		USD 1,416.34
	Jumlah rupiah				27.089,04		129.095,90
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah			1	177,50	1	177,50
2	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah	16	97.299,05	27	9.372,41	43	106.671,46
					USD 1,416.34		USD 1,416.34
	Jumlah rupiah				26.636,18		123.935,23
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	4.707,81	4	275,36	5	4.983,17
IV	Kelemahan Administrasi	5	-	32	-	37	-
1	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5	-	28	-	33	-
2	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-		4		4	-
V	Ketidakefektifan	-	-	5	1.608,36	5	1.608,36
1	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai			5	1.608,36	5	1.608,36
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		22	102.006,86	74	41.125,66	96	143.132,52
					USD 1,416.34		USD 1,416.34
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah dikonversi ke Rupiah		22	102.006,86	74	58.389,43	96	160.396,29

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 2 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan														
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Temuan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Kelemahan Sistem Pengendalian Eksternal		Kelemahan Sistem Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Keuangan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Kedakelengkapan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	Poli	10	4.527,43	-	-	-	-	-	10	4.527,43	7	4.527,43	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pembangunan dan Pengadaan Alat Revitalisasi Simtekol pada Staf Sarana dan Prasarana Polri	5	1.919,51	-	-	-	-	5	1.919,51	3	1.919,51	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Belanja dan PNB Polda Papua	5	2.607,92	-	-	-	-	5	2.607,92	4	2.607,92	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kejaksan RI	23	149,20	-	-	-	-	23	149,20	9	124,69	2	2,54	3	21,97	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2012 dan 2013 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu	2	22,40	-	-	-	-	2	22,40	1	22,40	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Barang, Belanja Modal dan Intensifikasi PNB pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Sulut	6	44,76	-	-	-	-	6	44,76	1	25,70	1	1,41	1	17,65	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Barang, Belanja Modal dan Intensifikasi PNB pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Nusa Tenggara Barat	2	1,13	-	-	-	-	2	1,13	-	-	1	1,13	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi PNB di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo	8	54,44	-	-	-	-	8	54,44	5	53,12	-	-	1	1,32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Barang, Belanja Modal dan Intensifikasi PNB pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Bali	2	4,58	-	-	-	-	2	4,58	1	4,58	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Belanja dan PNB Kejati Kalimantan Barat	3	21,89	-	-	-	-	3	21,89	1	18,89	-	-	1	3,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vallas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah dibindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Keuangan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi	Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan	Nilai temuan	Nilai temuan	Nilai temuan			
									Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan		Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus	Nilai temuan							Jml Kasus	Nilai temuan	Jml Kasus
1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Paris di Perancis	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24				
22	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Paris di Perancis	9	20,40	5	1	-	4	4	20,40	1	20,40	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
23	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2012 dan 2013 pada Keleluasan Besar Republik Indonesia Ottawa di Canada	9	14,44	6	2	-	3	3	14,44	1	14,44	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	Kementub	11	7.631,84	-	-	-	-	11	7.631,84	5	4.112,39	3	3.519,45	-	-	3	-	-	-	-	4.112,39	-	-	-				
24	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 yang Dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya	6	3.519,45	-	-	-	-	6	3.519,45	-	-	3	3.519,45	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
25	Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan TA 2011 dan 2012 pada sakter-sakter Dirjen Perhubungan Laut Kementerian dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Kesyahbandaran dan Otortas Pelabuhan Samarinda, Pontianak, Benoa dan Tanjung Balai Asahan	5	4.112,39	-	-	-	-	5	4.112,39	5	4.112,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.112,39	-	-	-				
8	Kemensehneg	19	616,32	1	-	-	1	18	616,32	5	436,19	-	-	5	109,25	7	1	70,88	-	-	-	-	-	44,79				
26	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2011 dan 2012 Pada Kementerian Sekretariat Negara	19	616,32	1	-	-	1	18	616,32	5	436,19	-	-	5	109,25	7	1	70,88	-	-	-	-	-	44,79				
9	Kemmaketrans	36	16.251,73	4	1	1	2	32	16.251,73	20	6.018,88	1	13,48	3	390,18	3	5	9,829,19	-	-	300,89	13,48	-	-				
27	Pengelolaan Belanja TA 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenaakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta	17	5.560,57	1	-	-	1	16	5.560,57	10	5.004,49	-	-	3	390,18	2	1	165,90	-	-	-	-	-	-				

Halaman 5 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valess)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern												Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah dibindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Kelemahan Sistem Pengendalian Perundang-undangan			Kelemahan Sistem Pengendalian Perundang-undangan			Kelemahan Sistem Pengendalian Perundang-undangan			Kelemahan Sistem Pengendalian Perundang-undangan			Kelemahan Sistem Pengendalian Perundang-undangan			Kekurangan Penerimaan	Potensi Kerugian Negara	Kekurangan Penerimaan						
								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus				Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
28	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun 2012 s.d. Triwulan III Tahun 2013 pada Ditjen Pembinaan dan Pemantauan Kerja Kemakmuran di Jakarta dan Jawa Barat	19	10.691,16	3	1	1	1	16	10.691,16	10	1.014,39	1	13,48	-	-	1	4	9.663,29	-	-	300,89	13,48	-	-	-	-	-				
10	Badan Informasi Geospasial	13	1.808,21	1	-	1	-	12	1.808,21	8	1.735,30	-	-	-	-	3	1	72,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
29	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada BKG	13	1.808,21	1	-	1	-	12	1.808,21	8	1.735,30	-	-	-	-	3	1	72,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	Kemenuhutan	23	3.529,34	-	-	-	-	23	3.529,34	11	2.649,12	1	1,50	3	225,85	5	3	652,87	-	-	1.745,43	-	-	163,68	-	-					
30	Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2012 dan TA. 2013 pada Kementerian Kelautanian dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur	23	3.529,34	-	-	-	-	23	3.529,34	11	2.649,12	1	1,50	3	225,85	5	3	652,87	-	-	1.745,43	-	-	163,68	-	-					
12	Kemen PU	24	24.965,33	3	1	2	-	21	24.965,33	7	2.815,05	7	6.301,68	-	-	4	2	15.848,60	1	-	-	-	-	-	-	-					
	Pelaksanaan Pembangunan Waduk Jatigede Dan Waduk Jatibarang Pada SNVT Pembangunan Waduk Jatigede, SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang Pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Dan Instansi Terkait Lainnya Di Provinsi Jabar Dan Jateng	24	24.965,33	3	1	2	-	21	24.965,33	7	2.815,05	7	6.301,68	-	-	4	2	15.848,60	1	-	-	-	-	-	-	-					
13	Kemtan	2	2.067,32	-	-	-	-	2	2.067,32	1	253,44	-	-	1	1.813,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pertanian di Wilayah DKI Jakarta, Jabar, Jatim, dan Papua Barat	2	2.067,32	-	-	-	-	2	2.067,32	1	253,44	-	-	1	1.813,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
14	KKP	12	8.167,43	-	-	-	-	12	8.167,43	4	3.210,07	1	369,72	4	4.587,64	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					
	Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2012 Dan Tahun 2013 Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan	12	8.167,43	-	-	-	-	12	8.167,43	4	3.210,07	1	369,72	4	4.587,64	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-					

Halaman 6 - Lampiran 11

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Keuangan Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidaktepatan		Kekurangan Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
15	Kemenag	9	44.471,23	-	-	-	-	9	44.471,23	4	7.586,87	1	36.585,10	-	-	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-		
	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2010, 2011, Dan Semester I Tahun Anggaran 2012	9	44.471,23	-	-	-	-	9	44.471,23	4	7.586,87	1	36.585,10	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-		
16	Kemendagri	8	203.805,39	-	-	-	-	8	203.805,39	4	11.800,82	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
	Pelaksanaan Kontrak Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional Tahun 2012 pada Dirjen Dukcapil	8	203.805,39	-	-	-	-	8	203.805,39	4	11.800,82	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
17	Kemendag	18	27.435,67	2	-	2	-	16	27.435,67	5	1.799,09	1	261,98	1	154,78	3	1	3	1	5	5	5	5	5	5		
	Pengelolaan Anggaran Dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Untuk Pembangunan Pasar Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dan 2013	18	27.435,67	2	-	2	-	16	27.435,67	5	1.799,09	1	261,98	1	154,78	3	1	3	1	5	5	5	5	5	5		
18	BPN	11	-	11	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan IP4T dan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redistrol) Tahun 2012 dan Semester I 2013 Pada BPN Wilayah Provinsi Kalsel dan NTB di Banjarmasin dan Mataram	11	-	11	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah	340	351.115,39	69	11	22	36	271	351.115,39	134	52.557,99	20	47.247,83	24	7.326,35	64	18	29.153,29	11	214.849,93	20.855,43	26,02	239,15	239,15			
			USD 0,25						USD 0,25																		
			AUD 1,80						AUD 1,80																		
	Jumlah Rupiah		351.138,01					351.138,01			52.545,17		47.263,27												20.859,56		

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 12

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	11	16
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	10	-
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	22	32
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	10	-
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5	-
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	36	52
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	12	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	24	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		69	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara	134	52.537,99
			USD 0.25
			AUD 0.38
	Jumlah Rupiah		52.545,17
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	4	805,00
2	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif lainnya	4	1.574,36
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30	10.024,75
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	39	9.429,12
5	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	9	10.665,21
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	126,37
7	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	6	2.023,42
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	10	933,96
			USD 0.25
	Jumlah Rupiah		937,01
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	6	1.030,47
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	13	12.749,13
			AUD 0.38
	Jumlah Rupiah		12.753,26
11	Lain-lain	11	3.176,20
II	Potensi Kerugian Negara	20	47.247,83
			AUD 1.42
	Jumlah Rupiah		47.263,27
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	17	9.953,47
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	709,26
3	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	-
			AUD 1.42
	Jumlah Rupiah		15,44
4	Lain-lain	1	36.585,10
III	Kekurangan Penerimaan	24	7.326,35
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	19	3.310,47
2	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	4	3.125,05
3	Penaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	890,83
IV	Kelemahan Administrasi	64	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	4	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	24	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	17	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	1	-

Halaman 2 - Lampiran 13

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UUan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara	5	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	5	-
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3	-
10	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3	-
V	Ketidakhematan	18	29.153,29
1	Pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga	18	29.153,29
VI	Ketidakefektifan	11	214.849,93
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	8.071,89
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	204.433,72
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	4	2.344,32
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	271	351.115,39
			USD 0.25
			AUD 1.80
	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah dikonversi ke Rupiah	271	351.138,01

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyelesaian atas atau penyimpangan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kelemahan Administrasi	Ketidakhormatan	Ketidakefektifan	Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan	Kekurangan Penerimaan	Nilai Temuan	Nilai Temuan	Nilai Temuan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Provinsi Aceh	37	2.226,46	3	-	2	1	34	2.226,46	11	608,37	7	288,22	9	948,79	3	1	93,78	3	287,30	37,83	-	-		
1	1 Belanja Daerah Kab. Gayo Lues TA 2012 dan TA 2013	22	1.062,76	1	-	-	1	21	1.062,76	7	260,26	5	170,68	6	387,64	1	1	93,78	1	150,40	-	-	-		
2	2 Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya A.2012 dan 2013	15	1.163,70	2	-	2	-	13	1.163,70	4	348,11	2	117,54	3	561,15	2	-	-	2	136,90	37,83	-	-		
2	2 Provinsi Sumatera Utara	77	32.569,47	2	-	-	2	75	32.569,47	41	23.375,06	17	7.648,11	8	702,63	7	2	843,67	-	-	2.684,98	33,55	14,12		
	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Umum Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 pada KPU dan Panitia Pengawas Pemilu Sumatera Utara	16	1.840,56	2	-	-	2	14	1.840,56	6	561,11	-	-	2	435,78	4	2	843,67	-	-	-	-	-		
4	2 Belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Asahan	13	7.618,29	-	-	-	-	13	7.618,29	7	3.291,66	5	4.301,17	1	25,46	-	-	-	-	-	351,70	-	-		
5	3 Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Kabupaten Labuhanbatu	15	7.745,83	-	-	-	-	15	7.745,83	7	5.804,60	4	1.894,30	3	46,93	1	-	-	-	-	1.459,21	33,55	14,12		
6	4 Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 dan 2013 (s.d. Juli) pada Pemerintah Kab. Langkat	5	2.262,74	-	-	-	-	5	2.262,74	5	2.262,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	562,10	-	-		
7	5 Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2013 pada Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	8	2.149,71	-	-	-	-	8	2.149,71	4	1.676,50	3	346,89	1	126,32	-	-	-	-	-	259,78	-	-		
8	6 Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2013 pada Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	11	1.554,97	-	-	-	-	11	1.554,97	6	871,64	3	683,33	-	-	2	-	-	-	-	29,59	-	-		
9	7 Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2013 pada Pemerintah Kota Medan	9	9.397,37	-	-	-	-	9	9.397,37	6	8.906,81	2	422,42	1	68,14	-	-	-	-	-	22,60	-	-		

Halaman 2 - Lampiran 14

No.	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah difinalkan/juti selama proses pemeriksaan		
		TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Nilai Temuan	Nilai Temuan	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3	Provinsi Sumatera Barat	84	5.854,24	13	-	10	3	71	5.854,24	35	2.848,14	8	1.930,10	19	930,98	6	2	145,02	1	-	161,58	-	-	
10	1 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	24	1.219,36	4	-	3	1	20	1.219,36	10	1.057,52	-	-	6	161,84	3	-	-	1	-	-	-	-	
11	2 Kabupaten Padang Pariaman TA. 2013	26	1.655,07	4	-	4	-	22	1.655,07	11	756,87	1	672,91	6	96,73	3	1	128,56	-	-	-	-	-	
12	3 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA. 2013	13	851,00	3	-	1	2	10	851,00	7	621,22	-	-	2	213,32	-	1	16,46	-	-	137,87	-	-	
13	4 Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA. 2013	21	2.128,81	2	-	2	-	19	2.128,81	7	412,53	7	1.257,19	5	459,09	-	-	-	-	-	23,71	-	-	
4	Provinsi Jambi	62	8.123,87	16	1	13	2	46	8.123,87	28	5.664,25	5	1.194,13	6	289,10	3	2	776,54	2	199,85	462,52	120,94	10,85	
14	1 Belanja Daerah Provinsi Jambi TA. 2013	13	1.339,69	4	-	4	-	9	1.339,69	2	328,67	2	382,34	2	52,29	1	1	376,54	1	199,85	-	-	-	
15	2 Belanja Daerah Kabupaten Bungo TA.2013	3	375,13	-	-	-	-	3	375,13	1	358,81	-	-	1	16,32	1	-	-	-	-	52,33	-	2,37	
16	3 Belanja Daerah Kabupaten Merangin TA.2013	9	225,19	2	-	1	1	7	225,19	5	225,15	1	1,57	1	0,47	-	-	-	-	-	4,42	1,57	0,47	
17	4 Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi TA. 2013	5	1.222,06	1	-	1	-	4	1.222,06	2	363,16	1	458,90	-	-	-	1	400,00	-	-	327,56	119,37	-	
18	5 Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA.2013	12	640,80	5	-	5	-	7	640,80	5	285,84	1	351,32	1	3,64	-	-	-	-	-	65,67	-	1,42	
19	6 Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabbar TA. 2013	13	3.693,42	4	1	2	1	9	3.693,42	6	3.477,04	-	-	1	216,38	1	-	-	1	-	-	-	6,59	
20	7 Belanja Daerah Kabupaten Tebo TA. 2013	7	627,58	-	-	-	-	7	627,58	7	627,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,54	-	-	
5	Provinsi Sumatera Selatan	43	16.077,08	5	-	5	-	38	16.077,08	21	5.635,03	8	9.108,26	6	1.333,79	2	-	-	-	1	-	1.751,74	892,60	75,41
21	1 Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuwasin	9	2.169,82	2	-	2	-	7	2.169,82	5	1.651,87	1	445,11	1	72,84	-	-	-	-	-	384,06	-	3,36	
22	2 Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir	6	5.388,36	-	-	-	-	6	5.388,36	3	1.858,40	2	3.515,44	1	14,52	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	3 Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir	6	1.889,50	-	-	-	-	6	1.889,50	4	1.228,41	1	646,32	1	14,77	-	-	-	-	-	1.111,87	646,32	14,77	

Halaman 3 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan								
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			Kerugian daerah			Potensi Kerugian Daerah			Kekurangan Penerimaan			Kelemahan Administrasi			Ketidakhematan			Ketidakefektifan			Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24								
24	4	11	600,13	3	-	3	-	8	600,13	6	573,19	1	26,94	-	-	1	-	-	-	-	-	110,18	-	-	-	-	-	-			
25	5	6	5.580,19	-	-	-	-	6	5.580,19	1	177,55	2	4.228,26	2	1.174,38	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
26	6	5	449,08	-	-	-	-	5	449,08	2	145,61	1	246,19	1	57,28	1	-	-	-	-	-	145,63	246,28	57,28	-	-	-	-			
6	Provinsi Bengkulu	74	20.821,75	12	-	11	1	62	20.821,75	32	5.732,87	5	412,49	18	13.956,44	3	2	281,12	2	438,83	2	691,69	199,43	3.085,04							
27	1	10	6.922,70	-	-	-	-	10	6.922,70	4	56,93	1	32,50	5	6.833,27	-	-	-	-	-	-	12,00	32,55	76,45							
28	2	25	2.231,65	5	-	5	-	20	2.231,65	11	683,15	2	4,31	5	1.309,24	1	1	234,95	-	-	-	303,86	0,24	-							
29	3	2	254,04	-	-	-	-	2	254,04	2	254,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
30	4	11	8.769,87	1	-	1	-	10	8.769,87	3	2.803,01	1	166,64	5	5.800,22	1	-	-	-	-	-	47,92	166,64	3.008,59							
31	5	10	1.710,55	1	-	1	-	9	1.710,55	6	1.271,23	-	-	1	0,49	1	-	-	-	1	438,83	327,91	-	-							
32	6	16	932,94	5	-	4	1	11	932,94	6	664,51	1	209,04	2	13,22	-	1	46,17	1	-	-	-	-	-							
7	Provinsi Lampung	88	20.467,75	13	-	11	2	75	20.467,75	31	9.725,48	7	3.264,59	10	844,23	17	4	5.486,01	6	1.147,44	741,07	-	-	16,15							
33	1	10	7.620,26	3	-	3	-	7	7.620,26	3	2.602,98	-	-	2	526,58	1	1	4.490,70	-	-	-	428,02	-	12,69							
34	2	12	1.447,03	2	-	-	-	10	1.447,03	4	594,86	1	379,23	1	46,03	2	-	-	-	2	426,91	-	-	-							
35	3	8	1.129,28	2	-	2	-	6	1.129,28	2	1.107,48	-	-	1	21,80	3	-	-	-	-	-	18,85	-	-							
36	4	11	3.088,23	-	-	-	-	11	3.088,23	5	2.227,57	1	514,99	1	41,52	2	-	-	-	2	304,15	-	-	-							
37	5	10	1.629,35	3	-	3	-	7	1.629,35	4	705,86	1	908,27	1	15,22	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
38	6	6	1.006,76	-	-	-	-	6	1.006,76	2	425,65	1	72,23	1	92,50	1	-	-	-	1	416,38	-	-	-							

Halaman 4 - Lampiran 14

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakhematan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah	Nilai Temuan	Nilai Temuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
39	Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang TA. 2012 s.d. Triwulan III TA. 2013	6	475,48	-	-	-	-	6	475,48	1	12,87	1	353,90	-	-	3	1	108,71	-	-	-	-	-				
40	Belanja Daerah Kab. Tulang Bawang Barat TA. 2012 s.d. Triwulan III TA. 2013	11	1.833,37	3	-	3	-	8	1.833,37	2	317,40	2	1.035,97	-	-	3	1	480,00	-	-	-	56,63	-				
41	Belanja Daerah Kab. Way Kanan TA. 2012 s.d. Triwulan III TA. 2013	6	393,80	-	-	-	-	6	393,80	2	336,70	-	-	2	57,10	1	-	-	-	-	-	-	3,46				
42	Belanja Daerah Kota Bandar Lampung TA. 2012 s.d. Triwulan III TA. 2013	8	1.844,19	-	-	-	-	8	1.844,19	6	1.394,11	-	-	1	43,48	-	1	406,60	-	-	-	223,39	-				
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	34	3.375,25	-	-	-	-	34	3.375,25	12	588,43	11	1.099,86	9	716,48	-	-	-	2	970,48	3,60	4,61	-				
43	Belanja Modal Kab. Bangka Barat TA. 2013	10	1.082,65	-	-	-	-	10	1.082,65	2	184,97	3	346,01	4	551,67	-	-	-	1	-	-	-	-				
44	Belanja Modal Kab. Bangka Selatan TA. 2013	11	696,00	-	-	-	-	11	696,00	5	75,78	3	496,31	3	123,91	-	-	-	-	-	-	4,61	-				
45	Belanja Modal Kota Pangkalpinang TA. 2013	13	1.596,60	-	-	-	-	13	1.596,60	5	327,68	5	257,54	2	40,90	-	-	-	1	970,48	3,60	-	-				
9	Provinsi Kepulauan Riau	83	8.117,41	10	-	5	5	73	8.117,41	22	2.497,62	28	3.014,66	16	330,94	1	-	-	6	2.274,19	9,50	-	-				
46	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah TA. 2012 dan 2013 (Semester I) Provinsi Kepulauan Riau	8	2.690,00	4	-	1	3	4	2.690,00	2	886,70	-	-	-	-	-	-	-	2	1.803,30	-	-	-				
47	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah TA. 2012 dan 2013 (Semester I) Kota Tanjungpinang	9	470,89	5	-	4	1	4	470,89	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	470,89	-	-	-				
48	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan konstruksi TA. 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) Kab. Karimun	38	1.376,29	-	-	-	-	38	1.376,29	9	293,24	18	851,39	11	231,66	-	-	-	-	-	-	-	-				

Halaman 5 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
49	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan Konstruksi TA 2012 dan 2013 (6.d Oktober) Kab. Kep. Anambas	16	3.066,84	-	-	-	-	16	3.066,84	8	1.234,73	5	1.789,62	3	42,49	-	-	-	-	-	9,50	-	-
50	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang terkait dengan Konstruksi TA 2012 dan 2013 (5.d Oktober) Kota Tanjungpinang	12	513,39	1	-	-	1	11	513,39	3	82,95	5	373,65	2	56,79	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Provinsi DKI Jakarta	62	85.107,60	3	-	2	1	59	85.107,60	20	13.426,51	1	668,93	12	10.438,93	5	6	7.776,80	15	52.796,43	11.931,41	-	728,83
51	Belanja daerah TA 2011 (Semester II), TA 2012, dan TA 2013 (Semester I) Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta	7	5.825,84	3	-	2	1	4	5.825,84	4	5.825,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.232,44	-	-
52	Belanja daerah TA 2012 s.d. Triwulan III TA 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta	16	20.411,61	-	-	-	-	16	20.411,61	8	3.804,65	-	-	5	441,97	-	1	2.201,36	2	13.963,63	3.804,65	-	441,97
53	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta	11	36.421,29	-	-	-	-	11	36.421,29	3	492,22	1	668,93	-	-	1	1	324,63	5	34.935,51	492,22	-	-
54	Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan TA 2010 s.d. 2013 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	19	8.049,22	-	-	-	-	19	8.049,22	3	1.091,68	-	-	3	125,86	3	4	5.250,81	6	1.580,87	232,43	-	114,67
55	Pengadaan dan Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	9	14.399,64	-	-	-	-	9	14.399,64	2	2.212,12	-	-	4	9.871,10	1	-	-	2	2.316,42	2.169,67	-	172,19
11	Provinsi Jawa Barat	76	14.346,56	9	-	7	2	67	14.346,56	33	6.034,51	4	435,10	9	866,57	12	3	2.431,39	6	4.578,99	643,55	149,24	98,45
56	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bencos dan Hibah serta Belanja Daerah Kab. Bandung	18	2.044,84	3	-	2	1	15	2.044,84	8	2.036,17	-	-	2	8,67	5	-	-	-	-	224,48	-	8,67
57	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bencos dan Hibah serta Belanja Daerah Kab. Kuningan	24	8.029,83	-	-	-	-	24	8.029,83	11	1.739,60	2	88,52	4	610,62	3	2	2.334,80	2	3.256,29	248,01	-	72,43

Halaman 6 - Lampiran 14

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kekurangan daerah		Potensi Kerugian Daerah	Kerugian daerah	Nilai Temuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
58	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bencos dan Hibah serta Belanja Daerah Kota Bogor	15	2.045,65	5	-	4	1	10	2.045,65	3	179,27	1	322,04	2	221,64	1	-	-	3	1.322,70	24,27	149,24	5,66				
59	Pengelolaan Belanja Kota Cirebon	19	2.226,24	1	-	1	-	18	2.226,24	11	2.079,47	1	24,54	1	25,64	3	1	96,59	1	-	-	-	-				
12	Provinsi Jawa Tengah	181	14.883,79	24	1	16	7	157	14.883,79	34	1.625,38	42	11.019,03	35	1.778,73	30	2	442,48	14	18,17	548,59	152,12	140,70				
60	Belanja Modal Kab. Banyumas TA 2013	21	455,77	3	-	2	1	18	455,77	5	79,27	7	225,24	6	151,26	-	-	-	-	-	-	78,87	126,99				
61	Belanja Modal Kab. Batang TA 2013	22	1.134,44	3	-	2	1	19	1.134,44	2	156,11	8	768,19	8	210,14	-	-	-	-	-	-	124,36	36,61				
62	Belanja Modal Kab Kendal TA 2013	16	1.123,71	-	-	-	-	16	1.123,71	1	56,91	9	1.019,22	2	47,58	2	-	-	-	-	-	-	-				
63	Belanja Modal Kab Tegal TA 2013	15	3.958,99	1	-	-	1	14	3.958,99	1	271,80	3	3.572,23	4	114,96	5	-	-	-	-	-	-	-				
64	Belanja Barang dan Jasa Kab. Magelang TA 2013 (s.d. 31 Agustus)	5	96,15	3	-	3	-	2	96,15	2	96,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,78	-				
65	Belanja Barang dan Jasa Kab. Temanggung TA 2013 (s.d. 31 Agustus)	10	113,67	2	-	2	-	8	113,67	2	55,91	2	52,01	1	5,75	3	-	-	-	-	-	-	-				
66	Belanja Hibah Kab. Cilacap TA 2012 dan TA 2013	18	78,75	3	-	1	2	15	78,75	3	78,75	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-				
67	Belanja Hibah dan Bencos Kab. Kudus TA 2012 dan TA 2013	10	67,36	5	-	5	-	5	67,36	1	56,98	-	-	1	10,38	2	-	-	-	-	-	56,98	-				
68	Belanja Daerah Kabupaten Grobogan TA 2012 dan TA 2013	18	1.086,32	2	-	1	1	16	1.086,32	8	578,44	2	386,74	4	121,14	2	-	-	-	-	-	103,26	-				
69	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo TA 2012 dan TA 2013 (semester I)	2	834,86	-	-	-	-	2	834,86	-	-	2	834,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
70	Belanja Infrastruktur Kota Magelang TA 2013	20	4.901,49	-	-	-	-	20	4.901,49	2	15,95	9	4.160,54	4	282,52	2	2	442,48	1	-	-	-	-				
71	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013	24	1.032,28	2	1	-	1	22	1.032,28	7	179,11	-	-	5	835,00	9	-	-	-	1	18,17	133,34	-				

Halaman 7 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Kelelahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan					
		TOTAL		Kelelahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelelahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelelahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
13	Provinsi D.I. Yogyakarta	15	1.943,48	8	-	6	2	7	1.943,48	5	1.943,48	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.943,48	-	-	-	-	-	
72	1 Belanja Daerah Kab. Bantul TA 2013	15	1.943,48	8	-	6	2	7	1.943,48	5	1.943,48	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.943,48	-	-	-	-	-	
14	Provinsi Jawa Timur	56	6.024,77	14	-	10	4	42	6.024,77	16	3.815,54	12	1.621,30	4	380,82	8	-	-	-	-	2	207,11	150,62	145,29			
73	1 Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kab. Malang TA 2012 dan 2013 (Semester I)	12	207,11	7	-	5	2	5	207,11	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	207,11	-	-	-	-	
74	2 Belanja Infrastruktur Kab. Bojonegoro TA 2013	6	2.112,91	1	-	1	-	5	2.112,91	1	807,63	3	1.078,22	1	227,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	3 Belanja Infrastruktur Kab. Ngawi TA 2013	6	1.077,56	-	-	-	-	6	1.077,56	4	1.054,39	1	21,24	1	1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	4 Belanja Infrastruktur Kota Batu TA 2012 dan 2013 (Semester I)	6	786,62	1	-	-	1	5	786,62	3	734,78	1	48,84	1	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	
77	5 Belanja Infrastruktur Kab. Situbondo TA 2013	13	466,90	3	-	3	-	10	466,90	3	86,36	5	380,54	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,17	
78	6 Belanja Infrastruktur Kota Madurejo TA 2013	5	653,07	1	-	1	-	4	653,07	2	456,79	1	47,45	1	148,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,27	
79	7 Belanja Infrastruktur Kota Pasuruan TA 2013	6	720,60	1	-	-	1	5	720,60	3	675,59	1	45,01	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,33	
80	8 Belanja Perjalanan Dinas dan Kursus-Kursus Singkat Kota Surabaya TA 2010	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Provinsi Banten	14	115,10	2	2	2	-	12	115,10	5	76,40	-	-	2	25,65	4	-	-	-	-	1	13,05	-	-	-	16,01	
	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilikada Tahun 2012 KPI dan Panitia Pengawas Pemilikada Kab. Tangerang	14	115,10	2	2	2	-	12	115,10	5	76,40	-	-	2	25,65	4	-	-	-	-	1	13,05	-	-	-	16,01	
81	1 Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Bali	22	255,51	3	2	1	-	19	255,51	5	156,11	-	-	2	4,90	9	-	-	-	-	2	94,50	1	-	-	66,55	
83	2 Belanja Daerah Kab. Badung TA 2012 dan 2013	13	3.977,15	1	-	-	1	12	3.977,15	4	2.424,38	3	1.312,04	1	50,45	3	1	190,28	-	-	1	2.424,40	-	-	-	201,61	

Halaman 8 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kelemahan Administrasi		Kekurangan Penerimaan		Potensi Kerugian Daerah		Ketidakefektifan		Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah	Kerugian Penerimaan					
										Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan				Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
17	Provinsi Nusa Tenggara Barat	55	17.142,27	2	-	7	2	8	-	53	17.142,27	25	4.726,27	6	10.672,54	7	489,15	10	15,31	4	1.239,00	682,35	51,29	223,36			
84	1 Belanja Modal Provinsi NTB TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 November)	8	1.026,11	-	-	-	-	-	-	8	1.026,11	4	999,90	-	-	1	26,21	1	-	2	-	246,99	-	-			
85	2 Belanja Modal Kab. Bima TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 November)	5	798,39	-	-	-	-	-	-	5	798,39	3	759,81	-	-	1	38,58	1	-	-	-	107,09	-	14,13			
86	3 Belanja Modal Kab. Lombok Barat TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 Nopember)	7	1.504,86	-	-	-	-	-	-	7	1.504,86	2	39,79	1	51,29	1	177,78	2	-	1	1.236,00	39,80	51,29	183,69			
87	4 Belanja Modal Kab. Lombok Timur TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 Nopember)	9	1.831,70	-	-	-	-	-	-	9	1.831,70	4	1.475,45	2	167,45	1	188,80	2	-	-	-	-	-	-	-		
88	5 Belanja Modal Kab. Sumbawa Barat TA 2012 dan 2013 (s.d. 31 Juli)	10	202,76	-	-	-	-	-	-	10	202,76	6	170,22	-	-	1	29,54	2	-	1	3,00	153,17	-	22,23			
89	6 Belanja Modal Kab. Sumbawa Barat TA 2012 dan 2013 (s.d. 31 Juli)	11	11.477,04	2	-	2	-	-	-	9	11.477,04	4	1.030,59	2	10.438,27	1	8,18	2	-	-	-	-	-	-	3,31		
90	7 Belanja Modal Kota Mataram TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 Nopember)	5	301,41	-	-	-	-	-	-	5	301,41	2	250,51	1	15,53	1	20,06	-	-	1	15,31	-	-	-	-		
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur	65	1.578,82	6	2	4	4	-	-	59	1.578,82	19	338,43	1	65,10	8	227,99	19	710,41	4	236,89	19,63	-	92,80			
91	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Permisi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 pada KPU dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur	17	616,63	4	1	3	3	-	-	13	616,63	2	39,03	1	65,10	3	126,13	3	336,20	2	50,17	10,21	-	9,17			
92	2 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2013 pada KPU dan Parwaslu Kabupaten Nagekeo	10	142,01	1	1	-	-	-	-	9	142,01	2	62,96	-	-	1	77,91	5	1,14	-	-	-	-	71,32			
93	3 Pertanggungjawaban belanja hibah Pemilukada Tahun 2013 pada KPU dan Parwaslu Kabupaten Sikka	19	202,75	1	-	1	1	-	-	18	202,75	7	47,57	-	-	1	4,75	7	150,43	-	-	-	-	-			

Halaman 10 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jml Kasus	Keurangan daerah	Jml Kasus	Potensi Kerugian Daerah	Jml Kasus	Kelemahan Administrasi	Jml Kasus	Ketidakhormatan	Jml Kasus	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Keurangan daerah	Jml Kasus	Potensi Kerugian Daerah	Nilai Temuan	Nilai Temuan
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
22	Provinsi Sulawesi Utara	48	6.248,29	5	-	4	1	43	6.248,29	16	2.365,89	5	1.398,52	6	553,84	11	5	1.932,04	-	-	396,50	73,02	69,24				
106	1 Belanja Modal Infrastruktur Kab. Bolang Mongondow TA 2013 (s.d. 30 November 2013)	5	938,40	-	-	-	-	5	938,40	2	187,95	1	344,02	1	273,38	-	1	133,05	-	-	157,29	73,02	26,84				
107	2 Belanja Modal Infrastruktur Kab. Bolang Mongondow Selatan TA 2013 (s.d. 30 November 2013)	12	1.225,65	2	-	1	1	10	1.225,65	3	226,96	2	960,43	3	38,26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	3 Belanja Modal Infrastruktur Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro TA 2013 (s.d. 30 November 2013)	9	1.891,92	-	-	-	-	9	1.891,92	3	786,16	-	-	1	240,62	3	2	865,14	-	-	156,55	-	42,40				
109	4 Belanja Modal Infrastruktur Kab. Minahasa TA 2013 (s.d. 30 November 2013)	13	1.074,78	1	-	1	-	12	1.074,78	7	737,93	1	0,31	1	1,58	2	1	334,96	-	-	82,66	-	-				
110	5 Belanja Modal Infrastruktur Kab. Minahasa Selatan TA 2013	9	1.117,54	2	-	2	-	7	1.117,54	1	424,89	1	93,76	-	-	4	1	598,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Provinsi Sulawesi Tengah	71	22.482,26	8	-	7	1	63	22.482,26	38	6.823,76	3	1.004,78	8	713,65	7	2	1.145,52	5	12.794,55	225,43	9,12	385,55				
111	1 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kab. Buoi TA 2012 dan 2013	21	2.665,95	4	-	3	1	17	2.665,95	12	1.306,46	-	-	2	357,40	1	-	-	2	1.002,09	152,13	-	344,74				
112	2 Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kab. Morowali TA 2012 dan 2013	19	6.826,72	4	-	4	-	15	6.826,72	9	1.488,95	-	-	-	-	3	1	502,32	2	4.835,45	-	-	-	-	-	-	
113	3 Belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kab. Morowali TA 2012 dan 2013	15	1.813,52	-	-	-	-	15	1.813,52	10	1.115,22	-	-	2	55,10	2	1	643,20	-	-	-	-	-	40,81			
114	4 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Pilkada Kab. Parigi Moutong TA 2013	5	707,40	-	-	-	-	5	707,40	3	644,84	-	-	2	62,56	-	-	-	-	-	49,21	-	-	-	-	-	
115	5 Belanja Modal Infrastruktur TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 November 2013) Kab. Poso	3	1.896,46	-	-	-	-	3	1.896,46	1	1.125,10	1	757,12	1	14,24	-	-	-	-	-	24,09	9,12	-	-	-	-	
116	6 Belanja Modal Infrastruktur TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 November 2013) Kab. Toiwoi	8	8.572,21	-	-	-	-	8	8.572,21	3	1.143,19	2	247,66	1	224,35	1	-	-	1	6.957,01	-	-	-	-	-	-	

Halaman 11 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan								Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Nilai Temuan	Potensi Kerugian Daerah	Nilai Temuan	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24	Provinsi Sulawesi Selatan	31	1.511,09	5	2	3	-	26	1.511,09	8	585,61	4	122,31	6	350,74	6	2	454,43	-	-	-	-	-
117	1 Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Prov Sulsel Tahun 2013	31	1.511,09	5	2	3	-	26	1.511,09	8	585,61	4	122,31	6	350,74	6	2	454,43	-	-	-	-	-
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	91	5.309,97	4	2	2	-	87	5.309,97	30	2.343,45	7	689,36	19	2.082,96	28	3	194,20	-	-	133,50	-	232,82
118	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Penyelenggaraan Pilkada TA 2012 pada KPU dan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	11	691,23	-	-	-	-	11	691,23	2	178,13	-	-	3	491,40	5	1	21,70	-	-	-	-	26,45
119	2 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum (KPU) Kota Bombana, Panwaslu Kabupaten Bombana	5	372,18	-	-	-	-	5	372,18	-	-	-	-	2	372,18	3	-	-	-	-	-	-	0,86
120	3 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Umum (KPU) Kota Kolaka Utara	10	181,71	1	-	1	-	9	181,71	3	99,30	-	-	1	66,61	4	1	15,80	-	-	-	-	52,97
121	4 Belanja Hibah Pilkada TA 2012 dan 2013 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau, Panwaslu Kota Baubau	17	301,38	1	1	-	-	16	301,38	5	249,24	-	-	4	52,14	7	-	-	-	-	-	-	7,48
122	5 Belanja Hibah Pilkada TA 2011 dan 2012 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Panwaslu Kota Kendari	15	1.662,42	-	-	-	-	15	1.662,42	7	724,04	1	137,70	3	643,68	3	1	156,70	-	-	-	-	-
123	6 Belanja Daerah Kab. Kolaka Utara TA 2013 (S.D. Oktober 2013)	9	507,78	-	-	-	-	9	507,78	4	384,67	1	68,87	2	54,24	2	-	-	-	-	-	-	-
124	7 Belanja Daerah Kab. Konawe TA 2013 (S.D. Oktober 2013)	8	544,96	1	1	-	-	7	544,96	5	524,92	-	-	1	20,04	1	-	-	-	-	133,50	-	-
125	8 Belanja Daerah Kab. Konawe Utara TA 2013	16	1.048,61	1	-	1	-	15	1.048,61	4	183,15	5	482,79	3	382,67	3	-	-	-	-	-	-	145,06

Halaman 12 - Lampiran 14

(Nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern												Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan												Nilai penyimpangan aset atau penyeroran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Total SPI	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kerugian daerah		Potensi Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
26	Provinsi Gorontalo	78	5.921,27	5	-	3	2	73	5.921,27	35	3.203,86	16	1.230,20	15	1.044,25	3	2	99,46	2	343,50	12,90	4,40	6,80	-	-	-	-				
126	1 Belanja Modal Provinsi Gorontalo TA 2012 dan 2013	10	1.505,16	-	-	-	-	10	1.505,16	7	1.382,60	1	68,93	2	53,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
127	2 Belanja Modal Kab. Bone Bolango TA 2012 dan 2013	28	2.060,60	-	-	-	-	28	2.060,60	14	775,85	8	808,65	6	476,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
128	3 Belanja Modal Kab. Gorontalo TA 2012 dan 2013	13	890,51	-	-	-	-	13	890,51	5	567,22	5	294,00	3	29,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
129	4 Belanja Modal Kab. Pohuwato TA 2012 dan 2013	10	808,64	1	-	1	-	9	808,64	4	269,37	2	58,62	2	480,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
130	5 Belanja Bantuan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi Kabupaten Boalemo TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013)	17	656,36	4	-	2	2	13	656,36	5	208,82	-	-	2	4,58	3	2	99,46	1	343,50	2,55	-	-	-	-	-	-				
27	Provinsi Sulawesi Barat	41	3.726,34	10	-	9	1	31	3.726,34	16	1.343,22	3	84,11	4	90,22	4	2	1.555,54	2	653,25	131,88	-	-	-	-	-					
131	1 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2012 & 2013 (s.d. 30 September 2013)	16	964,34	3	-	2	1	13	964,34	7	831,78	-	-	2	24,52	3	1	108,04	-	-	105,25	-	-	-	-	-					
132	2 Belanja Daerah Kab. Mamuju Utara TA 2012 dan 2013	14	467,09	1	-	1	-	13	467,09	7	348,20	3	84,11	1	34,78	1	-	-	-	-	26,63	-	-	-	-	-					
133	3 Belanja Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan TA 2013 Dan Belanja Modal (Gedung Dan Bangunan) TA 2012 Dan 2013 Kab. Majene	11	2.294,91	6	-	6	-	5	2.294,91	2	163,24	-	-	1	30,92	-	-	-	-	-	653,25	-	-	-	-	-					
28	Provinsi Maluku	52	10.296,55	-	-	-	-	52	10.296,55	33	5.346,63	9	1.687,47	1	39,70	4	2	230,37	3	2.992,38	135,86	-	-	-	-	-					
134	1 Belanja Daerah TA 2012-2013 Kab. Maluku Tenggara Barat	19	4.186,44	-	-	-	-	19	4.186,44	7	686,92	3	276,77	-	-	4	2	230,37	3	2.992,38	-	-	-	-	-	-					
135	2 Belanja Modal TA 2012-2013 Kota Tual	33	6.110,11	-	-	-	-	33	6.110,11	26	4.659,71	6	1.410,70	1	39,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
29	Provinsi Maluku Utara	47	34.385,47	2	-	1	1	45	34.385,47	18	11.208,95	8	18.852,64	8	618,09	8	-	-	-	-	797,90	-	-	-	-	-					
136	1 Belanja Bantuan dan Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Provinsi Maluku Utara	21	16.419,09	-	-	-	-	21	16.419,09	9	8.012,60	3	5.655,57	2	77,37	5	-	-	-	-	797,90	-	-	-	-	-					
137	2 Belanja Bantuan dan Belanja Modal TA 2013 kab. Halmahera Utara	7	1.948,79	-	-	-	-	7	1.948,79	2	244,68	2	653,43	2	18,44	-	-	-	-	-	1.032,24	-	-	-	-	-					

Halaman 13 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Ketidakefektifan										Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan				
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Potensi Kerugian Daerah	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Kerugian daerah	Potensi Kerugian Daerah
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
138	Belanja Bantuan dan Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Kab. Kepulauan Sula	12	13.994,98	2	-	1	1	10	13.994,98	5	1.245,40	3	12.543,64	1	205,94	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kab. Halmahera Selatan	7	2.022,61	-	-	-	-	7	2.022,61	2	1.706,27	-	-	3	316,34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Provinsi Papua	176	104.467,69	13	-	11	2	163	104.467,69	77	59.531,72	27	19.246,34	12	2.163,00	19	12.813,20	19	10.713,43	295,63	-	-	42,41							
140	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) Kab. Dogiyai	7	4.282,84	2	-	2	-	5	4.282,84	2	3.649,87	1	417,39	-	-	1	-	-	1	215,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Belanja Daerah TA 2013 kab. Intan Jaya	15	16.205,70	-	-	-	-	15	16.205,70	8	3.997,45	3	12.133,53	1	74,72	3	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Belanja TA 2012 s.d. Oktober 2013 kab. Kep. Yapen	9	4.787,56	1	-	1	-	8	4.787,56	3	2.827,19	1	489,48	1	73,41	1	1	506,48	1	891,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) kab. Lanny Jaya	31	17.081,01	2	-	2	-	29	17.081,01	16	10.304,01	7	2.875,44	1	214,23	2	2	3.687,33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) Kab. Mamberamo Raya	41	23.477,87	-	-	-	-	41	23.477,87	22	13.350,15	6	1.335,15	5	291,59	1	2	7.034,05	5	1.467,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) kab. Pegunungan Bintang	21	5.888,88	2	-	2	-	19	5.888,88	6	2.950,15	6	1.357,07	1	376,48	4	1	157,18	1	1.048,00	226,51	-	-	42,41	-	-	-	-	-	-
146	Belanja Daerah TA 2012 Kab. Sarmi	21	16.509,47	-	-	-	-	21	16.509,47	11	14.834,39	1	277,95	2	95,07	4	2	812,81	1	489,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober 2013) Kab. Tolikara	16	10.490,15	-	-	-	-	16	10.490,15	9	7.618,51	2	360,33	1	1.037,50	1	1	615,35	2	858,46	49,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	Belanja Bantuan TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) kab. Merauke	15	5.744,11	6	-	4	-	9	5.744,11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	5.744,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Provinsi Papua Barat	106	36.435,35	-	-	-	-	106	36.435,35	52	24.412,13	23	6.052,68	28	5.846,08	2	-	-	1	124,46	1,75	6,75	-	-	-	-	-	-	-	-
149	Belanja Daerah Prov. Papua Barat TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	21	8.785,05	-	-	-	-	21	8.785,05	13	6.358,61	3	258,29	5	2.168,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Belanja Daerah Kab. Fakfak TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	6	577,11	-	-	-	-	6	577,11	3	502,55	1	16,74	1	57,82	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	Belanja Daerah Kab. Kaimana TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	14	3.305,88	-	-	-	-	14	3.305,88	5	802,14	5	1.362,14	4	1.141,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 14

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan														
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Potensi Kerugian Daerah	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24													
132	Belanja Daerah Kab. Manokwari TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	8	2.351,86	-	-	-	-	8	2.351,86	3	1.866,84	2	290,80	3	194,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
153	Belanja Daerah Kab. Maybrat TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	10	5.742,60	-	-	-	-	10	5.742,60	6	5.268,76	-	-	3	473,84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
154	Belanja Daerah Kab Raja Ampat TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	10	5.674,73	-	-	-	-	10	5.674,73	6	4.100,64	2	839,21	2	734,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
155	Belanja Daerah Kab. Sorong TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	6	816,56	-	-	-	-	6	816,56	1	60,87	3	664,95	2	90,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
156	Belanja Daerah Kab. Sorong Selatan TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	8	1.342,98	-	-	-	-	8	1.342,98	4	819,84	1	27,98	2	370,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,75	
157	Belanja Daerah Kab. Tambora TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	8	3.300,82	-	-	-	-	8	3.300,82	4	1.239,16	2	1.573,02	2	488,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	Belanja Daerah Kab. Teluk Bintuni TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	4	2.045,01	-	-	-	-	4	2.045,01	3	2.003,81	-	-	1	41,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	Belanja Daerah Kab. Teluk Wondama TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	5	1.950,96	-	-	-	-	5	1.950,96	2	1.170,56	2	715,60	1	64,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	Belanja Daerah Kota Sorong TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)	6	541,79	-	-	-	-	6	541,79	2	218,35	2	303,95	2	19,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	1.989	564.333,74	201	12	148	41	1.788	564.333,74	760	226.728,42	291	117.821,43	306	56.717,82	250	69	39.221,56	112	123.844,51	28.047,75	3.594,49	7.563,33													
	Jumlah Provinsi	300	138.327,30	33	6	19	8	267	138.327,30	101	36.584,38	16	7.253,97	54	22.444,90	52	18	14.502,58	26	57.543,47	13.731,67	32,55	853,59													
	Jumlah Kabupaten/kota	1.689	426.006,44	168	6	129	33	1.521	426.006,44	659	190.144,04	275	110.567,46	252	34.272,92	198	51	24.718,98	86	66.303,04	14.316,08	3.561,94	6.709,74													

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

No	Kelompok	Total Kasus			%
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total	
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	6	6	12	6
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	4	5	
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	3	1	4	
3	Entitas Terlambat Menyampaikan Laporan	2	-	2	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	1	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	19	129	148	74
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	54	59	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	-	4	4	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	11	53	64	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	7	9	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	1	11	12	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	8	33	41	20
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	4	21	25	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	9	13	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	1	1	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	2	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		33	168	201	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	101	36.584,38	659	190.144,04	760	226.728,42
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	3	48,00	22	4.883,72	25	4.931,72
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	9	3.152,06	23	9.791,37	32	12.943,43
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	5.054,35	11	6.202,44	13	11.256,79
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	34	15.072,17	234	79.649,23	268	94.721,40
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	10	5.988,06	117	34.603,74	127	40.591,80
6	Pemahalan harga (Mark up)	2	881,75	52	10.573,58	54	11.455,33
7	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	30,00	5	443,05	6	473,05
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	12	1.781,97	49	12.183,27	61	13.965,24
9	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	706,07	25	1.156,33	32	1.862,40
10	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	7	1.135,68	51	13.966,60	58	15.102,28
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	11	1.315,78	59	12.173,87	70	13.489,65
12	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah	-	-	1	2,40	1	2,40
13	Lain-lain	3	1.418,49	10	4.514,44	13	5.932,93
II	Potensi Kerugian Daerah	16	7.253,97	275	110.567,46	291	117.821,43
1	Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	11	6.995,52	262	105.445,56	273	112.441,08
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	136,14	4	131,91	5	268,05
3	Aset dikuasai pihak lain	-	-	1	93,00	1	93,00
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	38,67	-	-	1	38,67
5	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	-	-	2	59,08	2	59,08
6	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	1	20,08	1	597,74	2	617,82
7	Lain-lain	2	63,56	5	4.240,17	7	4.303,73
III	Kekurangan Penerimaan	54	22.444,90	252	34.272,92	306	56.717,82
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	29	12.835,89	206	17.422,73	235	30.258,62
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	18	8.478,32	43	16.798,05	61	25.276,37
3	Penerimaan Negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	2	323,30	-	-	2	323,30
4	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	0,07	1	24,66	2	24,73
5	Lain-lain	4	807,32	2	27,48	6	834,80

Halaman 2 - Lampiran 16

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
IV	Kelemahan Administrasi	52	-	198	-	250	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	21	-	21	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	19	-	79	-	98	-
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-	9	-	10	-
4	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	16	-	49	-	65	-
5	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	-	-	6	-	6	-
6	Pelaksanaan lelang secara proforma	-	-	2	-	2	-
7	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/ Daerah/Perusahaan	2	-	6	-	8	-
8	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kesehatan, pertambangan, perpajakan, dll.	3	-	13	-	16	-
9	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	6	-	3	-	9	-
10	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	4	-	4	-	8	-
11	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-	5	-	6	-
12	Lain-lain	-	-	1	-	1	-
V	Ketidakhematan	18	14.502,58	51	24.718,98	69	39.221,56
1	penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	-	-	1	1.987,44	1	1.987,44
2	Pemborosan keuangan negara/daerah atau kemahalan harga	18	14.502,58	50	22.731,54	68	37.234,12
VI	Ketidakefektifan	26	57.541,47	86	66.303,04	112	123.844,51
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	8	4.545,19	33	24.933,59	41	29.478,78
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	2	247,50	2	247,50
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	10	18.117,62	23	23.242,42	33	41.360,04
4	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	8	34.878,66	16	17.879,53	24	52.758,19
5	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	-	-	2	-	2	-
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	-	-	10	-	10	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		267	138.327,30	1.521	426.006,44	1.788	564.333,74

Halaman 1 - Lampiran 17

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PPada PDTT atas Pengelolaan Aset tetap**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah difinalkan/ lanjut selama proses pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian Negara/ Daerah	Potensi Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah	Kelemahan Administrasi	Ketidakefektifan	Kerugian Negara/ Daerah	Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah	Nilai temuan	20	21	
Badan Layanan Umum																			
1	PPKGBK	22	2.736,44	12	-	11	1	10	2.736,44	1	-	5	2.736,44	3	1	-	-		
			USD 30.300,00						USD 30.300,00										
2	PPK Kemayoran	44	630.919,11	4	1	3	-	40	630.919,11	11	59.590,27	19	306.969,74	6	1	-	-		
	Jumlah BLU	66	633.655,55	16	1	14	1	50	633.655,55	12	59.590,27	24	309.706,18	9	2	-	-		
			USD 30.300,00						USD 30.300,00										
Pemerintah Daerah																			
1 Provinsi Jawa Tengah																			
1	Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Bora Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Bora	20	-	11	10	1	-	9	-	-	1	-	-	8	-	-	-		
2	Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Klaten	24	-	10	6	3	1	14	-	-	1	-	-	13	-	-	-		
3	Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Sragen	27	69,13	13	10	2	1	14	69,13	1	69,13	-	-	10	3	-	-		
		28	2.955,11	11	10	-	1	17	2.955,11	1	133,46	1	1.612,47	13	2	1.209,18	-		
4	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo	13	1.342,64	6	5	-	1	7	1.342,64	1	133,46	-	-	5	1	1.209,18	-		
5	Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Yogyakarta	15	1.612,47	5	5	-	-	10	1.612,47	-	-	1	1.612,47	8	1	-	-		
3 Provinsi Jawa Timur																			
6	Manajemen Aset Kabupaten Bojonegoro	10	2.183,32	4	1	2	1	6	2.183,32	1	2.003,49	-	1	4	-	-	-		
7	Manajemen Aset Kabupaten Bondowoso	7	-	2	2	-	-	5	-	-	-	-	-	4	-	-	-		
8	Manajemen Aset Kabupaten Lumajang	8	-	4	2	1	1	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-		
9	Manajemen Aset Kabupaten Magetan	12	-	5	2	2	1	7	-	-	-	-	-	5	2	-	-		
		68	2.566,31	27	12	8	7	41	2.566,31	1	2.003,49	2	362,82	33	2	-	27,21		

Halaman 2 - Lampiran 17

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidaktapatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah difinalkan/juati selama proses pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
10	Manajemen Aset Kabupaten Sampang	14	-	2	1	2	2	9	-	-	-	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-
11	Manajemen Aset Kabupaten Tulungagung	17	182,99	7	3	2	2	10	182,99	-	-	-	-	1	182,99	9	-	-	-	-	-	27,21
4	Provinsi Kalimantan Selatan	21	14.234,92	7	7	-	-	14	14.234,92	-	-	5	14.234,92	-	-	9	-	-	-	-	-	-
12	Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2012 dan Smt. I Tahun 2013	21	14.234,92	7	7	-	-	14	14.234,92	-	-	5	14.234,92	-	-	9	-	-	-	-	-	-
5	Provinsi Sulawesi Selatan	87	13.099,66	45	29	9	7	42	13.099,66	1	29,95	10	13.069,71	-	-	28	3	-	-	-	-	-
13	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Benteng	21	12.217,71	11	5	4	2	10	12.217,71	-	-	2	12.217,71	-	-	7	1	-	-	-	-	-
14	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Pangajene	19	729,32	10	8	1	1	9	729,32	-	-	2	729,32	-	-	6	1	-	-	-	-	-
15	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Witanosoppeng	29	152,63	13	10	2	1	16	152,63	1	29,95	5	122,68	-	-	9	1	-	-	-	-	-
16	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Makassar	18	-	11	6	2	3	7	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
6	Provinsi Gorontalo	16	117,57	3	2	1	-	13	117,57	1	18,07	1	66,50	1	35,00	9	1	-	-	-	1,40	-
17	Pengelolaan Aset Tahun 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kota Gorontalo	16	117,57	3	2	1	-	13	117,57	1	18,07	1	66,50	1	33,00	9	1	-	-	-	1,40	-

Halaman 3 - Lampiran 17

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Objek Pemeriksaan	Total				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Kelemahan Negara/ Daerah		Potensi Kelemahan Negara/ Daerah		Kelemahan Pemerintahan Negara/ Daerah		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan		Kelemahan Negara/ Daerah		Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah				
											Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
7	Provinsi Sulawesi Barat	13	540,64	3	540,64	5	2	7	8	1	10	540,64	1	25,68	2	514,96	15	16	17	18	19	20	21	-	-				
18	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali/Mandar	13	540,64	3	540,64	3	2	-	1	10	540,64	1	25,68	2	514,96	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-				
8	Provinsi Maluku Utara	26	5.420,93	10	5.420,93	8	2	-	-	16	5.420,93	3	575,11	3	4.845,82	-	-	10	-	-	-	-	152,07	-	-				
19	Manajemen Aset TA 2012 dan 2013 Kabupaten Pulau Morotai	8	349,56	1	349,56	1	1	-	-	7	349,56	1	349,56	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-					
20	Manajemen Aset TA 2012 dan 2013 Kota Tidore Kepulauan	18	5.071,37	9	5.071,37	7	2	2	-	9	5.071,37	2	225,55	3	4.845,82	-	-	4	-	-	-	-	152,07	-	-				
9	Provinsi Papua	22	12.911,83	8	12.911,83	4	2	2	2	14	12.911,83	-	-	2	12.524,18	1	387,65	11	-	-	-	-	-	-	-				
21	Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai	22	12.911,83	8	12.911,83	4	2	2	2	14	12.911,83	-	-	2	12.524,18	1	387,65	11	-	-	-	-	-	-	-				
	Jumlah Pemerintah Daerah	352	51.716,10	148	51.716,10	100	28	20	20	204	51.716,10	10	2.854,89	27	46.868,56	5	783,47	151	11	1.209,18	153,47	27,21	-	-					
	Jumlah Pemerintah Daerah dan BLU	418	685.371,65	164	685.371,65	101	42	21	21	254	685.371,65	22	62.445,16	30	311.227,66	29	310.489,65	160	13	1.209,18	153,47	27,21	-	-					
	Jumlah Rupiah Pemerintah Daerah dan BLU	418	1.054.698,35	164	1.054.698,35	101	42	21	21	254	1.054.698,35	22	431.771,86	30	311.227,66	29	310.489,65	160	13	1.209,18	153,47	27,21	-	-					
	Jumlah Rupiah Pemerintah Pusat (BLU)	66	633.655,55	16	633.655,55	1	14	1	1	50	633.655,55	12	59.590,27	3	264.359,10	24	309.706,18	9	2	-	-	-	-	-					
	Jumlah Rupiah Pemerintah Pusat (BLU)	66	1.002.982,25	16	1.002.982,25	1	14	1	1	50	1.002.982,25	12	428.916,97	3	264.359,10	24	309.706,18	9	2	-	-	-	-	-					
	Pemerintah Provinsi	21	14.234,92	7	14.234,92	7	-	-	-	14	14.234,92	-	-	5	14.234,92	-	-	9	-	-	-	-	-	-					
	Pemerintah Kabupaten/Kota	331	37.481,18	141	37.481,18	93	28	20	20	190	37.481,18	10	2.854,89	22	32.633,64	5	783,47	142	11	1.209,18	153,47	27,21	-	-					
	Jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	352	51.716,10	148	51.716,10	100	28	20	20	204	51.716,10	10	2.854,89	27	46.868,56	5	783,47	151	11	1.209,18	153,47	27,21	-	-					

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Aset Tetap**

No	Kelompok	BLU		Pemerintah Daerah			
				Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total	%
		Jumlah Kasus	%	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus		
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1	6	7	93	100	68
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1		7	74	81	
2	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	-		-	16	16	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-		-	1	1	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-		-	2	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	14	88	-	28	28	19
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	-		-	6	6	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	14		-	17	17	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-		-	2	2	
4	Lain-lain	-		-	3	3	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1	6	-	20	20	13
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1		-	14	14	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	-		-	4	4	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-		-	2	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		16	100	7	141	148	100

Halaman 1 - Lampiran 19

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Pengelolaan Aset Tetap

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	BLU		Pemerintah Daerah					
		Jumlah Kasus	Nilai	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
				Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan									
I	Kerugian Negara/Daerah	12	59.590,27	-	-	10	2.854,89	10	2.854,89
			USD 30.000,00						
	Jumlah rupiah	12	428.916,97	-	-	10	2.854,89	10	2.854,89
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	-	-	2	2.219,74	2	2.219,74
2	penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	-	-	-	-	1	18,07	1	18,07
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2	2.042,70	-	-	-	-	-	-
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	525,00						
5	Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset negara/ daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/ daerah	8	57.022,57	-	-	1	9,30	1	9,30
6	Lain-lain	1	-			6	607,78	6	607,78
			USD 30.300,00						
	nilai rupiah		369.326,70						
	Jumlah rupiah		369.326,70						
II	Potensi Kerugian Negara/Daerah	3	264.359,10	5	14.234,92	22	32.633,64	27	46.868,56
1	Aset dikuasai pihak lain	-	-	3	5.220,95	11	17.155,56	14	22.376,51
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	-	-	2	9.013,97	9	15.411,58	11	24.425,55
3	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	-	-	-	-	1	-	1	-
4	Lain-lain	3	264.359,10	-	-	1	66,50	1	66,50
III	Kekurangan Penerimaan	24	309.706,18	-	-	5	783,47	5	783,47
1	Penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan	24	309.706,18	-	-	3	603,64	3	603,64
2	Penggunaan langsung Penerimaan Negara/Daerah			-	-	2	179,83	2	179,83
IV	Kelemahan Administrasi	9	-	9	-	142	-	151	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	2	-	-	-	1	-	1	-
2	pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	-	-	-	-	2	-	2	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/ perusahaan	4	-	7	-	110	-	117	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-	-	-	2	-	2	-
5	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas negara/daerah	1	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	-	-	-	-	1	-	1	-
7	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-	2	-	26	-	28	-
V	Ketidakefektifan	2	-	-	-	11	1.209,18	11	1.209,18
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	-	-	1	-	1	-
2	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	-	-	9	1.209,18	9	1.209,18
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	1	-	1	-
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2	-	-	-	-	-	-	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		50	633.655,55	14	14.234,92	190	37.481,18	204	51.716,10
			USD 30.000,00		-		-		-
		50	1.002.982,25	14	14.234,92	190	37.481,18	204	51.716,10

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 20

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan															
		TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	PLIK dan MPLIK																
1	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Dan Mobile PLIK Pada Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) Di Jakarta dan Maluku Utara	12	39.812,76	2	39.812,76	1	2.287,70	2	8.457,76	1	559,15	3	3	28.508,15			
2	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Dan Mobile PLIK Pada Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) Di Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung	19	87.077,49	2	87.077,49	1	780,60	3	33.043,06	-	-	6	7	53.253,83			
3	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Dan Mobile PLIK Pada Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi Dan Informatika (KOMINFO) Di Jakarta dan Sulawesi Utara	15	22.401,16	0	22.401,16	2	2.769,16	2	4.065,16	1	248,45	8	2	15.318,39			
	Jumlah	46	149.291,41	4	149.291,41	4	5.837,46	7	45.565,98	2	807,60	17	12	97.080,37			

Lampiran 21

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDDT atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	4	100
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	1	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		4	100

Lampiran 22

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Penyediaan Jasa PLIK dan MPLIK**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	PLIK dan MPLIK	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara	4	5.837,46
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	4	5.837,46
II	Potensi Kerugian Negara	7	45.565,98
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	7	45.565,98
III	Kekurangan Penerimaan	2	807,60
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	2	807,60
IV	Kelemahan Administrasi	17	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	9	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	8	-
V	Ketidakefektifan	12	97.080,37
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
2	Barang yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan	3	7.170,21
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	8	89.910,16
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		42	149.291,41

Lampiran 23

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan				Ketidakefektifan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Jml Kasus	Nilai Temuan	
								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan			Jml kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KKKS BP Indonesia Ltd - WK Berau, Muturi, dan Wriangar (Tanggguh Joint Venture)	9	USD 23,019.52	1	1	-	-	8	USD 23,019.52	7	USD 23,019.52	1	-	-
2	KKKS China National Offshore Oil Company (CNOOC) SES Ltd - WK South East Sumatera	14	USD 10,274.06	2	-	2	-	12	USD 10,274.06	7	USD 10,274.06	4	1	-
3	KKKS Citic Seram Energy Ltd. (CSEL) - WK Seram Non Bula	8	USD 643.84	2	-	2	-	6	USD 643.84	5	USD 643.84	1	-	-
4	KKKS Petrochina International Jabung Ltd (PCIL) - WK Jabung	5	USD 744.02	2	-	-	2	3	USD 744.02	3	USD 744.02	-	-	-
5	KKKS Hess (Indonesia-Pangkajene) Ltd - WK Pangkajene	16	USD 24,915.90	-	-	-	-	16	USD 24,915.90	14	USD 24,915.90	2	-	-
6	KKKS Vico Indonesia - WK Sanga - sanga	13	USD 5,553.66	4	2	-	2	9	USD 5,553.66	8	USD 5,553.66	1	-	-
7	KKKS Energi Mega Persada Malacca Strait S.A (EMP MSA) - WK Malacca Strait	15	USD 14,218.62	2	2	-	-	13	USD 14,218.62	12	USD 14,218.62	1	-	-
8	KKKS Star Energy (Kakap) Ltd - WK Kakap	12	USD 2,245.34	-	-	-	-	12	USD 2,245.34	12	USD 2,245.34	-	-	-
	Jumlah	92	USD 81,614.96	13	5	4	4	79	USD 81,614.96	68	USD 81,614.96	10	1	-
	Jumlah Rupiah	92	994.804,75	13	5	4	4	79	994.804,75	68	994.804,75	10	1	-

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 24

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	5	38
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	4	-
2	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4	31
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	-
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	4	31
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		13	100

Lampiran 25

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDTT atas Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kekurangan Penerimaan	68	USD 81,614.96
	Jumlah Rupiah		994.804,75
1	Penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara	3	USD 13,058.34
	Jumlah Rupiah		159.168,11
2	Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS	65	USD 68,556.62
	Jumlah Rupiah		835.636,64
II	Kelemahan Administrasi	10	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	1	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	5	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	4	-
III	Ketidakefektifan	1	-
1	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		79	USD 81,614.96
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		79	994.804,75

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 1 - Lampiran 26

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan atas Temuan yang Telah Diditindaklanjuti selama Proses Pemeriksaan									
		Jml Kasus	Nilai	Total Kelemahan SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jml Kasus	Nilai	Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	Ketidakhematan	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai					
1	Pengelolaan pendapatan WPU Klam kretekkan penumpang pesawat udara dan investasi teknologi informasi pada PT Jasa Bahari (Persero)	3	46.034,29	5	-	1	4	13	46.034,29	2	44.551,08	1	331,20	1	962,77	2	189,24	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pemeriksaan PIP2U, PIP4U, PIP, konsepsi dan sewa serta belanja modal investasi teknologi informasi pada PT Angkasa Pura I (Persero)	33	8.765,27	22	3	11	8	11	8.765,27	-	-	-	3	460,54	3	8.304,73	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pemeriksaan PIP2U, PIP4U, PIP, konsepsi dan sewa serta belanja modal investasi teknologi informasi pada PT Angkasa Pura II (Persero)	49	27.915,59	25	4	13	8	24	27.915,59	3	429,98	3	7.767,52	10	13.125,09	-	-	-	-	3	6.593,00	-	-	-	-	-	-	157,20	
4	Pengelolaan, biaya dan investasi unit bisnis petrokimia dan pelumas PT Pertamina	-	USD 571,32	-	-	-	-	-	USD 571,32	-	USD 16,00	-	-	-	USD 555,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Pendapatan Tol dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Jasa Marga (Persero)	23	6.827,83	8	-	4	4	15	6.827,83	3	583,79	2	288,97	1	143,25	4	5.811,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367,68	129,60	
6	Pengelolaan Biaya Tahun 2013 (s.d. Triwulan II) dan Penyelesaian Hji Tahun 1434 H/ 2013 M pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	16	1.472,21	6	-	1	5	10	1.472,21	-	-	3	237,41	-	-	4	1.234,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan dan penjualan Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	11	26.605,43	8	1	4	3	3	26.605,43	-	-	-	-	-	2	5.622,23	1	20.983,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			USD 131,39 SAR 966,42						USD 131,39 SAR 966,42				USD 93,84 SAR 522,26				USD 37,55 SAR 444,16										5AR 52,26		

Halaman 2 - Lampiran 26

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vallas)

No	Eritas	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai Penyerahan Aset atau Penyeroran ke Kas Negara/Perusahaan atas temuan yang telah Ditindaklanjuti selama Proses Pemeriksaan																				
		Jml Kasus	Nilai	Total Kelemahan SPI	Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jml Kasus	Nilai	Kerugian Perusahaan	Jml Kasus	Nilai	Potensi Kerugian perusahaan	Jml Kasus	Nilai	Kekurangan Penerimaan	Jml Kasus	Nilai	Kelemahan Administrasi	Jml Kasus	Nilai	Ketidakhormatan	Jml Kasus	Nilai	Ketidakefisienan	Jml Kasus	Nilai	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai	Kerugian Perusahaan	Nilai	Potensi Kerugian Perusahaan	Nilai	Kekurangan Penerimaan	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26															
8	Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan dan penjualan tahun buku 2011 dan 2012 pada PT Bahana (Persero) di Subang dan Tasikmalaya	17	78.709,55	7	1	4	2	10	78.709,55	2	66.912,50	1	274,02	1	2.273,48	-	2	3.141,99	-	-	4	6.107,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan dan penjualan tahun buku 2011 dan 2012 pada PT Pinda (Persero)	22	11.150,34	15	1	7	7	7	11.150,34	-	-	2	9.280,00	3	1.870,34	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			USD 876,16	-	-	-	-	-	USD 876,16	-	-	-	USD 204,36	-	USD 432,80	-	-	USD 232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan dan penjualan tahun buku 2011 dan 2012 pada PT Garam (Persero)	16	11.735,77	9	1	3	5	7	11.735,77	-	-	1	11.735,77	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kegiatan Pendapatn, Pengelolaan Biaya, Dan Pengendalian Investasi pada Perum Prasarana Perikanan Samudera Tahun 2012 dan Pemeriksaan Pengalihan Aset Kepada Perum Aset Kepulauan Perum Perikanan Indonesia Tahun 2013 Di Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur	22	4.735,81	13	2	8	3	9	4.735,81	2	2.180,55	1	276,54	3	826,86	2	-	-	-	-	1	1.451,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengelolaan Pendapatn, Pengelolaan Biaya, Dan Aktivitas Investasi Pada PT Inhutani I (Persero) Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Maret 2013) Di Jakarta, Balikpapan dan Tarakan	12	30.616,68	5	1	1	3	7	30.616,68	1	25,29	2	29.417,35	3	900,02	-	-	-	-	-	1	276,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			USD 101,26	-	-	-	-	-	USD 101,26	-	-	-	-	-	USD 101,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 26

No	Entitas	Total			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Perusahaan atas Temuan yang Telah Dibridokan/temuan selama Proses Pemeriksaan				
		Jml Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Total Kelemahan SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Ke Rugian Perusahaan	Potensi Rugian perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	Ketidakhormatan	Ketidakefisienan	Ketidakefektifan	Kerugian Perusahaan	Potensi Kerugian Perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
13	Penerapan GCG, Penjualan Investasi Biaya dan Penyelidikan Utang ROI pada PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III 2013)	41	1.408.765,31	16	3	11	2	25	1.408.765,31	2	116,59	1	1.272.416,98	12	3.950,11	2	1	176,63	4	128.083,46	3	4.021,54	-	-	-
14	Pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi dan pengelolaan PKEL pada Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	32	10.024,05	11	-	4	7	21	10.024,05	5	2.045,01	2	4.755,30	3	2.622,44	7	3	598,30	-	-	1	-	-	-	-
	Jumlah	330	1.673.399,93	160	18	77	65	170	1.673.399,93	20	116.845,79	23	1.337.283,40	43	40.601,32	41	18	32.135,98	5	128.083,46	20	18.449,98	367,68	129,60	157,20
			USD 1.848,80						USD 1.848,80		USD 16,00		USD 298,20		USD 1.265,05			USD 269,55							
			SAR 966,42						SAR 966,42		SAR 522,26		SAR 522,26		SAR 444,16			SAR 444,16							SAR 522,26
			SGD 210,53						SGD 210,53				SGD 210,53		56.021,01			36.865,05		128.083,46		18.449,98	367,68	1.826,96	157,20
	Jumlah Rupiah Total		1.701.102,81						1.701.102,81		117.040,81		1.344.642,50		56.021,01			36.865,05		128.083,46		18.449,98	367,68	1.826,96	157,20

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	18	11
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	10	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	77	48
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	16	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	33	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	21	
6	Lain-lain	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	65	41
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	46	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	19	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		160	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pendapatan, Biaya dan Investasi BUMN**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Perusahaan	20	116.845,79
			USD 16.00
	Jumlah Rupiah Total		117.040,81
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	4	757,35
			USD 16.00
	Jumlah Rupiah		952,37
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	892,64
3	Penggunaan uang /barang untuk kepentingan pribadi	1	191,32
4	Pembayaran honorarium ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	1	253,54
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	8	45.488,34
6	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	616,28
7	Lain-lain	2	68.646,32
II	Potensi Kerugian Perusahaan	23	1.337.283,40
			USD 298.20
			SAR 522.26
			SGD 210.53
	Jumlah Rupiah Total		1.344.642,50
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	7	1.401,90
			USD 93.84
			SAR 522.26
	Jumlah Rupiah		4.243,07
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	165,28
3	Aset dikuasai pihak lain	1	276,54
4	Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	1	335,52
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	12	1.333.933,84
			USD 204.36
			SGD 210.53
	Jumlah Rupiah		1.338.451,76
6	Lain-lain	1	1.170,32
III	Kekurangan Penerimaan	43	40.601,32
			USD 1,265.05
	Jumlah Rupiah Total		56.021,01
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	15	7.454,63
			USD 429.35
	Jumlah Rupiah		12.687,98

Halaman 2 - Lampiran 28

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
2	Penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	24	31.282,37
			USD 835.70
	Jumlah Rupiah		41.468,72
3	Penggunaan langsung Penerimaan Negara	4	1.864,32
IV	Kelemahan Administrasi	41	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	2	
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	5	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	14	
4	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	4	
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	11	
7	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	2	
8	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	
9	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	
V	Ketidakhematan	18	32.135,98
			USD 269.55
			SGD 444.16
	Jumlah Total Rupiah		36.865,05
1	pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	1	-
			USD 232.00
	Jumlah Rupiah		2.827,85
2	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	3.141,99
3	Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga	16	28.993,99
			USD 37.55
			SAR 444.16
	Jumlah Rupiah		30.895,22
VI	Ketidakefisienan	5	128.083,46
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	5	128.083,46
VII	Ketidakefektifan	20	18.449,98
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	2	1.704,96
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	3	7.559,42
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	1	-

Halaman 3 - Lampiran 28

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	5	6.593,00
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	8	2.592,60
6	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		170	1.673.399,93
			USD 1,848.80
			SAR 966.42
			SGD 210.53
Jumlah Rupiah Total			1.701.102,81

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 1 - Lampiran 29

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Pengelolaan Kawasan Industri

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Total			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan							
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Ke Rugian Perusahaan		Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidaktepatan	
											Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan	Jml kasus	Nilai temuan
1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2011, 2012, Dan 2013 (Semester I) pada PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) di Batam.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1		8	20,83	6	-	4	2	2	20,83	-	-	-	-	1	20,83	1	-	-	-	
2	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2011, 2012, Dan 2013 (Semester I) pada PT Kawasan Industri Medan (Persero) di Medan.	10	246,35	5	-	4	1	5	246,35	-	-	-	-	2	246,35	3	-	-	-	
3	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Dan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2011, 2012, Dan 2013 (Semester I) pada PT Kawasan Industri Makassar (Persero) di Makassar	14	7.925,61	8	1	6	1	6	7.925,61	1	86,92	2	3.511,47	2	4.327,22	1	-	-	-	
4	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2011, 2012, Dan 2013 (Semester I) pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) di Semarang	10	638,50	4	-	1	3	6	638,50	4	44,74	-	-	-	-	-	2	593,76	-	
5	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2011, 2012, Dan 2013 (Semester I) pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) di Surabaya	5	1.527,88	1	-	1	-	4	1.527,88	1	393,57	1	698,32	2	435,99	-	-	-	-	
6	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2011, 2012, Dan 2013 (Semester I) pada PT Jakarta Industrial Estate PuloGadung (Persero) di Jakarta	19	8.140,51	11	2	6	3	8	8.140,51	2	3.980,22	-	-	3	4.160,29	3	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 29

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																
		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Kerugian Perusahaan				Potensi Kerugian Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidaktehamatan		
		Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Buku 2011, 2012, Dan 2013 (Semester I) pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) di Jakarta	16	1.928,94	11	-	9	2	5	1.928,94	1	50,95	1	1.877,99	1	-	2	-	-
			USD 26.73												USD 26.73			
	Total Temuan	82	20.428,62	46	3	31	12	36	20.428,62	9	4.556,40	4	6.087,78	11	9.190,68	10	2	593,76
	Jumlah Rupiah	82	20.754,43	46	3	31	12	36	20.754,43	9	4.556,40	4	6.087,78	11	9.516,49	10	2	593,76

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 30

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan Kawasan Industri**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	7
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	31	67
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	21	
4	Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	7	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	12	26
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		46	100

Lampiran 31

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Pengelolaan Kawasan Industri**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Perusahaan	9	4.556,40
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	94,34
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	4	88,27
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	2	452,85
4	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/perusahaan	1	3.920,94
II	Potensi Kerugian Perusahaan	4	6.087,78
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4	6.087,78
III	Kekurangan Penerimaan	11	9.190,68
			USD 26.73
Jumlah Rupiah			9.516,49
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	2	214,75
2	Penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ perusahaan	9	8.975,93
			USD 26.73
Jumlah Rupiah			9.301,74
IV	Kelemahan Administrasi	10	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	4	-
2	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	3	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/ Daerah/Perusahaan	1	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	-
V	Ketidakhematan	2	593,76
1	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	2	593,76
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		36	20.428,62
			USD 26.73
Jumlah rupiah			20.754,43

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 32

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Kegiatan Pemupukan

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

NO	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan								
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		
								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kegiatan Pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan instansi terkait lainnya di Medan	15	38.685,38	7	-	5	2	8	38.685,38	1	4.042,28	2	2	24.120,01	2	10.523,09	1	-
2	Kegiatan Pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dan instansi terkait lainnya di Medan	14	20.145,76	5	1	1	3	9	20.145,76	2	1.707,77	1	2	9.137,66	-	-	4	9.300,33
3	Kegiatan Pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. semester I) Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) di Pekanbaru	9	2.535,82	4	-	1	3	5	2.535,82	-	-	2	2	2.535,82	-	-	1	-
4	Kegiatan Pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d. Semester I) pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan instansi terkait lainnya di Bandar Lampung, Palembang, dan Bengkulu	12	41.331,77	3	1	-	2	9	41.331,77	-	-	1	3	19.661,55	1	18.183,05	4	3.487,17
Total Temuan		50	102.698,73	19	2	7	10	31	102.698,73	3	5.750,05	6	9	55.455,04	3	28.706,14	10	12.787,50
			USD 17,74						USD 17,74									USD 17,74
Jumlah Rupiah		50	102.914,96	19	2	7	10	31	102.914,96	3	5.750,05	6	9	55.455,04	3	28.706,14	10	13.003,73

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 33

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Kegiatan Pemupukan**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	10
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	7	37
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	10	53
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	8	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		19	100

Lampiran 34

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDTT atas Kegiatan Pemupukan**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kekurangan Penerimaan	3	5.750,05
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	1	233,78
2	Penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/ perusahaan	2	5.516,27
II	Kelemahan Administrasi	6	-
1	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara/perusahaan)	5	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
IV	Ketidakehematan	9	55.455,04
1	Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan	2	22.875,13
2	Pemborosan keuangan negara/perusahaan atau kemahalan harga	7	32.579,91
V	Ketidakefisienan	3	28.706,14
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	2	10.523,09
2	Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya	1	18.183,05
VI	Ketidakefektifan	10	12.787,50
			USD 17.74
Jumlah Rupiah			13.003,73
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	1.523,33
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	3	9.300,33
Jumlah Rupiah			9.516,56
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	5	1.963,84
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		31	102.698,73
			USD 17.74
Jumlah rupiah			102.914,96

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 35

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan menurut Entitas
Pada PDDT atas Program Bina Lingkungan BUMN Peduli

(nilai dalam juta rupiah)

No	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Mengakibatkan				
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kelemahan Administrasi	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program Kegiatan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Peduli Pada Kementerian BUMN dan BUMN - BUMN Pelaksanaan Tahun 2012 Dan Semester I 2013 Di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Ketapang.	13	163.949,53	8	2	4	2	5	163.949,53	3	2	163.949,53
	Jumlah	13	163.949,53	8	2	4	2	5	163.949,53	3	2	163.949,53

Lampiran 36

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Program Bina Lingkungan BUMN Peduli**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2	25
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1	-
2	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	4	50
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	4	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	25
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		8	100

Lampiran 37

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Program Bina Lingkungan BUMN Peduli**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Total	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kelemahan Administrasi	3	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	1	
2	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
II	Ketidakefektifan	2	163.949,53
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	163.949,53
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		5	163.949,53

Lampiran 38

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Pengelolaan BUMN Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Kerugian Perusahaan						Kelemahan Administrasi		Kedakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Pengelolaan Dana Pensiun Tahun Anggaran 2011, 2012 Dan Semester I 2013 Pada Dana Pensiun Pertamina dan Instansi Terkait Lainnya.	10	779,02	7	-	3	4	3	779,02	-	-	2	779,02	-	-	-	1	-	-	-
2	Pelaksanaan Penggabungan Usaha Dan Program Restrukturisasi Pada PT Balai Pustaka (Persero) Di Jakarta	7	77.021,58	2	-	2	-	5	77.021,58	1	533,49	1	75.635,40	1	852,69	-	-	2	-	-
3	Pengelolaan Kredit, Bisnis Kartu, Dan Beban Operasional Lainnya Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tahun Buku 2012 Dan 2013 (Semester I) Di Jakarta, Makassar, Palembang Dan Bandung	36	328.626,67	21	-	3	18	15	328.626,67	4	155.862,54	3	172.764,13	-	-	-	6	2	-	-
	Jumlah	53	406.427,27	30	-	8	22	23	406.427,27	5	156.396,03	6	249.178,55	1	852,69	7	4	-	-	

Lampiran 39

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	-
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	-
2	Entitas terlambat menyampaikan laporan	-	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	8	27
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	-
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	2	-
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	3	-
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	22	73
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	5	-
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	17	-
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		30	100

Lampiran 40

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Pengelolaan BUMN Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Total	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Perusahaan	5	156.396,03
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	1,65
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	155.621,90
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	88,99
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1	150,00
5	Lain-lain	1	533,49
II	Potensi Kerugian Perusahaan	6	249.178,55
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	4	248.399,53
2	Lain-lain	2	779,02
III	Kekurangan Penerimaan	1	852,69
1	Penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan	1	852,69
IV	Kelemahan Administrasi	7	-
1	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	6	-
V	Ketidakefektifan	4	-
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	-
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		23	406.427,27

Halaman 1 - Lampiran 41

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Operasional PDAM

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		
									Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Prov. Aceh																						
1	Operasional PDAM Tirta Nega dan 2012 dan 2013 Kab Aceh Selatan	17	174,73	9	-	6	3	8	174,73	1	19,10	-	-	1	13,61	1	1	41,44	-	-	4	100,58	
2	Prov. Sumatera Barat																						
2	Operasional PDAM TB 2012 dan 2013 pada PDAM Kota Payakumbuh	12	125,24	5	-	4	1	7	125,24	5	125,24	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	Prov. Sumatera Selatan																						
3	Operasional PDAM Lematang Enim Kabupaten Muara Enim TB 2012 dan 2013 (s.d. Semester I)	21	6.113,82	16	3	8	5	5	6.113,82	-	-	1	5.225,43	2	111,87	-	2	776,52	-	-	-	-	-
4	Operasional PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu TB 2012 dan 2013 (s.d. Semester I)	17	1.879,85	12	2	6	4	5	1.879,85	-	-	1	1.879,85	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
4	Prov. Lampung																						
5	Operasional PDAM Way Irang Kabupaten Lampung Tengah dan Pembagian Aset serta Utang dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Kota Metro	4	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
5	Prov. Jawa Tengah																						
6	Operasional PDAM Tirta Bening Kabupaten Pati Tahun 2012 dan 2013	13	8.077,47	6	1	4	1	7	8.077,47	-	-	-	-	-	-	6	1	8.077,47	-	-	-	-	

Halaman 2 - Lampiran 41

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																					
		TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Kelemahan Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan					
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai	Nilai	Nilai
1	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prov. Bali																							
7	1		8		5		4	1	3								1						
Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)																							
Prov. Nusa Tenggara Barat																							
8	1		8	232,79	4		3	1	4	232,79	1	232,79											
Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Mataram Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)																							
Prov. Nusa Tenggara Timur																							
9	1		16	113,02	11	1	7	3	5	113,02	2	113,02											
Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kupang Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)																							
Prov. Kalimantan Barat																							
10	1		13	6.125,10	6	2	4		7	6.125,10					1	32,23	1	1	6.092,87				
Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)																							
Prov. Kalimantan Tengah																							
11	1		11	632,31	8	3	2	3	3	632,31			1	632,31			1	1					
Operasional PDAM Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 s.d. 2013 (Semester I)																							
12	2		10	123,97	6		2	4	4	123,97					1	123,97	1						
Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)																							

Halaman 3 - Lampiran 41

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																									
		TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Kerugian Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan			
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
11	Prov. Kalimantan Selatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar Kabupaten Banjar Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	10		7	1	4	2	3								1											
13																											
14	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tapin Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	14		10	2	2	6	4								1											
15	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Banjarmasin Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	5		3		3		2																			
12	Prov. Kalimantan Timur																										
	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	19	204.051,95	14	3	5	6	5	204.051,95								1	10.391,45									199.660,50
16																											
17	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Paser Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	13	102,82	8		5	3	5	102,82	1	102,82					2											
18	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	6		4		4		2																			
19	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	20	6.156,14	11	1	4	6	9	6.156,14	2	358,68				1	5.081,60	1	715,86									

Halaman 4 - Lampiran 41

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														
		Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	
								Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
13	Prov. Sulawesi Utara																						
20	Pengelolaan PT Air Manado di Kota Manado Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	8	3.050,00	5	-	5	-	3	3.050,00	-	-	-	-	1	3.050,00	-	-	-	-	-	-	2	-
14	Prov. Sulawesi Selatan																						
21	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	15	334,01	8	-	2	6	7	334,01	3	334,01	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
15	Prov. Sulawesi Tenggara																						
22	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kendari Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	18	-	13	3	4	6	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-
16	Prov. Gorontalo																						
23	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	6	-	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
17	Prov. Sulawesi Barat																						
24	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamuju Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	10	-	7	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
18	Prov. Maluku																						
25	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Arbon Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	12	848,45	8	-	5	3	4	848,45	-	-	-	-	1	848,45	1	-	-	-	-	-	2	-

Halaman 5 - Lampiran 41

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																							
		TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				Kerugian Daerah/Perusahaan		Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
19	Prov. Maluku Utara																								
	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ternate Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	8	51,98	4	-	2	2	4	51,98	1	51,98	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
20	Prov. Papua																								
	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Jayapura Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	12	-	9	1	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
21	Prov. Papua Barat																								
	Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Marokvari Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 (Semester I)	19	1,30	12	2	5	5	7	1,30	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1,30	-	-	4	-	-	
28	Total	345	238.194,95	215	27	110	78	130	238.194,95	16	1.337,64	3	7.737,59	8	9.261,73	36	10	26.096,91	1	-	56	193.761,08			

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Operasional PDAM**

No	Kelompok	Total	
		Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	27	13
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	19	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	8	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	110	51
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	8	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	4	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	51	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	45	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	78	36
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	51	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	25	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		215	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Operasional PDAM**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Total	
		Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	16	1.337,64
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	16,20
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	97,69
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	4	161,17
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	9	1.035,53
5	Lain-lain	1	27,05
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	3	7.737,59
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3	7.737,59
III	Kekurangan Penerimaan	8	9.261,73
1	Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan	8	9.261,73
IV	Kelemahan Administrasi	36	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	-
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Perusahaan	3	-
4	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	28	-
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-
V	Ketidakhematan	10	26.096,91
1	Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar	1	-
2	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	9	26.096,91
VI	Ketidakefisienan	1	-
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	1	-
VII	Ketidakefektifan	56	193.761,08
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	100,58
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	2	193.660,50
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	46	-
5	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	6	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		130	238.194,95

Lampiran 44

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pada PDTT atas Operasional BPD/BPR

(nilai dalam juta rupiah)

No	Entitas	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidapatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan												Nilai Peryerahan Aset atau Penyerahan ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Selama Proses Pemeriksaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jumlah Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai		Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
1	Operasional PT BPD Jambi	14	1.578,52	7	-	5	2	7	1.578,52	-	-	2	1.578,52	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Operasional Bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	25	4.145,33	12	-	2	10	13	4.145,33	2	49,71	1	1.100,00	4	2.980,61	4	1	15,01	1	1	49,71	1	11,51	
3	Operasional PT Bank Lampung	14	-	9	1	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
4	Operasional PD BPR Bank Daerah Gunungkidul	11	49,31	6	1	1	4	5	49,31	1	23,12	-	-	1	26,19	3	-	-	-	-	-	-	-	
5	Operasional PT BPD Jawa Timur, Tbk.	7	24.674,70	-	-	-	-	7	24.674,70	1	34,99	3	18.287,18	2	6.352,53	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Operasional BPR Bank Pasar Bangli	6	-	3	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
7	Operasional BPR Werdhi Sedana	12	184,33	6	1	2	6	6	184,33	-	-	2	184,33	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	
8	Operasional BPR Lombok Tengah	11	9.374,90	5	1	2	2	6	9.374,90	2	1.700,49	1	6.606,53	-	-	1	1	1.067,88	1	-	-	-	-	
9	Operasional BPR Lombok Timur	26	1.826,57	5	2	2	3	21	1.826,57	4	795,70	2	432,87	-	-	9	4	598,00	2	-	-	-	-	
10	Operasional BPR Sumbawa	11	14.371,62	3	1	-	2	8	14.371,62	1	127,58	2	14.065,08	-	-	3	1	180,96	1	-	-	-	-	
11	Operasional BPR Kota Pontianak	12	320,18	2	-	1	1	10	320,18	2	157,11	1	113,37	-	-	4	1	49,70	2	-	-	-	-	
12	Operasional BPR Marungting Sejahtera	12	187,79	6	-	1	5	6	187,79	1	19,15	-	-	-	-	2	1	78,64	2	90,00	-	-		
13	Operasional BPR Muara Uya	9	472,41	2	-	-	2	7	472,41	1	238,94	-	-	-	-	3	1	233,47	2	-	-	-		
14	Operasional BPR Tapin Selatan	13	1.090,93	3	-	2	1	10	1.090,93	3	188,62	1	902,31	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	
15	Operasional BPR Kota Samarinda	9	1.713,17	4	-	-	4	5	1.713,17	1	432,89	2	1.280,28	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
16	Operasional BPR Pesisir Tanadoang	6	-	4	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
17	Operasional BPR Bahteramas Kota Kendari	15	2.411,35	3	-	-	3	12	2.411,35	4	433,70	1	1.319,62	-	-	4	2	658,03	1	-	-	-	-	
	Jumlah	213	62.401,11	80	4	21	55	133	62.401,11	23	4.202,00	18	45.868,09	7	9.359,33	53	12	2.881,69	20	90,00	200,12	14,24	14,24	

Lampiran 45

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Operasional BPD/BPR**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	5
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	3	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	21	26
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	6	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	8	
5	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	55	69
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	19	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	35	
3	Lain-lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		80	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
Pada PDTT atas Operasional BPD/BPR**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	23	4.202,00
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	104,75
2	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	25,94
3	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	341,00
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	23,77
5	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2	44,79
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	13	1.929,04
7	Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan	1	1.592,49
8	Lain-lain	1	140,22
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	18	45.868,09
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	10	22.270,00
2	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	5	22.191,16
3	Lain-lain	3	1.406,93
III	Kekurangan Penerimaan	7	9.359,33
1	Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/ perusahaan	3	6.378,72
2	Lain-lain	4	2.980,61
IV	Kelemahan Administrasi	53	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	7	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah/perusahaan)	5	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan	1	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	35	
6	Penyetoran penerimaan perusahaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2	
7	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	2	
V	Ketidakhematan	12	2.881,69
1	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	12	2.881,69
VI	Ketidakefektifan	20	90,00
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	90,00
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
3	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2	-
4	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	16	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		133	62.401,11

Lampiran 47

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PD TT atas Operasional PD Pasar

NO	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan												Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke Kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti selama proses pemeriksaan					
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus		Jml Kasus	Jml Kasus	Nilai Temuan	Nilai Temuan	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	24	
PD Pasar																									
1	PD Pasar Kota Medan	16	1.129,18	8	3	3	2	8	1.129,18	2	148,95	-	-	3	980,23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	148,95
2	PD Pasar Kabupaten Badung	8	-	3	-	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
3	PD Pasar Kabupaten Buleleng	8	122,72	3	1	2	-	5	122,72	-	-	-	-	1	24,15	3	-	-	1	98,57	-	-	-	-	
4	PD Pasar Kota Denpasar	11	-	6	-	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	
5	PD Pasar Selaparang	6	-	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
6	PD Pasar Kota Kupang	15	689,42	6	1	3	2	9	689,42	2	44,60	2	63,24	1	581,58	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	PD Pasar Bauntung Batuah	10	927,36	3	1	2	-	7	927,36	-	-	-	-	2	927,36	4	-	-	-	-	1	-	-	-	
8	PD Pasar Kota Manado	19	1.841,45	6	-	4	2	13	1.841,45	1	356,06	-	-	3	1.326,39	7	1	159,00	-	-	1	-	-	-	
9	PD Pasar Makassar Raya	7	506,24	1	-	1	-	6	506,24	-	-	-	-	1	25,45	3	1	480,79	-	-	1	-	-	-	
10	PD Pasar Kota Kendari	8	1.029,02	2	-	2	-	6	1.029,02	-	-	-	-	1	637,41	4	-	-	1	391,61	-	-	-	-	
	Jumlah	108	6.245,39	39	7	23	9	69	6.245,39	5	549,61	2	63,24	12	4.502,57	40	2	639,79	2	490,18	6	-	-	148,95	

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Operasional PD Pasar**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	6	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	1	
II Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara dan Hibah tidak sesuai ketentuan	3	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	3	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN	2	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	10	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	2	
III Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	7	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		39	100

Lampiran 49

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Operasional PD Pasar**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	5	549,61
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	1	50,16
2	Pemahalan harga (Mark up)	1	98,79
3	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	44,60
4	Lain-lain	1	356,06
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	2	63,24
1	Aset dikuasai pihak lain	1	-
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	63,24
III	Kekurangan Penerimaan	12	4.502,57
1	Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah atau perusahaan	12	4.502,57
IV	Kelemahan Administrasi	40	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara	5	-
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	27	-
4	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	2	-
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	4	-
V	Ketidakhematan	2	639,79
1	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	2	639,79
VI	Ketidakefisienan	2	490,18
1	Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya	2	490,18
VII	Ketidakefektifan	6	-
1	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
2	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	1	-
3	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	2	-
4	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		69	6.245,39

Lampiran 50

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pada PDDT atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan

NO	Entitas	TOTAL		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas daerah/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjut selama proses pemeriksaan
		Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	Kerugian Daerah/Perusahaan	Kerugian Penerimaan	Kelemahan Administrasi	Ketidaktepatan	Ketidaktepatan	Ketidaktepatan	Jml Kasus	Nilai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
BUMD Pertambangan																								
1	1	PD Baromarta	21	46.345,94	7	1	4	2	14	46.345,94	7	1	9.277,15	1	3.611,89	4	1	2.607,39	-	-	-			
				USD 3.535,20					USD 3.535,20									USD 63,96						
2	2	PD Aneka Usaha Kolaka	22	15.089,04	10	1	5	4	12	15.089,04	1	1	600,00	1	14.276,66	9	-	-	-	-	-			
3	3	Baratala Tuntung Pandang	12	494,74	6	1	4	1	6	494,74	-	-	-	-	1	494,74	5	-	-	-	-			
4	4	PD Benuo Taka	13	62,24	6	1	5	-	7	62,24	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-			
5	5	PD Danum Belum	12	370,83	3	-	2	1	9	370,83	-	1	8,00	3	247,34	3	1	95,17	1	20,32	-			
6	6	PD Bara Kalim Sejahtera	8	605,45	2	-	1	1	6	605,45	2	-	-	1	410,00	3	-	-	-	-	-			
7	7	PD Bangun Banua	8	544,82	1	-	-	1	7	544,82	2	-	-	2	428,48	1	1	33,94	1	-	30,00			
				USD 179,20					USD 179,20															
8	8	PD Banggai Energi Utama	3	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-			
9	9	PD Banggai Sakti	3	200,00	1	-	1	-	2	200,00	-	-	-	1	200,00	1	-	-	-	-	-			
		Total	102	65.713,06	37	4	23	10	65	65.713,06	13	3	9.885,15	10	19.669,11	34	3	2.736,50	2	20,32	30,00			
		USD		USD 3.714,40					USD 3.714,40						USD 179,20			USD 63,96						
		Jumlah Rupiah	102	106.987,88	37	4	23	10	65	106.987,88	13	3	9.885,15	10	21.853,38	34	3	3.516,11	2	20,32	30,00			

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Lampiran 51

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	4	11
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4	-
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	23	62
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	12	
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	2	
3	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	5	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	10	27
1	Entitas tidak memiliki SOP formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan	6	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	3	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		37	100

Lampiran 52

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDTT atas Operasional BUMD Bidang Pertambangan**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	13	31.401,98
			USD 3,471.24
	Jumlah Rupiah		73.712,92
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	4	23.462,35
			USD 3,471.24
	Jumlah Rupiah		65.773,29
2	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	1	75,00
3	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	387,09
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	7.477,54
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	3	9.885,15
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	3	9.885,15
III	Kekurangan Penerimaan	10	19.669,11
			USD 179.20
	Jumlah Rupiah		21.853,38
1	Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah/perusahaan	10	19.669,11
			USD 179.20
	Jumlah Rupiah		21.853,38
IV	Kelemahan Administrasi	34	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	3	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	27	-
3	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
4	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	2	-
5	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1	-
V	Ketidakhematan	3	2.736,50
			USD 63.96
			3.516,11
1	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan atau kemahalan harga	3	2.736,50
			USD 63.96
	Jumlah Rupiah		3.516,11
VI	Ketidakefektifan	2	20,32
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	1	20,32
2	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai	1	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		65	63.713,06
			USD 3,714.40
	Jumlah Rupiah	65	108.987,88

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 1 - Lampiran 53

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDDT atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang telah Ditindaklanjuti Selama Proses Pemeriksaan									
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Total Kelemahan SPI	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Jml Kasus	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Jml Kasus	Kelemahan Pengendalian Intern	Jml Kasus	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Kasus	Total Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jml Kasus	Kerugian daerah/perusahaan	Jml Kasus	Potensi Kerugian daerah/perusahaan	Jml Kasus	Kekurangan Penerimaan	Jml Kasus	Kelemahan Administrasi	Jml Kasus	Ketidakhematan	Jml Kasus	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai
1	PT Pembangunan Investasi Riau Provinsi Riau	3	4	5	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya Kota Palembang	23	-	19	3	8	8	8	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Perusahaan Daerah Wahana Raharja Provinsi Lampung	27	2.745,11	12	1	9	2	2	2	15	2.745,11	2	261,05	1	23,46	2	2.460,60	9	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
3	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. dan Anak Perusahaan Provinsi DKI Jakarta	16	2.031,08	5	1	2	2	2	2	11	2.031,08	1	1.640,09	-	-	2	110,73	6	2	280,26	-	-	-	-	-	-	-	-	23,11
4	PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan Provinsi DKI Jakarta	10	3.977,89	5	1	3	1	1	1	5	3.977,89	1	183,24	-	-	4	3.794,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,44
5	PT Anindya Mitra Internasional Provinsi Yogyakarta	17	20.976,43	10	-	5	5	5	5	7	20.976,43	-	-	-	-	4	20.976,43	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah	22	904,67	9	3	3	3	3	3	13	904,67	3	140,36	3	756,51	1	7,80	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Operasional PD Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	27	920,35	10	4	2	4	4	4	17	920,35	-	-	6	498,09	8	422,26	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Operasional PD Taru Martani Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	26	1.705,59	14	7	5	2	2	2	12	1.705,59	-	-	2	22,23	1	45,42	6	-	-	-	-	-	-	-	3	1.637,94	-	-

Halaman 2 - Lampiran 53

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern										Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi										Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Selama Proses Pemeriksaan	
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Total Kelemahan SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Kerugian daerah/perusahaan	Potensi Kerugian daerah/perusahaan	Kekurangan Penerimaan	Kelemahan Administrasi	Ketidakhormatan	Ketidakefektifan	Jml Kasus	Nilai								
1	Operasional PT Perogas Jati Utama Provinsi Jawa Timur	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
9	Operasional PT Perogas Jati Utama Provinsi Jawa Timur	9	29.158,59	6	1	2	3	3	29.158,59	1	29.133,59	1	25,00	-	-	1	-	-	-	-	-				
10	PT Jankrida Bali Mandara Provinsi Bali	4	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
11	PD Jembrana Kabupaten Jembrana	8	-	6	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-				
12	PT Flobamor Provinsi NTT	17	694,79	11	2	7	2	6	694,79	-	-	2	534,01	1	160,78	2	1	-	-	-	-				
13	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	11	3.929,28	4	-	3	1	7	3.929,28	-	-	4	3.575,99	-	-	1	2	353,29	-	-	-				
14	PD Katingan Jaya Mandiri di Kasongan Provinsi Kalimantan Tengah	14	1.288,57	8	3	-	5	6	1.288,57	2	368,52	2	632,75	1	287,30	1	-	-	-	-	-				
15	PD Banama Tingang Makmur Provinsi Kalimantan Tengah	7	112,27	1	-	1	-	6	112,27	-	-	-	-	2	112,27	4	-	-	-	-	-				
16	PD Pengelola Air Limbah Kota Banjarmasin	11	1.417,10	5	-	4	1	6	1.417,10	3	903,15	1	271,60	-	-	1	-	-	1	242,35	-				
17	PT Indo Pusaka Berau Kabupaten Berau	4	800,52	1	-	1	-	3	800,52	-	-	-	-	1	800,52	2	-	-	-	-	-				
18	PT Bontang Migas dan Energi Kota Bontang	8	22,44	6	1	2	3	2	22,44	-	-	-	-	-	-	1	1	22,44	-	-	-				
19	PD Kota Tarakan	14	243,59	9	1	4	4	5	243,59	-	-	-	-	2	243,59	3	-	-	-	-	-				
20	PD Pembangunan Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara	9	146,41	3	-	1	2	6	146,41	-	-	-	-	1	146,41	4	-	-	1	-	-				

Halaman 3 - Lampiran 53

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								Ketidaktahuan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan								Nilai Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Daerah atas Temuan yang Telah Ditindaklanjuti Selama Proses Pemeriksaan					
		Jml Kasus	Nilai	Total Kelemahan SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		Total Ketidaktahuan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kelemahan daerah/perusahaan		Potensi Kerugian daerah/perusahaan		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Kedakhematan		Ketidakefektifan		Kekurangan Penerimaan
					Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
21	PT Citra Nuansa Elok Kota Palu	18	1.483,11	9	3	4	2	9	1.483,11	1	208,80	-	-	5	1.274,31	3	-	-	-	-	-	-	-		
22	PD Holding Company Gowa Mandiri Kabupaten Gowa	11	9.962,54	7	2	2	3	4	9.962,54	1	1.058,53	1	7.853,59	1	1.050,42	1	-	-	-	-	-	-	-		
23	PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar	13	625,83	4	1	3	-	9	625,83	1	155,85	-	-	2	10,00	5	1	459,98	-	-	-	-	-		
24	PT Gorontalo Fitrah Mandiri Provinsi Gorontalo	14	2.504,01	6	-	5	1	8	2.504,01	-	-	-	-	2	2.504,01	4	-	-	2	-	-	-	-		
25	PD Panca Karya Provinsi Maluku	13	6.006,47	7	1	3	3	6	6.006,47	-	-	2	4.750,16	2	1.256,31	1	-	-	1	-	1	-	-		
26	PD Irian Bhakti Provinsi Papua	16	2.470,69	8	2	4	2	8	2.470,69	-	-	2	2.303,15	1	167,54	5	-	-	-	-	-	-	-		
27	PT Rakyat Papua Sejahtera Provinsi Papua	11	557,71	7	-	4	3	4	557,71	-	-	-	-	-	-	3	1	557,71	-	-	-	-	-		
28	PT Papua Doberai Mandiri Provinsi Papua Barat	14	1.303,50	5	-	4	1	9	1.303,50	3	1.028,80	2	197,70	1	77,00	3	-	-	-	-	-	-	-		
			USD 62,48						USD 62,48				USD 62,48												
	Jumlah	394	95.988,54	201	39	97	65	193	95.988,54	19	35.081,98	29	21.444,24	44	35.908,35	84	8	1.673,68	9	1.880,29			1.524,55		
	Jumlah Total	394	96.750,11	201	39	97	65	193	96.750,11	19	35.081,98	29	22.205,81	44	35.908,35	84	8	1.673,68	9	1.880,29			1.524,55		

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDPT atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya**

No	Kelompok	Jumlah Kasus	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	39	20
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	24	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	12	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	97	48
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	23	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	20	
4	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	25	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	27	
6	Lain-lain	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	65	32
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	39	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	14	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	7	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	5	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		201	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan
Pada PDDT atas Operasional BUMD Aneka Usaha Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan:			
I	Kerugian Daerah/Perusahaan	19	35.081,98
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	520,99
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	2	29.698,99
3	Pemahalan harga (Mark up)	1	139,65
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1	143,23
5	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	2	705,99
6	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	972,88
7	Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet	1	1.640,09
8	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1	1.058,53
9	Lain-lain	1	201,63
II	Potensi Kerugian Daerah/Perusahaan	29	21.444,24
			USD 62.48
	Jumlah Rupiah		22.205,81
1	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	1	23,46
2	Aset dikuasai pihak lain	7	1.230,84
3	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	2	101,09
4	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	18	20.066,62
			USD 62.48
	Jumlah Rupiah		20.828,19
5	Lain-lain	1	22,23
III	Kekurangan Penerimaan	44	35.908,35
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas daerah atau perusahaan milik daerah	4	3.614,85
2	Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas negara/daerah/perusahaan	40	32.293,50
IV	Kelemahan Administrasi	84	
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1	
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	9	
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	6	
4	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan Milik Daerah	19	
5	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	38	
6	Penyetoran penerimaan negara melebihi batas waktu yang ditentukan	2	
7	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1	
8	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	7	
9	Lain-lain	1	

Halaman 2 - Lampiran 55

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Kelompok	Jumlah Kasus	Nilai
V	Ketidakhematan	8	1.673,68
1	Pemborosan keuangan daerah/perusahaan milik daerah atau kemahalan harga	8	1.673,68
VI	Ketidakefektifan	9	1.880,29
1	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	3	1.880,29
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	5	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		193	95.988,54
			USD 62.48
Jumlah Rupiah		193	96.750,11

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 1 - Lampiran 56

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pada PDTT atas Operasional RSUD

NO	Entitas	Total		Keklemahan Sistem Pengendalian Intern							Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjut selama proses pemeriksaan			
		Jml Kasus	Nilai	Total SPI	Keklemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan dan Pelaporan	Keklemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Keklemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidaktahuan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhormatan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Nilai	Nilai	
								Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai				Jml Kasus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Prov. Bengkulu																								
1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Operasional RSUD M. Yunus TA 2013	14	1.018,49	5	-	1	4	9	1.018,49	3	73,98	-	-	3	640,86	2	-	-	1	303,65	73,99	-	-	-	-
2	Prov. DKI Jakarta																								
2	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 pada RSUD Kojja	4	924,33	-	-	-	-	4	924,33	1	766,15	-	-	2	158,18	1	-	-	-	-	766,15	33,00	-	-	-
3	Prov. Jawa Barat																								
3	Pendapatan dan Biaya RSUD Gunung Jati TA 2012 dan Semester I TA 2013	18	5.984,13	8	2	6	-	10	5.984,13	3	635,12	2	4.703,58	3	177,35	1	-	-	1	468,08	-	-	-	-	-
4	Pendapatan dan Biaya RSUD R. Syamsudin, SH TA 2012 dan Semester I TA 2013	34	2.294,35	19	6	9	4	15	2.294,35	4	290,63	-	-	4	1.283,69	6	-	-	1	720,03	-	-	-	-	-
4	Prov. Jawa Tengah																								
5	Operasional RSUD Pemand Arang Kabupaten Boyolali TA 2012 dan 2013 (s.d. Trwulan III)	18	242,19	10	-	3	7	8	242,19	-	-	-	-	3	242,19	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6	Operasional RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo TA 2012 dan 2013 (s.d. Trwulan III)	32	1.438,29	12	-	4	8	20	1.438,29	10	1.080,19	1	254,86	2	91,40	5	2	11,84	-	-	-	-	-	-	-
5	Prov. Bali																								
7	Operasional RSUD Wangaya Kota Denpasar TA 2012 dan 2013 (s.d. Juni 2013)	6	356,14	1	1	-	-	5	356,14	1	213,13	1	111,49	1	31,52	2	-	-	-	-	213,13	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 56

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Entitas	Total		Ketiadaapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah dibindak lanjut selama proses pemeriksaan									
		Jml Kasus	Nilai	Klemahan Sistem Pengendalian Intern		Total Ketiadaapatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Kelemahan Administrasi		Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian Daerah	Kekurangan Penerimaan		
		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
6	Prov. Nusa Tenggara Barat																						
8	Operasional RSUD pada Pemerintah Daerah Kota Mataram TA 2012 dan 2013 (s.d. 31 Agustus 2013)	17	205,73	10	1	4	5	7	205,73	1	82,52	-	-	3	109,47	1	1	13,74	1	-	-	-	
	Jumlah BLUD	143	12.463,65	65	10	27	28	78	12.463,65	23		4	5.069,93	21	2.734,66	22	3	25,58	5	1.491,76	1.053,27	33,00	
7	Provinsi Lampung																						
9	Operasional RSUD Zainal Abidin Pagar Alam TA 2012 dan Semester I 2013 pada Kabupaten Way Kanan	15	114,50	6	-	1	5	9	114,50	-	-	-	-	-	-	3	1	114,50	5	-	-	-	
	Jumlah Kabupaten/Kota	15	114,50	6	-	1	5	9	114,50	-	-	-	-	-	-	3	1	114,50	5	-	-	-	
	Total RSUD	158	12.578,15	71	10	28	33	87	12.578,15	23	3.141,72	4	5.069,93	21	2.734,66	25	4	140,08	10	1.491,76	1.053,27	33,00	

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
Pada PDTT atas Operasional RSUD**

No	Kelompok	Jumlah Kasus			
		Kabupaten/ Kota	BLUD	Total	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	-	10	10	14
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	-	4	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	-	5	5	
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	-	1	1	
				-	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1	27	28	39
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	3	4	
2	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah/perusahaan milik daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan	-	5	5	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	-	6	6	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD	-	1	1	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	-	7	7	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	5	5	
				-	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	5	28	33	47
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	2	18	20	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	2	8	10	
3	Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern	1	-	1	
4	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	-	1	1	
5	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	-	1	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		6	65	71	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidapatuhan Pada PDTT atas Operasional RSUD

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Kabupaten/Kota		BLUD		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	-	-	23	3.141,72	23	3.141,72
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	-	-	1	29,93	1	29,93
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	-	-	3	138,83	3	138,83
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	2	794,06	2	794,06
4	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	1	2,34	1	2,34
5	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	9	1.726,82	9	1.726,82
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	-	-	1	13,50	1	13,50
7	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	6	436,24	6	436,24
II	Potensi Kerugian Daerah	-	-	4	5.069,93	4	5.069,93
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	-	-	1	254,86	1	254,86
2	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	-	-	2	4.267,92	2	4.267,92
3	Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	-	-	1	547,15	1	547,15
III	Kekurangan Penerimaan	-	-	21	2.734,66	21	2.734,66
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah	-	-	6	412,10	6	412,10
2	Penerimaan negara/daerah/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan	-	-	15	2.322,56	15	2.322,56
IV	Kelemahan Administrasi	3	-	22	-	25	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	-	-	2	-	2	-
2	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	7	-	7	-
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah/perusahaan)	-	-	2	-	2	-
4	Pelaksanaan lelang secara proforma	-	-	1	-	1	-
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah/perusahaan	1	-	2	-	3	-
6	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	2	-	6	-	8	-
7	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	-	-	2	-	2	-
V	Ketidakhematan	1	114,50	3	25,58	4	140,08
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	1	114,50	3	25,58	4	140,08
VI	Ketidakefektifan	5	-	5	1.491,76	10	1.491,76
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	2	771,73	2	771,73
2	Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-
3	Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	-	-	1	720,03	1	720,03
4	Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-	1	-	2	-
6	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	2	-	-	-	2	-
7	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2	-	1	-	3	-
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		9	114,50	78	12.463,65	87	12.578,15

Lampiran 59

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat

(nilai dalam juta rupiah)

NO	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan				Ketidakefektifan		
		Jml Kasus	Nilai Temuan	Total SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		Potensi Kerugian Negara		Kelemahan Administrasi	Jml Kasus	Nilai Temuan
								Jml Kasus	Nilai Temuan	Jml kasus	Nilai temuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kementerian Pekerjaan Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan TA 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum	12	75.411,39	4	-	-	4	8	75.411,39	1	74.840,55	2	5	570,84
2	Kementerian Lingkungan Hidup Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	10	2	-
3	Bank Indonesia Pencetakan dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2012 pada Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya	8	-	8	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	32	75.411,39	12	-	2	10	20	75.411,39	1	74.840,55	12	7	570,84
	Jumlah Kementerian/Lembaga	24	75.411,39	4	-	-	4	20	75.411,39	1	74.840,55	12	7	570,84
	Jumlah Badan Lainnya	8	-	8	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-

Lampiran 60

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
PDTT Lainnya pada Pemerintah Pusat**

No	Kelompok	Jumlah Kasus			
		Kementerian	Badan	Total	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	2	2	17
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	2	2	
II	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	4	6	10	83
1	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	-	4	4	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4	2	6	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		4	8	12	100

Lampiran 61

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
PDDT Lainnya pada Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

No	Kelompok	Kementerian		Badan		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
<i>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan</i>							
I	Potensi Kerugian Negara	1	74.840,55	-	-	1	74.840,55
1	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	1	74.840,55	-	-	1	74.840,55
II	Kelemahan Administrasi	12	-	-	-	12	-
1	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	2	-	-	-	2	-
2	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	10	-	-	-	10	-
III	Ketidakefektifan	7	570,84	-	-	7	570,84
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	4	570,84	-	-	4	570,84
2	Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	1	-	-	-	1	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	2	-	-	-	2	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		20	75.411,39	-	-	20	75.411,39

Lampiran 62

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
PDTT Lainnya pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Objek Pemeriksaan	Total		Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan											
		Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan	Jumlah Kasus	Nilai Temuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Provinsi Sulawesi Utara																		
	Pemeriksaan atas Pengelolaan Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMIDA) Keuangan, SIMIDA Barang Milik Daerah, Dan SIMIDA Gaji pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	11	-	5	3	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	6			
2	Pemeriksaan atas Kepatuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia TA 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kota Tomohon	16	-	12	-	1	11	4	-	-	-	-	-	-	-	4			
2	Provinsi Sulawesi Tengah																		
	Pemeriksaan atas Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan (Dana BOS) Pada Pemerintah Kabupaten Sigi	13	177,92	2	-	-	2	11	177,92	5	54,93	3	1	28,87	2	94,12			
	Jumlah	40	177,92	19	3	1	15	21	177,92	5	54,93	3	1	28,87	12	94,12			
	Jumlah Provinsi	11	-	5	3	-	2	6	-	-	-	-	-	-	6	-			
	Jumlah Kabupaten/kota	29	177,92	14	-	1	13	15	177,92	5	54,93	3	1	28,87	6	94,12			

Lampiran 63

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Kelemahan SPI
PDDT Lainnya pada Pemerintah Daerah**

No.	Kelompok	Jumlah Kasus			
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total	%
<i>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</i>					
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	-	3	16
1	Lain-lain	3	-	3	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	-	1	1	5
1	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	-	1	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	2	13	15	79
1	Entitas tidak memiliki SOP formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan	1	10	11	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1	3	4	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		5	14	19	100

**Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan
PDTT Lainnya pada Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

No.	Kelompok	Provinsi		Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan							
I	Kerugian Daerah	-	-	5	54,93	5	54,93
1	Belanja/Pengadaan Fiktif Lainnya	-	-	1	2,00	1	2,00
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	-	-	1	6,17	1	6,17
3	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	-	-	1	28,41	1	28,41
4	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	-	-	2	18,35	2	18,35
II	Kelemahan Administrasi	-	-	3	-	3	-
1	pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	-	-	3	-	3	-
III	Ketidakhematan	-	-	1	28,87	1	28,87
1	Pemborosan keuangan daerah atau kemahalan harga	-	-	1	28,87	1	28,87
IV	Ketidakefektifan	6	-	6	94,12	12	94,12
1	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	-	-	1	94,12	1	94,12
2	Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	-	-	1	-	1	-
3	Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik, termasuk target penerimaan tidak tercapai	6	-	4	-	10	-
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		6	-	15	177,92	21	177,92

**Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2013**

No	Entitas	Jml	Daftar LHP	
			Objek Pemeriksaan	
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu				
I	Pengelolaan Pendapatan & Pelaksanaan Belanja			
	A	Pendapatan Pusat		
1	Kementerian ESDM	1	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara TA 2011 s.d.2012 pada Kementerian ESDM	
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	
3	Kementerian Pertanian	1	Pelaksanaan Karantina Komoditi Hortikultura Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2013 pada Kementerian Pertanian.	
4	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban PNPB dan Penggunaannya Kembali Tahun 2012 dan Semester I 2013 pada BPN Wilayah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	
5	BP Batam	1	Pendapatan Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Batam	
	Jumlah	5		
	B	Pendapatan Daerah		
6	Provinsi Sumatera Utara	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	
7	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pendapatan Daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) TA 2012 s.d. Semester I 2013 Provinsi Sumatera Selatan	
8	Provinsi Lampung	1	Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah	
9		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur	
10		1	Pendapatan Daerah Kota Metro	
11	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan	
12	Provinsi Bali	1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng	
13		1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem	
14	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Singkawang	
15	Provinsi Sulawesi Tengah	1	PKB dan BBNKB Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2012 dan 2013	
16	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	PAD dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	
17		1	PAD Kabupaten Wakatobi TA 2012 dan Semester I 2013	
18		1	Pengelolaan Izin Usaha dan PNPB sektor Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara	
19		1	Pengelolaan Izin Usaha dan PNPB sektor Pertambangan Kabupaten Kolaka	
20	Provinsi Maluku	1	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Maluku	
	Jumlah	15		
	C	Belanja Pusat		
21	Kementerian Pertahanan	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Komando Pasukan Khusus	
22		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Korps Marinir TNI AL	
23	Kementerian Hukum dan HAM	1	Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2012 s.d. 2013 (Semester I) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Jakarta	
24		1	Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2012 s.d. 2013 (Semester I) pada BPSDM Hukum dan HAM di Jawa Barat	

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
25		1	Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2012 s.d. 2013 (Semester I) pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Tengah di Semarang
26		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan di Palembang
27		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2013 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
28	Kepolisian Republik Indonesia	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang, Modal dan PNBP TA 2009 s.d. 2011 pada Polda Papua
29		1	Pembangunan dan Pengadaan Alat Revitalisasi Simtepol TA 2011 pada Sarpras Polri
30	Kejaksaan RI	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2012 dan 2013 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak
31		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2012 dan 2013 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
32		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2012 dan 2013 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali
33		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2012 dan 2013 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
34		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2012 dan 2013 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo
35		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2012 dan 2013 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu
36	Kementerian Luar Negeri	1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2012 dan 2013 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa di Canada
37		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2012 dan 2013 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Vancouver British Columbia di Canada
38		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Paris di Perancis
39		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2012 dan 2013 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Marseille di Perancis
40		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perlindungan WNI di Australia pada KJRI Melbourne Tahun 2012 dan 2013 di Melbourne
41		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perlindungan WNI di Australia pada KJRI Sydney Tahun 2012 dan 2013 di Sydney
42		1	Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2012 dan 2013 serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perlindungan WNI di Australia Tahun 2012 dan 2013 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth di Australia
43		1	Belanja dan PNBP serta Fungsi Pelayanan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) tahun 2012 dan 2013 pada KJRI Darwin di Australia

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
44	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Kegiatan Pengerukan TA 2011 dan 2012 pada satker-satker Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub dan Instansi Terkait Lainnya di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Samarinda, Pontianak, Benoa dan Tanjung Balai Asahan
45		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 yang Dibiayai dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya, Ditjen Perkeretapihan, Kementerian Perhubungan dan Instansi Terkait Lainnya
46	Kementerian Sekretaris Negara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2011 dan 2012 pada Kementerian Sekretaris Negara
47	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun 2012 sampai dengan Triwulan III Tahun 2013 pada Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta dan Jawa Barat
48		1	Pengelolaan Belanja TA 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta
49	Badan Informasi Geospasial	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun 2012 sampai dengan Semester I Tahun 2013 pada Badan Informasi Geospasial
50	Kementerian Kehutanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2012 dan TA 2013 pada Kementerian Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur
51	Kementrian Pekerjaan Umum	1	Pelaksanaan Pembangunan Waduk Jatigede dan Waduk Jatibarang pada SNVT Pembangunan Waduk Jatigede, SNVT Pembangunan Waduk Jatibarang pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Jawa Barat
52	Kementerian Pertanian	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Pertanian TA 2013
53	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2012 dan 2013
54	Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja IAIN Sunan Ampel Surabaya TA 2010, 2011 dan Semester I 2012
55	Kementerian Dalam Negeri	1	Pelaksanaan Kontrak Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2012 pada Ditjen Dukcapil Kemendagri
56	Kementerian Perdagangan	1	Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan untuk Pembangunan Pasar pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan TA 2012 dan 2013 di DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua
57	Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan IP4T dan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redistol) Tahun 2012 Semester I 2013 Pada BPN Wilayah Provinsi Kalsel dan NTB di Banjarmasin dan Mataram
	Jumlah	37	
D	Belanja Daerah		
58	Provinsi Aceh	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2012 dan 2013
59		1	Belanja Daerah Pada Kabupaten Gayo Lues TA 2012 dan 2013 (s.d. 31 Oktober 2013)
60	Provinsi Sumatera Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Prov. Sumatera Utara Tahun 2013
61		1	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Asahan
62		1	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2012 dan TA 2013 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
63		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2012 dan 2013 (s.d. Juli) pada Pemerintah Kabupaten Langkat
64		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
65		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
66		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2013 pada Pemerintah Kota Medan
67	Provinsi Sumatera Barat	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2013
68		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2013
69		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat TA 2013
70		1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan TA 2013
71	Provinsi Bengkulu	1	Belanja Provinsi Bengkulu TA 2013
72		1	Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2013
73		1	Belanja Daerah Kabupateng Kepahiang TA 2013
74		1	Belanja Daerah Kabupaten Lebong TA 2013
75		1	Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong TA 2013
76		1	Belanja Daerah Kabupaten Seluma TA 2013
77	Provinsi Bangka Belitung	1	Belanja Modal pada Pemkab Bangka Barat TA 2013
78		1	Belanja Modal pada Pemkab Bangka Selatan TA 2013
79		1	Belanja Modal pada Pemkot Pangkalpinang TA 2013
80	Provinsi Jambi	1	Belanja Daerah Provinsi Jambi TA 2013
81		1	Belanja Daerah Kabupaten Bungo TA 2013
82		1	Belanja Daerah Kabupaten Merangin TA 2013
83		1	Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi TA 2013
84		1	Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2013
85		1	Belanja Daerah Kabupaten Tanjabbar TA 2013
86		1	Belanja Daerah Kabupaten Tebo TA 2013
87		1	Pilkada Kabupaten Merangin
88	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
89		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang Terkait Dengan Konstruksi TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa
90		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang Terkait Dengan Konstruksi TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Karimun di Tanjungbalai Karimun
91		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang
92		1	Pengadaan Barang dan Jasa dari Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang Terkait Dengan Konstruksi TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang
93	Provinsi Sumatera Selatan	1	Belanja Daerah Kota Lubuklinggau
94		1	Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
95		1	Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
96		1	Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
97		1	Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
98		1	Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir
99	Provinsi Lampung	1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
100		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat di Liwa
101		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
102		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara di Kota Bumi
103		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Mesuji di Brabasan
104		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Way Kanan di Blambang Umpu
105		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panarangan Jaya
106		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Tanggamus di Kota Agung
107		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
108		1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2012 sampai dengan Triwulan III TA 2013 pada Pemerintahan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
109	Provinsi Banten	1	Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012 Pada KPU dan Panwaslu Kab Tangerang
110	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah TA 2012 s.d. Triwulan III TA 2013 pada Dinas Kelautan dan Pertanian
111		1	Belanja Daerah TA 2011 (Semester II), TA 2012, dan TA 2013 (Semester I) pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
112		1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta TA 2012 dan 2013
113		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan TA 2010 sampai dengan 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainnya
114	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Belanja dan Bansos Kab. Bandung
115		1	Pengelolaan Belanja dan Bansos Kab. Kuningan
116		1	Pengelolaan Bansos Kota Bogor
117		1	Pengelolaan Belanja Kota Cirebon
118	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Tengah
119		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Batang di Batang
120		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas di Purwokerto

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
121		1	Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Cilacap TA 2012 dan 2013 (s.d 31 Agustus) di Cilacap
122		1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Grobogan di Purwodadi
123		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Kudus TA 2012 dan 2013 di Kudus
124		1	Belanja Modal TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal
125		1	Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Magelang TA 2013 (s.d Agustus) di Kota Mungkid
126		1	Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Temanggung TA 2013 (s.d Agustus) di Temanggung
127		1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
128		1	Belanja Modal TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi
129		1	Belanja Infrastruktur TA 2013 pada Pemerintah Kota Magelang di Magelang
130	Provinsi DI Yogyakarta	1	Belanja pada Pemerintah Kab. Bantul
131	Provinsi Jawa Timur	1	Belanja Infrastruktur Kab. Bojonegoro
132		1	Belanja Infrastruktur Kab. Ngawi
133		1	Bansos Kab. Malang
134		1	Belanja Infrastruktur Kab. Situbondo
135		1	Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Kusus-kursus Singkat Kota Surabaya
136		1	Belanja Infrastruktur Kota Batu
137		1	Belanja Infrastruktur Kota Madiun
138		1	Belanja Infrastruktur Kota Pasuruan
139	Provinsi Kalimantan Barat	1	Belanja Daerah Kab. Bengkayang TA 2013
140		1	Belanja Daerah Kab. Landak TA 2013
141		1	Belanja Daerah Kab. Pontianak TA 2013
142	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2013 pada Pemkab Lamandau
143		1	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2013 pada Pemkab Murung Raya
144		1	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2013 pada Pemkab Sukamara
145	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Belanja Daerah Kab. Barito Kuala TA 2012 dan 2013
146		1	Belanja Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan TA 2012 dan 2013
147		1	Belanja Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah TA 2012 dan 2013
148		1	Belanja Daerah Kab. Tanah Bumbu TA 2012 dan 2013
149		1	Belanja Daerah Kota Banjarbaru TA 2012 dan 2013
150	Provinsi Bali	1	Belanja Penyelenggaraan Pilkada Prov. Bali Tahun 2013 pada KPU dan Panwaslu Prov. Bali
151		1	Belanja Daerah Kab. Badung TA 2012 dan 2013
152	Provinsi NTB	1	Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2012 dan TA 2013 (s.d. 30 November)
153		1	Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima TA 2012 dan TA 2013 (s.d. 30 November) di Raba
154		1	Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 Nopember)
155		1	Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 November) di Selong

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
156		1	Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa TA 2012 dan 2013 (s.d. 31 Juli) di Sumbawa Besar
157		1	Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2012 dan TA 2013 (s.d. 31 Juli) di Taliwang
158		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kota Mataram TA 2012 dan 2013 (s.d. 30 November)
159	Provinsi NTT	1	Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2013 Provinsi Nusa Tenggara Timur
160		1	Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2013 Kabupaten Nagekeo
161		1	Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2013 Kabupaten Sikka
162		1	Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2013 Kabupaten Sumba Tengah
163	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur pada Pemkab Bolang Mongondow TA 2013 (s.d 30 November 2013)
164		1	Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur pada Pemkab Bolang Mongondow Selatan TA 2013 (s.d 30 November 2013)
165		1	Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur TA 2013 (s.d 30 November 2013) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
166		1	Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur pada Pemkab Minahasa TA 2013 (s.d 30 November 2013)
167		1	Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur pada Pemkab Minahasa Selatan TA 2013
168	Provinsi Gorontalo	1	Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2012 dan 2013
169		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2012 dan 2013
170		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi pada Pemerintah Kabupaten Boalemo TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013)
171		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2012 dan 2013
172		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2012 dan 2013
173	Provinsi Sulawesi Barat	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Dan 2013 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
174		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
175		1	Belanja Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Dan Belanja Modal (Gedung dan Bangunan) Tahun Anggaran 2012 Dan 2013 Pada Pemerintah Kabupaten Majene
176	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kabupaten Buol
177		1	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2012 dan 2013
178		1	Belanja Pemilukada pada Pemerintah Kabupaten Morowali
179		1	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2012 dan 2013 (s.d. 30 November 2013) pada Pemerintah Kabupaten Poso.
180		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dana Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Parigi Moutong
181		1	Belanja Modal Infrastruktur Tahun 2012 dan 2013 (s.d. 30 November 2013) pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
182	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Belanja Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
183	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Penyelenggaraan Pilkada Tahun Anggaran 2012 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
184		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilukada TA 2010 dan 2011 pada KPU Kabupaten Bombana, Panwaslu Kabupaten Bombana, serta Instansi Terkait Lainnya di Rumbia
185		1	Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilukada Pada KPU Dan Panwasluda Kabupaten Kolaka Utara TA 2011 dan 2012 di Kolaka Utara
186		1	Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua
187		1	Belanja Daerah Kabupaten Konawe TA 2013 s.d. 31 Oktober 2013 di Unaaha
188		1	Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
189		1	KPU Kota Kendari, Panwaslu Kota Kendari dan Instansi Terkait Lainnya TA 2011 dan 2012 di Kendari
190		1	KPUD Kota BauBau, Panwaslu Kota BauBau dan Instansi Terkait Lainnya di BauBau
191	Provinsi Maluku	1	Belanja Daerah Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012-2013
192		1	Belanja Modal Kota Tual
193	Provinsi Maluku Utara	1	Belanja Bantuan dan Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Provinsi Maluku Utara 2013
194		1	Belanja Bantuan dan Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Kabupaten Halmahera Utara 2013
195		1	Pengadaan Kapal Motor pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
196		1	Belanja Bantuan dan Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Kabupaten Kepulauan Sula 2013
197	Provinsi Papua	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dogiyai TA 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) di Kigamani
198		1	Belanja Daerah Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya di Sugapa
199		1	Belanja Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober)
200		1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober)
201		1	Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Raya TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober 2013)
202		1	Belanja Bantuan TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke
203		1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil
204		1	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi TA 2012
205		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tolikara TA 2012 dan TA 2013 (s.d. Oktober 2013) di Karubaga
206	Provinsi Papua Barat	1	Belanja Daerah Prov. Papua Barat TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
207		1	Belanja Daerah Kabupaten Fakfak TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
208		1	Belanja Daerah Kabupaten Kaimana TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
209		1	Belanja Daerah Kabupaten Manokwari TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
210		1	Belanja Daerah Kabupaten Maybrat TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
211		1	Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
212		1	Belanja Daerah Kabupaten Sorong TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
213		1	Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
214		1	Belanja Daerah Kabupaten Tambrauw TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
215		1	Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
216		1	Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
217		1	Belanja Daerah Kota Sorong TA 2012 dan 2013 (Triwulan III)
	Jumlah	160	
	Total Belanja & Pendapatan	217	
II	Pengelolaan Aset		
A	Badan Layanan Umum		
218	Gelora Bung Karno	1	Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno (PPKGBK)
219	Komplek Kemayoran	1	Pengelolaan Aset-aset Negara pada Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
B	Pemerintah Daerah		
220	Provinsi Jawa Tengah	1	Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Blora
221		1	Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Sragen
222		1	Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Klaten
223	Provinsi DI Yogyakarta	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kab. Kulonprogo
224		1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Yogyakarta
225	Provinsi Jawa Timur	1	Manajemen Aset Kab. Bondowoso
226		1	Manajemen Aset Kab. Bojonegoro
227		1	Manajemen Aset Kab. Lumajang
228		1	Manajemen Aset Kab. Magetan
229		1	Manajemen Aset Kab. Sampang
230		1	Manajemen Aset Kab. Tulungagung
231	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pengelolaan Aset Daerah Prov. Kalimantan Selatan TA 2012 dan Smt. I Tahun 2013
232	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Benteng
233		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Watansoppeng
234		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Pangkajene
235		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Makassar TA 2012 dan 2013 (s.d. Agustus 2013) di Makassar
236	Provinsi Gorontalo	1	Pengelolaan Aset Tahun 2012 dan Semester I 2013 pada Pemerintah Kota Gorontalo
237	Provinsi Sulawesi Barat	1	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
238	Provinsi Maluku Utara	1	Manajemen Aset TA 2012 dan 2013 Kabupaten Pulau Morotai
239		1	Manajemen Aset TA 2012 dan 2013 Kota Tidore Kepulauan 2013
240	Provinsi Papua	1	Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo di Sumohai
	Jumlah	23	
III	Pengelolaan Pusat Layanan Internet Kementrian (PIK) dan Mobile MPLIK		

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
241	Kementerian Komunikasi dan Informasi	1	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan <i>Mobile</i> PLIK (MPLIK) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung
242		1	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (Plik) dan <i>Mobile</i> PLIK pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara
243		1	Penyediaan Jasa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Dan <i>Mobile</i> PLIK Pada Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta dan Maluku Utara
	Jumlah	3	
IV Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama			
244	SKK MIGAS	1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2012 Wilayah Kerja Berau, Muturi dan Wiriagar pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama BP Indonesia Ltd serta Instansi lain yang Terkait di Jakarta, Papua Barat dan Kuala Lumpur
245		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012 Wilayah Kerja Sanga-Sanga pada SKK Migas dan KKKS Vico Indonesia serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta, Sanga-Sanga dan Kuala Lumpur Malaysia
246		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012 Wilayah Kerja South East Sumatera pada SKK MIGAS dan KKKS China National Offshore Oil Company, serta Instansi lain yang Terkait di Jakarta dan Beijing
247		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2012 Wilayah Kerja Jabung pada SKK MIGAS dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Petrochina International Jabung Ltd serta Instansi lain yang Terkait di Jakarta, dan Jambi
248		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012 Wilayah Kerja Pangkah pada SKK MIGAS dan KKKS Hess Indonesia Pangkah LTD serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Gresik
249		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012 Wilayah Kerja Seram Non Bula pada SKK MIGAS dan KKKS CITIC Seram Energy Limited serta Instansi Terkait di Jakarta dan Seram
250		1	Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2012 Wilayah Kerja Malacca Strait pada SKK MIGAS dan KKKS Energi Mega Persada Malacca Strait S.A serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Riau
251		1	Perhitungan bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2012 Wilayah Kerja Kakap pada SKK MIGAS Star Energy (Kakap) Ltd serta Instansi Lain yang Terkait di Jakarta dan Kepulauan Riau
	Jumlah	8	
V Operasional BUMN			
A	Pendapatan, Biaya dan Investasi		
252	PT Pertamina (Persero)	1	Pendapatan, biaya dan investasi unit bisnis Petrokimia dan pelumas PT Pertamina Tahun 2012 dan 2013 di Jakarta, Semarang, Cilacap, Surabaya, dan Gresik

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
253	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1	Penerapan GCG, Penjualan Investasi, Biaya, dan Penyelesaian Utang RDI pada PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III 2013)
254	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan PKBL pada Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
255	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1	Pengelolaan biaya Tahun 2013 (s.d. Triwulan III) dan Penerbangan Haji Tahun 1434 H/2013 M pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
256	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
257	PT Garam (Persero)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Tahun buku 2011 dan 2012 pada PT Garam (Persero)
258	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Pendapatan Toll dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Jasa Marga Tbk.
259	PT Pindad (Persero)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Pindad (Persero)
260	PT Dahana (Persero)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan dan Penjualan Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Dahana (Persero) di Subang dan Tasikmalaya
261	PT Angkasa Pura I (Persero)	1	Pemeriksaan PJP2U, PJP4U, PJP, Konsesi dan Sewa serta Belanja Modal Investasi Teknologi Informasi pada PT Angkasa Pura I (Persero)
262	PT Angkasa Pura II (Persero)	1	Pemeriksaan PJP2U, PJP4U, PJP, Konsesi dan Sewa Serta Belanja Modal Investasi Teknologi Informasi pada PT Angkasa Pura II (Persero)
263	PT Jasa Raharja (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan IWPU, Klaim Kecelakaan Penumpang Pesawat Udara dan Investasi Teknologi Informasi pada PT Jasa Raharja (Persero)
264	Perum Perikanan Indonesia	1	Kegiatan Pendapatan Pengelolaan Biaya dan Pengendalian Investasi pada Perum Prasarana Perikanan Samudra Tahun 2012 dan Pemeriksaan Pengalihan Aset kepada Perum Perikanan Indonesia Tahun 2013 di Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa
265	PT Inhutani (Persero)	1	Kegiatan Pendapatan Pengendalian Biaya dan Aktivitas Investasi pada PT Inhutani (Persero) Tahun 2012 dan 2013 (s.d. Maret 2013) di Jakarta, Balikpapan dan Tarakan
	Jumlah	14	
B	Pengelolaan Kawasan Industri		
266	PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi Pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 (Semester I) pada PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) di Batam.
267	PT Kawasan Industri Medan Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi Pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 (s.d. Maret 2013) pada PT Kawasan Industri Medan
268	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi Pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 (s.d. Maret 2013) pada PT Kawasan Industri Makassar
269	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi Pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 (Semester I) pada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Semarang
270	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi Pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 (s.d. Maret 2013) pada PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
271	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi Pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 (s.d. Maret 2013) pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

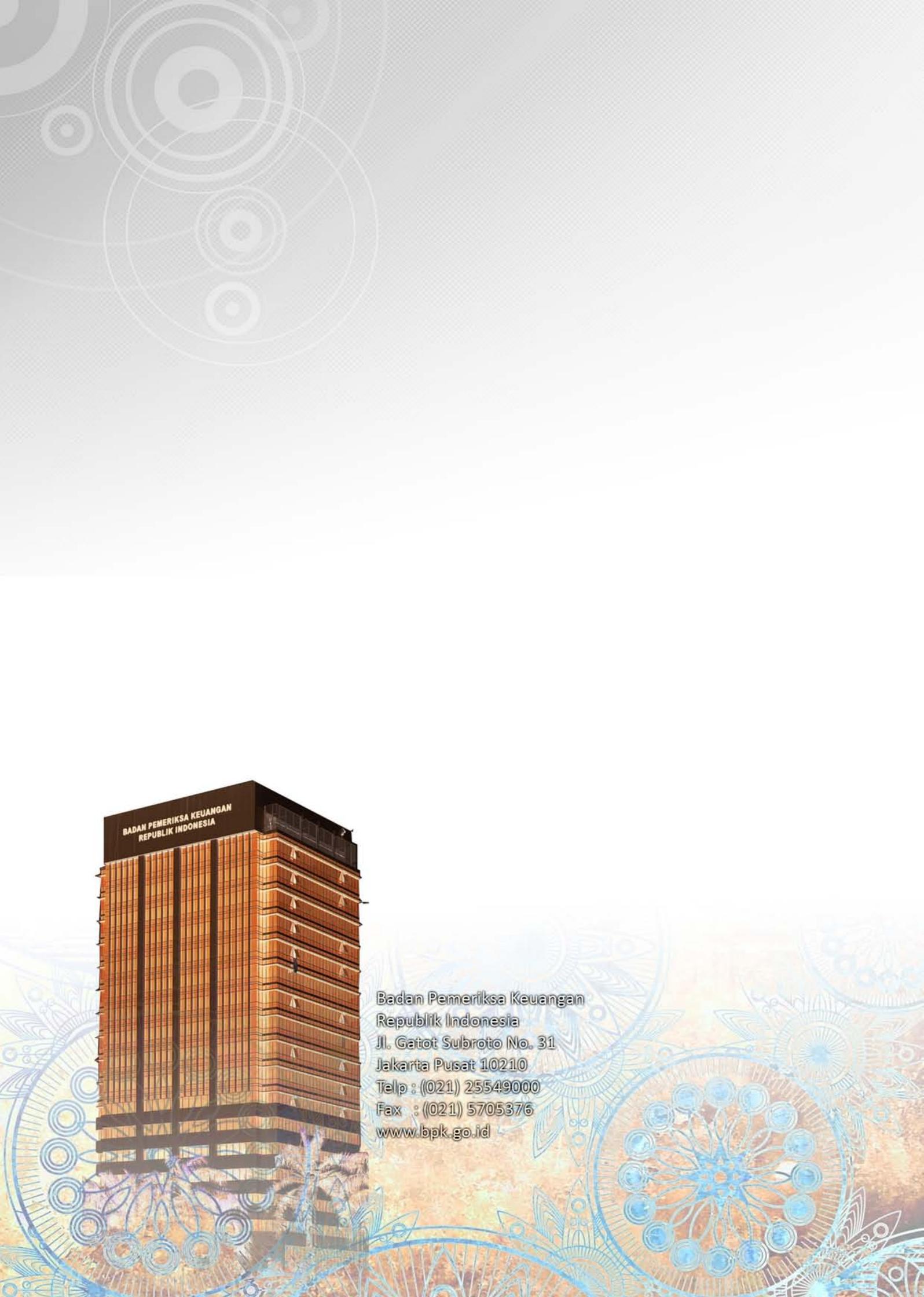
No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
272	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi Pada Tahun 2011, 2012 dan 2013 (Semester I) pada PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Jakarta.
	Jumlah	7	
C	Pengelolaan Pemupukan		
273	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1	Kegiatan Pemupukan Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Dan Instansi Terkait Tahun 2011, 2012 dan 2013 (s.d Semester I)
274	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	1	Kegiatan Pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d Semester I) Pada PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
275	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	1	Kegiatan Pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d semester I) Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) di Pekanbaru
276	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	1	Kegiatan Pemupukan Tahun 2011, 2012, dan 2013 (s.d Semester I) Pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
	Jumlah	4	
D	Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli		
277	Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana	1	Program Kegiatan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Peduli pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana Tahun 2012 dan Semester I 2013 di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Ketapang
	Jumlah	1	
E	Pengelolaan BUMN Lainnya		
278	PT Pertamina	1	Pengelolaan Dana Pensiun Tahun Anggaran 2011, 2012 dan Semester I 2013 pada Dana Pensiun Pertamina dan Istansi Terkait Lainnya
279	PT Balai Pustaka (Persero)	1	Pelaksanaan Penggabungan Usaha dan Program Restrukturisasi pada PT Balai Pustaka (Persero) Di Jakarta
280	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Kredit, Bisnis Kartu dan Beban Operasional Lainnya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
	Jumlah	3	
	Total Operasional BUMN	29	
VI	Pengelolaan BUMD		
A	Pengelolaan BPR		
281	Provinsi Jambi	1	Pemeriksaan Operasional BPD Jambi
282	Provinsi Bengkulu	1	Operasional Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
283	Provinsi Lampung	1	Operasional PT Bank Lampung Tahun Buku 2012 dan Semester I Tahun 2013
284	Provinsi DI Yogyakarta	1	Operasional Bank pada PD BPR Bank Daerah Gunung Kidul TB 2012 dan 2013 (s.d. September)
285	Provinsi Jawa Timur	1	Operasional PT Bank Jatim
286	Provinsi Bali	1	Perusahaan Daerah BPR Werdhi Sedana
287		1	Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Bangli
288	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Perusahaan Daerah BPR Lombok Tengah
289		1	Perusahaan Daerah BPR NTB Sumbawa
290		1	Perusahaan Daerah BPR Lombok Timur
291	Provinsi Kalimantan Barat	1	Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Pontianak
292	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Perusahaan Daerah BPR Marunting Sejahtera
293	Provinsi Kalimantan Timur	1	Perusahaan Daerah BPR Kota Samarinda

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
294	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Perusahaan Daerah BPR Muara Uya
295		1	Perusahaan Daerah BPR Tapin Selatan
296	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Perusahaan Daerah BPR Pesisir Tanadoang
297	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	BUMD Pada Perusahaan Daerah BPR Bahteramas Kendari
	Jumlah	17	
B	Pengelolaan PDAM		
298	Provinsi Aceh	1	Operasional PDAM Tirta Naga Kabupaten Aceh Selatan Tahun Buku 2012 Dan 2013 (Semester I)
299	Provinsi Sumatera Barat	1	Operasional PDAM Tahun Buku 2012 dan 2013 pada PDAM Kota Payakumbuh
300	Provinsi Lampung	1	Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Way Irang serta Pembagian Aset dan Hutang dengan Pemerintah Kota Metro pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
301	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu
302		1	Operasional PDAM Lematang Enim Kab. Muara Enim
303	Provinsi Jawa Tengah	1	Operasional PDAM Tirta Bening, Kab. Pati Tahun 2012 dan 2013 di Pati
304	Provinsi Bali	1	PDAM Kabupaten Karang Asem
305	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	PDAM Giri Menang, Kota Mataram
306	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	PDAM Kabupaten Kupang
307	Provinsi Kalimantan Barat	1	PDAM Tirta Khatulistiwa, Kota Pontianak
308	Provinsi Kalimantan Tengah	1	PDAM Kab. Kotawaringin Timur
309		1	Operasional PDAM Tirta Arut Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2012 s.d 2013 (Semester I)
310	Provinsi Kalimantan Selatan	1	PDAM Intan Banjar, Kab. Banjar
311		1	PDAM Kabupaten Tapin
312	Provinsi Kalimantan Timur	1	PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin
313		1	PDAM Kota Balikpapan
314		1	PDAM Kota Samarinda
315		1	PDAM Tirta Mahakam, Kab. Kutai Kartanegara
316		1	PDAM Kab. Paser
317	Provinsi Sulawesi Barat	1	PDAM Tirta Manakarra, Kab. Mamuju
318	Provinsi Sulawesi Selatan	1	PDAM Kabupaten Gowa
319	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	PDAM Tirta Anoa, Kota Kendari
320	Provinsi Sulawesi Utara	1	PDAM Kota Ambon
321		1	PDAM Perseroan Terbatas Air Manado, Kota Manado
322	Provinsi Maluku Utara	1	PDAM Kota Ternate
323	Provinsi Gorontalo	1	PDAM Kota Gorontalo
324	Provinsi Papua	1	PDAM Jayapura
325	Provinsi Papua Barat	1	PDAM Tirta Dharma, Kab. Manokwari
	Jumlah	28	
C	Pengelolaan PD Pasar		
326	Provinsi Sumatera Utara	1	Pelaksanaan Kegiatan Operasional PD Pasar Kota Medan Untuk TB 2012 s.d Smt I Tahun 2013
327	Provinsi Bali	1	PD Pasar Kota Denpasar
328		1	PD Pasar Kabupaten Buleleng
329		1	PD Pasar Kabupaten Badung

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
330	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	PD Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur
331	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	PD Pasar Kota Kupang
332	Provinsi Kalimantan Selatan	1	PD Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar
333	Provinsi Sulawesi Selatan	1	PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar
334	Provinsi Sulawesi Utara	1	PD Pasar Kota Manado
335	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	PD Pasar Kota Kendari
	Jumlah	10	
D	Pengelolaan Pertambangan		
336	Provinsi Sulawesi Tengah	1	PT Banggai Energi Utama, Kab. Banggai
337		1	PD Danum Belum, Kab. Barito Selatan
338		1	PD Banggai Sakti, Kab. Banggai
339	Provinsi Kalimantan Selatan	1	PD Baramarta Kab. Banjar
340		1	PD Baratala Tuntung Pandang Kab. Tanah Laut
341		1	PD Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan
342	Provinsi Kalimantan Timur	1	PD PD Benuo Taka, Kab. Penajem Paser Utara
343		1	PD Bara Kaltim Sejahtera
344	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	PD Aneka Usaha Kolaka Kab. Kolaka
	Jumlah	9	
E	Pengelolaan Aneka Usaha Lainnya		
345	Provinsi Riau	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Pengembangan Investasi Riau
346	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J)
347	Provinsi Lampung	1	Operasional Perusahaan Daerah Wahana Raharja TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Provinsi Lampung di Bandar Lampung
348	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan dan Biaya Tahun Buku 2011 dan 2012 pada PT Jakarta Propertindo dan Anak Perusahaan TB 2011 dan 2012
349		1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pembangunan Jaya Ancol., Tbk. Dan Anak Perusahaan
350	Provinsi Jawa Tengah	1	PD Anwusa Kabupaten Demak Tahun 2012 dan 2013 di Demak
351	Provinsi DI Yogyakarta	1	Operasional Anindya Mitra Internasional
352		1	Kegiatan Operasional Tahun 2012 dan 2013 (s.d 31 Oktober) pada PD Tarumartani
353	Provinsi Jawa Timur	1	Operasional PT Petrogas Jatim Utama
354	Provinsi Bali	1	PT JBM – Provinsi Bali
355	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	PT Flobamor – Provinsi NTT
356	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Semester I 2013 beserta Instansi Terkait Lainnya
357	Provinsi Kalimantan Timur	1	PT BME – Kota Bontang
358		1	PT IPB – Kabupaten Berau
359		1	LHP PDDT atas BUMD PD Kota Tarakan – Kota Tarakan
360	Provinsi Kalimantan Tengah	1	PD Banama Tingan Makmur – Provinsi Kalimantan Tengah

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
361		1	Operasional PD Katingan Jaya Jaya Mandiri Th. Buku 2012 dan Semester I 2013
362	Provinsi Kalimantan Selatan	1	PD Jembrana – Kabupaten Jembrana
363		1	PD PAL – Provinsi Kalimantan Selatan
364	Provinsi Sulawesi Tengah	1	PT CNE – Kota Palu
365		1	PD HCGM – Kabupaten Gowa
366	Provinsi Sulawesi Selatan	1	PD TMM – Kota Makassar
367	Provinsi Sulawesi Utara	1	PD PSU – Provinsi Sulawesi Utara
368	Provinsi Maluku	1	PD Panca Karya – Provinsi Maluku
369	Provinsi Gorontalo	1	PT GFM – Provinsi Gorontalo
370	Provinsi Papua	1	PD Irian Bhakti – Provinsi Papua
371		1	PT RPS – Provinsi Papua
372	Provinsi Papua Barat	1	PT Padoma – Provinsi Papua Barat
	Jumlah	28	
	F		
	Pengelolaan RSUD		
	RSUD-BLUD		
373	Provinsi Bengkulu	1	Pendapatan dan Belanja Operasional RSUD M. Yunus
374	Provinsi DKI Jakarta	1	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 pada RSU Koja
375	Provinsi Jawa Barat	1	Pendapatan dan Biaya RSUD Gunung Jati TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Cirebon
376		1	Pendapatan dan Biaya RSUD R. Syamsudin TA 2012 dan Semester I TA 2013 di Sukabumi
377	Provinsi Jawa Tengah	1	Operasional RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali TA 2012 dan 2013 (s.d Triwulan III) di Boyolali
378		1	Operasional RSUD KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo TA 2012 dan 2013 (s.d Triwulan III) di Wonosobo
379	Provinsi Bali	1	Operasional RSUD Wangaya Kota Denpasar TA 2012 dan 2013 (Semester I)
380	Provinsi NTB	1	Operasional RSUD pada Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (s.d. 31 Agustus)
	Jumlah	8	
	RSUD Pemerintah Kabupaten		
381	Provinsi Lampung	1	Operasional RSUD Zaenal Abidin Pagar Alam TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu dan Instansi Terkait
	Jumlah	1	
	Total Pengelolaan BUMD dan RSUD	101	
VII	PDTT Lainnya Pada Pusat dan Daerah		
	A		
	Pemerintah Pusat		
382	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012 pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
383	Bank Indonesia	1	Pencetakan dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2012 pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait

No	Entitas	Jml	Daftar LHP
			Objek Pemeriksaan
384	Kementerian Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau
	Jumlah	3	
B	Pemerintah Daerah		
385	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan (dana BOS) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kabupaten Sigi
386	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kepatuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia TA 2012 dan 2013 pada Pemerintah Kota Tomohon
387		1	Pengelolaan Teknologi Informasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah, Dan SIMDA Gaji pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
	Jumlah	3	
	Total PDDT Lainnya	6	
	Jumlah Total	387	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013

Buku V
Pemantauan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

(Buku ke-5 dari 5 Buku)

Jakarta, Maret 2014

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel	ii	
Daftar Grafik	iv	
Daftar Lampiran	v	
BAB 1	Gambaran Umum	1
BAB 2	Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara	3
BAB 3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	5
BAB 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	17

DAFTAR TABEL

- 3.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester II Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009
- 3.3 Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.4 Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.5 Data Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 3.6 Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013
- 4.1 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013
- 4.2 Data Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada Instansi Pusat
- 4.3 Data Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada BUMN
- 4.4 Data Kerugian Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah
- 4.5 Data Kerugian Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada BUMD
- 4.6 Data Kerugian Negara/Daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2013
- 4.7 Data Kerugian Negara/Daerah Tahun 2013
- 4.8 Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013
- 4.9 Penanganan LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013
- 4.10 Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013
- 4.11 Data Tindak Lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pada instansi berwenang yang menerima pada Tahun 2013

- 4.12 Data Tindak Lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelola anggarannya pada Tahun 2013
- 4.13 LHP BPK yang disampaikan kepada Instansi yang berwenang pada Semester II Tahun 2013

DAFTAR GRAFIK

- 3.1 Status Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (% Jumlah Rekomendasi)
- 3.2 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.3 Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.4 Status Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)
- 3.5 Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga Tahun 2009 -2013
2. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kementerian/Lembaga Tahun 2005 -2008
3. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2009 -2013
4. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2005 -2008
5. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (Induk dan anak perusahaan) Tahun 2009 – 2013
6. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BUMN (Induk dan anak perusahaan) Tahun 2005 - 2008
7. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 - 2013
8. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2005 - 2008

BAB 1

Gambaran Umum

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pengertian rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

B. Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB 2

Resume Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 BPK secara keseluruhan telah memberikan 212.750 rekomendasi senilai Rp81.493.375,80 juta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita. Tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 114.397 rekomendasi senilai Rp28.078.345,67 juta, status belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 55.256 rekomendasi senilai Rp32.603.121,28 juta, status belum ditindaklanjuti sebanyak 42.835 rekomendasi senilai Rp20.567.872,86 juta, dan status tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 262 rekomendasi senilai Rp244.035,99 juta.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 15.150 rekomendasi senilai Rp11.484.547,63 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 6.347 rekomendasi senilai Rp1.243.601,98 juta. Rekomendasi ini meliputi 21,41% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 100.426 rekomendasi.

Secara kumulatif rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sejak Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 adalah senilai Rp16.564.593,43 juta.

B. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/daerah sebanyak 24.474 kasus senilai Rp3.122,05 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 15.538 kasus senilai Rp603,5 miliar, baik berupa angsuran, pelunasan dan penghapusan.

Selain itu, BPK juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang mengandung unsur pidana kepada instansi berwenang (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak Tahun 2003 s.d. Tahun 2013 baik Kepala Kepolisian, Kejaksaan RI dan KPK sebanyak 218 surat yang memuat 432 temuan senilai Rp42.714,60 miliar.

Hasil pemantauan terhadap LHP BPK yang mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang menunjukkan bahwa dari 432 temuan yang telah disampaikan, sebanyak 319 temuan atau 73,84% telah ditindaklanjuti baik berupa pelimpahan, proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan dan persidangan, telah diputus oleh peradilan, maupun dihentikan penyidikannya. Adapun sebanyak 113 temuan atau 26,16% belum ditindaklanjuti atau belum ada informasi mengenai tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

BAB 3

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang memuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. IHPS II Tahun 2013 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 yang disajikan menurut entitas kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BHMN, dan badan lainnya.

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterima. Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu

- tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
- tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
- rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
- rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dan/atau tindakan administratif. Penyelamatan uang/aset ke negara/daerah/perusahaan dilakukan antara lain dengan cara menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan, dan/atau mengembalikan/menyerahkan sejumlah aset ke negara/daerah/perusahaan atau dengan cara melengkapi pekerjaan/barang. Adapun tindakan administratif biasanya berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 BPK secara keseluruhan telah memberikan 212.750 rekomendasi senilai Rp81.493.375,80 juta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.1.

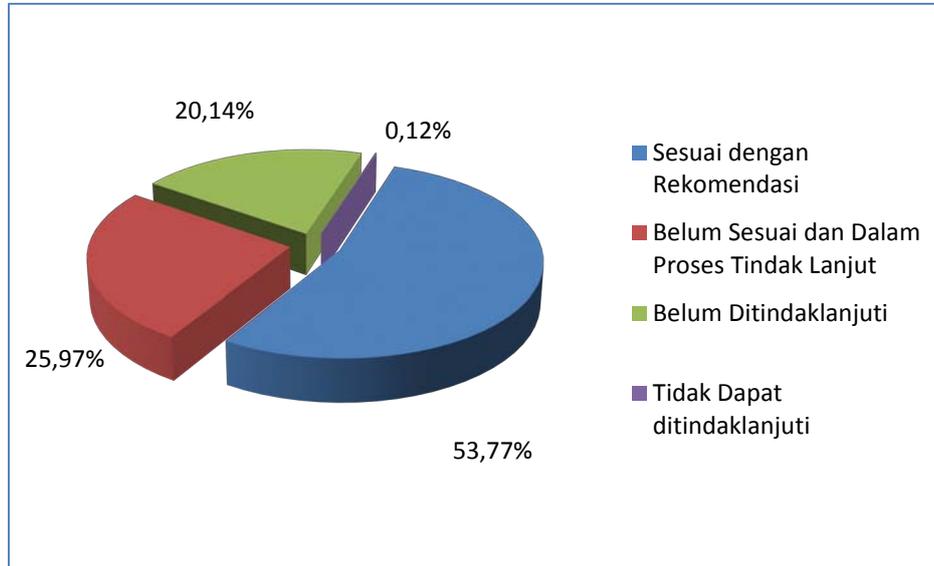
Tabel 3.1. Data Pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

(nilai dalam juta rupiah)

Entitas	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Pemerintah Pusat	25.658	44.073.624,72	15.545	11.163.946,37	5.696	21.603.786,63	4.335	11.103.570,19	82	202.321,53	7.939.376,78
Pemerintah Daerah	180.473	18.202.481,80	95.820	4.907.787,58	48.230	8.416.536,53	36.313	4.845.283,43	110	32.874,26	4.338.164,43
BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan)	6.024	14.646.614,04	2.755	10.072.817,20	1.236	1.808.650,04	1.963	2.756.306,60	70	8.840,20	4.285.417,49
BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita	595	4.570.655,24	277	1.933.794,52	94	774.148,08	224	1.862.712,64	-	-	1.634,73
TOTAL	212.750	81.493.375,80	114.397	28.078.345,67	55.256	32.603.121,28	42.835	20.567.872,86	262	244.035,99	16.564.593,43

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 3.1. sebagai berikut.

**Grafik 3.1. Status Pemantauan TLRHP
Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (% dari Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 3.1. dan Grafik 3.1. data pemantauan TLRHP di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 114.397 rekomendasi atau 53,77%, sedangkan sebanyak 55.256 rekomendasi atau 25,97% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 42.835 rekomendasi atau 20,14% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 262 rekomendasi atau 0,12% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 114.397 rekomendasi senilai Rp28.078.345,67 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/penyerahan aset ke negara secara kumulatif sejak tahun 2009 s.d. Tahun 2013 senilai Rp16.564.593,43 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebesar 53,77%, menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 15.150 rekomendasi senilai Rp11.484.547,63 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 6.347 rekomendasi senilai Rp1.243.601,98 juta. Rekomendasi ini meliputi 21,41% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 100.426 rekomendasi.

Untuk mengetahui perkembangan data TLRHP selama Semester II Tahun 2013 di bawah ini disajikan data TLRHP Semester II Tahun 2013 dibandingkan data TLRHP Semester I Tahun 2013 atas data sejak Tahun 2009.

Tabel 3.2. Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester II Tahun 2013 atas data TLRHP sejak Tahun 2009

(nilai dalam juta rupiah)

Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Semester II Tahun 2013	212.750	81.493.375,80	114.397	28.078.345,67	55.256	32.603.121,28	42.835	20.567.872,86	262	244.035,99	16.564.593,43
Semester I Tahun 2013	193.600	73.279.028,54	98.227	24.162.166,01	49.335	29.259.075,33	45.830	19.679.036,96	208	178.750,24	15.171.146,02
Perkembangan	19.150	8.214.347,26	16.170	3.916.179,66	5.921	3.344.045,95	(2.995)	888.835,90	54	65.285,75	1.393.447,41

Dari Tabel 3.2. di atas terlihat bahwa selama Semester II Tahun 2013, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2013 sebanyak 16.170 rekomendasi senilai Rp3.916.179,66 juta.

Selama Semester II Tahun 2013, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti rekomendasi BPK Tahun 2009 s.d. Semester II Tahun 2013 dengan penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp1.393.447,41 juta.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan pemerintah pusat mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 secara keseluruhan dari 96 kementerian/ lembaga (termasuk BPK, ETESP, STAR SDP, dan Sekretaris Kabinet) terdapat 25.658 rekomendasi senilai Rp44.073.624,72 juta. Status pemantauan hasil pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.3. Rincian hasil pemantauan TLRHP pada kementerian/lembaga Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 3.3. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

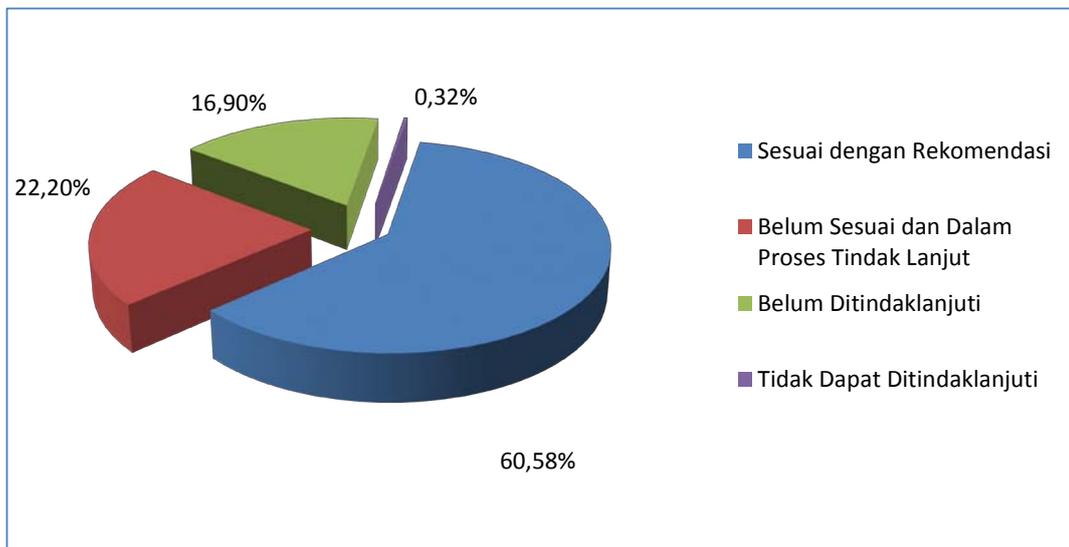
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
13.360	25.658	38.682.689,96	15.545	10.687.740,79	5.696	20.415.489,15	4.335	7.508.621,84	82	70.838,18	7.372.977,95
		USD 440,785.82		USD 37,579.85		USD 97,486.23		USD 294,932.69		USD 10,787.05	USD 46,465.97
		EUR 3.25		EUR 2.43		-		EUR 0.82		-	EUR 0.40
		AUD 29.97		AUD 29.97		-		-		-	AUD 0.38
		JPY 150,835.50		JPY 150,835.50		-		-		-	-
		THB 25.00		THB 25.00		-		-		-	-
		SGD 0.24		-		SGD 0.24		-		-	-
		RON 7.16		RON 7.16		-		-		-	-
		PLN 54.42		PLN 54.42		-		-		-	-
		KRW 3,075.01		-		KRW 3,075.01		-		-	-
		-		-		-		-		-	GBP 0.71
Total (Rp)		44.073.624,72		11.163.946,37		21.603.786,63		11.103.570,19		202.321,53	7.939.376,78

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013.

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 3.2. sebagai berikut.

Grafik 3.2. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.3. dan Grafik 3.2. data pemantauan TLRHP di atas terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 15.545 rekomendasi atau 60,58%, sedangkan sebanyak 5.696 rekomendasi atau 22,20% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 4.335 rekomendasi atau 16,90% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 82 rekomendasi atau 0,32% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 15.545 rekomendasi senilai Rp11.163.946,37 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara senilai Rp7.939.376,78 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebesar 60,58%, menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada pemerintah pusat yang belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 1.475 rekomendasi senilai Rp4.107.162,74 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 594 rekomendasi senilai Rp309.308,23 juta. Rekomendasi ini meliputi 14,65% dari seluruh rekomendasi BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada Pemerintah Pusat sebanyak 14.123 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 disajikan pada Lampiran 2.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 secara keseluruhan dari 529 pemerintah daerah (termasuk lima daerah pemekaran baru) terdapat 180.473 rekomendasi senilai Rp18.202.481,80 juta. Status pemantauan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.4. Rincian hasil pemantauan TLRHP pada pemerintah daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada Lampiran 3.

Tabel 3.4. Data Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

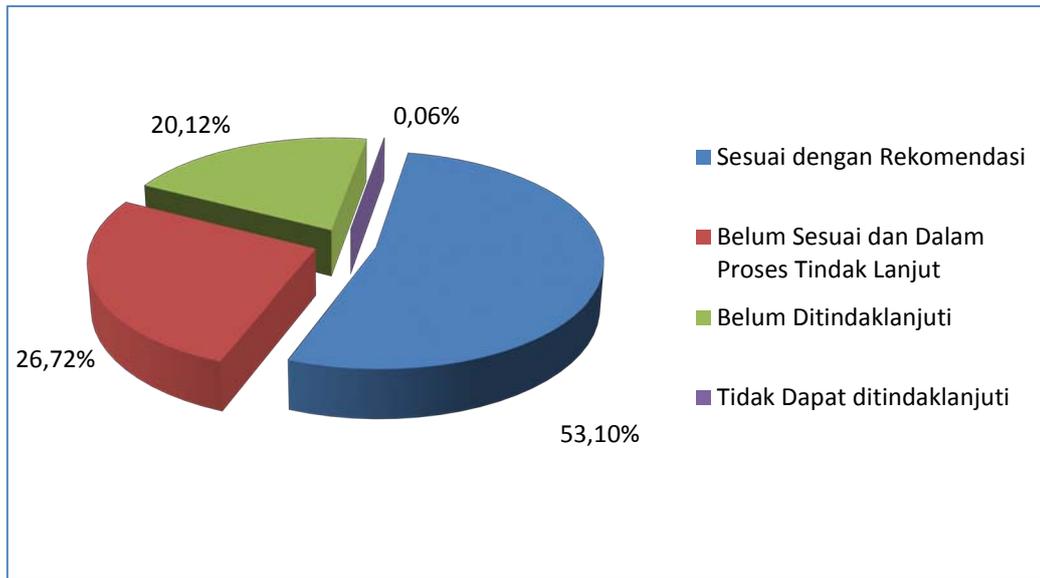
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
75.874	180.473	17.923.907,36	95.820	4.816.461,74	48.230	8.249.352,12	36.313	4.825.219,24	110	32.874,26	4.246.710,12
		USD 22,850.43	-	USD 7,492.48	-	USD 13,714.68	-	USD 1,643.27	-	-	USD 7,503.02
		SGD 5.25	-	-	-	SGD 1.68	-	SGD 3.57	-	-	-
Total (Rp)		18.202.481,80		4.907.787,58		8.416.536,53		4.845.283,43		32.874,26	4.338.164,43

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013.

Dalam bentuk yang lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 3.3. adalah sebagai berikut.

Grafik 3.3. Status Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.4. dan Grafik 3.3. terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 95.820 rekomendasi atau 53,10% sedangkan sebanyak 48.230 rekomendasi atau 26,72% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 36.313 rekomendasi atau 20,12% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 110 rekomendasi atau 0,06% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 95.820 rekomendasi senilai Rp4.907.787,58 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke daerah/perusahaan daerah senilai Rp4.338.164,43 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebesar 53,10%, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Selain itu masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada pemerintah daerah yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 13.355 rekomendasi senilai Rp5.079.731,33 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 5.618 rekomendasi senilai Rp829.790,29 juta. Rekomendasi ini meliputi 22,97% dari seluruh rekomendasi BPK pada pemerintah daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 82.590 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 disajikan pada Lampiran 4.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN (Termasuk Anak Perusahaan)

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan BUMN (termasuk Anak Perusahaan) mengungkapkan bahwa dalam periode Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 secara keseluruhan dari 173 BUMN (termasuk Anak Perusahaan) terdapat 6.024 rekomendasi senilai Rp14.646.614,04 juta. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada Tabel 3.5. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada Lampiran 5.

Tabel 3.5. Data Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

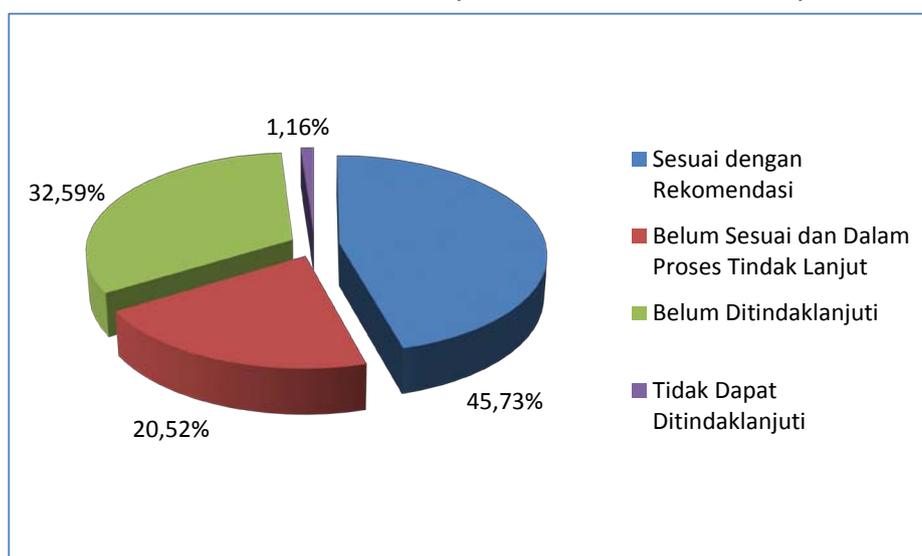
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
BUMN (Induk perusahaan)	2.731	5.751	8.472.392,21	2.550	4.151.740,95	1.203	1.597.897,33	1.932	2.713.913,73	66	8.840,20	3.749.721,52
			USD 494,696.23		USD 474,293.01		USD 16,989.17		USD 3,414.05		-	USD 32,877.48
			EUR 24.20		EUR 24.20		-		-		-	EUR 24.20
BUMN (anak perusahaan)	173	273	132.612,14	205	128.161,40	33	3.671,72	31	779,02	4	-	123.195,01
			USD 931.19		USD 931.19		-		-		-	USD 931.19
TOTAL	2.904	6.024	8.605.004,35	2.755	4.279.902,35	1.236	1.601.569,05	1.963	2.714.692,75	70	8.840,20	3.872.916,53
			USD 495,627.42		USD 475,224.20		USD 16,989.17		USD 3,414.05		-	USD 33,808.67
			EUR 24.20		EUR 24.20		-		-		-	EUR 24.20
Total (Rp)	2.904	6.024	14.646.614,04	2.755	10.072.817,20	1.236	1.808.650,04	1.963	2.756.306,60	70	8.840,20	4.285.417,49

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013.

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 3.4 sebagai berikut.

Grafik 3.4. Status Pemantauan TLRHP pada BUMN (termasuk Anak Perusahaan) Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 (dalam % Jumlah Rekomendasi)



Dari Tabel 3.5. dan Grafik 3.4. tersebut terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.755 rekomendasi atau 45,73%, sedangkan sebanyak 1.236 rekomendasi atau 20,52% belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 1.963 rekomendasi atau 32,59% belum ditindaklanjuti, serta sebanyak 70 rekomendasi atau 1,16% tidak dapat ditindaklanjuti. Dari 2.755 rekomendasi senilai Rp10.072.817,20 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke kas negara/perusahaan milik negara (termasuk Anak Perusahaan) senilai Rp4.285.417,49 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebesar 45,73%, menunjukkan bahwa BUMN (termasuk Anak Perusahaan) telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada BUMN yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 282 rekomendasi senilai Rp2.167.888,74 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 131 rekomendasi senilai Rp104.503,46 juta. Rekomendasi ini meliputi 12,14% dari seluruh rekomendasi BPK pada BUMN Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 3.402 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada BUMN Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 disajikan pada Lampiran 6.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita

Hasil pemantauan TLRHP di lingkungan BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita mengungkapkan bahwa dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 terdapat 595 rekomendasi senilai Rp4.570.655,24 juta. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 3.6. Rincian hasil pemantauan pelaksanaan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan pada Lampiran 7.

**Tabel 3.6. Data Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%,
Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**

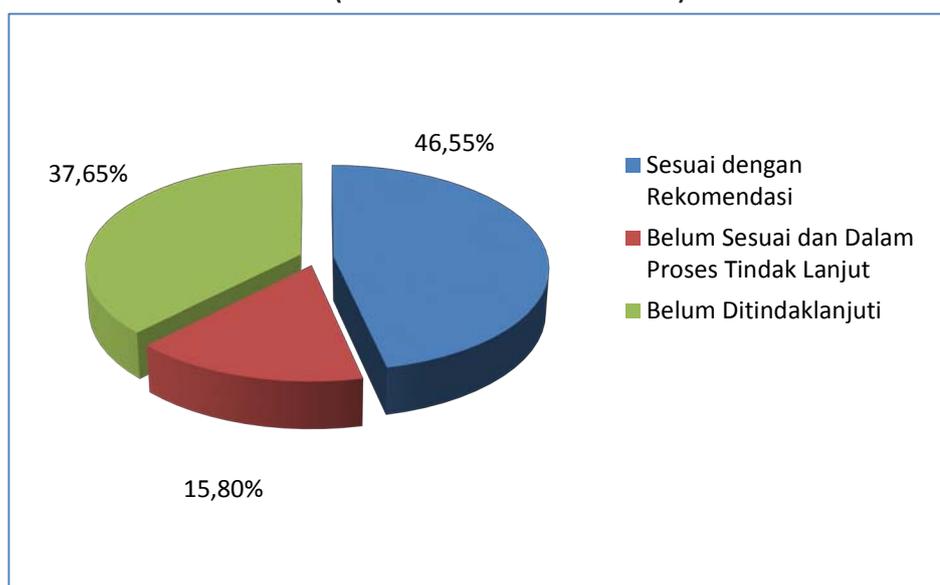
(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah	
	Jml	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml		Nilai
BHMN	83	129	-	35	-	10	-	84	-	-	-	-
			USD 15,204.03		USD 10,750.02		USD 500.00		USD 3,954.01			
KKKS	324	387	39.362,03	209	30.288,04	64	9.072,24	114	1,75	-	-	-
			USD 292,943.72		USD 145,261.21		USD 62,195.55		USD 85,486.96			
			SGD 5.30		SGD 5.30		-		-			
			EUR 11.88		EUR 11.88		-		-			
Lembaga	16	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-
Saham Pemerintah 50%	3	4	2.514,51	1	1.634,73	3	879,78	-	-	-	-	1.634,73
Penyertaan BUMN	9	14	-	5	-	9	-	-	-	-	-	-
Otorita	10	26	772.514,91	-	-	-	-	26	772.514,91	-	-	-
Total BHMN, KKKS dan Badan Usaha Lainnya, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN, dan Otorita	445	595	814.391,45	277	31.922,77	94	9.952,02	224	772.516,66	-	-	1.634,73
			USD 308,147.75		USD 156,011.23		USD 62,695.55		USD 89,440.97			
			SGD 5.30		SGD 5.30		-		-			
			EUR 11.88		EUR 11.88		-		-			
Total (Rp)	445	595	4.570.655,24	277	1.933.794,52	94	774.148,08	224	1.862.712,64	-	-	1.634,73

Ket: Konversi valas menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2013.

Dalam bentuk lebih ringkas, status pemantauan TLRHP Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 3.5. sebagai berikut.

**Grafik 3.5. Status Pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham
Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2009 s.d Tahun 2013
(dalam % Jumlah Rekomendasi)**



Dari Tabel 3.6. dan Grafik 3.5. terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 277 rekomendasi atau 46,55%, sedangkan sebanyak 94 rekomendasi atau 15,80% belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 224 rekomendasi atau 37,65% belum ditindaklanjuti. Dari 277 rekomendasi senilai Rp1.933.794,52 juta yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita senilai Rp1.634,73 juta.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebesar 46,55%, menunjukkan bahwa BHMN, KKKS Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain itu, masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 38 rekomendasi senilai Rp129.764,82 juta, serta belum ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi. Rekomendasi ini meliputi 13,50% dari seluruh rekomendasi BPK pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 sebanyak 311 rekomendasi. Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP pada BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita Tahun 2005 s.d. Tahun 2008 disajikan pada Lampiran 8.

BAB 4

HASIL PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan kewenangannya untuk memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil pemantauan BPK tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS).

GAMBARAN UMUM

Pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dilakukan terhadap data kerugian negara/daerah yang berupa **Tuntutan Ganti Rugi** terhadap bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pihak Ketiga, pengelola BUMN/BUMD dan pengelola Badan Keuangan Lainnya.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2013 memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 untuk status penyelesaian kerugian negara/daerah "telah ditetapkan" dan "dalam proses penetapan". Data kerugian dimaksud mencakup jumlah kasus dan nilai kerugian negara serta penyelesaiannya, baik angsuran, pelunasan, maupun penghapusan. Angsuran adalah penyelesaian pembayaran kerugian negara/daerah yang dilakukan dalam beberapa kali sesuai ketentuan sampai dengan lunas. Pelunasan adalah pembayaran kerugian negara/daerah yang dilakukan sekali dan lunas/selesai. Sedangkan penghapusan adalah penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pejabat berwenang berupa penghapusan sisa piutang karena sebab-sebab khusus, antara lain penanggungjawab meninggal dunia dan tidak terdapat ahli waris, penanggungjawab tidak mampu, tidak adanya jaminan, jaminan telah dicairkan atau permasalahan-permasalahan rumit lainnya yang menyebabkan piutang tidak dapat terselesaikan.

Cakupan entitas yang dipantau adalah sebesar 28,22% atau sebanyak 688 entitas dari total entitas yang seharusnya dipantau sebanyak 2.438 entitas, yang terdiri dari 91 entitas pemerintah pusat, 527 entitas pemerintah daerah, 11 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 59 entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester II Tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kasus kerugian negara/daerah dalam kurun waktu periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 sebanyak 24.474 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp3.122,05 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 15.538 kasus senilai Rp 603,50 miliar, baik berupa angsuran, pelunasan, dan penghapusan.

Rincian jumlah kasus dan penyelesaian kerugian negara/daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 sebagai berikut:

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2013

Data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 sebanyak 24.474 kasus senilai Rp3.122,05 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 15.538 kasus senilai Rp603,50 miliar yang terdiri dari angsuran sebanyak 6.335 kasus senilai Rp363,41 miliar, pelunasan sebanyak 9.103 kasus senilai Rp229,45 miliar dan penghapusan sebanyak 100 kasus senilai Rp10,64 miliar. Sisa kerugian negara/daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 sebanyak 18.319 kasus senilai Rp2.518,55 miliar.

Rincian data perkembangan penyelesaian kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Kerugian Negara/Daerah
Periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	2.720	600,34	529	80,11	654	19,56	6	0,38	2.281	500,29
	USD	-	243.29	-	3.58	-	-	-	-	-	239.71
TGR NON BENDAHARA	IDR	18.209	1.049,71	5.225	187,06	6.919	138,79	80	1,28	13.202	722,58
	USD	-	4.411.80	-	14.39	-	1.33	-	-	-	4.396.08
	GBP	-	199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15
	AUD	-	2,355.24	-	-	-	-	-	-	-	2,355.24
	CAD	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60
	JPY	-	755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27
	EUR	-	32,592.55	-	-	-	-	-	-	-	32,592.55
	NLG	-	509.42	-	-	-	-	-	-	-	509.42
	FFR	-	2,215.39	-	-	-	-	-	-	-	2,215.39
	DEM	-	510.23	-	-	-	-	-	-	-	510.23
	MYR	-	58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53
PIHAK KETIGA	IDR	3.468	679,75	538	92,33	1.506	70,70	3	3,01	2.777	513,71
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	77	55,29	43	3,70	24	0,39	11	5,97	59	45,23
TOTAL	IDR	24.474	2.385,09	6.335	363,20	9.103	229,44	100	10,64	18.319	1.781,81
	USD	-	4,655.09	-	17.97	-	1.33	-	-	-	4,635.79
	GBP	-	199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15
	AUD	-	2,355.24	-	-	-	-	-	-	-	2,355.24
	CAD	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60
	JPY	-	755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27
	EUR	-	32,592.55	-	-	-	-	-	-	-	32,592.55
	NLG	-	509.42	-	-	-	-	-	-	-	509.42
	FFR	-	2,215.39	-	-	-	-	-	-	-	2,215.39
	DEM	-	510.23	-	-	-	-	-	-	-	510.23
	MYR	-	58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	-	736,96	-	0,21	-	0,01	-	-	-	736,74
TOTAL KERUGIAN	IDR	24.474	3.122,05	6.335	363,41	9.103	229,45	100	10,64	18.319	2.518,55

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Rincian data kerugian negara/daerah hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 berdasarkan entitas pengelola penyelesaian kerugian negara/daerah adalah sebagai berikut:

Penyelesaian Kerugian Negara pada Instansi Pusat

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada instansi pusat dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 sebanyak 4.648 kasus senilai Rp1.377,37 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 3.424 kasus dengan nilai Rp128,25 miliar yang terdiri dari angsuran sebanyak 736 kasus senilai Rp44,92 miliar, pelunasan sebanyak 2.677 kasus senilai Rp83,02 miliar dan penghapusan sebanyak 11

kasus senilai Rp0,31 miliar. Sisa kerugian negara pada instansi pusat sampai dengan akhir Tahun 2013 adalah sebanyak 4.169 kasus senilai Rp1.249,12 miliar.

Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada instansi pusat sampai dengan Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Data Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada Instansi Pusat

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PEMBAYARAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	216	60,87	61	2,98	107	2,63	1	-	208	55,26
	USD	-	243,29	-	3,58	-	-	-	-	-	239,71
TGR NON BENDAHARA	IDR	3.446	255,17	596	28,43	1.788	37,97	10	0,31	2.980	188,46
	USD	-	4.411,80	-	14,39	-	1,33	-	-	-	4.396,08
	GBP	-	199,15	-	-	-	-	-	-	-	199,15
	AUD	-	2,355,24	-	-	-	-	-	-	-	2,355,24
	CAD	-	39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY	-	755,447,27	-	-	-	-	-	-	-	755,447,27
	EUR	-	32,592,55	-	-	-	-	-	-	-	32,592,55
	NLG	-	509,42	-	-	-	-	-	-	-	509,42
	FFR	-	2,215,39	-	-	-	-	-	-	-	2,215,39
	DEM	-	510,23	-	-	-	-	-	-	-	510,23
	MYR	-	58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
PIHAK KETIGA	IDR	986	324,37	79	13,30	782	42,41	-	-	981	268,66
	IDR	4.648	640,41	736	44,71	2.677	83,01	11	0,31	4.169	512,38
TOTAL	USD	-	4,655,09	-	17,97	-	1,33	-	-	-	4,635,79
	GBP	-	199,15	-	-	-	-	-	-	-	199,15
	AUD	-	2,355,24	-	-	-	-	-	-	-	2,355,24
	CAD	-	39,60	-	-	-	-	-	-	-	39,60
	JPY	-	755,447,27	-	-	-	-	-	-	-	755,447,27
	EUR	-	32,592,55	-	-	-	-	-	-	-	32,592,55
	NLG	-	509,42	-	-	-	-	-	-	-	509,42
	FFR	-	2,215,39	-	-	-	-	-	-	-	2,215,39
	DEM	-	510,23	-	-	-	-	-	-	-	510,23
	MYR	-	58,53	-	-	-	-	-	-	-	58,53
	TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	-	736,96	-	0,21	-	0,01	-	-	-
TOTAL KERUGIAN	IDR	4.648	1.377,37	736	44,92	2.677	83,02	11	0,31	4.169	1.249,12

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Penyelesaian Kerugian Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada BUMN dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 menunjukkan adanya kerugian negara sebanyak 108 kasus senilai Rp214,44 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 84 kasus senilai Rp67,87 miliar, yang terdiri dari angsuran sebanyak 49 kasus senilai Rp61,51 miliar, pelunasan sebanyak 24 kasus senilai Rp0,39 miliar dan penghapusan sebanyak 11 kasus senilai Rp5,97 miliar. Sisa kerugian negara pada BUMN sampai dengan akhir Tahun 2013 adalah sebanyak 89 kasus senilai Rp146,57 miliar.

Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara pada BUMN sampai dengan Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data Kerugian Negara sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada BUMN

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	31	159,15	6	57,81	-	-	-	-	-	101,34
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	77	55,29	43	3,70	24	0,39	11	5,97	59	45,23
TOTAL	IDR	108	214,44	49	61,51	24	0,39	11	5,97	89	146,57

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah daerah dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 menunjukkan jumlah kasus kerugian daerah sebanyak 19.714 kasus senilai Rp1.530,19 miliar dengan tingkat penyelesaian sebanyak 12.028 kasus senilai Rp407,35 miliar, yang terdiri dari angsuran sebanyak 5.550 kasus senilai Rp256,98 miliar, pelunasan sebanyak 6.400 kasus senilai Rp146,01 miliar dan penghapusan sebanyak 78 kasus senilai Rp4,36 miliar. Sisa kerugian daerah sampai dengan akhir Tahun 2013 sebanyak 14.057 kasus senilai Rp1.122,84 miliar. Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada pemerintah daerah sampai dengan akhir Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Data Kerugian Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada Pemerintah Daerah

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	2.504	539,47	468	77,13	547	16,93	5	0,38	2.073	445,03
TGR NON BENDAHARA	IDR	14.759	794,49	4.629	158,63	5.129	100,79	70	0,97	10.218	534,10
PIHAK KETIGA	IDR	2.451	196,23	453	21,22	724	28,29	3	3,01	1.766	143,71
TOTAL	IDR	19.714	1.530,19	5.550	256,98	6.400	146,01	78	4,36	14.057	1.122,84

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Penyelesaian Kerugian Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada BUMD dalam kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 sebanyak 4 kasus senilai Rp0,05 miliar, dengan tingkat penyelesaian berupa pelunasan sebanyak 2 kasus senilai Rp0,03 miliar. Sisa kerugian daerah sampai akhir Tahun 2013 adalah sebanyak 4 kasus senilai Rp0,02 miliar.

Rincian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada BUMD sampai dengan Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Data Kerugian Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2013 pada BUMD

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	4	0,05	-	-	2	0,03	-	-	4	0,02
PIHAK KETIGA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	4	0,05	-	-	2	0,03	-	-	4	0,02

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2013

Data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2013 sebanyak 21.528 kasus senilai Rp2.401,61 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 14.594 kasus senilai Rp502,28 miliar yang terdiri dari angsuran sebanyak 6.109 kasus senilai Rp285,58 miliar, pelunasan sebanyak 8.381 kasus senilai Rp206,34 miliar dan penghapusan sebanyak 104 kasus senilai Rp10,36 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada akhir Semester I Tahun 2013 sebanyak 17.658 kasus senilai Rp1.899,33 miliar. Rincian data penyelesaian kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Data Kerugian Negara/Daerah periode Tahun 2003 sampai dengan Semester I Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11**)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	2.271	520,67	434	49,33	763	21,31	8	0,41	2.206	449,62
TGR NON BENDAHARA	IDR	15.278	884,10	4.884	120,55	5.574	107,17	69	0,63	12.101	655,75
	USD	-	4,511.58	-	18.29	-	-	-	-	-	4,493.29
	GBP	-	199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15
	AUD	-	3,143.72	-	-	-	-	-	-	-	3,143.72
	CAD	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60
	JPY	-	755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27
	EUR	-	7,823.62	-	-	-	-	-	-	-	7,823.62
	MYR	-	58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53
	DEM	-	373.87	-	-	-	-	-	-	-	373.87
PIHAK KETIGA	IDR	3.879	683,34	746	111,29	2.034	77,54	15	3,31	3.271	491,20
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	100	56,32	45	4,23	10	0,32	12	6,01	80	45,76
TOTAL	IDR	21.528	2.144,43	6.109	285,40	8.381	206,34	104	10,36	17.658	1.642,33
	USD	-	4,511.58	-	18.29	-	-	-	-	-	4,493.29
	GBP	-	199.15	-	-	-	-	-	-	-	199.15
	AUD	-	3,143.72	-	-	-	-	-	-	-	3,143.72
	CAD	-	39.60	-	-	-	-	-	-	-	39.60
	JPY	-	755,447.27	-	-	-	-	-	-	-	755,447.27
	EUR	-	7,823.62	-	-	-	-	-	-	-	7,823.62
	MYR	-	58.53	-	-	-	-	-	-	-	58.53
	DEM	-	373.87	-	-	-	-	-	-	-	373.87
TOTAL VALAS EKVIVALEN*)	IDR	-	257,18	-	0,18	-	-	-	-	-	257,00
TOTAL KERUGIAN	IDR	21.528	2.401,61	6.109	285,58	8.381	206,34	104	10,36	17.658	1.899,33

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 28 Juni 2013.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH PADA TAHUN 2013

Data kerugian negara/daerah pada Tahun 2013 menunjukkan bahwa kerugian negara/daerah yang tercatat pada Tahun 2013 adalah sebanyak 840 kasus senilai Rp20,25 miliar, dengan tingkat penyelesaian sebanyak 310 kasus senilai Rp3,63 miliar dengan rincian angsuran sebanyak 169 kasus senilai Rp1,42 miliar dan pelunasan sebanyak 141 kasus senilai Rp2,21 miliar. Sisa kasus kerugian negara/daerah pada Tahun 2013 sebanyak 750 kasus senilai Rp16,62 miliar. Rincian data kerugian negara/daerah pada Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Data Kerugian Negara/Daerah Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah)

SUBYEK	MATA UANG	KERUGIAN		PENYELESAIAN						SISA	
		JML KASUS	NILAI	ANGSURAN		LUNAS		PENGHAPUSAN		JML KASUS	NILAI
PENANGGUNG JAWAB KERUGIAN NEGARA				JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI	JML KASUS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11*)	12
											12=4-(6+8+10)
TGR BENDAHARA	IDR	153	3,76	38	0,46	3	0,10	-	-	150	3,20
TGR NON BENDAHARA	IDR	514	11,05	93	0,49	110	1,63	-	-	430	8,93
PIHAK KETIGA	IDR	173	5,44	38	0,47	28	0,48	-	-	170	4,49
PENGELOLA KEUANGAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	840	20,25	169	1,42	141	2,21	-	-	750	16,62

*) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
- angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
- kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
- kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

Permasalahan Dalam Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelesaian kerugian negara/daerah berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada Semester II Tahun 2013 antara lain:

- Pemerintah belum menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga penyelesaian kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain belum sepenuhnya efektif.
- Instansi Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, maupun Badan Pengelola Keuangan lainnya, belum sepenuhnya mendasarkan proses penyelesaian kerugian negara/daerah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pencatatan dan pendokumentasian data kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya oleh entitas belum seluruhnya akurat dan valid.
- Pemahaman pengelola penyelesaian kerugian negara/daerah di instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD dan Badan Pengelola Keuangan lainnya atas kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya belum sama.
- Koordinasi antara instansi dengan BPK dan/atau Kementerian Keuangan terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/daerah dan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan

- membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian belum terjalin dengan baik sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah belum dapat dicapai.
6. Instansi belum secara optimal mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan.
 7. Kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan fungsi pengadministrasian dokumentasi kasus-kasus kerugian negara/daerah belum optimal.

Terhadap permasalahan di atas, BPK merekomendasikan sebagai berikut.

1. Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diikuti dengan tindakan koordinatif antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk memberikan pemahaman bersama bagi Instansi Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan pengelola Keuangan lainnya dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Satuan Pengawas Intern BUMN/ BUMD mendorong penyelesaian kerugian negara/daerah pada Instansi Pusat, BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Pengelola Keuangan lainnya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
3. Pimpinan Instansi memerintahkan TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan TP-TGR melakukan validasi dan akurasi atas data kasus kerugian negara/daerah beserta perkembangannya maupun ketertiban pengelolaan dokumen kerugian negara/daerah berdasarkan rekomendasi pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
4. Pimpinan Instansi mendorong peningkatan dan penyamaan pemahaman atas kerugian negara/daerah dan penyelesaiannya kepada pengelola keuangan, aparat pengawas, fungsi kesekretariatan, dan TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan fungsi konsultatif antara Instansi dengan Kementerian Keuangan dan atau BPK terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/daerah dan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi karena penanggungjawab meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak adanya jaminan untuk pembayaran kerugian belum terjalin dengan baik sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/daerah dapat dicapai.

6. Pimpinan Instansi memerintahkan TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan TP-TGR/Aparat Pengawasan Internal untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara/daerah dengan mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan.
7. Pimpinan Instansi memerintahkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah/Satuan Pengawasan Internal untuk meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada TPKN/TPKD/Majelis Pertimbangan TP-TGR dalam mengoptimalkan proses dan pendokumentasian administrasi penyelesaian kerugian negara/daerah.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sejak Tahun 2003 Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan unsur pidana kepada instansi yang berwenang.

Sejak Tahun 2003 sampai dengan akhir Semester II Tahun 2013, unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang, baik kepada Kepolisian, Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebanyak 218 surat yang memuat 432 temuan senilai Rp42.714,60 miliar.

Penanganan penyampaian unsur pidana dari BPK oleh Instansi yang berwenang adalah sebanyak 319 temuan (73,84%) senilai Rp42.714,60 miliar yang terdiri dari pelimpahan sebanyak 45 temuan (10,42%), dalam proses penyelidikan sebanyak 93 temuan (21,53%), dalam proses penyidikan 38 temuan (8,79%), proses penuntutan dan persidangan sebanyak 26 temuan (6,02%), telah memperoleh putusan pengadilan sebanyak 102 temuan (23,61%) dan dihentikan penyidikannya dengan SP3 sebanyak 15 kasus (3,47%). Sedangkan sebanyak 113 temuan (26,16%) belum ditindaklanjuti atau belum diperolehnya informasi tindak lanjut dari instansi yang berwenang.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang disajikan berdasarkan rincian instansi berwenang yang menerimanya disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Instansi Yang Berwenang	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti						Blm TL/ Tdk Ada Ket
		Surat Keluar Ketua dan Anggota BPK				Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	
		Surat	Temuan	Nilai (IDR)	Nilai (USD)							
Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004	1	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	10	-
	2005	1	1	103,63	-	-	-	-	-	1	-	-
	2006	1	4	391,13	3,191.92	-	-	-	-	-	-	4
	2007	5	9	1.130,88	-	-	4	-	-	5	-	-
	2008	2	2	7,96	-	-	-	2	-	-	-	-
	2009	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	2010	2	2	16,13	-	-	-	2	-	-	-	-
	2011	6	23	17,79	-	-	18	1	2	1	1	-
	2012	6	5	30,03	10,846.07	-	3	2	-	-	-	-
	2013	5	4	8,96	-	-	2	1	-	-	-	1
SUB TOTAL		30	61	20.671,12	14,037.99	-	27	8	3	7	11	5
Kejaksaan	2003	4	17	120,58	-	1	-	10	-	6	-	-
	2004	9	54	383,83	3,240.00	25	-	-	-	29	-	-
	2005	8	17	2.758,08	39,598.17	-	-	4	4	4	-	5
	2006	11	23	1.185,81	112,047.47	1	9	4	-	7	-	2
	2007	10	29	1.681,83	53,838.40	-	12	-	2	15	-	-
	2008	7	9	86,50	-	5	-	-	-	2	1	1
	2009	17	21	216,54	315.40	1	-	4	2	10	2	2
	2010	10	15	82,15	8,834.63	2	4	3	3	2	1	-
	2011	3	2	1,29	-	2	-	-	-	-	-	-
	2012	9	8	26,47	-	3	1	2	1	-	-	1
2013	7	6	140,71	-	1	-	-	1	-	-	4	
SUB TOTAL		95	201	6.683,79	217,874.07	41	26	27	13	75	4	15
KPK	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2006	3	8	120,33	-	-	3	-	-	5	-	-
	2007	5	5	18,76	235,214.22	-	2	-	-	3	-	-
	2008	23	38	3.627,74	26,375.63	1	23	-	1	9	-	4
	2009	22	23	402,57	1,463.99	-	6	-	4	2	-	11
	2010	13	46	394,98	453.00	2	6	-	5	-	-	33
	2011	4	4	78,51	-	-	-	2	-	-	-	2
	2012	12	8	321,01	-	1	-	1	-	1	-	5
2013	11	38	144,97	345,572.34	-	-	-	-	-	-	38	
SUB TOTAL		93	170	5.108,87	609,079.18	4	40	3	10	20	-	93
TOTAL		218	432	32.463,78	840,991.24	45	93	38	26	102	15	113
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)				10.250,82		10,42%	21,53%	8,79%	6,02%	23,61%	3,47%	26,16%
TOTAL KERUGIAN				42.714,60				73,84%				26,16%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

Berdasarkan penanganannya maka sebagaimana diungkap di atas, terdapat sebanyak 102 temuan (23,61%) telah memperoleh Putusan Pengadilan atau telah diputus oleh lembaga peradilan namun yang bersangkutan mengajukan banding. Rincian atas temuan dimaksud terdapat dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Penanganan LHP BPK mengandung unsur pidana yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Instansi Yang Berwenang	Kasus					Von/Band/Kas
	Tahun	Surat Keluar Ketua dan Anggota BPK				
		Surat	Temuan	Nilai (IDR)	Nilai (USD)	
Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-
	2004	1	10	18.964,61	-	-
	2005	1	1	103,63	-	1
	2006	1	4	391,13	3,191.92	-
	2007	5	9	1.130,88	-	5
	2008	2	2	7,96	-	-
	2009	1	1	-	-	-
	2010	2	2	16,13	-	-
	2011	6	23	17,79	-	1
	2012	6	5	30,03	10,846.07	-
	2013	5	4	8,96	-	-
SUB TOTAL		30	61	20.671,12	14,037.99	7
Kejaksaan	2003	4	17	120,58	-	6
	2004	9	54	383,83	3,240.00	29
	2005	8	17	2.758,08	39,598.17	4
	2006	11	23	1.185,81	112,047.47	7
	2007	10	29	1.681,83	53,838.40	15
	2008	7	9	86,50	-	2
	2009	17	21	216,54	315.40	10
	2010	10	15	82,15	8,834.63	2
	2011	3	2	1,29	-	-
	2012	9	8	26,47	-	-
	2013	7	6	140,71	-	-
SUB TOTAL		95	201	6.683,79	217,874.07	75
KPK	2003	-	-	-	-	-
	2004	-	-	-	-	-
	2005	-	-	-	-	-
	2006	3	8	120,33	-	5
	2007	5	5	18,76	235,214.22	3
	2008	23	38	3.627,74	26,375.63	9
	2009	22	23	402,57	1,463.99	2
	2010	13	46	394,98	453.00	-
	2011	4	4	78,51	-	-
	2012	12	8	321,01	-	1
	2013	11	38	144,97	345,572.34	-
SUB TOTAL		93	170	5.108,87	609,079.18	20
TOTAL		218	432	32.463,78	840,991.24	102
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)				10.250,82		23,61%
TOTAL KERUGIAN				42.714,60		73,84%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi kedalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

Rincian hasil pemantauan tindak lanjut LHP BPK periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013 mengandung unsur pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggarannya, yaitu Pemerintah Pusat (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah (APBD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disajikan dalam Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran periode Tahun 2003 sampai dengan Semester II Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Pengelola Anggaran	Jumlah Surat	Jumlah Temuan	Nilai		Sudah Ditindaklanjuti						Belum Ditindaklanjuti/ Tidak Ada Ket
			Rp	USD	Limpah	Penyelidikan	Penyidikan	Tuntutan/ Proses Peradilan	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	
A. LINGKUP APBN											
TAHUN 2004	4	26	19.012,82	3.240,00	15	-	-	-	1	10	-
TAHUN 2005	4	8	213,47	26.850,18	-	-	1	2	-	-	5
TAHUN 2006	4	5	72,79	4.230,00	1	1	-	-	3	-	-
TAHUN 2007	6	7	492,88	-	-	3	-	-	4	-	-
TAHUN 2008	10	16	265,55	26.375,63	3	7	1	-	4	-	1
TAHUN 2009	10	14	99,25	1.741,37	1	3	1	1	-	-	8
TAHUN 2010	2	6	111,66	453,00	-	-	2	-	-	-	4
TAHUN 2011	10	25	56,32	-	1	18	2	2	1	1	-
TAHUN 2012	14	12	302,89	10.846,07	1	3	4	-	-	-	4
TAHUN 2013	14	11	268,79	-	-	2	-	1	-	-	8
SUB TOTAL APBN	78	130	20.896,42	73.736,25	22	37	11	6	13	11	30
B. LINGKUP BUMN											
TAHUN 2005	5	10	2.648,23	12.747,99	-	-	3	2	5	-	-
TAHUN 2006	8	24	1.439,14	111.009,39	-	8	4	-	6	-	6
TAHUN 2007	6	13	2.210,61	289.052,62	-	8	-	-	5	-	-
TAHUN 2008	6	11	3.272,35	-	-	6	-	-	-	1	4
TAHUN 2009	5	7	29,54	-	-	-	-	-	7	-	-
TAHUN 2010	4	12	92,70	8.834,63	-	9	-	-	-	-	3
TAHUN 2013	2	31	13,26	345.572,34	-	-	-	-	-	-	31
SUB TOTAL BUMN	36	108	9.705,83	767.216,97	-	31	7	2	23	1	44
C. LINGKUP APBD											
TAHUN 2003	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-
TAHUN 2004	6	38	335,62	-	10	-	-	-	28	-	-
TAHUN 2006	3	6	185,35	-	-	3	-	-	3	-	-
TAHUN 2007	8	23	127,99	-	-	7	-	2	14	-	-
TAHUN 2008	16	22	184,30	-	3	10	1	1	7	-	-
TAHUN 2009	24	23	484,79	38,02	-	2	3	6	5	2	5
TAHUN 2010	18	44	286,90	-	4	-	3	8	2	1	26
TAHUN 2011	3	4	41,27	-	1	-	1	-	-	-	2
TAHUN 2012	13	9	74,62	-	3	1	1	1	1	-	2
TAHUN 2013	5	4	7,99	-	1	-	-	-	-	-	3
SUB TOTAL APBD	100	190	1.849,40	38,02	23	23	19	18	66	3	38
D. LINGKUP BUMD											
TAHUN 2009	1	1	5,54	-	-	1	-	-	-	-	-
TAHUN 2010	1	1	1,99	-	-	1	-	-	-	-	-
TAHUN 2013	2	2	4,60	-	-	-	1	-	-	-	1
SUB TOTAL BUMD	4	4	12,13	-	-	2	1	-	-	-	1
TOTAL (IDR & VALAS)			32.463,78	840.991,24	45	93	38	26	102	15	113
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	218	432	10.250,82		10,42%	21,53%	8,79%	6,02%	23,61%	3,47%	26,16%
TOTAL KERUGIAN (IDR)			42.714,60				73,84%				26,16%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Tahun 2013 sebanyak 23 surat yang mengungkapkan 48 temuan dengan nilai Rp294,64 miliar dan USD345.572,34 ribu atau total setara dengan Rp4.506,82 miliar. Rincian tindak lanjut LHP mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pada instansi berwenang yang menerima pada Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.11.

Tabel 4.11. Data Tindak Lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pada instansi berwenang yang menerima pada Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Instansi yang Berwenang	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti						Blm TL/ Tdk Ada Ket
		Surat Keluar Ketua dan Anggota BPK				Limpah	lid	Idik	Tut/ Pengad	Von / Band / Kas	SP3	
		Surat	Temuan	Nilai (IDR)	Nilai (USD)							
KEPOLISIAN RI	2013	5	4	8,96	-	-	2	1	-	-	-	1
KEJAKSAAN RI	2013	7	6	140,71	-	1	-	-	1	-	-	4
KPK	2013	11	38	144,97	345,572.34	-	-	-	-	-	-	38
TOTAL		23	48	294,64	345,572.34	1	2	1	1	-	-	43
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)					4.212,18	2,08%	4,17%	2,08%	2,08%	0,00%	0,00%	89,59%
TOTAL KERUGIAN					4.506,82				10,41%			89,59%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

Rincian LHP mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang pada Tahun 2013 berdasarkan pengelompokan pengelolaan anggarannya, yaitu Pemerintah Pusat (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah (APBD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disajikan dalam Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Data Tindak Lanjut LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang berdasarkan pengelompokan pengelola anggarannya pada Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Pengelola Anggaran	Jumlah Surat	Jumlah Temuan	Nilai		Sudah Ditindaklanjuti						Blm TL/ Tdk Ada Ket	
			Rp	USD	Limpah	lid	Idik	Tut/ Pengad	Von / Band / Kas	SP3		
A. LINGKUP APBN	14	11	268,79	-	-	2	-	1	-	-	-	8
B. LINGKUP BUMN	2	31	13,26	345,572.34	-	-	-	-	-	-	-	31
C. LINGKUP APBD	5	4	7,99	-	1	-	-	-	-	-	-	3
D. LINGKUP BUMD	2	2	4,60	-	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL (IDR & VALAS)			294,64	345,572.34	1	2	1	1	-	-	-	43
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	23	48		4.212,18	2,08%	4,17%	2,08%	2,08%	0,00%	0,00%		89,59%
TOTAL KERUGIAN (IDR)				4.506,82				10,41%				89,59%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

Laporan hasil pemantauan tindak lanjut terhadap LHP BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada Instansi yang berwenang pada Semester II Tahun 2013 adalah sebanyak 9 surat yang memuat 6 temuan senilai Rp47,67 miliar.

Rincian atas LHP BPK yang disampaikan kepada Instansi yang berwenang pada Semester II Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. LHP BPK yang disampaikan kepada Instansi yang berwenang pada Semester II Tahun 2013

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Instansi yang Berwenang	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti						Blm TL/ Tdk Ada Ket
	2013	Surat Keluar Ketua dan Anggota BPK				Limpah	lid	dik	Tut/ Pengad	Von / Band / Kas	SP3	
		Surat	Temuan	Nilai (IDR)	Nilai (USD)							
KEPOLISIAN RI	SMT II	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
KEJAKSAAN RI	SMT II	2	1	2,16	-	-	-	-	-	-	-	1
KPK	SMT II	5	4	45,51	-	-	-	-	-	-	-	4
TOTAL		9	6	47,67	-	-	-	-	-	-	-	6
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)					-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL KERUGIAN				47,67				0,00%				100,00%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2013.

LAMPIRAN

Halaman 1 - Lampiran 1

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2009 - 2013**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	Jml	Nilai	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Kementerian Pertahanan	2009	14	97	-	96	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	11	126	3.539,38	118	-	5	-	1	3.539,38	2	-	-	-	-	-
		2011	8	28	21.368,95	24	15.854,78	4	5.514,17	-	-	-	-	-	-	-	15.854,78
		2012	15	35	5.955,64	33	5.955,64	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.955,64
		2013	10	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	58	307	30.863,97	292	21.810,42	12	5.514,17	1	3.539,38	2	-	-	-	-	21.810,42
2	Mabes TNI	2009	22	35	138,91	35	138,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,91
		2010	10	14	95,94	14	95,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,94
		2011	21	43	841,56	41	732,62	-	-	-	-	2	108,94	-	-	-	732,62
		2012	23	58	495,66	57	495,66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	495,66
		2013	-	-	USD 13,42	-	USD 13,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 13,42
		Jumlah	76	150	1.572,07	147	1.463,13	1	-	-	-	2	108,94	-	-	-	1.463,13
					USD 13,42		USD 13,42										USD 13,42
3	TNI/AD	2009	1	1	0,00	0	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	1	4	0,00	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	25	10.228,67	16	8.169,06	9	2.059,61	-	-	-	-	-	-	-	6.688,10
		2012	92	159	21.542,07	123	21.152,60	32	389,47	4	-	-	-	-	-	-	3.978,36
		2013	7	8	0,00	8	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	114	197	31.770,74	148	29.321,66	45	2.449,08	4	-	-	-	-	-	-	10.666,46
4	TNI/AL	2009	10	18	649,84	18	649,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,09
		2010	22	49	2.351,12	49	2.351,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.450,78
		2011	19	24	4.754,35	17	3.393,89	6	550,46	1	810,00	-	-	-	-	-	3.393,89
		2012	74	106	2.705,18	78	2.155,67	27	-	1	549,51	-	-	-	-	-	2.172,64
		2013	8	8	111,22	8	111,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,22
		Jumlah	133	205	10.571,71	170	8.661,74	33	550,46	2	1.359,51	-	-	-	-	-	7.214,62

Halaman 2 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
5	TNI AU	2009	20	34	2.348,55	34	2.348,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.215,61		
		2010	37	58	2.066,05	58	2.066,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.463,70		
		2011	28	55	120,58	55	120,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,95		
		2012	29	37	6.108,51	30	4.118,29	7	1.250,85	-	-	-	-	739,37	-	-	-	-	4.118,29		
		2012	-	-	USD 611.05	-	USD 611.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 611.05		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	114	184	10.643,69	177	8.653,47	7	1.250,85	-	-	-	-	739,37	-	-	-	-	7.851,55		
					USD 611.05		USD 611.05		-		-		-	-		-		-	USD 611.05		
6	Kementerian Luar Negeri	2009	112	145	645.556,08	131	645.708,43	10	1.815,50	4	32,15	-	-	-	-	-	-	-	646.502,65		
					USD 1.597,42		USD 1.597,42		-		-		-	-		-		-	USD 1.549,22		
					EUR 0,40		EUR 0,40		-		-		-	-		-		-	EUR 0,40		
		2010	104	145	38.524,27	124	36.266,13	17	2.080,56	4	177,58	-	-	-	-	-	-	-	35.027,82		
					-		-		-		-		-	-		-		-	-		
		2011	155	230	12.098,94	165	3.847,15	40	2.332,27	24	5.849,82	1	69,70	-	-	-	-	-	2.981,39		
					USD 12,69		USD 7,42		-		USD 5,27		-			-			-		
					EUR 2,03		EUR 2,03		-		-		-			-			-		
					RON 7,16		RON 7,16		-		-		-			-			-		
		2012	160	269	2.618,26	136	1.415,53	53	103,84	80	1.098,89	-	-	-	-	-	-	-	1.279,63		
					USD 290,08		USD 65,17		-		USD 224,91		-			-			-		
					AUD 28,59		AUD 28,59		-		-		-			-			-		
					PLN 54,42		PLN 54,42		-		-		-			-			-		
		2013	75	127	5.740,95	28	30,28	10	5.660,16	81	50,51	8	-	-	-	-	-	-	140,00		
					USD 149,59		USD 140,00		USD 9,59		-		-			-			-		
					AUD 1,38		AUD 1,38		-		-		-			-			-		
		Jumlah	606	916	706.538,50	584	687.267,52	130	11.992,33	193	7.208,95	9	69,70	-	-	-	-	-	685.791,49		
					USD 2.049,78		USD 1.810,01		USD 9,59		USD 230,18		-			-			USD 1.689,22		
					EUR 2,43		EUR 2,43		-		-		-			-			EUR 0,40		
					RON 7,16		RON 7,16		-		-		-			-			-		
					AUD 29,97		AUD 29,97		-		-		-			-			-		
					PLN 54,42		PLN 54,42		-		-		-			-			AUD 0,38		

Halaman 3 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Dibtindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Dibtindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2009	27	39	1.435,64	12	1.435,64	14	-	13	-	-	-	1.435,64		
		2010	37	89	64.987,88	25	1.037,35	47	47.796,15	17	16.154,38	-	-	1.048,65		
		2011	35	66	44.858,55	18	8.311,57	26	26.711,06	22	9.835,92	-	-	8.311,57		
		2012	30	87	123.076,68	30	51.723,98	46	19.352,67	11	52.000,03	-	-	51.723,98		
			-	-	USD 13.72	-	-	-	USD 13.72	-	-	-	-	-		
			-	-	KRW 3,075,01	-	-	-	KRW 3,075,01	-	-	-	-	-		
			-	-	SGD 0,24	-	-	-	SGD 0,24	-	-	-	-	-		
		2013	52	120	26.487,90	38	2.874,31	52	23.613,59	30	-	-	-	2.874,31		
		Jumlah	181	401	260.846,65	123	65.382,85	185	117.473,47	93	77.990,33	-	-	65.394,15		
					USD 13.72				USD 13.72							
					KRW 3,075,01				KRW 3,075,01							
					SGD 0,24				SGD 0,24							
8	Wantannas	2009	7	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	5	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	5	5	3,52	5	3,52	-	-	-	-	-	-	3,52		
		2012	8	21	5,18	1	5,18	4	-	16	-	-	-	5,18		
		2013	5	10	445,55	-	-	-	-	10	445,55	-	-	-		
		Jumlah	30	58	454,25	28	8,70	4	-	26	445,55	-	-	8,70		
9	BIN	2009	14	21	11,26	21	11,26	-	-	-	-	-	-	11,26		
		2010	11	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	4	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	4	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	4	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-		
		Jumlah	37	57	11,26	50	11,26	-	-	7	-	-	-	11,26		
10	Lemsaneg	2009	18	44	1.047,20	38	870,44	6	23,42	-	-	-	153,34	892,44		
		2010	8	13	-	12	-	1	-	-	-	-	-	331,74		
		2011	8	18	777,75	17	171,61	1	-	-	-	-	606,14	171,61		
		2012	9	13	-	11	-	2	-	-	-	-	-	2.673,16		
		2013	6	19	151,72	-	-	-	-	19	151,72	-	-	-		
		Jumlah	49	107	1.976,67	78	1.042,05	10	23,42	19	151,72	-	759,48	4.068,95		

Halaman 4 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah				
				Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Lemhannas	2009	8	11	94,98	11	94,98	-	-	-	-	-	-	94,98
		2010	5	11	24,12	11	24,12	-	-	-	-	-	-	24,12
		2011	6	6	60,50	6	60,50	-	-	-	-	-	-	60,50
		2012	7	10	165,69	7	165,69	3	-	-	-	-	-	165,69
		2013	7	7	276,52	-	-	-	-	-	276,52	-	-	-
		Jumlah	33	45	621,81	35	345,29	3	-	7	276,52	-	-	345,29
12	Menko Polhukam	2009	15	34	243,71	34	243,71	-	-	-	-	-	-	243,71
		2010	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	12	418,53	10	32,22	-	-	2	386,31	-	-	32,22
		2012	11	16	290,80	16	290,80	-	-	-	-	-	-	894,75
		2013	8	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1.130,12
		Jumlah	46	80	953,04	67	566,73	-	-	13	386,31	-	-	2.300,80
13	Kementerian Dalam Negeri	2009	38	95	10.449,13	89	9.449,26	5	999,87	-	-	-	-	9.449,26
		2010	87	192	20.874,68	163	18.829,62	27	1.355,72	1	-	1	689,34	15.109,78
		2011	65	147	46.336,09	113	40.530,33	30	5.805,76	4	-	-	-	13.286,13
		2012	45	122	148.314,56	54	76.391,97	68	71.922,59	-	-	-	-	55.738,27
		2013	44	96	68.183,91	53	19.547,25	43	48.636,66	-	-	-	-	19.842,37
		Jumlah	279	652	294.158,37	472	164.748,43	173	128.720,60	5	-	2	689,34	113.425,81
14	Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	2009	6	13	699,83	7	132,89	6	566,94	-	-	-	-	132,89
		2010	7	10	158,40	9	158,40	1	-	-	-	-	-	158,40
		2011	4	5	399,50	5	399,50	-	-	-	-	-	-	399,50
		2012	9	15	85,93	12	85,93	3	-	-	-	-	-	85,93
		2013	28	65	4.015,59	31	187,15	16	3.828,44	18	-	-	-	187,15
		Jumlah	54	108	5.359,25	64	963,87	26	4.395,38	18	-	-	-	963,87

Halaman 5 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	Kementerian Sekretariat Negara	2009	24	38	23.283,05	24	4.353,87	14	18.892,43	-	-	-	-	4.353,87	
		2010	21	25	-	20	-	5	-	-	-	-	-	-	
		2011	40	55	3.178,16	39	660,30	12	2.457,59	-	-	4	60,27	660,30	
		2012	132	182	13.915,25	92	829,75	71	13.085,50	-	-	19	-	824,57	
		2013	31	63	731,61	30	408,08	14	181,42	19	142,11	-	-	408,08	
		Jumlah	248	363	41.108,07	205	6.252,00	116	34.616,94	19	178,86	23	60,27	6.246,82	
			-	-	USD 10,54	-	-	-	USD 10,54	-	-	-	-	-	
16	TMII	2009	12	21	138,60	20	138,60	1	-	-	-	-	-	138,60	
		2010	9	13	15.524,00	9	15.524,00	4	-	-	-	-	-	15.524,00	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	21	34	15.662,60	29	15.662,60	5	-	-	-	-	-	15.662,60	
17	BKN	2009	3	3	313,40	3	313,40	-	-	-	-	-	-	7,45	
		2010	12	36	150,92	23	150,92	13	-	-	-	-	-	150,92	
		2011	6	11	400,94	10	371,57	1	29,37	-	-	-	-	391,00	
		2012	11	14	1.024,52	12	660,02	2	364,50	-	-	-	-	169,77	
		2013	16	37	12,76	14	12,76	3	-	20	-	-	-	12,76	
		Jumlah	48	101	1.902,54	62	1.508,67	19	393,87	20	-	-	-	731,90	
18	BPN	2009	38	75	1.988,46	68	1.988,46	6	-	1	-	-	-	1.988,46	
		2010	42	62	2.168,82	60	2.168,82	2	-	-	-	-	-	2.169,13	
		2011	53	65	816,39	61	816,39	4	-	-	-	-	-	810,79	
		2012	38	55	2.176,01	39	1.314,63	9	861,38	7	-	-	-	615,00	
		2013	13	16	72,84	15	72,84	1	-	-	-	-	-	1.493,73	
		Jumlah	184	273	7.222,52	243	6.361,14	22	861,38	8	-	-	-	7.077,11	
19	LAN	2009	2	2	226,77	1	220,77	1	6,00	-	-	-	-	-	
		2010	7	16	315,75	15	315,75	1	-	-	-	-	-	293,25	
		2011	16	31	132,27	21	132,27	9	-	1	-	-	-	132,27	

Halaman 6 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		2012	8	20	1.817,54	20	1.817,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.817,54	
			-	-	USD 0,52	-	USD 0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 0,52	
		2013	9	15	186,42	15	186,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,42	
		Jumlah	42	84	2.678,75	72	2.672,75	11	6,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.429,48	
			-	-	USD 0,52	-	USD 0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 0,52	
20	Arsip Nasional	2009	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	7	9	1.005,47	9	1.005,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740,10	
		2011	8	12	475,87	12	475,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475,87	
		2012	8	11	80,06	10	80,06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,58	
		2013	13	31	191,02	24	191,02	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194,02	
		Jumlah	40	68	1.752,42	60	1.752,42	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.496,57	
21	KPU	2009	255	529	269.928,68	384	135.152,27	137	133.404,55	5	1.199,56	3	172,30	-	-	-	-	-	50.623,19	
		2010	9	22	4.592,24	20	1.550,69	2	3.041,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.550,69	
		2011	13	30	5.422,16	23	625,02	7	4.797,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557,58	
		2012	9	22	1.134,83	14	420,71	8	714,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,47	
		2013	9	19	1.316,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	295	622	282.394,79	441	137.748,69	154	141.957,36	24	2.516,44	3	172,30	-	-	-	-	-	52.791,93	
22	Kementerian Hukum dan HAM	2009	77	166	4.100,45	166	4.100,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.926,05	
		2010	62	136	3.239,61	128	2.909,62	8	329,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.898,45	
		2011	28	65	2.320,96	63	1.767,16	2	553,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.753,44	
		2012	99	205	4.638,74	188	3.992,75	14	645,99	3	-	-	-	-	-	-	-	-	16.707,11	
		2013	68	169	14.690,05	108	3.735,43	49	10.627,85	12	326,77	-	-	-	-	-	-	-	15.114,29	
		Jumlah	334	741	28.989,81	653	16.505,41	73	12.157,63	15	326,77	-	-	-	-	-	-	-	40.399,34	
23	Kejaksaan RI	2009	145	306	5.432.778,73	134	177.833,57	40	62.638,95	132	5.192.306,21	-	-	-	-	-	-	-	14.516,12	
			-	-	USD 293,631,75	-	-	-	USD 34,95	-	USD 293,596,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	78	158	43.363,57	47	1.123,50	15	4.894,56	96	37.345,51	-	-	-	-	-	-	-	1.123,50	
			-	-	USD 5,00	-	-	-	USD 5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	81	227	28.381,98	126	1.736,36	15	8.406,78	86	18.238,84	-	-	-	-	-	-	-	903,78	
			-	-	USD 9,63	-	-	-	USD 9,63	-	USD 9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	THB 25,00	-	THB 25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 7 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2012	61	148	1.173,35	59	980,40	11	134,94	78	58,01	-	-	744,63
		2013	49	134	9.312,24	22	5,76	4	244,43	108	9.062,05	-	-	-
		Jumlah	414	973	5.515.009,87	388	181.679,59	85	76.319,66	500	5.257.010,62	-	-	17.288,03
			-	-	USD 293,680,78	-	THB 25,00	-	USD 39,95	-	USD 293,640,83	-	-	-
			49	134	THB 25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	POLRI	2009	118	171	6.057,59	170	6.057,59	1	-	-	-	-	-	3.861,26
		2010	87	128	13.663,90	122	13.193,29	6	470,61	-	-	-	-	9.901,80
		2011	52	115	31.580,10	112	31.443,61	3	136,49	-	-	-	-	28.890,68
		2012	68	151	26.354,00	137	25.906,01	10	447,99	4	-	-	-	7.325,88
		2013	79	-	37.376,39	541	11.110,50	20	25.755,60	4	510,29	-	-	5.416,56
		Jumlah	404	565	115.031,98	541	87.711,00	20	26.810,69	4	510,29	-	-	55.396,18
25	Komnas HAM	2009	18	30	680,03	25	4,99	4	648,20	1	26,84	-	-	4,99
		2010	5	11	2,74	11	2,74	-	-	-	-	-	-	2,74
		2011	6	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	73,52
		2012	4	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	5	8	77,86	-	-	-	-	8	77,86	-	-	-
		Jumlah	38	66	760,63	53	7,73	4	648,20	9	104,70	-	-	81,25
26	Mahkamah Konstitusi	2009	5	8	121,85	8	121,85	-	-	-	-	-	-	121,85
		2010	6	13	86,98	13	86,98	-	-	-	-	-	-	86,98
		2011	3	7	196,79	7	196,79	-	-	-	-	-	-	196,79
		2012	6	13	173,68	13	173,68	-	-	-	-	-	-	173,68
		2013	7	14	332,76	14	332,76	-	-	-	-	-	-	332,76
		Jumlah	27	55	912,06	55	912,06	-	-	-	-	-	-	912,06
27	MPR	2009	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	3	5	29,02	5	29,02	-	-	-	-	-	-	29,02
		2013	5	9	21,21	5	21,21	4	-	-	-	-	-	21,21
		Jumlah	18	24	50,23	19	50,23	5	-	-	-	-	-	50,23

Halaman 8 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
28	DPR	2009	17	28	32.614,86	25	32.599,87	3	14,99	-	-	-	-	3.801,46		
		2010	7	13	326,45	13	326,45	-	-	-	-	-	-	326,45		
		2011	21	30	24.415,00	18	7.750,70	12	16.664,30	-	-	-	-	7.750,70		
		2012	20	38	3.347,40	22	1.332,23	16	2.015,17	-	-	-	-	1.332,23		
		2013	26	49	2.640,74	22	1.246,76	27	1.393,98	-	-	-	-	1.246,76		
		Jumlah	91	158	63.344,45	100	43.256,01	58	20.088,44	-	-	-	-	14.457,60		
29	DPD	2009	8	8	33,19	8	33,19	-	-	-	-	-	-	33,19		
		2010	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	230,01		
		2011	7	11	1.358,80	10	3,02	1	1.355,78	-	-	-	-	206,72		
		2012	5	10	126,41	10	126,41	-	-	-	-	-	-	126,41		
		2013	6	8	5,24	1	5,24	7	-	-	-	-	-	5,24		
		Jumlah	30	41	1.523,64	33	167,86	8	1.355,78	-	-	-	-	601,57		
30	Mahkamah Agung	2009	21	40	98,73	39	98,73	-	-	-	-	1	-	98,73		
		2010	44	79	795,86	77	762,36	1	33,50	-	-	1	-	1.004,33		
		2011	56	100	2.418,52	90	1.472,41	10	946,11	-	-	-	-	1.556,43		
		2012	43	78	1.517,59	57	1.130,78	21	386,81	-	-	-	-	1.046,12		
		2013	25	42	1.813,08	24	1.115,31	18	697,77	-	-	-	-	1.084,19		
		Jumlah	189	339	6.643,78	287	4.579,59	50	2.064,19	-	-	2	-	4.789,80		
31	Komisi Yudisial	2009	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	8	10	26,81	10	26,81	-	-	-	-	-	-	16,10		
		2011	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3,65		
		2012	4	8	55,28	8	55,28	-	-	-	-	-	-	55,28		
		2013	7	13	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	26	39	82,09	39	82,09	-	-	-	-	-	-	75,03		
32	KPK	2009	8	10	160,78	10	107,59	-	-	-	-	-	53,19	50,03		
		2010	7	8	47,15	7	47,15	1	-	-	-	-	-	4,00		
		2011	6	11	173.812,37	10	173.812,37	1	-	-	-	-	-	-		
		2012	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	24	32	174.020,30	28	173.967,11	4	-	-	-	-	53,19	54,03		

Halaman 9 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan negara/ daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
33	PPATK	2009	3	3	6.196,69	3	6.196,69	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	15	15	2.032,96	15	2.032,96	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	8	10	305,10	8	305,10	2	-	-	-	-	-	-	
		2012	6	6	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	
		2013	4	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	8,94	
		Jumlah	36	40	8.534,75	30	8.534,75	2	-	8	-	-	-	8,94	
34	BNN	2009	10	17	2.281,99	17	2.281,99	-	-	-	-	-	-	2.034,36	
		2010	14	32	421,54	31	421,54	1	-	-	-	-	-	421,54	
		2011	14	27	1.334,38	25	1.156,21	2	178,17	-	-	-	-	1.057,80	
		2012	13	20	4.418,25	19	4.418,25	1	-	-	-	-	-	3.523,41	
		2013	13	25	870,87	18	280,17	6	590,70	1	-	-	-	257,40	
		Jumlah	64	121	9.327,03	110	8.558,16	10	768,87	1	-	-	-	7.294,51	
35	Kementerian Pertanian	2009	33	55	2.064,48	54	2.064,48	1	-	-	-	-	-	2.064,48	
		2010	55	91	12.988,71	73	12.988,71	4	-	13	-	1	-	11.947,09	
		2011	80	122	22.187,21	106	21.222,33	13	964,88	2	-	1	-	20.517,82	
		2012	87	144	332.542,26	59	201.400,90	38	131.141,36	47	-	-	-	54.083,97	
		2013	46	81	53.337,55	25	17.307,34	55	36.030,21	1	-	-	-	6.839,52	
		Jumlah	301	493	423.120,21	317	254.983,76	111	168.136,45	63	-	2	-	95.452,88	
36	Kementerian Kehutanan	2009	118	210	491.162,86	136	66.369,12	66	424.793,74	7	-	1	-	37.783,77	
		2010	78	111	74.779,05	60	14.183,98	28	55.968,08	9	4.486,11	14	140,88	13.662,60	
		2011	52	80	6.483.924,46	44	127.929,36	36	6.355.995,10	-	USD 4.000	-	-	127.865,53	
		2012	106	133	7.983,64	61	2.981,17	72	5.002,47	-	-	-	-	372,77	
		2013	38	57	45.374,80	23	18.731,79	20	26.643,01	14	-	-	-	21.423,42	
		Jumlah	392	591	7.103.224,81	324	230.195,42	222	6.868.402,40	30	4.486,11	15	140,88	201.108,09	
			-	-	USD 14.427,59	-	USD 3.914,69	-	USD 10.077,77	-	USD 435,13	-	-	USD 348,66	

Halaman 10 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah				
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2009	36	66	1.990,35	48	1.922,46	18	67,89	-	-	-	-	1.922,46
		2010	36	55	3.024,60	43	2.520,86	12	503,74	-	-	-	-	2.520,86
		2011	42	54	6.312,97	26	3.815,10	27	126,30	-	-	1	2.371,57	3.815,10
		2012	56	86	9.332,11	39	2.139,31	45	2.303,77	2	4.889,03	-	-	1.877,36
		2013	27	29	1.614,24	12	1.370,52	17	243,72	-	-	-	-	1.370,52
		Jumlah	197	290	22.274,27	168	11.768,25	119	3.245,42	2	4.889,03	1	2.371,57	11.506,30
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2009	156	362	83.686,20	296	80.991,60	32	2.142,21	34	552,39	-	-	83.900,36
		2010	102	239	26.644,09	167	24.017,46	41	469,48	29	3.563,25	-	2.157,15	23.988,83
		2011	62	152	50.427,83	88	37.665,06	50	9.199,52	14	11,67	-	-	31.704,37
		2012	62	136	770.569,15	86	103.301,19	36	667.256,29	14	11,67	-	-	15.490,27
		2013	81	184	31.511,33	130	29.156,10	30	2.355,23	24	-	-	-	8.093,80
		Jumlah	463	1.073	962.838,60	767	275.131,41	189	681.422,73	115	4.127,31	2	2.157,15	163.177,63
39	Kementerian Perhubungan	2009	33	50	658,98	48	658,98	2	-	-	-	-	-	767,06
		2010	84	147	24.768,55	132	18.164,61	15	6.578,83	-	-	-	25,11	18.164,61
		2011	44	77	10.600,32	49	10.302,82	8	206,36	20	91,14	-	-	10.302,82
		2012	66	139	13.115,05	99	5.657,78	25	7.271,14	15	83,59	-	102,54	17.534,28
			-	-	USD 145,13	-	-	-	-	-	USD 145,13	-	-	-
		2013	25	58	350.544,14	9	248.616,73	23	101.721,97	26	-	-	205,44	252.729,12
		Jumlah	252	471	399.687,04	337	283.400,92	73	115.778,30	61	174,73	-	333,09	299.497,89
			-	-	USD 145,13	-	-	-	-	-	USD 145,13	-	-	-
40	Kemenpera	2009	3	3	228,37	3	228,37	-	-	-	-	-	-	228,37
		2010	23	26	1.197,85	22	1.197,85	4	-	-	-	-	-	1.197,85
		2011	21	27	403,25	19	403,25	7	-	1	-	-	-	403,25
		2012	28	41	10.903,75	17	2.933,64	18	7.970,11	6	-	-	-	2.933,64
		2013	36	47	172.623,73	9	169.411,87	7	1.480,72	31	1.731,14	-	-	169.411,87
		Jumlah	111	144	185.356,95	70	174.174,98	36	9.450,83	38	1.731,14	-	-	174.175,14

Halaman 11 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Jml	Nilai		
							Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Bapertanum	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	7	41.145,88	2	874,54	5	40.271,34	-	-	-	-	874,54
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	7	41.145,88	2	874,54	5	40.271,34	-	-	-	-	874,54
42	Kementerian PDT	2009	8	25	-	23	-	2	-	-	-	-	-	-
		2010	14	22	1.336,99	21	1.336,99	1	-	-	-	-	-	1.336,99
		2011	16	31	1.684,20	26	1.457,64	4	226,56	-	-	1	-	1.457,64
		2012	18	39	2.315,95	33	2.315,95	6	-	-	-	-	-	9.452,89
		2013	14	40	5.899,85	34	5.395,50	6	504,35	-	-	-	-	5.747,15
		Jumlah	70	157	11.236,99	137	10.506,08	19	730,91	-	-	1	-	17.994,67
43	BMKG	2009	12	21	191,07	21	191,07	-	-	-	-	-	-	191,07
		2010	19	39	3.143,81	39	3.143,81	-	-	-	-	-	-	790,78
		2011	9	16	19,80	16	19,80	-	-	-	-	-	-	19,80
		2012	8	12	490,43	12	490,43	-	-	-	-	-	-	490,43
		2013	11	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	618,81
		Jumlah	59	106	3.845,11	88	3.845,11	-	-	18	-	-	-	2.110,89
44	Kementerian Perindustrian	2009	16	20	1.704,40	20	1.704,40	-	-	-	-	-	-	1.111,41
		2010	12	17	222,81	17	222,81	-	-	-	-	-	-	222,81
		2011	13	13	-	10	-	3	-	-	-	-	-	417,60
		2012	34	47	132,20	31	132,20	9	-	7	-	-	-	725,29
		2013	17	28	2.142,13	-	-	-	-	28	2.142,13	-	-	933,11
		Jumlah	92	125	4.201,54	78	2.059,41	12	-	35	2.142,13	-	-	3.410,22
45	Kementerian Perdagangan	2009	18	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	31	47	3.722,64	34	2.486,48	13	1.236,16	-	-	-	-	1.186,28
		2011	26	48	1.580,06	20	1.580,06	1	-	27	-	-	-	2.300,02
		2012	20	32	862,21	21	862,21	20	-	11	-	-	-	633,81
		2013	11	20	46,59	2	46,59	-	-	18	-	-	-	1.256,18
		Jumlah	106	186	6.211,50	116	4.975,34	14	1.236,16	56	-	-	-	5.376,29

Halaman 12 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
				Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
46	Kementerian Kop. & UKM	2009	24	38	6.084,75	27	500,00	10	2.237,95	-	-	1	3.346,80	-		
		2010	16	32	19.471,60	31	17.468,98	1	2.002,62	-	-	-	-	17.468,98		
		2011	18	20	5.208,84	18	4.898,42	2	310,42	-	-	-	-	1.075,44		
		2012	9	13	-	11	-	2	-	-	-	-	-	884,73		
		2013	24	57	29.367,76	-	-	-	-	57	29.367,76	-	-	4.944,28		
		Jumlah	91	160	60.132,95	87	22.867,40	15	4.550,99	57	29.367,76	1	3.346,80	24.373,43		
47	BSN	2009	4	5	300,78	5	300,78	-	-	-	-	-	-	300,78		
		2010	7	10	11,55	10	11,55	-	-	-	-	-	-	11,55		
		2011	14	27	59,23	27	59,23	-	-	-	-	-	-	59,23		
		2012	5	10	216,23	10	216,23	-	-	-	-	-	-	216,23		
		2013	8	13	640,51	-	-	-	-	13	640,51	-	-	286,32		
		Jumlah	38	65	1.228,30	52	587,79	-	-	13	640,51	-	-	874,11		
48	BKPM	2009	2	2	8,60	2	8,60	-	-	-	-	-	-	8,60		
		2010	15	24	-	19	-	4	-	1	-	-	-	-		
		2011	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	3	3	79,62	3	79,62	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	4	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	637,84		
		Jumlah	27	39	88,22	27	88,22	4	-	8	-	-	-	646,44		
49	Kementerian ESDM	2009	34	42	384,46	37	83,12	5	301,34	-	-	-	-	83,12		
		2010	57	95	251.503,29	78	130.747,45	16	111.856,95	-	-	1	8.898,89	132.151,88		
		2011	31	51	97.927,02	32	26.135,98	19	71.791,04	-	-	-	-	USD 22,865,36		
		2012	25	32	4.515,10	18	2.684,89	14	1.830,21	-	-	-	-	USD 19,328,50		
		2013	23	41	332.089,56	6	-	35	332.089,56	-	-	-	-	USD 1,274,17		
		Jumlah	170	261	686.419,43	171	159.651,44	89	517.869,10	-	-	1	8.898,89	208.712,83		
			-	-	USD 88,346,17	-	USD 30,626,62	-	USD 46,932,60	-	-	-	USD 10,787,05	USD 43,476,54		

Halaman 13 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi Tindak Lanjut		Belum Dibindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	Kementerian Lingkungan Hidup	2009	60	1.680,79	110	457,16	15	1.223,63	-	-	-	-	-	604,54
		2010	16	20.109,49	28	5.004,45	-	-	-	-	-	1	15.105,04	5.002,93
		2011	20	2.867,82	31	2.867,82	2	-	-	-	-	-	-	3.831,05
		2012	26	211,54	14	211,54	15	-	-	2	-	-	-	374,81
		2013	9	-	7	-	6	-	-	-	-	-	-	1.046,48
		Jumlah	131	24.869,64	190	8.540,97	38	1.223,63	2	-	-	1	15.105,04	10.859,81
51	Kementerian BUMN	2009	8	165,79	8	165,79	-	-	-	-	-	-	-	165,79
		2010	9	61,20	9	61,20	-	-	-	-	-	-	-	61,20
		2011	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	-	11	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2013	20	215,74	-	215,74	-	-	36	-	215,74	-	-	-
		Jumlah	52	442,73	33	226,99	2	-	36	-	215,74	-	-	226,99
52	Kementerian Ristek	2009	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		2010	11	116,23	12	116,23	2	-	-	-	-	-	-	116,23
		2011	14	928,30	26	928,30	5	-	1	-	-	-	-	928,30
		2012	21	5.099,67	35	5.099,67	6	-	-	-	-	-	-	282,11
		2013	10	0,33	12	0,33	3	-	-	3	-	-	-	0,33
		Jumlah	63	6.144,53	91	6.144,53	17	-	4	-	-	-	-	1.326,97
53	BPPT	2009	9	315,65	10	315,65	-	-	-	-	-	-	-	160,75
		2010	23	26.156,71	33	26.156,71	1	-	-	-	-	-	-	25.113,74
		2011	12	288,16	22	288,16	1	-	-	-	-	-	-	288,16
		2012	15	1.037,93	35	914,50	3	123,43	-	-	-	-	-	906,03
		2013	12	2.821,47	19	1.637,23	5	1.184,24	-	-	-	-	-	1.637,23
		Jumlah	71	30.619,92	119	29.312,25	10	1.307,67	-	-	-	-	-	28.105,91
54	LPI	2009	8	35,80	7	35,80	1	-	-	-	-	-	-	35,80
		2010	17	7.204,58	13	1.137,29	4	6.067,29	-	-	-	-	-	1.137,37
		2011	28	892,25	52	744,85	7	147,40	-	-	-	-	-	744,85
		2012	11	449,89	9	133,66	10	104,88	-	-	211,35	-	-	133,66
		2013	20	2.421,36	20	469,37	30	1.951,99	-	-	-	-	-	469,37
		Jumlah	84	11.003,88	101	2.520,97	52	8.271,56	-	-	211,35	-	-	2.521,05

Halaman 14 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	BATAN	2009	14	24	234,82	24	234,82	-	-	-	-	-	-	234,82
		2010	9	12	82,06	12	82,06	-	-	-	-	-	-	82,06
		2011	15	25	194,74	25	194,74	-	-	-	-	-	-	194,74
		2012	13	34	895,02	29	635,45	5	259,57	-	-	-	-	635,45
		2013	18	48	2.483,81	27	2.263,27	21	220,54	-	-	-	-	2.263,27
		Jumlah	69	143	3.890,45	117	3.410,34	26	480,11	-	-	-	-	3.410,34
56	BAPETEN	2009	6	7	17,90	6	17,90	1	-	-	-	-	-	17,90
		2010	9	15	73,22	11	25,00	4	48,22	-	-	-	-	25,00
			-	-	USD 222,15	-	USD 222,15	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	14	73,24	13	71,95	1	1,29	-	-	-	-	71,95
		2012	11	25	104,04	20	32,75	5	71,29	-	-	-	-	32,75
		2013	12	32	169,65	24	38,32	4	-	-	131,33	-	-	38,32
		Jumlah	47	93	438,05	74	185,92	15	120,80	4	131,33	-	-	185,92
			-	-	USD 222,15	-	USD 222,15	-	-	-	-	-	-	-
57	Badan Informasi Geospasial	2009	4	6	69,65	6	69,65	-	-	-	-	-	-	74,31
		2010	13	13	350,56	12	311,93	1	38,63	-	-	-	-	332,13
		2011	16	24	4.485,99	11	3.721,02	4	764,97	9	20,56	-	-	3.719,82
		2012	10	27	3.382,29	3	1.876,30	19	1.485,43	5	-	-	-	1.857,08
		2013	19	44	9.337,96	21	1.024,37	10	66,36	13	8.247,23	-	-	1.024,37
		Jumlah	62	114	17.626,45	53	7.003,27	34	2.355,39	27	8.267,79	-	-	7.007,71
58	LAPAN	2009	6	7	289,69	5	6,61	2	283,08	-	-	-	-	6,61
		2010	23	29	409,45	26	358,86	2	41,11	1	9,48	-	-	358,86
		2011	17	36	9.732,29	30	137,14	6	9.595,15	-	-	-	-	137,14
		2012	9	21	1.932,02	13	99,71	7	1.832,31	1	-	-	-	99,71
		2013	14	44	3.692,24	21	325,36	22	3.366,88	1	-	-	-	325,36
		Jumlah	69	137	16.055,69	95	927,68	39	15.118,53	3	9,48	-	-	927,68

Halaman 15 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	Kementerian Agama	2009	86	183	65.226,04	101	25.901,67	66	39.248,88	12	-	4	75,49	25.336,66
		2010	154	341	40.902,89	193	28.771,98	38	7.104,93	109	4.925,68	1	100,30	16.871,75
			-	-	USD 270,53		USD 262,87		USD 0,71		USD 6,95			USD 262,87
		2011	119	248	JPY 150.835,50	-	JPY 150.835,50	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	22.323,01	129	9.320,74	103	13.002,27	16	-	-	-	107.152,50
		2012	73	138	USD 1.05	60	7.477,89	74	6.834,73	4	-	-	-	USD 1.05
			-	-	14.312,62		USD 0,09		USD 128,47		-	-	-	6.758,72
		2013	94	190	USD 128,56	65	16.003,97	90	42.436,65	35	-	-	-	USD 0,09
			-	-	58.524,11		USD 0,16		83,49		-	-	-	13.836,27
		Jumlah	526	1.100	USD 0,28	548	87.476,25	371	108.627,46	176	5.009,17	5	175,79	169.955,90
			-	-	201.288,67		USD 264,17		USD 129,30		USD 6,95			USD 264,17
			-	-	USD 400,42		JPY 150.835,50		-		-			-
			-	-	JPY 150.835,50		-		-		-			-
60	Kementerian Sosial	2009	28	45	7.029,72	37	2.612,42	7	4.417,30	1	-	-	-	5.591,79
		2010	42	49	10.850,29	29	775,35	19	9.240,44	1	834,50	-	-	1.914,49
		2011	20	31	2.127,44	23	1.971,05	8	156,39	-	-	-	-	2.531,05
		2012	29	46	2.378,87	19	1.265,46	24	1.113,41	3	-	-	-	1.202,46
		2013	33	51	2.698,39	38	1.975,48	12	722,91	1	-	-	-	1.435,36
		Jumlah	152	222	25.084,71	146	8.599,76	70	15.650,45	6	834,50	-	-	12.675,15
61	BN Penanggulangan Bencana	2009	11	19	7.749,04	18	7.749,04	1	-	-	-	-	-	9.235,28
		2010	15	27	424,26	27	424,26	-	-	-	-	-	-	424,26
			-	-	USD 0,06		USD 0,06		-		-			USD 0,06
		2011	59	98	24.406,38	17	8.725,86	64	15.652,87	17	27,65	-	-	23.717,10
		2012	27	38	7.097,79	30	2.759,61	7	4.338,18	1	-	-	-	2.566,41
		2013	19	44	693.112,52	32	16.225,44	7	676.816,09	5	70,99	-	-	1.643,12
		Jumlah	131	226	732.789,99	124	35.884,21	79	696.807,14	23	98,64	-	-	37.586,17
			-	-	USD 0,06		USD 0,06		-		-			USD 0,06
62	Kemrenko Kesra	2009	15	31	65.103,70	7	2.942,77	12	14.306,02	12	47.854,91	-	-	2.992,05
		2010	16	17	234,48	7	188,35	2	46,13	8	-	-	-	188,35
		2011	5	7	870,56	2	147,98	3	722,58	2	-	-	-	147,98

Halaman 16 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
		2012	19	23	707,97	8	296,03	4	321,45	11	88,59	-	1,90	296,03							
			-	-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	-	-	-	-	-	USD 0,05							
		2013	13	21	439,03	3	51,89	2	116,50	16	270,64	-	-	51,89							
		Jumlah	68	99	67.355,74	27	3.627,02	23	15.512,68	49	48.214,14	-	1,90	3.676,30							
			-	-	USD 0,05	-	USD 0,05	-	-	-	-	-	-	USD 0,05							
63	KPP & PA	2009	2	2	54,54	2	54,54	-	-	-	-	-	-	54,54							
		2010	12	14	5.002,28	14	5.002,28	-	-	-	-	-	-	164,24							
		2011	10	16	259,34	15	259,34	1	-	-	-	-	-	259,34							
		2012	10	24	182,60	22	182,60	2	-	-	-	-	-	182,60							
		2013	17	45	156,15	26	156,15	19	-	-	-	-	-	172,00							
		Jumlah	51	101	5.654,91	79	5.654,91	22	-	-	-	-	-	832,72							
64	Kementerian Kesehatan	2009	72	103	78.730,09	65	2.927,64	35	40.605,72	1	-	-	-	2.931,11							
		2010	53	93	22.107,13	59	20.447,82	34	1.659,31	-	-	-	-	35.196,73							
		2011	116	235	267.652,29	82	130.559,87	145	136.900,10	8	192,32	-	-	20.059,56							
		2012	43	148	948.900,21	44	3.398,12	103	838.341,78	1	107.160,31	-	-	14.415,90							
		2013	73	140	175.877,15	38	19.465,81	72	4.264,17	29	152.147,17	1	-	19.892,45							
		Jumlah	357	719	1.493.266,87	288	176.799,26	389	1.021.771,08	39	259.499,80	3	35.196,73	60.499,16							
65	Kementerian Nakertrans	2009	29	43	113,90	10	52,92	10	60,98	23	-	-	-	52,92							
			-	-	USD 203,60	-	USD 16,80	-	USD 2,40	-	USD 184,40	-	-	USD 16,80							
		2010	38	56	10.005,42	36	1.750,72	14	8.254,70	6	-	-	-	1.758,08							
		2011	63	164	22.163,42	41	19.517,15	19	2.646,27	104	-	-	-	18.430,05							
		2012	78	168	42.033,85	45	29.551,15	46	12.279,02	77	203,68	-	-	8.562,41							
		2013	19	44	16.990,14	7	3.685,93	30	13.304,21	7	-	-	-	3.699,51							
		Jumlah	227	475	91.306,73	139	54.557,87	119	36.545,18	217	203,68	-	-	32.502,97							
			-	-	USD 203,60	-	USD 16,80	-	USD 2,40	-	USD 184,40	-	-	USD 16,80							
66	BKKBN	2009	11	17	392,37	16	112,74	1	279,63	-	-	-	-	112,74							
		2010	22	22	30.022,90	20	24.663,20	2	5.359,70	-	-	-	-	898,73							
		2011	64	116	6.319,42	72	6.286,11	41	33,31	3	-	-	-	599,26							
		2012	27	61	688,73	11	631,07	38	57,66	12	-	-	-	601,92							
		2013	35	89	2.539,62	18	1.742,96	66	796,66	5	-	-	-	1.680,39							
		Jumlah	159	305	39.963,04	137	33.436,08	148	6.526,96	20	-	-	-	3.893,04							

Halaman 17 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi Tindak Lanjut		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jml	Nilai	Jml	Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
67	BPOM	2009	12	21	4.363,17	18	4.363,17	3	-	-	-	-	-	-	4.363,17	
		2010	10	18	1,04	15	1,04	3	-	-	-	-	-	-	1,04	
		2011	13	27	940,80	23	453,08	4	487,72	-	-	-	-	-	453,08	
		2012	18	35	1.260,77	13	629,52	17	602,96	5	28,29	-	-	-	381,86	
		2013	26	55	9.981,00	18	9.953,45	11	27,55	26	-	-	-	-	9.953,45	
		Jumlah	79	156	16.546,78	87	15.400,26	38	1.118,23	31	28,29	-	-	-	15.152,60	
68	Kementerian Pendidikan Nasional	2009	169	417	247.322,17	255	195.059,45	92	45.267,60	70	6.995,12	-	-	-	45.282,45	
					USD 9,56				USD 9,56							
		2010	139	298	299.721,71	168	134.950,80	82	162.368,43	48	2.402,48	-	-	-	99.993,99	
		2011	284	661	420.608,84	395	252.543,20	208	167.641,48	58	424,16	-	-	-	130.395,31	
					USD 261,49		USD 62,00		USD 199,49						USD 19,90	
		2012	93	208	103.798,39	81	15.036,70	120	74.844,42	7	13.917,27	-	-	-	10.884,18	
		2013	144	363	446.765,19	135	147.741,53	106	186.088,93	122	112.934,73	-	-	-	147.741,53	
					USD 58,32		USD 7,15				USD 51,17				USD 7,15	
		Jumlah	829	1.947	1.518.216,30	1.034	745.331,68	608	636.210,86	305	136.673,76	-	-	-	434.297,46	
					USD 329,37		USD 69,15		USD 209,05		USD 51,17				USD 27,05	
69	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2009	19	37	421,19	25	421,19	5	-	7	-	-	-	-	421,19	
		2010	27	47	585,08	25	530,09	9	54,99	13	-	-	-	-	530,57	
		2011	32	77	2.674,16	27	2.498,98	19	175,18	31	-	-	-	-	2.498,98	
		2012	57	110	37.670,89	34	4.658,51	74	32.931,49	2	80,89	-	-	-	3.803,25	
		2013	24	58	18.231,78	30	4.178,93	24	14.052,85	4	-	-	-	-	-	
		Jumlah	159	329	59.583,10	141	12.287,70	131	47.214,51	57	80,89	-	-	-	7.253,99	
70	Kemempora	2009	18	22	1.221,42	17	828,09	5	393,33	-	-	-	-	-	828,09	
		2010	11	11	2.002,69	5	424,34	3	1.578,35	3	-	-	-	-	581,51	
		2011	13	17	17.812,08	3	7.191,82	5	7.835,67	9	2.784,59	-	-	-	7.191,82	
		2012	86	165	1.979.418,63	38	13.823,79	83	1.954.253,08	44	11.341,76	-	-	-	13.602,87	
		2013	33	93	196.088,93	72	161.816,55	17	27.783,09	4	6.489,29	-	-	-	161.816,55	
					USD 45,40		USD 45,40		USD 45,40		USD 45,40					
		Jumlah	161	308	2.196.543,75	135	184.084,59	113	1.991.843,52	60	20.615,64	-	-	-	184.020,84	
					USD 45,40		USD 45,40		USD 45,40		USD 45,40					

Halaman 18 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
71	Perpustakaan Nasional	2009	5	7	458,08	4	458,08	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	11	21	1.535,53	20	1.535,53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.535,53	
		2011	5	8	47,61	8	47,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,61	
		2012	6	8	82,81	8	82,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,81	
		2013	11	22	349,92	19	309,12	2	40,80	1	-	-	-	-	-	-	-	-	309,12	
		Jumlah	38	66	2.473,95	59	2.433,15	4	40,80	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1.975,07	
72	Kementerian Keuangan	2009	293	490	247.364,33	386	159.422,79	89	87.941,54	14	-	1	-	-	-	-	-	-	1.717,27	
		2010	553	1.064	2.530.181,11	769	2.227.742,32	203	164.280,42	92	138.158,37	-	-	-	-	-	-	-	1.849.200,03	
		2011	516	1.264	6.208.271,00	442	2.655.265,35	143	3.515.726,78	679	37.273,60	-	-	-	-	-	-	-	1.669.573,43	
		2012	-	-	USD 40,261,10	-	USD 12,59	-	USD 40,055,09	-	USD 193,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	360	694	3.331.497,86	211	918.366,83	163	2.363.586,52	320	49.544,51	-	-	-	-	-	-	-	169.803,56	
		Jumlah	-	-	USD 0,24	-	USD 0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	109	254	1.265.209,54	-	30,26	-	-	254	1.265.179,28	-	-	-	-	-	-	-	256,68	
		2010	-	-	USD 0,08	-	-	-	-	-	USD 0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	EUR 0,82	-	-	-	-	-	EUR 0,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	1.831	3.766	13.582.523,84	1.808	5.960.827,55	598	6.431.535,26	1.359	1.490.155,76	1	5,27	-	-	-	-	-	3.690.550,98	
		Jumlah	-	-	USD 40,261,42	-	USD 12,83	-	USD 40,055,09	-	USD 193,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2009	9	15	733,68	13	558,68	1	-	-	-	1	175,00	-	-	-	-	-	335,30	
		2010	8	11	404,53	10	404,53	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,03	
		2011	14	22	84,05	20	84,05	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,58	
		2012	11	13	5,80	9	5,80	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,86	
		2013	10	11	13,83	-	-	1	13,83	10	-	-	-	-	-	-	-	-	79,55	
		Jumlah	52	72	1.241,89	52	1.053,06	9	13,83	10	-	1	175,00	-	-	-	-	-	1.056,32	
74	BPKP	2009	9	12	72,19	12	72,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,19	
		2010	17	29	617,38	25	615,26	2	-	1	-	1	2,12	-	-	-	-	-	615,26	
		2011	16	19	356,33	16	279,42	3	76,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,46	
		2012	11	18	271,42	14	271,42	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	37,76	
		2013	15	29	712,91	21	120,33	8	592,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,33	
		Jumlah	68	107	2.030,23	88	1.358,62	16	669,49	2	-	1	2,12	-	-	-	-	-	1.116,00	

Halaman 19 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
75	BPS	2009	16	21	765,91	19	478,58	2	286,03	-	-	-	1,30	150,36		
		2010	9	14	103,47	14	103,47	-	-	-	-	-	-	103,47		
		2011	31	59	659,19	56	379,32	1	-	1	15,80	1	264,07	709,81		
		2012	26	41	1.733,22	19	35,70	4	1.687,53	18	-	-	9,99	34,59		
		2013	11	14	423,40	-	-	-	-	14	423,40	-	-	-		
		Jumlah	93	149	3.685,19	108	997,07	7	1.973,56	33	439,20	1	275,36	998,23		
76	Kemenko Perekonomian	2009	2	2	41,25	2	41,25	-	-	-	-	-	-	41,25		
		2010	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	4	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	40,91		
		2012	5	7	163,19	7	163,19	-	-	-	-	-	-	163,19		
		2013	8	15	370,19	-	5,70	-	-	15	364,49	-	-	5,70		
		Jumlah	21	30	574,63	14	210,14	1	-	15	364,49	-	-	251,05		
77	BPK	2009	24	25	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-		
		2010	20	28	71,30	27	71,30	1	-	-	-	-	-	71,32		
		2011	12	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	34	41	-	39	-	2	-	-	-	-	-	-		
		2013	20	20	-	16	-	4	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	110	131	71,30	123	71,30	8	-	-	-	-	-	71,32		
78	Bank Indonesia	2009	12	21	2.847,94	14	14,00	7	2.833,94	-	-	-	-	14,00		
		2010	13	21	599.941,27	12	77.553,60	8	522.387,67	-	-	1	-	95.845,48		
		2011	13	29	1.676,71	19	459,58	10	1.217,13	-	-	-	-	GBP 0,71		
		2012	10	20	44.708,66	13	36.219,35	7	8.489,31	-	-	-	-	152.774,09		
		2013	11	20	20.376,63	-	-	20	20.376,63	-	-	-	-	-		
		Jumlah	59	111	669.551,21	58	114.246,53	52	555.304,68	-	-	1	-	249.093,15		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	GBP 0,71		
79	LPS	2009	11	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 20 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		15
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2012	27	35	2.425,43	22	41,94	13	2.383,49	-	-	-	-	0,41	
		2013	8	12	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	56	68	2.425,43	44	41,94	24	2.383,49	-	-	-	-	0,41	
80	BNP2TKI	2009	21	32	-	8	-	12	-	12	-	-	-	-	
		2010	11	17	336,84	10	336,84	1	-	6	-	-	-	336,84	
		2011	10	13	575,02	6	361,92	5	213,10	2	-	-	-	361,92	
		2012	24	57	1.077,70	15	656,63	25	421,07	17	-	-	-	486,98	
		2013	15	40	6.323,75	-	1.531,55	36	4.792,20	4	-	-	-	1.529,76	
		Jumlah	81	159	8.313,31	39	2.886,94	79	5.426,37	41	-	-	-	2.715,50	
81	BPLS	2009	11	19	266,89	19	266,89	-	-	-	-	-	-	266,89	
		2010	5	9	2,06	8	2,06	1	-	-	-	-	-	128,68	
		2011	4	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	7	10	17,99	10	17,99	-	-	-	-	-	-	17,99	
		2013	6	7	71,75	5	71,75	2	-	-	-	-	-	71,75	
		Jumlah	33	51	358,69	48	358,69	3	-	-	-	-	-	485,31	
82	LPP TVRI	2009	10	12	53.598,29	3	17.710,41	9	35.887,88	-	-	-	-	17.710,41	
		2010	15	20	326,02	7	74,05	11	123,43	2	128,54	-	-	74,05	
		2011	21	42	66.197,05	7	1.334,89	22	2.273,21	13	62.588,95	-	-	1.334,89	
		2012	64	81	85.060,10	-	761,44	2	37.119,42	79	47.179,24	-	-	3,34	
		2013	10	26	95,90	-	4,30	1	91,60	25	-	-	-	-	
		Jumlah	120	181	205.277,36	17	19.885,09	45	75.495,54	119	109.896,73	-	-	19.122,69	
83	LPP RRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	14	32	557,83	20	54,72	12	503,11	-	-	-	-	54,72	
		2011	14	51	10.099,55	39	896,97	12	9.202,58	-	-	-	-	723,19	
		2012	78	92	3.179,80	22	570,99	59	1.690,99	11	917,82	-	-	560,54	
		2013	24	64	3.290,47	29	116,11	31	3.174,36	4	-	-	-	116,11	
		Jumlah	130	239	17.127,65	110	1.638,79	114	14.571,04	15	917,82	-	-	1.454,56	

Halaman 21 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu, valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi Tindak Lanjut		Belum Dibindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml	Nilai
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	BP Batam	2009	13	18	17.670,17	17	15.504,79	-	-	1	2.165,38	-	-	4.638,82
		2010	37	67	3.917,36	63	3.917,36	2	-	2	-	-	-	3.027,41
		2011	49	88	1.183,40	84	529,24	3	654,16	1	-	-	-	958,00
		2012	31	97	324,20	80	222,34	15	101,86	2	-	-	-	USD 17,75
		2013	27	83	9.517,55	37	60,15	23	-	23	9.457,40	-	-	272,75
		Jumlah	157	353	32.613,05	281	20.234,25	43	756,02	29	11.622,78	-	-	8.957,50
85	BPKS Sabang	2013	16	53	16.786,08	16	6,98	34	12.118,96	3	4.660,13	-	-	6,98
		Jumlah	16	53	16.786,08	16	6,98	34	12.118,96	3	4.660,13	-	-	6,98
86	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	2012	10	31	1.589,53	28	1.391,48	3	198,04	-	-	-	-	1.401,05
		2013	5	11	324,90	9	324,90	2	-	-	-	-	-	324,90
		Jumlah	15	42	1.914,43	37	1.716,38	5	198,04	-	-	-	-	1.725,95
87	BASARNAS	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	19	1.514,59	19	1.514,59	-	-	-	-	-	-	1.514,59
		2012	8	18	23,38	16	-	2	-	-	-	-	-	-
		2013	7	11	23,38	7	23,38	4	-	-	-	-	-	923,86
		Jumlah	26	48	1.537,97	42	1.537,97	6	-	-	-	-	-	2.438,45
88	KPPU	2009	2	2	11,70	2	11,70	-	-	-	-	-	-	11,70
		2010	5	7	183,51	5	3,39	2	180,12	-	-	-	-	3,39
		2011	4	6	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	8	11	1.073,19	8	1.073,19	3	-	-	-	-	-	1.073,19
		2013	7	13	7.103,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	26	39	8.372,21	20	1.088,28	6	180,12	13	7.103,81	-	-	1.088,28

Halaman 22 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
89	BAWASLU	2009	7	26	4.943,02	17	857,54	8	4.085,48	-	-	1	-	857,54	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	8	10	159,54	-	-	-	-	10	159,54	-	-	825,95	
		Jumlah	15	36	5.102,56	17	857,54	8	4.085,48	10	159,54	1	-	1.683,49	
90	Ombudsman RI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	5	10	268,92	6	85,69	2	-	2	183,23	-	-	99,10	
		Jumlah	8	13	268,92	9	85,69	2	-	2	183,23	-	-	99,10	
91	BNPP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	20	59	14.234,47	24	8.817,13	14	2.114,80	21	3.302,54	-	-	8.817,13	
		2013	8	19	2.069,84	-	1.567,83	3	345,07	16	156,94	-	-	1.567,83	
		Jumlah	28	78	16.304,31	24	10.384,96	17	2.459,87	37	3.459,48	-	-	10.384,96	
92	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat (LKPP)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	9	24	720,02	23	720,02	1	-	-	-	-	-	720,02	
		2012	15	24	-	11	-	1	-	12	-	-	-	-	
		2013	10	24	56,00	1	56,00	-	-	23	-	-	-	821,27	
		Jumlah	34	72	776,02	35	776,02	2	-	35	-	-	-	1.541,29	
93	ETESP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

Halaman 23 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Jml	
1	94 STAR SDP	2009	4	-	7	-	9	-	11	-	13	-	15
		2010	5	4,39	5	4,39	-	-	-	-	-	-	4,39
		2011	8	104,18	6	46,74	2	57,44	-	-	-	-	46,74
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	108,57	11	51,13	2	57,44	-	-	-	-	51,13
95	Sekretariat Kabinet	2011	2	10,00	4	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	13	79,03	22	79,03	2	-	-	-	-	-	73,19
		Jumlah	15	89,03	26	89,03	2	-	-	-	-	-	83,19
96	BNPT	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	8	164,13	11	164,13	7	-	-	-	-	-	164,13
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	164,13	11	164,13	7	-	-	-	-	-	164,13
		Total 2009 -2012	11.326	21.340	13.895	9.763.080,46	4.430	18.778.444,13	2.942	5.894.101,21	73	70.632,74	6.432.949,91
						USD 37,432.23		USD 70,140.22		USD 294.801,64		USD 10,787.05	USD 46,318.35
						EUR 2.43							EUR 0.40
						AUD 28.59							
						JPY 150,835.50							
						THB 25.00							
						SGD 0,24		SGD 0,24					
						RON 7,16							
						PLN 54.42							
						KRW 3,075.01		KRW 3,075.01					GBP 0,71
		Total (Rp)	11.326	21.340	13.895	10.237.471,70	4.430	19.633.421,10	2.942	9.487.438,40	73	202.116,09	6.997.545,27

Halaman 24 - Lampiran 1

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Total 2013	2.034	4.318	4.176.431,42	1.650	924.660,33	1.266	1.637.045,02	1.393	1.614.520,63	9	205,44	940.028,04
					USD 27,624,68		USD 147,62		USD 27,346,01		USD 131,05			USD 147,62
					EUR 0,82				EUR 0,82					
					AUD 1,38		AUD 1,38							AUD 0,38
		Total (Rp)	2.034	4.318	4.513.177,43	1.650	926.474,67	1.266	1.970.365,53	1.393	1.616.131,79	9	205,44	941.831,51
		Total 2009 -2013	13.360	25.658	38.682.689,96	15.545	10.687.740,79	5.696	20.415.489,15	4.335	7.508.621,84	82	70.838,18	7.372.977,95
					USD 440,785,82		USD 37,579,85		USD 97,486,23		USD 294,932,69		USD 10,787,05	USD 46,465,97
					EUR 3,25		EUR 2,43				EUR 0,82			EUR 0,40
					AUD 29,97		AUD 29,97							0,38
					JPY 150,835,50		JPY 150,835,50							
					THB 25,00		THB 25,00							
					SGD 0,24				SGD 0,24					
					RON 7,16		RON 7,16							
					PLN 54,42		PLN 54,42							
					KRW 3,075,01				KRW 3,075,01					
		Total (Rp)	13.360	25.658	44.073.624,72	15.545	11.163.946,37	5.696	21.603.786,63	4.335	11.103.570,19	82	202.321,53	7.939.376,78

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 1 - Lampiran 2

**DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2005 - 2008**

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kementerian Pertahanan	2005 - 2008	45	203	7.785,87	200	4.086,35	2	202,11	-	-	1	3.497,41	4.086,35
2	Mabes TNI	2005 - 2008	67	117	1.536,83	117	1.536,83	-	-	-	-	-	-	1.536,83
3	TNI/AD	2005 - 2008	172	296	401.944,88	289	201.416,01	6	200.528,87	-	-	1	-	186.583,38
4	TNI/AL	2005 - 2008	175	351	48.131,77	351	48.131,77	-	-	-	-	-	-	48.131,77
5	TNI/AU	2005 - 2008	85	171	115.964,12	159	50.242,85	12	65.721,27	-	-	-	-	27.407,43
6	Kementerian Luar Negeri	2005 - 2008	503	604	793.613,61	490	774.228,38	93	17.031,60	20	2.271,37	1	82,26	772.032,19
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	2005 - 2008	112	187	90.104,39	173	87.988,86	14	2.115,53	-	-	-	-	87.988,86
8	Wantannas	2005 - 2008	24	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BIN	2005 - 2008	14	17	39,20	17	39,20	-	-	-	-	-	-	39,20
10	Lemsaneg	2005 - 2008	21	18	422,24	18	422,24	-	-	-	-	-	-	422,24
11	Lemhannas	2005 - 2008	37	45	414,03	45	414,03	-	-	-	-	-	-	414,03

Halaman 2 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Kemendagri	2005 - 2008	27	38	509,19	38	509,19	-	-	-	-	-	-	509,19
13	Kemendagri	2005 - 2008	94	124	71.612,86	97	70.973,45	23	639,41	-	-	4	-	166.673,34
14	Kemendagri dan Reformasi Birokrasi	2005 - 2008	37	67	665,63	67	665,63	-	-	-	-	-	-	665,63
15	Kemendagri Sekretariat Negara	2005 - 2008	247	426	137.211,08	374	128.133,47	24	2.650,42	-	1.015,69	28	5.411,50	96.560,86
16	TMII	2005 - 2008	4	7	749,90	5	749,90	2	-	-	-	-	-	749,90
17	BKN	2005 - 2008	19	27	-	25	-	2	-	-	-	-	-	-
18	BPN	2005 - 2008	57	107	2.616,79	103	2.616,79	3	-	1	-	-	-	1.872,24
19	LAN	2005 - 2008	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Arsip Nasional	2005 - 2008	11	15	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-
21	KPU	2005 - 2008	32	54	77.722,96	40	5.967,30	10	71.755,66	4	-	-	-	5.967,36
22	Kemendagri Hukum dan HAM	2005 - 2008	268	454	126.636,56	450	15.077,61	3	156,31	-	-	1	111.402,64	16.567,20
23	Kejaksaan RI	2005 - 2008	265	513	999.529,02	256	60.172,47	83	865.272,10	174	74.084,45	-	-	26.717,39
24	POLRI	2005 - 2008	229	416	58.174,03	406	54.650,42	7	1.240,53	-	-	3,00	2.283,08	11.022,01
			-	-	USD 1.022,89	-	USD 1.022,89	-	-	-	-	-	-	USD 1.022,89

Halaman 3 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
25	Komnas HAM	2005 - 2008	18	23	27,39	23	27,39	-	-	-	-	-	-	-	-	32,18
26	Mahkamah Konstitusi	2005 - 2008	14	14	754,66	14	754,66	-	-	-	-	-	-	-	-	754,66
27	MPR	2005 - 2008	45	64	803,70	64	803,70	-	-	-	-	-	-	-	-	803,70
28	DPR	2005 - 2008	45	57	3.078,43	48	1.166,95	9	1.911,48	-	-	-	-	-	-	760,08
29	DPD	2005 - 2008	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,88
30	Mahkamah Agung	2005 - 2008	67	89	1.417,95	76	928,74	13	489,21	-	-	-	-	-	-	900,56
31	Komisi Yudisial	2005 - 2008	7	7	59,29	7	59,29	-	-	-	-	-	-	-	-	59,29
32	KPK	2005 - 2008	9	20	9.299,88	18	6.093,88	-	-	-	-	2	3.206,00	-	-	1.145,00
33	PPATK	2005 - 2008	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	BNN	2005 - 2008	45	51	16.545,71	48	15.913,39	1	143,90	-	-	2	488,42	-	-	2.442,40
35	Kementerian Pertanian	2005 - 2008	39	73	3.578,83	48	2.791,55	20	787,28	-	-	5	-	-	-	2.791,55
36	Kementerian Kehutanan	2005 - 2008	324	524	2.033.049,18	380	1.371.258,65	109	621.708,32	-	-	35	40.082,21	-	-	1.299.595,32
			-	-	USD 78,151,55	-	USD 14,121,79	-	USD 52,375,82	-	-	-	USD 11,653,94	-	-	USD 3,744,85
37	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2005 - 2008	72	123	68.948,77	104	68.748,65	19	200,12	-	-	-	-	-	-	68.748,65
38	Kementerian Pekerjaan Umum	2005 - 2008	184	283	74.308,80	268	74.293,60	15	15,20	-	-	-	-	-	-	74.184,73

Halaman 4 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
39	Kementerian Perhubungan	2005 - 2008	37	7.266,43	42	6.935,88	22	330,55	2	-	-	-	-	6.935,88		
40	Kemenpera	2005 - 2008	12	5.287,50	15	5.287,50	-	-	-	-	-	-	-	5.287,50		
41	Bapertarum	2005 - 2008	5	59.200,00	6	59.200,00	2	-	-	-	-	-	-	59.200,00		
42	Kementerian PDT	2005 - 2008	29	302,61	46	302,61	-	-	-	-	-	-	-	302,61		
43	BMKG	2005 - 2008	48	115.720,42	117	115.720,42	-	-	-	-	-	-	-	115.720,42		
44	Kementerian Perindustrian	2005 - 2008	52	-	71	-	16	-	-	-	-	-	-	-		
45	Kementerian Perdagangan	2005 - 2008	51	1.047,08	55	1.047,08	6	-	-	-	-	-	-	1.047,08		
46	Kementerian Koperasi & UKM	2005 - 2008	25	1.966,61	28	441,38	3	1.525,23	-	-	-	2	-	381,45		
47	BSN	2005 - 2008	7	519,99	7	519,99	-	-	-	-	-	-	-	519,99		
48	BKPM	2005 - 2008	13	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
49	Kementerian ESDM	2005 - 2008	119	254.648,19	123	107.001,74	22	145.763,50	-	-	-	3	1.882,95	107.364,08		
50	Kementerian Lingkungan Hidup	2005 - 2008	43	20,52	55	USD 45,936.19	1	USD 17,432.29	-	-	-	-	-	USD 74,903.90		
51	Kementerian BUMIN	2005 - 2008	28	120,50	37	120,50	-	-	-	-	-	-	-	120,50		
52	Kementerian Ristek	2005 - 2008	17	222.683,63	19	222.683,63	1	-	-	-	-	-	-	222.698,78		

Halaman 5 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
53	BPPT	2005 - 2008	43	49	19.908,29	35	7.869,99	14	12.038,30	-	-	-	-	-	-	7.869,99
			-	-	USD 476.73	-	USD 476.73	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 476.73
54	LIPi	2005 - 2008	37	43	98.887,00	37	98.887,00	6	-	-	-	-	-	-	-	98.876,72
55	BATAN	2005 - 2008	21	24	USD 36.72	22	USD 36.72	2	-	-	-	-	-	-	-	USD 36.72
56	BAPETEN	2005 - 2008	14	16	145,80	15	116,63	1	29,17	-	-	-	-	-	-	116,63
57	Badan Informasi Geospasial	2005 - 2008	28	33	3.875,30	32	1.679,63	1	2.195,67	-	-	-	-	-	-	1.818,47
58	LAPAN	2005 - 2008	28	48	2.762,81	48	2.762,81	0	0,00	-	-	-	-	-	-	1.928,20
59	Kementerian Agama	2005 - 2008	377	743	143.931,36	582	54.223,87	81	89.404,56	80	302,93	-	-	-	-	47.198,89
			-	-	SAR 101.41	-	SAR 101.41	-	-	-	-	-	-	-	-	SAR 101.41
60	Kementerian Sosial	2005 - 2008	123	235	13.990,71	229	11.989,16	3	2.001,55	3	-	-	-	-	-	11.778,38
61	BN Penanggulangan Bencana	2005 - 2008	22	30	367.044,38	25	55.026,97	2	312.017,41	-	-	3	-	-	-	72.991,34
62	Kemenko Kesra	2005 - 2008	51	60	334.679,67	37	111.163,10	18	110.925,28	5	112.591,29	-	-	-	-	111.163,10
63	KPP & PA	2005 - 2008	21	25	94,86	25	94,86	-	-	-	-	-	-	-	-	94,86
64	Kementerian Kesehatan	2005 - 2008	612	1.049	111.680,35	801	42.357,17	8	40.049,71	-	-	240	29.273,47	-	-	39.326,65
			-	-	USD 125.88	-	USD 125.88	-	USD 125.88	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	AUD 36.52	-	AUD 36.52	-	-	-	-	-	AUD 36.52	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Kementerian Nakertrans	2005 - 2008	467	688	280.316,83	400	144.552,58	154	90.308,62	134	45.455,63	-	145.152,96
			-	-	USD 6.619,38	-	USD 246,68	-	USD 531,64	-	USD 5.841,06	-	USD 251,48
66	BKKBN	2005 - 2008	55	72	444,91	70	444,91	1	-	1	-	-	395,38
67	BPOM	2005 - 2008	49	70	3.266,74	66	3.266,74	4	-	-	-	-	3.266,74
			-	-	EUR 29,60	-	EUR 29,60	-	-	-	-	-	EUR 29,60
68	Kementerian Pendidikan dan Nasional	2005 - 2008	1.059	2.022	443.092,83	1.717	141.867,63	160	300.357,60	145	867,60	-	57.302,17
			-	-	USD 8,69	-	USD 8,69	-	-	-	-	-	-
69	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2005 - 2008	144	213	3.542,64	195	3.542,64	13	-	5	-	-	2.542,64
70	Kemempora	2005 - 2008	14	16	1.397,26	13	1.397,26	3	-	-	-	-	1.397,26
71	Perpustakaan Nasional	2005 - 2008	36	68	176,64	67	176,64	-	-	-	-	1	176,64
72	Kementerian Keuangan	2005 - 2008	997	1.875	6.376.077,00	1.520	6.339.027,41	348	37.049,59	5	-	2	6.319.477,72
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 14,910,76
73	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional	2005 - 2008	14	24	289,05	24	289,05	-	-	-	-	-	289,05
74	BPKP	2005 - 2008	24	32	46,00	32	46,00	-	-	-	-	-	46,00
75	BPS	2005 - 2008	85	135	6.606,75	123	6.600,56	5	6,19	-	-	7	2.474,46

Halaman 7 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
76	Kemeko Perekonomian	2005 - 2008	13	867,15	12	867,15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	644,21
77	BPK	2005 - 2008	64	58,38	51	58,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,76
78	Bank Indonesia	2005 - 2008	34	96.236,27	44	3.135,28	9	93.100,99	-	-	-	1	-	-	-	1.595,28
79	LPS	2005 - 2008	22	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	BNP2TKI	2005 - 2008	11	-	10	-	7	-	-	3	-	-	-	-	-	-
81	BPLS	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	LPP TVRI	2005 - 2008	30	228.390,84	34	82.443,89	12	145.946,95	-	-	-	-	-	-	-	82.443,89
83	LPP RRI	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	BP Batam	2005 - 2008	50	267.017,20	80	265.937,48	4	829,56	-	-	5	250,16	-	-	-	166.318,20
			-	USD 259,44	-	USD 235,85	-	USD 23,59	-	-	-	-	-	-	-	USD 235,85
			-	SGD 349,95	-	SGD 217,79	-	-	-	-	-	SGD 132,16	-	-	-	SGD 217,79
87	BASARNAS	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	KPPU	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	BAWASLU	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 2

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan negara/daerah				
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	Ombudsman RI	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	BNPP	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah Pusat (LKPP)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	ETESP	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	STAR SDP	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Sekretariat Kabinet	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	BNPT	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	8.441	14.123	14.620.868,05	11.707	10.949.529,44	1.475	3.236.889,55	594	236.839,12	347	197.609,94	10.633.628,84
					USD 155,799.06		USD 66,952.20		USD 71,351.86		USD 5,841.06		USD 11,653.94	USD 99,993.02
					EUR 628.42		EUR 594.81		EUR 33.61				AUD 36.52	EUR 580.12
					AUD 36.52									
					SAR 101.41		SAR 101.41							SAR 101.41
					SGD 349.95		SGD 217.79				SGD 132.16			SGD 217.79
		Total (Rp)	8.441	14.123	16.534.569,79	11.707	11.778.041,83	1.475	4.107.162,74	594	309.308,23	347	340.056,99	11.864.628,67

Keterangan
Nilai valas telah dikonsersikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013

(Nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	Prov. Aceh	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		2009	74	199	44.100,11	142	25.624,52	51	18.463,40	6	12,19	-	-	-	4.083,57	
		2010	94	238	191.443,67	108	3.344,67	102	3.302,19	28	184.796,81	-	-	-	3.004,32	
		2011	70	256	26.966,91	74	2.182,57	177	8.671,82	5	16.112,52	-	-	-	2.182,61	
		2012	93	251	330.058,15	61	10.021,86	161	1.244,64	29	318.791,65	-	-	-	8.831,21	
		2013	34	109	17.053,03	45	15,00	62	22,46	2	17.015,57	-	-	-	-	
		Jumlah	365	1.053	609.621,87	430	41.188,62	553	31.704,51	70	536.728,74	-	-	-	18.101,71	
2	Kab. Aceh Barat	2009	15	35	10.901,46	4	-	4	9.918,79	27	982,67	-	-	-	-	
		2010	10	30	6.721,14	-	-	12	6.721,14	18	-	-	-	-	-	
		2011	31	89	7.132,35	-	-	34	4.558,52	55	2.573,83	-	-	-	-	
		2012	17	50	4.187,15	-	-	-	-	50	4.187,15	-	-	-	-	
		2013	14	29	3.188,14	19	104,01	10	3.084,13	-	-	-	-	-	104,01	
		Jumlah	87	233	32.130,24	23	104,01	60	24.282,58	150	7.743,65	-	-	-	104,01	
3	Kab. Aceh Barat Daya	2009	14	42	5.167,19	1	-	1	11,20	40	5.155,99	-	-	-	-	
		2010	23	84	7.792,85	1	63,59	9	2.065,72	74	5.663,54	-	-	-	63,59	
		2011	18	48	9.027,26	-	-	-	-	48	9.027,26	-	-	-	-	
		2012	25	79	8.375,72	1	4.877,63	-	-	78	3.498,09	-	-	-	-	
		2013	29	85	15.434,11	48	545,42	36	14.680,44	1	208,25	-	-	-	170,16	
		Jumlah	109	338	45.797,13	51	5.486,64	46	16.757,36	241	23.553,13	-	-	-	233,75	
4	Kab. Aceh Besar	2009	18	45	501,15	41	145,20	2	256,50	2	99,45	-	-	-	626,81	
		2010	21	43	4.011,85	30	523,01	13	3.488,84	-	-	-	-	-	523,01	
		2011	24	56	2.864,84	24	1.515,44	10	431,57	22	917,83	-	-	-	51,44	
		2012	15	44	1.306,10	26	88,79	1	16,10	17	1.201,21	-	-	-	-	
		2013	14	33	4.430,62	19	3.801,34	13	57,62	1	571,66	-	-	-	3.858,96	
		Jumlah	92	221	13.114,56	140	6.073,78	39	4.250,63	42	2.790,15	-	-	-	5.060,22	
5	Kab. Aceh Jaya	2009	21	48	4.262,16	31	1.095,12	12	3.167,04	5	-	-	-	-	57,47	
		2010	24	48	2.030,88	23	722,18	9	959,28	16	349,42	-	-	-	55,64	
		2011	19	50	2.353,42	2	521,46	1	648,41	47	1.183,55	-	-	-	521,46	
		2012	19	41	2.852,05	7	1.340,42	18	976,80	16	594,83	-	-	-	1.209,05	
		2013	11	24	445,98	5	-	9	349,33	10	96,65	-	-	-	-	
		Jumlah	94	211	11.944,49	68	3.679,18	49	6.100,86	94	2.164,45	-	-	-	1.843,62	
6	Kab. Aceh Selatan	2009	19	44	30.108,17	23	12.601,68	14	17.392,64	7	113,85	-	-	-	12.593,91	
		2010	20	54	4.042,38	43	1.960,64	10	2.081,74	1	-	-	-	-	1.775,12	
		2011	20	59	966,41	2	259,86	2	22,50	55	684,05	-	-	-	259,86	
		2012	26	58	1.709,52	12	222,52	2	430,00	44	1.057,00	-	-	-	-	
		2013	19	66	1.769,96	27	164,31	18	-	21	12,65	-	-	-	164,31	
		Jumlah	104	281	37.003,44	107	15.209,01	46	19.926,88	128	1.867,55	-	-	-	14.793,20	

Halaman 2 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Lanjut		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	Kab. Aceh Singkil	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2009	13	34	647,59	23	443,86	5	179,95	6	23,78	-	-	180,39	
		2010	17	63	1.033,10	48	893,86	9	139,24	6	-	-	-	315,96	
		2011	23	68	7.691,85	5	4.926,21	26	743,47	37	2.022,17	-	-	267,37	
		2012	15	41	564,28	9	564,28	3	-	29	-	-	-	-	
8	Kab. Aceh Tamiang	3	15	43	760,21	15	32,04	8	33,17	20	695,00	-	-	25,29	
		2010	83	249	10.697,03	100	6.860,25	51	1.095,83	98	2.740,95	-	-	789,01	
		2011	25	71	8.279,27	56	4.798,78	11	3.265,08	4	215,41	-	-	361,72	
		2012	14	52	394,96	40	186,36	9	14,50	3	194,10	-	-	186,36	
		2013	16	47	2.200,02	5	-	1	-	41	2.200,02	-	-	5,72	
9	Kab. Aceh Tengah	3	12	19	2.219,08	1	188,07	16	266,68	2	1.764,33	-	-	188,07	
		2010	91	256	15.551,02	136	5.178,93	40	5.540,49	80	4.831,60	-	-	741,87	
		2011	14	34	1.666,66	30	464,62	4	1.202,04	-	-	-	-	464,62	
		2012	22	53	1.766,26	14	246,33	16	819,03	23	700,90	-	-	58,13	
		2013	17	46	2.333,82	30	561,62	14	1.772,20	2	-	-	-	561,62	
10	Kab. Aceh Tenggara	3	36	73	659,11	-	306,18	73	352,93	-	-	-	-	306,18	
		2010	105	244	16.674,64	103	2.574,05	115	13.399,69	26	700,90	-	-	2.158,36	
		2011	15	32	33.643,02	29	20.148,16	3	13.494,86	-	-	-	-	9.039,20	
		2012	15	33	14.327,88	28	12.603,34	3	1.724,54	2	-	-	-	458,47	
		2013	12	36	7.547,02	9	6.723,09	22	630,63	5	193,30	-	-	-	
11	Kab. Aceh Timur	3	20	48	1.569,55	27	181,33	19	1.388,22	2	-	-	-	181,33	
		2010	99	245	65.325,84	110	42.232,94	63	20.639,64	72	2.453,26	-	-	10.830,39	
		2011	26	72	6.374,23	36	871,56	20	3.732,83	16	1.769,84	-	-	871,56	
		2012	25	59	1.482,26	28	89,27	9	864,95	22	528,04	-	-	-	
		2013	12	23	632,99	5	-	3	632,99	15	-	-	-	-	
12	Kab. Aceh Utara	3	22	60	7.807,73	15	-	29	3.184,10	16	4.623,63	-	-	-	
		2010	104	258	22.876,67	97	960,83	81	6.661,15	80	13.254,69	-	-	871,56	
		2011	23	56	225.656,05	42	5.583,43	8	219.970,36	6	102,26	-	-	2.369,17	
		2012	69	145	14.032,44	93	2.502,49	33	7.154,06	19	4.375,89	-	-	337,67	
		2013	21	50	571,49	19	378,85	19	185,09	12	7,55	-	-	378,85	
		3	33	55	11.153,42	18	17,08	27	11.136,34	10	-	-	-	17,08	
		2010	19	30	2.564,92	3	243,25	2	616,94	25	1.704,73	-	-	243,25	
		2011	165	336	253.978,32	175	8.725,10	89	239.062,79	72	6.190,43	-	-	3.346,02	
		2012	19	30	2.564,92	3	243,25	2	616,94	25	1.704,73	-	-	243,25	
		2013	165	336	253.978,32	175	8.725,10	89	239.062,79	72	6.190,43	-	-	3.346,02	

Halaman 3 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	Kab. Bener Meriah	2009	20	54	2.329,46	28	242,16	20	174,31	6	1.912,99	-	-	-	-
		2010	15	36	321,44	29	203,39	3	80,91	4	37,14	-	-	-	142,94
		2011	31	74	4.266,17	-	1.515,36	5	1.099,23	69	1.515,36	-	-	-	1.515,36
		2012	12	26	683,64	1	101,21	-	-	25	582,43	-	-	-	-
		2013	17	39	993,58	-	147,66	38	845,92	1	-	-	-	-	147,66
		Jumlah	95	229	8.594,29	58	2.209,78	66	2.752,72	105	3.631,79	-	-	-	1.805,96
14	Kab. Bireuen	2009	21	53	43.854,38	22	18.994,30	14	24.784,72	17	75,36	-	-	-	92,93
		2010	11	28	2.912,88	1	2.839,99	1	64,45	26	8,44	-	-	-	467,11
		2011	27	74	5.375,68	3	2.441,93	3	1.343,10	68	1.590,65	-	-	-	-
		2012	35	114	7.931,55	8	2.504,58	1	-	105	5.426,97	-	-	-	-
		2013	24	72	6.959,46	22	258,00	42	6.701,46	8	-	-	-	-	258,00
		Jumlah	118	341	67.033,95	56	27.038,80	61	32.893,73	224	7.101,42	-	-	-	818,04
15	Kab. Gayo Lues	2009	18	48	512,16	43	33,28	5	478,88	-	-	-	-	-	33,28
		2010	21	42	2.545,94	34	2.414,95	5	27,78	2	96,62	1	6,59	-	263,91
		2011	25	61	2.922,48	45	1.941,72	14	960,15	1	-	1	20,61	-	529,61
		2012	13	25	1.541,80	9	69,46	11	1.366,94	5	105,40	-	-	-	69,46
		2013	35	99	2.180,19	28	17,51	12	1.344,08	59	818,60	-	-	-	17,51
		Jumlah	112	275	9.702,57	159	4.476,92	47	4.177,83	67	1.020,62	2	27,20	-	913,77
16	Kab. Nagan Raya	2009	11	25	441,49	24	309,45	1	132,04	-	-	-	-	-	309,45
		2010	13	34	518,66	29	368,34	4	150,32	1	-	-	-	-	368,34
		2011	23	69	3.350,16	40	378,12	21	1.148,35	8	1.823,69	-	-	-	219,50
		2012	17	49	740,45	26	46,54	23	54,49	-	639,42	-	-	-	46,48
		2013	18	47	8.794,38	26	-	21	8.794,38	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	82	224	13.845,14	145	1.102,45	70	10.279,58	9	2.463,11	-	-	-	943,77
			-	-	USD 161,64	-	-	-	USD 161,64	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Pidie	2009	15	31	1.728,16	15	0,66	11	269,55	5	1.457,95	-	-	-	0,66
		2010	11	30	1.634,17	21	-	7	-	2	1.634,17	-	-	-	-
		2011	38	95	41,28	7	41,28	25	-	63	-	-	-	-	-
		2012	21	54	1.873,07	16	60,97	29	1.482,79	9	329,31	-	-	-	60,97
		2013	17	43	177,54	8	40,62	30	136,92	5	-	-	-	-	-
		Jumlah	102	253	5.454,22	67	143,53	102	1.889,26	84	3.421,43	-	-	-	61,63
18	Kab. Pidie Jaya	2009	27	59	1.771,93	41	672,21	13	1.099,72	5	-	-	-	-	362,04
		2010	14	44	648,60	22	99,40	22	549,20	-	-	-	-	-	-
		2011	26	83	4.342,41	28	33,25	55	4.309,16	-	-	-	-	-	-
		2012	15	45	205,45	24	6,00	21	199,45	-	-	-	-	-	-
		2013	19	62	6.482,03	15	43,94	41	-	6	6.438,09	-	-	-	1.724,94
		Jumlah	101	293	13.450,42	130	854,80	152	6.157,53	11	6.438,09	-	-	-	2.086,98

Halaman 4 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
19	Kab. Simeulue	2009	21	63	2.018,06	47	163,14	15	1.972,92	11	-	13	-	10,20	
		2010	12	17	3.656,57	12	2.200,45	5	1.436,12	-	-	-	-	2.200,45	
		2011	36	116	3.421,62	29	1.116,04	55	2.610,86	32	694,72	-	-	116,04	
		2012	20	56	2.869,56	17	59,03	14	2.059,15	25	751,38	-	-	59,03	
		2013	24	81	1.336,22	2	394,89	-	-	79	941,33	-	-	6,09	
		Jumlah	113	333	13.282,03	107	2.815,55	89	8.079,05	137	2.387,43	-	-	2.391,81	
20	Kota Banda Aceh	2009	36	73	5.169,89	66	1.045,33	7	4.085,59	-	-	-	-	390,51	
		2010	10	22	1.031,42	19	531,58	3	499,84	-	-	-	-	119,87	
		2011	19	51	5,33	49	5,33	2	-	-	-	-	-	5,33	
		2012	12	29	681,73	29	681,73	-	-	-	-	-	-	681,73	
		2013	21	58	16,85	28	16,85	1	-	29	-	-	-	215,77	
		Jumlah	98	233	6.905,22	191	2.280,82	13	4.585,43	29	38,97	-	-	1.413,21	
21	Kota Langsa	2009	11	19	2.510,69	13	381,26	4	2.097,39	2	32,04	-	-	381,26	
		2010	11	33	569,25	29	-	-	-	4	569,25	-	-	-	
		2011	13	35	8.590,91	19	5.439,12	8	2.044,69	8	1.107,10	-	-	5.439,12	
		2012	22	59	729,39	27	24,31	19	114,58	13	590,50	-	-	22,01	
		2013	13	30	110,39	6	-	20	110,39	4	-	-	-	-	
		Jumlah	70	176	12.510,63	94	5.844,69	51	4.367,05	31	2.298,89	-	-	5.842,39	
22	Kota Lhokseumawe	2009	23	55	2.392,01	28	502,99	25	1.772,75	2	116,27	-	-	386,29	
		2010	12	29	-	15	-	11	-	3	-	-	-	-	
		2011	27	84	3.497,92	53	140,09	25	3.336,25	6	21,58	-	-	140,09	
		2012	23	43	3.848,53	8	322,20	18	3.367,06	17	159,27	-	-	322,20	
		2013	11	30	2.069,31	18	97,18	12	200,00	-	1.772,13	-	-	97,18	
		Jumlah	96	241	11.807,77	122	1.062,46	91	8.676,06	28	2.069,25	-	-	945,76	
23	Kota Sabang	2009	10	21	1.354,40	18	1.354,40	2	-	1	-	-	-	1.354,40	
		2010	21	42	200,49	29	40,54	12	140,78	1	19,17	-	-	40,54	
		2011	13	28	66,24	13	15,01	10	46,23	5	5,00	-	-	15,01	
		2012	16	45	366,23	31	336,03	12	-	2	30,20	-	-	336,03	
		2013	11	43	1.320,50	26	-	13	14,00	4	1.306,50	-	-	-	
		Jumlah	71	179	3.307,86	117	1.745,98	49	201,01	13	1.360,87	-	-	1.745,98	
			-	-	SGD 3,57	-	-	-	-	-	SGD 3,57	-	-	-	
24	Kota Subulussalam	2009	24	74	10.377,92	27	2.574,25	17	6.306,04	30	1.497,63	-	-	205,84	
		2010	17	50	1.030,54	5	165,10	9	302,11	36	563,33	-	-	165,10	
		2011	29	71	491,83	9	100,92	3	34,95	59	355,96	-	-	-	
		2012	16	49	905,61	11	49	32	516,09	6	389,52	-	-	-	
		2013	13	46	2.546,78	32	29,25	10	2.517,53	4	-	-	-	29,25	
		Jumlah	99	290	15.352,68	84	2.869,52	71	9.676,72	135	2.806,44	-	-	400,19	

Halaman 5 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
25	Prov. Sumatera Utara	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2009	43	108	47.246,87	55	4.056,51	45	41.075,61	8	2.114,75	-	-	-	4.056,51
		2010	26	70	296.469,94	37	5.438,49	23	148.035,59	10	142.995,86	-	-	-	5.438,49
		2011	52	122	40.805,14	57	16.011,42	41	22.320,87	24	2.472,85	-	-	-	16.054,19
		2012	36	74	74.444,85	20	9.234,69	50	64.926,25	4	283,91	-	-	-	9.234,69
26	Kab. Asahan	2009	38	91	487,86	45	449,58	5	28,28	41	10,00	-	-	-	449,58
		2010	32	74	5.806,37	37	642,54	17	4.552,01	20	611,82	-	-	-	642,54
		2011	16	36	2.109,54	27	209,85	8	1.899,69	1	-	-	-	-	209,85
		2012	17	43	5.373,58	38	2.583,92	3	2.789,66	2	-	-	-	-	2.583,92
		2013	22	46	8.899,68	23	743,37	7	947,52	16	7.208,79	-	-	-	743,37
27	Kab. Batubara	Jumlah	125	290	22.677,03	170	4.629,26	40	10.217,16	80	7.830,61	-	-	-	4.629,26
		2009	20	55	41.857,70	34	768,37	21	41.089,33	-	-	-	-	-	768,37
		2010	17	52	24.028,76	31	1.326,59	19	22.702,17	2	-	-	-	-	1.326,59
		2011	25	57	83.164,38	40	456,14	12	1.433,60	5	81.274,64	-	-	-	456,14
		2012	17	28	2.046,05	5	780,20	23	1.265,85	-	-	-	-	-	780,20
28	Kab. Dairi	2009	14	40	3.056,09	28	932,96	10	1.303,19	-	-	2	819,94	-	932,96
		2010	16	35	606,60	7	397,42	25	209,18	3	-	-	-	-	397,42
		2011	25	71	2.659,27	15	230,52	54	1.656,64	2	772,11	-	-	-	230,52
		2012	12	29	621,96	10	107,02	16	456,92	3	58,02	-	-	-	107,02
		2013	22	54	8.662,01	18	283,61	14	1.065,81	22	7.312,59	-	-	-	283,61
29	Kab. Deli Serdang	Jumlah	89	229	15.605,93	78	1.951,53	119	4.691,74	30	8.142,72	2	819,94	-	1.875,31
		2009	25	63	9.033,54	32	585,64	18	3.777,34	13	4.670,56	-	-	-	585,64
		2010	25	62	2.731,15	41	1.479,70	18	1.251,45	3	-	-	-	-	1.479,70
		2011	22	44	5.098,26	28	184,29	14	4.913,97	2	-	-	-	-	184,29
		2012	11	19	58,18	5	47,78	13	10,40	1	-	-	-	-	47,78
30	Kab. Humbang Hasundutan	2009	19	43	7.334,82	32	609,53	4	2.511,75	7	4.213,54	-	-	-	609,53
		2010	15	31	8.576,11	11	456,43	1	150,00	19	7.969,68	-	-	-	456,43
		2011	19	54	1.495,15	14	1.031,27	6	360,78	34	103,10	-	-	-	1.031,27
		2012	10	18	685,62	4	528,52	2	157,10	12	-	-	-	-	528,52
		2013	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
31	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah	75	169	18.613,99	67	2.882,28	18	3.441,75	84	12.289,96	-	-	-	2.882,28
		2009	19	43	7.334,82	32	609,53	4	2.511,75	7	4.213,54	-	-	-	609,53
		2010	15	31	8.576,11	11	456,43	1	150,00	19	7.969,68	-	-	-	456,43
		2011	19	54	1.495,15	14	1.031,27	6	360,78	34	103,10	-	-	-	1.031,27
		2012	10	18	685,62	4	528,52	2	157,10	12	-	-	-	-	528,52
32	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2009	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2010	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2011	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2012	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
33	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2009	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2010	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2011	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2012	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
34	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2009	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2010	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2011	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2012	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
35	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2009	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2010	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2011	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53
		2012	12	23	522,29	6	256,53	5	262,12	12	3,64	-	-	-	256,53

Halaman 6 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
31	Kab. Karo	2009	12	32	318,16	6	314,42	25	3,74	1	3,74	-	-	314,42	15
		2010	16	29	963,65	7	387,20	17	576,45	5	-	-	-	387,20	
		2011	26	76	2.330,12	58	1.824,51	17	498,44	1	7,17	-	-	1.824,51	
		2012	13	37	2.474,93	13	250,34	23	2.224,59	1	-	-	-	250,34	
		2013	27	67	1.905,33	5	860,47	17	71,56	45	973,30	-	-	-	873,73
	Jumlah	94	241	7.992,19	89	3.636,94	99	3.374,78	53	980,47	-	-	3.650,20		
32	Kab. Labuhanbatu	2009	25	68	5.066,95	55	791,02	13	4.275,93	-	-	-	-	452,34	
		2010	12	27	584,14	19	262,67	8	321,47	-	-	-	-	242,67	
		2011	23	58	6.492,99	43	276,97	14	6.216,02	-	-	1	-	128,62	
		2012	10	22	600,20	19	600,20	3	-	-	-	-	-	600,20	
		2013	31	31	14.585,54	12	1.746,42	7	3.950,89	12	8.888,23	-	-	-	1.746,42
	Jumlah	87	206	27.329,82	148	3.677,28	45	14.764,31	12	8.888,23	1	-	3.170,25		
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	15	37	3.221,81	17	715,44	7	1.751,91	13	754,46	-	-	95,97	
		2012	11	24	4.380,15	6	1.218,59	12	3.161,56	6	-	-	-	344,77	
		2013	11	24	2.820,90	9	749,85	14	1.850,10	1	220,95	-	-	-	328,97
	Jumlah	37	85	10.422,86	32	2.683,88	33	6.763,57	20	975,41	-	-	769,71		
34	Kab. Labuhanbatu Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	13	47	11.417,42	10	2.078,11	19	9.230,95	18	108,36	-	-	2.078,11	
		2012	16	44	2.038,14	13	854,29	23	62,91	8	1.120,94	-	-	854,29	
		2013	19	53	1.721,70	11	282,79	41	1.438,91	1	-	-	-	282,79	
	Jumlah	48	144	15.177,26	34	3.215,19	83	10.732,77	27	1.229,30	-	-	3.215,19		
35	Kab. Langkat	2009	20	54	109.569,34	38	80.198,23	16	29.371,11	-	-	-	-	80.198,23	
		2010	23	56	6.221,89	29	2.940,96	26	3.280,93	1	-	-	-	2.940,96	
		2011	33	78	6.847,49	27	3.656,50	33	2.993,28	18	257,71	-	-	3.656,50	
		2012	38	82	1.229,08	33	1.139,80	49	89,28	-	-	-	-	944,46	
		2013	21	39	4.907,15	12	1.329,72	20	1.295,24	7	2.282,19	-	-	-	1.067,90
	Jumlah	135	309	128.774,95	139	89.265,21	144	36.969,84	26	2.539,90	-	-	88.808,05		
36	Kab. Mandailing Natal	2009	22	52	2.104,66	19	389,98	6	998,27	27	716,41	-	-	389,98	
		2010	32	96	1.280,09	26	415,13	37	827,40	33	37,56	-	-	415,13	
		2011	19	40	1.659,19	5	866,28	27	526,75	8	264,16	-	-	856,09	
		2012	11	23	426,13	5	102,16	4	6,08	14	317,89	-	-	102,16	
		2013	11	15	1.845,50	-	203,60	15	1.641,90	-	-	-	-	203,60	
	Jumlah	95	226	7.315,57	55	1.979,15	89	4.000,40	82	1.336,02	-	-	1.966,96		

Halaman 7 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	Kab. Nias	2009	20	67	14.452,31	43	8.403,47	19	6.048,84	5	-	-	-	12.139,61
		2010	14	34	141,42	24	93,42	8	48,00	2	-	-	-	93,42
		2011	14	31	768,32	17	12,28	13	756,04	1	-	-	-	-
		2012	21	46	7.620,62	3	212,97	38	7.136,31	5	271,34	-	-	214,97
		2013	12	32	8.293,61	9	21,25	23	8.272,36	-	-	-	-	-
		Jumlah	81	210	31.276,28	96	8.743,39	101	22.261,55	13	271,34	-	-	12.448,00
38	Kab. Nias Barat	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	43	776,02	31	-	10	776,02	2	-	-	-	-
		2012	11	35	1.568,49	16	-	19	1.568,49	-	-	-	-	213,82
		2013	15	34	2.030,46	-	-	-	-	34	2.030,46	-	-	-
		Jumlah	41	112	4.374,97	47	-	29	2.344,51	36	2.030,46	-	-	213,82
39	Kab. Nias Selatan	2009	17	48	2.920,49	2	1.050,31	5	894,49	41	975,69	-	-	491,89
		2010	15	45	685,33	2	239,84	3	84,33	40	361,16	-	-	239,84
		2011	17	55	2.658,15	23	356,08	23	2.302,07	9	-	-	-	356,08
		2012	12	24	3.755,55	1	382,39	1	3.117,34	22	255,82	-	-	382,39
		2013	11	19	32.144,37	2	17.722,24	16	14.422,13	1	-	-	-	18.310,79
		Jumlah	72	191	42.163,89	30	19.750,86	48	20.820,36	113	1.592,67	-	-	19.780,99
40	Kab. Nias Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	19	60	10.249,38	2	341,09	6	9.137,08	52	771,21	-	-	341,09
		2012	14	43	6.121,52	3	1.081,68	6	4.688,21	34	4.688,21	-	-	1.081,68
		2013	14	27	1.122,02	2	41,54	23	1.055,28	2	25,20	-	-	41,54
		Jumlah	47	130	17.492,92	7	1.464,31	35	10.563,99	88	5.464,62	-	-	1.464,31
41	Kab. Padang Lawas	2009	9	20	343,09	15	192,70	4	150,39	1	-	-	-	116,64
		2010	20	53	2.724,66	1	275,48	8	1.411,53	44	1.037,65	-	-	275,48
		2011	15	33	2.339,99	-	-	-	-	33	2.339,99	-	-	-
		2012	22	48	10.733,73	14	720,41	27	9.912,50	7	100,82	-	-	720,41
		2013	16	32	9.392,67	1	737,82	25	7.372,26	6	1.282,59	-	-	502,32
		Jumlah	82	186	25.534,14	31	1.926,41	64	18.846,68	91	4.761,05	-	-	1.614,85
42	Kab. Padang Lawas Utara	2009	11	18	6.867,61	11	6.531,12	4	336,49	3	-	-	-	207,48
		2010	20	52	4.763,10	36	878,57	11	2.697,99	5	1.186,54	-	-	803,57
		2011	19	54	7.066,07	39	3.097,09	14	3.968,98	1	-	-	-	361,11
		2012	15	40	2.386,95	16	182,39	22	2.204,56	2	-	-	-	182,39
		2013	11	18	2.550,29	6	175,21	9	2.346,51	3	28,57	-	-	175,21
		Jumlah	76	182	23.634,02	108	10.864,38	60	11.554,53	14	1.215,11	-	-	1.729,76

Halaman 8 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	Kab. Pakpak Bharat	2009	12	26	836,71	22	164,20	3	225,64	1	446,87	-	-	164,20
		2010	26	73	1.841,98	40	288,66	28	1.553,32	5	-	-	-	288,66
		2011	13	33	1.117,67	26	354,48	4	763,19	3	-	-	-	354,48
		2012	7	26	10,42	3	10,42	22	-	1	-	-	-	38,39
		2013	21	51	1.549,63	3	332,28	46	1.217,35	2	-	-	-	332,28
		Jumlah	79	209	5.356,41	94	1.150,04	103	3.759,50	12	446,87	-	-	1.178,01
44	Kab. Samosir	2009	14	35	649,76	-	164,69	19	485,07	16	-	-	-	164,69
		2010	28	67	4.238,24	10	480,52	42	3.621,10	15	136,62	-	-	480,52
		2011	11	47	674,32	23	87,40	11	586,92	13	-	-	-	87,40
		2012	9	27	380,24	7	80,53	18	243,19	2	56,52	-	-	-
		2013	12	28	4.116,34	6	330,48	22	3.785,86	-	-	-	-	186,80
		Jumlah	74	204	10.058,90	46	1.143,62	112	8.722,14	46	193,14	-	-	919,41
45	Kab. Serdang Bedagai	2009	29	74	693,51	40	13,37	34	680,14	-	-	-	-	691,43
		2010	17	38	2.046,74	21	1.090,23	17	956,51	-	-	-	-	1.090,23
		2011	25	67	2.972,58	34	837,45	33	2.135,13	-	-	-	-	837,45
		2012	12	24	74,32	12	39,72	11	34,60	1	-	-	-	39,72
		2013	22	44	3.219,95	4	439,50	23	884,10	17	1.896,35	-	-	439,50
		Jumlah	105	247	9.007,10	111	2.420,27	118	4.690,48	18	1.896,35	-	-	3.098,33
46	Kab. Simalungun	2009	17	53	3.009,69	4	360,39	20	39,26	29	2.610,04	-	-	381,33
		2010	28	66	2.476,40	11	71,71	29	2.032,37	26	372,32	-	-	71,71
		2011	25	66	23.640,16	15	20.766,69	41	2.873,47	10	-	-	-	782,21
		2012	23	50	5.039,30	16	1.861,17	29	3.142,86	5	35,27	-	-	1.875,31
		2013	11	30	1.201,27	9	210,22	8	820,79	13	170,26	-	-	210,22
		Jumlah	104	265	35.366,82	55	23.270,18	127	8.908,75	83	3.187,89	-	-	3.320,78
47	Kab. Tapanuli Selatan	2009	19	56	854,67	41	261,22	9	593,45	6	-	-	-	261,22
		2010	34	95	6.328,53	79	3.254,43	10	3.074,10	6	-	-	-	3.254,43
		2011	11	34	1.030,22	32	299,98	2	299,98	-	-	-	-	730,24
		2012	24	61	5.883,68	51	3.207,90	10	2.675,78	-	-	-	-	945,52
		2013	10	21	1.130,35	13	654,11	7	160,90	1	315,34	-	-	654,11
		Jumlah	98	267	15.227,45	216	8.107,90	38	6.804,21	13	315,34	-	-	5.845,52
48	Kab. Tapanuli Tengah	2009	16	37	355,79	28	265,77	5	90,02	4	-	-	-	265,77
		2010	20	54	1.194,90	33	750,39	18	444,51	3	-	-	-	750,39
		2011	11	34	1.422,33	2	592,67	5	829,66	27	-	-	-	592,67
		2012	13	35	2.665,48	2	642,41	5	801,80	28	1.221,27	-	-	642,41
		2013	35	62	6.218,26	3	2.623,48	26	340,37	33	3.254,41	-	-	2.623,48
		Jumlah	95	222	11.856,76	68	4.874,72	59	2.506,36	95	4.475,68	-	-	4.874,72

Halaman 9 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
49	Kab. Tapanuli Utara	2009	42	65	5.688,28	45	161,18	16	5.527,10	4	-	-	-	161,18			
		2010	16	39	1.033,48	26	88,87	9	625,86	4	318,75	-	-	88,87			
		2011	17	40	633,19	27	331,95	11	301,24	2	-	-	-	331,95			
		2012	13	24	1.471,07	16	708,76	7	762,31	1	-	-	-	708,76			
		2013	20	35	1.255,86	9	241,82	11	1.014,04	15	-	-	-	241,82			
		Jumlah	108	203	10.081,88	123	1.532,58	54	8.230,55	26	318,75	-	-	1.532,58			
50	Kab. Toba Samosir	2009	13	34	449,39	27	426,61	6	22,78	1	-	-	-	426,61			
		2010	10	30	14.172,81	20	8.943,62	7	2.311,61	3	2.917,58	-	-	633,98			
		2011	21	54	5.104,97	8	788,13	10	484,55	36	3.832,29	-	-	417,68			
		2012	16	38	1.330,90	27	1.003,50	10	327,40	1	-	-	-	967,19			
		2013	16	23	1.489,41	13	508,06	6	981,35	4	-	-	-	189,16			
		Jumlah	76	179	22.547,48	95	11.669,92	39	4.127,69	45	6.749,87	-	-	2.634,62			
51	Kota Binjai	2009	18	34	3.436,18	19	317,91	15	3.118,27	-	-	-	-	317,91			
		2010	15	40	4.207,20	14	373,69	23	3.833,51	3	-	-	-	373,69			
		2011	22	55	6.533,16	18	457,64	4	4.331,42	33	1.744,10	-	-	457,64			
		2012	14	34	3.325,10	3	74,43	30	3.250,67	1	-	-	-	74,43			
		2013	11	28	1.444,36	4	270,62	24	1.173,74	-	-	-	-	282,28			
		Jumlah	80	191	18.946,00	58	1.494,29	96	15.707,61	37	1.744,10	-	-	1.505,95			
52	Kota Gunung Sitoli	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	13	34	206,06	20	190,26	14	15,80	3	-	-	-	190,26			
		2012	13	23	1.558,89	15	1.360,17	8	198,72	-	-	-	-	1.360,17			
		2013	16	33	7.538,72	11	-	8	3.169,00	14	4.369,72	-	-	-			
		Jumlah	42	90	9.303,67	46	1.550,43	30	3.383,52	14	4.369,72	-	-	1.550,43			
53	Kota Medan	2009	54	109	43.809,58	79	19.472,40	27	24.337,18	3	-	-	-	19.472,40			
		2010	49	128	31.463,94	73	7.417,79	54	23.699,08	1	-	-	-	347,07			
		2011	37	98	6.126,81	38	3.375,04	16	2.436,72	43	315,05	1	-	3.378,18			
		2012	49	101	38.764,47	35	5.823,37	14	649,07	52	32.292,03	-	-	5.823,37			
		2013	48	79	1.464,71,61	11	4.289,81	10	131.826,78	58	10.355,02	-	-	4.292,78			
		Jumlah	237	515	266.636,41	236	40.378,41	121	182.948,83	157	42.962,10	1	-	36.863,98			
54	Kota Padangsidimpuan	2009	17	41	8.015,62	34	556,26	7	7.459,36	-	-	-	-	556,26			
		2010	20	55	2.959,60	50	306,66	5	2.652,94	-	-	-	-	306,66			
		2011	19	53	877,31	44	269,96	6	607,35	3	-	-	-	269,96			
		2012	16	54	2.195,80	42	1.864,46	12	331,34	-	-	-	-	1.864,46			
		2013	14	30	201,68	23	164,27	7	37,41	-	-	-	-	164,27			
		Jumlah	86	233	14.250,01	193	3.161,61	37	11.088,40	3	-	-	-	3.161,61			

Halaman 10 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15		
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai				
55	Kota Pematangsiantar	2009	25	61	1.511,02	7	20	237,82	39	567,21	10	11	2	705,99	-	-	237,82
		2010	26	94	15.547,17	53	86,00	15.461,17	40	15.461,17	10	1	1	-	-	-	86,00
		2011	22	67	2.772,19	49	1.021,37	872,49	12	872,49	6	6	6	878,33	-	-	1.021,37
		2012	27	62	831,49	48	307,69	408,85	13	408,85	1	1	1	114,95	-	-	307,69
		2013	16	41	878,27	13	399,26	479,01	28	479,01	-	-	-	-	-	-	423,09
		Jumlah	116	325	21.540,14	183	2.052,14	17.788,73	132	17.788,73	10	10	10	1.699,27	-	-	2.075,97
56	Kota Sibolga	2009	17	42	226,33	35	13,20	213,13	4	213,13	-	-	-	-	-	-	13,20
		2010	10	23	458,93	8	26,57	432,36	11	432,36	-	-	-	-	-	-	26,57
		2011	23	63	1.049,08	27	224,27	637,95	8	637,95	28	28	28	186,86	-	-	118,43
		2012	14	40	1.220,45	9	283,40	677,01	7	677,01	24	24	24	260,04	-	-	283,40
		2013	11	25	5.847,50	9	66,82	468,23	8	468,23	8	8	8	5.312,45	-	-	66,82
		Jumlah	75	193	8.802,29	88	614,26	2.428,68	38	2.428,68	67	67	67	5.759,35	-	-	508,42
57	Kota Tanjungbalai	2009	16	39	2.144,80	28	890,94	1.253,86	9	1.253,86	2	2	2	-	-	-	890,94
		2010	18	47	4.299,51	29	324,57	3.143,55	17	3.143,55	1	1	1	831,39	-	-	324,57
		2011	18	35	5.540,04	19	-	5.540,04	16	5.540,04	-	-	-	-	-	-	-
		2012	15	30	380,07	17	131,80	248,27	13	248,27	-	-	-	-	-	-	131,80
		2013	32	67	9.860,41	1	654,13	903,29	2	903,29	64	64	64	8.302,99	-	-	654,13
		Jumlah	99	218	22.224,83	94	2.001,44	11.089,01	57	11.089,01	67	67	67	9.134,38	-	-	2.001,44
58	Kota Tebing Tinggi	2009	17	38	260,20	10	10,27	159,93	17	159,93	11	11	11	90,00	-	-	10,27
		2010	16	48	2.721,39	21	1.344,90	1.376,49	10	1.376,49	17	17	17	-	-	-	-
		2011	5	16	886,74	-	-	-	-	-	16	16	16	886,74	-	-	-
		2012	25	51	10.341,87	32	1.850,56	3.484,80	10	3.484,80	9	9	9	5.006,51	-	-	1.850,56
		2013	17	41	681,32	27	193,08	105,62	12	105,62	2	2	2	382,62	-	-	190,11
		Jumlah	80	194	14.891,52	90	3.398,81	5.126,84	49	5.126,84	55	55	55	6.365,87	-	-	2.050,94
59	Prov. Sumatera Barat	2009	22	73	31.452,49	54	31.440,77	11,72	18	11,72	-	-	-	-	-	-	31.440,77
		2010	130	297	5.128,43	252	3.275,05	1.853,38	43	1.853,38	2	2	2	-	-	-	3.275,05
		2011	46	135	7.511,24	91	419,90	7.091,34	44	7.091,34	-	-	-	-	-	-	419,90
		2012	53	142	3.019,02	106	1.480,89	1.312,44	35	1.312,44	1	1	1	225,69	-	-	1.480,89
		2013	24	44	17.421,89	24	17,28	16.209,74	15	16.209,74	5	5	5	1.194,87	-	-	17,28
		Jumlah	275	691	64.533,07	527	36.633,89	26.478,62	155	26.478,62	9	9	9	1.420,56	-	-	36.633,89
60	Kab. Agam	2009	28	62	3.735,67	48	3.341,96	393,71	12	393,71	2	2	2	-	-	-	3.341,96
		2010	34	71	640,11	23	166,98	472,41	46	472,41	2	2	2	-	-	-	166,98
		2011	25	62	537,51	36	352,72	177,91	36	352,72	3	3	3	-	-	-	320,54
		2012	43	100	1.652,70	58	1.057,07	595,63	38	595,63	4	4	4	-	-	-	1.057,07
		2013	13	31	659,77	23	59,60	544,39	7	544,39	1	1	1	55,78	-	-	59,60
		Jumlah	143	326	7.225,76	175	4.978,33	2.184,05	139	2.184,05	12	12	12	55,78	-	-	7,60

Halaman 11 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
61	Kab. Dharmasraya	2009	43	129	4.686,75	32	129	76	2.567,25	21	643,90	-	-	-	1.475,60
		2010	38	110	777,65	18	409,25	65	359,82	27	0,24	-	-	-	409,25
		2011	19	44	3.118,84	5	627,44	28	2.491,40	11	-	-	-	-	627,44
		2012	32	91	3.153,04	64	389,66	25	2.763,38	2	-	-	-	-	395,42
		2013	17	36	505,56	15	145,42	15	360,14	6	-	-	-	-	145,42
		Jumlah	149	410	12.241,84	134	3.047,37	209	8.541,99	67	644,14	-	-	-	3.053,13
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2009	27	81	2.428,59	49	211,63	16	1.307,64	16	909,32	-	-	-	211,63
		2010	27	64	2.919,16	2	586,02	58	2.239,74	4	93,40	-	-	-	586,02
		2011	34	92	1.293,86	30	1.087,57	58	1.161,17	4	24,12	-	-	-	1.087,57
		2012	19	35	4.458,36	24	1,84	11	4.456,52	-	-	-	-	-	1,84
		2013	16	38	2.058,09	24	49,62	14	2.008,47	-	-	-	-	-	509,76
		Jumlah	123	310	13.158,06	129	957,68	157	11.173,54	24	1.026,84	-	-	-	1.417,82
63	Kab. Lima Puluh Kota	2009	18	48	2.807,86	33	2.242,98	10	564,88	5	-	-	-	-	2.242,98
		2010	43	136	3.811,72	76	1.661,82	56	2.149,90	4	-	-	-	-	1.661,82
		2011	28	67	1.038,77	35	335,59	31	703,18	1	-	-	-	-	335,59
		2012	22	50	1.384,97	19	131,32	24	458,58	7	795,07	-	-	-	131,32
		2013	19	44	396,19	16	-	28	103,77	-	292,42	-	-	-	103,77
		Jumlah	130	345	9.439,51	179	4.371,71	149	3.980,31	17	1.087,49	-	-	-	4.475,48
64	Kab. Padang Pariaman	2009	35	74	4.033,55	47	93,59	23	3.939,96	4	-	-	-	-	93,59
		2010	20	60	508,92	20	243,91	34	265,01	6	-	-	-	-	243,91
		2011	47	142	4.892,46	41	526,43	89	4.292,62	12	73,41	-	-	-	526,43
		2012	21	56	1.509,88	9	-	37	-	10	1.509,88	-	-	-	-
		2013	56	178	4.576,43	56	589,80	43	2.059,98	79	1.926,65	-	-	-	589,80
		Jumlah	179	510	15.521,24	173	1.453,73	226	10.557,57	111	3.509,94	-	-	-	1.453,73
65	Kab. Pasaman	2009	28	86	1.357,14	51	198,53	34	1.158,61	1	-	-	-	-	198,53
		2010	52	130	6.452,95	63	172,72	62	6.260,97	5	19,26	-	-	-	172,72
		2011	15	41	683,28	23	49,84	18	49,84	-	-	-	-	-	633,44
		2012	29	75	3.703,51	29	180,02	44	3.523,49	2	-	-	-	-	180,02
		2013	36	80	2.713,56	3	1.103,35	24	492,96	53	1.117,25	-	-	-	1.103,35
		Jumlah	160	412	14.910,44	169	2.288,06	182	11.485,87	61	1.136,51	-	-	-	2.288,06
66	Kab. Pasaman Barat	2009	32	86	667,65	61	67,91	13	493,24	12	106,50	-	-	-	67,91
		2010	34	118	5.377,93	49	1.866,62	56	3.251,90	13	259,41	-	-	-	1.866,62
		2011	24	66	1.182,58	34	183,56	27	999,02	5	-	-	-	-	183,56
		2012	38	94	1.550,36	58	404,81	35	1.121,55	1	24,00	-	-	-	404,81
		2013	31	72	2.431,85	23	313,04	18	1.619,14	31	499,67	-	-	-	313,04
		Jumlah	159	436	11.210,37	225	2.835,94	149	7.484,85	62	889,58	-	-	-	2.835,94

Halaman 12 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	Kab. Pesisir Selatan	2009	20	51	779,79	43	748,99	7	30,80	-	-	-	-	-	748,99
		2010	25	72	2.852,42	50	1.752,42	21	1.100,00	-	-	-	-	-	1.752,42
		2011	32	100	564,93	87	544,03	12	20,90	-	-	-	-	-	544,17
		2012	45	105	4.195,06	87	1.240,23	18	2.954,83	-	-	-	-	-	1.272,24
		2013	15	31	1.335,03	21	437,44	10	897,59	-	-	-	-	-	437,45
		Jumlah	137	359	9.727,23	288	4.723,11	68	5.004,12	-	-	-	-	-	4.755,27
68	Kab. Sijunjung	2009	20	52	68,94	9	-	37	44,64	-	-	-	-	-	-
		2010	41	97	524,87	63	151,94	27	260,37	-	-	24,30	-	-	151,94
		2011	22	60	5,94	10	5,94	47	-	USD 924,18	-	-	-	-	-
		2012	53	126	1.665,06	69	867,84	38	797,22	-	-	-	-	-	5,94
		2013	43	93	388,90	22	156,48	22	232,42	-	-	-	-	-	868,36
		Jumlah	179	428	2.653,71	173	1.182,20	171	1.334,65	-	-	136,86	-	-	1.182,72
69	Kab. Solok	2009	27	74	5.220,59	54	427,58	20	4.793,01	-	-	-	-	-	427,58
		2010	32	102	4.615,11	75	730,80	26	3.884,31	-	-	-	-	-	730,80
		2011	34	75	1.531,80	28	121,72	46	1.410,08	-	-	-	-	-	121,72
		2012	19	42	90,38	32	3,44	3	86,94	-	-	-	-	-	3,44
		2013	22	57	558,41	28	27,42	26	530,99	-	-	-	-	-	27,42
		Jumlah	134	350	12.016,29	217	1.310,96	121	10.705,33	-	-	-	-	-	1.310,96
70	Kab. Solok Selatan	2009	25	75	11.464,07	42	-	31	11.464,07	-	-	-	-	-	-
		2010	53	168	34.088,51	4	-	157	34.088,51	-	-	-	-	-	-
		2011	27	77	1.345,35	1	-	56	1.345,35	-	-	-	-	-	-
		2012	37	114	14.226,01	21	192,89	25	12.677,46	-	-	-	-	-	194,62
		2013	29	75	6.351,13	-	23,71	-	-	-	-	-	-	-	23,71
		Jumlah	171	509	67.475,07	68	216,60	269	59.575,39	-	-	7.683,08	-	-	218,33
71	Kab. Tanah Datar	2009	39	94	971,05	88	114,35	5	856,70	-	-	-	-	-	114,35
		2010	24	65	259,83	53	73,50	12	186,33	-	-	-	-	-	73,50
		2011	36	97	2.445,25	83	25,33	13	2.419,92	-	-	-	-	-	25,33
		2012	50	168	4.486,39	123	3.565,15	33	921,24	-	-	-	-	-	3.565,15
		2013	20	55	1.508,80	43	790,89	12	717,91	-	-	-	-	-	790,89
		Jumlah	169	479	9.671,32	390	4.569,22	75	5.102,10	-	-	-	-	-	4.569,22
72	Kota Bukittinggi	2009	24	66	97,00	46	2,50	16	94,50	-	-	-	-	-	2,50
		2010	60	163	7.527,65	118	2.553,20	44	4.974,45	-	-	-	-	-	2.553,20
		2011	24	58	331,17	36	167,42	22	163,75	-	-	-	-	-	167,42
		2012	53	133	3.293,77	21	2.163,54	109	1.130,23	-	-	-	-	-	2.163,54
		2013	26	55	1.808,63	6	719,79	25	961,05	-	-	-	-	-	715,72
		Jumlah	187	475	13.058,22	227	5.606,45	216	7.323,98	-	-	127,79	-	-	5.602,38

Halaman 13 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Seluruh dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	Kota Padang	2009	47	123	6.288,12	107	6.184,01	16	104,11	-	-	-	-	6.184,01
		2010	39	123	392,09	111	287,48	11	104,61	1	-	-	-	287,48
		2011	77	240	6.930,68	183	1.850,76	50	5.079,92	7	-	-	-	1.850,76
		2012	69	215	16.719,40	146	2.579,79	17	12.068,93	52	2.070,68	-	-	2.541,70
		2013	60	148	18.168,37	70	778,18	14	1.570,12	64	15.820,07	-	-	778,18
		Jumlah	292	849	48.498,66	617	11.680,22	108	18.927,69	124	17.890,75	-	-	11.642,13
74	Kota Padang Panjang	2009	20	46	287,03	46	287,03	-	-	-	-	-	-	287,03
		2010	44	106	1.567,73	100	373,70	6	1.194,03	-	-	-	-	373,70
		2011	21	58	282,52	55	282,52	3	-	-	-	-	-	282,52
		2012	25	77	669,74	70	669,74	5	-	2	-	-	-	669,74
		2013	37	90	314,71	50	120,91	4	193,80	36	120,91	-	-	120,91
		Jumlah	147	377	3.121,73	321	1.733,90	18	1.387,83	38	-	-	-	1.733,90
75	Kota Pariaman	2009	33	81	3.907,39	46	3.222,27	32	685,12	3	-	-	-	3.222,27
		2010	21	55	835,48	43	787,93	6	787,93	6	47,55	-	-	-
		2011	29	75	1.330,85	26	126,01	14	819,24	35	385,60	-	-	126,01
		2012	13	34	304,42	29	262,68	4	41,74	1	-	-	-	262,68
		2013	32	65	1.013,76	33	471,48	5	471,48	27	298,50	-	-	243,78
		Jumlah	128	310	7.391,90	177	3.854,74	61	2.805,51	72	731,65	-	-	3.854,74
76	Kota Payakumbuh	2009	35	98	1.298,95	84	436,68	12	771,41	2	90,86	-	-	436,68
		2010	36	92	-	79	-	13	-	-	-	-	-	-
		2011	49	114	5.143,89	89	4.237,23	24	906,66	1	-	-	-	4.237,23
		2012	37	89	1.225,67	51	181,30	36	1.044,37	2	-	-	-	181,30
		2013	37	87	6.252,51	36	613,72	26	5.461,80	25	176,99	-	-	597,70
		Jumlah	194	480	13.921,02	339	5.468,93	111	8.184,24	30	267,85	-	-	5.452,91
77	Kota Sawahlunto	2009	37	103	15.332,94	64	3.083,82	20	12.238,34	19	10,78	-	-	3.083,82
		2010	29	87	27.970,10	63	12.389,84	18	15.580,26	6	-	-	-	12.389,84
		2011	32	77	4.133,23	70	3.908,56	7	224,67	-	-	-	-	3.908,56
		2012	51	138	9.795,18	87	8.457,15	21	1.030,28	30	307,75	-	-	8.492,64
		2013	19	45	16.904,93	23	4.335,13	21	12.366,20	1	203,60	-	-	4.335,13
		Jumlah	168	450	74.136,38	307	32.174,50	87	41.439,75	56	522,13	-	-	32.209,99
78	Kota Solok	2009	26	60	7.267,58	57	6.135,69	3	1.131,89	-	-	-	-	6.135,69
		2010	45	106	1.290,68	98	948,57	8	241,76	-	-	-	-	948,57
		2011	42	87	2.383,25	82	2.098,66	4	248,17	-	-	1	36,42	36,42
		2012	32	76	1.104,76	65	301,47	11	803,29	-	-	-	-	308,46
		2013	13	26	57,43	21	23,14	5	34,29	-	-	-	-	23,14
		Jumlah	158	355	12.103,70	323	9.507,53	31	2.459,40	-	-	1	136,77	8.252,57

Halaman 14 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
					Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai					
79	Prov. Riau	2009	74	323	45.829,30	222	13.802,20	99	32.027,10	2	-	13	-	13.802,20	15
		2010	80	184	49.963,89	136	7.005,09	48	42.958,80	-	-	-	-	7.005,09	
		2011	105	227	34.886,50	139	14.534,61	87	20.351,89	1	-	-	-	14.134,61	
		2012	152	429	57.316,13	250	5.633,67	105	44.456,43	73	2.051,93	1	5.174,10	9.645,49	
		2013	62	133	147.093,80	33	884,96	36	17.290,16	64	128.918,68	-	-	USD 10.55	
		Jumlah	473	1.296	335.089,62	780	41.860,53	375	157.084,38	140	130.970,61	1	5.174,10	46.229,41	
			-	-	USD 1.100,01	-	USD 0,01	-	USD 1.100,00	-	-	-	-	USD 10,55	
80	Kab. Bengkalis	2009	78	214	51.962,27	77	6.507,53	130	45.454,74	7	-	-	-	6.507,53	
		2010	52	136	23.699,95	56	2.873,75	47	13.482,07	33	7.344,13	-	-	2.910,27	
		2011	31	76	32.426,72	24	5.842,24	52	15.522,65	-	-	-	-	5.872,13	
		2012	36	96	19.275,73	28	2.212,78	22	12.863,88	46	4.199,07	-	-	2.212,78	
		2013	42	97	19.672,53	19	248,21	37	19.071,57	41	352,75	-	-	248,21	
		Jumlah	239	619	147.037,20	204	17.684,51	288	106.394,91	127	22.957,78	-	-	17.750,92	
81	Kab. Indragiri Hilir	2009	57	149	20.417,00	117	12.396,59	32	8.020,41	-	-	-	-	12.396,59	
		2010	14	23	19.264,36	14	5.589,11	8	13.675,25	1	-	-	-	5.589,11	
		2011	27	64	7.692,35	37	2.393,29	27	5.299,06	-	-	-	-	2.393,29	
		2012	38	141	11.461,81	86	662,77	47	10.799,04	8	-	-	-	662,77	
		2013	25	71	4.905,99	42	72,08	23	4.833,91	6	-	-	-	72,08	
		Jumlah	161	448	63.741,51	296	21.113,84	137	42.627,67	15	-	-	-	21.113,84	
82	Kab. Indragiri Hulu	2009	41	116	6.011,43	93	2.453,11	14	3.558,32	9	-	-	-	2.453,11	
		2010	31	82	182.687,95	57	33.954,22	20	148.733,73	5	-	-	-	33.954,22	
		2011	49	128	39.457,35	83	1.032,43	36	38.424,92	9	-	-	-	1.032,43	
		2012	28	71	13.278,30	6	1.508,42	4	11.031,09	61	738,79	-	-	1.508,42	
		2013	32	110	11.623,38	43	1.207,15	61	10.416,23	6	-	-	-	1.207,15	
		Jumlah	181	507	253.058,41	282	40.155,33	135	212.164,29	90	738,79	-	-	40.155,33	
83	Kab. Kampar	2009	46	140	9.455,10	100	4.888,68	36	4.212,41	4	354,01	-	-	4.888,68	
		2010	21	57	6.509,73	4	1.826,00	6	1.011,21	47	3.672,52	-	-	1.826,00	
		2011	58	144	3.000,49	24	1.508,77	38	672,79	82	818,93	-	-	1.508,77	
		2012	38	86	1.242,48	24	199,51	39	808,68	23	234,29	-	-	199,51	
		2013	38	74	2.301,63	19	1.466,22	50	835,41	5	-	-	-	1.466,22	
		Jumlah	201	501	22.509,43	171	9.889,18	169	7.540,50	161	5.079,75	-	-	9.889,18	
84	Kab. Kuantan Singingi	2009	32	90	11.497,05	75	9.250,35	15	2.246,70	-	-	-	-	9.250,35	
		2010	32	83	3.787,65	67	2.504,97	14	1.282,68	2	-	-	-	2.504,97	
		2011	43	113	6.158,45	75	3.741,57	36	3.741,57	2	-	-	-	3.741,57	
		2012	26	66	1.078,18	45	594,42	19	483,76	2	-	-	-	594,42	
		2013	13	27	648,51	16	108,43	8	540,08	3	-	-	-	108,43	
		Jumlah	146	379	23.169,84	278	12.813,87	92	8.294,79	9	-	-	-	12.813,87	

Halaman 15 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	Kab. Kepulauan Meranti	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	32	242,92	26	227,61	4	15,31	2	-	-	-	227,61
		2011	23	57	4.573,90	41	1.492,38	9	2.922,72	7	158,80	-	-	1.540,73
		2012	40	98	5.683,05	27	1.049,93	40	3.022,66	31	1.610,46	-	-	1.075,17
		2013	20	58	1.594,47	36	38,64	21	1.210,79	1	48,52	-	-	48,52
		Jumlah	96	245	12.094,34	130	2.808,56	74	6.305,73	41	2.980,05	-	-	2.892,03
86	Kab. Pelalawan	2009	47	193	30.562,78	76	2.324,24	107	27.476,06	10	762,48	-	-	2.332,46
		2010	23	69	3.676,08	31	1.114,03	18	2.562,05	20	-	-	-	1.114,03
		2011	27	61	3.786,56	22	552,77	36	2.948,88	3	284,91	-	-	552,77
		2012	16	54	5.974,93	42	771,16	7	-	5	5.203,77	-	-	771,16
		2013	30	80	4.116,60	55	36,92	17	229,92	8	3.849,76	-	-	36,92
		Jumlah	143	457	48.116,95	226	4.799,12	185	33.216,91	46	10.100,92	-	-	4.807,34
87	Kab. Rokan Hilir	2009	40	127	20.346,13	59	1.993,56	43	285,42	25	18.067,15	-	-	1.993,56
		2010	24	63	4.105,38	22	1.991,52	19	237,38	22	1.876,48	-	-	1.991,52
		2011	34	92	12.253,34	29	2.750,10	29	8.715,68	34	787,56	-	-	2.750,10
		2012	24	74	4.191,67	11	167,98	19	2.007,91	44	2.015,78	-	-	167,98
		2013	40	93	1.997,60	15	-	78	1.997,60	-	-	-	-	-
		Jumlah	162	449	42.894,12	136	6.903,16	188	5.315,87	125	30.675,09	-	-	6.903,16
88	Kab. Rokan Hulu	2009	35	103	8.985,99	89	983,80	14	7.846,85	-	155,34	-	-	983,80
		2010	16	43	8.930,46	28	8.369,98	15	560,48	-	-	-	-	8.369,98
		2011	26	58	2.594,98	41	633,84	16	1.853,68	1	107,46	-	-	633,84
		2012	19	33	8.738,38	8	240,97	23	8.497,41	2	-	-	-	321,01
		2013	27	55	1.513,84	35	288,45	20	850,60	-	374,79	-	-	317,65
		Jumlah	123	292	30.763,65	201	10.517,04	88	19.609,02	3	637,59	-	-	10.626,28
89	Kab. Siak	2009	62	140	25.155,13	118	22.025,65	19	3.129,48	3	-	-	-	22.025,65
		2010	59	199	31.380,71	164	20.951,32	35	10.429,39	-	-	-	-	20.951,32
		2011	49	126	14.722,85	79	1.479,78	20	12.117,81	27	1.125,26	-	-	1.479,78
		2012	52	146	3.282,65	102	2.310,58	31	972,07	13	-	-	-	3.129,06
		2013	36	107	3.621,09	45	1.660,29	19	1.960,80	43	-	-	-	4.178,27
		Jumlah	258	718	78.162,43	508	48.427,62	124	28.609,55	86	1.125,26	-	-	51.764,08
90	Kota Dumai	2009	38	98	28.611,41	65	7.524,35	25	7.737,82	8	13.349,24	-	-	7.524,35
		2010	36	96	4.634,60	67	2.174,52	21	2.047,25	8	412,83	-	-	2.174,52
		2011	28	61	2.447,96	50	1.196,63	8	626,47	3	624,86	-	-	1.196,63
		2012	25	66	-	-	USD 177,99	-	USD 80,04	-	-	-	-	USD 177,99
		2013	56	116	6.497,38	17	-	28	1.655,98	71	4.841,40	-	-	64,61
		Jumlah	183	437	42.191,35	238	10.895,50	108	12.067,52	91	19.228,33	-	-	10.960,11
			-	-	USD 258,03	-	USD 177,99	-	USD 80,04	-	-	-	-	USD 177,99

Halaman 16 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	Kota Pekanbaru	3	51	109	8.852,29	75	1.222,23	30	6.573,83	3	1.019,14	1	37,09	1.222,23
		2009	27	61	5.958,29	35	4.121,83	24	1.836,46	2	-	-	-	4.121,83
		2010	27	61	5.958,29	35	4.121,83	24	1.836,46	2	-	-	-	4.121,83
		2011	34	76	3.172,48	35	630,39	32	2.542,09	9	-	-	-	630,39
		2012	42	107	12.825,02	44	4.000,00	61	8.825,02	2	-	-	-	4.000,00
		2013	51	132	736,79	34	57,46	47	679,33	51	-	-	-	57,46
		Jumlah	205	485	31.544,87	223	10.031,91	194	20.456,73	67	1.019,14	1	37,09	10.031,91
92	Prov. Jambi		43	101	7.627,40	99	7.187,95	2	439,45	-	-	-	-	7.655,96
		2009	55	127	3.854,63	93	3.113,68	34	740,95	-	-	-	-	3.113,68
		2010	47	113	11.529,89	65	2.362,06	48	8.527,94	-	-	-	-	2.362,06
		2011	40	81	27.696,11	52	7.623,70	29	20.072,41	-	-	-	-	7.623,70
		2012	64	170	1.043,36	38	7,83	38	223,22	94	812,31	-	-	4.295,72
		2013	249	592	51.751,39	347	20.295,22	151	30.003,97	94	1.452,20	-	-	25.051,12
		Jumlah	30	96	3.377,72	69	1.846,76	27	1.530,96	-	-	-	-	1.842,66
93	Kab. Batang Hari		31	78	6.847,44	47	4.297,07	31	2.550,37	-	-	-	-	4.345,66
		2009	49	86	175,26	27	128,24	59	47,02	-	-	-	-	128,24
		2010	24	52	2.415,96	37	2.224,98	14	190,98	1	-	-	-	2.224,98
		2011	18	58	5.411,99	35	11,22	23	5.400,77	-	-	-	-	697,68
		2012	152	370	18.228,37	215	8.508,27	154	9.720,10	1	-	-	-	9.239,22
		Jumlah	58	139	4.859,48	113	544,99	26	4.314,49	-	-	-	-	544,99
94	Kab. Bungo		48	102	19.532,50	54	6.038,63	48	13.493,87	-	-	-	-	6.066,03
		2009	27	55	286,23	39	120,50	16	165,73	-	-	-	-	120,50
		2010	56	136	3.384,01	68	573,39	54	2.810,62	14	-	-	-	3,36
		2011	26	82	924,15	15	210,71	18	367,01	49	346,43	-	-	290,57
		2012	215	514	28.986,37	289	7.488,22	162	21.151,72	63	346,43	-	-	7.025,45
		Jumlah	45	102	11.976,66	67	1.925,92	35	10.050,74	-	-	-	-	2.562,06
95	Kab. Kerinci		44	85	6.241,96	29	1.066,68	34	5.175,28	22	-	-	-	1.077,79
		2009	23	58	1.263,00	31	126,30	25	-	2	-	-	-	379,59
		2010	82	187	1.870,06	112	623,78	71	1.246,28	4	-	-	-	490,00
		2011	15	53	1.864,28	23	974,12	29	890,16	1	-	-	-	974,12
		2012	209	485	22.079,26	262	4.716,80	194	17.362,46	29	-	-	-	5.483,56
		Jumlah	33	97	7.947,74	57	1.774,44	40	6.173,30	-	-	-	-	1.774,44
96	Kab. Merangin		21	45	3.585,13	27	1.879,20	18	1.705,93	-	-	-	-	1.879,20
		2009	22	59	1.666,07	15	533,03	25	1.133,04	19	-	-	-	533,03
		2010	48	117	1.819,55	43	1.288,16	69	531,39	5	-	-	-	1.353,39
		2011	33	100	4.176,62	7	670,90	70	3.235,15	23	270,57	-	-	1.012,90
		2012	157	418	19.195,11	149	6.145,73	222	12.778,81	47	270,57	-	-	6.552,96
		Jumlah												

Halaman 17 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
97	Kab. Muaro Jambi	2009	42	113	4.395,16	101	3.835,28	12	559,88	-	-	-	-	-	3.840,77
		2010	25	60	3.160,87	48	2.111,54	12	1.049,33	-	-	-	-	-	2.129,16
		2011	29	60	6.234,11	34	1.451,80	25	4.782,31	-	-	-	-	-	1.451,80
		2012	49	97	511,18	77	511,18	19	-	-	-	-	-	-	511,18
		2013	12	26	385,10	16	-	2	9,98	-	375,12	-	-	-	1.167,29
		Jumlah	157	356	14.686,42	276	7.909,80	70	6.401,50	10	375,12	-	-	-	9.100,20
98	Kab. Sarolangun	2009	38	99	8.175,48	69	3.163,87	30	5.011,61	-	-	-	-	-	3.163,87
		2010	39	67	7.125,58	12	1.837,16	42	3.894,69	13	1.393,73	-	-	-	1.837,16
			-	-	USD 466,91	-	-	-	-	-	USD 466,91	-	-	-	-
		2011	27	59	1.845,98	14	382,53	26	1.007,82	19	455,63	-	-	-	382,53
		2012	48	130	47.722,93	18	2.220,37	111	43.806,81	1	1.695,75	-	-	-	2.248,29
		2013	30	82	2.725,86	8	429,95	50	1.722,20	24	573,71	-	-	-	472,99
		Jumlah	182	437	67.595,83	121	8.033,88	259	55.443,13	57	4.118,82	-	-	-	8.104,84
			-	-	USD 466,91	-	-	-	-	-	USD 466,91	-	-	-	-
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	2009	32	106	16.618,21	66	5.860,66	37	10.757,55	3	-	-	-	-	5.620,06
		2010	21	48	1.772,46	32	917,42	14	855,04	2	917,42	-	-	-	917,42
		2011	63	32	1.593,47	11	1.133,78	48	459,69	4	-	-	-	-	1.106,65
		2012	20	53	10.999,34	11	2.926,99	34	3.255,47	8	4.816,88	-	-	-	2.926,99
		2013	23	53	708,35	22	670,07	28	38,28	3	216,54	-	-	-	216,54
		Jumlah	128	323	31.691,83	142	11.508,92	161	15.366,03	20	4.816,88	-	-	-	10.787,66
100	Kab. Tanjung Jabung Barat	2009	52	129	5.866,56	112	1.847,67	17	4.018,89	-	-	-	-	-	1.847,67
		2010	33	60	949,71	37	595,31	23	354,40	-	-	-	-	-	595,31
		2011	23	43	9.495,48	16	1.637,69	23	7.835,38	4	22,41	-	-	-	1.637,69
		2012	22	70	4.636,39	8	1.541,35	58	3.095,04	4	-	-	-	-	1.541,35
		2013	44	119	3.952,30	33	265,2	33	1.494,35	53	2.431,43	-	-	-	1.613,07
		Jumlah	174	421	24.900,44	206	5.648,54	154	16.798,06	61	2.453,84	-	-	-	7.235,09
101	Kab. Tebo	2009	43	108	19.482,65	69	12.190,57	38	7.292,08	1	-	-	-	-	12.190,57
		2010	40	80	7.842,03	25	1.983,19	43	5.461,70	12	397,14	-	-	-	1.983,19
		2011	29	71	2.555,02	25	1.622,93	36	831,11	10	100,98	-	-	-	2.057,06
		2012	41	91	766,68	43	44,63	45	722,05	3	-	-	-	-	36,01
		2013	16	40	2.881,40	14	1.785,72	18	480,63	8	615,05	-	-	-	-
		Jumlah	169	390	33.527,78	176	17.627,04	180	14.787,57	34	1.113,17	-	-	-	16.266,83
102	Kota Jambi	2009	87	191	13.206,64	156	4.177,73	35	9.028,91	-	-	-	-	-	4.177,73
		2010	26	59	2.693,41	35	1.248,44	24	1.444,97	-	-	-	-	-	1.401,44
		2011	54	119,04	47,89	13	51,95	13	19,20	8	19,20	-	-	-	169,80
		2012	17	41	291,53	13	201,20	24	90,33	4	-	-	-	-	329,42
		2013	20	67	319,91	-	-	3	-	64	319,91	-	-	-	-
		Jumlah	170	412	16.630,53	237	5.675,26	99	10.616,16	76	339,11	-	-	-	6.078,39

Halaman 18 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai			
103	Kota Sungai Penuh	2009	4	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	15	27	120,25	109,39	20	7	10,86	-	-	-	-	-	-	548,30	
		2011	21	70	1.599,20	1.180,63	56	14	418,57	-	-	-	-	-	-	1.200,74	
		2012	33	77	3.781,00	894,22	28	32	2.847,33	-	-	17	39,45	-	-	-	848,11
		2013	12	30	648,31	103,26	17	13	545,05	-	-	-	-	-	-	-	16,74
	Jumlah	81	204	6.148,76	2.287,50	121	66	3.821,81	-	-	17	39,45	-	-	-	2.613,89	
104	Prov. Sumatera Selatan	2009	40	92	9.406,59	982,20	74	17	8.424,39	-	-	-	-	-	-	-	2.337,36
		2010	35	81	10.203,01	975,53	62	19	9.227,48	-	-	1	-	-	-	-	1.005,22
		2011	68	169	5.770,34	3.669,73	142	26	1.231,93	-	-	1	868,68	-	-	-	3.669,74
		2012	78	204	20.084,64	1.841,31	148	49	3.817,06	-	-	7	14.426,27	-	-	-	1.791,31
		2013	42	119	78.014,52	842,67	22	53	77.171,85	-	-	44	-	-	-	-	1.935,85
	Jumlah	263	665	123.479,10	8.311,44	448	164	99.872,71	-	-	53	15.294,95	-	-	-	10.739,48	
105	Kab. Banyuasin	2009	29	74	5.365,20	2.756,31	66	8	2.608,89	-	-	-	-	-	-	-	2.742,19
		2010	23	60	752,43	677,13	59	1	75,30	-	-	-	-	-	-	-	3.224,73
		2011	17	46	1.033,39	941,24	43	3	92,15	-	-	-	-	-	-	-	941,24
		2012	35	86	936,89	751,40	75	11	185,49	-	-	-	-	-	-	-	367,39
		2013	15	39	446,44	232,36	34	4	99,88	-	-	1	114,20	-	-	-	207,42
	Jumlah	119	305	8.534,35	5.358,44	277	27	3.061,71	-	-	1	114,20	-	-	-	7.482,97	
106	Kab. Empat Lawang	2009	28	76	2.257,52	957,49	65	11	1.300,03	-	-	-	-	-	-	-	926,68
		2010	25	69	858,96	138,48	58	11	720,48	-	-	-	-	-	-	-	138,52
		2011	22	63	4.416,86	120,80	40	23	4.296,06	-	-	-	-	-	-	-	201,18
		2012	33	89	7.486,39	262,88	52	36	7.223,51	-	-	1	-	-	-	-	280,21
		2013	16	57	2.542,60	87,25	35	21	2.455,35	-	-	1	-	-	-	-	87,25
	Jumlah	124	354	17.562,33	1.566,90	250	102	15.995,43	-	-	2	-	-	-	-	1.633,84	
107	Kab. Lahat	2009	41	93	1.472,57	645,50	80	11	827,07	-	-	-	-	-	-	-	645,50
		2010	34	90	3.353,61	545,00	75	15	2.808,61	-	-	-	-	-	-	-	555,46
		2011	23	54	406,73	282,92	47	7	123,81	-	-	-	-	-	-	-	507,56
		2012	29	75	3.004,82	1.281,37	55	19	1.527,93	-	-	1	195,52	-	-	-	2.084,48
		2013	16	45	1.621,92	789,94	29	16	831,98	-	-	-	-	-	-	-	849,57
	Jumlah	143	357	9.859,65	3.544,73	286	68	6.119,40	-	-	3	195,52	-	-	-	4.642,57	
108	Kab. Muara Enim	2009	48	83	1.021,62	425,65	68	15	595,97	-	-	-	-	-	-	-	425,65
		2010	38	91	986,30	714,17	83	8	272,13	-	-	-	-	-	-	-	1.723,85
		2011	23	54	1.50	1.50	52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	35,70
		2012	28	53	988,93	659,05	40	10	329,88	-	-	3	-	-	-	-	1.154,90
		2013	39	109	2.111,41	1.617,11	56	36	494,30	-	-	17	-	-	-	-	1.636,65
	Jumlah	176	390	5.109,76	3.417,48	299	71	1.692,28	-	-	20	-	-	-	-	4.976,75	

Halaman 19 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	Kab. Musi Banyuwasin	2009	43	99	26.151,62	87	10.297,28	12	15.854,34	-	-	-	-	10.723,18
		2010	35	60	433,96	40	163,03	6	270,93	14	-	-	-	163,03
		2011	23	61	1.300,67	51	259,31	10	1.041,36	-	-	-	-	582,77
		2012	59	131	5.473,68	81	3.687,58	29	1.786,10	21	-	-	-	1.993,10
		2013	37	86	5.884,73	25	3.083,62	8	1.018,71	53	1.782,40	-	-	539,54
		Jumlah	197	437	39.244,66	284	17.490,82	65	19.971,44	88	1.782,40	-	-	14.001,62
110	Kab. Musi Rawas	2009	33	69	1.659,14	67	1.557,01	2	102,13	-	-	-	-	1.542,75
		2010	24	44	-	44	-	-	-	-	-	-	-	18,02
		2011	21	52	868,16	48	786,70	4	81,46	-	-	-	-	819,80
		2012	32	85	1.255,82	79	919,51	5	336,31	1	-	-	-	1.368,46
		2013	23	68	6.697,81	32	760,93	11	954,15	25	4.982,73	-	-	780,87
		Jumlah	133	318	10.480,93	270	4.024,15	22	1.474,05	26	4.982,73	-	-	4.529,90
111	Kab. Ogan Ilir	2009	24	54	2.762,26	40	1.908,25	14	854,01	-	-	-	-	1.908,25
		2010	14	36	1.159,00	33	187,26	3	971,74	-	-	-	-	189,49
		2011	38	83	3.400,56	68	3.355,50	13	45,06	2	-	-	-	3.355,70
		2012	20	45	1.157,81	37	788,51	7	369,30	1	-	-	-	788,51
		2013	19	52	9.650,75	30	1.122,58	12	3.139,79	10	5.388,38	-	-	1.485,93
		Jumlah	115	270	18.130,38	208	7.362,10	49	5.379,90	13	5.388,38	-	-	7.727,88
112	Kab. Ogan Komering Ilir	2009	29	65	159,75	65	159,75	-	-	-	-	-	-	159,75
		2010	28	76	1.624,34	76	1.624,34	-	-	-	-	-	-	1.948,57
		2011	17	44	37,45	41	37,45	3	-	-	-	-	-	37,45
		2012	34	62	1.077,89	61	946,54	1	131,35	-	-	-	-	946,54
		2013	23	60	472,65	32	188,28	14	167,67	14	116,70	-	-	2.886,56
		Jumlah	131	307	3.372,08	275	2.956,36	18	299,02	14	116,70	-	-	5.978,87
113	Kab. Ogan Komering Ulu	2009	60	137	2.423,98	107	1.220,22	29	1.203,76	1	-	-	-	1.220,22
		2010	40	92	5.378,43	73	2.485,03	18	2.893,40	1	-	-	-	2.485,03
		2011	29	58	470,17	43	149,82	13	311,97	2	8,38	-	-	2.345,49
		2012	22	58	2.702,13	32	640,66	7	868,89	19	1.192,58	-	-	654,05
		2013	35	100	3.484,55	32	815,87	12	2.178,73	56	489,95	-	-	1.495,27
		Jumlah	186	445	14.459,26	287	5.311,60	79	7.456,75	79	1.690,91	-	-	8.200,06
114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2009	30	72	3.432,13	60	2.940,89	12	491,24	-	-	-	-	2.940,89
		2010	18	53	496,03	50	340,74	3	155,29	-	-	-	-	340,74
		2011	24	65	1.552,20	40	1.116,17	10	1.295,93	10	140,10	-	-	268,82
		2012	22	53	3.787,98	39	1.345,35	13	2.442,63	1	-	-	-	3.938,94
		2013	27	93	4.735,26	49	743,17	11	1.730,35	33	2.261,74	-	-	1.467,90
		Jumlah	121	336	14.003,60	238	5.486,32	49	6.115,44	49	2.401,84	-	-	8.957,29

Halaman 20 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2009	15	40	468,06	40	468,06	-	-	-	-	-	-	468,06
		2010	26	70	2.361,09	70	2.361,09	-	-	-	-	-	-	2.255,16
		2011	19	47	593,15	47	593,15	-	-	-	-	-	-	593,15
		2012	23	61	2.925,73	57	2.812,54	4	113,19	-	-	-	-	2.812,54
		2013	18	50	737,49	43	243,15	7	494,34	-	-	-	-	1.935,91
		Jumlah	101	268	7.085,52	257	6.477,99	11	607,53	-	-	-	-	8.064,82
116	Kota Lubuklinggau	2009	29	58	139,92	56	69,65	2	70,27	-	-	-	-	69,65
		2010	18	49	296,73	49	296,73	-	-	-	-	-	-	319,45
		2011	41	85	2.763,96	81	1.829,25	4	934,71	-	-	-	-	2.459,96
		2012	18	40	315,41	37	28,15	3	287,26	-	-	-	-	28,15
		2013	16	37	6,86	19	1,55	8	5,31	10	-	-	-	532,30
		Jumlah	122	269	3.522,88	242	2.225,33	17	1.297,55	10	-	-	-	3.409,51
117	Kota Pagar Alam	2009	18	38	243,66	36	118,47	2	125,19	-	-	-	-	230,43
		2010	17	40	2.027,40	30	27,85	9	1.999,55	1	-	-	-	2.891
		2011	50	127	2.632,09	111	2.118,90	13	508,12	3	5,07	-	-	4.374,56
		2012	25	59	6.265,93	50	4.849,26	3	640,36	6	776,31	-	-	4.940,24
		2013	36	94	2.460,26	31	484,80	28	1.800,81	35	174,65	-	-	484,80
		Jumlah	146	358	13.629,34	258	7.599,28	55	5.074,03	45	956,03	-	-	10.058,94
118	Kota Palembang	2009	57	112	7.837,66	67	129,39	35	7.708,27	10	-	-	-	129,39
		2010	26	51	26,97	35	5,61	16	21,36	-	-	-	-	5,61
		2011	34	86	1.609,90	74	792,58	8	817,32	4	-	-	-	792,58
		2012	63	139	13.239,78	107	7.725,31	31	4.875,66	1	638,81	-	-	9.410,47
		2013	51	187	5.104,90	82	2.004,45	30	2.839,39	75	261,06	-	-	2.159,02
		Jumlah	231	575	27.819,21	365	10.657,34	120	16.262,00	90	899,87	-	-	12.497,07
119	Kota Prabumulih	2009	26	73	1.860,70	66	1.028,86	7	831,84	-	-	-	-	1.664,07
		2010	23	55	4.211,47	48	3.588,65	7	62,82	-	-	-	-	3.588,65
		2011	16	38	-	35	-	3	-	-	-	-	-	54,69
		2012	23	65	4.582,01	46	725,38	17	2.873,48	2	983,15	-	-	752,36
		2013	15	36	2.675,47	29	281,77	7	2.393,70	-	-	-	-	2.363,13
		Jumlah	103	267	13.329,65	224	5.624,66	41	6.721,84	2	983,15	-	-	8.422,90
120	Prov. Bengkulu	2009	73	139	18.809,01	87	13.432,19	50	5.376,82	-	-	-	-	8.436,09
		2010	51	87	5.712,67	49	4.278,72	36	1.483,95	2	-	-	-	4.177,95
		2011	48	112	4.934,22	39	3.784,81	70	1.149,41	2	-	-	-	3.512,61
		2012	33	65	3.791,48	31	12,76	27	3.778,72	7	-	-	-	310,79
		2013	63	136	14.643,70	28	4.784,75	49	2.825,16	59	7.033,79	-	-	3.367,65
		Jumlah	268	539	47.891,08	234	26.293,23	232	14.564,06	70	7.033,79	-	-	19.805,09

Halaman 21 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
121	Kab. Bengkulu Selatan	2009	45	77	1.826,88	54	762,15	14	1.064,73	-	-	9	-	-	865,45		
		2010	20	36	2.162,44	15	1.782,97	13	379,47	8	-	-	-	-	929,75		
		2011	21	41	205,81	5	-	19	66,65	17	139,16	-	-	-	-		
		2012	16	40	1.563,37	8	1.202,76	4	143,42	28	217,19	-	-	-	51,95		
		2013	10	18	87,85	4	-	10	-	4	87,85	-	-	-	87,85		
		Jumlah	112	212	5.846,35	86	3.747,88	60	1.654,27	57	444,20	9	-	-	1.935,00		
122	Kab. Bengkulu Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	12	21	36,10	13	36,10	8	-	-	-	-	-	-	36,10		
		2011	9	13	170,72	5	123,39	6	47,33	2	-	-	-	-	123,39		
		2012	21	42	413,11	13	413,11	27	-	2	-	-	-	-	413,11		
		2013	23	61	2.345,43	-	304,10	5	255,26	56	1.786,07	-	-	-	304,10		
		Jumlah	65	137	2.965,36	31	876,70	46	302,59	60	1.786,07	-	-	-	876,70		
123	Kab. Bengkulu Utara	2009	27	50	3.413,76	36	1.663,03	14	1.750,73	-	-	-	-	-	1.654,45		
		2010	39	90	1.995,65	26	228,80	64	1.766,85	-	-	-	-	-	228,80		
		2011	24	37	1.815,99	25	728,04	12	1.087,95	2	-	-	-	-	728,04		
		2012	28	38	7.323,29	23	4.402,54	15	2.920,75	-	-	-	-	-	4.402,54		
		2013	5	11	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	123	226	14.548,69	112	7.022,41	114	7.526,28	-	-	-	-	-	7.013,83		
124	Kab. Kaur	2009	13	25	879,51	20	675,19	4	204,32	-	-	1	-	-	675,19		
		2010	8	18	1.122,97	8	599,12	10	523,85	-	-	-	-	-	521,35		
		2011	10	17	1.944,33	4	475,33	13	1.469,00	-	-	-	-	-	475,33		
		2012	13	28	463,48	13	127,64	10	335,84	5	-	-	-	-	77,64		
		2013	22	48	80,94	10	80,94	5	-	33	-	-	-	-	80,94		
		Jumlah	66	136	4.491,23	55	1.958,22	42	2.533,01	38	-	1	-	-	1.830,45		
125	Kab. Kepahiang	2009	23	49	3.443,82	39	3.166,09	10	277,73	-	-	-	-	-	3.146,86		
		2010	21	38	3.122,06	23	1.957,55	15	1.164,51	-	-	-	-	-	1.939,88		
		2011	13	27	4.191,03	3	3.796,76	24	394,27	-	-	-	-	-	3.797,83		
		2012	10	22	6.819,17	6	6.819,17	16	6.819,17	-	-	-	-	-	-		
		2013	24	50	6.935,59	28	3.146,35	20	3.535,19	2	254,05	-	-	-	1.924,40		
		Jumlah	91	186	24.511,67	99	12.066,75	85	12.190,87	2	254,05	-	-	-	10.808,97		
126	Kab. Lebong	2009	18	38	3.296,41	16	556,93	18	2.739,48	4	-	-	-	-	556,93		
		2010	21	36	1.868,92	10	379,44	26	1.489,48	-	-	-	-	-	379,44		
		2011	21	49	2.863,98	14	2.076,78	30	787,20	5	-	-	-	-	2.076,78		
		2012	31	55	685,99	7	66,00	44	257,99	4	362,00	-	-	-	66,00		
		2013	17	46	12.911,88	5	3.291,26	3	1.828,28	38	7.792,34	-	-	-	3.291,26		
		Jumlah	108	224	21.627,18	52	6.370,41	121	7.102,43	51	8.154,34	-	-	-	6.370,41		

Halaman 22 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	Kab. Mukomuko	2009	31	61	710,13	14	417,38	3	292,75	44	-	-	-	49,26
		2010	13	25	702,34	13	411,53	12	290,81	-	-	-	-	411,53
		2011	17	36	993,57	16	767,26	18	226,31	2	-	-	-	767,26
		2012	6	16	1.479,37	11	364,28	5	1.115,09	-	-	-	-	364,28
		2013	8	10	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	75	148	3.885,41	62	1.960,45	40	1.924,96	46	-	-	-	1.592,33
128	Kab. Rejang Lebong	2009	38	70	1.711,63	27	359,96	39	568,32	4	783,35	-	-	359,96
		2010	29	56	1.339,67	40	376,61	15	963,06	1	-	-	-	358,61
		2011	20	32	588,70	20	204,31	12	384,39	-	-	-	-	204,31
		2012	28	48	61,06	18	23,37	28	37,69	2	-	-	-	23,37
		2013	15	42	2.557,71	14	350,77	16	1.914,35	12	292,59	-	-	350,77
		Jumlah	130	248	6.258,77	119	1.315,02	110	3.867,81	19	1.075,94	-	-	1.297,02
129	Kab. Seluma	2009	20	35	2.017,16	19	659,01	14	1.358,15	-	-	2	-	574,35
		2010	13	23	172,12	6	32,00	11	140,12	6	-	-	-	32,00
		2011	20	44	3.093,99	21	1.669,87	19	1.424,12	4	-	-	-	1.669,87
		2012	20	60	10.812,46	19	1.359,46	23	9.453,00	17	-	1	-	1.229,66
		2013	28	72	5.288,44	12	494,73	31	3.909,09	29	884,62	-	-	494,73
		Jumlah	101	234	21.384,17	77	4.215,07	98	16.284,48	56	884,62	3	-	4.000,61
130	Kota Bengkulu	2009	103	185	2.931,13	78	2.856,18	43	13,73	64	61,22	-	-	2.856,18
		2010	15	31	1.239,85	14	939,85	16	300,00	1	-	-	-	-
		2011	27	58	1.256,23	9	488,66	45	767,57	4	-	-	-	488,85
		2012	32	73	2.628,16	8	1.389,53	34	1.177,79	31	60,84	-	-	1.105,39
		2013	30	65	1.017,79	6	328,46	6	460,68	53	228,65	-	-	328,46
		Jumlah	207	412	9.073,16	115	6.002,68	144	2.719,77	153	350,71	-	-	4.778,88
131	Prov. Lampung	2009	44	103	11.843,77	83	9.300,22	19	2.543,55	1	-	-	-	9.300,22
		2010	43	114	6.033,33	106	2.274,53	7	3.758,80	1	-	-	-	2.274,92
		2011	90	231	19.501,92	156	17.841,83	57	1.660,09	18	-	-	-	17.841,83
		2012	26	63	9,28	49	9,28	11	-	3	-	-	-	9,28
		2013	99	202	11.283,85	32	8.289,59	12	731,68	158	2.262,58	-	-	8.336,59
		Jumlah	302	713	48.672,15	426	37.715,45	106	8.694,12	181	2.262,58	-	-	37.762,84
132	Kab. Lampung Barat	2009	17	35	804,94	35	804,94	-	-	-	-	-	-	916,32
		2010	16	38	261,76	37	193,68	1	68,08	-	-	-	-	193,68
		2011	19	48	176,13	48	176,13	-	-	-	-	-	-	176,13
		2012	8	22	264,52	21	264,52	1	-	-	-	-	-	264,52
		2013	23	44	1.303,12	20	282,98	7	-	17	1.020,14	-	-	282,98
		Jumlah	83	187	2.810,47	161	1.722,25	9	68,08	17	1.020,14	-	-	1.833,63

Halaman 23 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
133	Kab. Lampung Selatan	2009	18	45	697,42	43	306,99	2	390,43	-	-	-	-	-	306,99
		2010	24	56	2.633,75	53	2.546,87	3	86,88	-	-	-	-	-	2.546,87
		2011	38	104	2.823,65	101	2.753,73	3	69,92	-	-	-	-	-	2.753,73
		2012	36	96	1.451,24	67	636,74	29	814,50	-	-	-	-	-	673,92
		2013	21	64	5.658,45	34	1.475,90	11	3.072,11	-	-	-	-	-	448,85
		Jumlah	137	365	13.264,51	298	7.720,23	48	4.433,84	-	-	-	-	-	6.730,36
134	Kab. Lampung Tengah	2009	21	60	8.637,02	52	5.675,33	8	2.961,69	-	-	-	-	-	5.675,33
		2010	20	69	7.559,79	62	7.271,74	7	288,05	-	-	-	-	-	7.271,74
		2011	27	74	31.350,24	66	2.246,59	5	29.103,65	-	-	-	-	-	2.246,59
		2012	17	44	366,15	38	366,15	4	-	-	-	-	-	-	366,15
		2013	23	57	3.987,92	14	1.206,74	35	2.781,18	-	-	-	-	-	1.240,35
		Jumlah	108	304	51.901,12	232	16.766,55	59	35.134,57	-	-	-	-	-	16.800,16
135	Kab. Lampung Timur	2009	23	53	4.541,40	41	145,05	12	4.396,35	-	-	-	-	-	624,63
		2010	22	60	2.058,47	39	307,53	18	1.750,94	-	-	-	-	-	1.776,3
		2011	38	109	114.875,10	46	285,90	62	114.589,20	-	-	-	-	-	285,90
		2012	14	35	272,22	3	29,28	32	242,94	-	-	-	-	-	134,82
		2013	25	62	1.563,65	16	229,64	22	1.285,74	-	-	-	-	-	229,64
		Jumlah	122	319	123.310,84	145	997,40	146	122.265,17	-	-	-	-	-	1.452,62
136	Kab. Lampung Utara	2009	24	51	5.083,94	43	3.660,43	8	1.423,51	-	-	-	-	-	3.660,65
		2010	38	101	4.997,20	67	1.539,09	16	3.458,11	-	-	-	-	-	1.539,09
		2011	52	131	3.030,75	58	1.425,38	40	1.090,23	-	-	-	-	-	1.425,38
		2012	16	44	599,91	14	132,08	21	418,61	-	-	-	-	-	197,08
		2013	29	67	17.490,33	22	0,40	8	25,56	-	-	-	-	-	14,58
		Jumlah	159	394	31.202,13	204	6.757,38	93	6.416,02	-	-	-	-	-	6.836,78
137	Kab. Mesuji	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	42	578,96	34	238,04	6	340,92	-	-	-	-	-	238,04
		2012	12	42	1.232,07	27	349,61	13	882,46	-	-	-	-	-	349,61
		2013	18	55	2.572,15	31	452,13	2	490,66	-	-	-	-	-	452,13
		Jumlah	46	139	4.383,18	92	1.039,78	21	1.714,04	-	-	-	-	-	1.039,78
138	Kab. Pesawaran	2009	4	12	623,95	10	446,38	2	177,57	-	-	-	-	-	446,38
		2010	20	58	688,02	50	160,72	8	527,30	-	-	-	-	-	160,72
		2011	16	42	467,62	38	420,31	4	420,31	-	-	-	-	-	47,31
		2012	17	41	794,67	31	162,53	6	632,14	-	-	-	-	-	162,53
		2013	43	103	1.064,49	38	270,92	8	793,57	-	-	-	-	-	275,50
		Jumlah	100	256	3.638,75	167	1.087,86	28	2.550,89	-	-	-	-	-	1.092,44

Halaman 24 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
139	Kab. Pringsewu	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	14	246,74	49	246,74	-	-	-	-	-	-	-	-	246,74
		2012	23	1.012,33	51	737,62	6	274,71	-	-	-	-	-	-	737,62
		2013	23	1.430,17	15	1.269,57	11	160,60	23	-	-	-	-	-	1.269,57
		Jumlah	60	2.689,24	115	2.253,93	17	435,31	23	-	-	-	-	-	2.253,93
140	Kab. Pesisir Barat*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Kab. Tanggamus	2009	23	7.687,62	52	7.160,20	8	527,42	-	-	-	-	-	-	7.160,20
		2010	21	3.832,31	65	3.507,97	4	324,34	-	-	-	-	-	-	1.769,73
		2011	15	238,62	40	209,87	3	28,75	-	-	-	-	-	-	209,87
		2012	29	1.205,41	34	1.154,38	43	51,03	1	-	-	-	-	-	1.094,29
		2013	21	1.179,13	35	557,34	2	31,99	17	590,40	-	-	-	-	557,34
		Jumlah	109	14.143,09	226	12.589,76	60	962,93	18	590,40	-	-	-	-	10.791,43
142	Kab. Tulang Bawang	2009	26	2.819,46	50	1.142,82	5	1.676,64	-	-	-	-	-	-	1.142,82
		2010	31	5.902,80	91	4.929,81	4	972,99	-	-	-	-	-	-	4.929,81
		2011	17	413,57	42	206,29	1	207,28	-	-	-	-	-	-	206,29
		2012	34	1.855,55	49	1.85,55	43	-	-	-	-	-	-	-	1.108,13
		2013	22	2.974,74	26	2.974,74	8	2.607,96	12	366,78	-	-	-	-	-
		Jumlah	130	12.296,12	258	6.464,47	61	5.464,87	14	366,78	-	-	-	-	7.387,05
143	Kab. Tulang Bawang Barat	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	170,19	42	170,19	-	-	-	-	-	-	-	-	170,19
		2012	13	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,69
		2013	19	1.968,64	22	645,61	1	-	20	1.323,03	-	-	-	-	702,25
		Jumlah	45	2.138,83	100	815,80	1	-	20	1.323,03	-	-	-	-	1.287,13
144	Kab. Way Kanan	2009	22	1.143,64	35	346,76	22	445,27	11	351,61	-	-	-	-	346,76
		2010	21	1.276,65	31	645,54	23	631,11	3	-	-	-	-	-	645,54
		2011	16	1.091,45	44	292,88	19	798,57	-	-	-	-	-	-	292,88
		2012	19	619,47	17	142,50	37	476,97	5	-	-	-	-	-	564,24
		2013	25	1.037,13	11	35,18	8	21,87	45	982,08	-	-	-	-	36,64
		Jumlah	103	5.168,34	119	1.460,86	109	2.373,79	64	1.333,69	-	-	-	-	1.886,06

Halaman 25 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	Kota Bandar Lampung	2009	40	91	1.387,40	73	1.201,03	2	186,37	16	-	-	-	1.201,03
		2010	45	116	4.053,81	110	2.833,83	6	1.219,98	-	-	-	-	2.833,83
		2011	36	87	3.776,15	74	1.758,07	13	2.018,08	-	-	-	-	1.758,07
		2012	36	108	778,64	94	778,64	14	-	-	-	-	-	778,64
		2013	35	92	3.751,89	40	794,41	8	1.743,26	44	1.214,22	-	-	1.017,81
		Jumlah	192	494	13.747,89	391	7.365,98	43	5.167,69	60	1.214,22	-	-	7.589,38
146	Kota Metro	2009	33	65	311,55	62	99,95	2	205,60	1	6,00	-	-	99,95
		2010	22	62	666,31	42	437,17	19	229,14	1	-	-	-	437,17
		2011	77	387,55	387,55	69	18,19	7	369,36	1	-	-	-	18,19
		2012	15	25	49,70	21	49,70	2	-	2	-	-	-	49,70
		2013	17	44	139,53	31	106,81	12	32,70	1	0,02	-	-	94,35
		Jumlah	116	273	1.554,64	225	711,82	42	836,80	6	6,02	-	-	699,36
147	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2009	26	56	4.152,81	45	3.713,70	11	439,11	-	-	-	-	3.713,70
		2010	26	43	972,96	37	917,91	6	55,05	-	-	-	-	917,91
		2011	28	42	473,60	14	110,34	28	363,26	-	-	-	-	110,34
		2012	34	49	1.518,96	21	329,85	28	1.189,11	-	-	-	-	343,85
		2013	33	71	3.811,34	19	166,69	30	3.644,65	22	-	-	-	166,69
		Jumlah	147	261	10.929,67	136	5.238,49	103	5.691,18	22	-	-	-	5.252,49
148	Kab. Bangka	2009	61	106	1.684,88	99	1.160,24	5	524,64	2	-	-	-	1.160,24
		2010	33	57	11.338,93	40	2.549,07	11	8.789,86	6	-	-	-	2.549,07
		2011	38	59	552,69	44	13,75	6	538,94	9	-	-	-	13,75
		2012	25	38	675,54	16	612,00	19	6,87	3	56,67	-	-	732,44
		2013	20	33	86,44	7	-	26	86,44	-	-	-	-	-
		Jumlah	177	293	14.338,48	206	4.335,06	67	9.946,75	20	56,67	-	-	4.455,50
149	Kab. Bangka Barat	2009	32	59	523,56	58	523,56	1	-	-	-	-	-	523,56
		2010	10	19	789	17	7,89	2	-	-	-	-	-	789
		2011	28	39	276,10	26	216,98	13	59,12	-	-	-	-	216,98
		2012	11	12	-	8	-	4	-	-	-	-	-	-
		2013	20	48	1.657,19	14	571,15	13	3,37	21	1.082,67	-	-	571,15
		Jumlah	101	177	2.464,74	123	1.319,58	33	62,49	21	1.082,67	-	-	1.319,58
150	Kab. Bangka Selatan	2009	35	85	2.618,84	76	2.581,77	8	37,07	1	-	-	-	2.581,77
		2010	32	68	1.702,64	57	1.480,06	10	222,58	1	-	-	-	1.480,06
		2011	19	29	603,76	14	593,35	14	10,41	1	-	-	-	593,35
		2012	9	10	60,52	3	22,45	4	31,62	3	6,45	-	-	22,45
		2013	33	63	1.069,44	18	205,84	5	-	40	863,60	-	-	207,80
		Jumlah	128	255	6.055,20	168	4.883,47	41	301,68	46	870,05	-	-	4.885,43

Halaman 26 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
151	Kab. Bangka Tengah	2009	20	42	197,41	35	197,41	7	-	-	-	-	-	197,41	
		2010	15	30	513,24	20	513,24	7	-	3	-	-	-	513,24	
		2011	21	21	103,38	8	60,17	7	43,21	6	-	-	-	60,17	
		2012	18	27	764,76	27	764,76	-	-	-	-	-	-	764,76	
		2013	16	27	782,37	18	120,93	9	661,44	-	-	-	-	120,93	
		Jumlah	84	147	2.361,16	108	1.656,51	30	704,65	9	-	-	-	1.656,51	
152	Kab. Belitung	2009	27	59	2.030,26	31	1.208,09	21	822,17	7	-	-	-	1.208,09	
		2010	27	72	375,64	34	100,09	36	275,55	2	-	-	-	100,09	
		2011	33	44	720,51	22	440,15	18	280,36	4	-	-	-	466,74	
		2012	13	19	473,71	5	70,16	4	70,16	10	403,55	-	-	-	
		2013	26	44	317,40	9	112,06	13	205,34	22	-	-	-	112,06	
		Jumlah	126	238	3.917,52	101	1.860,39	92	1.653,58	45	403,55	-	-	1.886,98	
153	Kab. Belitung Timur	2009	21	39	921,38	34	483,25	5	438,13	-	-	-	-	483,25	
		2010	21	41	1.026,59	27	677,10	12	349,49	2	-	-	-	677,10	
		2011	15	20	744,86	11	496,03	9	248,83	-	-	-	-	496,03	
		2012	41	57	3.120,08	10	118,70	21	304,59	26	2.696,79	-	-	118,70	
		2013	15	26	1.470,58	-	-	1	-	25	1.470,58	-	-	-	
		Jumlah	113	183	7.283,49	82	1.775,08	48	1.341,04	53	4.167,37	-	-	1.775,08	
154	Kota Pangkalpinang	2009	78	126	1.278,05	82	609,19	25	668,86	19	-	-	-	609,19	
		2010	63	136	3.020,95	102	355,89	30	2.665,06	4	-	-	-	355,89	
		2011	42	76	1.023,85	31	591,58	41	411,55	4	20,72	-	-	591,58	
		2012	12	14	365,88	1	4,36	12	381,52	1	-	-	-	4,36	
		2013	60	132	2.038,34	53	774,63	37	803,43	42	460,28	-	-	892,70	
		Jumlah	255	484	7.747,07	269	2.335,65	145	4.930,42	70	481,00	-	-	2.453,72	
155	Prov. Kepulauan Riau	2009	45	90	6.048,34	76	5.563,60	11	413,30	3	71,44	-	-	4.303,06	
		2010	53	101	2.918,69	86	1.059,19	15	1.859,50	-	-	-	-	1.059,19	
		2011	98	157	5.247,91	98	439,63	47	4.808,28	12	-	-	-	439,63	
		2012	49	93	8.442,31	47	1.854,77	45	6.587,54	1	-	-	-	2.646,64	
		2013	35	58	1.533,31	6	51,34	18	595,27	34	886,70	-	-	51,34	
		Jumlah	280	499	24.190,56	313	8.968,53	136	14.263,89	50	958,14	-	-	8.499,86	
156	Kab. Bintan	2009	30	45	15.866,51	40	1.142,15	5	14.724,36	-	-	-	-	1.142,15	
		2010	33	60	582,50	51	552,41	9	30,09	-	-	-	-	552,41	
		2011	42	105	487,83	103	291,62	2	196,21	-	-	-	-	291,62	
		2012	22	34	504,66	28	153,36	6	351,30	-	-	-	-	153,36	
		2013	36	50	1.250,12	24	480,36	21	769,76	5	-	-	-	568,19	
		Jumlah	163	294	18.691,62	246	2.619,90	43	16.071,72	5	-	-	-	2.707,73	
			-	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	SGD 1,68	-	-	-	-	-	

Halaman 27 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
157	Kab. Karimun	2009	60	91	23.008,73	82	10.196,57	6	12.773,10	3	39,06	-	-	-	8.062,50	
		2010	62	127	27.381,01	106	25.286,61	9	42,15	12	2.052,25	-	-	-	25.255,74	
		2011	59	150	11.970,78	127	11.970,10	6	0,68	17	-	-	-	-	359,64	
		2012	45	98	890,09	52	148,08	10	-	36	742,01	-	-	-	148,08	
		2013	53	99	1.465,89	14	85,84	6	3,74	79	1.376,31	-	-	-	149,05	
		Jumlah	279	565	64.716,50	381	47.687,20	37	12.819,67	147	4.209,63	-	-	-	33.975,01	
158	Kab. Kepulauan Anambas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	25	61	1.098,71	57	1.028,71	4	70,00	-	-	-	-	-	1.793,43	
		2011	43	104	836,81	83	402,90	21	433,91	-	-	-	-	-	361,04	
		2012	18	34	2.387,90	25	1.955,11	9	432,79	-	-	-	-	-	31,29	
		2013	34	85	3.102,36	35	45,00	15	-	35	3.057,36	-	-	-	9,50	
		Jumlah	120	284	7.425,78	200	3.431,72	49	936,70	35	3.057,36	-	-	-	2.195,26	
159	Kab. Lingga	2009	36	64	2.991,46	46	1.427,70	11	1.563,76	7	-	-	-	-	1.431,38	
		2010	44	88	13.558,27	48	11.669,01	36	1.880,11	4	9,15	-	-	-	11.669,01	
		2011	58	139	181,27	98	141,81	30	39,46	11	-	-	-	-	141,81	
		2012	28	59	80,74	13	-	43	80,74	3	-	-	-	-	-	
		2013	21	48	423,80	13	-	15	-	20	423,80	-	-	-	-	
		Jumlah	187	398	17.235,54	218	13.238,52	135	3.564,07	45	432,95	-	-	-	13.242,20	
160	Kab. Natuna	2009	43	61	652,40	49	591,05	12	61,35	-	-	-	-	-	591,05	
		2010	50	101	12.804,45	59	1.828,43	15	10.920,00	27	56,02	-	-	-	738,10	
		2011	57	110	7.035,14	46	4.341,47	20	166,37	44	2.527,30	-	-	-	294,23	
		2012	34	60	9.145,66	21	97,62	6	7.909,15	33	1.138,89	-	-	-	97,62	
		2013	29	54	1.578,47	30	135,02	8	496,03	16	947,42	-	-	-	135,02	
		Jumlah	213	386	31.216,12	205	6.993,59	61	19.552,90	120	4.669,63	-	-	-	1.856,02	
161	Kota Batam	2009	54	96	10.444,24	74	1.252,58	13	9.183,56	9	8,10	-	-	-	1.252,58	
		2010	54	102	7.193,25	65	6.880,48	32	293,32	5	19,45	-	-	-	6.880,48	
		2011	60	137	13.729,22	90	2.474,66	29	10.575,51	18	679,05	-	-	-	1.581,84	
		2012	54	104	9.548,95	14	-	32	9.418,40	58	130,55	-	-	-	27,20	
		2013	23	40	3.355,68	4	51,44	17	39,13	19	3.265,11	-	-	-	51,44	
		Jumlah	245	479	44.271,34	247	10.659,16	123	29.509,92	109	4.102,26	-	-	-	9.793,54	
162	Kota Tanjungpinang	2009	50	61	107,44	52	87,12	5	20,32	4	-	-	-	-	87,12	
		2010	53	106	425,27	98	332,06	8	93,21	-	-	-	-	-	332,06	
		2011	61	140	1.757,72	122	151,31	13	1.742,41	5	-	-	-	-	15,31	
		2012	58	108	240,27	90	220,27	18	20,00	-	-	-	-	-	220,27	
		2013	43	97	614,94	24	25,54	10	76,00	63	513,40	-	-	-	60,35	
		Jumlah	265	512	3.145,64	386	680,30	54	1.951,94	72	513,40	-	-	-	715,11	

Halaman 28 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyotiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
163	Prov. DKI Jakarta	2009	337	735	202.627,34	597	125.468,10	118	73.235,16	17	3.924,08	3	-	-	131.372,51		
		2010	215	449	24.634,36	394	24.392,29	55	242,07	-	-	-	-	-	31.167,91		
		2011	411	967	85.184,01	677	47.015,32	208	38.168,69	82	-	-	-	-	48.654,80		
		2012	353	815	31.795,77	411	31.795,77	298	43.446,47	106	20.491,17	-	-	-	56.370,55		
		2013	104	183	48.072,15	79	5.167,47	62	24.767,02	42	18.137,66	-	-	-	14.039,05		
		Jumlah	1.420	3.149	456.251,27	2.158	233.838,95	741	179.859,41	247	42.552,91	3	-	-	281.604,82		
164	Prov. Jawa Barat	2009	104	159	4.422,82	123	1.487,84	34	2.926,53	2	8,45	-	-	-	2.775,14		
		2010	73	183	9.192,87	165	8.141,44	17	669,98	1	381,45	-	-	-	9.847,80		
		2011	100	226	3.367,57	170	3.101,26	53	266,31	3	-	-	-	-	3.101,26		
		2012	108	267	132.103,12	69	125.494,80	121	4.413,56	77	2.194,76	-	-	-	47.337,31		
			-	-	USD 9.530,27	-	-	-	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-		
		2013	42	108	3.516,00	19	846,18	15	162,19	74	2.507,63	-	-	-	846,18		
		Jumlah	427	943	152.602,38	546	139.071,52	240	8.438,57	157	5.092,29	-	-	-	63.907,69		
			-	-	USD 9.530,27	-	-	-	USD 9.530,27	-	-	-	-	-	-		
165	Kab. Bandung	2009	42	88	1.189,05	80	932,21	6	56,00	2	200,84	-	-	-	941,52		
		2010	44	92	1.850,87	62	1.003,04	21	687,83	9	160,00	-	-	-	1.003,04		
		2011	16	34	2.157,88	26	1.975,48	8	182,40	-	-	-	-	-	3.565,58		
		2012	51	131	8.330,16	69	5.372,18	58	2.957,98	4	-	-	-	-	5.378,58		
		2013	41	118	4.128,54	29	1.125,40	38	1.233,08	51	1.770,06	-	-	-	1.125,40		
		Jumlah	194	463	17.656,50	266	10.408,31	131	5.117,29	66	2.130,90	-	-	-	12.014,12		
166	Kab. Bandung Barat	2009	38	73	4.060,88	71	339,69	2	3.721,19	-	-	-	-	-	339,69		
		2010	31	84	1.967,47	78	1.762,51	6	204,96	-	-	-	-	-	1.762,51		
		2011	28	75	2.023,81	67	1.467,24	7	380,96	1	175,61	-	-	-	1.467,24		
		2012	26	64	715,51	42	274,25	8	0,16	14	441,10	-	-	-	274,25		
		2013	21	58	1.370,67	31	1.039,09	27	331,58	-	-	-	-	-	1.039,09		
		Jumlah	144	354	10.138,34	289	4.882,78	50	4.638,85	15	616,71	-	-	-	4.882,78		
167	Kab. Bekasi	2009	31	61	15.023,30	36	9.829,12	20	5.194,18	5	-	-	-	-	11.075,98		
		2010	23	41	5.337,35	25	2.281,84	16	3.055,51	-	-	-	-	-	3.840,85		
		2011	25	53	1.599,75	28	366,51	25	1.233,24	-	-	-	-	-	386,73		
		2012	36	81	15.770,02	54	2.708,11	25	13.061,91	2	2.616,30	-	-	-	2.616,30		
		2013	10	27	221,75	17	221,75	10	-	-	-	-	-	-	221,75		
		Jumlah	125	263	37.952,17	160	15.407,33	96	22.544,84	7	-	-	-	-	18.141,61		
168	Kab. Bogor	2009	22	52	22.526,06	35	3.395,02	13	19.131,04	4	-	-	-	-	3.386,10		
		2010	27	58	9.097,38	29	6.011,47	27	6.011,47	2	2.425,35	-	-	-	660,56		
		2011	15	41	4.641,60	35	253,60	6	4.388,00	-	-	-	-	-	253,60		
		2012	23	55	8.847,31	22	1.676,75	18	4.152,31	15	3.018,25	-	-	-	1.676,75		
		2013	15	29	4.831,15	3	742,87	24	3.638,92	2	449,36	-	-	-	742,87		
		Jumlah	102	235	49.943,50	124	6.728,80	88	37.321,74	23	5.892,96	-	-	-	6.719,88		

Halaman 29 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	Kab. Ciamis	2009	15	24	882,50	24	882,50	-	-	-	-	-	-	1.118,41
		2010	18	34	1.257,61	32	1.257,61	2	-	-	-	-	-	1.311,51
		2011	26	49	104,18	45	104,18	3	-	1	-	-	-	104,18
		2012	32	86	4.288,54	61	1.090,08	24	3.198,46	1	-	-	-	1.082,94
		2013	16	40	416,71	26	416,71	12	-	-	-	-	-	416,71
		Jumlah	107	233	6.949,54	188	3.751,08	41	3.198,46	4	-	-	-	4.033,75
170	Kab. Cianjur	2009	37	73	5.875,60	5	431,68	14	2.484,80	54	2.959,12	-	-	431,68
		2010	39	76	3.095,72	31	570,44	33	2.525,28	12	-	-	-	1.771,14
		2011	24	65	1.614,23	19	312,86	23	819,45	23	481,92	-	-	381,98
		2012	30	65	1.806,18	24	708,80	24	677,89	17	419,49	-	-	708,80
		2013	36	92	6.862,42	26	1.209,72	27	5.172,59	39	480,11	-	-	1.209,72
		Jumlah	166	371	19.254,15	105	3.233,50	121	11.680,01	145	4.340,64	-	-	4.503,32
171	Kab. Cirebon	2009	38	53	1.679,75	43	1.402,27	10	277,48	-	-	-	-	1.537,24
		2010	17	32	2.243,57	22	1.041,04	10	1.202,53	-	-	-	-	1.094,66
		2011	21	55	1.256,68	42	853,89	13	402,79	-	-	-	-	865,45
		2012	21	62	3.766,23	55	3.619,62	6	146,61	1	-	-	-	3.621,68
		2013	17	46	917,66	29	613,34	13	206,34	4	97,98	-	-	613,34
		Jumlah	114	248	9.863,89	191	7.530,16	52	2.235,75	5	97,98	-	-	7.732,37
172	Kab. Garut	2009	24	57	2.112,65	27	1.038,40	3	131,50	27	942,75	-	-	1.038,40
		2010	44	71	7.066,91	10	-	10	3.805,50	51	3.261,41	-	-	8,14
		2011	57	123	4.995,52	82	1.560,25	24	3.425,10	17	10,17	-	-	1.485,36
		2012	25	87	2.088,12	61	660,47	21	1.215,58	5	212,07	-	-	149,97
		2013	13	40	4.262,12	27	1.753,76	10	2.366,29	3	142,07	-	-	1.753,76
		Jumlah	163	378	20.525,32	207	5.012,88	68	10.943,97	103	4.568,47	-	-	4.435,63
173	Kab. Indramayu	2009	23	50	1.284,37	44	1.198,58	4	85,79	2	-	-	-	1.324,66
		2010	12	22	-	16	-	6	-	-	-	-	-	201,88
		2011	23	53	3.832,96	27	1.111,90	19	2.171,13	7	549,93	-	-	-
		2012	38	96	3.526,94	10	1.875,24	60	1.580,80	26	70,90	-	-	-
		2013	16	35	110,14	3	42,59	31	67,55	1	-	-	-	42,59
		Jumlah	112	256	8.754,41	100	4.228,31	120	3.905,27	36	620,83	-	-	1.569,13
174	Kab. Karawang	2009	48	109	2.433,84	81	749,48	25	1.142,87	3	541,49	-	-	759,48
		2010	-	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	-	-	-	-	-	USD 4,00
		2011	14	28	438,18	11	19,35	14	108,13	3	310,70	-	-	210,45
		2012	43	105	6.194,22	12	175,45	15	3.209,43	78	2.809,34	-	-	177,27
		2013	37	71	5.948,13	20	1.431,13	34	2.739,62	17	1.777,38	-	-	1.431,13
		2013	25	69	3.051,83	22	827,06	47	2.224,77	-	-	-	-	827,06
		Jumlah	167	382	18.066,20	146	3.202,47	135	9.424,82	101	5.438,91	-	-	3.405,39
			-	-	USD 4,00	-	USD 4,00	-	-	-	-	-	-	USD 4,00

Halaman 30 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	Kab. Kuningan	2009	18	39	274,89	38	274,89	1	-	-	-	-	-	274,89
		2010	16	29	380,57	28	380,57	1	-	-	-	-	-	380,57
		2011	21	48	1.040,35	37	1.007,03	8	33,32	3	-	-	-	818,78
		2012	19	43	2.963,64	37	2.358,86	6	604,78	-	-	-	-	749,95
		2013	38	118	3.186,54	46	776,10	18	951,35	54	1.459,09	-	-	776,10
		Jumlah	112	277	7.845,99	186	4.797,45	34	1.589,45	57	1.459,09	-	-	3.000,29
176	Kab. Majalengka	2009	21	49	1.144,80	46	1.091,85	3	52,95	-	-	-	-	1.103,05
		2010	21	38	119,69	26	119,69	12	-	-	-	-	-	119,69
		2011	15	31	1.754,15	25	677,64	6	1.076,51	-	-	-	-	739,64
		2012	21	57	869,73	39	779,31	12	90,42	6	-	-	-	774,31
		2013	21	60	4.275,44	43	809,63	17	3.465,81	-	-	-	-	809,63
		Jumlah	99	235	8.163,81	179	3.478,12	50	4.685,69	6	-	-	-	3.546,32
177	Kab. Pangandaran*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Kab. Purwakarta	2009	38	81	6.592,24	22	354,25	20	3.485,67	39	2.752,32	-	-	426,73
		2010	24	61	7.705,28	12	974,12	14	5.317,33	35	1.413,83	-	-	1.000,84
		2011	14	24	2.640,79	4	53,63	17	2.462,92	3	124,24	-	-	582,74
		2012	24	54	4.810,00	25	840,40	23	334,26	6	3.635,34	-	-	1.014,83
		2013	40	86	2.283,99	6	2.021,97	2	262,02	78	-	-	-	2.054,68
		Jumlah	140	306	24.032,30	69	4.244,37	76	11.862,20	161	7.925,73	-	-	5.079,82
179	Kab. Subang	2009	21	44	2.938,93	36	1.669,85	7	1.269,08	1	-	-	-	1.693,38
		2010	13	22	1.051,28	15	190,13	6	861,15	1	-	-	-	190,13
		2011	31	53	4.699,69	33	4.516,76	13	29,51	7	153,42	-	-	4.537,00
		2012	11	22	202,55	2	51,42	6	151,13	14	-	-	-	51,42
		2013	15	40	20.667,33	22	20.465,52	17	201,81	1	-	-	-	20.465,52
		Jumlah	91	181	29.559,78	108	26.893,68	49	2.512,68	24	153,42	-	-	26.937,45
180	Kab. Sukabumi	2009	39	84	5.035,36	53	4.412,39	29	523,96	2	99,01	-	-	4.326,68
		2010	14	19	203,49	16	153,42	3	50,07	-	-	-	-	153,42
		2011	89	32	3.136,58	67	2.065,20	22	1.071,38	-	-	-	-	2.828,38
		2012	15	31	1.699,03	21	938,95	9	760,08	1	-	-	-	938,95
		2013	12	29	481,48	10	186,42	17	295,06	2	-	-	-	186,42
		Jumlah	112	252	10.555,94	167	7.756,38	80	2.700,55	5	99,01	-	-	8.433,85

Halaman 31 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
181	Kab. Sumedang	2009	35	64	1.038,94	45	186,07	15	852,87	4	-	-	-	186,07			
		2010	11	18	717,37	4	487,98	10	65,10	4	164,29	-	-	479,04			
		2011	31	99	4.034,61	67	1.996,74	25	2.037,87	7	-	-	-	2.002,00			
		2012	37	104	431,91	73	223,10	23	208,81	8	-	-	-	223,10			
		2013	24	77	1.231,82	43	455,15	29	776,67	5	-	-	-	455,15			
		Jumlah	138	362	7.454,65	232	3.349,04	102	3.941,32	28	164,29	-	-	3.345,36			
182	Kab. Tasikmalaya	2009	8	13	37,02	12	37,02	1	-	-	-	-	-	37,02			
		2010	7	17	771,79	6	111,79	11	660,00	-	-	-	-	111,79			
		2011	62	158	5.857,81	41	670,94	41	3.311,11	76	1.875,76	-	-	669,95			
		2012	21	49	596,71	9	30,00	22	178,26	18	388,45	-	-	30,00			
		2013	14	44	1.833,61	23	1.134,59	21	699,02	-	-	-	-	1.134,59			
		Jumlah	112	281	9.096,94	91	1.984,34	96	4.848,39	94	2.264,21	-	-	1.983,35			
183	Kota Bandung	2009	74	165	3.861,75	86	3.658,30	42	159,84	37	43,61	-	-	3.673,78			
		2010	43	110	22.100,28	68	690,42	27	5.078,51	15	16.331,35	-	-	684,10			
		2011	39	102	20.786,18	77	11.401,74	14	9.384,44	11	-	-	-	12.307,34			
		2012	45	130	8.410,81	25	669,10	12	2.698,77	93	5.042,94	-	-	669,10			
		2013	44	139	4.759,84	41	505,98	35	4.253,86	63	-	-	-	505,98			
		Jumlah	245	646	59.918,86	297	16.925,54	130	21.575,42	219	21.417,90	-	-	17.840,30			
184	Kota Banjar	2009	21	33	411,91	33	411,91	-	-	-	-	-	-	396,89			
		2010	21	38	251,92	38	251,92	-	-	-	-	-	-	251,92			
		2011	12	28	492,92	28	492,92	-	-	-	-	-	-	492,92			
		2012	13	32	893,81	31	893,81	1	-	-	-	-	-	893,81			
		2013	8	20	129,64	20	129,64	-	-	-	-	-	-	129,64			
		Jumlah	75	151	2.180,20	150	2.180,20	1	-	-	-	-	-	2.165,18			
185	Kota Bekasi	2009	46	70	356,01	41	285,94	16	70,07	13	-	-	-	285,94			
		2010	20	34	6.317,53	6	4.702,68	19	799,15	9	815,70	-	-	1.614,85			
		2011	32	71	3.291,90	35	32,92	35	3.258,98	5	-	-	-	32,92			
		2012	24	64	565,58	25	289,14	36	276,44	3	-	-	-	326,44			
		2013	18	39	1.212,94	22	1.024,69	16	188,25	1	-	-	-	1.024,69			
		Jumlah	140	278	11.743,96	129	6.335,37	118	4.592,89	31	815,70	-	-	3.284,84			
186	Kota Bogor	2009	9	22	842,78	21	842,78	1	-	-	-	-	-	842,78			
		2010	33	58	1.137,34	51	594,50	7	542,84	-	-	-	-	607,46			
		2011	22	65	9.357,44	46	1.358,15	17	7.999,29	2	-	-	-	1.358,42			
		2012	30	96	2.866,70	43	603,97	46	2.262,73	7	-	-	-	603,99			
		2013	40	107	2.018,08	8	1.176,32	31	1.176,32	68	348,70	-	-	493,06			
		Jumlah	134	348	16.222,34	169	3.892,46	102	11.981,18	77	348,70	-	-	3.905,71			

Halaman 32 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	Kota Cimahi	2009	40	87	2.758,66	38	518,30	34	1.235,05	15	1.005,31	-	-	518,30
		2010	24	49	885,44	29	454,45	14	430,99	6	-	-	-	454,45
		2011	24	47	507,38	23	417,02	8	417,02	16	-	-	-	110,36
		2012	53	141	3.463,89	73	550,18	65	2.913,71	3	-	-	-	570,59
		2013	17	49	698,27	28	220,57	18	477,70	3	-	-	-	220,57
		Jumlah	158	373	8.313,64	191	1.833,86	139	5.474,47	43	1.005,31	-	-	1.874,27
188	Kota Cirebon	2009	24	51	228,27	42	191,54	9	36,73	-	-	-	-	191,54
		2010	15	39	272,27	38	272,27	1	-	-	-	-	-	221,59
		2011	20	46	2.213,87	43	2.083,13	3	130,74	-	-	-	-	2.315,78
		2012	32	92	1.777,28	51	657,64	33	1.031,51	8	88,13	-	-	616,45
		2013	42	107	4.398,74	26	1.094,25	20	600,01	61	2.704,48	-	-	1.108,51
		Jumlah	133	335	8.890,43	200	4.298,83	66	1.798,99	69	2.792,61	-	-	4.453,87
189	Kota Depok	2009	37	74	10.980,90	73	10.980,90	1	-	-	-	-	-	1.813,59
		2010	12	23	419,92	17	419,92	5	-	1	-	-	-	352,47
		2011	7	11	24,12	9	24,12	2	-	-	-	-	-	24,12
		2012	11	25	775,95	20	775,95	5	-	-	-	-	-	805,29
		2013	29	58	697,43	19	533,42	29	164,01	10	-	-	-	533,42
		Jumlah	96	191	12.898,32	138	12.734,31	42	164,01	11	-	-	-	3.528,89
190	Kota Sukabumi	2009	22	51	1.555,10	38	477,77	12	1.077,33	1	-	-	-	297,13
		2010	25	57	950,40	41	166,45	16	783,95	-	-	-	-	184,08
		2011	67	163	2.403,63	120	1.776,66	43	626,97	-	-	-	-	1.441,66
		2012	27	71	734,37	44	467,59	25	266,78	2	-	-	-	469,09
		2013	30	126	1.979,56	8	-	34	405,23	84	1.574,33	-	-	-
		Jumlah	171	468	7.623,06	251	2.888,47	130	3.160,26	87	1.574,33	-	-	2.391,96
191	Kota Tasikmalaya	2009	23	47	1.555,18	29	712,75	15	818,88	3	23,55	-	-	695,99
		2010	7	14	940,91	1	383,48	12	557,43	1	-	-	-	383,48
		2011	22	56	521,80	12	283,11	36	205,13	8	33,56	-	-	283,11
		2012	53	139	1.645,45	71	670,18	55	975,27	13	-	-	-	559,52
		2013	21	53	312,41	24	218,12	11	94,29	18	-	-	-	202,47
		Jumlah	126	309	4.975,75	137	2.267,64	129	2.651,00	43	57,11	-	-	2.124,57
192	Prov. Jawa Tengah	2009	24	48	1.160,23	37	174,80	2	-	-	-	9	985,43	227,40
		2010	52	93	8.944,26	83	2.337,33	8	5.629,83	1	0,93	1	976,17	1.891,83
		2011	45	131	1.662,82	82	1.662,82	48	-	-	-	1	-	1.662,82
		2012	44	91	17.419,87	49	4.103,20	38	13.316,67	4	-	-	-	2.991,59
		2013	70	142	1.681,33	15	664,97	14	10,23	113	1.006,13	-	-	736,63
		Jumlah	235	505	30.868,51	266	8.943,12	110	18.956,73	118	1.007,06	11	1.961,60	7.510,27

Halaman 33 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	Kab. Banjarnegara	2009	13	23	1.931,96	23	1.931,96	-	-	-	-	-	-	1.931,96
		2010	27	40	498,07	38	475,74	2	22,33	-	-	-	-	475,74
		2011	29	53	5.664,00	49	5.544,63	4	119,37	-	-	-	-	5.748,52
		2012	30	80	152,32	79	152,32	1	-	-	-	-	-	152,32
		2013	23	47	493,85	45	269,85	2	224,00	-	-	-	-	269,85
		Jumlah	122	243	8.740,20	234	8.374,50	9	365,70	-	-	-	-	8.578,39
194	Kab. Banyumas	2009	16	38	658,25	38	658,25	-	-	-	-	-	-	658,25
		2010	20	36	184,81	36	184,81	-	-	-	-	-	-	263,68
		2011	29	58	2.234,04	55	2.231,53	3	2,51	-	-	-	-	2.585,66
		2012	6	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	33	54	800,97	10	686,12	7	-	37	114,85	-	-	686,12
		Jumlah	104	201	3.878,07	154	3.760,71	10	2,51	37	114,85	-	-	4.193,71
195	Kab. Batang	2009	15	29	241,57	28	184,07	1	57,50	-	-	-	-	184,07
		2010	27	44	106,25	41	106,25	3	-	-	-	-	-	228,33
		2011	9	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	20	83,71	17	83,71	3	-	-	-	-	-	83,71
		2013	50	23	1.134,45	16	181,69	9	-	25	952,76	-	-	186,11
		Jumlah	86	161	1.565,98	120	555,72	16	57,50	25	952,76	-	-	682,22
196	Kab. Blora	2009	14	35	333,22	30	276,92	5	56,30	-	-	-	-	276,92
		2010	29	66	306,48	63	168,19	3	138,29	-	-	-	-	526,36
		2011	33	64	-	64	-	-	-	-	-	-	-	22,33
		2012	18	49	647,95	45	65,64	4	582,31	-	-	-	-	65,64
		2013	30	58	7,26	28	5,48	30	1,78	-	-	-	-	66,50
		Jumlah	124	272	1.294,91	230	516,23	42	778,68	-	-	-	-	957,75
197	Kab. Boyolali	2009	12	19	40,13	18	40,13	1	-	-	-	-	-	40,21
		2010	10	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	33	64	103,69	57	70,44	7	33,25	-	-	-	-	44,64
		2012	14	29	-	27	-	2	-	-	-	-	-	-
		2013	21	39	2.549,58	13	1.112,01	6	1.195,38	20	242,19	-	-	1.119,47
		Jumlah	90	176	2.693,40	140	1.222,58	16	1.228,63	20	242,19	-	-	1.204,32
198	Kab. Brebes	2009	12	32	344,64	28	148,16	4	196,48	-	-	-	-	111,37
		2010	15	35	153,50	18	150,00	17	3,50	-	-	-	-	150,00
		2011	9	26	46,38	10	46,38	16	-	-	-	-	-	46,38
		2012	55	121	858,74	37	540,48	42	318,26	42	-	-	-	540,48
		2013	21	40	588,78	10	278,39	28	302,22	2	8,17	-	-	278,39
		Jumlah	112	254	1.992,04	103	1.163,41	107	820,46	44	8,17	-	-	1.126,62

Halaman 34 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindakan Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	Kab. Cilacap	2009	44	99	854,06	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2010	20	36	7.731,64	34	180,34	2	108,50	-	-	-	-	745,56	
		2011	51	104	2.415,83	102	2.415,83	2	7.551,30	-	-	-	-	180,34	
		2012	38	107	1.624,08	86	1.613,33	17	10,75	4	-	-	-	2.415,83	
		2013	27	60	3.241,42	33	3.237,82	27	3,60	-	-	-	-	1.624,65	
		Jumlah	180	406	15.867,03	352	8.192,88	50	7.674,15	4	-	-	-	3.184,67	
200	Kab. Demak	2009	14	42	320,20	33	75,70	8	244,50	-	-	-	-	8.151,05	
		2010	24	37	933,73	34	933,73	3	-	1	-	-	-	75,70	
		2011	21	61	315,39	48	315,39	12	-	1	-	-	-	933,73	
		2012	15	33	1.671,48	22	1.667,98	11	3,50	-	-	-	-	316,12	
		2013	26	87	1.100,33	27	326,11	60	774,22	-	-	-	-	1.710,52	
		Jumlah	100	260	4.341,13	164	3.318,91	94	1.022,22	2	-	-	-	326,11	
201	Kab. Grobogan	2009	19	39	2.881,56	36	1.796,43	3	1.085,13	-	-	-	-	3.362,18	
		2010	21	59	1.604,82	49	1.362,66	10	242,16	-	-	-	-	1.796,43	
		2011	16	34	537,88	31	455,60	3	82,28	-	-	-	-	1.347,96	
		2012	29	74	8.382,38	49	216,90	19	22,72	6	8.142,76	-	-	455,60	
		2013	29	74	1.278,22	33	314,85	9	-	32	963,37	-	-	87,94	
		Jumlah	114	280	14.684,86	198	4.146,44	44	1.432,29	38	9.106,13	-	-	345,34	
202	Kab. Jepara	2009	11	22	1.347,70	22	1.347,70	-	-	-	-	-	-	4.033,27	
		2010	12	25	361,20	25	361,20	-	-	-	-	-	-	1.347,70	
		2011	6	16	0,62	16	0,62	-	-	-	-	-	-	361,20	
		2012	9	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	0,62	
		2013	12	32	1.118,23	16	1.118,23	16	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	50	111	2.827,75	95	2.827,75	16	-	-	-	-	-	378,94	
203	Kab. Karanganyar	2009	9	18	1.724,12	17	568,27	1	1.155,85	-	-	-	-	2.088,46	
		2010	31	65	3.595,16	61	667,41	4	2.927,75	-	-	-	-	568,27	
		2011	26	49	3.639,60	46	327,56	3	3.312,04	-	-	-	-	647,23	
		2012	31	83	-	51	-	24	-	8	-	-	-	327,56	
		2013	29	52	151,12	36	151,12	16	-	-	-	-	-	648,84	
		Jumlah	126	267	9.110,00	211	1.714,36	48	7.395,64	8	-	-	-	151,12	
204	Kab. Kebumen	2009	10	14	11.554,62	14	11.554,62	-	-	-	-	-	-	2.343,02	
		2010	26	43	146,17	43	146,17	-	-	-	-	-	-	11.554,62	
		2011	28	65	1.579,35	65	1.579,35	-	-	-	-	-	-	146,17	
		2012	20	39	688,84	39	688,84	-	-	-	-	-	-	1.579,35	
		2013	55	78	1.920,49	43	1.920,49	35	-	-	-	-	-	688,84	
		Jumlah	139	239	15.889,47	204	15.889,47	35	-	-	-	-	-	1.920,49	

Halaman 35 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	Kab. Kendal	2009	23	45	3.329,00	37	737,15	8	2.591,85	-	-	-	-	737,15
		2010	16	41	4.176,43	26	3.321,24	13	375,27	2	479,92	-	-	3.314,66
		2011	9	19	1.540,79	10	1.540,79	9	-	-	-	-	-	1.540,79
		2012	27	62	1.797,01	24	444,02	30	641,39	8	711,60	-	-	444,02
		2013	19	43	718,24	18	116,38	21	601,86	4	116,38	-	-	116,38
		Jumlah	94	210	11.561,47	115	6.159,58	81	4.210,37	14	1.191,52	-	-	6.153,00
206	Kab. Klaten	2009	8	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	32	64	2.974,52	45	22,04	17	2.952,48	2	-	-	-	22,04
		2011	26	49	202,99	37	115,00	12	87,99	-	-	-	-	115,00
		2012	26	61	9.989,64	22	6.453,58	37	3.402,74	2	133,32	-	-	4.713,10
		2013	28	71	492,89	22	73,49	49	419,40	-	-	-	-	1.221,92
		Jumlah	120	267	13.660,04	148	6.664,11	115	6.862,61	4	133,32	-	-	6.072,06
207	Kab. Kudus	2009	15	27	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	39	1.219,73	36	800,72	3	419,01	-	-	-	-	800,72
		2011	20	51	521,62	49	521,62	2	-	-	-	-	-	521,62
		2012	10	23	505,47	16	122,97	7	382,50	-	-	-	-	122,97
		2013	25	46	2.481,10	23	1.124,19	23	1.356,91	-	-	-	-	1.431,17
		Jumlah	95	186	4.727,92	151	2.569,50	35	2.158,42	-	-	-	-	2.876,48
208	Kab. Magelang	2009	12	32	166,61	28	159,59	4	7,02	-	-	-	-	169,51
		2010	21	41	991,87	38	776,44	3	215,43	-	-	-	-	776,44
		2011	19	36	2.842,92	28	2.650,98	8	191,94	-	-	-	-	2.650,98
		2012	43	105	219,03	65	197,18	40	21,85	-	-	-	-	203,23
		2013	27	58	1.46,78	32	106,38	19	40,40	7	-	-	-	106,38
		Jumlah	122	272	4.367,21	191	3.890,57	74	476,64	7	-	-	-	3.906,54
209	Kab. Pati	2009	24	51	241,77	49	241,77	2	-	-	-	-	-	241,77
		2010	12	28	1.137,31	26	1.137,31	2	-	-	-	-	-	1.137,31
		2011	14	34	791,72	30	388,12	3	403,60	-	-	1	-	388,12
		2012	18	46	1.238,69	30	1.104,78	16	133,91	-	-	-	-	1.080,87
		2013	18	43	1.020,17	8	-	35	1.020,17	-	-	-	-	-
		Jumlah	86	202	4.429,66	143	2.871,98	58	1.557,68	-	-	1	-	2.848,07
210	Kab. Pekalongan	2009	10	28	136,09	25	103,20	3	32,89	-	-	-	-	147,69
		2010	12	26	3.931,59	18	2.014,79	8	1.916,80	-	-	-	-	2.010,79
		2011	28	51	70,49	17	70,49	17	-	-	-	-	-	497,98
		2012	16	27	-	22	-	5	-	-	-	-	-	-
		2013	17	42	123,82	31	15,25	11	108,57	-	-	-	-	173,07
		Jumlah	83	174	4.261,99	130	2.203,73	44	2.058,26	-	-	-	-	2.829,53

Halaman 36 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
211	Kab. Pemalang	2009	14	26	75,87	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2010	52	84	8,86	17	45,36	8	30,51	1	-	-	-	45,36
		2011	22	43	345,58	34	8,86	48	-	2	-	-	-	8,86
		2012	19	39	401,23	25	342,91	16	2,67	2	-	-	-	342,91
		2013	13	28	70,93	7	-	25	401,23	7	-	-	-	256,60
		Jumlah	120	220	902,47	4	397,13	118	505,34	3	-	-	-	653,73
212	Kab. Purwalingga	2009	10	16	1.476,07	10	1.132,08	4	343,99	2	-	-	-	1.132,08
		2010	44	75	480,85	71	185,41	4	295,44	-	-	-	-	214,96
		2011	16	35	587,50	28	587,50	7	-	-	-	-	-	587,50
		2012	37	87	1.881,58	37	985,20	43	863,53	7	32,85	-	-	941,54
		2013	45	101	1.256,69	12	499,32	50	757,37	39	-	-	-	547,90
		Jumlah	152	314	5.682,69	158	3.389,51	108	2.260,33	48	32,85	-	-	3.423,98
213	Kab. Purworejo	2009	12	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	261,69
		2010	24	44	437,22	41	219,82	3	217,40	-	-	-	-	388,46
		2011	26	54	101,08	50	101,08	4	-	-	-	-	-	558,52
		2012	25	60	594,53	58	594,53	2	-	-	-	-	-	754,02
		2013	16	41	285,30	28	271,62	13	13,68	-	-	-	-	271,62
		Jumlah	103	219	1.418,13	197	1.187,05	22	231,08	-	-	-	-	2.234,31
214	Kab. Rembang	2009	12	31	661,34	28	661,34	3	-	-	-	-	-	2.299,52
		2010	24	60	274,22	51	176,16	9	98,06	-	-	-	-	176,16
		2011	7	14	-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
		2012	24	67	5.075,48	54	5.075,48	13	-	-	-	-	-	5.076,02
		2013	13	27	2.018,42	15	-	12	2.018,42	-	-	-	-	402,01
		Jumlah	80	199	8.029,46	155	5.912,98	44	2.116,48	-	-	-	-	7.953,71
215	Kab. Semarang	2009	11	24	474,28	21	109,78	-	-	-	-	3	364,50	109,78
		2010	33	70	-	61	-	9	-	-	-	-	-	-
		2011	29	52	305,90	35	-	16	-	-	-	1	305,90	-
		2012	9	28	-	26	-	2	-	-	-	-	-	-
		2013	14	34	158,34	20	158,34	14	-	-	-	-	-	183,04
		Jumlah	96	208	938,52	163	268,12	41	-	-	-	4	670,40	292,82
216	Kab. Sragen	2009	24	45	1.041,33	44	1.041,33	1	-	-	-	-	-	1.041,33
		2010	19	38	-	37	-	-	-	-	-	1	-	-
		2011	25	58	240,40	56	240,40	2	-	-	-	-	-	239,80
		2012	21	47	12.169,69	45	465,64	2	11.704,05	-	-	-	-	465,64
		2013	30	60	11.285,17	35	11.285,17	25	11.175,17	-	-	-	-	3.161,91
		Jumlah	119	248	24.736,59	217	1.857,37	30	22.879,22	-	-	1	-	4.908,68

Halaman 37 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
217	Kab. Sukoharjo	2009	12	31	518,10	28	445,04	3	73,06	-	-	-	-	-	445,04	
		2010	5	12	103,68	12	103,68	-	-	-	-	-	-	-	103,68	
		2011	16	37	653,95	30	336,95	7	317,00	-	-	-	-	-	336,95	
		2012	26	69	1.428,10	26	202,17	43	1.225,93	-	-	-	-	-	231,14	
		2013	16	35	857,49	9	-	20	22,63	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	75	184	3.561,32	105	1.087,84	73	1.638,62	6	834,86	-	-	-	1.116,81	
218	Kab. Tegal	2009	26	76	12.891,08	16	934,36	34	11.493,07	26	463,65	-	-	-	934,36	
		2010	12	30	1.236,16	4	826,45	4	409,71	22	-	-	-	-	826,45	
		2011	23	42	1.373,89	11	486,93	17	886,96	14	-	-	-	-	486,93	
		2012	26	67	1.090,25	19	152,86	45	761,09	3	176,30	-	-	-	152,86	
		2013	30	62	4.435,71	15	296,39	21	180,32	26	3.959,00	-	-	-	224,28	
		Jumlah	117	277	21.027,09	65	2.696,99	121	13.731,15	91	4.598,95	-	-	-	2.624,88	
219	Kab. Temanggung	2009	11	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	25	43	10.174,05	41	9.836,86	2	337,19	-	-	-	-	-	9.851,40	
		2011	20	30	53,44	30	14,05	-	39,39	-	-	-	-	-	21,14	
		2012	28	60	419,12	57	221,23	3	197,89	-	-	-	-	-	221,74	
		2013	28	65	224,11	62	190,31	3	33,80	-	-	-	-	-	132,89	
		Jumlah	112	220	10.870,72	212	10.262,45	8	608,27	-	-	-	-	-	10.227,17	
220	Kab. Wonogiri	2009	14	36	94,97	33	94,97	3	-	-	-	-	-	-	94,97	
		2010	13	22	-	21	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	10	17	9,54	13	9,54	4	-	-	-	-	-	-	9,54	
		2012	26	45	259,53	30	225,51	15	34,02	-	-	-	-	-	259,54	
		2013	27	40	27,85	20	27,85	9	-	11	-	-	-	-	27,85	
		Jumlah	90	160	391,89	117	357,87	32	34,02	11	-	-	-	-	391,90	
221	Kab. Wonosobo	2009	19	31	15,98	19	15,98	12	-	-	-	-	-	-	15,98	
		2010	31	71	8.245,25	43	6.184,71	25	2.059,52	3	1,02	-	-	-	6.195,60	
		2011	41	75	63,20	57	63,20	18	-	-	-	-	-	-	63,20	
		2012	19	52	682,83	35	271,47	17	411,36	-	-	-	-	-	190,18	
		2013	32	81	1.477,40	9	50,91	14	-	58	1.426,49	-	-	-	50,91	
		Jumlah	142	310	10.484,66	163	6.586,27	86	2.470,88	61	1.427,51	-	-	-	6.515,87	
222	Kota Magelang	2009	25	31	696,20	24	105,50	7	590,70	-	-	-	-	-	105,50	
		2010	54	101	9.071,95	85	9.047,48	14	24,47	2	-	-	-	-	9.047,48	
		2011	30	70	6.509,90	60	6.509,90	8	-	2	-	-	-	-	6.509,90	
		2012	29	80	40,58	53	40,58	27	-	-	-	-	-	-	40,58	
		2013	29	64	4.525,44	14	-	19	66,40	31	4.459,04	-	-	-	-	
		Jumlah	167	346	20.844,07	236	15.703,46	75	681,57	35	4.459,04	-	-	-	15.703,46	

Halaman 38 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15	
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
223	Kota Pekalongan	2009	9	20	2.927,37	17	2.365,75	3	561,62	9	10	11	12	13	14	15
		2010	23	46	14.221,82	38	11.637,59	7	2.319,81						264,42	2.365,75
		2011	10	25	112,56	18	112,56	6	-					1	-	11.278,72
		2012	30	54	1.303,05	47	1.303,05	7	-					-	-	1.303,05
		2013	26	56	39,98	28	37,05	6	2,93			22		-	-	37,05
		Jumlah	98	201	18.604,78	148	15.456,00	29	2.884,36			22		2	264,42	15.097,13
224	Kota Salatiga	2009	11	25	354,68	24	316,21	1	38,47							316,21
		2010	30	55	15.291,92	43	14.902,38	12	389,54							14.902,38
		2011	12	37	1.962,75	28	1.962,75	9	-							1.962,75
		2012	28	72	6.912,28	52	5.949,75	19	962,53					1	-	5.983,80
		2013	13	30	35,32	8	35,32	16	-			6		-	-	35,32
		Jumlah	94	219	24.556,95	155	23.166,41	57	1.390,54			6		1	-	23.200,46
225	Kota Semarang	2009	39	66	1.920,54	34	1.157,65	15	739,47			17				1.157,65
		2010	24	46	5.396,28	38	2.020,57	6	3.375,71			1		1	-	2.045,37
		2011	40	143	1.512,91	97	1.490,69	32	22,22			13		1	-	1.490,69
		2012	41	80	3.160,72	52	23,43	13	3.137,29			15		-	-	23,43
		2013	40	99	248,61	13	248,61	18	-			68		-	-	255,20
		Jumlah	184	434	12.239,06	234	4.940,95	84	7.274,69			114		2	23,42	4.972,34
226	Kota Surakarta	2009	13	24	168,19	24	168,19	-	-							168,19
		2010	23	43	847,06	34	623,55	9	223,51							618,67
		2011	10	17	-	17	-	-	-							143,00
		2012	13	27	20,13	22	20,13	5	-							204,84
		2013	32	82	54,55	29	54,55	16	-			37		-	-	58,85
		Jumlah	91	193	1.089,93	126	866,42	30	223,51			37		-	-	1.193,55
227	Kota Tegal	2009	22	48	1.685,15	42	1.354,24	6	330,91							1.359,67
		2010	21	33	218,26	28	182,79	5	35,47							182,79
		2011	27	55	3.032,93	45	2.150,26	9	882,67			1		-	-	2.150,26
		2012	12	24	75,46	21	75,46	3	-							75,46
		2013	36	89	236,06	27	114,48	17	121,58			45		-	-	114,48
		Jumlah	118	249	5.247,86	163	3.877,23	40	1.370,63			46		-	-	3.882,66
228	Prov. D.I. Yogyakarta	2009	39	52	18.576,10	52	18.576,10	-	-							18.551,97
		2010	34	69	3.360,23	66	2.382,00	3	978,23							2.063,18
		2011	72	166	2.166,89	47	1.287,07	25	879,82							1.022,67
		2012	61	113	1.242,51	66	884,05	47	358,46							1.046,07
		2013	68	115	11.293,24	11	67,05	16	2.720,68			88		-	-	67,05
		Jumlah	242	421	36.638,97	242	23.196,27	91	4.937,19			88		-	-	22.750,94

Halaman 39 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai		
229	Kab. Bantul	3	4	23	3.611,99	7	18	9	4	10	11	12	13	14	15			
		2009	20	53	2.777,25	73	1.962,25	9	4	10	11	12	13	14	15			
		2010	53	75	3.980,47	62	853,35	4	3.127,12	-	-	-	2	815,00	-	2.018,33		
		2011	32	66	633,74	20	5,73	4	5,73	-	-	-	-	-	-	-	1.962,25	
		2012	12	20	11.009,18	205	49,78	2	49,78	-	-	-	-	-	-	-	3.334,95	
230	Kab. Gunung Kidul	Jumlah	142	242	11.009,18	205	5,73	4	5,73	-	-	-	-	-	-	632,83		
		2009	10	19	49,78	16	49,78	2	49,78	-	-	-	-	-	-	-	58,45	
		2010	22	44	587,16	33	373,33	11	213,83	-	-	-	-	-	-	-	8.006,81	
		2011	19	35	1.066,44	18	965,80	17	100,64	-	-	-	-	-	-	-	49,78	
		2012	43	103	243,14	44	68,38	59	143,82	-	-	-	-	-	-	-	373,33	
231	Kab. Kulon Progo	2013	24	42	-	7	-	22	-	-	-	-	-	-	-	779,35		
		Jumlah	118	243	1.946,52	118	1.457,29	111	458,29	-	-	-	-	-	-	-	64,50	
		2009	6	16	712,03	16	712,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,33	
		2010	10	21	802,63	19	802,63	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290,29	
		2011	57	91	93,60	82	93,60	9	-	-	-	-	-	-	-	-	712,03	
232	Kab. Sleman	2012	36	69	162,91	42	154,80	25	8,11	-	-	-	-	-	-	802,63		
		2013	23	44	33.639,10	8	0,46	18	3,55	-	-	-	-	-	-	-	227,97	
		Jumlah	132	241	35.410,27	167	1.763,52	54	11,66	-	-	-	-	-	-	-	297,36	
		2009	36	53	22.602,84	51	22.491,79	2	111,05	-	-	-	-	-	-	-	49,77	
		2010	41	72	172,92	70	49,77	2	123,15	-	-	-	-	-	-	-	55,83	
233	Kota Yogyakarta	2011	31	56	14,58	55	14,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	55,83	
		2012	51	99	2.983,29	77	1.176,44	21	1.806,85	-	-	-	-	-	-	-	1.355,19	
		2013	20	36	175,18	27	175,18	9	175,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	179	316	25.948,81	280	23.732,58	35	2.216,23	-	-	-	-	-	-	-	-	23.952,58
		2009	33	45	41.460,43	39	19.389,34	6	22.071,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	Prov. Jawa Timur	2010	40	85	1.048,67	76	29,17	9	1.019,50	-	-	-	-	-	-	-	22.491,79	
		2011	28	45	6.138,54	28	385,19	15	2.106,59	-	-	-	-	-	-	-	49,77	
		2012	51	101	1.142,72	37	1.139,40	61	3,32	-	-	-	-	-	-	-	29,17	
		2013	54	139	962,98	25	39,24	52	923,74	-	-	-	-	-	-	-	385,19	
		Jumlah	206	415	50.753,34	205	20.982,34	143	26.124,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.421,98
2009	47	76	651,50	72	651,50	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.403,00		
2010	47	77	17.287,79	71	17.055,30	6	232,49	-	-	-	-	-	-	-	-	1.976,64		
2011	89	181	4.231,06	156	4.160,88	24	70,18	-	-	-	-	-	-	-	-	711,18		
2012	57	98	4.200,36	62	1.947,50	33	560,12	-	-	-	-	-	-	-	-	23.907,94		
2013	35	81	79.118,52	14	25.285,20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.163,92		
Jumlah	275	513	105.489,23	375	49.100,38	70	862,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.947,50	
																	25.285,20	
																	56.015,74	

Halaman 40 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235	Kab. Bangkalan	2009	23	49	112,50	49	112,50	-	-	-	-	-	-	112,50
		2010	23	39	66,42	39	66,42	-	-	-	-	-	-	582,61
		2011	10	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	16	1.029,52	15	1.029,52	1	-	-	-	-	-	1.029,52
		2013	14	25	1.827,00	23	1.827,00	2	-	-	-	-	-	1.827,00
		Jumlah	77	150	3.035,44	147	3.035,44	3	-	-	-	-	-	3.551,63
236	Kab. Banyuwangi	2009	22	28	17,59	27	17,59	1	-	-	-	-	-	17,59
		2010	50	111	910,55	110	773,04	1	137,51	-	-	-	-	783,85
		2011	30	105	1.079,93	91	661,28	13	418,65	1	-	-	-	668,22
		2012	25	57	1.297,12	38	420,42	18	876,70	1	-	-	-	513,41
		2013	21	39	239,14	18	184,48	21	54,66	-	-	-	-	184,48
		Jumlah	148	340	3.544,33	288	2.056,81	54	1.487,52	2	-	-	-	2.167,55
237	Kab. Blitar	2009	35	52	2.275,54	49	1.294,11	3	981,43	-	-	-	-	1.851,66
		2010	41	89	584,08	75	497,32	10	86,76	4	-	-	-	2.032,93
		2011	36	80	3.990,10	74	3.990,10	6	-	-	-	-	-	3.990,10
		2012	37	90	498,57	70	474,45	20	24,12	-	-	-	-	474,45
		2013	12	25	114,09	20	114,09	5	-	-	-	-	-	114,09
		Jumlah	161	336	7.462,38	288	6.370,07	44	1.092,31	4	-	-	-	8.463,23
238	Kab. Bojonegoro	2009	54	98	5.355,43	92	2.109,18	6	3.246,25	-	-	-	-	2.145,07
		2010	31	67	1.616,94	63	1.329,40	4	287,54	-	-	-	-	2.042,82
		2011	29	67	420,60	65	420,60	2	-	-	-	-	-	454,47
		2012	24	63	1.259,56	53	1.086,84	10	172,72	-	-	-	-	1.002,86
		2013	26	58	4.276,63	33	481,70	25	3.794,93	-	-	-	-	481,70
		Jumlah	164	353	12.929,16	306	5.427,72	47	7.501,44	-	-	-	-	6.126,92
239	Kab. Bondowoso	2009	40	52	1.170,12	52	1.170,12	-	-	-	-	-	-	239,68
		2010	27	60	-	59	-	1	-	-	-	-	-	308,98
		2011	32	76	2.157,38	64	127,88	11	2.029,50	1	-	-	-	150,42
		2012	37	71	398,59	50	398,59	21	-	-	-	-	-	730,98
		2013	16	43	189,32	29	189,32	13	-	-	-	-	-	189,32
		Jumlah	152	302	3.915,41	254	1.885,91	46	2.029,50	2	-	-	-	1.619,38
240	Kab. Gresik	2009	17	37	276,77	31	206,77	5	70,00	1	-	-	-	206,77
		2010	20	43	4.336,78	39	4.324,48	4	12,30	-	-	-	-	4.579,78
		2011	-	-	USD 121,85	-	USD 121,85	-	USD 4,65	-	-	-	-	USD 121,85
		2012	36	88	3.526,50	73	2.918,51	15	607,99	-	-	-	-	3.121,36
		2013	16	38	454,84	23	422,84	15	32,00	-	-	-	-	423,12
		2013	25	83	713,18	21	713,18	11	-	51	-	-	-	1.106,95
		Jumlah	114	289	9.308,07	187	8.585,78	50	722,29	52	-	-	-	9.437,98
		USD Jumlah	-	-	USD 126,50	-	USD 121,85	-	USD 4,65	-	-	-	-	USD 121,85

Halaman 41 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
241	Kab. Jember	2009	39	107	7.649,51	60	936,27	46	6.713,24	1	-	-	-	936,27
		2010	46	106	382,35	93	205,99	12	101,87	1	74,49	-	-	502,63
		2011	25	58	182,56	45	7,93	13	174,63	-	-	-	-	88,16
		2012	41	89	854,89	49	688,12	37	166,77	3	-	-	-	688,12
		2013	18	44	230,22	24	230,22	20	-	-	-	-	-	277,04
		Jumlah	169	404	9.299,53	271	2.068,53	128	7.156,51	5	74,49	-	-	2.492,22
242	Kab. Jombang	2009	36	63	315,96	60	193,61	3	122,35	-	-	-	-	206,95
		2010	23	35	10,73	35	10,73	-	-	-	-	-	-	10,73
		2011	25	62	3.471,61	52	1.375,98	10	2.095,63	-	-	-	-	1.383,94
		2012	36	79	-	76	-	3	-	-	-	-	-	120,17
		2013	9	21	871,77	15	630,99	6	240,78	-	-	-	-	688,96
		Jumlah	129	260	4.670,07	238	2.211,31	22	2.458,76	-	-	-	-	2.410,75
243	Kab. Kediri	2009	44	69	96,54	69	96,54	-	-	-	-	-	-	1.955,81
		2010	41	56	1.909,35	54	1.708,03	2	201,32	-	-	-	-	1.494,13
		2011	16	52	1.911,66	52	1.911,66	-	-	-	-	-	-	1.911,66
		2012	53	102	441,38	91	441,38	11	-	-	-	-	-	441,38
		2013	21	58	1.066,97	20	816,97	7	250,00	31	-	-	-	816,97
		Jumlah	175	337	5.425,90	286	4.974,58	20	451,32	31	-	-	-	6.619,95
244	Kab. Lamongan	2009	17	33	155,18	30	155,18	3	-	-	-	-	-	155,18
		2010	9	17	530,19	14	530,19	3	-	-	-	-	-	530,19
		2011	11	21	758,71	16	581,45	3	177,26	2	-	-	-	581,45
		2012	46	87	331,84	57	331,84	27	-	3	-	-	-	331,84
		2013	12	34	3.966,75	10	2.685,24	24	1.281,51	-	-	-	-	2.685,24
		Jumlah	95	192	5.742,67	127	4.283,90	60	1.458,77	5	-	-	-	4.283,90
245	Kab. Lumajang	2009	41	97	1.750,50	93	250,79	4	1.499,71	-	-	-	-	250,79
		2010	35	99	680,37	89	233,63	10	446,74	-	-	-	-	714,13
		2011	34	88	1.017,46	77	870,10	11	147,36	-	-	-	-	870,10
		2012	43	106	1.413,40	65	1.174,75	32	238,65	9	-	-	-	1.218,92
		2013	19	43	230,97	13	95,78	30	135,19	-	-	-	-	103,90
		Jumlah	172	433	5.092,70	337	2.625,05	87	2.467,65	9	-	-	-	3.157,84
246	Kab. Madiun	2009	28	47	241,50	47	241,50	-	-	-	-	-	-	253,36
		2010	35	64	506,65	63	459,69	1	46,96	-	-	-	-	459,69
		2011	28	61	7.603,84	53	7.599,53	8	4,31	-	-	-	-	8.027,19
		2012	27	57	1.747,24	44	201,50	13	1.545,74	-	-	-	-	385,88
		2013	22	45	427,59	28	408,99	3	18,60	14	-	-	-	964,29
		Jumlah	140	274	10.526,82	235	8.911,21	25	1.615,61	14	-	-	-	10.090,41

Halaman 42 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
247	Kab. Magetan	2009	34	339,20	52	297,96	2	41,24	-	-	-	297,96
		2010	21	4.896,88	38	3.159,46	6	1.737,42	-	-	-	3.178,27
		2011	17	418,42	35	139,17	4	4,25	1	275,00	-	166,60
		2012	25	82,70	57	73,20	14	9,50	-	-	-	73,20
		2013	16	-	20	-	16	-	-	-	-	-
		Jumlah	113	5.737,20	202	3.669,79	42	1.792,41	1	275,00	-	3.716,03
248	Kab. Malang	2009	41	1.094,51	83	902,57	1	191,94	-	-	-	909,44
		2010	38	88,52	71	88,52	1	-	-	-	-	1.986,61
		2011	47	228,62	101	228,62	-	-	-	-	-	228,62
		2012	68	776,98	95	638,38	32	138,60	2	-	-	639,16
		2013	20	1.298,95	18	1.298,95	3	-	23	-	-	1.529,89
		Jumlah	214	3.487,58	368	3.157,04	37	330,54	25	-	-	5.293,72
249	Kab. Mojokerto	2009	49	308,35	91	170,67	1	137,68	-	-	-	184,75
		2010	27	221,01	50	221,01	-	-	-	-	-	381,74
		2011	44	2.016,09	109	994,45	11	1.021,64	-	-	-	1.170,21
		2012	36	39.964,47	63	1.924,04	22	38.040,43	-	-	-	1.848,13
		2013	37	-	16	-	8	-	52	-	-	-
		Jumlah	193	42.509,92	329	3.310,17	42	39.199,75	52	-	-	3.584,83
250	Kab. Nganjuk	2009	42	881,58	60	750,53	7	131,05	-	-	-	750,53
		2010	29	1.197,74	42	997,62	14	200,12	-	-	-	997,62
		2011	24	295,59	37	295,59	19	-	-	-	-	295,59
		2012	13	210,60	21	210,60	13	-	-	-	-	210,60
		2013	7	-	6	-	4	-	-	-	-	-
		Jumlah	115	2.585,51	166	2.254,34	57	331,17	-	-	-	2.254,34
251	Kab. Ngawi	2009	19	588,91	26	588,91	4	-	-	-	-	588,91
		2010	16	1.040,67	21	828,66	13	186,69	4	25,32	-	746,89
		2011	25	1.045,83	41	269,44	21	776,39	3	-	-	269,44
		2012	34	1.052,43	43	593,40	18	182,71	18	276,32	-	593,40
		2013	16	1.973,03	16	922,71	10	449,42	14	600,90	-	922,71
		Jumlah	110	5.700,87	147	3.203,12	66	1.595,21	39	902,54	-	3.121,35
252	Kab. Pacitan	2009	17	428,44	22	428,44	-	-	-	-	-	428,44
		2010	33	1.840,42	46	1.840,42	-	-	-	-	-	1.840,42
		2011	31	62,62	63	9,00	4	53,62	-	-	-	9,00
		2012	6	-	16	-	4	-	-	-	-	-
		2013	15	742,66	33	536,38	8	206,28	-	-	-	536,38
		Jumlah	102	3.074,14	180	2.814,24	16	259,90	-	-	-	2.814,24

Halaman 43 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
253	Kab. Pamekasan	2009	34	64	2.384,98	56	1.949,51	8	435,47	-	-	-	-	1.958,71
		2010	14	31	3.024,52	28	864,90	3	2.159,62	-	-	-	-	1.209,90
		2011	12	24	666,75	22	664,08	2	2,67	-	-	-	-	666,87
		2012	39	74	148,66	24	148,66	26	-	24	-	-	-	148,66
		2013	14	39	231,62	19	163,78	18	67,84	2	-	-	-	163,78
		Jumlah	113	232	6.456,53	149	3.790,93	57	2.665,60	26	-	-	-	4.147,92
254	Kab. Pasuruan	2009	28	62	736,21	62	736,21	-	-	-	-	-	-	745,80
		2010	31	61	48,13	61	48,13	-	-	-	-	-	-	305,14
		2011	31	82	1.624,23	75	1.059,35	7	564,88	-	-	-	-	1.059,92
		2012	28	77	332,41	72	332,41	5	-	-	-	-	-	481,63
		2013	19	36	935,33	13	741,57	11	193,76	12	-	-	-	741,57
		Jumlah	137	318	3.676,31	283	2.917,67	23	758,64	12	-	-	-	3.334,06
255	Kab. Ponorogo	2009	29	56	273,43	55	230,93	1	42,50	-	-	-	-	230,93
		2010	43	86	6.065,15	66	6.065,15	20	-	-	-	-	-	6.065,15
		2011	23	47	3.409,41	31	1.700,43	16	1.708,98	-	-	-	-	1.700,43
		2012	17	40	979,33	24	502,45	8	476,88	8	-	-	-	743,93
		2013	12	33	328,22	8	323,16	21	-	4	5,06	-	-	330,04
		Jumlah	124	262	11.055,54	184	8.822,12	66	2.228,36	12	5,06	-	-	9.070,48
256	Kab. Probolinggo	2009	25	36	130,53	32	106,04	4	24,49	-	-	-	-	148,51
		2010	25	50	3,75	43	-	7	3,75	-	-	-	-	938,53
		2011	35	84	229,18	83	229,18	1	-	-	-	-	-	229,18
		2012	25	86	1.280,28	76	1.280,28	8	-	2	-	-	-	1.354,87
		2013	22	40	717,17	25	717,17	15	-	-	-	-	-	717,17
		Jumlah	132	296	2.360,91	259	2.332,67	35	28,24	2	-	-	-	3.388,26
257	Kab. Sampang	2009	17	41	2.577,64	40	2.577,64	1	-	-	-	-	-	2.665,55
		2010	29	48	419,94	44	313,92	4	106,02	-	-	-	-	682,03
		2011	15	36	587,32	33	275,45	3	311,87	-	-	-	-	275,45
		2012	10	27	289,88	21	289,88	6	-	-	-	-	-	289,88
		2013	22	52	156,25	22	72,40	30	83,85	-	-	-	-	79,25
		Jumlah	93	204	4.031,03	160	3.529,29	44	501,74	-	-	-	-	3.992,16
258	Kab. Sidoarjo	2009	31	52	4.999,03	50	4.999,03	2	-	-	-	-	-	4.999,03
		2010	35	83	2.821,39	74	183,88	9	2.637,51	-	-	-	-	3.080,31
		2011	41	95	3.027,02	85	452,54	10	2.574,48	-	-	-	-	452,54
		2012	14	38	839,07	35	839,07	3	-	-	-	-	-	839,07
		2013	11	26	819,59	19	819,59	6	-	1	-	-	-	819,89
		Jumlah	132	294	12.506,10	263	7.294,11	30	5.211,99	1	-	-	-	10.190,84

Halaman 44 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
259	Kab. Situbondo	2009	37	75	1.039,31	58	236,06	17	803,25	-	-	-	-	470,23
		2010	30	82	52,71	79	52,71	3	-	-	-	-	-	513,15
		2011	36	87	484,69	79	419,61	8	65,08	-	-	-	-	419,61
		2012	22	84	82,91	64	82,91	20	-	-	-	-	-	133,68
		2013	14	39	847,72	18	796,16	9	2,72	12	48,84	-	-	796,16
		Jumlah	139	367	2.507,34	298	1.587,45	57	871,05	12	48,84	-	-	2.332,83
260	Kab. Sumenep	2009	15	25	409,79	21	286,97	4	122,82	-	-	-	-	286,97
		2010	24	47	17.314,29	40	17.218,94	7	95,35	-	-	-	-	17.220,98
		2011	9	22	0,33	17	0,33	5	-	-	-	-	-	0,33
		2012	12	18	833,96	14	534,00	4	299,96	-	-	-	-	534,00
		2013	9	25	902,52	16	838,34	9	64,18	-	-	-	-	814,24
		Jumlah	69	137	19.460,89	108	18.878,58	29	582,31	-	-	-	-	18.856,52
261	Kab. Trenggalek	2009	21	34	180,32	31	47,24	3	133,08	-	-	-	-	47,24
		2010	50	90	1.639,28	72	464,51	14	1.174,77	4	-	-	-	461,47
		2011	29	70	107,47	59	107,47	11	-	-	-	-	-	107,47
		2012	20	51	196,99	44	155,32	7	41,67	-	-	-	-	155,32
		2013	17	37	209,54	30	35,00	7	174,54	-	-	-	-	65,19
		Jumlah	137	282	2.333,60	236	809,54	42	1.524,06	4	-	-	-	836,69
262	Kab. Tuban	2009	41	57	101,34	56	73,62	1	27,72	-	-	-	-	73,62
		2010	27	58	3.543,18	57	2.977,81	1	565,37	-	-	-	-	5.563,61
		2011	16	42	994,54	39	753,06	3	241,48	-	-	-	-	921,65
		2012	31	79	1.902,79	65	881,99	11	1.020,80	3	-	-	-	926,74
		2013	21	43	2.383,07	25	2.182,01	15	201,06	3	-	-	-	2.243,86
		Jumlah	136	279	8.924,92	242	6.868,49	31	2.056,43	6	-	-	-	9.729,48
263	Kab. Tulungagung	2009	25	41	1.710,31	41	1.710,31	-	-	-	-	-	-	1.710,31
		2010	37	69	1.018,84	68	1.018,84	1	-	-	-	-	-	1.018,84
		2011	27	69	396,68	67	396,68	2	-	-	-	-	-	397,53
		2012	40	104	269,59	102	269,59	2	-	-	-	-	-	269,59
		2013	23	53	182,99	19	-	5	-	29	182,99	-	-	48,26
		Jumlah	152	336	3.578,41	297	3.395,42	10	-	29	182,99	-	-	3.444,53
264	Kota Batu	2009	32	54	375,59	41	220,00	13	155,59	-	-	-	-	366,31
		2010	40	126	420,57	116	420,57	10	-	-	-	-	-	792,75
		2011	33	103	16.252,25	76	571,81	27	15.680,44	-	-	-	-	571,81
		2012	10	19	50,86	16	50,86	3	-	-	-	-	-	50,86
		2013	33	93	1.368,71	23	601,42	44	544,98	26	222,31	-	-	610,96
		Jumlah	148	395	18.467,98	272	1.864,66	97	16.381,01	26	222,31	-	-	2.392,69

Halaman 45 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
265	Kota Blitar	2009	14	22	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	53	39,09	53	39,09	-	-	-	-	-	-	39,09
		2011	27	48	148,15	48	148,15	-	-	-	-	-	-	160,50
		2012	31	67	37,10	63	37,10	4	-	-	-	-	-	15,98
		2013	41	75	197,12	26	175,12	6	22,00	43	-	-	-	175,17
		Jumlah	149	265	421,46	212	399,46	10	22,00	43	-	-	-	390,74
266	Kota Kediri	2009	33	50	2.674,60	45	1.625,70	5	1.048,90	-	-	-	-	1.625,70
		2010	24	48	3.453,38	45	3.453,38	3	-	-	-	-	-	3.453,38
		2011	41	113	245,40	107	245,40	6	-	-	-	-	-	245,40
		2012	24	64	1.017,26	58	883,71	6	133,55	-	-	-	-	883,71
		2013	26	50	362,85	11	337,45	2	25,40	37	-	-	-	337,45
		Jumlah	148	325	7.753,49	266	6.545,64	22	1.207,85	37	-	-	-	6.545,64
267	Kota Madiun	2009	33	58	738,24	57	611,17	1	127,07	-	-	-	-	611,17
		2010	18	38	1.790,90	38	1.790,90	-	-	-	-	-	-	1.824,55
		2011	24	57	193,31	41	193,31	16	-	-	-	-	-	193,31
		2012	7	16	-	7	-	9	-	-	-	-	-	-
		2013	16	29	2.194,44	17	2.164,45	12	29,99	-	-	-	-	2.165,78
		Jumlah	98	198	4.916,89	160	4.759,83	38	157,06	-	-	-	-	4.794,81
268	Kota Malang	2009	30	37	1,44	37	1,44	-	-	-	-	-	-	52,05
		2010	31	46	6,97	46	6,97	-	-	-	-	-	-	1.057,18
		2011	30	91	904,29	72	904,29	19	-	-	-	-	-	904,29
		2012	28	58	3.573,85	58	3.573,85	-	-	-	-	-	-	3.526,20
		2013	16	43	316,88	25	316,88	-	25,40	18	-	-	-	316,88
		Jumlah	135	275	4.803,43	238	4.803,43	19	-	18	-	-	-	5.856,60
269	Kota Mojokerto	2009	41	68	319,64	67	319,64	1	-	-	-	-	-	319,64
		2010	28	58	820,70	57	820,70	1	-	-	-	-	-	820,70
		2011	12	22	-	20	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	8	20	21,95	20	21,95	-	-	-	-	-	-	224,89
		2013	28	67	71,06	26	71,06	27	-	14	-	-	-	71,06
		Jumlah	117	235	1.233,35	190	1.233,35	31	-	14	-	-	-	1.436,29
270	Kota Pasuruan	2009	44	100	6.022,17	80	4.659,90	20	1.322,27	-	-	-	-	4.954,90
		2010	31	64	261,00	55	133,22	9	127,78	-	-	-	-	181,38
		2011	40	106	2.598,61	86	1.677,62	20	920,99	-	-	-	-	1.684,47
		2012	25	75	166,40	58	117,26	16	49,14	1	-	-	-	123,11
		2013	12	36	740,27	11	93,66	14	646,61	11	-	-	-	93,66
		Jumlah	152	381	9.788,45	290	6.721,66	79	3.066,79	12	-	-	-	7.037,52

Halaman 46 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
271	Kota Probolinggo	2009	30	48	2.739,04	48	2.739,04	-	-	-	-	-	-	2.753,44
		2010	27	75	425,31	65	424,79	10	0,52	-	-	-	-	456,62
		2011	24	57	466,87	51	406,84	6	60,03	-	-	-	-	406,84
		2012	26	60	284,76	58	284,76	2	-	-	-	-	-	284,76
		2013	9	17	336,12	13	336,12	4	-	-	-	-	-	336,13
		Jumlah	116	257	4.252,10	235	4.191,55	22	60,55	-	-	-	-	4.237,79
272	Kota Surabaya	2009	43	73	698,05	60	648,83	9	49,22	-	-	-	-	1.300,37
		2010	80	173	3.781,81	116	1.356,07	55	2.425,74	2	-	-	-	3.728,14
		2011	22	49	2.036,42	42	2.036,42	7	-	-	-	-	-	2.036,42
		2012	38	72	3.637,18	37	2.380,76	31	1.256,42	4	-	-	-	2.380,76
		2013	18	82	3.404,73	6	3.404,73	13	-	63	-	-	-	3.503,97
		Jumlah	201	449	13.558,19	261	9.826,81	115	3.731,38	73	-	-	-	12.949,66
273	Prov. Banten	2009	61	141	16.199,61	94	10.930,28	34	5.269,33	-	-	-	-	11.771,12
		2010	23	46	6.473,34	30	6.444,86	5	-	11	28,48	-	-	6.551,44
		2011	31	55	3.176,92	37	3.096,48	8	80,44	-	-	-	-	4.210,17
		2012	46	91	4.767,62	41	3.407,18	12	858,71	38	501,73	-	-	3.101,69
		2013	39	96	43.511,95	26	9.229,50	51	34.208,37	19	74,08	-	-	9.659,82
		Jumlah	200	429	74.129,44	228	33.108,30	110	40.416,85	91	604,29	-	-	35.294,24
274	Kab. Lebak	2009	16	45	1.154,38	42	912,96	2	241,42	-	-	1	-	912,96
		2010	27	56	1.865,10	51	1.618,92	5	246,18	-	-	-	-	1.677,58
		2011	32	50	1.501,54	43	974,20	5	527,34	2	-	-	-	1.165,07
		2012	53	103	14.020,14	34	13.456,71	5	492,37	64	71,06	-	-	736,80
		2013	17	26	25.885,91	16	269,04	5	584,29	5	25.032,58	-	-	269,04
		Jumlah	145	280	44.427,07	186	17.231,83	22	2.091,60	71	25.103,64	1	-	4.761,45
275	Kab. Pandeglang	2009	42	75	323,09	33	105,37	23	112,90	-	104,82	-	-	109,69
		2010	24	51	363,77	24	6,02	26	357,75	1	-	-	-	59,45
		2011	35	48	818,71	12	137,30	9	254,65	27	426,76	-	-	806,57
		2012	26	53	5.000,74	34	1.408,12	14	1.399,35	5	2.193,27	-	-	1.408,12
		2013	22	35	8.215,72	21	704,04	8	1.613,15	6	5.898,53	-	-	247,82
		Jumlah	149	262	14.722,03	124	2.360,85	80	3.737,80	58	8.623,38	-	-	2.631,65
276	Kab. Serang	2009	31	68	1.985,74	36	502,82	29	327,22	3	1.155,70	-	-	473,50
		2010	43	94	856,28	32	185,91	23	670,37	39	-	-	-	28,01
		2011	26	42	1.696,88	19	404,47	12	1.145,14	11	147,27	-	-	503,76
		2012	31	64	4.392,23	23	1.609,47	38	2.720,36	3	62,40	-	-	1.379,09
		2013	19	35	3.533,55	3	2.198,28	3	1.300,03	29	35,24	-	-	6.957,46
		Jumlah	150	303	12.464,68	113	4.900,95	105	6.163,12	85	1.400,61	-	-	9.341,82

Halaman 47- Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
277	Kab. Tangerang	2009	52	108	5.732,68	91	5.568,52	9	164,16	8	-	-	-	6.565,62
		2010	15	28	49,71	25	49,71	3	-	-	-	-	-	49,71
		2011	41	70	2.481,77	43	2.140,44	27	341,33	-	-	-	-	2.510,72
		2012	46	78	2.426,49	49	2.426,49	9	-	20	-	-	-	2.426,49
		2013	21	42	985,69	19	703,15	23	282,54	-	-	-	-	716,17
		Jumlah	175	326	11.676,34	227	10.888,31	71	788,03	28	-	-	-	12.268,71
278	Kota Cilegon	2009	22	39	1.233,34	38	1.233,34	1	-	-	-	-	-	1.228,25
		2010	22	62	4.455,05	53	4.422,87	7	32,18	-	-	2	-	8.765,67
		2011	37	50	637,89	44	547,39	5	90,50	-	-	1	-	522,67
		2012	30	48	2.745,19	33	2.470,76	15	274,43	-	-	-	-	2.078,26
		2013	22	41	1.220,27	29	1.108,24	12	112,03	-	-	-	-	1.907,95
		Jumlah	133	240	10.291,74	197	9.782,60	40	509,14	-	-	3	-	14.502,80
279	Kota Serang	2009	24	55	78,30	53	78,30	1	-	1	-	-	-	89,03
		2010	21	47	248,32	45	228,80	1	19,52	1	-	-	-	253,88
		2011	26	39	1.829,22	32	1.829,22	6	-	1	-	-	-	1.773,07
		2012	27	50	1.809,49	45	750,38	5	1.059,11	-	-	-	-	750,38
		2013	21	35	1.461,10	22	194,88	9	1.266,22	4	-	-	-	1.68,47
		Jumlah	119	226	5.426,43	197	3.081,58	22	2.344,85	7	-	-	-	3.034,83
280	Kota Tangerang	2009	50	89	2.045,85	86	1.697,51	3	348,34	-	-	-	-	1.945,47
		2010	13	35	1.319,66	35	1.319,66	-	-	-	-	-	-	2.267,89
		2011	37	55	7.465,03	50	7.465,03	5	-	-	-	-	-	8.365,49
		2012	36	64	4.277,60	47	4.109,27	15	168,33	2	-	-	-	4.113,69
		2013	20	30	124,39	3	-	7	-	20	124,39	-	-	-
		Jumlah	156	273	15.232,53	221	14.591,47	30	516,67	22	124,39	-	-	16.692,54
281	Kota Tangerang Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	19	35	554,10	35	554,10	-	-	-	-	-	-	554,10
		2011	58	58	1.501,12	58	1.501,12	-	-	-	-	-	-	1.436,29
		2012	27	42	1.234,91	35	1.144,07	7	90,84	-	-	-	-	1.478,06
		2013	24	50	1.480,32	42	590,46	8	889,86	-	-	-	-	4.435,37
		Jumlah	105	185	4.770,45	170	3.789,75	15	980,70	-	-	-	-	7.903,82
282	Prov. Bali	2009	63	142	16.604,94	140	16.526,57	2	78,37	-	-	-	-	15.521,19
		2010	33	79	3.180,62	78	3.180,62	1	-	-	-	-	-	3.115,62
		2011	72	203	14.371,97	170	14.302,61	32	69,36	1	-	-	-	14.302,61
		2012	46	93	20.312,46	79	3.722,28	13	13.050,91	-	-	1	-	4.394,43
		2013	25	76	-	21	-	27	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	239	593	54.469,99	488	37.732,08	75	13.198,64	29	-	1	-	37.333,85

Halaman 48 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
283	Kab. Bandung	2009	28	79	20.318,17	73	8.853,04	6	11.465,13	-	-	-	-	8.853,04	
		2010	36	85	990,41	85	990,41	-	-	-	-	-	-	990,41	
		2011	47	88	0,12	72	0,12	16	-	-	-	-	-	0,12	
		2012	50	115	738,72	110	699,32	5	39,40	-	-	-	-	2.432,06	
		2013	20	73	-	22	-	23	-	28	-	-	-	1.817,30	
		Jumlah	181	440	22.047,42	362	10.542,89	50	11.504,53	28	-	-	-	14.092,93	
284	Kab. Bangli	2009	55	108	1.021,93	88	727,64	19	294,29	1	-	-	-	727,64	
		2010	13	34	280,59	23	99,15	4	181,44	7	-	-	-	99,15	
		2011	59	154	1.538,61	90	56,00	59	1.482,61	5	-	-	-	56,00	
		2012	31	99	381,09	75	313,19	23	67,90	1	-	-	-	313,22	
		2013	34	63	186,70	25	47,32	31	124,00	7	15,38	-	-	72,51	
		Jumlah	192	458	3.408,92	301	1.243,30	136	2.150,24	21	15,38	-	-	1.268,52	
285	Kab. Buleleng	2009	20	80	153,01	70	148,01	10	5,00	-	-	-	-	148,01	
		2010	102	247	608,62	212	341,71	34	266,91	1	-	-	-	797,23	
		2011	55	238	5.356,37	147	16,55	85	5.338,16	6	1,66	-	-	16,55	
		2012	40	121	2.767,31	61	2.694,83	59	72,48	1	-	-	-	3.176,51	
		2013	47	133	2.662,50	38	825,25	47	1.068,82	48	768,43	-	-	504,10	
		Jumlah	264	819	11.547,81	528	4.026,35	235	6.751,37	56	770,09	-	-	4.642,40	
286	Kab. Gianyar	2009	16	34	53,44	34	53,44	-	-	-	-	-	-	53,44	
		2010	36	98	2.758,45	86	1.464,00	12	1.294,45	-	-	-	-	1.464,00	
		2011	46	139	5.098,05	98	553,69	41	4.544,36	-	-	-	-	556,27	
		2012	33	85	53,16	55	26,04	15	27,12	15	-	-	-	26,04	
		2013	34	67	659,08	13	116,05	44	537,18	10	5,85	-	-	117,98	
		Jumlah	165	423	8.622,18	286	2.213,22	112	6.403,11	25	5,85	-	-	2.217,73	
287	Kab. Jembrana	2009	21	37	15.694,00	30	2.141,29	7	13.552,71	-	-	-	-	2.141,29	
		2010	44	112	2.251,90	99	738,10	11	1.513,80	2	-	-	-	777,96	
		2011	44	103	1.681,95	90	267,78	11	1.414,17	2	-	-	-	326,68	
		2012	20	51	2.318,05	45	921,03	5	1.397,02	1	-	-	-	953,91	
		2013	20	31	483,68	15	383,33	7	-	9	100,35	-	-	448,76	
		Jumlah	149	334	22.429,58	279	4.451,53	41	17.877,70	14	100,35	-	-	4.648,60	
288	Kab. Karangasem	2009	33	70	214,69	66	170,17	4	44,52	-	-	-	-	170,17	
		2010	54	168	1.924,14	160	834,24	5	1.089,90	3	-	-	-	1.174,71	
		2011	50	175	2.987,77	163	2.531,29	11	456,48	1	-	-	-	2.533,67	
		2012	33	75	2.719,96	60	1.353,88	14	1.366,08	1	-	-	-	1.363,01	
		2013	37	89	712,26	34	168,13	10	224,28	45	319,85	-	-	144,66	
		Jumlah	207	577	8.558,82	483	5.057,71	44	3.181,26	50	319,85	-	-	5.386,22	

Halaman 49 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
289	Kab. Klungkung	2009	16	37	205,85	35	194,40	2	11,45	-	-	-	-	244,38
		2010	22	57	768,32	46	586,16	11	182,16	-	-	-	-	712,67
		2011	42	131	2.940,26	52	1.676,25	34	1.264,01	45	-	-	-	1.799,32
		2012	33	79	1.505,73	55	118,28	19	1.364,21	5	23,24	-	-	294,46
		2013	33	63	193,82	40	56,63	23	137,19	-	-	-	-	56,63
		Jumlah	146	367	5.613,98	228	2.631,72	89	2.959,02	50	23,24	-	-	3.107,46
290	Kab. Tabanan	2009	20	36	890,23	35	771,71	1	118,52	-	-	-	-	771,71
		2010	59	131	2.823,97	123	1.450,49	8	1.373,48	-	-	-	-	1.459,11
		2011	55	109	36,16	74	34,09	33	2,07	2	-	-	-	377,60
		2012	53	148	6.055,26	44	1.437,71	95	4.617,55	9	-	-	-	1.437,71
		2013	40	96	49,54	57	13,23	22	-	17	36,31	-	-	332,74
		Jumlah	227	520	9.855,16	333	3.707,23	159	6.111,62	28	36,31	-	-	4.378,87
291	Kota Denpasar	2009	68	135	10.476,17	131	9.524,96	4	951,21	-	-	-	-	11.814,29
		2010	39	82	749,88	80	749,88	2	-	-	-	-	-	751,08
		2011	33	106	1.013,70	102	773,26	4	240,44	-	-	-	-	773,60
		2012	58	129	3.728,97	123	3.177,56	6	551,41	-	-	-	-	1.913,74
		2013	59	161	1.125,55	62	448,57	31	147,81	68	529,17	-	-	1.247,60
		Jumlah	257	613	17.094,27	498	14.674,23	47	1.890,87	68	529,17	-	-	16.500,31
292	Prov. Nusa Tenggara Barat	2009	23	51	3.908,43	33	3.428,85	17	479,58	1	-	-	-	3.428,85
		2010	56	112	9.218,37	84	6.879,05	19	2.339,32	8	-	1	-	6.879,05
		2011	68	157	2.191,59	129	1.689,23	27	1.689,23	1	-	-	-	502,36
		2012	101	304	4.644,48	245	2.010,84	20	2.393,19	35	-	4	-	2.073,43
		2013	15	50	821,16	30	-	7	42,03	13	779,13	-	-	-
		Jumlah	263	674	20.784,03	521	12.821,10	90	6.943,35	58	779,13	5	-	12.883,69
293	Kab. Bima	2009	14	23	247,53	18	84,50	5	163,03	-	-	-	-	84,50
		2010	15	27	126,68	16	70,17	8	56,51	3	-	-	-	70,17
		2011	26	48	246,10	30	90,31	9	155,79	9	-	-	-	90,31
		2012	41	100	1.432,19	45	59,17	46	1.373,02	9	-	-	-	149,89
		2013	25	49	1.760,01	16	8,98	25	1.218,70	8	532,33	-	-	652,42
		Jumlah	121	247	3.812,51	125	313,13	93	2.967,05	29	532,33	-	-	1.047,29
294	Kab. Dompu	2009	34	85	2.152,14	61	363,94	18	1.788,20	6	-	-	-	363,94
		2010	15	25	227,64	16	140,26	7	85,06	2	-	-	2,32	140,26
		2011	15	27	190,31	23	103,49	4	86,82	-	-	-	-	103,49
		2012	43	141	5.243,72	98	194,42	21	4.989,67	22	59,63	-	-	194,42
		2013	68	18	788,99	52	692,76	16	692,76	-	-	-	-	1,42
		Jumlah	125	346	8.602,80	250	802,11	66	7.642,51	30	155,86	-	2,32	803,53

Halaman 50 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
295	Kab. Lombok Barat	2009	14	30	755,07	22	148,27	8	606,80	-	-	-	-	148,27
		2010	61	113	1.641,44	89	1.259,20	18	380,77	5	-	1	1,47	1.259,20
		2011	48	108	5.958,76	83	1.158,40	14	4.487,66	10	-	1	312,70	1.158,40
		2012	23	90	150,93	87	106,22	3	44,71	-	-	-	-	106,22
		2013	43	102	328,28	81	314,59	21	13,69	-	-	-	-	583,47
		Jumlah	189	443	8.834,48	362	2.986,68	64	5.533,63	15	-	2	314,17	3.255,56
296	Kab. Lombok Tengah	2009	40	81	21.931,54	79	21.931,54	1	-	1	-	-	-	21.931,54
		2010	39	89	3.716,56	82	3.095,31	7	621,25	-	-	-	-	3.095,31
		2011	63	107	383,53	93	160,19	11	208,72	3	14,62	-	-	160,19
		2012	28	91	1.527,62	81	1.405,42	10	122,20	-	-	-	-	1.315,31
		2013	14	47	-	44	-	3	-	-	-	-	-	612,79
		Jumlah	184	415	27.559,25	379	26.592,46	32	952,17	4	14,62	-	-	27.115,14
297	Kab. Lombok Timur	2009	21	47	523,94	16	126,85	3	327,21	28	69,88	-	-	126,85
		2010	40	94	694,3	2	37,04	8	32,39	84	-	-	-	22,08
		2011	37	81	1.768,76	-	309,61	25	520,21	56	938,94	-	-	309,61
		2012	25	98	1.067,17	56	1.067,17	11	604,22	31	462,95	-	-	-
		2013	28	87	1.973,32	21	1.973,32	39	138,06	27	1.835,26	-	-	941
		Jumlah	151	407	5.402,62	95	473,50	86	1.622,09	226	3.307,03	-	-	467,95
298	Kab. Sumbawa	2009	19	39	1.131,43	35	571,90	4	559,53	-	-	-	-	571,90
		2010	13	22	313,36	19	307,86	3	5,50	-	-	-	-	307,86
		2011	25	33	1.415,55	28	370,84	5	1.044,71	-	-	-	-	370,84
		2012	13	46	737,31	45	544,39	1	192,92	-	-	-	-	544,39
		2013	19	62	1.088,5	22	900	19	99,85	21	-	-	-	-
		Jumlah	89	202	3.706,50	149	1.803,99	32	1.902,51	21	-	-	-	1.794,99
299	Kab. Sumbawa Barat	2009	36	96	867,56	72	670,04	24	197,52	-	-	-	-	680,30
		2010	32	62	287,46	56	213,86	6	73,60	-	-	-	-	213,86
		2011	26	52	212,12	37	116,25	15	95,87	-	-	-	-	116,25
		2012	18	48	400,00	47	200,00	1	200,00	-	-	-	-	200,00
		2013	31	89	12.438,00	65	1.104,58	13	971,10	11	10.362,32	-	-	1.104,58
		Jumlah	143	347	14.205,14	277	2.304,73	59	1.538,09	11	10.362,32	-	-	2.314,99
300	Kab. Lombok Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	26	171,65	22	148,65	4	23,00	-	-	-	-	148,65
		2011	26	60	825,05	52	687,07	8	137,98	-	-	-	-	687,07
		2012	25	85	1.199,71	67	912,41	6	208,57	12	50,28	-	28,45	912,41
		2013	20	65	1.102,41	50	493,64	9	608,77	6	-	-	-	493,64
		Jumlah	83	236	3.298,82	191	2.241,77	27	978,32	18	50,28	-	28,45	2.241,77

Halaman 51 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301	Kota Bima	2009	16	34	2.638,43	19	-	15	2.638,43	-	-	-	-	-
		2010	24	46	1.225,49	7	30,40	5	490,21	34	704,88	-	-	30,40
		2011	18	35	2.253,28	13	632,01	7	29,85	14	-	1	1.591,42	-
		2012	28	122	727,12	99	569,69	11	157,43	12	-	-	-	569,69
		2013	45	120	264,61	71	143,58	12	84,13	37	36,90	-	-	334,72
		Jumlah	131	357	7.108,93	209	1.375,68	50	3.400,05	97	741,78	1	1.591,42	1.566,82
302	Kota Mataram	2009	16	31	295,49	30	295,49	1	-	-	-	-	-	295,49
		2010	69	159	888,79	118	809,47	10	77,69	31	1,63	-	-	809,47
		2011	61	143	308,52	72	154,47	34	129,73	37	24,32	-	-	154,47
		2012	28	95	561,47	74	66,50	17	494,97	4	-	-	-	560,24
		2013	39	111	836,39	54	373,98	9	110,12	48	352,29	-	-	373,98
		Jumlah	213	539	2.890,66	348	1.699,91	71	812,51	120	378,24	-	-	2.193,65
303	Prov. Nusa Tenggara Timur	2009	56	113	2.164,26	72	541,17	14	1.623,09	27	-	-	-	541,17
		2010	81	154	8.166,85	113	901,29	19	687,11	21	6.578,45	1	-	865,57
		2011	66	157	3.033,59	47	1.678,30	93	1.355,29	17	-	-	-	1.700,84
		2012	59	157	11.417,59	70	1.258,49	85	9.917,83	2	241,27	-	-	1.257,65
		2013	36	105	7.398,71	51	2.789,92	24	4.470,56	30	138,23	-	-	2.789,92
		Jumlah	298	686	32.181,00	353	7.169,17	235	18.053,88	97	6.957,95	1	-	7.155,15
304	Kab. Alor	2009	27	55	6.109,58	29	1.844,58	21	4.265,00	5	-	-	-	1.844,58
		2010	35	79	527,92	57	284,08	19	243,84	3	-	-	-	284,08
		2011	36	88	2.612,98	44	1.186,39	42	1.426,59	2	-	-	-	1.186,39
		2012	27	79	1.722,91	58	218,35	20	1.504,56	1	-	-	-	191,02
		2013	24	62	1.002,34	30	318,54	30	683,80	2	-	-	-	673,53
		Jumlah	149	363	11.975,73	218	3.851,94	132	8.123,79	13	-	-	-	4.179,60
305	Kab. Belu	2009	29	62	948,73	32	107,41	30	841,32	-	-	-	-	107,41
		2010	56	149	1.986,77	84	1.192,93	46	793,84	19	-	-	-	1.192,93
		2011	32	80	1.059,96	37	376	11	-	32	102,20	-	-	17,51
		2012	36	68	2.070,28	36	233,56	10	374,92	22	1.461,80	-	-	233,56
		2013	15	44	1.557,79	30	155,79	14	-	-	-	-	-	263,47
		Jumlah	168	403	5.267,53	219	1.693,45	111	2.010,08	73	1.564,00	-	-	1.814,88
306	Kab. Ende	2009	15	23	3.680,52	-	10,00	1	2.013,05	22	1.657,47	-	-	10,00
		2010	36	81	920,00	31	31,75	45	888,25	5	-	-	-	31,75
		2011	36	121	4.219,77	34	2.802,34	82	1.417,43	5	-	-	-	2.802,34
		2012	38	124	3.993,55	39	225,36	26	1.987,09	59	1.781,10	-	-	336,67
		2013	18	51	481,35	17	74,74	31	322,21	3	84,40	-	-	96,87
		Jumlah	143	400	13.295,19	121	3.144,19	185	6.628,03	94	3.522,97	-	-	3.277,63

Halaman 52 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan					
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai		
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai				
307	Kab. Flores Timur	2009	21	49	196,93	25	43,89	16	153,04	11	8	-	-	13	14	15	66,79
		2010	23	56	1.205,12	19	181,71	31	1.023,41	6	-	-	-	-	-	-	181,71
		2011	23	49	2.010,33	20	1.671,75	16	338,58	13	-	-	-	-	-	-	1.691,28
		2012	31	84	662,38	31	62,30	27	600,08	26	-	-	-	-	-	-	62,30
		2013	17	54	1.744,81	32	17,48	14	1.727,33	8	-	-	-	-	-	-	130,81
		Jumlah	115	292	5.819,57	127	1.977,13	104	3.842,44	61	-	-	-	-	-	-	2.132,89
308	Kab. Kupang	2009	47	114	792,17	33	151,01	33	631,77	48	9,39	-	-	-	-	-	151,01
		2010	36	75	565,80	40	42,49	23	523,31	12	-	-	-	-	-	-	42,49
		2011	33	95	2.796,98	39	1.046,67	29	1.683,77	27	66,54	-	-	-	-	-	1.046,67
		2012	20	46	2.928,01	23	249,06	13	1.733,32	10	945,63	-	-	-	-	-	5.356,74
		2013	21	57	1.203,39	21	72,91	27	1.130,48	9	-	-	-	-	-	-	72,91
		Jumlah	157	387	8.286,35	156	1.562,14	125	5.702,65	106	1.021,56	-	-	-	-	-	6.669,82
309	Kab. Lembata	2009	14	23	1.340,31	20	558,49	3	781,82	-	-	-	-	-	-	-	558,49
		2010	41	113	2.992,16	59	1.280,37	47	1.711,79	7	-	-	-	-	-	-	1.280,37
		2011	24	46	952,53	24	31,66	22	920,87	-	-	-	-	-	-	-	41,61
		2012	29	77	3.089,24	42	152,93	31	2.936,31	4	-	-	-	-	-	-	152,93
		2013	21	47	1.069,40	31	138,75	16	930,65	-	-	-	-	-	-	-	138,75
		Jumlah	129	306	9.443,64	176	2.162,20	119	7.281,44	11	-	-	-	-	-	-	2.172,15
310	Kab. Manggarai	2009	33	83	1.088,74	61	179,00	16	519,74	5	179,00	1	-	1	-	-	179,00
		2010	18	42	2.543,10	37	408,89	4	-	-	-	-	-	-	2.134,21	-	408,89
		2011	21	57	426,17	26	108,64	30	317,53	1	-	-	-	-	-	-	503,74
		2012	32	113	1.362,62	71	432,21	40	891,16	2	39,25	-	-	-	-	-	952,99
		2013	31	78	2.536,53	26	519,50	23	2.017,03	29	-	-	-	-	-	-	610,99
		Jumlah	135	373	7.957,16	221	1.648,24	113	3.745,46	37	429,25	2	-	2	2.134,21	-	2.655,61
311	Kab. Manggarai Barat	2009	28	53	1.016,13	50	415,08	3	601,05	-	-	-	-	-	-	-	415,08
		2010	27	49	1.746,02	34	319,94	8	598,07	7	828,01	-	-	-	-	-	319,94
		2011	34	81	1.140,18	63	303,35	16	836,83	2	-	-	-	-	-	-	375,35
		2012	13	32	2.345,67	21	1.079,45	11	1.266,22	-	-	-	-	-	-	-	1.079,45
		2013	21	60	2.134,86	39	254,83	21	1.880,03	-	-	-	-	-	-	-	658,89
		Jumlah	123	275	8.382,86	207	2.372,65	59	5.182,20	9	828,01	-	-	-	-	-	2.848,71
312	Kab. Manggarai Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	30	93	4.525,30	42	80,50	33	4.369,80	18	75,00	-	-	-	-	-	80,50
		2011	35	74	8.693,93	15	311,61	26	86,42	33	8.295,90	-	-	-	-	-	371,61
		2012	17	65	2.033,75	57	259,74	8	1.774,01	-	-	-	-	-	-	-	259,74
		2013	18	51	4.696,59	26	2.923,78	23	1.772,81	2	-	-	-	-	-	-	813,60
		Jumlah	100	283	19.949,57	140	3.575,63	90	8.003,04	53	8.370,90	-	-	-	-	-	1.525,45

Halaman 53 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
313	Kab. Sabu Raijua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	18	39	384,62	33	296,13	2	88,49	4	296,13	-	-	296,13
		2012	14	33	1.263,42	10	548,01	20	715,41	3	548,01	-	-	548,01
		2013	18	54	2.030,08	28	380,98	20	1.649,10	6	3.043,34	-	-	3.043,34
		Jumlah	50	126	3.678,12	71	1.225,12	42	2.453,00	13	3.887,48	-	-	3.887,48
314	Kab. Nagekeo	2009	17	30	159,61	23	71,62	6	87,99	1	71,62	-	-	71,62
		2010	26	47	914,15	26	211,81	14	677,40	7	24,94	-	-	211,81
		2011	17	59	355,50	27	270,22	31	85,28	1	270,22	-	-	270,22
		2012	18	46	683,00	26	83,64	18	599,36	2	83,64	-	-	83,64
		2013	33	69	1.387,34	28	84,78	38	1.302,56	3	160,17	-	-	160,17
		Jumlah	111	251	3.499,60	130	722,07	107	2.752,59	14	24,94	-	-	797,46
315	Kab. Ngada	2009	14	28	136,22	26	122,17	2	14,05	-	-	-	-	122,17
		2010	21	59	4.414,32	37	3.913,50	11	500,82	11	3.913,50	-	-	3.913,50
		2011	16	47	332,28	17	12,58	28	319,70	2	12,58	-	-	12,58
		2012	19	65	18.546,89	34	375,35	31	18.171,54	-	-	-	-	375,35
		2013	20	62	3.389,59	27	530,68	35	2.858,91	-	-	-	-	530,68
		Jumlah	90	261	26.819,30	141	4.954,28	107	21.865,02	13	4.954,28	-	-	4.954,28
316	Kab. Rote Ndao	2009	16	28	1.271,20	17	245,10	7	1.026,10	4	-	-	-	245,10
		2010	25	54	287,51	36	125,08	12	162,43	6	-	-	-	125,08
		2011	42	109	1.145,72	62	171,45	43	962,93	4	11,34	-	-	171,45
		2012	24	70	5.058,94	36	87,45	30	4.971,49	4	-	-	-	87,45
		2013	18	40	1.357,46	21	183,45	17	1.174,01	2	-	-	-	183,45
		Jumlah	125	301	9.120,83	172	812,53	109	8.296,96	20	11,34	-	-	812,53
317	Kab. Sikka	2009	25	46	599,63	13	-	15	-	18	599,63	-	-	-
		2010	24	58	90,11	30	81,47	10	8,64	18	-	-	-	85,07
		2011	39	115	16.379,86	44	666,37	37	15.196,87	34	516,62	-	-	666,37
		2012	29	73	4.740,48	23	393,14	50	4.347,34	-	-	-	-	393,14
		2013	32	81	889,53	2	225,97	5	488,24	74	488,24	-	-	287,44
		Jumlah	149	373	22.699,61	112	1.366,95	117	19.768,17	144	1.564,49	-	-	1.432,02
318	Kab. Sumba Barat	2009	37	85	1.282,58	64	1.029,80	21	252,78	-	-	-	-	1.029,80
		2010	36	72	783,92	45	637,20	24	146,72	3	-	-	-	637,20
		2011	42	89	668,06	64	156,17	13	137,22	12	374,67	-	-	156,17
		2012	19	60	1.979,94	32	410,77	24	196,05	4	1.373,12	-	-	535,54
		2013	23	47	269,25	4	185,76	42	185,76	1	83,49	-	-	83,49
		Jumlah	157	353	4.983,75	209	2.317,43	124	918,53	20	1.747,79	-	-	2.442,20

Halaman 54 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
319	Kab. Sumba Barat Daya	2009	14	24	25,80	9	25,80	4	-	11	-	-	-	25,80	
		2010	22	45	600,56	36	453,68	4	146,88	5	-	-	-	453,68	
		2011	28	61	4.215,00	1	1.306,63	7	595,28	53	2.313,09	-	-	1.306,63	
		2012	23	72	436,88	29	404,31	36	8,10	7	24,47	-	-	404,31	
		2013	16	57	847,65	7	257,96	49	589,69	1	-	-	-	257,96	
		Jumlah	103	259	6.125,89	82	2.448,38	100	1.339,95	77	2.337,56	-	-	2.448,38	
320	Kab. Sumba Tengah	2009	23	46	680,89	29	670,36	13	10,53	4	-	-	-	670,36	
		2010	26	62	837,34	34	622,28	26	215,06	2	-	-	-	622,28	
		2011	18	50	73,90	37	29,31	13	44,59	-	-	-	-	29,31	
		2012	32	93	1.120,69	53	552,08	37	568,61	3	-	-	-	733,04	
		2013	41	152	1.825,38	57	218,00	70	1.421,04	25	186,34	-	-	973,68	
		Jumlah	140	403	4.538,20	210	2.092,03	159	2.259,83	34	186,34	-	-	3.028,67	
321	Kab. Sumba Timur	2009	66	143	1.559,27	138	1.516,89	5	42,38	-	-	-	-	1.524,35	
		2010	38	88	2.334,37	81	2.332,18	7	-	-	-	-	2,19	2.332,18	
		2011	40	112	1.172,65	94	759,24	17	379,76	-	-	1	33,65	1.527,13	
		2012	30	87	421,09	74	120,33	13	300,76	-	-	-	-	242,56	
		2013	18	44	153,80	23	26,41	21	127,89	-	-	-	-	123,49	
		Jumlah	192	474	5.641,18	410	4.755,05	63	850,29	-	-	1	35,84	5.749,71	
322	Kab. Timor Tengah Selatan	2009	42	73	1.061,24	28	185,02	12	570,48	33	305,74	-	-	185,02	
		2010	40	78	619,83	46	18,67	22	383,79	10	217,37	-	-	18,67	
		2011	25	63	80,20	18	-	8	80,20	37	-	-	-	-	
		2012	16	40	4.265,76	20	81,67	18	4.133,29	2	50,80	-	-	81,67	
		2013	25	44	1.826,95	24	538,53	19	1.234,42	1	54,00	-	-	947,18	
		Jumlah	148	298	7.853,98	136	823,89	79	6.321,98	83	708,11	-	-	1.232,54	
323	Kab. Timor Tengah Utara	2009	15	31	329,69	10	180,67	12	149,02	9	-	-	-	180,67	
		2010	38	97	2.627,91	63	520,61	30	2.107,30	4	-	-	-	519,61	
		2011	38	90	11.930,99	23	3.952,40	24	6.873,59	43	1.105,00	-	-	3.952,40	
		2012	24	51	2.265,57	13	1.253,52	23	1.012,05	15	-	-	-	1.253,52	
		2013	27	80	307,01	37	-	31	301,33	12	5,68	-	-	289,43	
		Jumlah	142	349	17.461,17	146	5.907,20	120	10.443,29	83	1.110,68	-	-	6.195,63	
324	Kota Kupang	2009	26	39	247,32	33	136,76	6	110,56	-	-	-	-	136,76	
		2010	35	71	1.915,00	17	201,80	22	1.642,95	32	70,25	-	-	201,80	
		2011	43	110	2.601,52	59	1.038,20	35	1.563,32	16	-	-	-	1.038,20	
		2012	15	35	516,17	15	27,00	18	489,17	2	27,00	-	-	27,00	
		2013	26	78	2.695,42	36	2.181,91	36	513,51	6	-	-	-	2.181,91	
		Jumlah	145	333	7.975,43	160	3.585,67	117	4.319,51	56	70,25	-	-	3.585,67	

Halaman 55 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
325	Prov. Kalimantan Barat	2009	84	207	53.825,06	149	16.015,07	58	37.809,99	-	-	-	-	16.053,42
		2010	77	147	4.532,42	111	2.569,08	35	1.689,71	-	-	1	273,63	2.717,16
		2011	89	213	23.280,54	117	1.021,21	90	22.151,25	6	108,08	-	-	410,60
		2012	47	111	5.466,71	87	5.047,43	19	411,16	5	-	-	8,12	4.824,51
		2013	33	99	15.782,25	11	11.895,09	16	311,17	72	3.575,99	-	-	11.823,12
		Jumlah	330	777	102.886,98	475	36.547,88	218	62.373,28	83	3.684,07	1	281,75	35.828,81
326	Kab. Bengkayang	2009	29	62	187,65	35	137,14	24	50,51	3	-	-	-	145,98
		2010	12	30	646,69	17	546,30	13	100,39	-	-	-	-	554,30
		2011	23	78	1.035,06	16	64,31	58	970,75	4	-	-	-	56,32
		2012	15	45	616,07	5	68,54	40	547,53	-	-	-	-	68,54
		2013	21	45	1.282,55	-	60,85	31	373,45	14	848,25	-	-	-
		Jumlah	100	260	3.768,02	73	877,14	166	2.042,63	21	848,25	-	-	825,14
327	Kab. Kapuas Hulu	2009	52	120	3.011,12	102	2.728,09	18	283,03	-	-	-	-	2.728,09
		2010	18	35	1.225,61	28	674,75	7	550,86	-	-	-	-	548,75
		2011	24	45	1.057,28	41	481,86	4	575,42	-	-	-	-	633,96
		2012	18	37	1.879,98	26	502,04	11	1.377,94	-	-	-	-	416,64
		2013	9	22	766,31	11	393,27	11	373,04	-	-	-	-	393,27
		Jumlah	121	259	7.940,30	208	4.780,01	51	3.160,29	-	-	-	-	4.720,71
328	Kab. Kayong Utara	2009	43	115	3.276,02	84	986,69	31	2.272,61	-	-	-	16,72	1.019,61
		2010	22	53	3.484,73	36	1.393,75	17	2.090,98	-	-	-	-	1.393,75
		2011	19	41	594,90	26	-	15	594,90	-	-	-	-	-
		2012	8	20	242,22	6	130,81	5	80,73	9	30,68	-	-	130,81
		2013	8	16	191,64	7	19,34	8	172,30	1	-	-	-	175,02
		Jumlah	100	245	7.789,51	159	2.530,59	76	5.211,52	10	30,68	-	16,72	2.719,19
329	Kab. Ketapang	2009	79	171	4.819,41	94	1.760,80	70	3.058,61	7	-	-	-	1.760,80
		2010	17	46	559,44	29	258,95	17	300,49	-	-	-	-	258,95
		2011	30	82	1.859,72	28	323,73	33	1.535,99	21	-	-	-	323,73
		2012	42	95	1.710,40	36	132,86	52	1.546,05	7	31,49	-	-	132,86
		2013	27	49	378,03	3	301,45	7	76,58	39	-	-	-	275,92
		Jumlah	195	443	9.327,00	190	2.777,79	179	6.517,72	74	31,49	-	-	2.752,26
330	Kab. Kubu Raya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	27	56	720,37	56	720,37	-	-	-	-	-	-	720,37
		2011	17	28	38,86	26	38,86	2	-	-	-	-	-	38,86
		2012	26	58	1.496,56	11	28,71	42	1.467,85	5	-	-	-	28,71
		2013	28	54	571,71	10	449,67	5	122,04	39	-	-	-	449,67
		Jumlah	98	196	2.827,50	103	1.237,61	49	1.589,89	44	-	-	-	1.237,61

Halaman 56 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/peyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
331	Kab. Landak	2009	33	72	2.456,20	58	1.873,28	10	582,92	4	-	-	-	1.942,10
		2010	20	42	2.406,23	30	899,22	12	1.507,01	-	-	-	-	899,22
		2011	25	64	1.319,40	60	1.319,40	4	-	-	-	-	-	4.474,69
		2012	22	50	32,50	37	-	13	32,50	-	-	-	-	-
		2013	14	36	3.377,12	16	2.163,51	8	1.085,26	12	128,35	-	-	2.128,74
		Jumlah	114	264	9.591,45	201	6.255,41	47	3.207,69	16	128,35	-	-	9.444,75
332	Kab. Melawi	2009	29	56	1.109,38	22	143,44	23	898,87	11	67,07	-	-	143,44
		2010	29	60	2.258,57	25	33,87	35	2.224,70	-	-	-	-	33,87
		2011	36	82	4.892,34	32	684,10	33	4.194,19	17	14,05	-	-	669,10
		2012	18	28	433,86	9	243,81	6	190,05	13	-	-	-	243,81
		2013	12	29	924,05	5	51,70	24	872,35	-	-	-	-	51,70
		Jumlah	124	255	9.618,20	93	1.156,92	121	8.380,16	41	81,12	-	-	1.141,92
333	Kab. Pontianak	2009	36	78	859,01	68	105,66	10	753,35	-	-	-	-	105,66
		2010	23	51	1.946,18	40	126,12	11	1.820,06	-	-	-	-	126,12
		2011	14	25	-	20	-	5	-	-	-	-	-	-
		2012	28	58	1.293,55	26	798,10	32	495,45	-	-	-	-	798,10
		2013	21	52	4.092,85	14	779,56	18	3.197,96	20	115,33	-	-	735,63
		Jumlah	122	264	8.191,59	168	1.809,44	76	6.266,82	20	115,33	-	-	1.765,51
334	Kab. Sambas	2009	8	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	51	466,26	50	466,26	1	-	-	-	-	-	468,79
		2011	25	38	185,75	31	76,00	7	109,75	-	-	-	-	10,00
		2012	15	49	541,56	23	541,56	26	-	-	-	-	-	541,74
		2013	11	20	666,69	7	430,20	13	236,49	-	-	-	-	430,20
		Jumlah	83	178	1.860,26	131	1.514,02	47	346,24	-	-	-	-	1.450,73
335	Kab. Sanggau	2009	45	81	805,63	46	325,80	33	479,83	2	-	-	-	325,80
		2010	37	100	1.511,91	84	371,39	16	1.140,52	-	-	-	-	371,39
		2011	18	38	543,85	32	90,91	6	452,94	-	-	-	-	104,01
		2012	8	23	3.288,52	8	-	14	3.288,52	1	-	-	-	-
		2013	10	27	2.696,58	12	763,13	15	1.933,45	-	-	-	-	763,13
		Jumlah	118	269	8.846,49	182	1.551,23	84	7.295,26	3	-	-	-	1.564,33
336	Kab. Sekadau	2009	36	76	766,02	62	407,32	11	193,32	3	165,38	-	-	381,71
		2010	30	60	3.234,10	42	320,07	14	1.221,60	4	1.692,43	-	-	619,57
		2011	24	53	921,12	34	779,06	19	142,06	-	-	-	-	709,99
		2012	10	24	2.225,57	17	789,39	6	1.436,18	1	-	-	-	499,98
		2013	8	19	882,09	12	342,42	7	539,67	-	-	-	-	-
		Jumlah	108	232	8.028,90	167	2.638,26	57	3.532,83	8	1.857,81	-	-	2.211,25

Halaman 57 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
337	Kab. Sintang	2009	28	59	641,81	46	299,56	13	342,25	-	-	-	-	299,56
		2010	25	46	307,70	40	294,77	6	12,93	-	-	-	-	294,77
		2011	21	49	1.245,01	28	345,15	15	899,86	6	-	-	-	345,15
		2012	33	74	1.256,91	9	56,68	15	1.200,23	50	-	-	-	56,68
		2013	19	29	1.128,85	7	959,59	12	169,26	10	-	-	-	959,59
		Jumlah	126	257	4.580,28	130	1.955,75	61	2.624,53	66	-	-	-	1.955,75
338	Kota Pontianak	2009	70	136	24.245,72	102	2.430,74	31	20.682,63	1	-	2	1.132,35	2.256,32
		2010	25	44	826,87	42	673,41	2	153,46	-	-	-	-	514,13
		2011	44	94	5.244,24	72	3.673,30	21	1.570,94	1	-	-	-	3.033,79
		2012	17	24	4,20	18	4,20	5	-	1	-	-	-	4,20
		2013	27	81	54,72	21	21,26	8	33,46	52	-	-	-	21,26
		Jumlah	183	379	30.375,75	255	6.802,91	67	22.440,49	55	-	2	1.132,35	5.829,70
339	Kota Singkawang	2009	50	96	1.001,12	72	561,36	10	413,30	14	26,46	-	-	863,66
		2010	22	45	295,70	38	91,83	7	203,87	-	-	-	-	91,83
		2011	46	126	2.497,40	49	381,14	25	2.116,26	1	-	-	-	194,58
		2012	27	65	1.910,64	10	261,45	76	1.649,19	30	-	-	-	261,45
		2013	30	88	18,68	-	-	18	-	70	18,68	-	-	-
		Jumlah	175	420	5.723,54	169	1.295,78	136	4.382,62	115	45,14	-	-	1.411,52
340	Prov. Kalimantan Tengah	2009	64	112	11.935,61	81	10.536,47	31	1.399,14	-	-	-	-	10.893,03
		2010	64	154	7.281,91	135	7.025,72	17	256,19	-	-	2	-	7.025,72
		2011	83	144	9.550,90	114	7.350,86	27	2.200,04	3	-	-	-	7.350,86
		2012	27	65	1.243,16	29	399,83	32	686,40	4	156,93	-	-	410,96
		2013	42	82	2.095,99	75	2.095,99	7	-	-	-	-	-	2.095,99
		Jumlah	280	557	32.107,57	434	27.408,87	114	4.541,77	7	156,93	2	-	27.776,56
341	Kab. Barito Selatan	2009	39	86	2.345,82	73	393,87	13	1.951,95	-	-	-	-	393,87
		2010	42	96	4.637,74	77	1.036,56	19	3.601,18	-	-	-	-	1.036,56
		2011	23	58	1.742,79	46	347,80	11	1.394,99	1	-	-	-	347,80
		2012	15	34	641,10	31	27,92	3	537,48	-	-	-	75,70	133,35
		2013	18	41	834,09	34	734,06	7	100,03	-	-	-	-	182,98
		Jumlah	137	315	10.201,54	261	2.540,21	53	7.585,63	1	-	-	75,70	2.094,56
342	Kab. Barito Timur	2009	25	63	5.144,19	48	4.398,25	12	745,94	3	-	-	-	4.398,25
		2010	47	121	6.625,77	62	4.699,12	29	1.874,63	30	52,02	-	-	4.685,35
		2011	38	125	3.919,88	73	711,18	41	3.208,70	11	-	-	-	710,02
		2012	38	100	2.734,11	47	262,42	46	2.440,65	7	31,04	-	-	262,42
		2013	51	88	11.250,93	50	395,52	28	10.855,41	10	-	-	-	395,52
		Jumlah	199	497	29.674,88	280	10.466,49	156	19.125,33	61	83,06	-	-	10.451,56

Halaman 58 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
343	Kab. Barito Utara	2009	55	117	979,36	95	699,38	17	139,20	3	-	2	140,78	699,38
		2010	35	97	518,74	84	404,53	7	-	5	-	1	114,21	404,53
		2011	58	123	346,56	68	303,18	17	43,38	38	-	-	-	303,18
		2012	36	137	3.118,06	72	866,54	46	325,38	19	1.926,14	-	-	976,31
		2013	20	37	1.963,71	31	668,34	6	1.151,24	65	-	-	-	470,98
		Jumlah	204	511	6.926,43	350	2.941,97	93	652,09	129	3.077,38	3	254,99	2.854,38
344	Kab. Gunung Mas	2009	42	92	2.538,90	82	374,46	10	2.164,44	-	-	-	-	374,46
		2010	42	109	1.348,85	65	729,89	22	440,27	22	178,69	-	-	729,89
		2011	29	72	1.576,60	21	982,24	7	444,17	44	444,17	-	-	982,24
		2012	29	83	1.547,95	13	431,89	12	154,40	58	961,66	-	-	571,98
		2013	14	34	284,1	20	284,1	9	-	5	284,1	-	-	-
		Jumlah	156	390	7.040,71	201	2.518,48	60	2.909,30	129	1.612,93	-	-	2.658,57
345	Kab. Kapuas	2009	65	142	755,22	133	754,22	7	1,00	2	-	-	-	754,22
		2010	31	79	494,46	66	43,17	6	6,29	6	-	1	-	43,17
		2011	38	54	4,52	11	-	7	4,52	36	-	-	-	-
		2012	44	118	20.402,25	72	8.219,94	46	12.182,31	-	-	-	-	19.098,63
		2013	10	29	1.158,81	9	38,07	9	63,12	11	1.057,62	-	-	63,12
		Jumlah	188	422	22.370,26	291	9.055,40	75	12.257,24	55	1.057,62	1	-	19.959,14
346	Kab. Katingan	2009	36	86	5.972,07	40	924,44	41	5.047,63	5	-	-	-	924,31
		2010	32	82	3.392,84	61	1.434,43	20	1.958,41	1	-	-	-	1.433,08
		2011	17	39	3.930,69	26	2.432,66	11	1.498,03	2	-	-	-	2.432,66
		2012	24	77	3.054,75	45	539,04	31	2.515,71	1	-	-	-	544,89
		2013	19	37	4.498,76	13	-	24	4.498,76	-	-	-	-	-
		Jumlah	128	321	20.849,11	185	5.330,57	127	15.518,54	9	-	-	-	5.334,94
347	Kab. Kotawaringin Barat	2009	69	140	15.285,69	140	15.285,69	-	-	-	-	-	-	15.285,69
		2010	56	137	1.861,13	131	1.372,45	6	488,68	-	-	-	-	1.372,45
		2011	29	58	726,00	58	726,00	-	-	-	-	-	-	726,00
		2012	42	91	323,12	75	323,12	11	-	5	-	-	-	390,92
		2013	31	59	-	26	-	3	-	30	-	-	-	-
		Jumlah	227	485	18.195,94	430	17.707,26	20	488,68	35	-	-	-	17.775,06
348	Kab. Kotawaringin Timur	2009	36	91	5.784,45	68	778,04	23	5.006,41	-	-	-	-	778,04
		2010	65	149	12.142,95	78	5.141,63	59	7.001,32	12	-	-	-	5.141,63
		2011	15	52	1.773,51	28	1.757,89	9	15,62	15	-	-	-	1.757,89
		2012	22	60	2.774,16	17	1.145,27	21	1.628,89	22	-	-	-	370,82
		2013	41	94	464,13	24	453,68	35	10,45	35	-	-	-	453,68
		Jumlah	179	446	22.939,20	215	9.276,51	147	13.662,69	84	-	-	-	8.502,06

Halaman 59 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
349	Kab. Lamandau	2009	30	76	1.743,23	75	1.743,23	1	-	-	-	-	-	-	1.743,23
		2010	22	45	1.474,72	30	1.454,72	15	20,00	-	-	-	-	-	1.454,72
		2011	31	60	786,54	45	687,99	15	98,55	-	-	-	-	-	702,99
		2012	14	31	19,58	21	4,86	10	14,72	-	-	-	-	-	-
		2013	21	51	7.939,24	39	2.275,19	7	5.664,05	-	-	-	-	-	2.275,19
		Jumlah	118	263	11.963,31	210	6.165,99	48	5.797,32	-	-	-	-	-	6.176,13
350	Kab. Murung Raya	2009	35	109	10.568,44	79	7.443,48	14	3.124,96	-	-	-	-	-	7.443,48
		2010	31	101	3.758,65	81	1.492,65	17	2.263,49	-	-	-	-	-	1.492,65
		2011	32	90	1.274,17	53	470,50	12	717,19	-	-	-	-	-	470,50
		2012	30	65	1.458,26	38	1.412,52	20	21,24	-	-	-	-	-	1.412,52
		2013	22	65	3.808,53	23	443,81	14	18,72	-	-	-	-	-	443,81
		Jumlah	150	430	20.868,05	274	11.262,96	77	6.145,60	-	-	-	-	-	11.262,96
351	Kab. Pulang Pisau	2009	58	114	3.225,22	77	2.309,57	25	876,48	-	-	-	-	-	2.291,41
		2010	38	82	1.247,13	53	659,02	28	588,11	-	-	-	-	-	740,52
		2011	13	30	302,79	8	25,00	8	25,00	-	-	-	-	-	130,28
		2012	36	82	1.079,31	51	929,27	26	150,04	-	-	-	-	-	998,08
		2013	27	55	549,63	16	349,25	18	134,30	-	-	-	-	-	349,26
		Jumlah	172	363	6.404,08	218	4.394,62	105	1.773,93	-	-	-	-	-	4.526,78
352	Kab. Seruyan	2009	40	102	5.579,07	33	3.099,20	63	2.464,37	-	-	-	-	-	3.099,20
		2010	37	126	25.245,47	37	4.692,56	21	1.059,39	-	-	-	-	-	4.692,56
		2011	41	95	32.971,67	52	488,34	29	18.253,55	-	-	-	-	-	488,34
		2012	31	128	39.769,54	36	241,34	25	-	-	-	-	-	-	241,34
		2013	20	62	2.275,19	35	34,00	6	-	-	-	-	-	-	34,00
		Jumlah	169	513	105.840,94	193	8.555,44	144	21.777,31	-	-	-	-	-	8.555,44
353	Kab. Sukamara	2009	61	61	2.333,93	33	639,33	18	1.694,60	-	-	-	-	-	639,33
		2010	24	62	3.982,12	41	832,65	15	3.149,47	-	-	-	-	-	832,65
		2011	24	60	159,92	39	122,65	21	37,27	-	-	-	-	-	122,65
		2012	37	37	386,22	23	213,68	6	172,54	-	-	-	-	-	213,68
		2013	21	49	1.062,36	8	20,00	20	102,62	-	-	-	-	-	20,00
		Jumlah	167	269	7.924,55	144	1.828,31	80	5.156,50	-	-	-	-	-	1.828,31
354	Kota Palangkaraya	2009	31	64	-	26	-	11	-	-	-	-	-	-	-
		2010	36	108	13.605,32	36	458,01	67	13.147,31	-	-	-	-	-	458,01
		2011	51	132	8.312,53	33	8.295,61	83	8.295,61	-	-	-	-	-	16,92
		2012	29	67	1.084,31	46	795,36	21	192,23	-	-	-	-	-	839,06
		2013	39	86	1.727,11	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	186	457	24.729,27	144	1.270,29	186	21.635,15	-	-	-	-	-	1.313,99

Halaman 60 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
355	Prov. Kalimantan Selatan	2009	49	74	6.361,73	68	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2010	57	117	9.220,11	81		6.361,73	6							6.368,63
		2011	44	95	6.631,87	25		8.440,94	34	779,17	2					8.440,94
		2012	74	162	10.821,17	27		3.252,87	70	3.379,00						3.252,87
		2013	50	132	15.249,51	25		583,89	123	3.568,55	12	6.668,73				5.823,20
		Jumlah	274	580	48.284,39	226		498,82	259	7.726,72	95	21.419,42				1.522,95
356	Kab. Batangas	2009	42	74	281,67	72		281,67	2							281,67
		2010	15	35	132,86	32		98,50	3	34,36						98,50
		2011	24	54	668,40	35		668,40	19							668,40
		2012	20	46	539,26	14		518,38	32	20,88						518,38
		2013	18	42	143,31	12		133,51	29	9,80	1					326,41
		Jumlah	119	251	1.765,50	165		1.700,46	85	65,04	1					1.893,36
357	Kab. Banjar	2009	23	30	4.173,08	27		3.798,08	3	375,00						3.798,08
		2010	36	67	19.849,64	54		19.793,51	13	56,13						19.793,51
		2011	46	98	380,45	65		380,45	24		9					380,45
		2012	23	57	1.492,77	35		1.268,64	21	224,13	1					1.616,78
		2013	21	60	808,91	41		786,85	15	22,06	4					1.544,91
		Jumlah	149	312	26.704,85	222		26.027,53	76	677,32	14					27.133,73
358	Kab. Barito Kuala	2009	13	21	2.863,13	19		1.153,41	2	1.709,72						1.153,41
		2010	29	60	7.923,07	51		593,72	9	7.329,35						593,72
		2011	24	51	14.237,35	22		332,61	29	13.904,74						332,61
		2012	12	21	10.469,26	9			12	10.469,26						
		2013	25	67	14.518,84	21		267,36	20	363,20	26	13.888,28				267,36
		Jumlah	103	220	50.011,65	122		2.347,10	72	33.776,27	26	13.888,28				2.347,10
359	Kab. Hulu Sungai Selatan	2009	11	22	3.742,42	20		3.507,67	2	234,75						3.507,67
		2010	21	30	461,27	24		434,18	3	27,09	3					434,18
		2011	13	29	1.049,32	28		130,27			1	919,05				130,27
		2012	11	22	199,33	18		199,33	3		1					199,33
		2013	20	54	1.566,35	11		68,98	19	97,21	24	1.400,16				68,98
		Jumlah	76	157	7.018,69	101		4.340,43	27	359,05	29	2.319,21				4.340,43
360	Kab. Hulu Sungai Tengah	2009	12	18	1.865,89	16		1.832,13	2	33,76						1.870,41
		2010	23	35	1.494,02	29		1.494,02	6							1.494,02
		2011	19	43	321,80	34		321,80	8		1					321,80
		2012	13	34	36,09	26		36,09	8							36,09
		2013	25	53	4.136,41	27		388,73	14	22,06	12	3.725,62				388,73
		Jumlah	92	183	7.854,21	132		4.072,77	38	55,82	13	3.725,62				4.111,05

Halaman 61 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
361	Kab. Hulu Sungai Utara	2009	19	35	754,13	34	754,13	1	-	-	-	-	-	-	754,13	-
		2010	8	11	277,47	10	277,47	1	-	-	-	-	-	-	277,47	-
		2011	14	40	1.123,95	24	1.123,95	16	-	-	-	-	-	-	1.123,95	-
		2012	18	48	7.666,42	21	2.819,96	26	4.846,46	1	-	-	-	-	2.933,26	-
		2013	52	162	1.112,46	18	468,45	35	438,65	109	205,36	-	-	-	468,45	-
		Jumlah	111	296	10.934,43	107	5.443,96	79	5.285,11	110	205,36	-	-	-	5.557,26	-
362	Kab. Kotabaru	2009	12	18	65,96	15	-	3	65,96	-	-	-	-	-	-	-
		2010	54	109	2.236,38	36	986,78	66	1.249,60	7	-	-	-	-	986,78	-
		2011	25	66	3.878,75	23	720,47	41	3.139,81	2	18,47	-	-	-	720,47	-
		2012	18	39	3.573,68	21	1.739,55	18	1.834,13	-	-	-	-	-	1.795,61	-
		2013	14	44	4.003,36	7	277,69	35	3.725,67	2	-	-	-	-	277,69	-
		Jumlah	123	276	13.758,13	102	3.724,49	163	10.015,17	11	18,47	-	-	-	3.780,55	-
363	Kab. Tabalong	2009	22	39	1.007,35	38	686,10	1	321,25	-	-	-	-	-	686,10	-
		2010	31	58	779,46	28	744,18	28	35,28	2	-	-	-	-	744,18	-
		2011	37	78	736,32	42	161,89	31	574,43	5	-	-	-	-	161,89	-
		2012	25	60	8.080,51	19	4.377,55	36	3.702,96	5	-	-	-	-	4.377,55	-
		2013	31	80	14.408,80	16	676,66	52	13.732,14	12	-	-	-	-	778,15	-
		Jumlah	146	315	25.012,44	143	6.646,38	148	18.366,06	24	-	-	-	-	6.747,87	-
364	Kab. Tanah Bumbu	2009	31	59	8.845,16	53	8.601,84	5	243,32	1	-	-	-	-	8.601,84	-
		2010	24	42	2.080,36	36	2.062,80	5	17,56	1	-	-	-	-	2.062,80	-
		2011	26	44	1.545,94	35	217,92	9	1.328,02	-	-	-	-	-	524,92	-
		2012	28	74	2.102,67	25	1.244,16	36	858,51	13	-	-	-	-	1.506,94	-
		2013	37	107	9.239,40	50	504,96	29	3.250,65	28	5.483,79	-	-	-	1.223,59	-
		Jumlah	146	326	23.813,53	199	12.631,68	84	5.698,06	43	5.483,79	-	-	-	13.920,09	-
365	Kab. Tanah Laut	2009	14	28	10.039,43	20	1.517,56	8	8.521,87	-	-	-	-	-	1.517,56	-
		2010	30	53	62.252,67	36	1.307,08	17	60.945,59	-	-	-	-	-	1.307,08	-
		2011	12	21	196,84	12	106,15	9	90,69	-	-	-	-	-	106,15	-
		2012	49	124	408,09	28	297,07	16	111,02	80	-	-	-	-	297,07	-
		2013	29	71	494,87	18	311,74	19	183,13	34	-	-	-	-	612,22	-
		Jumlah	134	297	73.391,90	114	3.539,60	69	69.852,30	114	-	-	-	-	3.840,08	-
366	Kab. Tapin	2009	13	17	4.646,74	16	1.035,28	1	3.611,46	-	-	-	-	-	1.035,28	-
		2010	13	20	342,60	18	310,18	2	32,42	-	-	-	-	-	310,18	-
		2011	38	62	227,13	40	212,61	22	14,52	-	-	-	-	-	212,61	-
		2012	17	38	6.748,55	29	6.674,50	2	74,05	7	-	-	-	-	6.774,50	-
		2013	12	48	1.871,04	31	1.413,95	6	81,97	11	375,12	-	-	-	1.697,27	-
		Jumlah	93	185	13.836,06	134	9.646,52	33	3.814,42	18	375,12	-	-	-	10.029,84	-

Halaman 62 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
367	Kota Banjarbaru	2009	14	24	67,00	24	67,00	-	-	-	-	-	-	67,00	
		2010	34	60	1.140,37	55	1.058,78	5	81,59	-	-	-	-	1.061,88	
		2011	21	54	27,19	45	25,16	9	25,16	-	-	-	-	2,03	
		2012	20	75	6.770,33	14	5.933,90	61	836,43	-	-	-	-	5.833,54	
		2013	23	68	3.997,59	-	-	-	-	68	3.997,59	-	-	149,12	
		Jumlah	112	281	12.002,48	138	7.064,71	75	943,18	68	3.997,59	-	-	7.113,57	
368	Kota Banjarmasin	2009	51	59	1.429,07	49	1.372,48	10	56,59	-	-	-	-	1.372,48	
		2010	36	72	1.903,39	43	1.903,39	29	-	-	-	-	-	1.903,39	
		2011	29	55	2.489,18	39	828,78	13	1.624,21	3	36,19	-	-	828,78	
		2012	34	82	979,56	24	256,17	58	723,39	-	-	-	-	256,17	
		2013	67	175	894,09	27	339,39	61	473,17	87	81,53	-	-	339,39	
		Jumlah	217	443	5.982,29	182	2.987,21	171	2.877,36	90	117,72	-	-	2.987,21	
369	Prov. Kalimantan Timur	2009	13	42	241,76	25	241,76	-	-	-	-	-	-	241,76	
		2010	44	110	6.908,39	52	5.133,86	43	1.544,82	15	229,71	-	-	5.133,86	
		2011	72	198	34.166,78	121	19.310,33	73	10.453,92	2	-	2	4.402,53	11.308,22	
		2012	50	104	18.022,86	43	14.823,72	54	3.199,14	7	-	-	-	14.823,72	
		2013	32	60	4.472,33	16	180,20	30	4.282,35	14	4.282,35	-	-	180,20	
		Jumlah	211	514	63.812,11	257	39.689,87	217	15.207,66	38	4.512,06	2	4.402,53	31.687,76	
370	Kab. Berau	2009	32	60	4.365,14	58	4.053,27	2	311,87	-	-	-	-	1.027,86	
		2010	25	56	1.925,69	45	1.293,61	11	632,08	-	-	-	-	813,60	
		2011	25	53	16.363,27	49	14.930,44	4	1.432,83	-	-	-	-	USD 5.474,93	
		2012	18	32	8.084,88	19	8.037,93	13	46,95	-	-	-	-	14.480,30	
		2013	30	61	1.026,24	40	694,89	21	331,35	-	-	-	-	USD 4,50	
		Jumlah	130	262	31.765,22	211	29.010,14	51	2.755,08	-	-	-	-	7.987,93	
			-	-	USD 6.867,23	-	USD 5.479,43	-	USD 1.387,80	-	-	-	-	694,89	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.004,58	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 5.479,43	
371	Kab. Bulungan	2009	26	75	48.799,98	57	45.263,57	16	2.994,62	2	541,79	-	-	9.062,91	
		2010	22	63	849,11	56	463,33	3	385,78	4	-	-	-	463,33	
		2011	27	53	6.970,56	8	2.039,53	34	4.931,03	11	-	-	-	1.962,91	
		2012	13	29	5.049,31	3	418,14	26	4.631,17	-	-	-	-	-	
		2013	16	41	709,70	-	-	3	470,02	38	-	-	-	239,68	
		Jumlah	104	261	62.378,66	124	48.424,25	82	13.412,62	55	541,79	-	-	11.728,83	
372	Kab. Kutai Barat	2009	14	33	8.718,38	31	164,91	2	8.553,47	-	-	-	-	164,91	
		2010	15	45	13.513,64	40	728,70	5	12.784,94	-	-	-	-	728,70	
		2011	19	34	3.297,41	32	1.573,13	2	1.724,28	-	-	-	-	1.573,13	
		2012	24	57	3.690,32	43	1.384,22	12	2.306,10	2	-	-	-	1.384,22	
		2013	16	35	2.113,19	7	1.867,17	28	246,02	-	-	-	-	1.867,17	
		Jumlah	88	204	31.332,94	153	5.718,13	49	25.614,81	2	-	-	-	5.718,13	

Halaman 63 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
373	Kab. Kutai Kartanegara	2009	20	45	79.897,81	24	1.913,67	21	77.984,14	-	-	-	-	-
		2010	27	79	22.160,08	38	3.964,49	32	14.474,63	9	3.720,96	-	-	3.964,49
		2011	123	174	76.389,62	87	40.562,13	86	35.298,63	1	528,86	-	-	14.450,72
			-	-	USD 40.12	-	-	-	USD 40.12	-	-	-	-	-
		2012	24	56	6.670,71	43	3.651,90	13	3.018,81	-	-	-	-	6.670,72
		2013	28	73	3.959,08	19	353,11	37	3.605,97	17	-	-	-	-
		Jumlah	222	427	189.077,30	211	50.445,30	189	134.382,18	27	4.209,82	-	-	25.085,93
			-	-	USD 40.12	-	-	-	USD 40.12	-	-	-	-	-
374	Kab. Kutai Timur	2009	24	64	21.263,44	45	3.741,29	18	17.522,15	1	-	-	-	3.637,26
		2010	22	68	6.411,43	55	4.933,01	13	1.478,42	-	-	-	-	3.173,23
		2011	16	35	2.907,41	19	1.155,20	15	1.752,21	1	-	-	-	250,06
		2012	26	41	8.134,95	23	272,77	18	7.862,18	-	-	-	-	-
		2013	14	36	12.099,11	10	7.789,76	26	4.309,35	-	-	-	-	-
		Jumlah	102	244	50.816,34	152	17.892,03	90	32.924,31	2	-	-	-	7.060,55
375	Kab. Malinau	2009	21	51	1.055,80	38	25,00	12	1.030,80	1	-	-	-	25,00
		2010	23	59	3.433,51	48	2.339,54	11	1.093,97	-	-	-	-	2.339,54
		2011	21	38	1.360,26	31	524,54	7	835,72	-	-	-	-	524,54
		2012	30	58	17.004,93	25	7.311,81	31	9.693,12	2	-	-	-	7.311,81
		2013	16	39	2.108,49	25	1.443,74	8	664,75	6	-	-	-	1.443,74
		Jumlah	111	245	24.962,99	167	11.644,63	69	13.318,36	9	-	-	-	11.644,63
376	Kab. Nunukan	2009	21	44	856,92	42	576,79	2	280,13	-	-	-	-	576,79
		2010	43	101	30.258,78	82	14.536,01	18	15.722,77	1	-	-	-	14.536,01
		2011	12	23	609,80	21	609,80	2	-	-	-	-	-	609,80
		2012	17	62	4.303,68	30	632,15	32	3.671,53	-	-	-	-	632,15
		2013	20	46	1.309,92	18	1.013,38	27	296,54	1	-	-	-	1.013,38
		Jumlah	113	276	37.339,10	193	17.368,13	81	19.970,97	2	-	-	-	17.368,13
377	Kab. Paser	2009	72	210	19.195,95	152	9.134,01	48	10.061,94	10	-	-	-	13.334,30
		2010	14	31	535,28	26	535,28	5	-	-	-	-	-	4.735,28
		2011	10	27	459,03	21	76,57	6	382,46	-	-	-	-	76,57
		2012	48	88	8.331,04	51	707,90	32	7.623,14	5	-	-	-	707,90
		2013	22	59	2.280,90	3	606,85	54	1.674,05	2	-	-	-	606,85
		Jumlah	166	415	30.802,20	253	11.060,61	145	19.741,59	17	-	-	-	19.461,19
378	Kab. Penajam Paser Utara	2009	18	43	182,45	41	182,45	1	-	-	-	1	-	182,45
		2010	33	72	11.298,66	58	5.867,19	14	5.431,47	-	-	-	-	5.867,19
		2011	21	64	727,73	54	404,82	10	322,91	-	-	-	-	404,82
		2012	17	32	3.451,58	25	85,86	7	3.365,72	-	-	-	-	100,59
		2013	15	53	1.251,84	2	20,67	47	1.231,17	4	-	-	-	20,67
		Jumlah	104	264	16.912,26	180	6.560,99	79	10.351,27	4	-	1	-	6.575,72

Halaman 64 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/ perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
379	Kab. Tana Tidung	3	4	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	2.722,46	55	622,92	19	2.099,54	19	2.099,54	17	-	-	-	622,92
		2011	26	2.411,26	68	337,92	24	2.073,34	24	2.073,34	16	-	-	-	337,92
		2012	31	7.152,83	67	1.242,70	12	5.163,52	8	1.242,70	47	746,61	-	-	1.087,70
		2013	13	4.525,61	31	16.812,16	9	-	7	3.407,62	15	1.117,99	-	-	-
		Jumlah	95	16.812,16	221	3.875,15	68	2.203,54	58	12.744,02	95	1.864,60	-	-	2.048,54
380	Kota Balikpapan	2009	41	3.875,15	67	3.872,48	63	3.872,48	3	2,67	1	-	-	-	3.872,48
		2010	26	52	52	-	46	-	6	-	-	-	-	-	-
		2011	18	34	33	-	33	-	1	-	-	-	-	-	4.555,57
		2012	29	4.925,89	56	4.925,89	51	4.925,89	5	-	-	-	-	-	3.968,30
		2013	28	729,08	60	729,08	51	361,41	9	367,67	-	-	-	-	729,09
		Jumlah	142	9.530,12	269	9.530,12	244	9.159,78	24	370,34	1	-	-	-	13.125,44
381	Kota Bontang	2009	58	11.509,95	140	11.509,95	96	5.426,92	44	6.083,03	-	-	-	-	5.426,92
		2010	10	4.517,48	22	2.798,15	12	2.798,15	10	1.719,33	-	-	-	-	2.798,15
		2011	34	698,15	86	698,15	66	270,95	20	427,20	-	-	-	-	270,95
		2012	21	2.178,78	52	2.178,78	25	444,84	27	1.733,94	-	-	-	-	444,84
		2013	11	168,57	22	168,57	2	25,07	20	143,50	-	-	-	-	25,07
		Jumlah	134	19.072,93	322	19.072,93	201	8.965,93	121	10.107,00	-	-	-	-	8.965,93
382	Kota Samarinda	2009	73	115.813,93	145	115.813,93	57	5.334,15	67	101.641,33	18	8.691,92	3	146,53	5.326,33
		2010	23	18.081,97	62	4.345,03	46	4.345,03	15	13.736,94	1	-	-	-	4.345,03
		2011	44	11.384,83	104	6.218,77	86	6.218,77	12	5.166,06	6	-	-	-	6.218,77
		2012	20	1.149,99	38	1.149,99	17	330,50	18	258,05	3	561,44	-	-	330,50
		2013	23	1.860,05	32	1.860,05	3	127,43	15	1.569,54	14	1.569,54	-	-	118,86
		Jumlah	183	148.290,77	381	148.290,77	209	16.355,88	127	120.965,46	42	10.822,90	3	146,53	16.339,49
			-	USD 2.115,60	-	USD 1.709,20	-	USD 406,40	-	USD 406,40	-	-	-	-	USD 1.709,20
383	Kota Tarakan	2009	20	1.763,19	52	1.763,19	37	1.493,65	14	269,54	1	-	-	-	1.493,65
		2010	17	334,15	41	334,15	32	334,15	9	-	-	-	-	-	334,15
		2011	39	8.607,41	74	8.607,41	33	2.167,94	34	6.439,47	7	-	-	-	2.199,48
		2012	20	5.814,68	53	5.814,68	27	4.991,24	25	823,44	1	-	-	-	4.991,24
		2013	15	949,79	26	949,79	4	486,31	22	463,48	-	-	-	-	486,31
		Jumlah	111	17.469,22	246	17.469,22	133	9.473,29	104	7.995,93	9	-	-	-	9.504,83
384	Prov. Kalimantan Utara*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 65 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
385	Prov. Sulawesi Utara	2009	20	3.313,33	49	38	2.952,39	10	360,94	1	-	-	-	-	2.952,39
		2010	18	2.175,36	45	24	1.875,84	15	299,52	6	-	-	-	-	1.875,84
		2011	58	770,51	134	82	751,05	49	19,46	3	-	-	-	-	751,05
		2012	49	4.230,06	143	87	1.430,55	32	405,03	24	2.394,48	-	-	-	1.430,55
		2013	93	8.504,61	214	116	8.156,70	28	347,91	70	-	-	-	-	8.156,70
		Jumlah	238	18.993,87	585	347	15.166,53	134	1.432,86	104	2.394,48	-	-	-	15.166,53
386	Kab. Bolaang Mongondow	2009	35	762,34	57	41	395,95	7	265,62	9	100,77	-	-	-	395,95
		2010	26	2.867,54	51	12	404,23	10	1.051,47	29	1.411,84	-	-	-	404,23
		2011	37	2.221,40	88	35	290,20	29	1.758,24	24	172,96	-	-	-	290,20
		2012	69	5.201,90	180	28	404,01	35	4.298,38	117	499,51	-	-	-	404,01
		2013	39	6.414,91	91	30	1.597,16	33	4.817,75	28	-	-	-	-	1.597,16
		Jumlah	206	17.468,09	467	146	3.091,55	114	12.191,46	207	2.185,08	-	-	-	3.091,55
387	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	8	197,82	22	10	96,30	12	101,52	-	-	-	-	-	96,30
		2011	20	3.631,41	47	24	2.694,67	21	503,24	2	433,50	-	-	-	2.694,67
		2012	43	4.868,15	122	71	3.063,46	40	1.710,42	11	94,27	-	-	-	3.063,46
		2013	33	1.454,68	85	19	212,20	34	1.242,48	32	212,20	-	-	-	212,20
		Jumlah	104	10.152,06	276	124	6.066,63	107	3.557,66	45	527,77	-	-	-	6.066,63
388	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2009	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	4	400,09	9	6	332,35	3	67,74	-	-	-	-	-	332,35
		2011	14	8.593,28	24	14	6.040,95	10	2.552,33	-	-	-	-	-	6.040,95
		2012	31	4.871,58	77	51	3.256,03	24	1.615,55	2	-	-	-	-	3.256,03
		2013	36	3.144,88	117	47	69,16	39	1.849,86	31	1.225,86	-	-	-	69,16
		Jumlah	170	17.009,83	227	118	9.698,49	76	6.085,48	33	1.225,86	-	-	-	9.698,49
389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2009	14	5.728,01	23	13	3.069,98	10	2.658,03	-	-	-	-	-	3.069,98
		2010	14	1.860,97	26	20	965,69	6	895,28	-	-	-	-	-	965,69
		2011	15	5.051,81	29	5	1.065,72	19	3.986,09	5	-	-	-	-	1.065,72
		2012	30	4.481,98	85	50	1.199,93	31	3.074,79	4	207,26	-	-	-	1.199,93
		2013	32	3.596,45	94	43	430,25	28	3.166,20	23	430,25	-	-	-	430,25
		Jumlah	105	20.719,22	257	131	6.731,57	94	13.780,39	32	207,26	-	-	-	6.731,57
390	Kab. Minahasa	2009	12	1.103,50	21	13	826,49	6	268,37	2	8,64	-	-	-	826,49
		2010	31	658,54	61	34	572,10	16	86,44	11	-	-	-	-	572,10
		2011	13	416,38	38	7	372,62	1	43,76	30	372,62	-	-	-	372,62
		2012	59	1.610,66	151	44	939,63	47	35,14	60	635,89	-	-	-	939,63
		2013	38	7.622,46	97	39	988,72	22	6.181,22	36	452,52	-	-	-	988,72
		Jumlah	153	11.411,54	368	137	3.699,56	92	6.614,93	139	1.097,05	-	-	-	3.699,56

Halaman 66 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
391	Kab. Minahasa Selatan	2009	11	22	3.428,68	3	90,76	8	3.337,92	11	-	-	-	-	90,76	-	15	
		2010	10	22	409,56	11	8,12	2	93,80	9	307,64	-	-	-	8,12	-	8,12	
		2011	30	85	31.875,38	27	772,68	57	31.102,70	1	-	-	-	-	772,68	-	772,68	
		2012	45	92	4.346,53	34	915,40	58	3.431,13	-	-	-	-	-	915,40	-	915,40	
		2013	35	93	6.815,44	31	438,97	46	6.096,19	16	280,28	-	-	-	438,97	-	438,97	
		Jumlah	131	314	46.875,59	106	2.225,93	171	44.061,74	37	587,92	-	-	-	2.225,93	-	2.225,93	
392	Kab. Minahasa Tenggara	2009	18	38	3.657,91	22	178,39	10	3.403,63	6	75,89	-	-	-	178,39	-	178,39	
		2010	20	64	14.731,71	25	2.154,74	7	1.931,27	32	10.645,70	-	-	-	2.154,74	-	2.154,74	
		2011	23	61	15.503,29	28	359,42	13	2.771,71	20	12.372,16	-	-	-	359,42	-	359,42	
		2012	31	89	7.537,72	12	955,62	47	5.708,03	30	874,07	-	-	-	955,62	-	955,62	
		2013	64	174	8.398,54	12	486,25	24	4.995,37	138	2.916,92	-	-	-	486,25	-	486,25	
		Jumlah	156	426	49.829,17	99	4.134,42	101	18.810,01	226	26.884,74	-	-	-	4.134,42	-	4.134,42	
393	Kab. Minahasa Utara	2009	12	25	1.971,92	10	347,20	12	1.624,72	3	-	-	-	-	347,20	-	347,20	
		2010	18	39	354,91	3	300,82	3	54,09	33	-	-	-	-	300,82	-	300,82	
		2011	26	65	3.476,11	5	780,87	31	940,89	29	1.754,35	-	-	-	780,87	-	780,87	
		2012	47	112	6.729,26	4	2.808,48	11	2.618,84	97	1.301,94	-	-	-	2.826,99	-	2.826,99	
		2013	19	49	2.820,03	-	815,20	7	767,00	42	1.237,83	-	-	-	815,20	-	815,20	
		Jumlah	122	290	15.352,23	22	5.052,57	64	6.005,54	204	4.294,12	-	-	-	5.071,08	-	5.071,08	
394	Kab. Kepulauan Sangihe	2009	13	24	12.324,52	23	8.616,96	1	3.707,56	-	-	-	-	-	8.616,96	-	8.616,96	
		2010	25	49	1.187,31	19	643,57	5	543,74	25	-	-	-	-	643,57	-	643,57	
		2011	18	46	1.201,73	34	300,99	7	900,74	5	-	-	-	-	300,99	-	300,99	
		2012	19	58	1.739,13	18	478,74	38	1.260,39	2	-	-	-	-	478,74	-	478,74	
		2013	26	85	3.658,72	30	955,08	40	2.639,54	15	64,10	-	-	-	955,08	-	955,08	
		Jumlah	101	262	20.111,41	124	10.995,34	91	9.051,97	47	64,10	-	-	-	10.995,34	-	10.995,34	
395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2009	12	23	6.840,91	13	4.244,74	10	2.596,17	-	-	-	-	-	4.244,74	-	4.244,74	
		2010	11	29	1.248,61	20	633,35	8	601,52	1	13,74	-	-	-	633,35	-	633,35	
		2011	14	37	2.010,21	12	882,79	25	1.127,42	-	-	-	-	-	882,79	-	882,79	
		2012	13	35	48,04	22	31,59	8	16,45	5	-	-	-	-	31,59	-	31,59	
		2013	23	66	3.604,31	15	1.579,57	28	2.024,74	23	-	-	-	-	1.579,57	-	1.579,57	
		Jumlah	73	190	13.752,08	82	7.372,04	79	6.366,30	29	13,74	-	-	-	7.372,04	-	7.372,04	
396	Kab. Kepulauan Talaud	2009	23	44	25.322,47	15	24.676,21	20	646,26	9	-	-	-	-	24.676,21	-	24.676,21	
		2010	18	61	16.599,98	28	205,68	18	2.982,76	15	13.411,54	-	-	-	205,68	-	205,68	
		2011	19	40	6.224,37	18	474,77	15	5.749,60	7	-	-	-	-	474,77	-	474,77	
		2012	35	82	6.597,87	47	2.114,02	29	4.483,85	6	-	-	-	-	2.780,52	-	2.780,52	
		2013	23	60	5.601,01	23	960,34	23	4.640,67	14	-	-	-	-	960,34	-	960,34	
		Jumlah	118	287	60.345,70	131	28.431,02	105	18.503,14	51	13.411,54	-	-	-	29.097,52	-	29.097,52	

Halaman 67 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai		Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
397	Kota Bitung	2009	29	49	1.360,96	36	179,07	13	1.181,89	-	-	-	-	179,07
		2010	17	51	681,33	45	653,83	6	27,50	-	-	-	-	653,83
		2011	45	93	552,44	29	294,89	6	130,05	58	127,50	-	-	294,89
		2012	23	55	134,91	43	124,20	12	10,71	-	-	-	-	124,20
		2013	35	81	654,96	39	510,05	18	144,91	24	-	-	-	510,05
		Jumlah	149	329	3.384,60	192	1.762,04	55	1.495,06	82	127,50	-	-	1.762,04
398	Kota Kotamobagu	2009	10	21	333,83	17	259,80	2	74,03	2	-	-	-	259,80
		2010	18	46	3.286,88	31	1.446,06	15	1.840,82	-	-	-	-	1.446,06
		2011	31	58	1.725,90	43	772,81	10	932,78	5	20,31	-	-	772,81
		2012	15	41	1.522,64	25	1.060,48	11	409,21	5	52,95	-	-	1.060,48
		2013	39	98	4.384,27	-	112,83	5	1.678,96	93	2.592,48	-	-	112,83
		Jumlah	113	264	11.253,52	116	3.651,98	43	4.935,80	105	2.665,74	-	-	3.651,98
399	Kota Manado	2009	8	14	5.661,98	1	77,16	1	-	12	5.584,82	-	-	77,16
		2010	22	56	9.986,27	37	147,62	15	2.689,18	4	7.149,47	-	-	147,62
		2011	67	169	10.544,03	105	2.897,56	43	5.868,89	21	1.777,58	-	-	2.897,56
		2012	37	83	6.489,15	56	1.861,86	26	4.627,29	1	-	-	-	1.861,86
		2013	34	106	2.322,36	41	573,98	30	937,56	35	810,82	-	-	573,98
		Jumlah	168	428	35.003,79	240	5.558,18	115	14.122,92	73	15.322,69	-	-	5.558,18
400	Kota Tomohon	2009	3	7	21.812,69	3	1.500,00	2	17.147,62	2	3.165,07	-	-	1.500,00
		2010	17	41	40.406,25	22	1.387,50	8	38.501,60	11	517,15	-	-	1.387,50
		2011	34	81	66.425,25	13	150,88	16	316,73	52	65.957,64	-	-	150,88
		2012	43	93	3.508,90	41	1.910,80	15	1.367,80	37	230,30	-	-	1.910,80
		2013	41	115	3.187,95	55	536,68	22	2.651,27	38	-	-	-	536,68
		Jumlah	138	337	135.341,04	134	5.485,86	63	59.985,02	140	69.870,16	-	-	5.485,86
401	Prov. Sulawesi Tengah	2009	38	98	20.599,62	30	2.072,02	62	18.527,60	6	-	-	-	2.072,02
		2010	55	161	5.146,36	133	1.187,83	24	3.958,53	4	-	-	-	1.203,61
		2011	76	151	8.818,45	38	7.631,23	106	1.187,22	7	-	-	-	1.604,39
		2012	25	32	2.479,37	14	731,90	18	1.747,47	-	-	-	-	2.008,05
		2013	55	117	2.246,34	45	161,67	9	1.998,30	63	146,37	-	-	3.959,56
		Jumlah	249	559	39.290,14	260	11.784,65	219	27.359,12	80	146,37	-	-	10.847,63
402	Kab. Banggai	2009	14	33	1.274,26	30	1.265,65	3	8,61	-	-	-	-	2.719,96
		2010	40	136	1.544,19	124	1.358,26	11	120,71	-	-	1	65,22	1.780,93
		2011	36	53	2.066,96	40	648,69	11	1.336,14	1	-	1	82,13	648,69
		2012	21	30	1.305,38	18	817,47	12	487,91	-	-	-	-	1.841,92
		2013	10	25	1.419,81	6	474,66	1	231,40	18	713,75	-	-	2.967,21
		Jumlah	121	277	7.610,60	218	4.564,73	38	2.184,77	19	713,75	2	147,35	9.958,71

Halaman 68 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
403	Kab. Banggai Kepulauan	2009	16	50	3.233,27	34	3.012,49	14	220,78	2	-	-	-	3.022,57
		2010	34	121	4.743,83	92	3.056,78	27	1.687,05	2	-	-	-	3.414,08
		2011	34	61	2.637,10	32	2.210,43	16	2.210,43	13	-	-	-	606,06
		2012	13	18	503,97	13	399,10	4	104,87	1	-	-	-	533,32
		2013	13	22	724,22	8	127,66	7	596,56	7	-	-	-	913,56
		Jumlah	110	272	11.842,39	179	7.022,70	68	4.819,69	25	-	-	-	8.489,59
404	Kab. Buol	2009	38	114	10.802,59	88	5.275,52	23	5.527,07	3	-	-	-	5.281,01
		2010	34	95	42.957,91	73	38.537,12	5	4.420,79	17	-	-	-	2.818,25
		2011	20	24	14.351,82	8	6.802,70	14	7.549,12	2	-	-	-	6.557,40
		2012	21	33	2.588,33	21	920,08	6	1.668,25	6	-	-	-	1.213,65
		2013	27	58	4.862,50	23	1.021,95	13	2.970,27	22	870,28	-	-	1.641,48
		Jumlah	140	324	75.563,15	213	52.557,37	61	22.135,50	50	870,28	-	-	17.511,79
405	Kab. Donggala	2009	29	75	23.666,46	32	19.726,12	23	3.940,34	19	-	1	-	19.555,88
		2010	42	118	6.396,70	66	4.684,46	44	1.712,24	8	-	-	-	4.684,46
		2011	21	24	2.626,71	16	648,71	8	1.978,00	-	-	-	-	680,37
		2012	15	21	1.430,54	16	1.218,84	5	211,70	-	-	-	-	1.701,79
		2013	17	34	-	3	-	1	-	30	-	-	-	651,36
		Jumlah	124	272	34.120,41	133	26.278,13	81	7.842,28	57	-	1	-	27.273,86
406	Kab. Morowali	2009	28	78	5.760,15	15	2.522,14	43	3.238,01	20	-	-	-	2.522,14
		2010	49	124	2.377,96	15	182,24	47	2.143,38	62	52,34	-	-	6.038,84
		2011	26	27	1.519,98	11	126,15	15	1.077,20	1	316,63	-	-	195,73
		2012	18	29	3.023,11	3	798,64	25	2.224,47	1	-	-	-	798,64
		2013	34	55	3.863,04	2	271,10	14	914,67	39	2.677,27	-	-	966,78
		Jumlah	155	313	16.544,24	46	3.900,27	144	9.597,73	123	3.046,24	-	-	10.522,13
407	Kab. Parigi Moutong	2009	34	86	4.288,45	52	2.864,32	19	1.424,13	15	-	-	-	2.873,55
		2010	41	125	1.998,23	98	1.199,53	22	723,91	5	74,79	-	-	1.199,53
		2011	21	24	6.621,96	8	1.040,22	16	5.581,74	-	-	-	-	941,35
		2012	8	11	3.361,80	-	1.848,23	11	1.513,57	-	-	-	-	1.848,27
		2013	34	46	1.400,02	8	125,71	12	572,26	26	702,05	-	-	674,56
		Jumlah	138	292	17.670,46	166	7.078,01	80	9.815,61	46	776,84	-	-	7.537,26
408	Kab. Poso	2009	30	75	1.210,76	61	638,15	9	572,61	5	-	-	-	416,63
		2010	24	83	2.605,40	76	627,66	4	1.916,54	3	61,20	-	-	294,75
		2011	40	56	255,04	53	238,01	3	17,03	-	-	-	-	628,80
		2012	22	36	2.387,90	29	393,61	6	935,87	1	1.058,42	-	-	408,53
		2013	9	17	4.807,69	10	2.944,44	2	1.863,25	5	-	-	-	2.977,66
		Jumlah	125	267	11.266,79	229	4.841,87	24	3.442,05	14	2.982,87	-	-	4.726,37

Halaman 69 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	Kab. Sigi	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	37	121	1.259,37	109	643,58	12	615,79	-	-	-	-	575,56
		2011	18	18	1.529,02	14	1.123,16	4	405,86	-	-	-	-	1.191,75
		2012	17	26	1.336,89	22	830,01	4	506,88	-	-	-	-	849,62
		2013	30	51	793,63	13	308,41	4	313,02	34	172,20	-	-	2.380,51
		Jumlah	102	216	4.918,91	158	2.905,16	24	1.841,55	34	172,20	-	-	4.997,44
410	Kab. Tojo Una-Una	2009	34	87	3.181,47	71	2.583,87	11	597,60	5	-	-	-	2.653,33
		2010	30	84	5.075,22	49	1.322,57	8	3.752,65	27	-	-	-	601,38
		2011	27	33	2.314,20	26	959,62	6	1.354,58	1	-	-	-	967,63
		2012	18	34	907,08	3	595,78	21	72,46	10	238,84	-	-	1.205,56
		2013	8	11	1.120,75	7	527,34	4	593,41	-	-	-	-	2.238,78
		Jumlah	117	249	12.598,72	156	5.989,18	50	6.370,70	43	238,84	-	-	7.666,68
411	Kab. Tolitoli	2009	61	159	3.087,57	40	890,40	76	867,42	43	1.329,75	-	-	890,40
		2010	24	65	663,75	11	405,00	8	121,00	46	137,75	-	-	405,00
		2011	25	31	2.684,94	8	1.846,73	15	721,88	8	116,33	-	-	1.228,42
		2012	16	29	1.185,01	12	530,74	16	654,27	1	-	-	-	2.827,02
		2013	19	33	3.414,57	10	568,98	10	1.148,80	13	1.696,79	-	-	568,98
		Jumlah	145	317	11.035,84	81	4.241,85	125	3.513,37	111	3.280,62	-	-	5.919,82
412	Kota Palu	2009	44	116	1.645,01	86	945,56	29	699,45	1	-	-	-	967,97
		2010	24	90	686,91	70	552,72	19	134,19	1	-	-	-	569,72
		2011	26	34	2.856,97	17	1.397,09	13	866,71	4	593,17	-	-	1.782,09
		2012	16	38	502,33	20	340,76	17	161,57	1	-	-	-	1.474,79
		2013	25	45	37,68	15	21,19	11	16,49	19	-	-	-	1.343,06
		Jumlah	135	323	5.728,90	208	3.257,32	89	1.878,41	26	593,17	-	-	6.137,63
413	Prov. Sulawesi Selatan	2009	30	93	10.736,95	76	9.429,39	16	1.307,56	1	-	-	-	9.429,39
		2010	70	161	18.085,99	104	5.756,54	41	12.329,45	16	-	-	-	5.756,54
		2011	63	149	34.871,16	85	4.834,99	49	21.647,82	10	6.978,15	5	1.410,20	4.834,99
		2012	52	65	5.633,01	30	3.852,09	26	1.780,92	9	-	-	-	3.852,09
		2013	62	147	5.226,90	21	3.412,09	39	801,66	87	1.013,15	-	-	3.412,09
		Jumlah	277	615	74.554,01	316	27.285,10	171	37.867,41	123	7.991,30	5	1.410,20	27.285,10
414	Kab. Bantaeng	2009	18	49	1.428,78	23	518,99	9	306,11	17	603,68	-	-	518,99
		2010	22	55	533,45	33	201,09	8	259,86	14	72,50	-	-	201,09
		2011	37	82	902,91	40	506,48	8	286,93	34	109,50	-	-	506,48
		2012	25	74	1.497,35	20	498,96	51	998,39	3	-	-	-	498,96
		2013	16	43	1.336,84	29	288,76	12	1.048,08	2	-	-	-	288,76
		Jumlah	118	303	5.699,33	145	2.014,28	88	2.899,37	70	785,68	-	-	2.014,28

Halaman 70- Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
415	Kab. Barru	2009	18	35	3.577,01	20	2.010,26	14	1.566,75	1	-	-	-	2.010,26
		2010	17	31	3.420,82	17	2.543,13	11	877,69	3	-	-	-	2.543,13
		2011	18	35	723,52	28	229,01	7	494,51	-	-	-	-	229,01
		2012	28	61	1.568,63	32	866,54	23	105,97	6	596,12	-	-	866,54
		2013	14	34	378,09	18	146,81	14	231,28	2	-	-	-	146,81
		Jumlah	95	196	9.668,07	115	5.795,75	69	3.276,20	12	596,12	-	-	5.795,75
416	Kab. Bone	2009	17	37	553,70	25	260,22	12	293,48	-	-	-	-	260,22
		2010	30	100	313,90	27	271,29	60	19,51	13	23,10	-	-	271,29
		2011	16	33	511,41	28	470,71	5	40,70	-	-	-	-	470,71
		2012	24	61	2.065,68	40	1.491,24	21	574,44	-	-	-	-	1.491,24
		2013	34	87	530,31	35	465,45	25	64,86	27	-	-	-	465,45
		Jumlah	121	318	3.975,00	155	2.958,91	123	992,99	40	23,10	-	-	2.958,91
417	Kab. Bulukumba	2009	21	43	5.469,52	26	994,60	17	4.474,92	-	-	-	-	994,60
		2010	14	26	84,50	21	42,82	4	41,68	-	-	1	-	42,82
		2011	15	35	347,00	34	195,47	1	151,53	-	-	-	-	195,47
		2012	14	33	1.197,43	25	207,08	8	990,35	-	-	-	-	207,08
		2013	12	34	487,30	24	237,59	9	6,15	1	243,56	-	-	237,59
		Jumlah	76	171	7.585,75	130	1.677,56	39	5.664,63	1	243,56	1	-	1.677,56
418	Kab. Enrekang	2009	15	29	695,08	16	384,44	12	310,64	1	-	-	-	384,44
		2010	19	38	636,51	28	595,99	10	40,52	-	-	-	-	595,99
		2011	27	64	1.068,89	47	93,03	17	13,86	-	-	-	-	93,03
		2012	15	46	2.330,67	34	2.170,34	12	160,33	-	-	-	-	2.170,34
		2013	24	74	2.428,45	48	1.480,00	26	948,45	-	-	-	-	1.480,00
		Jumlah	100	251	6.197,60	173	4.723,80	77	1.473,80	1	-	-	-	4.723,80
419	Kab. Gowa	2009	21	59	1.066,53	46	367,11	12	699,42	1	-	-	-	367,11
		2010	27	50	1.225,28	33	1.103,91	11	-	6	121,37	-	-	1.103,91
		2011	29	54	237,22	44	237,22	7	-	3	-	-	-	237,22
		2012	9	15	759,45	11	588,54	4	170,91	-	-	-	-	588,54
		2013	12	28	333,86	22	333,86	6	-	-	-	-	-	333,86
		Jumlah	98	206	3.622,34	156	2.630,64	40	870,33	10	121,37	-	-	2.630,64
420	Kab. Jeneponto	2009	27	79	13.946,36	53	1.421,89	24	6.809,17	2	5.000,00	-	-	1.421,89
		2010	21	58	6.417,50	27	1.565,01	21	4.331,54	10	520,95	-	-	1.565,01
		2011	26	80	3.005,93	49	602,81	21	2.385,88	10	17,24	-	-	602,81
		2012	19	54	951,83	15	354,54	29	577,29	10	-	-	-	354,54
		2013	31	85	1.069,15	23	400,41	41	668,74	21	-	-	-	400,41
		Jumlah	124	356	25.370,77	167	4.344,66	136	14.772,62	53	5.538,19	-	-	4.344,66

Halaman 71 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
421	Kab. Luwu	2009	19	46	3.754,67	24	1.795,63	15	1.951,74	7	7,30	-	-	1.795,63
		2010	26	80	524,32	27	151,53	41	362,10	12	10,69	-	-	151,53
		2011	16	37	592,56	23	396,03	9	139,17	5	57,36	-	-	396,03
		2012	25	62	7.393,56	17	4.290,23	42	3.103,33	3	-	-	-	4.290,23
		2013	24	66	3.809,89	11	246,08	53	3.554,77	2	9,04	-	-	246,08
		Jumlah	110	291	16.075,00	102	6.879,50	160	9.111,11	29	84,39	-	-	6.879,50
422	Kab. Luwu Timur	2009	17	48	4.405,66	44	1.232,19	4	3.173,47	-	-	-	-	1.232,19
		2010	11	36	1.093,82	35	1.093,20	1	0,62	-	-	-	-	1.093,20
		2011	26	65	101,09	62	101,09	1	-	1	-	1	-	101,09
		2012	10	20	14.994,42	19	13.174,00	1	1.820,42	-	-	-	-	13.174,00
		2013	11	28	1.552,92	20	1.428,45	8	1.428,45	-	-	-	-	1.428,45
		Jumlah	75	197	22.147,91	180	15.724,95	15	6.422,96	1	-	1	-	15.724,95
423	Kab. Luwu Utara	2009	16	32	2.415,62	17	430,41	11	115,27	3	35,55	1	1.834,39	430,41
		2010	22	68	870,99	40	579,94	23	291,05	5	-	-	-	579,94
		2011	30	73	289,38	30	30,63	41	258,75	2	-	-	-	30,63
		2012	29	64	1.215,36	40	982,05	18	233,31	6	-	-	-	982,05
		2013	15	50	1.684,90	32	1.225,76	17	459,14	1	-	-	-	1.225,76
		Jumlah	112	287	6.476,25	159	3.248,79	110	1.357,52	17	35,55	1	1.834,39	3.248,79
424	Kab. Maros	2009	43	99	5.354,75	58	907,04	41	4.447,71	-	-	-	-	907,04
		2010	53	136	7.102,62	64	272,88	66	6.616,52	6	213,22	-	-	272,88
		2011	63	183	44.051,96	95	1.803,44	79	40.591,30	8	-	1	1.657,22	1.803,44
		2012	35	79	3.096,28	28	1.404,45	47	1.691,83	4	-	-	-	1.404,45
		2013	33	63	3.887,40	28	963,45	6	2.923,95	29	-	-	-	963,45
		Jumlah	227	560	63.493,01	273	5.351,26	239	56.271,31	47	213,22	1	1.657,22	5.351,26
425	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2009	16	28	827,09	18	376,57	7	450,52	3	-	-	-	376,57
		2010	22	47	3.281,64	35	2.384,48	12	897,16	-	-	-	-	2.384,48
		2011	29	68	31.299,79	57	31.135,99	7	149,75	4	14,05	-	-	31.135,99
		2012	10	34	637,42	33	350,68	8	286,74	4	-	-	-	350,68
		2013	19	52	2.511,82	22	1.667,63	19	844,19	-	-	-	-	1.667,63
		Jumlah	96	229	38.557,76	165	35.915,35	53	2.628,36	11	14,05	-	-	35.915,35
426	Kab. Pinrang	2009	19	46	1.356,77	42	1.128,88	3	227,89	1	-	-	-	1.128,88
		2010	17	40	1.035,86	26	735,62	11	300,24	3	-	-	-	735,62
		2011	30	90	891,44	39	82,54	45	195,55	6	613,35	-	-	82,54
		2012	12	33	1.751,82	27	1.670,07	6	81,75	-	-	-	-	1.670,07
		2013	20	44	592,28	30	520,34	14	71,94	-	-	-	-	520,34
		Jumlah	98	253	5.628,17	164	4.137,45	79	877,37	10	613,35	-	-	4.137,45

Halaman 72 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
427	Kab. Kepulauan Selayar	2009	28	83	4.420,18	52	1.550,55	31	2.869,63	-	-	-	-	1.550,55	
		2010	32	76	3.451,57	27	3.04,84	44	3.146,73	5	-	-	-	304,84	
		2011	32	83	5.295,73	56	2.155,78	24	3.139,95	3	-	-	-	2.155,78	
		2012	17	53	454,38	32	134,22	19	320,16	2	-	-	-	134,22	
		2013	33	99	5.356,82	36	1.370,42	14	3.891,98	49	94,42	-	-	1.370,42	
		Jumlah	142	394	18.978,68	203	5.515,81	132	13.368,45	59	94,42	-	-	5.515,81	
428	Kab. Sidenreng Rappang	2009	20	38	1.952,30	22	1.084,22	14	868,08	1	-	1	-	1.084,22	
		2010	28	56	1.974,23	31	1.954,38	10	19,85	12	-	3	-	1.954,38	
		2011	22	64	1.719,44	54	1.259,99	10	459,45	-	-	-	-	1.259,99	
		2012	11	41	1.195,09	22	1.184,63	19	10,46	-	-	-	-	1.184,63	
		2013	32	88	1.375,95	20	1.255,89	31	120,06	37	-	-	-	1.255,89	
		Jumlah	113	287	8.217,01	149	6.739,11	84	1.477,90	50	94,42	4	-	6.739,11	
429	Kab. Sinjai	2009	17	26	853,72	19	-	3	853,72	3	-	1	-	-	
		2010	25	64	1.101,45	57	738,23	3	363,22	3	-	1	-	738,23	
		2011	25	68	817,44	64	690,94	2	126,50	2	-	-	-	690,94	
		2012	21	53	888,12	48	309,64	2	291,27	2	87,48	1	199,73	309,64	
		2013	19	49	236,26	37	191,11	6	34,85	6	10,30	-	-	191,11	
		Jumlah	107	260	3.896,99	225	1.929,92	16	1.669,56	16	97,78	3	199,73	1.929,92	
430	Kab. Soppeng	2009	17	47	2.919,10	35	859,91	11	2.059,19	1	-	-	-	859,91	
		2010	15	45	1.106,11	28	718,51	16	387,60	1	-	-	-	718,51	
		2011	13	33	180,40	21	180,40	12	-	-	-	-	-	180,40	
		2012	13	32	4.568,44	14	1.170,70	18	3.397,74	-	-	-	-	1.170,70	
		2013	34	93	1.338,39	16	615,67	31	722,72	46	-	-	-	615,67	
		Jumlah	92	250	10.112,44	114	3.545,19	88	6.567,25	48	-	-	-	3.545,19	
431	Kab. Takalar	2009	15	39	7.918,08	10	6.310,47	5	1.255,71	24	351,90	-	-	6.310,47	
		2010	32	68	2.023,94	2	123,57	2	103,57	64	1.796,80	-	-	123,57	
		2011	20	63	13.192,40	26	289,47	33	12.902,93	4	-	-	-	289,47	
		2012	21	48	3.194,17	4	2.328,19	35	865,98	9	-	-	-	2.328,19	
		2013	21	57	789,04	8	270,85	12	372,36	37	145,83	-	-	270,85	
		Jumlah	109	275	27.117,63	50	9.322,55	87	15.500,55	138	2.294,53	-	-	9.322,55	
432	Kab. Tana Toraja	2009	18	45	854,95	28	329,92	11	525,03	6	-	-	-	329,92	
		2010	27	74	592,22	19	15,00	32	577,22	23	-	-	-	15,00	
		2011	22	78	1.271,65	2	331,09	9	583,92	67	356,64	-	-	331,09	
		2012	20	57	1.045,26	21	856,24	30	189,02	6	-	-	-	856,24	
		2013	17	43	5.617,50	1	145,14	41	5.472,36	1	-	-	-	145,14	
		Jumlah	104	297	9.381,58	71	1.677,39	123	7.347,55	103	356,64	-	-	1.677,39	

Halaman 73 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
433	Kabupaten Toraja Utara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	17	31	1.187,62	24	687,94	7	499,68	-	-	-	-	-	687,94	-
		2011	17	37	1.237,01	26	749,86	11	487,15	-	-	-	-	-	749,86	-
		2012	16	34	566,18	23	375,53	11	190,65	-	-	-	-	-	375,53	-
		2013	31	85	611,10	36	495,99	24	115,11	25	-	-	-	-	495,99	-
		Jumlah	81	187	3.601,91	109	2.309,32	53	1.292,59	25	-	-	-	-	2.309,32	-
434	Kab. Wajo	2009	12	18	559,63	12	291,92	6	267,71	-	-	-	-	-	291,92	-
		2010	44	128	4.072,10	115	3.292,32	13	779,78	-	-	-	-	-	3.292,32	-
		2011	12	39	422,21	2	80,70	2	107,14	-	-	1	234,37	-	80,70	-
		2012	25	65	28.994,47	53	3.787,79	12	25.206,68	-	-	-	-	-	3.787,79	-
		2013	29	68	536,63	29	501,07	17	35,56	22	-	-	-	-	501,07	-
		Jumlah	122	318	34.585,04	245	7.953,80	50	26.396,87	22	-	1	234,37	-	7.953,80	-
435	Kota Makassar	2009	39	81	1.624,58	19	-	49	1.624,58	13	-	-	-	-	-	-
		2010	63	162	28.722,93	70	4.773,70	66	23.873,41	25	75,82	1	-	-	4.773,70	-
		2011	33	77	45.006,97	22	2.295,10	51	40.076,10	4	2.635,77	-	-	-	2.295,10	-
		2012	20	54	929,47	35	782,52	19	146,95	-	-	-	-	-	782,52	-
		2013	45	138	1.049,77	10	487,86	39	561,91	89	-	-	-	-	487,86	-
		Jumlah	200	512	77.333,72	156	8.339,18	224	66.282,95	131	2.711,59	1	-	-	8.339,18	-
436	Kota Palopo	2009	15	46	4.514,68	21	620,96	22	3.821,78	3	71,94	-	-	-	620,96	-
		2010	19	62	989,16	41	80,66	19	908,50	2	-	-	-	-	80,66	-
		2011	30	105	12.965,63	63	2.804,98	41	10.096,26	1	64,39	-	-	-	2.804,98	-
		2012	40	91	6.766,35	56	1.136,91	33	5.629,44	2	-	-	-	-	1.136,91	-
		2013	22	56	310,99	13	270,99	20	40,00	23	-	-	-	-	270,99	-
		Jumlah	126	360	25.546,81	194	4.914,50	135	20.495,98	31	136,33	-	-	-	4.914,50	-
437	Kota Parepare	2009	18	24	920,30	21	852,11	3	68,19	-	-	-	-	-	652,11	-
		2010	32	72	2.269,20	63	1.722,72	9	546,48	-	-	-	-	-	1.722,72	-
		2011	26	60	1.223,90	14	1.047,42	14	176,48	6	-	-	-	-	1.047,42	-
		2012	28	58	516,86	37	396,74	21	120,12	-	-	-	-	-	396,74	-
		2013	31	115	434,64	57	61,87	38	372,77	20	-	-	-	-	61,87	-
		Jumlah	135	329	5.364,90	218	4.080,86	85	1.284,04	26	-	-	-	-	3.880,86	-
438	Prov. Sulawesi Tenggara	2009	91	245	32.945,18	114	10.894,46	79	15.935,29	52	6.115,43	-	-	-	8.098,58	-
		2010	69	200	29.370,17	100	14.421,90	85	14.948,27	15	-	-	-	-	6.843,38	-
		2011	49	127	4.762,42	53	2.382,02	43	2.382,02	31	-	-	-	-	3.035,64	-
		2012	34	101	6.540,33	62	961,38	22	516,47	17	5.062,48	-	-	-	1.180,30	-
		2013	46	114	1.545,85	13	777,41	98	768,44	3	-	-	-	-	2.083,57	-
		Jumlah	289	787	75.163,95	342	29.437,17	327	34.548,87	118	11.177,91	-	-	-	21.241,47	-

Halaman 74 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	Kab. Bombana	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
439		2009	58	183	79.353,27	48	41.252,03	29	16.343,06	106	21.758,18	-	-	4.090,39	
		2010	25	80	71.394,62	22	45.587,79	25	19.996,45	33	5.810,38	-	-	45.301,35	
		2011	48	145	20.764,32	21	982,71	33	14.754,18	91	5.027,43	-	-	982,71	
		2012	23	27	15.059,03	9	215,56	14	14.843,47	4	-	-	-	215,56	
		2013	39	73	2.144,31	25	158,81	16	1.205,84	32	779,66	-	-	360,38	
		Jumlah	193	508	188.715,55	125	88.196,90	117	67.143,00	266	33.375,65	-	-	50.950,39	
440	Kab. Buton	2009	17	47	190,50	38	99,22	9	91,28	-	-	-	-	99,22	
		2010	22	50	1.675,43	28	528,34	18	1.147,09	4	-	-	-	528,34	
		2011	44	44	3.166,42	9	150,67	22	3.015,75	13	-	-	-	150,67	
		2012	41	79	5.299,02	15	61,10	23	2.162,97	41	3.074,95	-	-	61,10	
		2013	15	34	1.431,99	15	0,30	19	1.431,69	-	-	-	-	0,30	
		Jumlah	115	254	11.763,36	105	839,63	91	7.848,78	58	3.074,95	-	-	839,63	
441	Kab. Buton Utara	2009	26	72	5.801,53	40	2.824,84	17	892,79	15	2.083,90	-	-	3.540,31	
		2010	29	92	23.743,17	72	21.899,46	14	974,69	6	869,02	-	-	22.478,40	
		2011	32	70	4.856,41	2	1.599,49	26	1.348,72	42	1.348,72	-	-	1.599,49	
		2012	34	72	7.266,25	22	6.471,29	25	657,90	25	137,06	-	-	6.491,28	
		2013	16	24	1.015,18	1	71,87	9	-	14	943,31	-	-	71,87	
		Jumlah	137	330	42.682,54	137	32.866,95	91	4.433,58	102	5.382,01	-	-	34.181,35	
442	Kab. Kolaka	2009	39	76	1.736,61	52	298,58	16	954,15	8	483,88	-	-	247,22	
		2010	29	73	5.211,28	38	2.046,64	32	3.164,64	3	-	-	-	1.730,04	
		2011	31	95	19.426,05	63	1.253,08	25	15.416,44	7	2.756,53	-	-	1.253,08	
		2012	44	137	979,85	53	111,96	41	443,10	43	424,79	-	-	111,96	
		2013	27	59	17.733,50	11	140,26	22	17.381,83	26	211,41	-	-	140,26	
		Jumlah	170	440	45.087,29	217	3.850,52	136	37.360,16	87	3.876,61	-	-	3.482,56	
					USD 776,04						USD 776,04				
443	Kab. Kolaka Utara	2009	49	152	19.091,46	84	1.938,79	26	4.330,30	42	12.822,37	-	-	1.938,93	
		2010	21	54	1.669,49	31	64,50	21	1.498,70	2	106,29	-	-	64,51	
		2011	32	97	8.244,79	66	4.582,55	29	3.570,70	2	91,54	-	-	4.582,60	
		2012	24	58	3.495,46	42	1.775,00	16	1.720,46	-	-	-	-	1.824,15	
		2013	20	50	1.406,69	19	338,65	16	955,10	15	112,94	-	-	434,80	
		Jumlah	146	411	33.907,89	242	8.699,49	108	12.075,26	61	13.133,14	-	-	8.844,99	
444	Kab. Konawe	2009	54	126	52.696,88	18	2.187,90	18	2.836,75	90	47.672,23	-	-	311,12	
		2010	34	95	52.469,84	52	35.699,54	32	15.052,44	11	1.717,86	-	-	11.578,40	
		2011	33	98	24.644,65	42	9.117,27	31	14.125,39	25	1.401,99	-	-	9.117,27	
		2012	32	86	4.820,76	51	593,58	35	4.227,18	-	-	-	-	593,58	
		2013	41	93	1.327,13	23	-	5	1.105,93	65	221,20	-	-	19,58	
		Jumlah	194	498	135.959,26	186	47.598,29	121	37.347,69	191	51.013,28	-	-	21.619,95	

Halaman 75 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai
			Jumlah	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
445	Kab. Konawe Selatan	2009	52	150	9.594,56	67	1.961,01	31	7.605,97	52	27,58	-	-	1.961,01
		2010	34	97	7.755,68	34	5.651,96	19	1.864,88	44	238,84	-	-	5.792,88
		2011	35	78	1.260,02	39	266,65	24	950,23	15	43,14	-	-	461,85
		2012	16	37	1.605,93	19	1.166,02	14	439,91	4	-	-	-	1.166,03
		2013	22	38	7.086,25	14	202,12	10	6.604,93	14	279,20	-	-	268,14
		Jumlah	159	400	27.302,44	173	9.247,76	98	17.465,92	129	588,76	-	-	9.649,91
446	Kab. Konawe Utara	2009	27	93	8.732,35	53	2.930,46	40	5.801,89	-	-	-	-	1.240,95
		2010	36	123	24.175,67	58	7.233,54	46	16.942,13	19	-	-	-	4.828,32
		2011	36	143	16.205,07	70	7.680,01	73	8.525,06	-	-	-	-	3.815,23
		2012	32	90	13.936,89	29	313,70	43	10.610,85	18	3.012,34	-	-	314,20
		2013	22	49	11.630,13	-	1.725,52	1	-	48	9.904,61	-	-	1.725,52
		Jumlah	153	498	74.680,11	210	19.883,23	203	41.879,93	85	12.916,95	-	-	11.924,22
					USD 88,65	-	-	-	-	-	USD 88,65	-	-	-
					USD 88,65	-	-	-	-	-	USD 88,65	-	-	-
447	Kab. Muna	2009	22	63	4.800,67	27	1.100,35	33	3.700,32	3	-	-	-	1.100,35
		2010	45	131	55.739,50	46	2.605,07	23	15.573,62	62	37.560,81	-	-	2.605,07
		2011	29	91	2.281,52	1	690,40	3	353,85	87	1.237,27	-	-	411,42
		2012	56	144	1.719,95	30	80,32	80	1.524,14	34	115,49	-	-	81,02
		2013	17	28	733,45	15	154,95	11	578,50	2	-	-	-	576,12
		Jumlah	169	457	65.275,09	119	4.631,09	150	21.730,43	188	38.913,57	-	-	4.773,98
448	Kab. Wakatobi	2009	15	38	8.213,03	30	7.855,77	8	357,26	-	-	-	-	9.873,67
		2010	45	104	3.001,39	48	953,54	9	258,14	47	1.789,71	-	-	953,63
		2011	34	99	21.489,47	60	542,69	37	20.946,78	2	-	-	-	648,48
		2012	22	44	1.315,86	17	86,43	27	1.229,43	-	-	-	-	397,41
		2013	36	96	2.686,14	20	279,58	44	1.977,15	32	429,41	-	-	351,55
		Jumlah	152	381	36.705,89	175	9.718,01	125	24.768,76	81	2.219,12	-	-	12.226,74
449	Kota Bau-Bau	2009	23	50	12.848,88	37	11.704,97	10	143,91	3	1.000,00	-	-	8.381,84
		2010	21	50	7.849,92	28	2.078,33	18	5.771,59	4	-	-	-	2.053,83
		2011	42	103	2.246,50	43	300,55	52	1.945,95	8	-	-	-	296,85
		2012	40	94	8.639,75	19	5.569,41	56	3.017,53	19	52,81	-	-	586,21
		2013	31	90	9.078,32	32	7,48	23	8.776,93	35	293,91	-	-	555,58
		Jumlah	157	387	40.663,37	159	19.660,74	159	19.655,91	69	1.346,72	-	-	11.874,31
450	Kota Kendari	2009	40	59	379,66	58	307,55	1	72,11	-	-	-	-	338,35
		2010	39	91	5.215,27	52	1.085,71	38	4.058,78	1	70,78	-	-	1.085,71
		2011	50	167	2.777,33	56	1.052,09	57	1.725,24	54	-	-	-	857,59
		2012	8	11	48,13	3	-	8	-	-	-	-	-	752,53
		2013	34	86	5.390,12	54	1.545,69	27	3.061,70	5	782,73	-	-	1.545,69
		Jumlah	171	414	13.810,51	223	3.991,04	131	8.917,83	60	901,64	-	-	4.579,87

Halaman 76 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
451	Prov. Gorontalo	2009	22	58	6.246,71	31	2.345,01	5	3.901,70	22	-	-	-	2.222,82
		2010	12	34	3.496,82	9	2.085,20	5	981,66	20	429,96	-	-	2.073,15
		2011	38	95	8.023,78	6	648,51	5	2.110,76	84	5.264,51	-	-	545,16
		2012	39	100	6.471,66	35	166,06	46	353,72	19	5.951,88	-	-	166,06
		2013	30	105	3.495,41	39	254,56	36	622,87	30	2.617,98	-	-	254,56
		Jumlah	141	392	27.734,38	120	5.499,34	97	7.970,71	175	14.264,33	-	-	5.261,75
452	Kab. Boalemo	2009	33	85	163,59	4	129,59	45	34,00	36	-	-	-	129,59
		2010	37	108	1.557,96	19	268,96	70	310,78	19	978,22	-	-	268,96
		2011	10	26	246,06	13	75,03	10	30,00	3	141,03	-	-	75,03
		2012	28	61	2.829,91	33	86,59	5	2.182,27	23	561,05	-	-	86,59
		2013	22	57	610,31	27	17,22	6	108,05	24	485,04	-	-	11,78
		Jumlah	130	337	5.407,83	96	577,39	136	2.665,10	105	2.165,34	-	-	571,95
453	Kab. Bone Bolango	2009	70	190	8.865,32	153	4.011,51	22	4.200,58	15	653,23	-	-	4.011,51
		2010	29	76	2.416,61	52	432,60	12	1.148,36	12	835,65	-	-	432,60
		2011	11	25	1.496,14	17	213,24	5	1.049,91	3	232,99	-	-	213,24
		2012	47	146	2.482,79	34	227,12	53	1.086,55	59	1.169,12	-	-	208,17
		2013	21	71	2.882,68	4	89,50	20	657,09	47	2.136,09	-	-	89,50
		Jumlah	178	508	18.143,54	260	4.973,97	112	8.142,49	136	5.027,08	-	-	4.955,02
454	Kab. Gorontalo	2009	73	179	4.299,51	37	1.213,66	60	2.966,55	82	119,30	-	-	1.213,65
		2010	23	67	1.445,07	24	807,83	2	523,28	41	113,96	-	-	824,02
		2011	71	184	2.921,63	78	876,65	40	1.940,95	66	104,03	-	-	758,74
		2012	31	69	11.019,05	37	549,50	1	250,95	31	10.218,60	-	-	549,50
		2013	14	37	623,61	30	59,39	3	85,60	4	478,62	-	-	59,39
		Jumlah	212	536	20.308,87	206	3.507,03	106	5.767,33	224	11.034,51	-	-	3.405,30
455	Kab. Gorontalo Utara	2009	22	73	3.032,58	46	817,21	23	1.657,63	4	557,74	-	-	787,31
		2010	26	54	2.290,85	9	1.179,59	36	1.092,95	9	18,31	-	-	1.179,59
		2011	13	29	127,35	18	38,01	8	14,34	3	75,00	-	-	38,01
		2012	39	114	5.714,76	40	421,62	43	3.132,82	31	2.160,32	-	-	421,62
		2013	20	44	1.059,65	15	407,93	15	569,57	14	82,15	-	-	407,93
		Jumlah	120	314	12.225,19	128	2.864,36	125	6.467,31	61	2.893,52	-	-	2.834,46
456	Kab. Pohuwato	2009	34	93	8.413,99	67	6.953,30	8	848,26	18	612,43	-	-	6.953,30
		2010	18	49	629,01	37	219,86	10	409,15	2	-	-	-	219,86
		2011	17	50	5.883,92	38	598,51	7	5.285,41	5	-	-	-	598,51
		2012	17	39	2.178,95	32	2.048,28	5	130,67	2	-	-	-	18,11
		2013	20	42	1.584,22	20	95,13	14	698,02	8	791,07	-	-	60,44
		Jumlah	106	273	18.690,09	194	9.915,08	44	7.371,51	35	1.403,50	-	-	7.850,22

Halaman 77 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jumlah	Nilai			
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
457	Kota Gorontalo	2009	64	130	2.392,60	57	273,09	39	1.253,81	34	865,70	-	-	273,09
		2010	58	136	2.919,54	58	86,27	59	792,83	19	2.040,44	-	-	86,27
		2011	30	103	3.806,34	63	384,73	21	3.335,25	19	86,36	-	-	384,73
		2012	35	80	3.168,04	28	369,45	24	452,01	28	2.346,58	-	-	369,45
		2013	21	52	1.423,44	18	137,10	32	1.286,34	2	-	-	-	137,10
		Jumlah	208	501	13.709,96	224	1.250,64	175	7.120,24	102	5.339,08	-	-	1.250,64
458	Prov. Sulawesi Barat	2009	39	92	10.112,81	15	2.113,19	75	7.999,62	2	-	-	-	2.113,32
		2010	45	97	15.536,69	19	6.322,86	74	9.213,83	4	-	-	-	6.162,37
		2011	34	74	7.839,38	4	804,02	54	7.035,36	16	-	-	-	6.372,33
		2012	37	85	18.525,13	15	3.968,63	54	6.143,00	16	8.413,50	-	-	6.749,60
		2013	43	82	2.750,99	20	837,02	15	1.047,69	47	866,28	-	-	2.201,02
		Jumlah	198	430	54.765,00	73	14.045,72	272	31.439,50	85	9.279,78	-	-	23.608,64
459	Kab. Majene	2009	31	67	1.475,72	35	466,70	28	1.009,02	4	-	-	-	466,70
		2010	30	65	2.851,13	20	155,28	44	2.695,85	1	-	-	-	148,81
		2011	46	106	1.655,19	39	610,93	56	1.044,26	20	-	-	-	1.948,74
		2012	41	90	1.975,11	50	415,64	36	1.526,58	4	32,89	-	-	790,48
		2013	30	74	2.761,04	41	976,81	11	1.590,06	22	194,17	-	-	129,42
		Jumlah	178	402	10.718,19	176	2.625,36	175	7.865,77	51	227,06	-	-	3.484,15
460	Kab. Mamasa	2009	20	50	2.995,50	36	1.148,11	14	1.847,39	-	-	-	-	1.148,11
		2010	36	75	3.323,15	39	707,35	36	2.615,80	-	-	-	-	707,35
		2011	39	87	8.535,52	39	2.238,24	48	6.297,28	-	-	-	-	2.282,05
		2012	35	85	6.905,01	51	587,66	34	6.317,35	-	-	-	-	587,66
		2013	40	114	2.224,79	-	-	-	-	114	2.224,79	-	-	371,44
		Jumlah	170	411	23.983,97	165	4.681,36	132	17.077,82	114	2.224,79	-	-	5.096,61
461	Kab. Mamuju	2009	40	80	2.439,89	26	814,88	47	1.625,01	7	-	-	-	822,29
		2010	37	93	10.484,83	14	6.861,45	63	3.611,83	16	11,55	-	-	6.864,45
		2011	36	77	4.483,55	29	732,32	37	3.751,23	11	-	-	-	732,32
		2012	48	87	2.057,24	34	1.524,54	51	532,70	2	-	-	-	2.202,15
		2013	33	66	1.040,54	12	84,06	8	956,48	46	-	-	-	238,21
		Jumlah	194	403	20.506,05	115	10.017,25	206	10.477,25	82	11,55	-	-	10.859,42
462	Kab. Mamuju Utara	2009	39	90	6.024,12	34	1.272,09	53	4.628,48	3	123,55	-	-	1.329,28
		2010	31	72	5.309,57	8	507,87	22	4.532,85	42	268,85	-	-	600,37
		2011	35	75	6.121,39	9	394,14	36	5.727,25	30	-	-	-	2.264,10
		2012	23	45	2.271,67	5	939,82	27	1.071,29	13	260,56	-	-	1.585,93
		2013	31	92	1.584,10	5	53,58	3	252,58	84	1.277,94	-	-	632,17
		Jumlah	159	374	21.310,85	61	3.167,50	141	16.212,45	172	1.930,90	-	-	6.411,85

Halaman 78 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/peyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/peyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
463	Kab. Polewali Mandar	2009	40	86	7.970,77	28	1.191,60	53	6.779,17	5	-	-	-	1.191,60
		2010	46	98	13.569,79	17	1.567,48	55	11.739,22	26	263,09	-	-	1.567,48
		2011	23	51	1.523,89	37	370,97	14	1.152,92	-	-	-	-	864,67
		2012	29	64	5.359,76	51	702,83	13	4.656,93	-	-	-	-	882,57
		2013	32	63	1.574,16	32	185,44	13	1.363,04	18	25,68	-	-	181,13
		Jumlah	170	362	29.998,37	165	4.018,32	148	25.691,28	49	288,77	-	-	4.687,45
464	Prov. Maluku	2009	27	67	4.725,14	11	1.950,30	53	2.774,84	3	-	-	-	1.950,30
		2010	19	57	9.029,56	16	-	40	9.029,56	1	-	-	-	-
		2011	29	117	3.678,06	8	-	39	1.303,64	70	2.374,42	-	-	-
		2012	57	158	22.107,16	27	223,34	35	1.713,89	96	20.169,93	-	-	223,34
		2013	44	87	12.947,89	-	-	35	9.033,35	52	3.914,54	-	-	-
		Jumlah	176	486	52.487,81	62	2.173,64	202	23.855,28	222	26.458,89	-	-	2.173,64
465	Kab. Buru	2009	29	75	977,70	38	23,44	21	818,69	16	135,57	-	-	23,44
		2010	26	74	1.485,83	19	-	52	1.485,83	3	-	-	-	-
		2011	42	137	2.799,70	-	-	-	-	137	2.799,70	-	-	-
		2012	18	84	7.028,05	13	-	67	6.813,35	4	214,70	-	-	-
		2013	55	55	3.739,24	-	-	-	-	55	3.739,24	-	-	-
		Jumlah	170	425	16.030,52	70	23,44	140	9.117,87	215	6.889,21	-	-	23,44
466	Kab. Buru Selatan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	77	2.800,31	3	-	37	2.745,03	37	55,28	-	-	-
		2011	31	159	34.573,64	-	-	-	-	159	34.573,64	-	-	-
		2012	39	132	60.949,32	-	-	-	-	132	60.949,32	-	-	-
		2013	54	260	21.677,86	-	-	-	-	260	21.677,86	-	-	-
		Jumlah	150	628	120.001,13	3	-	37	2.745,03	588	117.256,10	-	-	-
467	Kab. Kepulauan Aru	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	53	131	49.605,42	75	6,00	42	49.035,52	14	563,90	-	-	6,00
		2011	27	75	18.814,22	-	-	-	-	75	18.814,22	-	-	-
		2012	55	187	127.960,50	15	-	24	2.705,85	148	125.254,65	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	135	393	196.380,14	90	6,00	66	51.741,37	237	144.632,77	-	-	6,00
468	Kab. Maluku Tengah	2009	40	95	5.931,51	66	61,48	24	5.870,03	5	-	-	-	61,48
		2010	42	105	1.724,94	40	396,25	34	636,06	31	692,63	-	-	396,25
		2011	25	117	1.814,13	56	101,15	51	1.712,98	10	-	-	-	101,15
		2012	19	55	9.489,19	31	760,43	19	8.728,76	5	-	-	-	760,43
		2013	45	72	845,89	39	185,29	32	660,60	1	-	-	-	185,29
		Jumlah	171	444	19.805,66	232	1.504,60	160	17.608,43	52	692,63	-	-	1.504,60

Halaman 79 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
469	Kab. Maluku Tenggara	2009	32	99	4.524,87	54	210,86	40	4.314,01	5	-	-	-	210,86
		2010	49	135	3.822,53	72	579,19	49	3.243,34	14	-	-	-	579,19
		2011	45	170	2.477,29	34	899,13	40	1.081,71	96	496,45	-	-	899,13
		2012	32	103	8.325,48	29	563,82	65	7.761,66	9	-	-	-	563,82
		2013	30	122	6.685,58	62	18,50	51	6.667,08	9	-	-	-	18,50
		Jumlah	188	629	25.835,75	251	2.271,50	245	23.067,80	133	496,45	-	-	2.271,50
470	Kab. Maluku Tenggara Barat	2009	23	63	4.127,42	22	2.226,27	36	1.526,15	5	375,00	-	-	2.226,27
		2010	17	37	1.298,42	20	281,11	17	1.017,31	-	-	-	-	281,11
		2011	39	116	818,21	39	82,69	43	-	34	735,52	-	-	82,69
		2012	23	87	6.004,93	38	657,82	33	4.152,61	16	1.194,50	-	-	657,82
		2013	24	62	10.081,72	14	212,37	43	9.869,18	5	0,17	-	-	212,37
		Jumlah	126	365	22.330,70	133	3.460,26	172	16.565,25	60	2.305,19	-	-	3.460,26
471	Kab. Maluku Barat Daya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	25	64	1.577,40	3	-	57	1.577,40	4	-	-	-	-
		2011	29	165	2.268,95	-	-	-	-	165	2.268,95	-	-	-
		2012	19	91	3.923,71	-	-	-	-	91	3.923,71	-	-	-
		2013	18	52	39.079,88	-	-	-	-	52	39.079,88	-	-	-
		Jumlah	91	372	46.849,94	3	-	57	1.577,40	312	45.272,54	-	-	-
472	Kab. Seram Bagian Barat	2009	40	97	7.310,49	22	-	38	5.517,87	37	1.792,62	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	56	179	26.455,51	10	55,00	9	12.072,45	160	14.328,06	-	-	55,00
		2012	42	155	35.045,64	-	-	-	-	155	35.045,64	-	-	-
		2013	20	71	28.182,28	-	-	-	-	71	28.182,28	-	-	-
		Jumlah	158	502	96.953,92	32	55,00	47	17.590,32	423	79.348,60	-	-	55,00
473	Kab. Seram Bagian Timur	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	78	16.279,04	17	1.176,66	52	8.395,08	9	6.705,30	-	-	1.176,66
		2011	37	145	9.715,69	24	-	113	9.715,69	8	-	-	-	-
		2012	25	132	18.482,26	-	-	124	18.482,26	8	-	-	-	-
		2013	48	146	38.821,70	-	-	140	38.818,69	6	3,01	-	-	-
		Jumlah	138	501	83.298,69	41	1.178,66	429	75.411,72	31	6.708,31	-	-	1.178,66
474	Kota Ambon	2009	19	45	1.256,54	8	898,53	5	11,80	32	346,21	-	-	898,53
		2010	42	89	446,68	10	-	4	78,99	75	367,69	-	-	-
		2011	53	184	3.969,94	32	-	14	157,74	138	3.812,20	-	-	-
		2012	53	173	7.283,64	49	-	70	3.029,66	54	4.253,98	-	-	-
		2013	39	120	26.420,08	-	-	2	88,52	118	26.331,56	-	-	-
		Jumlah	206	611	39.376,88	99	898,53	95	3.366,71	417	35.111,64	-	-	898,53

Halaman 80 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Lanjut		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyortiran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	475	Kota Tual	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	26	1.838,81	6	60	6	212,93	16	1.324,03	38	301,85	-	-	-	212,93
		2011	26	7.042,09	-	95	-	642,47	1	6.399,62	94	6.399,62	-	-	-	-
		2012	42	16.717,08	18	184	18	806,38	18	11.921,74	148	3.988,96	-	-	-	806,38
		2013	19	9.825,60	93	93	-	2.433,25	2	952,28	91	6.440,07	-	-	-	2.433,25
		Jumlah	113	35.423,58	24	432	24	3.452,56	37	14.840,52	371	17.130,50	-	-	-	3.452,56
	476	Prov. Maluku Utara	73	1.967,80	22	113	22	219,08	40	1.085,42	51	663,30	-	-	-	219,08
		2010	69	6.505,28	16	154	16	1.303,02	37	1.716,00	101	3.486,26	-	-	-	1.303,02
		2011	101	23.675,87	72	288	72	2.362,19	91	8.664,53	125	12.649,15	-	-	-	2.362,19
		2012	59	12.125,11	74	177	74	5.825,83	59	2.526,27	44	3.773,01	-	-	-	5.825,83
		2013	80	33.002,38	41	264	41	4.749,15	79	9.459,00	144	18.794,23	-	-	-	1.504,66
		Jumlah	382	77.276,44	225	996	225	14.459,27	306	23.451,22	465	39.365,95	-	-	-	11.249,28
	477	Kab. Halmahera Barat	49	15.309,06	44	80	44	6.986,01	35	8.185,70	1	137,35	-	-	-	6.986,01
		2010	52	12.257,44	52	122	52	357,99	70	11.899,45	-	-	-	-	-	357,99
		2011	37	1.417,26	40	98	40	334,77	48	775,93	10	306,56	-	-	-	511,11
		2012	52	7.315,78	53	116	53	2.453,53	63	4.862,25	-	-	-	-	-	2.453,53
		2013	20	16.732,70	16	57	16	1.773,58	40	14.959,12	1	-	-	-	-	1.752,68
		Jumlah	210	53.032,24	205	473	205	11.905,88	256	40.682,45	12	443,91	-	-	-	12.061,32
	478	Kab. Halmahera Selatan	43	8.965,67	53	103	53	63,20	25	8.338,32	25	564,15	-	-	-	63,20
		2010	45	19.310,26	34	80	34	187,22	29	18.986,89	16	136,15	-	-	-	187,22
		2011	66	18.760,10	17	150	17	1.092,20	13	7.872,19	120	9.795,71	-	-	-	1.092,20
		2012	47	16.653,84	-	145	-	283,16	1	41,63	144	16.329,05	-	-	-	283,16
		2013	61	7.254,45	-	91	-	-	-	-	91	7.254,45	-	-	-	-
		Jumlah	262	70.944,32	104	569	104	1.625,78	68	35.239,03	396	34.079,51	-	-	-	1.625,78
	479	Kab. Halmahera Tengah	50	13.585,61	44	122	44	186,29	21	3.096,93	57	10.302,39	-	-	-	186,29
		2010	30	9.893,14	27	82	27	4.639,39	43	5.226,75	12	27,00	-	-	-	4.639,39
		2011	43	6.748,57	37	92	37	998,92	55	5.749,65	-	-	-	-	-	2.118,92
		2012	60	30.673,03	24	178	24	3.456,57	17	21.172,81	137	6.043,65	-	-	-	3.456,57
		2013	11	2.526,15	10	37	10	1.595,55	23	990,60	4	-	-	-	-	3.122,65
		Jumlah	194	63.426,50	142	511	142	10.876,72	159	36.176,74	210	16.373,04	-	-	-	13.523,82
	480	Kab. Halmahera Timur	51	14.104,44	67	108	67	1.600,63	37	12.503,81	3	-	-	-	-	1.600,63
		2010	48	14.999,17	51	116	51	342,99	55	12.478,61	10	2.177,57	-	-	-	342,99
		2011	96	33.195,63	15	264	15	4.987,17	49	10.819,11	200	17.389,35	-	-	-	5.237,17
		2012	41	1.773,89	32	128	32	936,03	30	801,06	66	36,80	-	-	-	1.401,21
		2013	22	10.388,79	47	79	47	537,95	24	8.848,60	8	1.002,24	-	-	-	538,49
		Jumlah	258	74.461,92	212	695	212	8.404,77	195	45.451,19	287	20.605,96	-	-	-	9.120,49

Halaman 81 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
481	Kab. Halimahera Utara	2009	39	76	10.540,26	25	7.794,83	20	2.200,06	31	545,37	-	-	-	7.552,04	
		2010	38	78	7.197,85	14	1.921,33	16	3.780,11	48	1.496,41	-	-	-	799,49	
		2011	54	124	8.670,88	13	3.157,72	17	1.595,58	94	3.061,8	-	-	-	3.099,25	
		2012	62	161	8.274,15	16	3.094,87	24	1.954,11	121	3.225,17	-	-	-	1.199,16	
		2013	20	55	13.891,22	1	1.199,16	7	10.236,24	47	2.455,82	-	-	-	12.956,12	
		Jumlah	213	494	48.574,36	69	14.325,91	84	19.766,10	341	14.482,35	-	-	-	492,15	
482	Kab. Kepulauan Sula	2009	45	99	4.033,24	35	728,61	30	2.163,37	34	1.141,26	-	-	-	63,07	
		2010	21	75	461,43	41	48,07	25	413,36	9	-	-	-	-	3.450,56	
		2011	69	196	15.753,03	39	3.452,55	76	5.663,64	81	6.636,84	-	-	-	521,55	
		2012	45	181	9.886,49	87	531,55	88	9.077,06	6	277,88	-	-	-	-	
		2013	26	74	15.505,58	-	-	-	-	74	15.505,58	-	-	-	-	
		Jumlah	206	625	45.639,77	202	4.760,78	219	17.317,43	204	23.561,56	-	-	-	4.527,33	
483	Kab. Pulau Morotai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	14	31	968,56	-	-	-	-	31	968,56	-	-	-	-	
		2011	56	161	9.230,65	8	931,88	79	6.161,35	74	2.137,42	-	-	-	259,00	
		2012	42	160	8.521,64	-	484,22	50	5.542,18	110	2.495,24	-	-	-	484,22	
		2013	89	28	4.561,67	48	358,99	-	-	41	4.202,68	-	-	-	358,99	
		Jumlah	140	441	23.282,52	56	1.775,09	129	11.703,53	256	9.803,90	-	-	-	1.102,21	
484	Kota Ternate	2009	64	122	1.726,86	80	372,27	38	1.354,59	4	-	-	-	-	372,27	
		2010	41	64	814,25	31	157,94	33	656,31	-	-	-	-	-	157,94	
		2011	76	239	34.486,60	66	723,86	112	33.762,74	61	-	-	-	-	723,86	
		2012	72	183	24.021,49	52	1.245,47	93	18.107,14	38	4.668,88	-	-	-	1.245,47	
		2013	22	60	601,87	18	178,40	24	423,47	18	-	-	-	-	178,40	
		Jumlah	275	668	61.651,07	247	2.677,94	300	54.304,25	121	4.668,88	-	-	-	2.677,94	
485	Kota Tidore Kepulauan	2009	56	104	6.487,42	90	6.457,10	11	30,32	1	-	-	-	-	6.457,10	
		2010	50	115	531,83	90	135,02	21	396,81	4	-	-	-	-	135,02	
		2011	25	48	5.462,45	34	1.754,64	13	3.707,81	1	-	-	-	-	1.754,64	
		2012	46	142	3.744,40	127	3.260,08	15	484,32	-	-	-	-	-	3.249,36	
		2013	25	79	5.119,00	22	184,91	31	78,97	26	4.855,12	-	-	-	184,91	
		Jumlah	202	488	21.345,10	363	11.791,75	91	4.698,23	32	4.855,12	-	-	-	11.781,03	
486	Prov. Papua	2009	44	73	20.500,48	31	675,54	42	19.824,94	-	-	-	-	-	4.503,20	
		2010	55	105	114.966,60	48	14.771,02	54	100.195,58	3	-	-	-	-	14.771,02	
		2011	49	146	13.847,06	-	-	-	-	146	13.847,06	-	-	-	-	
		2012	52	136	74.676,28	9	7.114,95	71	19.943,39	56	47.617,94	-	-	-	7.114,95	
		2013	87	149	42.117,51	-	-	-	-	149	42.117,51	-	-	-	-	
		Jumlah	287	609	266.107,93	88	22.561,51	167	139.963,91	354	103.582,51	-	-	-	26.389,17	

Halaman 82 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
487	Kab. Asmat	2009	12	29	943,42	22	442,41	7	501,01	-	-	-	-	795,05	
		2010	20	39	1.246,25	22	361,12	15	885,13	2	-	-	-	666,33	
		2011	9	15	268,05	6	144,18	8	123,87	1	-	-	-	144,18	
		2012	15	32	2.095,53	-	4,32	2	234,15	30	1.857,06	-	-	8,64	
		2013	17	42	5.909,24	-	-	-	-	42	5.909,24	-	-	-	
		Jumlah	73	157	10.462,49	50	952,03	32	1.744,16	75	7.766,30	-	-	1.614,20	
488	Kab. Biak Numfor	2009	24	51	6.635,20	33	5.935,07	18	700,13	-	-	-	-	4.400,26	
		2010	17	43	4.956,06	25	1.498,70	17	3.325,24	1	132,12	-	-	291,65	
		2011	44	115	15.375,90	54	8.642,20	33	6.733,70	28	-	-	-	1.371,75	
		2012	34	77	3.231,46	1	42,18	-	-	76	3.189,28	-	-	-	
		2013	36	89	3.127,49	-	-	-	-	89	3.127,49	-	-	-	
		Jumlah	155	375	33.326,11	113	16.118,15	68	10.759,07	194	6.448,89	-	-	6.063,66	
489	Kab. Boven Digoel	2009	21	44	65.956,03	32	56.712,99	11	9.243,04	1	-	-	-	2.275,00	
		2010	23	45	87.505,12	13	22.481,98	31	65.023,14	1	-	-	-	420,89	
		2011	24	38	85.879,52	8	73.183,36	22	12.145,26	8	550,90	-	-	1.492,46	
		2012	30	80	4.796,23	-	-	-	-	80	4.796,23	-	-	-	
		2013	23	52	1.861,69	-	-	-	-	52	1.861,69	-	-	-	
		Jumlah	121	259	245.998,59	53	152.378,33	64	86.411,44	142	7.208,82	-	-	4.188,35	
490	Kab. Dogiyai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	17	36	12.128,10	14	4.567,73	17	7.560,37	5	-	-	-	4.567,73	
		2011	17	41	3.178,79	2	424,69	4	1.475,36	35	1.278,74	-	-	117,78	
		2012	18	55	6.568,37	1	-	-	-	54	6.568,37	-	-	92,11	
		2013	27	45	38.178,46	-	-	-	-	45	38.178,46	-	-	-	
		Jumlah	79	177	60.053,72	17	4.992,42	21	9.035,73	139	46.025,57	-	-	4.777,62	
491	Kab. Deyai	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	7	16	38.400,88	6	150,00	7	738,83	3	37.512,05	-	-	-	
		2012	16	36	27.171,73	17	-	19	27.171,73	-	-	-	-	-	
		2013	15	26	123.788,42	-	-	-	-	26	123.788,42	-	-	-	
		Jumlah	38	78	189.361,03	23	150,00	26	27.910,56	29	161.300,47	-	-	-	
492	Kab. Intan Jaya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	10	25	9.377,38	10	2.827,73	10	737,00	5	5.812,65	-	-	-	
		2012	15	34	5.019,02	-	-	-	-	34	5.019,02	-	-	-	
		2013	26	39	40.225,38	-	-	-	-	39	40.225,38	-	-	-	
		Jumlah	51	98	54.621,78	10	2.827,73	10	737,00	78	51.057,05	-	-	-	

Halaman 83 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
493	Kab. Jayapura	2009	20	23	6.746,22	16	4.352,86	7	2.393,36	-	-	-	-	-	-	-
		2010	20	37	3.607,74	9	1.322,30	9	4.792,22	19	1.806,22	-	-	-	-	-
		2011	57	94	10.652,32	-	-	-	-	94	10.652,32	-	-	-	-	-
		2012	42	90	11.129,15	-	-	-	-	90	11.129,15	-	-	-	-	-
		2013	52	79	7.649,36	-	-	-	-	79	7.649,36	-	-	-	-	-
		Jumlah	191	323	39.784,79	25	5.675,16	16	2.872,58	282	31.237,05	-	-	-	-	-
494	Kab. Jayawijaya	2009	29	50	34.814,92	29	2.447,89	21	32.367,03	-	-	-	-	-	-	2.447,89
		2010	54	102	5.550,98	67	4.905,51	34	5.060,47	1	-	-	-	-	-	490,51
		2011	26	56	3.378,95	26	2.191,98	3	275,95	27	911,02	-	-	-	-	2.191,98
		2012	29	75	10.006,07	2	1.174,67	39	3.395,71	34	5.435,69	-	-	-	-	-
		2013	33	71	3.603,34	-	1.736,78	-	-	71	1.866,56	-	-	-	-	-
		Jumlah	171	354	57.354,26	124	8.041,83	97	41.099,16	133	8.213,27	-	-	-	-	5.130,38
495	Kab. Keerom	2009	21	42	13.347,25	25	4.811,72	17	8.535,53	-	-	-	-	-	-	101.022,74
		2010	25	50	4.856,35	23	2.035,04	27	2.821,31	-	-	-	-	-	-	2.035,04
		2011	21	48	5.015,29	-	-	-	-	48	5.015,29	-	-	-	-	-
		2012	35	77	6.800,30	32	1.280,13	43	4.382,93	2	1.137,24	-	-	-	-	1.114,72
		2013	24	51	4.164,09	-	-	-	-	51	4.164,09	-	-	-	-	-
		Jumlah	126	268	34.183,28	80	8.126,89	87	15.739,77	101	10.316,62	-	-	-	-	104.172,50
496	Kab. Mappi	2009	8	23	21.003,20	19	21.000,05	4	3,15	-	-	-	-	-	-	-
		2010	18	31	18.589,08	19	14.443,51	12	4.145,57	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	31	3.208,69	10	1.226,70	21	1.981,99	-	-	-	-	-	-	-
		2012	27	60	9.013,14	9	289,86	10	3.825,44	41	4.897,84	-	-	-	-	-
		2013	16	26	11.217,06	-	11,24	1	6.306,26	25	4.899,56	-	-	-	-	-
		Jumlah	81	171	63.031,17	57	36.971,36	48	16.262,41	66	9.797,40	-	-	-	-	-
497	Kab. Merauke	2009	51	91	25.692,93	52	8.746,87	39	16.946,06	-	-	-	-	-	-	5.290,14
		2010	10	16	2.946,84	6	666,24	10	2.280,60	-	-	-	-	-	-	666,24
		2011	46	107	9.236,21	42	971,28	49	5.958,48	16	2.306,45	-	-	-	-	787,99
		2012	45	91	9.068,21	56	1.039,85	26	8.028,36	9	-	-	-	-	-	1.039,85
		2013	52	54	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	204	359	46.944,19	156	11.424,24	124	33.213,50	79	2.306,45	-	-	-	-	7.784,22
498	Kab. Mimika	2009	21	37	79.563,25	30	72.068,34	7	7.494,91	-	-	-	-	-	-	3.115,84
		2010	40	75	33.747,55	33	32.747,25	32	934,96	10	65,34	-	-	-	-	603,56
		2011	9	17	2.467,87	13	2.467,87	3	-	1	-	-	-	-	-	2.436,82
		2012	41	75	9.154,59	5	2.394,26	13	703,92	57	6.056,41	-	-	-	-	1.921,83
		2013	16	31	2.880,73	-	-	-	-	31	2.880,73	-	-	-	-	-
		Jumlah	127	235	127.813,99	81	109.677,72	55	9.133,79	99	9.002,48	-	-	-	-	8.078,05

Halaman 84 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	Kab. Nabire	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
499		2009	24	46	135.782,66	26	94.275,01	19	40.507,65	1	1.000,00	-	-	-
		2010	44	71	30.612,47	24	897,07	43	29.715,40	4	-	-	-	-
		2011	28	51	489.858,02	9	205,74	27	489.538,96	15	113,32	-	-	-
		2012	34	72	25.185,19	-	-	-	-	72	25.185,19	-	-	-
		2013	18	37	18.346,57	-	-	-	-	37	18.346,57	-	-	-
		Jumlah	148	277	699.784,91	59	95.377,82	89	559.762,01	129	44.645,08	-	-	-
500	Kab. Paniai	2009	11	22	8.513,63	10	956,99	12	7.556,64	-	-	-	-	956,99
		2010	27	51	56.982,35	20	47.043,87	18	9.862,92	13	75,56	-	-	47.043,87
		2011	17	33	14.476,40	-	-	-	-	33	14.476,40	-	-	-
		2012	26	61	7.066,41	7	-	5	-	49	7.066,41	-	-	-
		2013	21	40	175.803,07	-	-	-	-	40	175.803,07	-	-	-
		Jumlah	102	207	262.841,86	37	48.000,86	35	17.419,56	135	197.421,44	-	-	48.000,86
501	Kab. Pegunungan Bintang	2009	8	15	10.810,16	10	-	5	10.810,16	-	-	-	-	-
		2010	20	53	1.899,45	25	805,64	24	1.093,81	4	-	-	-	529,35
		2011	16	49	4.640,70	23	939,05	25	3.701,65	1	-	-	-	939,05
		2012	18	50	5.001,17	19	1.758,12	29	3.243,05	2	-	-	-	1.843,73
		2013	33	103	14.089,86	1	2.304,66	3	5.578,33	99	6.206,87	-	-	-
		Jumlah	95	270	36.441,34	78	5.807,47	86	24.427,00	106	6.206,87	-	-	3.312,13
502	Kab. Puncak	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	25	10.373,89	7	-	8	10.115,34	10	258,55	-	-	-
		2012	23	52	1.165,57	-	-	-	-	52	1.165,57	-	-	-
		2013	16	58	4.319,96	-	-	-	-	58	4.319,96	-	-	-
		Jumlah	49	135	15.859,42	7	-	8	10.115,34	120	5.744,08	-	-	-
503	Kab. Puncak Jaya	2009	24	52	40.046,31	31	6.510,82	16	33.083,23	5	452,26	-	-	6.510,82
		2010	26	68	5.402,54	49	4.945,83	19	456,71	-	-	-	-	4.945,83
		2011	8	23	1.533,90	13	1.533,90	10	-	-	-	-	-	1.533,90
		2012	8	20	1.523,49	5	282,31	15	1.241,18	-	-	-	-	282,31
		2013	14	40	993,94	-	-	-	-	40	993,94	-	-	-
		Jumlah	80	203	49.500,18	98	13.272,86	60	34.781,12	45	1.446,20	-	-	13.272,86
504	Kab. Sarmi	2009	16	32	25.532,50	17	1.956,05	15	23.576,45	-	-	-	-	-
		2010	23	48	45.148,55	-	-	-	-	48	45.148,55	-	-	-
		2011	24	83	83.436,09	-	-	-	-	83	83.436,09	-	-	-
		2012	17	43	5.773,71	-	-	-	-	43	5.773,71	-	-	-
		2013	32	84	58.961,60	-	-	1	1.390,00	83	57.571,60	-	-	-
		Jumlah	112	290	218.852,45	17	1.956,05	16	24.966,45	257	191.929,95	-	-	-

Halaman 85 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pementaian Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
505	Kab. Supiori	2009	22	53	7.734,26	27	1.623,50	25	6.110,76	1	-	-	-	25,00
		2010	23	55	5.358,69	19	138,84	31	5.219,85	5	-	-	-	138,84
		2011	25	79	15.668,71	18	521,22	20	1.080,65	41	14.066,84	-	-	-
		2012	37	107	11.637,88	-	-	-	-	107	11.637,88	-	-	-
		2013	22	59	5.611,34	-	-	-	-	59	5.611,34	-	-	-
		Jumlah	129	353	46.010,88	64	2.283,56	76	12.411,26	213	31.316,06	-	-	163,84
506	Kab. Tolikara	2009	18	32	17.473,02	15	-	17	17.473,02	-	-	-	-	-
		2010	21	43	35.238,92	3	-	18	30.590,12	22	4.648,80	-	-	-
		2011	12	32	6.135,71	-	-	-	-	32	6.135,71	-	-	-
		2012	17	44	2.831,56	-	-	-	-	44	2.831,56	-	-	-
		2013	35	111	24.818,04	-	-	-	-	111	24.818,04	-	-	-
		Jumlah	103	262	86.497,25	18	-	35	48.063,14	209	38.434,11	-	-	-
507	Kab. Waropen	2009	33	74	185.870,11	15	751,64	31	156.696,79	28	28.421,68	-	-	865,64
		2010	27	79	4.833,33	11	-	42	4.771,23	26	62,10	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	52	163	30.182,51	-	-	-	-	163	30.182,51	-	-	-
		2013	22	62	6.708,99	-	-	-	-	62	6.708,99	-	-	-
		Jumlah	134	378	227.594,94	26	751,64	73	161.468,02	279	65.375,28	-	-	865,64
508	Kab. Yahukimo	2009	45	88	74.611,43	42	9.532,16	46	65.079,27	-	-	-	-	19.231,59
		2010	25	61	14.909,96	13	2.929,10	41	11.980,86	7	-	-	-	7.987,78
		2011	12	29	2.645,48	8	26,80	21	2.618,68	-	-	-	-	-
		2012	27	74	10.892,42	24	57,45	50	10.834,97	-	-	-	-	57,45
		2013	38	108	858,66	-	-	-	-	108	858,66	-	-	-
		Jumlah	147	360	103.917,95	87	12.545,51	158	90.513,78	115	858,66	-	-	27.276,82
509	Kab. Kepulauan Yapen	2009	23	46	10.299,22	17	535,01	16	7.020,87	13	2.743,34	-	-	32,86
		2010	17	53	1.372,93	29	106,81	18	447,93	6	818,19	-	-	221,79
		2011	12	31	714,79	19	164,80	12	549,99	-	-	-	-	32,48
		2012	40	77	1.494,44	19	20,00	35	1.474,44	23	-	-	-	-
		2013	32	90	7.904,21	-	-	-	-	90	7.904,21	-	-	-
		Jumlah	124	297	21.785,59	84	826,62	81	9.493,23	132	11.465,74	-	-	287,13
510	Kab. Mamberamo Raya	2009	18	34	46.200,29	24	24.078,49	10	22.121,80	-	-	-	-	24.078,49
		2010	25	53	24.137,66	14	-	33	24.137,66	6	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	73	131	43.465,32	-	-	-	-	131	43.465,32	-	-	-
		2013	48	92	26.934,98	-	-	-	-	92	26.934,98	-	-	-
		Jumlah	164	310	140.738,25	38	24.078,49	43	46.259,46	229	70.400,30	-	-	24.078,49

Halaman 86 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/peyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
511	Kab. Mamberamo Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	60	12.899,86	-	-	-	-	60	12.899,86	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	35	106	8.639,11	-	-	-	-	106	8.639,11	-	-	-
		2013	21	69	18.407,84	-	-	-	-	69	18.407,84	-	-	-
		Jumlah	72	235	39.946,81	-	-	-	-	235	39.946,81	-	-	-
512	Kab. Nduga	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	35	15.917,78	13	5.075,55	20	10.436,01	2	406,22	-	-	899,71
		2011	20	60	10.713,73	11	21	10.713,73	28	28	-	-	-	-
		2012	24	77	30.478,08	25	46	21.661,31	6	8.816,77	-	-	-	-
		2013	30	90	81.202,24	-	-	-	-	90	81.202,24	-	-	-
		Jumlah	86	262	138.311,83	49	5.075,55	87	42.811,05	126	90.425,23	-	-	899,71
513	Kab. Lany Jaya	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	20	4.238,84	-	-	-	-	20	4.238,84	-	-	-
		2011	9	24	1.866,26	-	-	-	-	24	1.866,26	-	-	-
		2012	25	82	10.813,29	3	896,37	1	110,00	78	9.806,92	-	-	436,37
		2013	42	115	27.298,51	1	1.101,30	5	7.880,53	109	18.316,68	-	-	-
		Jumlah	83	241	44.216,90	4	1.997,67	6	7.990,53	231	34.228,70	-	-	436,37
514	Kab. Yalimo	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	38	3.766,16	-	-	-	-	11	3.748,80	-	-	-
		2011	14	43	2.160,03	26	700,00	11	1.397,99	6	62,04	-	-	700,00
		2012	20	72	2.094,49	28	-	44	2.094,49	-	-	-	-	-
		2013	17	42	1.907,89	-	-	-	-	42	1.907,89	-	-	-
		Jumlah	63	195	9.928,57	54	700,00	66	7.241,28	75	1.987,29	-	-	700,00
515	Kota Jayapura	2009	16	29	3.554,45	18	2.823,50	11	730,95	-	-	-	-	2.823,50
		2010	62	94	7.357,70	31	2.856,60	62	4.501,10	1	-	-	-	12.716,48
		2011	59	120	12.556,06	30	490,50	72	12.065,56	18	-	-	-	493,10
		2012	22	69	1.495,91	-	-	-	-	69	1.495,91	-	-	-
		2013	45	95	5.513,68	-	-	-	-	95	5.513,68	-	-	-
		Jumlah	204	407	30.477,80	79	6.170,60	145	17.297,61	183	7.009,59	-	-	16.033,08
516	Prov. Papua Barat	2009	60	155	23.386,49	54	902,29	12	8.884,61	89	13.599,59	-	-	902,29
		2010	43	131	67.941,13	41	1.172,27	14	262,85	76	66.506,01	-	-	1.172,27
		2011	75	197	27.939,71	38	1.029,38	15	7.496,25	144	19.414,08	-	-	1.113,06
		2012	26	76	91.022,30	28	290,50	29	8.531,89	19	82.199,91	-	-	290,50
		2013	24	98	21.694,66	-	-	-	-	98	21.694,66	-	-	-
		Jumlah	228	657	231.984,29	161	3.394,44	70	25.175,60	426	203.414,25	-	-	3.478,12

Halaman 87 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
517	Kab. Fakfak	2009	51	134	8.001,43	83	966,40	19	6.230,90	32	804,13	-	-	966,40
		2010	28	63	4.376,17	15	63,14	3	140,49	45	4.172,54	-	-	63,14
		2011	52	135	5.533,57	8	-	2	-	125	5.533,57	-	-	-
		2012	24	84	16.334,47	-	324,38	-	-	84	16.010,09	-	-	324,38
		2013	29	94	22.985,54	-	-	-	-	94	22.985,54	-	-	-
		Jumlah	184	510	57.231,18	106	1.353,92	24	6.371,39	380	49.505,87	-	-	1.353,92
518	Kab. Kaimana	2009	32	79	4.443,56	29	1.997,22	7	1.178,29	43	1.268,05	-	-	1.997,22
		2010	24	57	3.761,22	42	659,00	4	2.107,48	11	994,74	-	-	659,00
		2011	49	104	6.459,63	39	1.115,52	7	2.134,33	58	3.209,78	-	-	1.115,52
		2012	30	87	8.388,44	55	253,15	5	1.065,46	27	7.069,83	-	-	253,15
		2013	21	70	62.507,70	-	-	-	-	70	62.507,70	-	-	-
		Jumlah	156	397	85.560,55	165	4.024,89	23	6.485,56	209	75.050,10	-	-	4.024,89
519	Kab. Manokwari	2009	29	78	5.345,79	-	-	-	-	78	5.345,79	-	-	-
		2010	42	82	4.204,02	16	589,87	-	-	66	3.614,15	-	-	589,87
		2011	60	172	3.729,75	11	1.448,83	5	308,99	156	1.971,83	-	-	1.448,83
		2012	29	93	13.977,02	21	38,17	3	45,11	69	13.893,74	-	-	38,17
		2013	30	98	8.256,63	-	-	-	-	98	8.256,63	-	-	-
		Jumlah	190	523	35.513,21	48	2.076,87	8	354,10	467	33.082,24	-	-	2.076,87
520	Kab. Manokwari Selatan*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Kab. Maybrat	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	28	66	11.339,21	-	0,26	4	5,98	62	11.332,97	-	-	0,26
		2012	30	92	12.114,92	-	21,68	1	2.279,42	91	9.813,82	-	-	21,68
		2013	29	91	24.643,13	1	3.720,63	11	14.029,95	79	6.892,55	-	-	3.720,63
		Jumlah	87	249	48.097,26	1	3.742,57	16	16.315,35	232	28.039,34	-	-	3.742,57
522	Kab. Pegunungan Arfak*	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 88 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tindak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penytoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
523	Kab. Raja Ampat	2009	42	140	8.066,80	28	3.859,66	42	2.022,55	70	2.184,59	-	-	3.859,66	
		2010	20	62	10.056,07	23	2.585,78	31	7.470,29	8	-	-	-	2.585,78	
		2011	50	128	5.815,41	52	485,88	40	2.393,86	36	2.935,67	-	-	485,88	
					USD 87,75	-	-	-	-	-	USD 87,75	-	-	-	
		2012	21	74	5.630,42	48	337,04	11	1.273,89	15	4.019,49	-	-	337,04	
		2013	26	95	8.974,56	20	604,22	10	2.695,60	65	5.674,74	-	-	-	
		Jumlah	159	499	38.543,26	171	7.872,58	134	15.856,19	194	14.814,49	-	-	7.268,36	
					USD 87,75	-	-	-	-	-	USD 87,75	-	-	-	
524	Kab. Sorong	2009	46	114	4.358,62	53	1.183,69	30	2.341,14	31	833,79	-	-	1.183,69	
		2010	33	94	5.338,88	60	2.819,13	12	1.251,63	22	1.268,12	-	-	2.816,63	
		2011	47	97	16.599,41	31	771,08	31	15.753,33	35	75,00	-	-	771,08	
					USD 79,58	-	-	-	USD 79,58	-	-	-	-	-	
		2012	25	72	11.449,84	40	10.643,08	24	653,16	8	153,60	-	-	10.643,08	
		2013	16	54	3.128,54	1	1.803,97	2	279,53	51	1.045,04	-	-	1.803,97	
		Jumlah	167	431	40.875,29	185	17.220,95	99	20.278,79	147	3.375,55	-	-	17.218,45	
					USD 79,58	-	-	-	USD 79,58	-	-	-	-	-	
525	Kab. Sorong Selatan	2009	31	81	1.928,97	56	242,41	18	1.686,56	7	-	-	-	242,41	
		2010	23	55	2.076,79	2	1.594,45	4	404,30	49	78,04	-	-	1.594,45	
		2011	33	98	8.071,43	42	2.686,98	25	4.692,75	31	691,70	-	-	2.686,98	
		2012	15	49	4.332,49	-	1.974,95	5	1.342,88	44	1.014,66	-	-	1.974,95	
		2013	19	77	3.097,08	28	561,76	8	901,70	41	1.633,62	-	-	561,76	
		Jumlah	121	360	19.506,76	128	7.060,55	60	9.028,19	172	3.418,02	-	-	7.060,55	
526	Kab. Tambora	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	26	66	1.666,40	34	272,78	11	923,52	21	470,10	-	-	272,78	
		2012	20	77	6.130,33	23	217,28	29	531,74	25	5.381,31	-	-	217,28	
		2013	22	60	3.659,04	-	-	49	358,21	11	3.300,83	-	-	-	
		Jumlah	68	203	11.455,77	57	490,06	89	1.813,47	57	9.152,24	-	-	490,06	
527	Kab. Teluk Bintuni	2009	51	171	10.142,47	81	2.038,53	90	8.103,94	-	-	-	-	2.038,53	
		2010	25	66	10.125,91	32	2.756,58	34	2.832,93	-	4.536,40	-	-	2.756,58	
		2011	34	95	3.291,97	9	509,38	11	558,17	75	2.224,42	-	-	509,38	
					USD 223,92	-	-	-	-	-	USD 223,92	-	-	-	
		2012	22	83	20.662,93	60	2.500,36	13	15.043,80	10	3.118,77	-	-	2.500,36	
		2013	19	67	28.911,60	39	766,11	14	18.651,20	14	9.494,29	-	-	766,11	
		Jumlah	151	482	73.134,88	221	8.570,96	162	45.190,04	99	19.373,88	-	-	8.570,96	
					USD 223,92	-	-	-	-	-	USD 223,92	-	-	-	

Halaman 89 - Lampiran 3

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
528	Kab. Teluk Wondama	2009	58	179	17.628,24	3	122,85	1	-	175	17.505,39	-	-	122,85
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	51	99	11.498,29	-	-	-	-	99	11.498,29	-	-	-
		2012	23	69	14.183,83	1	273,78	2	1.343,00	66	12.567,05	-	-	273,78
		2013	23	75	68.855,44	-	550,49	8	14.303,27	67	54.001,68	-	-	-
		Jumlah	155	422	112.165,80	4	947,12	11	15.646,27	407	95.572,41	-	-	396,63
529	Kota Sorong	2009	23	66	7.339,93	24	-	7	819,04	35	6.520,89	-	-	-
		2010	34	96	12.168,67	50	-	13	12.168,67	33	-	-	-	-
		2011	30	81	11.908,80	44	563,67	17	9.534,45	20	1.810,68	-	-	563,67
		2012	23	64	5.587,18	27	526,02	14	4.951,93	23	109,23	-	-	526,02
		2013	22	70	5.690,44	-	45,96	2	305,56	68	5.338,92	-	-	45,96
		Jumlah	132	377	42.695,02	145	1.135,65	53	27.779,65	179	13.779,72	-	-	1.135,65
	Daerah 2009 -2013	2009 -2012	62.163	146.847	14.699.018,10	85.262	4.440.369,35	38.774	7.199.220,35	22.701	3.026.554,14	110	32.874,26	3.817.396,33
					USD 20.724,10		USD 7.492,48		USD 12.453,04		USD 778,58			
					SGD 5.25				SGD 1.68		SGD 3.57			
		Total 2009 - 2012	62.163	146.847	14.951.674,70	85.262	4.531.695,19	38.774	7.351.026,63	22.701	3.036.078,62	110	32.874,26	3.908.850,64
		2013	13.711	33.626	3.224.889,26	10.588	376.092,39	9.456	1.050.131,77	13.612	1.798.665,10	-	-	429.313,79
					USD 2.126,33				USD 1.261,64		USD 864,69			
		Total 2013	13.711	33.626	3.250.807,10	10.588	376.092,39	9.456	1.065.509,90	13.612	1.809.204,81	-	-	429.313,79
		2009 -2013	75.874	180.473	17.923.907,36	95.820	4.816.461,74	48.230	8.249.352,12	36.313	4.825.219,24	110	32.874,26	4.246.710,12
					USD 22.850,43		USD 7.492,48		USD 13.714,68		USD 1.643,27			USD 7.503,02
					SGD 5.25				SGD 1.68		SGD 3.57			
		Grand Total	75.874	180.473	18.202.481,80	95.820	4.907.787,58	48.230	8.416.536,53	36.313	4.845.283,43	110	32.874,26	4.338.164,43

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

*) Pada Sub IHPS II 2013 terdapat tambahan 5 daerah pemekaran baru namun untuk daerah tersebut belum ada pemeriksaan pada Tahun 2009 - 2013

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2005 - 2008

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Prov. Aceh	2005 - 2008	223	465	46.922,76	384	32.988,42	44	9.673,26	37	4.261,08	-	-	-	26.547,42
2	Kab. Aceh Barat	2005 - 2008	86	200	14.762,80	129	5.145,87	61	9.342,68	10	274,25	-	-	-	768,99
3	Kab. Aceh Barat Daya	2005 - 2008	76	160	9.494,29	77	4.009,87	80	5.484,42	3	-	-	-	-	3.295,23
4	Kab. Aceh Besar	2005 - 2008	109	238	14.961,31	206	5.880,41	23	9.045,60	9	35,30	-	-	-	4.307,30
5	Kab. Aceh Jaya	2005 - 2008	39	91	2.593,76	59	826,54	18	1.415,50	14	351,72	-	-	-	57,19
6	Kab. Aceh Selatan	2005 - 2008	61	176	48.814,55	156	46.936,73	20	1.877,82	-	-	-	-	-	19.421,42
7	Kab. Aceh Singkil	2005 - 2008	68	155	5.329,88	141	4.048,25	14	1.281,63	-	-	-	-	-	4.048,25
8	Kab. Aceh Tamiang	2005 - 2008	73	183	18.610,54	156	15.184,97	22	1.306,58	5	2.118,99	-	-	-	8.621,94
9	Kab. Aceh Tengah	2005 - 2008	70	143	11.157,64	125	6.739,33	15	1.927,23	3	2.491,08	-	-	-	5.867,70
10	Kab. Aceh Tenggara	2005 - 2008	97	198	19.103,89	144	11.420,76	50	7.533,13	4	150,00	-	-	-	880,92
11	Kab. Aceh Timur	2005 - 2008	99	200	67.226,01	164	10.382,54	20	56.426,46	16	417,01	-	-	-	8.945,30
12	Kab. Aceh Utara	2005 - 2008	70	147	1.936,83	132	1.158,37	13	706,01	2	72,45	-	-	-	1.158,37
13	Kab. Bener Meriah	2005 - 2008	61	118	4.449,75	93	1.998,58	8	410,39	17	2.040,78	-	-	-	1.982,31
14	Kab. Bireuen	2005 - 2008	80	187	14.215,71	161	12.165,17	21	2.050,54	5	-	-	-	-	74,55
15	Kab. Gayo Lues	2005 - 2008	86	160	16.649,77	137	12.674,79	13	2.941,60	10	1.033,38	-	-	-	11.428,26
16	Kab. Nagan Raya	2005 - 2008	75	145	2.953,53	138	2.157,01	5	796,52	2	-	-	-	-	2.152,83
17	Kab. Pidie	2005 - 2008	79	144	8.145,79	100	4.649,77	38	3.410,16	6	85,86	-	-	-	2.035,72
18	Kab. Pidie Jaya	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kab. Simeulue	2005 - 2008	50	127	58.943,32	110	57.727,04	16	1.216,28	1	-	-	-	-	57.662,53
20	Kota Banda Aceh	2005 - 2008	109	248	8.531,65	215	7.106,14	21	1.400,66	12	24,85	-	-	-	2.105,98

Halaman 2 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Kota Langsa	2005 - 2008	78	174	4.895,23	148	4.414,18	4	453,92	22	27,13	-	-	3.560,89
22	Kota Lhokseumawe	2005 - 2008	88	188	3.227,15	160	1.554,74	27	1.165,09	-	-	1	507,32	1.554,74
23	Kota Sabang	2005 - 2008	73	149	4.348,33	136	1.412,75	13	2.935,58	-	-	-	-	809,51
24	Kota Subulussalam	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Prov. Sumatera Utara	2005 - 2008	209	461	116.660,03	334	38.744,41	86	70.953,40	40	6.962,22	1	-	38.744,41
26	Kab. Asahan	2005 - 2008	69	166	11.197,95	113	4.144,61	35	6.905,28	17	-	1	148,06	4.144,61
27	Kab. Batu bara	2005 - 2008	7	16	96,21	11	58,74	2	37,47	1	-	2	-	58,74
28	Kab. Dairi	2005 - 2008	81	173	17.970,65	152	15.435,65	13	1.690,66	6	276,02	2	568,32	15.321,80
29	Kab. Deli Serdang	2005 - 2008	121	258	12.576,91	215	4.325,21	34	7.975,12	9	276,58	-	-	3.714,18
30	Kab. Humbang Hasundutan	2005 - 2008	75	176	6.359,99	135	5.724,86	26	635,13	15	-	-	-	5.724,86
31	Kab. Karo	2005 - 2008	59	136	1.685,01	89	895,42	40	789,59	7	-	-	-	895,42
32	Kab. Labuhanbatu	2005 - 2008	106	213	18.314,61	192	5.286,70	21	13.027,91	-	-	-	-	5.286,70
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kab. Labuhanbatu Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kab. Langkat	2005 - 2008	74	166	118.152,50	101	6.134,96	59	112.017,54	6	-	-	-	5.418,38
36	Kab. Mandailing Natal	2005 - 2008	92	194	8.376,25	123	3.635,89	55	4.586,46	16	153,90	-	-	3.635,89
37	Kab. Nias	2005 - 2008	39	91	57.620,35	62	49.479,35	23	8.141,00	6	-	-	-	50.940,24
38	Kab. Nias Barat	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kab. Nias Selatan	2005 - 2008	37	74	22.849,05	13	5.721,57	11	10.668,89	50	6.458,59	-	-	5.721,57
40	Kab. Nias Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kab. Padang Lawas	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
42	Kab. Padang Lawas Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kab. Pakpak Bharat	2005 - 2008	46	113	13.189,78	99	2.214,11	13	10.975,67	1	-	-	-	-	-	-	2.214,11
44	Kab. Samosir	2005 - 2008	40	84	4.840,63	32	939,58	38	3.270,57	14	630,48	-	-	-	-	-	939,58
45	Kab. Serdang Bedagai	2005 - 2008	61	145	3.658,26	100	1.156,89	37	2.501,37	8	-	-	-	-	-	-	1.156,89
46	Kab. Simalungun	2005 - 2008	114	234	15.219,02	34	1.098,28	74	4.739,18	126	9.381,56	-	-	-	-	-	1.098,28
47	Kab. Tapanuli Selatan	2005 - 2008	67	124	39.445,03	104	4.119,57	19	35.325,46	1	-	-	-	-	-	-	4.104,30
48	Kab. Tapanuli Tengah	2005 - 2008	87	174	4.434,02	152	2.864,13	14	783,68	8	786,21	-	-	-	-	-	2.864,13
49	Kab. Tapanuli Utara	2005 - 2008	67	159	1.162,82	119	774,30	32	388,52	8	-	-	-	-	-	-	774,30
50	Kab. Toba Samosir	2005 - 2008	73	160	3.761,50	115	1.909,44	29	1.650,76	16	201,30	-	-	-	-	-	2.195,44
51	kota Binjai	2005 - 2008	76	182	16.636,99	145	4.795,18	35	11.841,81	2	-	-	-	-	-	-	4.795,18
52	Kota Gunung Sitoli	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kota Medan	2005 - 2008	164	397	39.566,98	347	27.820,92	49	9.056,31	-	-	1	2.689,75	-	-	-	27.797,21
			-	-	USD 60,66	-	USD 56,58	-	USD 4,08	-	-	-	-	-	-	-	USD 55,59
54	Kota Padangsidimpuan	2005 - 2008	76	177	6.454,79	139	769,85	35	5.684,94	3	-	-	-	-	-	-	769,85
55	Kota Pematangsiantar	2005 - 2008	97	220	19.666,53	92	312,57	112	19.252,68	16	101,28	-	-	-	-	-	312,57
56	Kota Sibolga	2005 - 2008	86	169	4.593,96	134	2.295,25	25	2.007,80	10	290,91	-	-	-	-	-	1.275,25
57	Kota Tanjungbalai	2005 - 2008	77	169	2.399,67	133	923,17	21	1.174,42	15	302,08	-	-	-	-	-	921,13
58	Kota Tebing Tinggi	2005 - 2008	85	198	1.553,53	79	319,43	23	733,89	96	500,21	-	-	-	-	-	70,83
59	Prov. Sumatera Barat	2005 - 2008	203	439	41.260,91	348	20.386,26	81	20.279,12	9	595,53	1	-	-	-	-	20.386,26
60	Kab. Agam	2005 - 2008	73	156	1.091,56	119	520,89	25	570,67	12	-	-	-	-	-	-	485,71
61	Kab. Dharmasraya	2005 - 2008	68	155	4.081,28	119	930,04	87	2.486,33	49	664,91	-	-	-	-	-	930,04

Halaman 4 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan				
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	15
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
62	Kab. Kepulauan Mentawai	2005 - 2008	50	119	822,09	65	284,63	22	133,10	32	404,36	-	-	284,63		
63	Kab. Lima Puluh Kota	2005 - 2008	80	178	25.338,49	118	1.994,59	47	15.056,87	13	8.287,03	-	-	1.994,59		
64	Kab. Padang Pariaman	2005 - 2008	63	116	44.241,84	87	30.888,91	25	13.352,93	4	-	-	-	30.888,91		
65	Kab. Pasaman	2005 - 2008	64	127	5.517,61	85	234,66	38	5.282,95	4	-	-	-	234,66		
66	Kab. Pasaman Barat	2005 - 2008	85	207	14.870,42	138	1.523,31	62	12.958,61	7	388,50	-	-	1.523,31		
67	Kab. Pesisir Selatan	2005 - 2008	101	221	11.700,79	192	7.806,44	25	3.894,35	4	-	-	-	7.806,44		
68	Kab. Sijunjung	2005 - 2008	80	157	1.153,33	91	791,33	54	362,00	12	-	-	-	791,33		
69	Kab. Solok	2005 - 2008	33	79	2.383,31	70	1.240,26	9	1.136,80	-	-	-	6,25	1.240,26		
70	Kab. Solok Selatan	2005 - 2008	56	131	1.051,84	74	347,06	48	682,83	9	21,95	-	-	347,06		
71	Kab. Tanah Datar	2005 - 2008	28	85	372,63	81	306,13	4	66,50	-	-	-	-	306,13		
72	Kota Bukittinggi	2005 - 2008	59	116	589,75	90	167,83	22	421,92	4	-	-	-	160,77		
73	Kota Padang	2005 - 2008	97	251	8.692,86	221	4.101,52	22	4.591,34	8	-	-	-	4.056,28		
74	Kota Padang Panjang	2005 - 2008	21	57	734,76	57	734,76	-	-	-	-	-	-	734,76		
75	Kota Pariaman	2005 - 2008	70	145	2.174,57	101	80,47	38	2.094,10	6	-	-	-	80,47		
76	Kota Payakumbuh	2005 - 2008	76	131	4.583,39	113	504,46	17	4.043,02	1	35,91	-	-	504,46		
77	Kota Sawahlunto	2005 - 2008	78	148	3.733,17	77	2.973,53	27	759,64	44	-	-	-	2.973,53		
78	Kota Solok	2005 - 2008	45	102	3.629,65	92	1.372,45	8	776,81	1	-	1	1.480,39	1.372,45		
79	Prov. Riau	2005 - 2008	255	527	516.887,28	397	488.230,95	97	28.656,33	33	-	-	-	488.267,14		
80	Kab. Bengkalis	2005 - 2008	129	317	79.664,26	169	16.688,00	101	23.672,10	47	39.304,16	-	-	16.688,00		
81	Kab. Indragiri Hilir	2005 - 2008	104	202	21.771,97	136	16.575,96	66	5.196,01	-	-	-	-	16.575,96		
82	Kab. Indragiri Hulu	2005 - 2008	66	190	20.068,42	158	12.061,96	13	5.311,86	19	2.694,60	-	-	12.061,96		

Halaman 5 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Dithindakkanjuti			Tidak Dapat Dithindakkanjuti		Rekomendasi yang telah dithindakkanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
83	Kab. Kampar	2005 - 2008	79	196	7.049,78	152	4.145,42	20	2.615,13	24	289,23	-	-	4.145,42			
84	Kab. Kuantan Singingi	2005 - 2008	102	222	15.822,54	192	13.256,29	26	1.276,78	4	1.289,47	-	-	13.256,29			
85	Kab. Kepulauan Meranti	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
86	Kab. Pelalawan	2005 - 2008	90	210	9.097,79	169	1.628,68	28	7.434,80	13	34,31	-	-	1.628,68			
87	Kab. Rokan Hilir	2005 - 2008	87	201	19.970,40	119	3.565,46	44	16.394,74	38	10,20	-	-	3.565,46			
88	Kab. Rokan Hulu	2005 - 2008	96	194	20.238,84	151	13.285,37	33	5.394,53	10	1.558,94	-	-	13.285,37			
89	Kab. Siak	2005 - 2008	72	156	19.369,42	132	13.973,65	21	5.261,21	3	134,56	-	-	13.973,65			
90	Kota Dumai	2005 - 2008	104	218	10.715,53	199	6.508,02	16	4.092,50	1	115,01	2	-	5.508,02			
91	Kota Pekanbaru	2005 - 2008	80	171	6.164,60	136	4.264,91	32	1.730,40	3	169,29	-	-	4.264,91			
92	Prov. Jambi	2005 - 2008	215	491	40.547,97	468	38.117,68	23	2.430,29	-	-	-	-	40.528,00			
93	Kab. Batang Hari	2005 - 2008	106	203	28.514,65	179	23.925,96	23	4.588,69	1	-	-	-	24.378,59			
94	Kab. Bungo	2005 - 2008	103	250	28.498,64	228	22.422,55	22	6.076,09	-	-	-	-	22.546,82			
95	Kab. Kerinci	2005 - 2008	65	145	12.757,60	111	8.412,11	30	4.345,49	4	-	-	-	8.466,53			
96	Kab. Merangin	2005 - 2008	75	179	14.635,74	141	8.777,75	36	5.857,99	2	-	-	-	8.777,75			
97	Kab. Muaro Jambi	2005 - 2008	165	343	18.948,83	296	12.917,37	47	6.031,46	-	-	-	-	12.917,37			
98	Kab. Sarolangun	2005 - 2008	85	200	21.137,27	151	12.730,89	48	7.799,73	1	606,65	-	-	12.730,89			
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	2005 - 2008	84	183	13.685,86	137	9.637,70	43	4.013,82	3	34,34	-	-	10.014,73			
100	Kab. Tanjung Jabung Barat	2005 - 2008	79	197	27.156,51	162	13.745,27	35	13.411,24	-	-	-	-	13.897,37			
101	Kab. Tebo	2005 - 2008	81	201	20.569,16	139	13.274,89	59	7.294,27	3	-	-	-	14.255,76			
102	Kota Jambi	2005 - 2008	115	223	11.162,79	212	10.930,67	11	232,12	-	-	-	-	11.773,76			
103	Kota Sungai Penuh	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Halaman 6 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	Prov. Sumatera Selatan	2005 - 2008	194	399	32.008,89	327	21.039,59	66	10.969,30	6	-	-	-	17.634,24
105	Kab. Banyuasin	2005 - 2008	105	228	11.803,20	204	4.281,14	21	7.522,06	3	-	-	-	7.609,17
106	Kab. Empat Lawang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Kab. Lahat	2005 - 2008	75	148	6.254,18	119	1.595,38	28	4.658,80	1	-	-	-	1.595,38
108	Kab. Muara Enim	2005 - 2008	82	147	6.109,00	114	1.481,15	31	4.627,85	2	-	-	-	2.060,84
109	Kab. Musi Banyuasin	2005 - 2008	135	282	10.399,36	237	4.168,50	44	6.230,86	1	-	-	-	12.273,82
110	Kab. Musi Rawas	2005 - 2008	121	255	17.874,97	244	14.536,66	11	3.338,31	-	-	-	-	15.888,49
111	Kab. Ogan Ilir	2005 - 2008	72	132	2.918,74	124	2.255,05	8	663,69	-	-	-	-	2.178,10
112	Kab. Ogan Komering Ilir	2005 - 2008	59	125	2.983,86	115	414,66	10	2.569,20	-	-	-	-	616,25
113	Kab. Ogan Komering Ulu	2005 - 2008	76	136	1.524,18	122	1.032,70	14	491,48	-	-	-	-	1.032,70
114	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2005 - 2008	99	223	5.537,14	178	3.818,06	44	1.719,08	1	-	-	-	6.877,34
115	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2005 - 2008	84	179	4.820,35	178	4.820,35	1	-	-	-	-	-	5.656,16
116	Kota Lubuklinggau	2005 - 2008	73	144	3.928,56	133	3.189,90	11	738,66	-	-	-	-	3.288,75
117	Kota Pagar Alam	2005 - 2008	96	177	5.946,40	154	3.344,57	22	2.601,83	1	-	-	-	3.666,92
118	Kota Palembang	2005 - 2008	132	302	13.708,67	222	8.605,94	71	5.102,73	9	-	-	-	4.291,60
119	Kota Prabumulih	2005 - 2008	81	172	6.680,17	142	2.871,48	30	3.808,69	-	-	-	-	4.696,46
120	Prov. Bengkulu	2005 - 2008	192	382	71.891,11	348	39.270,14	32	30.911,22	-	-	2	1.709,75	39.189,42
121	Kab. Bengkulu Selatan	2005 - 2008	65	148	4.823,10	136	3.692,18	12	1.130,92	-	-	-	-	3.692,18
122	Kab. Bengkulu Tengah	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Kab. Bengkulu Utara	2005 - 2008	96	215	8.359,00	206	8.282,19	9	76,81	-	-	-	-	8.282,19
124	Kab. Kaur	2005 - 2008	55	104	1.708,15	97	1.213,72	7	494,43	-	-	-	-	1.213,72

Halaman 7 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
125	Kab. Kepahiang	2005 - 2008	72	149	1.042,23	140	926,64	8	115,59	-	-	1	-	758,94	
126	Kab. Lebong	2005 - 2008	57	142	6.082,83	107	1.935,70	35	4.147,13	-	-	-	-	1.847,61	
127	Kab. Mukomuko	2005 - 2008	51	115	6.575,40	110	3.775,35	5	2.800,05	-	-	-	-	796,07	
128	Kab. Rejang Lebong	2005 - 2008	85	165	6.354,25	143	2.524,84	20	3.829,41	2	-	-	-	2.454,24	
129	Kab. Seluma	2005 - 2008	41	86	13.554,57	75	6.332,26	6	4.239,25	5	2.983,06	-	-	6.332,26	
130	Kota Bengkulu	2005 - 2008	89	176	26.168,01	155	22.662,14	12	1.917,76	9	1.588,11	-	-	22.557,98	
131	Prov. Lampung	2005 - 2008	98	162	9.887,15	147	8.573,38	15	1.313,77	-	-	-	-	8.573,38	
132	Kab. Lampung Barat	2005 - 2008	77	163	9.175,91	140	5.722,66	18	3.453,25	5	-	-	-	5.229,86	
133	Kab. Lampung Selatan	2005 - 2008	72	155	10.087,02	142	7.089,78	13	2.997,24	-	-	-	-	7.089,78	
134	Kab. Lampung Tengah	2005 - 2008	91	194	9.979,97	169	4.696,71	17	5.283,26	8	-	-	-	4.696,71	
135	Kab. Lampung Timur	2005 - 2008	85	151	15.403,06	127	11.460,95	24	3.942,11	-	-	-	-	11.460,97	
136	Kab. Lampung Utara	2005 - 2008	45	96	8.906,01	67	7.531,29	20	731,49	9	643,23	-	-	7.531,29	
137	Kab. Mesuji	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
138	Kab. Pesawaran	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	Kab. Pringsewu	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	Kab. Pesisir Barat*	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
141	Kab. Tanggamus	2005 - 2008	54	117	13.987,94	101	11.050,58	16	2.937,36	-	-	-	-	10.720,28	
142	Kab. Tulang Bawang	2005 - 2008	80	155	16.444,29	136	7.294,08	19	9.150,21	-	-	-	-	7.294,08	
143	Kab. Tulang Bawang Barat	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	Kab. Way Kanan	2005 - 2008	65	136	8.430,71	81	5.636,76	33	1.967,07	22	826,88	-	-	2.958,05	
145	Kota Bandar Lampung	2005 - 2008	106	209	16.591,40	192	13.867,57	16	2.456,61	1	267,22	-	-	13.635,47	

Halaman 8 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan												
			Jumlah	4	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah		Nilai											
							Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai				Jumlah	Nilai									
1	2	3	Jumlah	4	Jumlah	5	Nilai	6	Jumlah	7	Nilai	8	Nilai	9	Nilai	10	Nilai	11	Nilai	12	Nilai	13	Nilai	14	Nilai	15
146	Kota Metro	2005 - 2008	84	161	5.791,34	139	2.975,73	20	2.619,69	2	195,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.639,13
147	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	2005 - 2008	112	204	15.810,59	189	15.021,75	15	788,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.021,75
148	Kab. Bangka	2005 - 2008	71	148	1.099,56	148	1.099,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.099,56
149	Kab. Bangka Barat	2005 - 2008	41	86	2.161,51	86	2.161,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.161,51
150	Kab. Bangka Selatan	2005 - 2008	50	95	5.250,82	93	5.243,24	2	7,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.243,24
151	Kab. Bangka Tengah	2005 - 2008	63	119	6.020,77	101	5.502,11	16	518,66	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.502,11
152	Kab. Belitung	2005 - 2008	63	138	3.801,22	121	3.340,33	11	181,30	6	279,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.340,33
153	Kab. Belitung Timur	2005 - 2008	55	119	44.206,39	111	43.653,03	8	553,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.653,03
154	Kota Pangkalpinang	2005 - 2008	82	164	6.924,51	147	6.174,24	12	750,27	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.174,24
155	Prov. Kepulauan Riau	2005 - 2008	71	158	54.981,54	124	51.223,46	24	3.666,98	8	91,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.470,34
156	Kab. Bintan	2005 - 2008	41	73	223,56	72	217,49	1	6,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,49
157	Kab. Karimun	2005 - 2008	59	116	15.817,41	75	2.707,56	40	13.109,85	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.707,56
158	Kab. Kepulauan Anambas	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Kab. Lingga	2005 - 2008	46	89	44.351,01	81	40.961,95	8	3.389,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.961,95
160	Kab. Natuna	2005 - 2008	69	143	43.276,34	101	26.109,13	18	15.764,53	24	1.402,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.813,68
161	Kota Batam	2005 - 2008	96	186	37.857,81	163	35.851,80	21	1.975,63	2	30,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.431,61
162	Kota Tanjungpinang	2005 - 2008	85	169	20.710,37	148	15.180,84	19	5.483,05	2	46,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.857,82
163	Prov. DKI Jakarta	2005 - 2008	1.090	2.277	594.914,06	2.000	280.361,24	208	131.642,39	54	3.874,37	15	179.036,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.680,95
164	Prov. Jawa Barat	2005 - 2008	256	397	260.016,65	301	237.116,85	45	20.915,36	51	1.984,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.730,88
165	Kab. Bandung	2005 - 2008	101	169	35.596,09	160	31.722,31	8	3.713,78	1	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.040,78

Halaman 9 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	Kab. Bandung Barat	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Kab. Bekasi	2005 - 2008	78	123	8.079,84	112	2.967,58	10	5.112,26	1	-	-	-	3.009,00
168	Kab. Bogor	2005 - 2008	84	142	28.087,61	133	25.535,92	9	2.551,69	-	-	-	-	26.674,33
169	Kab. Ciamis	2005 - 2008	55	80	4.602,44	61	1.082,44	18	3.520,00	1	-	-	-	1.083,87
170	Kab. Cianjur	2005 - 2008	138	225	13.799,70	80	1.322,84	83	2.759,33	62	9.717,53	-	-	3.087,67
171	Kab. Cirebon	2005 - 2008	66	85	5.904,38	83	4.654,64	2	1.249,74	-	-	-	-	5.218,34
172	Kab. Garut	2005 - 2008	60	107	34.121,72	50	5.301,57	30	21.764,18	27	7.055,97	-	-	5.314,87
173	Kab. Indramayu	2005 - 2008	61	84	4.116,82	70	2.310,64	10	1.773,71	3	32,47	1	-	2.372,79
174	Kab. Karawang	2005 - 2008	104	162	22.969,31	114	12.738,02	31	8.844,38	17	1.386,91	-	-	12.797,74
175	Kab. Kuningan	2005 - 2008	55	74	6.586,22	72	5.053,04	2	1.533,18	-	-	-	-	5.055,18
176	Kab. Majalengka	2005 - 2008	43	63	1.057,43	63	1.057,43	-	-	-	-	-	-	1.049,52
177	Kab. Pangandaran*	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Kab. Purwakarta	2005 - 2008	87	147	20.552,09	92	6.115,88	32	14.434,01	23	2,20	-	-	6.205,64
179	Kab. Subang	2005 - 2008	67	96	27.410,24	74	20.236,65	14	6.126,42	8	1.047,17	-	-	20.663,51
180	Kab. Sukabumi	2005 - 2008	99	142	27.384,62	115	25.177,81	25	2.174,93	2	31,88	-	-	5.674,66
181	Kab. Sumedang	2005 - 2008	73	101	7.236,86	68	4.546,98	18	2.622,38	15	67,50	-	-	4.731,15
182	Kab. Tasikmalaya	2005 - 2008	62	94	7.672,63	83	7.416,56	11	256,07	-	-	-	-	8.366,65
183	Kota Bandung	2005 - 2008	127	167	123.434,37	112	45.903,35	52	77.342,49	3	188,53	-	-	17.340,17
184	Kota Banjar	2005 - 2008	63	88	4.383,11	88	4.383,11	-	-	-	-	-	-	4.194,41
185	Kota Bekasi	2005 - 2008	91	134	32.640,85	109	17.518,90	22	15.107,55	3	14,40	-	-	17.829,59
186	Kota Bogor	2005 - 2008	82	119	12.113,89	105	9.890,66	6	1.077,43	8	1.145,80	-	-	9.980,60

Halaman 10 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
187	Kota Cimahi	2005 - 2008	69	114	9.715,25	96	8.224,38	18	1.490,87	-	-	-	-	-	8.316,63
188	Kota Cirebon	2005 - 2008	89	129	5.700,32	122	3.784,13	7	1.916,19	-	-	-	-	-	2.878,88
189	Kota Depok	2005 - 2008	88	151	17.951,22	151	17.951,22	-	-	-	-	-	-	-	2.985,95
190	Kota Sukabumi	2005 - 2008	70	105	4.260,47	95	3.692,18	8	568,29	2	-	-	-	-	3.328,97
191	Kota Tasikmalaya	2005 - 2008	72	140	5.298,21	124	3.202,86	3	17,08	13	2.078,27	-	-	-	3.047,74
192	Prov. Jawa Tengah	2005 - 2008	156	272	29.392,25	232	28.966,42	-	-	-	-	40	425,83	-	28.966,42
193	Kab. Banjarnegara	2005 - 2008	124	230	8.895,97	225	6.526,73	5	2.369,24	-	-	-	-	-	6.380,44
194	Kab. Banyumas	2005 - 2008	86	179	7.706,52	174	5.762,53	5	1.943,99	-	-	-	-	-	5.762,53
195	Kab. Batang	2005 - 2008	64	107	1.534,27	91	906,21	8	628,06	-	-	8	-	-	906,21
196	Kab. Blora	2005 - 2008	85	170	7.012,23	161	3.184,38	9	3.827,85	-	-	-	-	-	3.264,79
197	Kab. Boyolali	2005 - 2008	97	150	3.421,81	138	1.590,67	9	1.831,14	3	-	-	-	-	1.597,36
198	Kab. Brebes	2005 - 2008	87	177	4.017,40	155	3.457,04	19	560,36	3	-	-	-	-	3.458,23
199	Kab. Cilacap	2005 - 2008	69	123	29.772,61	115	25.547,35	8	4.225,26	-	-	-	-	-	25.547,35
200	Kab. Demak	2005 - 2008	63	107	1.492,65	103	1.348,70	4	143,95	-	-	-	-	-	1.348,70
201	Kab. Grobogan	2005 - 2008	82	152	8.615,23	141	4.932,01	9	3.683,22	2	-	-	-	-	4.932,01
202	Kab. Jepara	2005 - 2008	75	107	4.470,34	106	2.761,64	1	1.708,70	-	-	-	-	-	2.761,64
203	Kab. Karanganyar	2005 - 2008	76	125	2.572,29	123	1.934,21	2	638,08	-	-	-	-	-	1.934,25
204	Kab. Kebumen	2005 - 2008	73	132	5.311,41	125	4.694,74	7	616,67	-	-	-	-	-	4.694,77
205	Kab. Kendal	2005 - 2008	80	150	16.213,50	116	6.716,86	24	9.412,37	10	84,27	-	-	-	7.801,10
206	Kab. Klaten	2005 - 2008	87	189	5.731,28	179	4.508,11	6	770,68	4	452,49	-	-	-	4.688,58
207	Kab. Kudus	2005 - 2008	104	191	7.385,73	187	4.520,43	4	2.865,30	-	-	-	-	-	4.520,43

Halaman 11 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	Kab. Magelang	2005 - 2008	97	167	5.326,10	116	4.684,19	51	641,91	-	-	-	-	4.684,19
209	Kab. Pati	2005 - 2008	97	204	7.173,73	199	2.127,62	4	5.046,11	-	-	1	-	2.127,62
210	Kab. Pekalongan	2005 - 2008	62	125	1.548,09	118	1.347,94	7	200,15	-	-	-	-	1.156,40
211	Kab. Pemalang	2005 - 2008	102	179	6.897,15	161	6.292,52	9	604,63	9	-	-	-	6.033,64
212	Kab. Purbalangga	2005 - 2008	60	111	6.295,72	108	6.171,80	2	123,92	1	-	-	-	6.171,80
213	Kab. Purworejo	2005 - 2008	107	226	38.579,02	167	7.837,05	37	13.994,60	22	16.747,37	-	-	6.489,29
214	Kab. Rembang	2005 - 2008	80	156	35.606,38	137	5.844,08	19	29.762,30	-	-	-	-	5.844,08
215	Kab. Semarang	2005 - 2008	81	137	11.910,29	128	7.835,52	2	1.582,68	-	-	7	2.492,09	5.331,43
216	Kab. Sragen	2005 - 2008	85	133	5.580,10	132	5.244,45	1	335,65	-	-	-	-	5.138,61
217	Kab. Sukoharjo	2005 - 2008	79	167	6.654,88	153	3.553,18	14	3.101,70	-	-	-	-	3.553,18
218	Kab. Tegal	2005 - 2008	62	107	5.190,64	52	2.700,88	46	949,57	9	1.540,19	-	-	2.700,88
219	Kab. Temanggung	2005 - 2008	64	92	154,81	91	97,11	1	57,70	-	-	-	-	97,11
220	Kab. Wonogiri	2005 - 2008	76	130	6.705,55	124	5.630,81	6	1.074,74	-	-	-	-	5.630,81
221	Kab. Wonosobo	2005 - 2008	79	138	12.868,46	116	4.892,86	21	7.849,93	1	125,67	-	-	4.832,74
222	Kota Magelang	2005 - 2008	74	118	6.885,81	96	4.414,52	22	2.471,29	-	-	-	-	4.414,52
223	Kota Pekalongan	2005 - 2008	57	103	325,51	94	325,51	9	-	-	-	-	-	325,51
224	Kota Salatiga	2005 - 2008	77	111	4.150,36	101	1.792,49	9	1.267,06	1	-	-	1.090,81	1.792,49
225	Kota Semarang	2005 - 2008	87	187	12.432,46	172	5.796,16	13	6.636,30	2	-	-	-	5.796,16
226	Kota Surakarta	2005 - 2008	95	150	5.664,44	127	1.351,63	22	4.312,81	1	-	-	-	1.351,63
227	Kota Tegal	2005 - 2008	85	158	5.364,21	140	3.583,84	16	1.780,37	2	-	-	-	3.583,84
228	Prov. D.I. Yogyakarta	2005 - 2008	132	213	23.031,37	206	21.481,43	5	1.549,94	2	-	-	-	21.803,06

Halaman 12 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
229	Kab. Bantul	2005 - 2008	103	170	2.536,80	167	1.447,72	3	1.089,08	-	-	-	-	1.447,72
230	Kab. Gunung Kidul	2005 - 2008	86	170	3.361,54	157	2.468,00	13	893,54	-	-	-	-	2.468,00
231	Kab. Kulon Progo	2005 - 2008	85	156	6.730,61	143	4.015,69	13	2.714,92	-	-	-	-	2.060,70
232	Kab. Sleman	2005 - 2008	108	200	50.712,19	192	47.477,89	8	3.234,30	-	-	-	-	45.986,87
233	Kota Yogyakarta	2005 - 2008	56	91	11.065,87	83	7.390,61	8	3.675,26	-	-	-	-	7.384,06
234	Prov. Jawa Timur	2005 - 2008	234	354	14.171,66	319	5.601,69	12	7.785,77	23	784,20	-	-	6.104,69
235	Kab. Bangkalan	2005 - 2008	99	167	5.868,73	164	3.249,41	3	2.619,32	-	-	-	-	4.105,57
236	Kab. Banyuwangi	2005 - 2008	175	324	14.447,68	284	6.106,23	39	8.341,45	1	-	-	-	6.212,15
237	Kab. Blitar	2005 - 2008	115	166	50.430,46	148	3.334,28	18	47.096,18	-	-	-	-	3.872,80
238	Kab. Bojonegoro	2005 - 2008	108	156	7.683,94	154	1.933,56	2	5.760,38	-	-	-	-	1.973,56
239	Kab. Bondowoso	2005 - 2008	101	161	3.761,49	158	1.725,91	3	2.035,58	-	-	-	-	1.575,63
240	Kab. Gresik	2005 - 2008	100	158	7.720,09	150	4.501,08	8	3.219,01	-	-	-	-	17.975,46
241	Kab. Jember	2005 - 2008	165	310	58.796,79	262	33.161,34	35	25.635,45	13	-	-	-	16.036,29
242	Kab. Jombang	2005 - 2008	118	169	1.705,05	165	1.555,31	4	149,74	-	-	-	-	1.548,52
243	Kab. Kediri	2005 - 2008	140	204	1.916,13	204	1.916,13	-	-	-	-	-	-	3.462,84
244	Kab. Lamongan	2005 - 2008	150	248	7.094,24	245	7.094,24	3	-	-	-	-	-	6.933,02
245	Kab. Lumajang	2005 - 2008	140	200	2.178,62	198	1.900,57	1	278,05	1	-	-	-	1.986,69
246	Kab. Madiun	2005 - 2008	114	204	2.318,51	202	2.241,57	2	76,94	-	-	-	-	2.241,57
247	Kab. Magetan	2005 - 2008	130	216	12.382,83	208	7.140,32	8	5.242,51	-	-	-	-	7.140,32
248	Kab. Malang	2005 - 2008	188	275	7.523,79	270	6.753,16	5	770,63	-	-	-	-	6.475,36
249	Kab. Mojokerto	2005 - 2008	119	217	10.500,27	213	9.791,29	4	708,98	-	-	-	-	9.691,29

Halaman 13 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
250	Kab. Nganjuk	2005 - 2008	68	108	2.480,25	105	1.436,31	3	1.043,94	-	-	-	-	-	1.436,31			
251	Kab. Ngawi	2005 - 2008	118	165	8.155,58	124	4.714,64	36	3.440,94	5	-	-	-	-	4.714,64			
252	Kab. Pachtan	2005 - 2008	76	123	490,49	122	399,08	1	91,41	-	-	-	-	-	697,76			
253	Kab. Pamekasan	2005 - 2008	74	110	2.952,30	98	2.716,28	11	236,02	1	-	-	-	-	2.722,36			
254	Kab. Pasuruan	2005 - 2008	175	322	42.296,44	315	13.135,66	7	5.779,67	-	23.381,11	-	-	-	13.557,49			
255	Kab. Ponorogo	2005 - 2008	134	207	4.608,72	203	4.269,00	4	339,72	-	-	-	-	-	4.269,00			
256	Kab. Probolinggo	2005 - 2008	106	169	3.503,79	157	2.200,43	10	1.298,86	1	-	-	4,50	-	2.301,29			
257	Kab. Sampang	2005 - 2008	85	145	5.530,50	139	4.861,78	6	668,72	-	-	-	-	-	4.861,78			
258	Kab. Sidoarjo	2005 - 2008	132	207	4.675,26	203	4.574,30	4	100,96	-	-	-	-	-	5.535,59			
259	Kab. Situbondo	2005 - 2008	153	245	50.237,78	239	5.131,79	6	45.105,99	-	-	-	-	-	6.273,08			
260	Kab. Sumenep	2005 - 2008	81	125	6.133,77	99	3.866,93	26	2.266,84	-	-	-	-	-	3.867,65			
261	Kab. Trenggalek	2005 - 2008	112	188	2.221,60	187	1.721,60	1	500,00	-	-	-	-	-	1.721,60			
262	Kab. Tuban	2005 - 2008	108	181	3.528,92	173	2.531,67	8	997,25	-	-	-	-	-	2.721,83			
263	Kab. Tulungagung	2005 - 2008	137	222	4.806,24	219	4.601,04	3	205,20	-	-	-	-	-	4.940,12			
264	Kota Batu	2005 - 2008	147	235	19.130,83	192	3.351,18	41	15.779,65	2	-	-	-	-	3.421,02			
265	Kota Blitar	2005 - 2008	116	185	2.087,32	185	2.087,32	-	-	-	-	-	-	-	2.313,51			
266	Kota Kediri	2005 - 2008	115	166	4.324,29	166	4.324,29	-	-	-	-	-	-	-	4.745,40			
267	Kota Madiun	2005 - 2008	107	177	3.482,23	176	3.310,54	1	171,69	-	-	-	-	-	2.739,23			
268	Kota Malang	2005 - 2008	123	150	25.234,80	147	22.446,98	3	2.787,82	-	-	-	-	-	22.475,56			
269	Kota Mojokerto	2005 - 2008	100	167	7.914,63	161	4.253,04	5	2.887,09	1	774,50	-	-	-	5.168,22			
270	Kota Pasuruan	2005 - 2008	170	311	10.386,18	268	7.441,59	37	2.944,59	6	-	-	-	-	7.569,07			

Halaman 14 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
271	Kota Probolinggo	2005 - 2008	99	148	9.182,51	147	8.738,43	1	444,08	-	-	-	-	8.992,41	
272	Kota Surabaya	2005 - 2008	146	255	8.708,98	227	2.861,56	27	5.847,42	1	-	-	-	4.031,19	
273	Prov. Banten	2005 - 2008	183	321	21.469,28	247	16.968,09	33	2.755,68	41	1.745,51	-	-	17.870,94	
274	Kab. Lebak	2005 - 2008	115	215	13.226,65	155	6.636,37	49	6.536,22	7	54,06	4	-	5.658,96	
275	Kab. Pandeglang	2005 - 2008	182	323	15.694,81	263	11.032,43	59	4.662,38	1	-	-	-	11.070,91	
276	Kab. Serang	2005 - 2008	162	304	15.646,17	221	7.847,25	78	7.119,17	5	679,75	-	-	8.557,34	
277	Kab. Tangerang	2005 - 2008	258	444	30.745,57	419	16.203,76	22	14.541,81	3	-	-	-	19.622,04	
278	Kota Cillegon	2005 - 2008	160	312	33.626,69	285	20.900,50	23	4.316,33	-	-	4	8.409,86	21.723,26	
279	Kota Serang	2005 - 2008	1	2	1.360,00	2	1.360,00	-	-	-	-	-	-	USD 409,14	
280	Kota Tangerang	2005 - 2008	117	176	3.509,88	171	2.878,28	5	631,60	-	-	-	-	1.510,00	
281	Kota Tangerang Selatan	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.297,35	
282	Prov. Bali	2005 - 2008	122	288	35.056,81	273	32.366,85	10	69,86	3	-	2	2.620,10	32.366,85	
283	Kab. Badung	2005 - 2008	107	192	107.831,11	178	50.202,19	14	57.628,92	-	-	-	-	64.918,87	
284	Kab. Bangli	2005 - 2008	79	142	2.631,70	120	1.145,44	21	1.486,26	1	-	-	-	1.145,44	
285	Kab. Buleleng	2005 - 2008	90	158	10.525,61	148	10.146,72	10	378,89	-	-	-	-	10.425,84	
286	Kab. Gianyar	2005 - 2008	106	201	16.111,35	190	9.228,83	11	6.882,52	-	-	-	-	9.428,26	
287	Kab. Jembrana	2005 - 2008	75	133	6.858,59	127	5.916,96	6	941,63	-	-	-	-	4.326,79	
288	Kab. Karangasem	2005 - 2008	58	103	4.733,25	96	2.065,14	7	2.668,11	-	-	-	-	2.065,14	
289	Kab. Klungkung	2005 - 2008	58	98	3.708,04	87	912,32	10	2.795,72	1	-	-	-	912,32	
290	Kab. Tabanan	2005 - 2008	116	210	12.695,11	204	3.287,83	6	9.407,28	-	-	-	-	3.287,83	
291	Kota Denpasar	2005 - 2008	131	254	33.361,09	247	19.800,32	7	13.560,77	-	-	-	-	19.800,32	

Halaman 15 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
292	Prov. Nusa Tenggara Barat	2005 - 2008	161	297	57.673,63	261	33.300,12	28	24.098,41	7	265,20	1	9,90	33.300,12	
293	Kab. Bima	2005 - 2008	42	59	577,43	51	434,14	8	143,29	-	-	-	-	434,14	
294	Kab. Dompu	2005 - 2008	54	89	4.120,24	62	2.523,49	16	1.234,84	10	351,91	1	10,00	2.523,49	
295	Kab. Lombok Barat	2005 - 2008	63	114	4.303,81	100	961,31	12	3.341,81	1	-	1	0,69	961,31	
296	Kab. Lombok Tengah	2005 - 2008	73	131	7.292,54	122	4.355,44	6	2.937,10	2	-	1	-	4.355,44	
297	Kab. Lombok Timur	2005 - 2008	67	128	2.122,66	69	1.316,82	31	775,76	28	30,08	-	-	1.316,82	
298	Kab. Sumbawa	2005 - 2008	49	83	1.099,75	66	815,54	16	284,21	1	-	-	-	815,54	
299	Kab. Sumbawa Barat	2005 - 2008	36	66	387,47	56	227,81	10	159,66	-	-	-	-	227,81	
300	Kab. Lombok Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
301	Kota Bima	2005 - 2008	78	153	32.107,88	33	9.438,91	51	20.643,32	69	2.025,65	-	-	9.438,91	
302	Kota Mataram	2005 - 2008	70	108	743,03	88	404,68	12	338,35	2	-	6	-	404,68	
303	Prov. Nusa Tenggara Timur	2005 - 2008	165	304	16.599,42	192	1.204,26	75	12.095,41	37	3.299,75	-	-	1.204,26	
304	Kab. Alor	2005 - 2008	55	114	12.412,31	94	4.472,14	16	7.940,17	4	-	-	-	4.472,14	
305	Kab. Belu	2005 - 2008	48	92	4.077,04	72	3.370,30	8	378,19	12	328,55	-	-	3.370,30	
306	Kab. Ende	2005 - 2008	63	128	1.858,85	89	413,16	20	1.362,88	19	69,69	-	13,12	411,66	
307	Kab. Flores Timur	2005 - 2008	70	128	20.485,98	69	1.242,99	30	15.156,07	29	4.086,92	-	-	1.865,33	
308	Kab. Kupang	2005 - 2008	91	181	923,46	125	610,84	18	242,62	26	45,00	12	25,00	610,84	
309	Kab. Lembata	2005 - 2008	75	145	3.832,61	109	1.113,73	23	2.687,60	13	31,28	-	-	1.113,73	
310	Kab. Manggarai	2005 - 2008	65	116	2.066,98	102	1.697,48	11	343,38	2	-	1	26,12	1.697,48	
311	Kab. Manggarai Barat	2005 - 2008	90	172	8.728,50	110	3.529,18	53	5.190,80	9	8,52	-	-	3.529,18	
312	Kab. Manggarai Timur	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 16 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
313	Kab. Sabu Raijua	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Kab. Nagekeo	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Kab. Ngada	2005 - 2008	71	132	3.671,39	112	2.845,36	18	812,80	2	13,23	-	-	2.845,36
316	Kab. Rote Ndao	2005 - 2008	50	85	2.938,71	55	887,84	20	2.050,87	10	-	-	-	887,84
317	Kab. Sikka	2005 - 2008	59	113	3.905,08	19	63,00	7	418,63	87	3.423,45	-	-	63,00
318	Kab. Sumba Barat	2005 - 2008	57	110	1.726,01	93	692,49	16	1.033,52	1	-	-	-	692,49
319	Kab. Sumba Barat Daya	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	Kab. Sumba Tengah	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	Kab. Sumba Timur	2005 - 2008	71	125	2.927,58	125	2.920,58	-	-	-	-	-	7,00	2.920,58
322	Kab. Timor Tengah Selatan	2005 - 2008	102	192	5.146,98	98	1.314,46	34	2.238,03	60	1.594,49	-	-	1.314,46
323	Kab. Timor Tengah Utara	2005 - 2008	68	112	3.747,14	49	1.398,60	63	2.348,54	-	-	-	-	1.398,60
324	Kota Kupang	2005 - 2008	85	152	12.517,72	118	2.765,21	18	9.008,31	16	744,20	-	-	2.765,21
325	Prov. Kalimantan Barat	2005 - 2008	197	412	45.440,69	325	21.866,71	63	18.175,02	-	290,81	24	5.108,15	22.291,24
326	Kab. Bengkulu	2005 - 2008	100	219	23.989,32	155	11.533,76	62	12.455,56	2	-	-	-	10.221,23
327	Kab. Kapuas Hulu	2005 - 2008	78	149	8.414,30	129	6.214,72	20	2.199,58	-	-	-	-	5.322,09
328	Kab. Kayong Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	Kab. Ketapang	2005 - 2008	60	111	16.003,89	75	7.083,99	29	8.877,75	7	42,15	-	-	7.084,36
330	Kab. Kubu Raya	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Kab. Landak	2005 - 2008	84	173	3.904,20	155	1.721,37	18	2.182,83	-	-	-	-	1.745,62
332	Kab. Melawi	2005 - 2008	99	188	18.315,62	89	4.355,68	87	13.959,94	12	-	-	-	4.356,09
333	Kab. Pontianak	2005 - 2008	38	82	7.279,38	65	200,36	12	2.241,09	-	-	5	4.837,93	200,36

Halaman 17 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Dithindakkanjuti		Tidak Dapat Dithindakkanjuti		Rekomendasi yang telah dithindakkanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
334	Kab. Sambas	2005 - 2008	89	161	4.626,26	151	4.099,03	10	527,23	-	-	-	-	4.099,03
335	Kab. Sanggau	2005 - 2008	60	110	6.383,53	83	4.112,04	25	2.271,49	2	-	-	-	4.219,48
336	Kab. Sekadau	2005 - 2008	83	193	9.480,50	156	3.767,31	34	5.713,19	3	-	-	-	4.392,83
337	Kab. Sintang	2005 - 2008	118	218	22.293,86	171	7.429,56	47	14.864,30	-	-	-	-	7.429,56
338	Kota Pontianak	2005 - 2008	114	206	4.859,25	149	2.750,42	57	2.108,83	-	-	-	-	5.316,28
339	Kota Singkawang	2005 - 2008	62	99	3.288,47	90	2.853,96	8	434,51	1	-	-	-	3.197,12
340	Prov. Kalimantan Tengah	2005 - 2008	160	313	36.525,21	252	19.615,34	56	15.926,53	5	-	-	-	19.682,70
341	Kab. Barito Selatan	2005 - 2008	115	211	11.955,96	156	4.172,29	47	7.783,67	8	-	-	-	4.124,41
342	Kab. Barito Timur	2005 - 2008	108	235	11.889,45	142	6.849,95	38	2.122,66	55	2.916,84	-	-	6.837,46
343	Kab. Barito Utara	2005 - 2008	117	199	27.218,32	154	14.508,74	31	12.709,58	14	-	-	-	11.929,53
344	Kab. Gunung Mas	2005 - 2008	101	158	4.216,63	127	2.099,42	31	2.117,21	-	-	-	-	2.099,42
345	Kab. Kapuas	2005 - 2008	109	192	6.158,44	175	2.040,38	12	4.112,75	5	5,31	-	-	2.040,38
346	Kab. Katingan	2005 - 2008	94	174	6.469,08	130	4.412,84	42	2.056,24	2	-	-	-	3.742,16
347	Kab. Kotawaringin Barat	2005 - 2008	122	242	2.758,25	240	2.674,95	2	83,30	-	-	-	-	2.674,95
348	Kab. Kotawaringin Timur	2005 - 2008	116	219	25.593,39	156	3.034,78	53	22.558,61	10	-	-	-	3.143,81
349	Kab. Lamandau	2005 - 2008	103	200	49.037,60	166	2.292,46	25	46.745,14	9	-	-	-	2.295,61
350	Kab. Murung Raya	2005 - 2008	98	182	14.281,69	145	4.747,28	23	9.145,60	14	388,81	-	-	4.747,28
351	Kab. Pulang Pisau	2005 - 2008	93	149	5.070,27	114	1.886,18	29	2.698,04	6	486,05	-	-	181,42
352	Kab. Seruyan	2005 - 2008	113	209	4.589,34	156	3.328,55	33	1.217,89	20	2,60	-	40,30	3.328,55
353	Kab. Sukamara	2005 - 2008	83	167	2.559,34	130	1.818,86	32	721,95	5	-	-	-	2.854,79
354	Kota Palangkaraya	2005 - 2008	144	270	11.635,16	163	9.692,36	77	1.811,19	30	131,61	-	-	9.802,17

Halaman 18 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
355	Prov. Kalimantan Selatan	2005 - 2008	245	409	19.469,48	297	6.993,18	89	12.476,30	23	-	-	-	-	6.993,18
356	Kab. Balangan	2005 - 2008	95	154	3.017,23	152	3.017,23	2	-	-	-	-	-	-	3.017,23
357	Kab. Banjar	2005 - 2008	165	257	51.248,45	215	7.445,45	36	43.803,00	6	-	-	-	-	7.445,45
358	Kab. Barito Kuala	2005 - 2008	112	192	10.513,46	180	6.844,78	12	3.668,68	-	-	-	-	-	6.844,78
359	Kab. Hulu Sungai Selatan	2005 - 2008	86	133	2.179,15	110	891,93	23	1.287,22	-	-	-	-	-	891,93
360	Kab. Hulu Sungai Tengah	2005 - 2008	110	171	2.340,03	149	1.080,92	20	1.259,11	2	-	-	-	-	1.080,92
361	Kab. Hulu Sungai Utara	2005 - 2008	93	164	3.359,75	159	3.337,35	5	22,40	-	-	-	-	-	3.337,35
362	Kab. Kotabaru	2005 - 2008	102	157	16.502,62	99	326,98	51	16.074,84	7	100,80	-	-	-	326,98
363	Kab. Tabalong	2005 - 2008	103	192	1.429,16	181	1.143,16	8	286,00	3	-	-	-	-	1.143,16
364	Kab. Tanah Bumbu	2005 - 2008	112	249	87.248,46	224	23.775,58	25	63.472,88	-	-	-	-	-	23.775,58
365	Kab. Tanah Laut	2005 - 2008	115	200	112.635,64	121	26.864,22	69	85.727,91	9	-	1	43,51	-	26.864,22
366	Kab. Tapin	2005 - 2008	141	240	334.642,21	152	23.460,66	52	28.946,67	31	282.234,88	5	-	-	23.460,66
367	Kota Banjarbaru	2005 - 2008	100	149	3.339,19	119	1.253,68	19	1.958,51	11	127,00	-	-	-	1.569,01
368	Kota Banjarmasin	2005 - 2008	165	254	26.593,34	209	18.985,07	35	7.608,27	10	-	-	-	-	19.033,01
369	Prov. Kalimantan Timur	2005 - 2008	131	263	165.241,98	184	141.827,25	69	23.414,73	10	-	-	-	-	141.827,25
370	Kab. Berau	2005 - 2008	93	171	9.277,45	161	8.943,94	10	333,51	-	-	-	-	-	8.263,18
			-	-	USD 1.262,72	-	USD 1.262,72	-	-	-	-	-	-	-	USD 1.262,72
371	Kab. Bulungan	2005 - 2008	74	134	14.285,13	94	8.049,73	25	6.089,90	15	145,50	-	-	-	7.329,73
372	Kab. Kutai Barat	2005 - 2008	90	164	18.546,47	148	9.130,17	15	936,94	1	8.479,36	-	-	-	9.130,17
373	Kab. Kutai Kartanegara	2005 - 2008	137	294	688.158,36	139	37.957,05	150	639.901,31	5	10.300,00	-	-	-	37.957,05
			-	-	USD 2.250,34	-	-	-	USD 2.250,34	-	-	-	-	-	-
374	Kab. Kutai Timur	2005 - 2008	178	383	95.481,18	277	38.625,41	97	43.808,24	9	13.047,53	-	-	-	22.696,56

Halaman 19 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Dithindakkanjuti			Tidak Dapat Dithindakkanjuti		Rekomendasi yang telah dithindakkanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan						
			Jumlah	4	Jumlah	5	Nilai	6	Jumlah	7	Nilai	8	Jumlah	9	Nilai	10	Jumlah		11	Nilai	12	Jumlah	13	Nilai
375	Kab. Malinau	2005 - 2008	70	121	6.590,01	109	6.174,58	12	415,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.174,58
376	Kab. Nunukan	2005 - 2008	119	248	10.362,80	219	7.838,78	26	2.524,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	7.838,78
377	Kab. Paser	2005 - 2008	82	128	22.795,35	110	14.500,45	18	8.294,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.500,45
378	Kab. Penejiam Paser Utara	2005 - 2008	79	147	12.517,30	141	11.907,45	6	609,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.907,45
379	Kab. Tana Tidung	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
380	Kota Balikpapan	2005 - 2008	88	138	8.391,32	136	8.379,16	2	12,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.637,03
381	Kota Bontang	2005 - 2008	95	150	41.233,43	136	9.129,99	14	32.103,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.129,99
382	Kota Samarinda	2005 - 2008	125	221	100.161,52	121	66.886,45	67	30.352,26	33	2.922,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.718,75
383	Kota Tarakan	2005 - 2008	102	194	86.873,48	172	83.716,93	9	412,68	13	2.743,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.681,18
384	Prov. Kalimantan Utara*	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	Prov. Sulawesi Utara	2005 - 2008	137	233	17.197,59	119	6.658,93	43	9.545,16	71	993,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.658,93
386	Kab. Bolaang Mongondow	2005 - 2008	82	162	4.584,74	104	3.148,65	31	1.371,09	27	65,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.148,65
387	Kab. Bolaang Mongondow Timur	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
388	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
389	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	Kab. Minahasa	2005 - 2008	117	218	1.917,58	160	1.917,58	27	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.917,58
391	Kab. Minahasa Selatan	2005 - 2008	76	134	10.126,41	22	4.297,62	21	4.351,38	91	1.477,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.297,62
392	Kab. Minahasa Tenggara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
393	Kab. Minahasa Utara	2005 - 2008	84	174	6.316,36	61	2.592,25	72	2.869,14	41	854,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.592,25
394	Kab. Kepulauan Sangihe	2005 - 2008	76	153	2.998,74	117	1.507,54	13	622,08	23	869,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.507,54
395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah		Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
396	Kab. Kepulauan Talaud	2005 - 2008	81	145	14.409,19	34	8.022,73	37	3.392,41	74	2.994,05	-	-	10.061,93
397	Kota Bitung	2005 - 2008	109	176	18.974,71	162	15.186,24	10	3.253,44	4	535,03	-	-	15.186,24
398	Kota Kotamobagu	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	Kota Manado	2005 - 2008	105	192	78.124,59	41	47.994,06	27	11.557,41	124	18.573,12	-	-	47.994,06
400	Kota Tomohon	2005 - 2008	94	166	7.460,50	137	5.363,31	21	2.097,19	8	-	-	-	5.363,31
401	Prov. Sulawesi Tengah	2005 - 2008	113	235	32.193,13	116	12.850,14	72	19.168,09	47	174,90	-	-	12.850,14
402	Kab. Banggai	2005 - 2008	58	118	1.322,71	113	1.317,22	3	5,49	-	-	2	-	1.317,22
403	Kab. Banggai Kepulauan	2005 - 2008	76	159	8.191,07	126	6.429,55	30	1.761,52	2	-	1	-	6.429,55
404	Kab. Buol	2005 - 2008	62	126	47.820,19	83	24.283,28	40	23.536,91	3	-	-	-	24.384,37
405	Kab. Donggala	2005 - 2008	70	144	66.009,41	73	3.362,86	59	62.546,63	12	99,92	-	-	2.690,02
406	Kab. Morowali	2005 - 2008	87	172	26.073,82	58	2.635,96	70	12.006,10	44	11.431,76	-	-	1.897,88
407	Kab. Parigi Moutong	2005 - 2008	58	120	9.260,23	85	7.670,65	28	1.348,32	7	241,26	-	-	7.466,32
408	Kab. Poso	2005 - 2008	54	109	7.200,03	92	3.713,84	13	3.238,43	4	247,76	-	-	3.892,84
409	Kab. Sigi	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	Kab. Tojo Una-Una	2005 - 2008	69	130	1.438,09	123	1.427,79	5	10,30	2	-	-	-	1.427,79
411	Kab. Toitoli	2005 - 2008	60	119	8.214,89	65	1.493,19	42	6.721,70	12	-	-	-	1.532,95
412	Kota Palu	2005 - 2008	106	203	9.032,15	132	6.262,39	51	2.769,76	20	-	-	-	2.813,74
413	Prov. Sulawesi Selatan	2005 - 2008	201	396	46.115,74	218	13.753,09	122	29.295,69	56	3.066,96	-	-	13.753,09
414	Kab. Bantaeng	2005 - 2008	55	96	6.011,58	35	2.194,18	17	1.435,38	30	2.382,02	14	-	2.194,18
415	Kab. Barru	2005 - 2008	71	113	2.849,58	88	2.297,90	22	551,68	3	-	-	-	2.297,90
416	Kab. Bone	2005 - 2008	77	143	4.401,04	109	2.128,67	17	997,82	17	1.274,55	-	-	2.128,67

Halaman 21 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Status Pemantauan Tindak Lanjut			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
417	Kab. Bulukumba	2005 - 2008	97	221	10.069,28	134	4.818,75	49	2.399,81	35	2.850,72	3	-	4.818,75			
418	Kab. Enrekang	2005 - 2008	57	102	2.628,05	58	2.055,30	33	511,44	11	-	-	61,31	2.055,30			
419	Kab. Gowa	2005 - 2008	67	136	10.664,99	70	3.259,30	41	7.173,21	24	232,48	1	-	3.259,30			
420	Kab. Jeneponto	2005 - 2008	102	213	9.318,56	61	735,05	42	3.241,99	110	5.341,52	-	-	735,05			
421	Kab. Luwu	2005 - 2008	96	185	19.366,57	80	5.753,05	87	13.525,39	17	88,13	1	-	5.753,05			
422	Kab. Luwu Timur	2005 - 2008	81	163	26.077,34	154	25.311,53	9	646,33	-	-	-	119,48	25.311,53			
423	Kab. Luwu Utara	2005 - 2008	78	156	4.505,90	78	3.461,96	30	1.014,06	48	29,88	-	-	3.461,96			
424	Kab. Maros	2005 - 2008	106	196	5.134,56	109	914,19	84	4.027,15	3	193,22	-	-	914,19			
425	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	2005 - 2008	75	130	8.258,30	96	2.737,79	25	5.045,24	9	475,27	-	-	2.737,79			
426	Kab. Pinrang	2005 - 2008	77	125	8.810,99	86	825,20	32	7.396,20	7	589,59	-	-	825,20			
427	Kab. Kepulauan Selayar	2005 - 2008	72	139	25.110,56	85	2.238,81	30	20.525,39	24	2.346,36	-	-	2.238,81			
428	Kab. Sidenreng Rappang	2005 - 2008	65	120	9.485,46	74	3.048,16	34	6.060,85	12	376,45	-	-	3.048,16			
429	Kab. Sinjai	2005 - 2008	59	82	5.472,77	60	4.366,94	11	1.105,83	11	-	-	-	4.366,94			
430	Kab. Soppeng	2005 - 2008	57	117	10.264,88	74	2.232,20	39	8.032,68	4	-	-	-	2.232,20			
431	Kab. Takalar	2005 - 2008	74	146	7.419,64	37	2.178,49	63	3.082,67	46	2.158,48	-	-	2.178,49			
432	Kab. Tana Toraja	2005 - 2008	82	188	11.682,32	115	1.621,32	36	5.355,88	37	4.705,12	-	-	1.621,32			
433	Kabupaten Toraja Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
434	Kab. Wajo	2005 - 2008	65	95	15.847,07	58	833,66	25	14.768,52	2	-	10	244,89	833,66			
435	Kota Makassar	2005 - 2008	120	267	33.810,07	67	4.313,04	73	22.241,86	127	7.255,17	-	-	4.313,04			
436	Kota Palopo	2005 - 2008	70	157	8.725,71	48	3.876,40	43	4.381,35	66	467,96	-	-	3.876,40			
437	Kota Parepare	2005 - 2008	60	92	7.380,46	84	5.661,06	8	1.621,60	-	-	-	97,80	5.661,06			

Halaman 22 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan			
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	15
						Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
438	Prov. Sulawesi Tenggara	2005 - 2008	205	498	44.223,63	310	13.321,54	126	26.352,45	62	4.549,64	-	-	14.809,63	
439	Kab. Bombana	2005 - 2008	93	203	44.404,71	123	31.992,96	74	12.411,75	6	-	-	-	23.196,81	
440	Kab. Buton	2005 - 2008	110	231	6.086,96	177	4.464,98	42	1.616,24	11	5,74	1	-	4.464,98	
441	Kab. Buton Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
442	Kab. Kolaka	2005 - 2008	138	345	38.867,76	228	29.910,09	70	7.131,36	47	1.826,31	-	-	11.033,18	
443	Kab. Kolaka Utara	2005 - 2008	84	218	20.538,19	144	3.738,41	67	15.449,18	7	1.350,60	-	-	3.738,41	
444	Kab. Konawe	2005 - 2008	115	304	40.183,84	192	20.654,72	90	16.792,75	22	2.736,37	-	-	7.814,44	
445	Kab. Konawe Selatan	2005 - 2008	78	167	17.963,47	100	4.267,94	54	10.739,40	13	2.956,13	-	-	4.267,94	
446	Kab. Konawe Utara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
447	Kab. Muna	2005 - 2008	112	250	25.221,88	125	7.463,31	87	10.967,47	38	6.791,10	-	-	6.127,08	
448	Kab. Wakatobi	2005 - 2008	57	107	20.186,34	85	13.116,92	20	7.069,42	2	-	-	-	11.410,92	
449	Kota Bau-Bau	2005 - 2008	107	202	15.342,33	125	13.006,61	63	1.714,30	14	621,42	-	-	10.020,14	
450	Kota Kendari	2005 - 2008	141	332	17.191,84	239	8.584,65	51	6.942,99	42	1.664,20	-	-	8.407,28	
451	Prov. Gorontalo	2005 - 2008	129	244	19.599,69	177	3.225,83	44	14.823,70	23	1.550,16	-	-	3.225,83	
452	Kab. Boalemo	2005 - 2008	84	162	7.715,37	123	2.199,67	17	4.150,55	22	1.365,15	-	-	2.199,67	
453	Kab. Bone Bolango	2005 - 2008	70	160	3.283,16	133	2.696,72	18	568,89	9	17,55	-	-	2.696,72	
454	Kab. Gorontalo	2005 - 2008	111	193	12.708,35	166	8.804,60	22	3.395,75	5	508,00	-	-	8.804,60	
455	Kab. Gorontalo Utara	2005 - 2008	8	24	68,50	7	15,50	17	53,00	-	-	-	-	15,50	
456	Kab. Pohuwato	2005 - 2008	94	171	12.798,99	131	8.495,27	29	4.246,92	11	56,80	-	-	8.495,27	
457	Kota Gorontalo	2005 - 2008	99	188	17.696,64	139	3.749,82	27	13.194,87	22	751,95	-	-	3.749,82	
458	Prov. Sulawesi Barat	2005 - 2008	123	231	37.957,04	132	9.986,75	79	13.303,86	16	127,72	4	14.538,71	9.986,75	

Halaman 23 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
459	Kab. Majene	2005 - 2008	88	191	6.341,59	45	1.083,11	105	2.181,70	41	3.076,78	-	-	1.083,11
460	Kab. Mamasa	2005 - 2008	93	227	25.055,85	108	5.766,20	117	19.210,11	2	79,54	-	-	3.281,20
461	Kab. Mamuju	2005 - 2008	96	205	20.122,89	93	8.288,95	100	11.507,87	12	326,07	-	-	8.293,69
462	Kab. Mamuju Utara	2005 - 2008	83	166	16.653,58	112	9.965,71	54	6.687,87	-	-	-	-	9.965,71
463	Kab. Polewali Mandar	2005 - 2008	96	190	25.304,18	91	10.423,88	75	14.092,18	24	788,12	-	-	10.945,98
464	Prov. Maluku	2005 - 2008	105	227	30.743,61	68	1.868,99	114	21.835,50	45	7.039,12	-	-	1.868,99
465	Kab. Buru	2005 - 2008	50	98	6.097,71	47	3.056,87	27	2.786,19	24	254,65	-	-	1.208,97
466	Kab. Buru Selatan	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	Kab. Kepulauan Aru	2005 - 2008	31	63	9.790,10	32	658,47	24	7.895,10	7	1.236,53	-	-	658,47
468	Kab. Maluku Tengah	2005 - 2008	73	178	5.728,42	84	1.394,73	79	4.333,69	15	-	-	-	1.394,73
469	Kab. Maluku Tenggara	2005 - 2008	73	145	6.530,53	90	3.537,12	41	2.058,44	14	934,97	-	-	3.541,02
470	Kab. Maluku Tenggara Barat	2005 - 2008	61	122	9.563,94	55	608,10	49	6.335,29	18	2.620,55	-	-	362,61
471	Kab. Maluku Barat Daya	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	Kab. Seram Bagian Barat	2005 - 2008	51	89	3.397,46	25	94,28	20	395,47	44	2.907,71	-	-	94,28
473	Kab. Seram Bagian Timur	2005 - 2008	42	88	3.645,03	35	12,65	49	3.497,02	4	135,36	-	-	12,65
474	Kota Ambon	2005 - 2008	53	102	3.201,00	56	1.532,64	32	1.380,08	14	288,28	-	-	1.532,64
475	Kota Tual	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	Prov. Maluku Utara	2005 - 2008	140	306	23.771,25	95	1.562,63	112	18.897,86	99	3.310,76	-	-	8.107,19
477	Kab. Halmahera Barat	2005 - 2008	81	169	7.657,55	133	3.257,49	33	4.381,07	3	18,99	-	-	3.257,49
478	Kab. Halmahera Selatan	2005 - 2008	86	180	11.784,35	104	3.534,38	32	5.845,91	43	2.404,06	1	-	3.534,38
479	Kab. Halmahera Tengah	2005 - 2008	72	143	8.791,19	103	2.454,16	35	6.228,20	5	108,83	-	-	2.454,16

Halaman 24 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
480	Kab. Halmahera Timur	2005 - 2008	71	147	13.345,46	116	4.540,72	31	8.804,74	-	-	-	-	4.540,72
481	Kab. Halmahera Utara	2005 - 2008	101	222	16.892,15	97	2.642,09	59	11.703,57	66	2.546,49	-	-	3.160,85
482	Kab. Kepulauan Sula	2005 - 2008	83	146	24.332,55	75	8.661,97	47	14.150,36	23	1.520,22	1	-	8.745,81
483	Kab. Pulau Morotai	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	Kota Ternate	2005 - 2008	95	165	8.600,14	102	2.772,99	44	5.324,04	19	503,11	-	-	2.656,92
485	Kota Tidore Kepulauan	2005 - 2008	83	156	6.467,74	130	6.084,63	13	319,83	10	63,28	3	-	6.084,63
486	Prov. Papua	2005 - 2008	103	147	69.434,12	69	5.323,27	60	64.110,85	18	-	-	-	7.304,53
487	Kab. Asmat	2005 - 2008	49	66	38.209,28	40	5.000,40	26	33.208,88	-	-	-	-	6.000,80
488	Kab. Biak Numfor	2005 - 2008	25	39	30.549,12	28	11.235,24	11	19.313,88	-	-	-	-	119.928,52
489	Kab. Boven Digoel	2005 - 2008	47	76	385.009,83	43	238.870,39	25	145.719,24	8	420,20	-	-	22.223,68
490	Kab. Dogiyai	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	Kab. Deiyai	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	Kab. Intan Jaya	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	Kab. Jayapura	2005 - 2008	70	121	17.857,54	92	9.651,53	29	8.206,01	-	-	-	-	9.651,53
494	Kab. Jayawijaya	2005 - 2008	40	53	119.849,90	21	2.954,13	32	116.895,77	-	-	-	-	2.954,13
495	Kab. Keerom	2005 - 2008	34	62	26.199,54	29	7.955,80	33	18.243,74	-	-	-	-	13.766,08
496	Kab. Mappi	2005 - 2008	28	51	233.317,26	21	104.181,58	26	126.026,09	4	3.109,59	-	-	-
497	Kab. Merauke	2005 - 2008	45	72	78.401,56	40	23.904,60	25	54.496,96	7	-	-	-	16.386,86
498	Kab. Mimika	2005 - 2008	30	56	22.264,85	36	19.553,46	17	2.711,39	3	-	-	-	9.158,99
499	Kab. Nabire	2005 - 2008	45	56	38.995,60	9	15.687,45	39	21.149,77	8	2.158,38	-	-	-
500	Kab. Paniai	2005 - 2008	41	58	49.124,28	28	21.307,84	14	22.316,02	16	5.500,42	-	-	21.307,84

Halaman 25 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti			Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
501	Kab. Pegunungan Bintang	2005 - 2008	38	63	62.320,94	38	3.445,25	25	58.643,85	-	-	-	231,84	-	1.852,61
502	Kab. Puncak	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
503	Kab. Puncak Jaya	2005 - 2008	37	52	267.657,85	26	3.268,89	15	255.227,38	11	9.161,58	-	-	-	3.268,89
504	Kab. Sarmi	2005 - 2008	48	83	25.680,05	52	3.819,68	31	21.860,37	-	-	-	-	-	3.819,68
505	Kab. Supiori	2005 - 2008	32	46	14.306,94	13	5.328,68	20	8.527,04	13	451,22	-	-	-	5.013,45
506	Kab. Tolikara	2005 - 2008	49	87	56.338,27	44	14.777,76	43	41.560,51	-	-	-	-	-	14.790,67
507	Kab. Waropen	2005 - 2008	34	45	17.428,56	2	3.529,21	12	5.468,73	31	8.430,62	-	-	-	3.529,21
508	Kab. Yahukimo	2005 - 2008	15	22	7.451,42	9	-	9	7.091,42	4	360,00	-	-	-	-
509	Kab. Kepulauan Yapen	2005 - 2008	32	50	83.469,84	1	21,30	2	9.103,63	47	74.344,91	-	-	-	21,76
510	Kab. Mamberamo Raya	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
511	Kab. Mamberamo Tengah	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	Kab. Nduga	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
513	Kab. Lany Jaya	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Kab. Yalimo	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Kota Jayapura	2005 - 2008	83	116	9.526,74	62	6.111,28	39	8.745,46	15	170,00	-	-	-	611,28
516	Prov. Papua Barat	2005 - 2008	90	200	54.849,62	81	1.211,63	40	34.056,74	79	19.581,25	-	-	-	-
517	Kab. Fakfak	2005 - 2008	83	179	11.759,42	116	801,66	36	9.719,21	27	1.238,55	-	-	-	801,66
518	Kab. Kaimana	2005 - 2008	85	210	9.831,09	67	4.016,48	25	5.292,11	118	522,50	-	-	-	4.016,48
519	Kab. Manokwari	2005 - 2008	95	185	16.478,99	27	2.209,71	46	594,43	112	13.674,85	-	-	-	2.209,71
520	Kab. Manokwari Selatan*	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	Kab. Maybrat	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 26 - Lampiran 4

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan		
				Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
522	Kab. Pegunungan Arfak*	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
523	Kab. Raja Ampat	2005 - 2008	74	148	18.260,86	29	3.062,83	28	10.480,75	91	4.717,28	-	-	3.062,83
524	Kab. Sorong	2005 - 2008	66	126	19.137,94	74	3.068,75	33	8.274,02	18	7.795,17	1	-	3.068,75
525	Kab. Sorong Selatan	2005 - 2008	73	149	27.055,78	81	8.352,49	25	8.495,68	43	10.200,61	-	7,00	8.352,49
526	Kab. Tambrauw	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	Kab. Teluk Bintuni	2005 - 2008	72	186	31.309,37	106	2.420,39	79	28.888,98	1	-	-	-	2.420,39
528	Kab. Teluk Wondama	2005 - 2008	54	103	19.434,19	17	1.227,13	20	6.477,45	66	11.729,61	-	-	1.227,13
529	Kota Sorong	2005 - 2008	65	123	25.098,84	56	3.830,01	7	15.018,45	60	6.250,38	-	-	3.830,01
	Daerah 2005 - 2008	Total	43.190	82.590	11.213.101,17	63.413	5.188.331,01	13.355	4.967.366,16	5.618	829.790,29	204	227.613,71	4.655.356,04
		Grand Total	43.190	82.590	11.347.747,21	63.413	5.210.119,69	13.355	5.079.731,33	5.618	829.790,29	204	228.105,90	4.677.132,64

Keterangan

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

*) Pada Sub IHPS II 2013 terdapat tambahan 5 daerah pemekaran baru namun untuk daerah tersebut belum ada pemeriksaan pada Tahun 2009 - 2013

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BUMN (INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN) TAHUN 2009 - 2013

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
BUMN (Induk Perusahaan)																	
1	PT PLN (Persero)	2009	12	20	1.844.357,89	17	1.828.695,34	1	15.662,55	-	-	2	-	1.828.976,06			
		2010	20	26	19.701,47	18	16.701,47	7	3.000,00	-	-	1	-	16.701,47			
		2011	82	146	USD 37,07	75	USD 37,07	55	157.947,11	11	-	5	-	USD 37,07			
		2012	11	16	155.283,08	1	-	14	155.283,08	1	-	-	-	81.419,67			
		2013	19	64	USD 37,07	-	USD 37,07	-	-	-	-	-	-	USD 37,07			
		Jumlah	144	272	2.313.210,91	111	1.930.453,13	77	331.892,74	76	50.865,04	8	-	1.977.159,09			
					USD 37,07		USD 37,07		-		50.865,04			1.977.159,09			
2	PT Bukit Asam (Persero)	2009	16	22	64.392,82	22	64.392,82	-	-	-	-	-	-	72.474,58			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 7,79			
		2011	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	12	13	885,24	6	-	6	-	-	-	1	885,24	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	34	42	65.278,06	35	64.392,82	6	-	-	-	1	885,24	72.474,58			
														USD 7,79			
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	8	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	21	26	5.213,47	16	40,61	7	2.699,55	2	-	1	2.473,31	40,61			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	29	35	5.213,47	25	40,61	7	2.699,55	2	-	1	2.473,31	40,61			
4	PT Sarana Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-			

Halaman 2 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	15	35	1.034,45	21	-	13	1.034,45	1	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	42	1.034,45	27	-	14	1.034,45	1	-	-	-	-
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	11	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	11	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	16	23	81.429,15	21	54,00	2	81.375,15	-	-	-	-	54,00
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	23	81.429,15	21	54,00	2	81.375,15	-	-	-	-	54,00
8	PT Pertamina (Persero)	2009	77	177	8.705,40	173	8.705,40	2	-	1	-	1	-	8.705,40
		2010	-	-	USD 32.489,22	-	USD 32.489,22	-	-	-	-	-	-	USD 32.489,22
		2011	83	139	14.771,81	139	14.771,81	-	-	-	-	-	-	14.771,81
		2012	61	88	-	67	-	17	-	4	-	-	-	-
		2013	129	259	9.402,96	160	453,20	73	8.949,76	24	-	2	-	453,20
		Jumlah	59	120	USD 306,67	-	USD 306,67	-	USD 306,67	120	41,80	-	-	-
		2013	59	120	41,80	-	41,80	-	-	-	41,80	-	-	-
		Jumlah	409	783	USD 139,60	539	23.930,41	92	8.949,76	149	USD 139,60	3	-	23.930,41
		Jumlah	409	783	USD 32.935,49	539	USD 32.489,22	92	USD 306,67	149	USD 139,60	3	-	USD 32.489,22

Halaman 3 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	14	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	12	24	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	10	24	14.919,99	-	-	-	-	24	14.919,99	-	-	-		
		Jumlah	36	67	14.919,99	42	-	1	-	24	14.919,99	-	-	-		
					USD 1,283,23						USD 1,283,23					
					USD 1,283,23						USD 1,283,23					
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	21	42	175,57	-	-	-	-	42	175,57	-	-	-		
		2013	24	53	2.948,81	-	-	-	-	53	2.948,81	-	-	-		
		Jumlah	45	95	3.124,38	-	-	-	-	95	3.124,38	-	-	-		
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	17	42	91,84	29	91,84	13	-	-	-	-	-	92		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	25	50	1.434,29	-	-	-	-	50	1.434,29	-	-	-		
		2013	30	78	20.928,24	1	157,20	-	-	77	20.771,04	-	-	157,20		
		Jumlah	72	170	22.454,37	30	249,04	13	-	127	22.205,33	-	-	249,04		
13	Perum Navigasi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 4 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	43	1.735,97	13	1.735,97	11	-	13	-	6	-	1.736,97
		2011	39	98	37.429,02	1	-	30	30.145,17	67	7.283,85	-	-	-
		2012	12	33	924,49	-	-	-	-	33	924,49	-	-	-
		2013	11	49	1.336,56	-	-	-	-	49	1.336,56	-	-	-
		Jumlah	78	223	41.426,04	14	1.735,97	41	30.145,17	162	9.544,90	6	-	1.735,97
15	Perum Damri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Perum PPD	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	40	679,21	32	661,55	7	-	1	-	-	17,66	-
		2013	8	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	169,17
		Jumlah	22	56	679,21	32	661,55	7	-	17	-	-	17,66	169,17

Halaman 5 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
19	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	15	31	42.030,59	17	25.082,73	10	16.947,86	3	-	1	-	25.059,35			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	13	27	1.147,00	-	-	-	-	27	1.147,00	-	-	-			
		Jumlah	28	58	43.177,59	17	25.082,73	10	16.947,86	30	1.147,00	1	-	25.059,35			
20	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	11	23	46,00	12	-	11	46,00	-	-	-	-	-			
		2013	10	20	1.354,00	-	-	-	-	20	1.354,00	-	-	-			
		Jumlah	21	43	1.400,00	12	-	11	46,00	20	1.354,00	-	-	-			
21	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	9	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-			
		Jumlah	9	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-			
22	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2009	21	35	123.452	16	3.916,08	11	119.536,07	8	-	-	-	197,50			
		2010	16	28	66,00	11	66,00	2	-	15	-	-	-	66,00			
					USD 1.21		USD 1.21							USD 1.21			
		2011	16	46	6.376,90	-	-	9	827,41	37	5.549	-	-	-			
		2012	11	17	123,40	-	-	-	-	17	123,40	-	-	-			
		2013	7	12	1.065,38	-	-	-	-	12	1.065,38	-	-	-			
		Jumlah	71	138	131.083,83	27	3.982,08	22	120.363,48	89	6.738,28	-	-	263,50			
					USD 1.21		USD 1.21							USD 1.21			
23	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Halaman 6 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1		3	4		7		9		11		13		14	
24	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2009	10	2.500,00	14		5		2	2.500				15
		2010	-	USD 8.83	-		-		-		-		-	-
		2011	-		-		-		-		-		-	-
		2012	-		-		-		-		-		-	-
		2013	-		-		-		-		-		-	-
		Jumlah	10	2.500,00	14		5		2	2.500,00				-
				USD 8.83										
25	PT Bina Karya (Persero)	2009	-		-		-		-		-		-	-
		2010	-		-		-		-		-		-	-
		2011	-		-		-		-		-		-	-
		2012	-		-		-		-		-		-	-
		2013	-		-		-		-		-		-	-
		Jumlah	-		-		-		-		-		-	-
26	PT Indah Karya (Persero)	2009	-		-		-		-		-		-	-
		2010	-		-		-		-		-		-	-
		2011	-		-		-		-		-		-	-
		2012	-		-		-		-		-		-	-
		2013	-		-		-		-		-		-	-
		Jumlah	-		-		-		-		-		-	-
27	PT Yodya Karya (Persero)	2009	-		-		-		-		-		-	-
		2010	-		-		-		-		-		-	-
		2011	-		-		-		-		-		-	-
		2012	-		-		-		-		-		-	-
		2013	-		-		-		-		-		-	-
		Jumlah	-		-		-		-		-		-	-
28	PT Indra Karya (Persero)	2009	-		-		-		-		-		-	-
		2010	-		-		-		-		-		-	-
		2011	-		-		-		-		-		-	-
		2012	-		-		-		-		-		-	-
		2013	-		-		-		-		-		-	-
		Jumlah	-		-		-		-		-		-	-

Halaman 7 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml		Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
29	PT Virama Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	PT Amarta Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	16	30	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	16	30	130.432,49	28	92.813,75	2	37.618,74	-	-	-	-	64.956,36		
32	PT Istaka Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	13	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	13	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-		

Halaman 8 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/peyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	PT Nindya Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	7	22	143.945,87	18	131.670,32	4	12.275,55	-	-	-	-	1.534,11
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	22	143.945,87	18	131.670,32	4	12.275,55	-	-	-	-	1.534,11
35	PT Hutama Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	23	154.943,43	-	-	-	-	23	154.943,43	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	23	154.943,43	-	-	-	-	23	154.943,43	-	-	-
36	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	26	121.925,04	26	121.925,04	-	-	-	-	-	-	26.222,85
		2011	6	8	USD 11,498.63	8	USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	34	121.925,04 USD 11,498.63	34	121.925,04 USD 11,498.63	-	-	-	-	-	-	26.222,85
37	Perum Perumnas	2009	15	28	12.671,11	21	9.871,27	7	2.799,84	-	-	-	-	9.871,27
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	35	44	37.776,23	-	-	-	-	44	37.776,23	-	-	-
		Jumlah	50	72	50.447,34	21	9.871,27	7	2.799,84	44	37.776,23	-	-	9.871,27
38	PT Brantas Abipraya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 9 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	PT Waskita Karya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	24	37.692,71	10	31.663,84	13	6.028,87	1	-	-	-	31.663,84
40	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2009	11	18	605.439,69	14	605.439,69	4	-	-	-	-	-	605.439,69
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	26	47	-	31	-	16	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	37	65	605.439,69	45	605.439,69	20	-	-	-	-	-	605.439,69
41	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	2	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	4	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		2013	9	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
		Jumlah	15	30	-	2	-	1	-	27	-	-	-	-
42	Perum LKBN Antara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Perum Produksi Film Negara	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 10 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	8	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	8	-	2	-	6	-	-	-	-	-	-
47	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	PT Hotel Indonesia Natour	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	24	5.550,04	-	-	-	-	24	5.550,04	-	-	-
					USD 120.24	-	-	-	-	-	USD 120.24	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	24	5.550,04	-	-	-	-	24	5.550,04	-	-	-
					USD 120.24	-	-	-	-	-	USD 120.24	-	-	-
50	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	12	5,60	2	5,60	1	-	9	-	-	-	5,60
					USD 412.07	-	USD 342.19	-	-	-	USD 69.88	-	-	USD 342.19
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	7	6.110,15	-	-	-	-	7	6.110,15	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	6	19	6.115,75	2	5,60	1	-	16	6.110,15	-	-	5,60
					USD 412.07	-	USD 342.19	-	-	-	USD 69.88	-	-	USD 342.19
52	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	15	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	24	8.045,64	17	6.448,68	6	1.596,96	1	-	-	-	12.570,16

Halaman 12 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
53	PT PAL Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	16	53	237.518,22	-	-	-	-	53	237.518,22	-	-	-	-		
		2013	-	-	USD 1,128.68	-	-	-	-	-	USD 1,128.68	-	-	-	-		
		Jumlah	16	53	237.518,22	-	-	-	-	53	237.518,22	-	-	-	-		
					USD 1,128.68						USD 1,128.68						
54	PT Pindad (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	PT Dahana (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	6	9	5.301,79	-	-	-	-	9	5.301,79	-	-	-	-		
		Jumlah	6	9	USD 104.19	-	-	-	-	9	USD 104.19	-	-	-	-		
					5.301,79						5.301,79						
					USD 104.19						USD 104.19						
57	PT Industri Kereta Api (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	7	16	21.215,41	12	1.288,27	4	19.927,14	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	7	16	21.215,41	12	1.288,27	4	19.927,14	-	-	-	-	-	-		

Halaman 13 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	PT Barata Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT LEN Industri (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT Batan Teknologi (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	17	25	-	18	-	4	-	3	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	PT Bio Farma (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	21	1.995,57	21	1.995,57	-	-	-	-	-	-	1.995,57
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	7	11	186,82	9	186,82	2	186,82	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	32	2.182,39	9	1.995,57	2	186,82	-	-	-	-	1.995,57
64	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	12	34	4.495,77	24	1.402,84	9	3.092,93	-	-	1	-	1.402,84
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	34	4.495,77	24	1.402,84	9	3.092,93	-	-	1	-	1.402,84
65	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	11	29	2.631,79	13	31,71	12	2.600,08	4	-	-	-	31,71
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	29	2.631,79	13	31,71	12	2.600,08	4	-	-	-	31,71
66	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	24	-	17	-	7	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	24	-	17	-	7	-	-	-	-	-	-
67	PT Semen Baturaja (Persero)	2009	9	19	7.671,13	15	5.685,92	1	432,79	-	-	3	1.552,42	53,39
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	19	7.671,13	15	5.685,92	1	432,79	-	-	3	1.552,42	53,39
		2009	9	19	7.671,13	15	5.685,92	1	432,79	-	-	3	1.552,42	53,39
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	19	7.671,13	15	5.685,92	1	432,79	-	-	3	1.552,42	53,39

Halaman 15 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
68	PT Semen Kumpang (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT Dok dan Perkapalan Koodja Bahari (Persero)	2009	10	25	7.631,67	13	271,41	9	4.728,81	1	-	2	2.631,45	2.430,94			
			-	-	USD 788,28	-	-	-	USD 788,28	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	12	44	19.620,87	-	-	-	-	44	19.620,87	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	22	69	27.252,54	13	271,41	9	4.728,81	45	19.620,87	2	2.631,45	2.430,94			
			-	-	USD 788,28	-	-	-	USD 788,28	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	9	24	35.683,60	-	-	-	-	24	35.683,60	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	24	35.683,60	-	-	-	-	24	35.683,60	-	-	-	-	-	-
71	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2009	10	21	4.851,24	6	65,00	14	3.783,01	-	-	1	1.003,23	65,00			
			-	-	USD 12,229,81	-	-	-	USD 12,229,81	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	21	4.851,24	6	65,00	14	3.783,01	-	-	1	1.003,23	65,00			
			-	-	USD 12,229,81	-	-	-	USD 12,229,81	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 16 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Cambrius Primiissima (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT Industri Gelas (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT Garam (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 17 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
77	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	20	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	20	20	30	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	9	16	5.257,01	15	5.257,01	1	-	-	-	-	-	-	6.573,21	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	14	21	4.042,28	-	-	-	-	21	4.042,28	-	-	-	-	
	Jumlah	23	23	37	9.299,29	15	5.257,01	1	-	21	4.042,28	-	-	-	6.573,21	
79	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	11	16	1.707,78	-	-	-	-	16	1.707,78	-	-	-	-	
	Jumlah	11	11	16	1.707,78	-	-	-	-	16	1.707,78	-	-	-	-	
80	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2009	9	9	73.621,54	5	55.947,08	4	17.674,46	-	-	-	-	-	25.918,06	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	7	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	
	Jumlah	16	16	23	73.621,54	5	55.947,08	4	17.674,46	14	-	-	-	-	25.918,06	
81	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 18 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	16	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	14	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
		Jumlah	21	30	-	15	-	1	-	14	-	-	-	-
83	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	15	18	-	17	-	1	-	-	-	-	-	-
84	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	24	52	1.703,15	41	1.703,15	3	-	5	-	3	-	1.703,15
		2012	7	12	-	3	-	7	-	2	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	64	1.703,15	44	1.703,15	10	-	7	-	3	-	1.703,15
85	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	21	-	12	-	8	-	1	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	21	-	12	-	8	-	1	-	-	-	-
86	PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	24	2.998,64	23	2.998,64	1	-	-	-	-	-	2.998,64
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	24	2.998,64	23	2.998,64	1	-	-	-	-	-	2.998,64

Halaman 19 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
87	PT Perkebunan Nuisantara XII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	24	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.026,80
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Jumlah	24	34	66.938,27	34	66.938,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.026,80
88	PT Perkebunan Nuisantara XIII (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT Perkebunan Nuisantara XIV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	13	31	46.273,03	20	-	8	46.273,03	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Jumlah	13	31	46.273,03	20	-	8	46.273,03	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
90	Perum Perhutani	2009	22	41	25.282,94	28	14.606,36	12	10.676,58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.398,86
					USD 758.61				USD 758.61										
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	39	69.915,81	32	56.309,00	5	13.606,81	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	30	77.194,78	3	22,31	14	77.146,94	13	25,53	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Jumlah	67	110	172.393,53	63	70.937,67	31	101.430,33	16	25,53	-	-	-	-	-	-	-	6.398,86
					USD 758.61				USD 758.61										
91	PT Inhutani I (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	15	15	-	7	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	10	17	29.170,36	-	-	-	-	17	29.170,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	Jumlah	25	32	29.170,36	7	-	7	-	18	29.170,36	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 20 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	PT Inhutani II (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	27	40	-	29	-	11	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	27	40	-	29	-	11	-	-	-	-	-	-
93	PT Inhutani III (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	22	180,61	10	164,26	8	16,35	4	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	22	180,61	10	164,26	8	16,35	4	-	-	-	-
94	PT Inhutani IV (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT Inhutani V (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2009	11	24	27.827,85	23	27.827,85	-	-	-	-	1	-	25.175,00
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	16	2.132,76	-	-	-	-	16	2.132,76	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	40	29.960,61	23	27.827,85	-	-	16	2.132,76	1	-	25.175,00

Halaman 21 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut			Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Jml	Nilai	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	PT Pertani (Persero)	2009	4	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	1.976,30
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	8	1.976,30	8	1.976,30	-	-	-	-	-	-	1.976,30
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	20	37	569,52	23	29,37	10	540,15	-	-	4	-	29,37
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	20	37	569,52	23	29,37	10	540,15	-	-	4	-	29,37
99	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	26	3.007,43	-	-	-	-	26	3.007,43	-	-	-
		Jumlah	12	26	3.007,43	-	-	-	-	26	3.007,43	-	-	-
100	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2009	14	19	3.575,33	13	447,58	2	3.127,75	-	-	4	-	447,58
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	26	46	1.274.508,64	-	-	-	-	46	1.274.508,64	-	-	-
		Jumlah	40	65	1.278.083,97	13	447,58	2	3.127,75	46	1.274.508,64	4	-	447,58
101	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	11	16	-	9	-	6	-	1	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	11	16	-	9	-	6	-	1	-	-	-	-

Halaman 22 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2009	10	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	12	2.251,22	1	-	3	2.251,22	8	-	-	-	-
103	PT Kertas Leces (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Perum PNRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	29	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	29	39	-	24	-	11	-	4	-	-	-	-
105	Perum Peruri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	25	32	1.328,83	28	1.328,83	4	-	-	-	-	-	451,76
					EUR 24,20		EUR 24,20		-	-	-	-	-	EUR 24,20
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	29	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-
		Jumlah	37	61	1.328,83	28	1.328,83	4	-	29	-	-	-	451,760
					EUR 24,20		EUR 24,20		-		-	-	-	EUR 24,20
106	PT Balai Pustaka (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	5	10	1.386,18	-	-	-	-	10	1.386,18	-	-	-
		Jumlah	5	10	1.386,18	-	-	-	-	10	1.386,18	-	-	-

Halaman 23 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
107	PT Pradnya Paramitha (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2009	17	41	-	30	-	7	-	-	-	4	-	-		
		2010	4	8	-	5	-	2	-	-	-	1	-	-		
		2011	43	105	-	63	-	42	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	61	249	336.720,25	27	-	222	336.720,25	-	-	-	-	-		
		Jumlah	125	403	336.720,25	125	-	273	336.720,25	-	-	5	-	-		
109	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	5	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	18	31	-	25	-	5	-	-	-	1	-	-		
		2012	32	180	-	29	-	151	-	-	-	-	-	-		
		2013	21	45	260,44	-	-	-	-	45	260,44	-	-	-		
		Jumlah	76	270	260,44	68	-	156	USD 568,23	45	260,44	1	-	-		
					260,44				USD 568,23		260,44					
					USD 568,23				USD 568,23		USD 568,23					
110	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	17	36	-	34	-	2	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	45	184	-	-	-	-	-	184	-	-	-	-		
		Jumlah	62	220	-	34	-	2	-	184	-	-	-	-		
111	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	48	84	-	58	-	26	-	-	-	-	-	-		
		2012	19	60	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-		
		2013	15	34	740,00	-	-	-	-	34	740,00	-	-	-		
		Jumlah	82	178	740,00	58	-	26	-	94	740,00	-	-	-		

Halaman 24 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	PT Jamsostek (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	10	-	8	-	-	-	-	-	2	-	-
		2012	7	15	-	13	-	1	-	-	-	1	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	25	-	21	-	1	-	-	-	3	-	-
113	PT Taspen (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	28	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	447.896,79
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	51	449.242,78	50	448.005,13	-	1.237,65	-	-	1	-	447.896,79
114	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2009	8	20	1.795,75	18	-	1	1.795,75	-	-	1	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	17	55	430,59	13	58,99	30	371,60	-	-	12	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	25	75	2.226,34	31	58,99	31	2.167,35	-	-	13	-	-
115	PT Jasaraharja (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	17	37	-	34	-	3	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	25	45.513,85	-	-	-	-	25	45.513,85	-	-	-
		Jumlah	29	62	45.513,85	34	-	3	-	25	45.513,85	-	-	-
116	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	12	22	-	18	-	4	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	12	22	-	18	-	4	-	-	-	-	-	-

Halaman 25 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah												
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Jml	7	Jml	8		Jml	9	Jml	10	Jml	11	Jml	12	Jml	13	Jml	14
117	PT Jasindo (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT ASABRI (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	18	49	379.191,42	39	54.334,58	10	324.856,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	18	49	379.191,42	39	54.334,58	10	324.856,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 26 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	PT Bahana PUJ (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT Danareksa (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Perum Pegadaian (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	22	58	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-
		Jumlah	44	82	-	24	-	-	-	58	-	-	-	-
125	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	12	2.845,14	12	2.845,14	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	12	2.845,14	12	2.845,14	-	-	-	-	-	-	-
126	PT PANIN Multi Finance (Persero)	2009	16	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
		2010	-	-	USD 429.924,69	-	USD 429.924,69	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	16	21	122.547,73	20	122.547,73	-	-	-	-	1	-	86.196,29
					USD 429.924,69		USD 429.924,69							

Halaman 27 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
127	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	5	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	5	9	-	3	-	6	-	-	-	-	-	-	-	
127	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	10	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	10	10	9.879,50	9	6.337,00	1	3.542,50	-	-	-	-	-	-	
129	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
131	PT Sarana Multiinfrastruktur Finansial (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 28 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
132	Perum Bulog	2009	48	77	204.543,90	63	186.903,85	13	17.640,05	-	-	-	-	-	-	-	186.903,85
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	5	12	-	4	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	47	8.275,22	40	558,74	7	7.716	-	-	-	-	-	-	-	558,74
		2013	12	40	707.674,23	4	-	33	11,66	-	-	-	-	-	-	-	-
					USD 2,896.97				USD 2,896.97								
		Jumlah	79	176	920.493,35	111	187.462,59	61	25.368,19	3	707.662,57	1					187.462,59
					USD 2,896.97				USD 2,896.97								
133	PT Survey Udara Pemas (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	18	61	21.895,89	-	-	-	-	61	21.895,89	-	-	-	-	-	-
					SGD 346.08						SGD 346.08						
		Jumlah	18	61	21.895,89	-	-	-	-	61	21.895,89	-	-	-	-	-	-
					SGD 346.08						SGD 346.08						
135	PT Pos Indonesia (Persero)	2009	14	43	-	41	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	22	49	-	20	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	30	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	66	182	-	61	-	31	-	90	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 29 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
136	PT Sarinah (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	10	15	4.933,50	5	796,82	9	1.403,98	1	2.455,81	-	-	-	276,89	568,28	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	1	12	4.459,16	-	-	-	-	12	4.459,16	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	11	27	9.392,66	5	796,82	9	1.403,98	13	6.914,97	-	-	-	276,89	568,28	
137	PT Sucofindo (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	11	35	-	34	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	6	13	23.904,66	6	295,31	7	23.609,35	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	17	48	23.904,66	40	295,31	8	23.609,35	-	-	-	-	-	-	-	
138	PT Berdikari (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	8	21	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	8	21	-	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 30 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta I	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	14	32	17.045,51	23	-	9	17.045,51	-	-	-	-	16.197,50
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	32	17.045,51	23	-	9	17.045,51	-	-	-	-	16.197,50
144	Perum Jasa Tirta II	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 31 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145	PT PPA (Persero)	2009	7	10	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
		2010	19	16	406,22	16	4,01	3	402,21	-	-	-	-	4,01
		2011	5	6	34.040,90	3	32.336,39	3	1.704,51	-	-	-	-	172,80
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	35	34.447,12	24	32.340,40	2	-	-	-	-	-	176,81
			2.731	5.751	8.472.392,21	2.550	4.151.740,95	1.194	1.597.897,33	1.932	2.713.913,73	66	8.840,20	3.749.721,52
					USD 494.696,23		USD 474.293,01		USD 16.989,17		USD 3.274,45			USD 32.869,69
					EUR 24,20		EUR 24,20		-		-			EUR 24,20
	ANAK PERUSAHAAN													
146	PT Indonesia Power	2009	4	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	4	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-
147	PT Pembangunan Jawa Bali	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	17	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-
148	PT Pelayan Listrik Nasional Batam	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 32 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2009	2	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.017,14
					USD 886.71		USD 886.71							USD 886.71
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	2	4	1.000,00	4	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.017,14
					USD 886.71		USD 886.71							USD 886.71
150	PT Prima Layanan Nasional Enjinhiring	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT ICON+	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT PelitaAir Service	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT Tugu Pratama Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	5	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	5	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-

Halaman 33 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Dana Pensiun Pertamina	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	9	16	779,02	-	0	-	0	16	779,02	-	USD 0	USD 0
		Jumlah	9	16	779,02	-	0	-	0	16	779,02	-	USD 0	USD 0
155	PT Pelat Timah Nusantara	2009	8	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	-	-	1	-	6.870,73
					USD 20,25		USD 20,25							USD 20,25
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	8	15	6.870,73	14	6.870,73	-	-	-	-	1	-	6.870,73
					USD 20,25		USD 20,25							USD 20,25
156	Dana Pensiun Perkebunan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	PT Pupuk Sriwijaya Palembang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	31	37	-	37	-	-	-	-	-	-	-	USD 9,47
		2012	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	35	42	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 34 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	PT Pupuk Kujang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	3	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	13	19	10.816,50	18	10.816,50	1	-	-	-	-	-	6.871,75
		2012	3	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	4	13	-	5	-	5	-	3	-	-	-	-
		Jumlah	23	41	10.816,50	32	10.816,50	6	-	3	-	-	-	6.871,75
159	PT Petrokimia Gresik	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	6	USD 11.62	6	USD 11.62	-	-	-	-	-	-	USD 11.62
		2011	3	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
		2012	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	5	12	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	24	USD 11.62	32	USD 11.62	4	-	-	-	-	-	USD 11.62
160	PT Pupuk Kaltim	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	16	23	-	20	-	-	-	-	-	3	-	-
		2011	6	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	4	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		Jumlah	28	41	-	34	-	-	-	4	-	3	-	-
161	PT PIM	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	5	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	4	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	3	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
		Jumlah	13	19	-	12	-	-	-	7	-	-	-	-
162	Dapensri	2009	7	11	107.690,81	11	107.690,81	-	-	-	-	-	-	107.690,81
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	11	107.690,81	11	107.690,81	-	-	-	-	-	-	107.690,81

Halaman 35 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset - negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	PT Relayasa Industri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	9	15	744,58	10	744,58	5	-	-	-	-	-
					USD 12.61		USD 12.61						744,58
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	9	15	744,58	10	744,58	5	-	-	-	-	744,58
					USD 12.61		USD 12.61						USD 12.61
164	PT Mega Eltra	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	14	4.710,50	4	1.038,78	9	3.671,72	1	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	14	4.710,50	4	1.038,78	9	3.671,72	1	-	-	-
165	Dana Pensiun BRI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	PT BNI Cabang London	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	DP BNI	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 36 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	PT BNI Multifinance	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	PT BNI Securities	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	PT Bank Syariah Mandiri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	PT Mandiri Sekuritas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	DP Mandiri	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 37 - Lampiran 5

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BUMN (Anak Perusahaan)		173	273	132.612,14 USD 931.19	205	128.161,40 USD 931.19	33	3.671,72	31	779,02	4	-	123.195,01 USD 931.19
	Total BUMN (Induk dan Anak Perusahaan)		2.904	6.024	8.605.004,35 USD 495.627,42	2.755	4.279.902,35 USD 475.224,20	1.236	1.601.569,05 USD 16.989,17	1.963	2.714.692,75 USD 3.274,45	70	8.840,20	3.872.916,53 USD 33.808,67 EUR 24,20
	Total (Rp)		2.904	6.024	14.646.614,04	2.755	10.072.817,20	1.236	1.808.650,04	1.963	2.756.306,60	70	8.840,20	4.285.417,49

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BUMIN (INDUK DAN ANAK PERUSAHAAN) TAHUN 2005 - 2008

Halaman 1 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	BUMN (Induk Perusahaan)																		
1	PT PLN (Persero)	2005 - 2008	101	130	327.183,63	96	125.723,37	30	16.266,73	-	-	4	185.193,53	125.723,38					
			-	-	JPY 274.280,52	-	JPY 270.977,12	-	JPY 3.303,40	-	-	-	-	JPY 270.977,12					
2	PT Bukit Asam (Persero)	2005 - 2008	17	28	1.365,01	27	1.365,01	-	-	-	-	1	-	1.365,01					
3	PT Aneka Tambang (Persero), Tbk.	2005 - 2008	11	18	16.940,23	18	16.940,23	-	-	-	-	-	-	16.378,81					
4	PT Sarana Karya (Persero)	2005 - 2008	7	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	PT Timah (Persero), Tbk.	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	PT Energi Manajemen Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk.	2005 - 2008	11	18	13.990,41	14	13.990,41	4	-	-	-	-	-	13.824					
			-	-	USD 13.365,34	-	USD 13.365,34	-	-	-	-	-	-	USD 13.365,34					
8	PT Pertamina (Persero)	2005 - 2008	300	317	-	317	-	-	-	-	-	-	-	-					
9	PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2008	17	31	2.358,82	25	2.358,82	3	-	-	-	3	-	-					
			-	-	USD 557,73	-	USD 557,73	-	-	-	-	-	-	USD 557,73					
10	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	2005 - 2008	14	22	-	8	-	11	-	2	-	1	-	-					
11	PT Angkasa Pura I (Persero)	2005 - 2008	8	10	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-					
12	PT Angkasa Pura II (Persero)	2005 - 2008	6	14	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-					
13	Perum Navigasi	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Halaman 2 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut				Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
14	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2005 - 2008	28	51	477,61	27	128,76	14	348,85	7		3		128,76								
15	Perum Damri	2005 - 2008	19	28	43,64	15	43,64	9		3		1		43,64								
15	Perum PPD	2005 - 2008	13	26	8.835,14	5	2.320,50	8	756,90	6	5.028,13	7	729,61	2.320,50								
16	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2005 - 2008	8	12	8.555,32	8	8.555,32					4		8.555,32								
17	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	2005 - 2008	6	10	65,08	10	65,08							65,08								
18	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	2005 - 2008	6	10	263,06	5	263,06	5						263,06								
19	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	2005 - 2008	12	17	11.649,86	9	38,43	6	11.597,74	1		1	13,69	38,43								
20	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	2005 - 2008	9	17		5		1		11												
21	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	2005 - 2008	7	7	1.516,82	7	1.516,82							1.516,82								
22	PT Djakarta Lloyd (Persero)	2005 - 2008	14	22	1.950,14					22	1.950,14											
23	PT Pengerukan Indonesia (Persero)	2005 - 2008																				
24	PT Bina Karya (Persero)	2005 - 2008																				
25	PT Indah Karya (Persero)	2005 - 2008																				
26	PT Yodya Karya (Persero)	2005 - 2008																				
27	PT Indra Karya (Persero)	2005 - 2008																				
28	PT Virama Karya (Persero)	2005 - 2008																				

Halaman 3 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
29	PT Amarta Karya (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	PT Adhi Karya (Persero), Tbk.	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	PT Istaka Karya (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.	2005 - 2008	13	25	330.883,30	22	330.883,30	-	-	3	-	-	-	-	-	330.883,30	
33	PT Niindya Karya (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	PT Hutama Karya (Persero)	2005 - 2008	21	27	256.538,26	22	249.741,77	4	6.796,49	1	-	-	-	-	-	249.741,77	
			-	-	USD 940,00	-	USD 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 940,00	
			-	-	SGD 106,30	-	SGD 106,30	-	-	-	-	-	-	-	-	SGD 106,30	
35	PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Perum Perumnas	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	PT Brantas Abipraya (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	PT Waskita Karya (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	PT Jasa Marga (Persero), Tbk.	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2008	11	11	17.999,90	9	17.999,90	-	-	-	-	-	-	-	-	17.999,90	
			-	-	USD 130,280,88	-	USD 20,13	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 130,260,75	
41	Perum LKBN Antara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Perum Produksi Film Negara	2005 - 2008	15	17	2.475,97	-	-	-	-	17	2.475,99	-	-	-	-	-	

Halaman 4 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
43	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	2005 - 2008	9	9	41.892,21	8	1.796,79	1	40.095,42	-	-	-	-	-	1.796,79			USD 86,73
			-	-	USD 86,73	-	USD 86,73	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2005 - 2008	9	13	1.739,01	8	1.739,01	5	-	-	-	-	-	-	1.739,01			
46	PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47	PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	PT Hotel Indonesia Natour	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
49	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
50	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
51	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
52	PT PAL Indonesia (Persero)	2005 - 2008	34	49	73.202,62	48	72.119,73	1	1.082,89	-	-	-	-	-	72.119,73			
			-	-	USD 1,365,58	-	USD 1,365,58	-	-	-	-	-	-	-	USD 1,365,58			
53	PT Pindad (Persero)	2005 - 2008	10	17	42.036,33	13	36.327,88	3	5.708,45	-	-	-	-	-	36.327,88			
54	PT Dahana (Persero)	2005 - 2008	46	82	77,27	64	77,27	15	-	3	-	-	-	-	77,27			
			-	-	USD 309,80	-	-	-	USD 309,80	-	-	-	-	-	-			
55	PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.	2005 - 2008	33	38	4.724,12	35	724,12	3	4.000,00	-	-	-	-	-	724,12			

Halaman 5 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	PT Industri Kereta Api (Persero)	2005 - 2008	13	17	418,12	14	418,12	3	-	-	-	-	-	418,12
57	PT Barata Indonesia (Persero)	2005 - 2008	11	22	7.491,68	21	7.491,68	-	-	-	-	1	-	9.589,54
58	PT Boma Bisma Indra (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2005 - 2008	10	17	4.695,00	16	4.695,00	-	-	-	-	1	-	4.376,85
60	PT LEN Industri (Persero)	2005 - 2008	8	13	35,26	13	35,26	-	-	-	-	-	-	35,26
61	PT Batan Teknologi (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT Bio Farma (Persero)	2005 - 2008	9	15	253,28	15	253,28	-	-	-	-	-	-	253,28
63	PT Kimia Farma (Persero), Tbk.	2005 - 2008	17	40	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT Indo Farma (Persero), Tbk.	2005 - 2008	18	25	3.591,61	17	1.117,34	5	2.474,27	1	-	2	-	1.117,34
65	PT Semen Gresik (Persero), Tbk.	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT Semen Baturaja (Persero)	2005 - 2008	9	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	6.356,07
67	PT Semen Kumpang (Persero)	2005 - 2008	9	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
68	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	2005 - 2008	16	21	25.398,73	17	25.398,73	3	-	-	-	1	-	2.313,92
69	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	2005 - 2008	19	30	6.023,14	22	12,48	6	354,31	2	5.656,35	-	-	12,48
70	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	2005 - 2008	13	31	11.065,54	26	11.065,54	2	-	-	-	3	-	11.065,54
			-	-	USD 58.17	-	USD 58.17	-	-	-	-	-	-	USD 58.17
72	PT Cambrics Primiissima (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT Industri Gelas (Persero)	2005 - 2008	11	24	15.506,34	21	13.983,06	1	11.65,72	-	-	2	1.407,56	13.983,06
74	PT Garam (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT Perkebunan Nusantara I (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT Perkebunan Nusantara II (Persero)	2005 - 2008	13	19	115.364,52	18	88.338,07	1	27.026,45	-	-	-	-	88.338,07
77	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	2005 - 2008	5	6	67,58	5	67,58	1	-	-	-	-	-	67,58
78	PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	2005 - 2008	8	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	USD 72.84	-	USD 72.84	-	-	-	-	-	-	USD 72.84
79	PT Perkebunan Nusantara V (Persero)	2005 - 2008	6	14	7.992,38	14	7.992,38	-	-	-	-	-	-	7.992,38
80	PT Perkebunan Nusantara VI (Persero)	2005 - 2008	8	13	908,85	9	908,44	-	-	-	-	4	0,41	206,31
81	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	2005 - 2008	9	16	1.327,00	15	1.289,74	-	-	-	-	1	37,26	1.354,86
83	PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)	2005 - 2008	11	18	4.018,34	13	2.292,90	2	1.412,85	-	-	3	312,59	2.320,53
			-	-	USD 131,22	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 131,22
84	PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	2005 - 2008	10	15	3.867,34	11	118,25	3	3.749,09	1	-	-	-	-

Halaman 7 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
86	PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)	2005 - 2008	8	15	272,45	14	127,20	-	-	-	-	1	145,25	127,20	-	-	-	
90	Perum Perhutani	2005 - 2008	16	32	13.789,63	22	10.008,52	9	3.781,11	-	-	1	-	10.008,52	-	-	10.008,52	
			-	-	USD 661,29	-	USD 661,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 661,29	
91	PT Inhutani I (Persero)	2005 - 2008	6	9	44.024,86	3	31.899,91	2	-	4	12.124,95	-	-	31.899,91	-	-	31.899,91	
			-	-	USD 1,913,05	-	USD 1,913,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD 1,913,05	
92	PT Inhutani II (Persero)	2005 - 2008	10	12	3.820,26	9	114,21	3	3.706,05	-	-	-	-	178,66	-	-	178,66	
			-	-	USD 1,217,66	-	USD 852,89	-	USD 364,77	-	-	-	-	-	-	-	USD 852,89	
93	PT Inhutani III (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	PT Inhutani IV (Persero)	2005 - 2008	6	8	3.180,73	4	-	3	3.180,73	1	-	-	-	800,26	-	-	800,26	
			-	-	USD 401,52	-	-	-	USD 401,52	-	-	-	-	USD 254,46	-	-	USD 254,46	
95	PT Inhutani V (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	PT Sang Hyang Seri (Persero)	2005 - 2008	12	16	527,62	5	527,63	2	-	9	-	-	-	527,63	-	-	527,63	
97	PT Pertani (Persero)	2005 - 2008	9	18	1.531,07	18	1.531,07	-	-	-	-	-	-	1.531,07	-	-	1.531,07	
98	PT Perikanan Nusantara (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	Perum Prasarana Perikanan Samudra	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	2005 - 2008	25	55	919.994,82	39	18.836,52	7	901.158,30	-	-	9	-	12.309,04	-	-	12.309,04	
			-	-	USD 175,07	-	USD 175,07	-	-	-	-	-	-	USD 175,07	-	-	USD 175,07	

Halaman 8 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
101	PT Pupuk Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT Kertas Lincee (Persero)	2005 - 2008	13	14	16.831,83	11	12.590,40	3	4.241,43	-	-	-	-	-	12.590,40
104	Perum PNRI	2005 - 2008	12	16	697,01	5	397,01	5	300,00	6	-	-	-	-	397,01
105	Perum Peruri	2005 - 2008	37	50	8.244,31	49	7.167,55	1	1.076,76	-	-	-	-	-	6.045,09
106	PT Balai Pustaka (Persero)	2005 - 2008	8	13	91.070,16	2	18.114,91	4	24.361,95	7	48.593,30	-	-	-	18.114,91
107	PT Pradhyia Paramitha (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2008	107	189	2.034.799,92	178	2.034.799,92	11	-	-	-	-	-	-	2.034.799,92
			-	-	USD 28,513,79	-	USD 24,513,79	-	USD 4,000,00	-	-	-	-	-	USD 24,513,79
109	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.	2005 - 2008	63	173	-	159	-	10	-	-	-	4	-	-	-
110	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	2005 - 2008	30	76	371.855,48	72	371.855,48	4	-	-	-	-	-	-	562.885,48
			-	-	USD 13,125,00	-	USD 13,125,00	2	-	-	-	-	-	-	USD 13,125,00
111	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	2005 - 2008	62	120	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT Jamsostek (Persero)	2005 - 2008	70	141	57.665,31	141	57.665,32	-	-	-	-	-	-	-	57.665,32
113	PT Taspen (Persero)	2005 - 2008	60	135	20.371,26	134	20.371,26	-	-	-	-	1	-	-	20.371,26
114	PT Asuransi Kesehatan (Persero)	2005 - 2008	15	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT Jasaraharja (Persero)	2005 - 2008	13	15	7.457,68	15	7.457,68	-	-	-	-	-	-	-	4.154,22

Halaman 9 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
116	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2005 - 2008	54	88	115.539,38	82	114.940,51	2	330,54	-	-	4	268,35	25.046,49			
			-	-	USD 6.19	-	-	-	USD 6.19	-	-	-	-	-			
117	PT Jasindo (Persero)	2005 - 2008	23	32	22.496,55	32	22.496,55	-	-	-	-	-	-	17.408,47			
118	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	2005 - 2008	18	26	319.913,06	23	311.552,48	-	8.360,58	-	-	3	-	311.552,48			
119	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	2005 - 2008	8	9	9.541,22	9	9.541,22	-	-	-	-	-	-	5.920,92			
			-	-	USD 337,50	-	USD 337,50	-	-	-	-	-	-	USD 342,64			
120	PT ASABRI (Persero)	2005 - 2008	7	7	28,23	7	28,23	-	-	-	-	-	-	28,23			
121	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
122	PT Bahana PUI (Persero)	2005 - 2008	17	18	281.880,25	18	281.880,25	-	-	-	-	-	-	12.782,57			
			-	-	USD 58,588.39	-	USD 58,588.39	-	-	-	-	-	-	USD 400,00			
123	PT Danareksa (Persero)	2005 - 2008	4	5	-	3	-	2	-	-	-	-	-	238.590,20			
			-	-	USD 51,605.93	-	USD 23,493.68	-	USD 28,112.25	-	-	-	-	-			
124	Perum Pegadaian (Persero)	2005 - 2008	5	5	54.579,16	5	54.579,16	-	-	-	-	-	-	5.096,51			
125	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2005 - 2008	21	47	61.048,74	42	52.492,92	-	-	-	-	5	8.555,82	78.760,06			
126	PT PANN Multi Finance (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
127	Perum Jaminan Kredit Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
128	PT Klining Berjangka Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
129	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Halaman 10 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
130	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT Sarana Multigraya Finansial (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Perum Bulog	2005 - 2008	90	129	986.051,11	106	888.349,52	21	97.701,61	-	-	2	-	484.427,16	-	-	-
133	PT Survey Udara Penas (Persero)	2005 - 2008	-	-	USD 15,452.72	-	USD 15,452.72	-	-	-	-	-	-	USD 14,722.72	-	-	-
134	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT Pos Indonesia (Persero)	2005 - 2008	4	6	3.031,25	6	3.031,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT Sarinah (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	PT Sucofindo (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT Berdikari (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2005 - 2008	17	15	154.916,53	7	505,00	8	154.411,53	-	-	-	-	505,00	-	-	-
140	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2005 - 2008	-	-	USD 12,704.20	-	-	-	USD 12,704.20	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT Bhandha Ghara Relksa (Persero)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Perum Jasa Tirta I	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	Perum Jasa Tirta II	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 11 - Lampiran 6

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
145	PT PPA (Persero)	2005 - 2008	9	-	1.570,56	6	1.570,56	1	-	-	-	2	-	1.570,56		
			-	-	USD 25,000.00	-	-	-	USD 25,000.00	-	-	-	-	-		
	Total BUMIN Induk	2005 - 2008	1.907	3.004	6.981.518,99	2.544	5.384.629,31	259	1.324.396,75	123	75.828,86	78	196.664,07	4.987.528,26		
			-	-	USD 317,146.32	-	USD 118,403.49	-	USD 67,786.48	-	USD 6.65	-	USD 130,949.70	USD 59,744.74		
			-	-	JPY 274,280.52	-	JPY 270,977.12	-	JPY 3,303.40	-	-	-	-	JPY 270,977.12		
			-	-	SGD 106.30	-	SGD 106.30	-	-	-	-	-	-	SGD 106.30		
	ANAK PERUSAHAAN															
146	PT Indonesia Power	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
147	PT Pembangunan Jawa Bali	2005 - 2008	12	17	12.223,41	17	12.223,41	-	-	-	-	-	-	12.223,41		
			-	-	USD 243.60	-	USD 243.60	-	-	-	-	-	-	USD 243.60		
148	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	2005 - 2008	12	13	63.189,38	10	60.169,10	2	3.020,28	-	-	1	-	60.169,10		
149	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	2005 - 2008	6	12	1.291,93	12	1.291,93	-	-	-	-	-	-	1.291,93		
150	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	2005 - 2008	7	15	1.075,99	12	-	2	1.075,99	-	-	1	-	-		
151	PT ICON+	2005 - 2008	9	16	224,32	16	224,32	-	-	-	-	-	-	224,32		
152	PT PelitaAir Service	2005 - 2008	24	57	12.075,19	52	35,43	5	12.039,76	-	-	-	-	35,43		
			-	-	USD 1,548.78	-	USD 1,548.78	-	-	-	-	-	-	USD 1,548.78		
153	PT Tugu Pratama Indonesia	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
154	Dana Pensiun Pertamina	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
155	PT Pelat Timah Nusantara	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 12 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
156	Dana Pensiun Perkebunan	2005 - 2008	7	7	3.423,51	-	-	-	-	7	3.423,51	-	-	-				
			-	-	USD 2,064,98	-	-	-	-	-	USD 2,064,98	-	-	-				
157	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	2005 - 2008	6	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-				
158	PT Pupuk Kujang	2005 - 2008	9	12	392,25	10	42,00	2	350,25	-	-	-	-	-			42,00	
			-	-	USD 1,099,83	-	USD 1,099,83	-	-	-	-	-	-	-			USD 1,099,83	
159	PT Petrokimia Gresik	2005 - 2008	12	13	2.500,76	13	2.500,76	-	-	-	-	-	-	-			1.486,58	
			-	-	USD 1,520,20	-	USD 1,291,17	-	-	-	-	-	-	-			USD 1,291,17	
160	PT Pupuk Kaltim	2005 - 2008	7	7	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-			-	
161	PT PIM	2005 - 2008	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
162	Dapensri	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
163	PT ReKayasa Industri	2005 - 2008	9	9	544,92	9	544,92	-	-	-	-	-	-	-			544,92	
			-	-	USD 9,32	-	USD 9,32	-	-	-	-	-	-	-			USD 9,32	
			-	-	MYR 525,00	-	MYR 525,00	-	-	-	-	-	-	-			MYR 525,00	
164	PT Mega Eltra	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
165	Dana Pensiun BRI	2005 - 2008	10	14	470,46	13	470,46	1	-	-	-	-	-	-			470,46	
166	PT BNI Cabang London	2005 - 2008	20	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-			-	
167	DP BNI	2005 - 2008	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
168	PT BNI Multifinance	2005 - 2008	12	23	80,00	23	80,00	-	-	-	-	-	-	-			39,09	
169	PT BNI Securities	2005 - 2008	12	18	18.458,10	15	18.085,54	3	372,56	-	-	-	-	-			18.085,54	
170	PT Bank Syariah Mandiri	2005 - 2008	33	99	46.914,60	98	46.914,60	1	-	-	-	-	-	-			46.914,6	

Halaman 13 - Lampiran 6

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut				Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/ penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Jml
			Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	PT Mandiri Sekuritas	2005 - 2008	12	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-
172	DP Mandiri	2005 - 2008	10	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-
173	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	2005 - 2008	9	16	539,92	4	539,92	6	-	1	-	5	-
	Total BUMIN (Anak Perusahaan)	2005 - 2008	250	398	163.404,74	359	143.122,39	23	16.858,84	8	3.423,51	8	-
			-	-	USD 6,486,71	-	USD 4,192,70	-	-	-	USD 2,064,98	-	USD 4,212,97
			-	-	MYR 525,00	-	MYR 525,00	-	-	-	-	-	MYR 525,00
	Total BUMIN (Induk dan Anak Perusahaan)	2005 - 2008	2.157	3.402	7.144.923,73	2.903	5.527.751,70	282	1.341.255,59	131	79.252,37	86	196.664,07
			-	-	USD 323,633,03	-	USD 122,596,19	-	USD 67,786,48	-	USD 2,071,63	-	USD 131,178,73
			-	-	MYR 525,00	-	MYR 525,00	-	-	-	-	-	MYR 525,00
			-	-	JPY 274,280,52	-	JPY 3,303,40	-	-	-	-	-	JPY 270,977,12
			-	-	SGD 106,30	-	SGD 106,30	-	-	-	-	-	SGD 106,30
	Total (Rp)		2.157	3.402	11.124.519,53	2.903	7.056.525,73	282	2.167.888,74	131	104.503,46	86	1.795.601,60
													5.943.625,62

Keterangan
Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013

Halaman 2 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
			Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Chevron Pacific Indonesia & ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd.	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	6	8	USD 13,025.52	6	USD 7,625.52	2	USD 5,400.00	-	-	-	-	-
		2012	8	11	USD 538.26	9	USD 538.26	2	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	14	19	USD 13,563.78	15	USD 8,163.78	4	USD 5,400.00	-	-	-	-	-
7	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	12	USD 1,211.84	6	USD 612.64	6	USD 599.20	-	-	-	-	-
		2012	11	11	USD 38,152.55	6	USD 21,892.57	5	USD 16,259.98	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	21	23	USD 39,364.39	12	USD 22,505.21	11	USD 16,859.18	-	-	-	-	-
8	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 7

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
									Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
9	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Kalila (Korinci Baru) WK Korinci	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2009	10	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	14	15	USD 14,222.19	-	-	-	-	15	USD 14,222.19	-	-	-	-		
		Jumlah	24	21	USD 14,222.19	6	-	-	-	15	USD 14,222.19	-	-	-	-		
13	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 4 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
									Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
14	Pearl Oil WK Tunggal	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	4	4	USD 881.53	4	USD 881.53	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	3	5	USD 744.01	2	USD 78.00	-	-	3	USD 666.01	-	-	-			
		Jumlah	7	9	USD 1,625.54	6	USD 959.53	-	-	3	USD 666.01	-	-	-			
16	Petroelat Ltd. WK Selat Panjang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
17	Premier Oil WK Natuna Sea A	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	8	10	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	8	10	USD 2,650.25	10	USD 2,650.25	-	-	-	-	-	-	-			
18	Star Energy Ltd. WK Kakap	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	9	14	USD 2,309.65	9	USD 447.65	2	-	3	USD 1,862.00	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	14	15	USD 2,920.61	4	USD 73.13	-	-	11	USD 2,847.48	-	-	-			
		Jumlah	23	29	USD 5,230.26	13	USD 520.78	2	-	14	USD 4,709.48	-	-	-			

Halaman 5 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
			Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Job (PSC) Costa Igi WK Gebang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	JOA (PSC) ConocoPhillips WK South Jambi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 7

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
							Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	8	9	6.325,76	1		5	6.324,01	3	1,75				
		2013	-	-	USD 1,074.33	-	USD 24.94	-	USD 910.02	-	USD 139.37	-			
		Jumlah	8	9	6.325,76	1	USD 24.94	5	6.324,01	3	1,75				
					USD 1,074.33		USD 24.94		USD 910.02		USD 139.37				
25	Camar Resource Canada WK Bawean	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	CINOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2009	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	7	7	288,19	6	288,19	1		-		-			
		2012	-	-	USD 985.66	-	USD 403.98	-	USD 581.68	-		-			
		2013	10	16		2		5		9					
		Jumlah	22	28	USD 15,693.55	13	288,19	6	USD 1.568.61	9	USD 14,124.94				
					USD 16,679.21		USD 403.98		USD 2,150.29		USD 14,124.94				
27	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Halaman 7 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Kangean Energy/Indonesia WK Kangean	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	16	22	USD 25,012.18	-	-	-	-	22	USD 25,012.18	-	-	-
		Jumlah	16	22	USD 25,012.18	-	-	-	-	22	USD 25,012.18	-	-	-
30	Lapindo Brantas inc. WK Brantas	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2009	7	7	USD 150.17	6	USD 150.17	1	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	6	8	USD 518.20	4	USD 125.47	4	USD 392.73	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	13	15	USD 668.37	10	USD 275.64	5	USD 392.73	-	-	-	-	-

Halaman 8 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml		Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
33	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
34	Petrochina Ltd. WK Bangko	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
36	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
37	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 9 - Lampiran 7

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
			Jml	4	Jml	5	Jml	6	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
									Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
38	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
39	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
40	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	6	10	USD 7,455.80	6	USD 6,696.66	4	USD 759.14	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	6	10	USD 7,455.80	6	USD 6,696.66	4	USD 759.14	-	-	-	-	-			
42	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Halaman 10 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml		Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
43	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	8	8	USD 36.10	-	-	4	USD 26.19	4	USD 9.91	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	8	8	USD 36.10	-	-	4	USD 26.19	4	USD 9.91	-	-	-		
44	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	6	8	USD 8,053.11	8	USD 8,053.11	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	6	8	USD 8,053.11	8	USD 8,053.11	-	-	-	-	-	-	-		
47	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	14	16	USD 29,747.09	1	USD 275.55	4	USD 28,252.84	11	USD 1,218.70	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	14	16	USD 29,747.09	1	USD 275.55	4	USD 28,252.84	11	USD 1,218.70	-	-	-		

Halaman 11 - Lampiran 7

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah				
				Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Seleraya - Merangin Dua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	10	411,94	10	411,94	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	USD 4,878.50	-	USD 4,878.50	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	10	10	411,94	10	411,94	-	-	-	-	-	-	-
					USD 4,878.50		USD 4,878.50							
50	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Chitic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	7	8	USD 363.94	2	USD 16.40	1	USD 307.11	5	USD 40.43	-	-	-
		Jumlah	7	8	USD 363.94	2	USD 16.40	1	USD 307.11	5	USD 40.43	-	-	-

Halaman 12 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut												Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum Ditindaklanjuti				Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	6	Jml	Nilai	8	Jml	Nilai	10	Jml	Nilai	11		Nilai	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
52	Energy Equity WK Sengkang	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
53	Inpex WK East Kalimantan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 13 - Lampiran 7

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
			Temuan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2009	13	13	32.323,38	12	29.575,15	1	2.748,23	-	-	-	-	-
					USD 4.411,37		USD 4.411,37							
					SGD 5.30		SGD 5.30							
					EUR 11.88		EUR 11.88							
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	11	12	USD 1,279,46	10	USD 1,161,00	1	-	1	USD 118,46	-	-	-
		2012	7	9	USD 12,367,60	5	USD 5,374,14	3	USD 6,967,86	1	USD 25,60	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	34	32.323,38	27	29.575,15	5	2.748,23	2	USD 144,06	-	-	-
					USD 18,058,43		USD 10,946,51		USD 6,967,86					
					SGD 5.30		SGD 5.30							
					EUR 11.88		EUR 11.88							
58	VICO WK Sanga-sanga	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	10	10	USD 638,29	10	USD 638,29	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	12	14	USD 5,553,66	2	USD 2,754,46	-	-	12	USD 2,799,20	-	-	-
		Jumlah	22	24	USD 6,191,95	12	USD 3,392,75	-	-	12	USD 2,799,20	-	-	-
59	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Toili, Sulawesi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Toili, Sulawesi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 14 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah					
			Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	7	12	USD 1,826.64	11	USD 1,826.64	-	-	1	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	7	12	USD 1,826.64	11	USD 1,826.64	-	-	1	-	-	-	-
62	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT Pertamina EP	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	10	12	USD 61,848.51	12	USD 61,848.51	-	-	-	-	-	-	-
		2011	8	10	USD 6,640.59	10	USD 6,640.59	-	-	-	-	-	-	-
		2012	10	11	USD 2,992.03	9	USD 2,992.03	2	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	28	33	USD 71,481.13	31	USD 71,481.13	2	-	-	-	-	-	-

Halaman 15 - Lampiran 7

No.	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
66	Benuo Taka Wk Waliawi Block	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Tanggung - BP Berau	2009	5	9	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	9	14	USD 23,019.52	1	USD 619.03	-	-	13	USD 22,400.49	-	-	-	-
		Jumlah	14	23	USD 23,019.52	3	USD 619.03	7	-	13	USD 22,400.49	-	-	-	-
68	BP Muturi	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	BP Wiriagar	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			324	387	39,362,03	209	30,288,04	64	9,072,24	114	1,75	-	-	-	-
					USD 292,943.72		USD 145,261.21		USD 62,195.55		USD 85,486.96				
					SGD 5.30		SGD 5.30		-		-				
					EUR 11.88		EUR 11.88		-		-				

Halaman 16 - Lampiran 7

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Jml		Nilai		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
LEMBAGA																
70	Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	16	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	16	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-		
	Total Lembaga		16	35	-	27	-	8	-	-	-	-	-	-		
SAHAM PEMERINTAH 50 %																
71	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
72	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2012	3	4	2.514,51	1	1.634,73	3	879,78	-	-	-	-	1.634,73		
		2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah	3	4	2.514,51	1	1.634,73	3	879,78	-	-	-	-	1.634,73		
	Total Saham Pemerintah 50%		3	4	2.514,51	1	1.634,73	3	879,78	-	-	-	-	1.634,73		

Halaman 1 - Lampiran 8

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BHMN, KKKs, LEMBAGA, SAHAM PEMERINTAH 50%, PENYERTAAN BUMI DAN OTORITA TAHUN 2005 - 2008

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jml
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SKK Migas													
	1. SKK Migas	2005 - 2008	24	35	-	19	-	12	-	4	-	-	-	-
	Total BHMN	2005 - 2008	24	35	-	19	-	12	-	4	-	-	-	-
	KKKs													
2	BOB PT BSP - Pertamina Hulu	2005 - 2008	4	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
			-	-	USD 972.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja (WK) MFK - PSC	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chevron Pacific Indonesia & Conoco Phillips Indonesia Grissik Ltd.	2005 - 2008	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	Chevron Pacific Indonesia WK Siak - PSC	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chevron Pacific Indonesia WK Rokan - PSC	2005 - 2008	22	31	USD 2,828.70	24	USD 2,828.70	7	-	-	-	-	-	-
7	ConocoPhillips Indonesia Ltd. WK South Natuna Sea B	2005 - 2008	11	18	USD 291,894.68	18	USD 291,894.68	-	-	-	-	-	-	-
8	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Bee	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK NSO	2005 - 2008	14	17	USD 4,088.42	14	USD 4,088.42	3	-	-	-	-	-	-
10	ExxonMobile Oil Inc. Ltd. WK Pase	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 2 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Kallia (Korinci Baru) WK Korinci	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kondur Petroleum WK Malacca Strait	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Medco E&P Malaca WK Area "A" North Sumatera	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Pearl Oil WK Tungkal	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Petrochina International Ltd. WK Jabung	2005 - 2008	17	21	USD 31,273.86	21	USD 31,273.86	-	-	-	-	-	-	-
16	Petroselat Ltd. WK Selat Panjang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Premier Oil WK Natuna Sea A	2005 - 2008	13	23	USD 16,152.60	19	USD 5,506.54	4	USD 10,646.06	-	-	-	-	-
18	Star Energy Ltd. WK Kakap	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Job (PSC) Costa Igl WK Gebang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PHE Costa - Job P Costa International WK Gebang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	JOA (PSC) ConocoPhillips WK south Jambi	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PHE South Jambi - Job P ConocoPhillips WK South Jambi	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT SPR Langgak - Langgak Riau	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 3 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	2005 - 2008	17	21	-	18	-	3	-	-	-	-	-	-
25	Camar Resource Canada WK Bawean	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	CNOOC SES Ltd. WK South East Sumatera	2005 - 2008	10	13	14.496,83	13	14.496,83	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	USD 3.559.33	-	USD 3.559.33	-	-	-	-	-	-	-
27	ConocoPhillips Indonesia Grissik Ltd. WK Corridor PSC	2005 - 2008	11	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Kangean Energy Indonesia WK Kangean	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	HESS Pangkah Ltd. WK Pangkah	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Lapindo Brantas Inc. WK Brantas	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Medco E&P Indonesia WK Lematang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Medco E&P Indonesia WK Barisan Rimau	2005 - 2008	9	9	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-
33	Medco E&P Indonesia WK South&Central Sumatera	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Petrochina Ltd. WK Bangko	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Santos PTY. Ltd. WK Madura	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Santos PTY. Ltd. WK Sampang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 4 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti				
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
37	JOB (PSC) HESS WK Jambi Merang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
38	PHE Jambi Merang - JOB P HESS WK Jambi Merang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
39	JOB (PSC) Golden Spike WK Raja Pendopo	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	PHE Raja Tempirai - JOB P GSIL WK Raja Block	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
41	JOB (PSC) Petrochina East Java WK Tuban	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
42	PHE Tuban East Java - JOB P PEJ WK Tuban	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
43	JOB (PSC) Talisman - Ogan Komering WK Ogan Komering	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	PHE Ogan Komering - JOB P TOKL WK Ogan Komering	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45	JOA (PSC) Kodeco WK West Madura	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	PHE W Kodeco - JOA P W Madura WK West Madura	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Mobil Cepu Ltd. WK Cepu Block	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
48	Seleraya - Merangin Dua	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 5 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu vaas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Chevron Ind. WK East Kalimantan	2005 - 2008	18	36	651,22	32	651,22	4	-	-	-	-	-
			-	-	USD 43,98	-	USD 43,98	-	-	-	-	-	-
50	Chevron Ind. WK Makassar Strait	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Citic Seram Energy Ltd. WK Seram Non Bula	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Energy Equity WK Sengiang	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Impex WK East Kalimantan	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kalrez Petroleum WK Bula Seram	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Medco E&P Indonesia WK Tarakan	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Petrochina International (Bermuda) Ltd. WK Salawati Basin, Papua	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Total E&P Indonesia WK Mahakam	2005 - 2008	15	19	1.441,95	18	1.441,95	1	-	-	-	-	-
			-	-	USD 383,48	-	USD 383,48	-	-	-	-	-	-
58	VICO WK Sanga-sanga	2005 - 2008	10	19	USD 300,80	19	USD 300,80	-	-	-	-	-	-
59	JOB (PSC) Medco E&P Tomori WK Senoro Tolli, Sulawesi	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PHE Medco Tomori - JOB P Medco WK Senoro Tolli, Sulawesi	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	JOB (PSC) Petrochina Salawati WK Kepala Burung, Papua	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Halaman 6 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

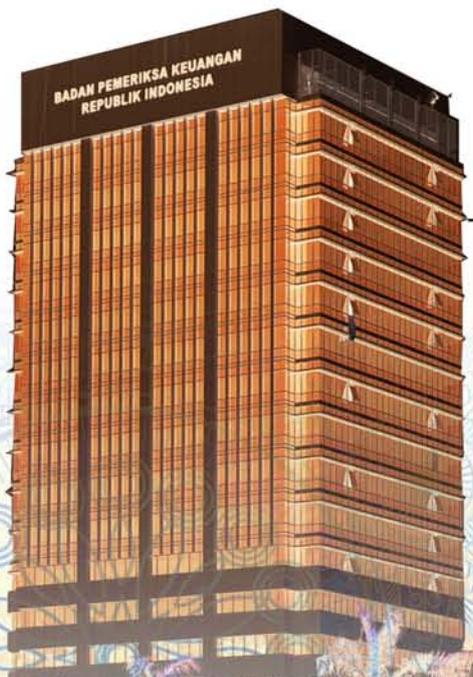
No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi						Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
				Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Nilai	Jml	Nilai	Jml	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
62	PHE Salawati - JOB P PS WK Kepala Burung, Papua	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63	JOB (PSC) Total - Tengah WK Tengah	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
64	PHE Tengah K - JOB P Tengah	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
65	PT Pertamina EP	2005 - 2008	7	8	USD 1,325,966.29	8	USD 1,325,966.29	-	-	-	-	-	-	-		
66	Benuo Taka WK Wailawi Block	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
67	Tangguh - BP Berau	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
68	BP Muturi	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
69	BP Wiriagar	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total KKKS	2005 - 2008	179	258	16.590,00	232	16.590,00	26	-	-	-	-	-	-		
			-	-	USD 1,677,464.32	-	USD 1,666,818.26	-	USD 10,646.06	-	-	-	-	-		
	LEMBAGA															
70	Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia	2005 - 2008	15	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Lembaga	2005 - 2008	15	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SAHAM PEMERINTAH 50 %															
71	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
72	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total Saham Pemerintah 50%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Halaman 7 - Lampiran 8

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No.	Entitas	Tahun	Temuan	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan penyerahan aset negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
				Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Penyertaan BUMN	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN)	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Penyertaan BUMN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTORITA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Otorita Asahan	2005 - 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Otorita		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total BHMN, KKKS, dan Badan Usaha Lainnya	2005 - 2008	218	311	16.590,00	269	16.590,00	38	-	4	-	-	-
			-	-	USD 1,677,464.32	-	USD 1,666,818.26	-	USD 10,646.06	-	-	-	-
	Total (Rp)				20.463.202,60		20.333.437,77		129.764,83		-		-

Keterangan
 Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2013



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31
Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id